

JADWAL

Tanggal Efektif	:	3 Januari 2023
Masa Penawaran Umum	:	4 - 5 Januari 2023
Tanggal Penjatahan	:	6 Januari 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	10 Januari 2023
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	10 Januari 2023
Tanggal Pencatatan Obligasi pada Bursa Efek Indonesia	:	11 Januari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk

Bidang Usaha:
Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Investasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
MNC Financial Center, Lantai 21
Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870
Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com
Website : www.mncfinancialservices.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp450.000.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp346.880.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp231.280.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp60.425.000.000,- (enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi seri C yang ditawarkan sebesar Rp55.175.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp103.120.000.000,- (seratus tiga miliar seratus dua puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut Penjamin Emisi Obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 10 April 2023 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 20 Januari 2024 untuk Obligasi Seri A, 10 Januari 2026 untuk Obligasi Seri B dan 10 Januari 2028 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK ("MSIN") DENGAN NILAI SEKURANG-KURANGNYA 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI SETIAP SAAT SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI. APABILA NILAI JAMINAN KURANG DARI 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, PERSEROAN DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN *TOP UP* SEHINGGA JAMINAN TERCUKUPI MENJADI MINIMAL SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH DENGAN PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITOR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idBBB+ (*Triple B Plus*)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 4 Januari 2023

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022" kepada Otoritas Jasa keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 079/MNCKI/DIR/IX/22 pada tanggal 22 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022" dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI No. S-09628/BEI.PP2/11-2022 tanggal 11 November 2022. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Prospektus ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yaitu PT MNC Sekuritas menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sedangkan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lainnya yaitu PT Sucor Sekuritas serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG SERTA PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xiii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.....	22
III. PERNYATAAN UTANG.....	24
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	37
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	41
VI. FAKTOR RISIKO.....	55
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	63
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA.....	64
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	64
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	64
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	67
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	69
4. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	70
5. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	76
6. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI.....	87
7. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	92
8. ASURANSI.....	94
9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK.....	104
B. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	106
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	107
D. TATA KELOLA PERSEROAN.....	113
E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	126
F. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN.....	126
G. SUMBER DAYA MANUSIA.....	128
H. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK YANG MEMILIKI KONTRIBUSI 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU LEBIH DARI TOTAL ASET, TOTAL LIABILITAS, ATAU LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK DARI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	134
I. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK.....	158
J. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	165
1. KEGIATAN USAHA.....	165
2. STRATEGI PERSEROAN.....	170
3. KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	173
4. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN LISENSI.....	174
5. PENGHARGAAN.....	183
6. PROSPEK USAHA.....	184
IX. PERPAJAKAN.....	187
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	189
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	191
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	194
XIII. TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	200
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	205
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	206
XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	276

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM pasal 1 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agen Jaminan** : Berarti Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang akan ditunjuk oleh Wali Amanat dengan persetujuan Emiten pada 1 hari sebelum tanggal emisi berdasarkan perjanjian agen jaminan.
- Agen Pembayaran** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- Akta Gadai Saham** : Berarti pengalihan saham untuk tujuan penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan, Wali Amanat (untuk dan atas nama Pemegang Obligasi) sehubungan dengan penyediaan Jaminan, sebagaimana termaktub dalam Akta Gadai Saham yang akan ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Bapepam dan/atau Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK)** : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (“DJLK”), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor

pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

- BNRI : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- Bunga Obligasi : Berarti bunga Obligasi per tahun dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan yaitu sebagai berikut:
- Seri A : 10,50% (sepuluh koma lima nol persen)
 - Seri B : 11,25% (sebelas koma dua lima persen)
 - Seri C : 12,00% (dua belas koma nol nol persen)
- BEI : Berarti PT Bursa Efek Indonesia dimana Obligasi dicatatkan yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
- Daftar Pemegang Rekening : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Dokumen Emisi : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Gadai Saham, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek, Prospektus, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017.
- DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
- Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang/kewajiban, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

- Efektif** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2
- a. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi, atau,
 - b. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Emisi** : Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Entitas Anak** : Berarti perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- Force Majeure** : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Hari Bursa** : Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- Hari Kalender** : Semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *gregorius* kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- Hari Kerja** : Berarti Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- IAPI** : Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Konfirmasi Tertulis** : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSI ("KTUR")	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjataan	:	Berarti PT Sucor Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Obligasi	:	Berarti Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022.
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan	:	Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-undang OJK) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
Pemegang Obligasi	:	Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat Efek	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia "Pefindo".
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal (<i>Book Building</i>)	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi yang ditawarkan sesuai Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.

- Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Pengakuan Utang : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang No. 61 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan di kemudian hari.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Efek : Berarti PT MNC Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Obligasi kepada Perseroan, menjamin penjualan Obligasi berdasarkan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) dan berdasarkan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*), serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum pada pasar perdana kepada Perseroan, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti PT MNC Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga November dua ribu lima belas) tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2-07-2020 (dua Juli dua ribu dua puluh) tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
- Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3-12-2020 (tiga Desember dua ribu dua puluh) tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- Peraturan No.VIII.G.12 : Berarti Peraturan Bapepam No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004, tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- Peraturan No.IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

- Perjanjian : Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, dan Pengakuan Utang.
- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi No. 38 tanggal 21 September 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI : Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 di KSEI No. SP-102/OBL/KSEI/0922 tanggal 21 Septemeber 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 37 tertanggal 21 September 2022, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 11 tertanggal 2 November 2022, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 66 tertanggal 21 November 2022, dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 60 tertanggal 27 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek : Surat persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sehubungan dengan permohonan pencatatan Obligasi Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia terhadap Obligasi sebagaimana ternyata dalam Surat No. S-09628/BEI.PP2/11-2022 tanggal 11 November 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
- Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi : Berarti perjanjian perwalianamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 36 tertanggal 21 September 2022, Addendum I Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 10 tertanggal 2 November 2022, Addendum II Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 65 tertanggal 21 November 2022 dan Addendum III Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 59 tertanggal 27 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwalianamanatan : Berarti Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.

- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 35 tertanggal 21 September 2022, Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 9 tertanggal 2 November 2022, Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 64 tertanggal 21 November 2022 dan Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 58 tertanggal 27 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
- Perseroan : Berarti PT MNC Kapital Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Pokok Obligasi : Berarti seluruh jumlah pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp346.880.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:
- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp231.280.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
 - Seri B : Jumlah Pokok Obligasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp60.425.000.000,- (enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Seri C : Jumlah Pokok Obligasi seri C yang ditawarkan sebesar Rp55.175.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp103.120.000.000,- (seratus tiga miliar seratus dua puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut Penjamin Emisi Obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi masing-masing dari seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.

- Prospektus** : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM, Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017, dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
- Prospektus Awal** : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Efek, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017.
- Prospektus Ringkas** : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.
- Rekening Efek** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
- RUPS** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- RUPO** : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- RUPSLB** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Satuan Pemindahbukuan** : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Satuan Perdagangan** : Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Sertifikat Jumbo Obligasi** : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- Suara** : Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- Tanggal Emisi** : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.

- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi : Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi kepada Pemegang Obligasi yaitu tanggal 6 Januari 2023.
- Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi, yaitu tanggal 10 Januari 2023.
- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi : Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
- Utang : Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
- UUPM : Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- UUPT : Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- UUWDP : Berarti Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajb Daftar Perusahaan yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3214 tahun 1982, Tambahan No. 3214.
- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan di Jakarta pertama kali dengan nama PT Bhakti Capital Indonesia berdasarkan Akta No. 100 tanggal 15 Juli 1999, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH 09.03/III/2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097.

Susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian, sesuai dengan Akta Pendirian No. 100 tanggal 15 Juli 1999, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Saham	Nominal	%
Modal Dasar	40.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Bhakti Investama Tbk	9.999.000	9.999.000.000	99,99
- Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk.	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	30.000.000	30.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir adalah sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.33 tanggal 15 Agustus 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022**”), yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0059072.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

2. KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 adalah berusaha dalam aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan penunjang usaha lainnya, pendidikan, informasi dan komunikasi, aktivitas jasa lainnya, perdagangan besar, industri pengolahan, pengangkutan dan pergudangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, serta real estat. Namun kegiatan usaha Perseroan saat ini yang telah benar-benar dijalankan adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Investasi.

Perseroan bergerak dalam bidang jasa keuangan di berbagai lini bisnis, antara lain: perbankan yang operasionalnya dilakukan oleh BABP, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 42,3%, lini bisnis asuransi oleh MNCAI, MNCL dan MIB, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 21,1%, lini bisnis pembiayaan oleh MNCF dan MNCGUI, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 13,1%, penjaminan dan perantara perdagangan efek oleh MNCS, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 7,5% bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memperoleh pendapatan dari bisnis pengelolaan investasi oleh MNCAM 1,9%, finansial teknologi oleh MTN dan FM 1,6% serta kegiatan operasional lainnya sebesar 12,5%.

A. Motion Digital

A.1. Lini Bisnis Jasa Perbankan

BABP menyediakan layanan perbankan lengkap bagi individu, UMKM, maupun korporasi, disamping layanan kartu kredit dan kartu debit. BABP mengoperasikan aplikasi perbankan digital MotionBanking. Selain *biometric onboarding* dan *artificial intelligence*, MotionBanking juga dibangun dengan arsitektur open API untuk memungkinkan aplikasi lain menjadi bagian dari ekosistem perbankan MNC Group. Pembiayaan yang diberikan atau kredit menjadi penopang pendapatan tersebut.

A.2. Lini Bisnis Jasa Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Perantara Efek

MNCS menyediakan layanan sekuritas lengkap dari perdagangan ekuitas, pendapatan tetap, *investment banking* hingga riset untuk investasi optimal. MNCS mengoperasikan MotionTrade, salah satu *platform online trading* terkemuka di Indonesia, menawarkan lebih dari 105 reksa dana di platformnya.

A.3. Lini Bisnis Jasa Finansial Teknologi

MTN mengoperasikan MotionPay, *platform e-money*, *e-wallet* dan transfer digital, mengadopsi teknologi yang kompatibel dengan QRIS untuk memastikan interkoneksi dengan *e-money* lainnya. MotionPay juga meluncurkan MotionPoints, program poin loyalitas yang mengintegrasikan semua platform digital MNC Group. Flash Mobile sebagai *brand payment gateway* dari MTN menyediakan akses terintegrasi ke berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank, kartu debit dan kredit, gerai ritel, QRIS, dan *e-wallet*.

FM sebagai *biller aggregator* melayani biller MNC Group dan melayani lebih dari 2.500 *merchant online* dan *offline* untuk mengumpulkan pembayaran tagihan melalui integrasi *single API*. FM juga berperan sebagai penyedia layanan nilai tambah untuk mendukung proses bisnis *fintech*, yaitu e-KYC dan tanda tangan digital.

B. Motion Non Digital

B.1. Bisnis Jasa Keuangan diluar Motion Digital

1. Bisnis Asuransi

MNCAI menyediakan produk asuransi umum untuk nasabah individu dan korporasi, termasuk asuransi properti, otomotif, dan perjalanan.

2. Bisnis Asuransi Jiwa

MNCL menawarkan produk asuransi jiwa, termasuk kesehatan, kecelakaan, dan unit link.

MNCAI dan MNCL memperkenalkan asuransi digital, MotionSure dan MotionLife, di mana pengguna dapat memilih dan membeli asuransi dengan mudah sesuai kebutuhan.

B.2. Lini Bisnis Jasa Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha (*Multifinance*)

1. Pembiayaan Konsumen

MNCF bergerak dalam pembiayaan konsumen, meliputi *refinancing* kendaraan bermotor dan properti.

2. Sewa Guna Usaha

MNCGUI melayani pelanggan korporasi dengan menyediakan pembiayaan aset produktif seperti *leasing* dan anjak piutang.

MNCL dan MNCF membantu menyalurkan dana BABP dan menggunakan aplikasi MotionCredit untuk memperluas basis pinjaman secara digital.

B.3. Lini Bisnis Jasa Pengelolaan Investasi (*Asset Management*)

Bergerak di bidang jasa Pengelolaan investasi, MNCAM melayani berbagai produk investasi bagi para investor individu maupun institusi dengan target segmen nasabah ritel dan *high net worth*. MNCAM fokus mengoptimalkan investasi memberikan imbal hasil terbaik bagi nasabah melalui reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, ekuitas dan ETF (*Exchange Traded Fund*) yang dikelola. MNCAM juga terus memperluas jaringan distribusi melalui *direct selling* kepada *high net worth*, penjualan kepada institusi, bank dan asuransi, bekerjasama dengan *selling agents* seperti sekuritas dan agen reksa dana baik *online* maupun *offline*, serta memaksimalkan sinergi ekosistem MNC Group.

B.4. Lini Bisnis Jasa Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Perantara Efek

Auerbach Grayson (AGCO)

Auerbach Grayson membangun jaringan globalnya dengan menjalin kemitraan dengan broker serta bank lokal maupun regional baik di negara maju maupun berkembang di seluruh dunia. Memiliki jaringan di lebih dari 125 negara, AGCO merupakan broker global terbesar dalam hal jumlah perusahaan yang diulas maupun jumlah analisis di seluruh dunia, dan memfasilitasi eksekusi perdagangan investor institusi Amerika Serikat dan riset saham lokal yang mendalam ke hampir semua pasar saham global. AGCO secara unik menawarkan pandangan lokal, akses korporasi, peningkatan modal serta *merger and acquisition* lintas negara.

Pengembangan Lain

Perseroan berupaya melakukan pengembangan digital dengan menjajaki peluang lain di dalam industri *fintech* melebihi penawaran layanan kami saat ini.

B.5. Lini Bisnis Jasa Perdagangan Aset Digital (*Cryptocurrency*)

Perseroan memandang mata uang kripto sebagai peluang yang menguntungkan dan telah mengajukan lisensi *platform* jual beli aset digital kripto, yang akan diberi nama MotionCrypto. Pengembangan *platform* berjalan dengan lancar dan sedang dalam tahap penyelesaian. Setelah disetujui, Perseroan dapat meluncurkan MotionCrypto dengan segera.

B.6. Lini Bisnis Modal Ventura

MMV, yang sedang dalam proses perijinan, merupakan perusahaan yang akan berfokus pada investasi dan pengembangan *start-up*, terutama di sektor *fintech*. Perseroan berharap dapat membantu mengembangkan ekosistem *fintech* di Indonesia, serta menjadi salah satu investor awal dalam *fintech* yang baru muncul dan memanfaatkan produk inovatif ke dalam ekosistem digital Perseroan.

B.7. Lini Bisnis *Securities Crowdfunding*

Aplikasi *securities crowdfunding* MotionSeeds yang dimiliki oleh MAB sedang dalam proses perijinan. MotionSeeds akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan usaha rintisan (*start-up*) dan UMKM dengan memberikan akses permodalan yang lebih fleksibel.

B.8. Lini Bisnis Broker Asuransi

MIB sedang mengembangkan MotionSafe, aplikasi asuransi dimana pelanggan dapat membeli asuransi dari berbagai penyedia asuransi, dengan menggabungkan semua paket asuransi dari berbagai mitra dengan biaya rendah untuk memberikan pilihan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Prospektus Bab VIII.

3. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Berikut ini adalah perubahan dalam struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 tahun terakhir.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta No. 164 tanggal 27 Juli 2020 *junctis* Akta No. 27 tanggal 23 Maret 2021 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan per 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Nominal	%
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	21.228.044.760	2.122.804.476.000	50,40
- Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	390.000.000.000	9,26
- UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	3.450.695.800	345.069.580.000	8,19
- HT Investment Development Ltd	3.708.705.000	370.870.500.000	8,81
- Masyarakat*	9.832.813.767	983.281.376.700	23,34
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (sebelum Saham Treasury)	42.120.259.327	4.212.025.932.700	100,00
Saham Treasury	498.591.600	49.859.160.000	
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.618.850.927	4.261.885.092.700	
Saham dalam Portepel	107.381.149.073	10.738.114.907.300	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 *jo*. "Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% Atau Lebih" (Daftar Pemegang Saham) Tanggal 31 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Nominal	%
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	21.228.044.760	2.122.804.476.000	50,31
- Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	390.000.000.000	9,24
- UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	3.114.935.800	311.493.580.000	7,38
- HT Capital Investment Ltd.	3.708.705.000	370.870.500.000	8,79
- Masyarakat*	10.241.707.767	1.024.170.776.700	24,28
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (sebelum Saham Treasury)	42.193.393.327	4.219.339.332.700	100,00
Saham Treasury	425.457.600	42.545.760.000	
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.618.850.927	4.261.885.092.700	
Saham dalam Portepel	107.381.149.073	10.738.114.907.300	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Jumlah saham *treasury* Perseroan sebanyak 425.457.600 saham, merupakan saham Perseroan milik Entitas Anak dengan perincian yang dimiliki PT MNC Sekuritas ("MNCS") adalah sejumlah 415.022.600 saham dan dimiliki oleh PT Modal Anak Bangsa ("MAB") sejumlah 10.435.000 saham.

Disamping yang dimiliki oleh MNCS dan MAB sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 22 Desember 2020 PT MNC Teknologi Nusantara ("MTN") membeli/memiliki saham Perseroan sejumlah 51.300.000 saham dan PT FM Digital Solution ("FM") membeli/memiliki saham Perseroan sejumlah 21.834.000 saham.

Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 UUPT, maka saham Perseroan yang dibeli oleh Anak Perusahaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai saham treasury Perseroan, karena saham treasury diperoleh apabila dilakukan pembelian saham Perseroan oleh Perseroan tersebut dan sahamnya dikuasai oleh Perseroan.

Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur bahwa Perseroan dilarang untuk mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan (*cross holding*), dengan demikian kepemilikan saham Perseroan oleh Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud diatas terqualifikasi sebagai larangan yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 UUPT. Namun demikian, saham Perseroan yang dimiliki oleh Anak Perusahaan saat ini telah dijual seluruhnya kepada pihak yang berwenang menerima pengalihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Bursa Efek, yaitu saham Perseroan yang dimiliki oleh MNCS telah dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 9 Desember 2022, saham Perseroan yang dimiliki oleh MAB telah dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 5 Desember 2022, saham Perseroan yang dimiliki MTN telah dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 10 Maret 2022, dan saham Perseroan yang dimiliki oleh FM telah dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 10 Maret 2022. Dengan dijualnya saham-saham tersebut maka sudah tidak ada lagi *cross holding* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 UUPT.

- Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 Juncto Daftar Pemegang Saham Per tanggal 12 Desember 2022, yang diambil dari Website KSEI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 12 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Nominal	%
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	21.228.044.760	2.122.804.476.000	49,81
- Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	390.000.000.000	9,16
- UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	3.004.211.300	300.421.130.000	7,05
- HT Capital Investment Ltd.	3.708.705.000	370.870.500.000	8,70
- Masyarakat*	10.777.889.867	1.077.788.986.700	25,28
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.618.850.927	4.261.885.092.700,00	100,00
Saham dalam Portepel	107.381.149.073	10.738.114.907.300	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

4. ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak berdasarkan DPS masing-masing Entitas Anak tertanggal 30 Juni 2022:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
1.	BABP	Jasa perbankan	Jakarta	48,99%	2014	Beroperasi	Langsung
2.	MNCS	Penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek	Jakarta	99,99%	2004	Beroperasi	Langsung
3.	MNCAI	Jasa asuransi umum	Jakarta	99,98%	2011	Beroperasi	Langsung
4.	MNCL	Jasa asuransi jiwa	Jakarta	99,98%	2010	Beroperasi	Langsung
5.	MIB	Jasa perantara asuransi	Jakarta	99,99%	2021	Beroperasi	Langsung
6.	MNCF	Pembiayaan konsumen	Jakarta	99,99%	2003	Beroperasi	Langsung
7.	MNCGUI	Sewa guna usaha	Jakarta	99,99%	2014	Beroperasi	Langsung
8.	MNCAM	Jasa pengelolaan investasi	Jakarta	99,99%	2003	Beroperasi	Langsung
9.	MTN	Finansial teknologi	Jakarta	99,99%	2018	Beroperasi	Langsung
10.	FM	Finansial teknologi	Jakarta	99,99%	2020	Beroperasi	Langsung
11.	SIAP	Finansial teknologi	Jakarta	99,99%	2016	Belum Beroperasi	Langsung
12.	MMV	Modal ventura	Jakarta	99,92%	2016	Belum Beroperasi	Langsung
13.	MAB	Layanan urun dana	Jakarta	99,99%	2016	Belum Beroperasi	Langsung

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
14.	MCT	Jasa perantara perdagangan aset digital	Jakarta	99,99%	2016	Belum Beroperasi	Langsung
15.	MDNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92%	2016	Beroperasi	Langsung
16.	RINP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92%	2016	Beroperasi	Langsung
17.	SGNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92%	2016	Beroperasi	Langsung
18.	Winfly	Investasi	British Virgin Island	100,00%	2018	Beroperasi	Langsung
19.	Lafite	Investasi	British Virgin Island	100,00%	2020	Beroperasi	Langsung
20.	MDT	Investasi	Jakarta	99,99%	2022	Beroperasi	Langsung

5. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Target Dana Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia : Sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)
- Jumlah Pokok Obligasi : Seluruh jumlah Pokok Obligasi yang akan ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah). Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp346.880.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:
- Seri A : Rp231.280.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah)
 - Seri B : Rp60.425.000.000,- (enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah)
 - Seri C : Rp55.175.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
- Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp103.120.000.000,- (seratus tiga miliar seratus dua puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut Penjamin Emisi Obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
- Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi
- Jangka Waktu :
 Seri A : 370 hari kalender
 Seri B : 3 (tiga) tahun
 Seri C : 5 (lima) tahun
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
- Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya
- Tingkat Bunga :
 Seri A : 10,50% (sepuluh koma lima nol persen)
 Seri B : 11,25% (sebelas koma dua lima persen)
 Seri C : 12,00% (dua belas koma nol nol persen)
- Periode Pembayaran Bunga : Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan

Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	:	10 April 2023
Jaminan	:	Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam PT MNC Digital Entertainment Tbk. (“MSIN”) sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan akan menandatangani akta jaminan gadai saham selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
Peringkat Efek	:	idBBB+ (<i>Triple B Plus</i>) dari Pefindo
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	:	1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Agen Pembayaran	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 28 November 2022 dan ditandatangani oleh Florus Daeli SE, Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP, ASEAN CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0126.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 31 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Harris Siregar CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0524 dan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 7 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Barugamuri Dachi M., Ak., CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1150.

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK. Informasi keuangan tersebut didisajikan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember	
	2022 *)	2022	2021	2020
ASET				
Kas dan setara kas	2.492.437	2.761.476	2.827.492	1.758.171
Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	8.487	8.445	8.353	8.103
Piutang dari Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	300.479	325.012	291.740	340.136
Piutang nasabah	495.542	461.452	474.897	680.541
Efek-efek				
Pihak berelasi	366.567	390.488	274.461	349.897
Pihak ketiga	4.402.667	4.061.015	4.308.196	3.695.181
Piutang pembiayaan				
Pihak berelasi	250.958	198.786	208.289	180.993
Pihak ketiga	1.268.623	1.381.693	1.317.356	1.390.494
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.576)	(12.339)	(13.338)	(15.447)
Kredit				
Pihak ketiga	9.944.252	9.559.927	8.422.485	7.051.743
Cadangan kerugian penurunan nilai	(265.235)	(248.848)	(218.438)	(223.144)
Piutang pembiayaan Murabahah				
Pihak berelasi	77	377	1.654	4.768
Pihak ketiga	19.262	25.515	3.674	89
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9)	(9)	-	(12)
Piutang pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah				
Pihak ketiga	48.330	35.541	21.610	13.316
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35)	(14)	(7)	(342)
Piutang Hawalah bil-Ujrah				
Pihak berelasi	14.676	10.534	28.473	43.458
Pihak ketiga	387.054	371.123	304.095	310.482
Cadangan kerugian penurunan nilai	(34.781)	(34.781)	(34.781)	(34.031)
Aset tetap - bersih	172.569	180.195	181.972	204.704
Aset Al - Ijarah - bersih	-	-	-	240
Aset tak berwujud - bersih	166.238	167.461	153.290	141.601
Goodwill	369.443	369.443	369.443	369.443
Aset pajak tangguhan	393.770	391.673	380.742	387.845
Aset lain-lain	2.515.634	2.243.089	2.342.310	2.443.317
Jumlah Aset	23.304.429	22.647.254	21.653.968	19.101.546
LIABILITAS				
Simpanan				
Pihak berelasi	1.502.231	1.426.641	1.524.695	753.682
Pihak ketiga	10.493.643	10.440.230	9.598.751	8.315.127
Simpanan dari bank lain	193.371	61.359	130.675	490.103
Liabilitas segera	67.365	96.708	69.299	173.797
Utang kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	393.201	369.354	385.506	421.663
Utang Nasabah	379.195	416.805	347.083	498.855
Utang reasuransi dan utang lain-lain	351.639	302.998	248.233	232.033
Utang pajak	28.535	25.548	29.696	25.398
Liabilitas kontrak asuransi dan investasi	636.050	659.614	573.363	534.608
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	1.013.823	931.265	926.766	976.791
Utang Al-Musyarakah	186.652	194.576	179.253	194.891
Utang Al-Mudharabah	7.274	7.685	3.065	1.000
Utang obligasi	298.983	299.419	299.155	298.673
Utang sewa pembiayaan	9.708	10.975	13.705	9.523
Liabilitas imbalan pasca kerja	59.704	58.029	56.998	77.035
Liabilitas lain-lain	1.627.295	1.285.117	1.259.914	1.004.533
Jumlah Liabilitas	17.248.669	16.586.323	15.646.157	14.007.712
EKUITAS				

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember	
	2022 *)	2022	2021	2020
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				
Modal dasar - 150.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	4.261.885	4.261.885	4.261.885	3.976.085
Tambahan modal disetor	1.312.867	1.312.867	1.312.867	1.184.910
Modal lain-lain - opsi saham karyawan	-	-	-	26.532
Komponen ekuitas lainnya	(752.592)	(732.646)	(712.210)	(729.604)
Saldo laba:				
Ditentukan penggunaannya	3.500	3.500	3.500	3.500
Belum ditentukan penggunaannya	481.621	467.489	413.269	271.088
Dikurangi biaya perolehan saham yang diperoleh kembali	(109.285)	(109.285)	(126.033)	(126.033)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				
Pemilik entitas induk	5.197.996	5.203.810	5.153.278	4.606.478
Kepentingan non-pengendali	857.764	857.121	854.533	487.356
Jumlah Ekuitas	6.055.760	6.060.931	6.007.811	5.093.834

*)Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember	
	2022 *)	2021 *)	2022	2021 *)	2021	2020
PENDAPATAN						
Pendapatan bunga dan dividen	1.201.144	1.066.994	804.277	713.727	1.531.716	1.618.002
Pendapatan pasar modal	275.901	293.122	199.020	203.333	433.796	150.151
Pendapatan premi bersih	271.616	294.319	177.331	174.310	371.512	427.158
Pendapatan digital	200.559	68.920	145.062	45.768	144.590	72.123
Pendapatan pembiayaan syariah	10.406	20.451	6.293	14.352	27.408	31.456
Pendapatan operasional lainnya	118.768	177.014	54.541	130.085	226.120	358.342
Jumlah Pendapatan	2.078.394	1.920.820	1.386.524	1.281.575	2.735.142	2.657.232
BEBAN						
Beban umum dan administrasi	989.242	954.195	644.513	637.212	1.233.850	1.045.425
Beban bunga	515.990	603.370	336.768	401.139	794.941	903.740
Klaim dan manfaat	250.580	178.156	168.875	119.338	224.720	448.869
Penurunan nilai	117.190	38.329	77.868	30.642	83.660	77.187
Komisi neto	18.671	5.511	9.825	2.966	23.753	8.187
Beban bagi hasil syariah	16.906	790	11.278	639	23.094	5.699
Beban administrasi	3.505	4.752	2.286	3.281	6.392	7.341
Lain-lain - bersih	73.449	108.972	68.618	73.686	177.685	76.170
Jumlah Beban	1.985.533	1.894.075	1.320.031	1.268.903	2.568.095	2.572.618
Laba sebelum pajak penghasilan	92.861	26.745	66.493	12.672	167.047	84.614
Manfaat (Beban) pajak - bersih	(9.644)	(596)	(3.733)	3.290	(19.877)	(19.089)
Laba bersih periode berjalan	83.217	26.149	62.760	15.962	147.170	65.525
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Pengkukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	4.687	-	4.721	-	2.337	1.997
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi						
Kerugian dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(38.450)	(42.555)	(21.767)	(31.867)	(6.021)	(4.294)
Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(33.763)	(42.555)	(17.046)	(31.867)	(3.684)	(2.297)
Laba (rugi) komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	49.454	(16.406)	45.714	(15.905)	143.486	63.228
Laba bersih yang diatribusikan kepada						
Pemilik entitas induk	68.352	23.252	54.220	12.738	142.181	62.078
Kepentingan non pengendali	14.865	2.898	8.540	3.224	4.989	3.447
Jumlah	83.217	26.150	62.760	15.962	147.170	65.525

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember	
	2022 *)	2021 *)	2022	2021 *)	2021	2020
Laba (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada						
Pemilik entitas induk	45.304	(12.985)	42.761	(9.672)	142.372	45.630
Kepentingan non pengendali	4.150	(3.420)	2.953	(6.233)	1.114	17.598
Jumlah	49.454	(16.405)	45.714	(15.905)	143.486	63.228
Laba per saham (Rupiah penuh)						
Dasar	1,62	0,55	1,29	0,30	3,38	1,57

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	30	30 Juni	31 Desember	
	September	2022	2021	2020
	2022 *)			
Rasio Usaha (dalam %)				
Laba Sebelum Pajak/ Jumlah Pendapatan	4,47%	4,80%	6,11%	3,18%
Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah Pendapatan	4,00%	4,53%	5,38%	2,47%
Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	1,37%	1,04%	2,45%	1,29%
Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah Aset	0,36%	0,28%	0,68%	0,34%
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Jumlah Pendapatan	3,29%	3,91%	5,20%	2,34%
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Jumlah Ekuitas	1,13%	0,89%	2,37%	1,22%
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Jumlah Aset	0,29%	0,24%	0,66%	0,32%
Jumlah Pendapatan/Jumlah Aset	8,92%	6,12%	12,63%	13,91%
Rasio Keuangan (dalam %)				
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	284,83%	273,66%	260,43%	274,99%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	74,01%	73,24%	72,26%	73,33%
<i>Interest Coverage Ratio</i> ¹⁾	164,73%	173,30%	163,34%	134,71%
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ²⁾	65,00%	72,74%	74,08%	65,65%
Rasio Pertumbuhan (dalam %)				
Jumlah Pendapatan	8,20%	8,19%	2,93%	-2,92%
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	218,23%	293,2%	124,60%	16,01%
Jumlah Aset	7,62%	4,59%	13,36%	3,90%
Jumlah Liabilitas	10,24%	6,01%	11,70%	9,10%
Jumlah Ekuitas	0,80%	0,88%	17,94%	-8,15%

¹⁾ *ISCR = EBITDA terhadap beban bunga*

²⁾ *DSCR = EBITDA terhadap bunga pinjaman dan pokok pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun*

*) Tidak diaudit

7. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 45% kepada PT MNC Sekuritas yang selanjutnya akan digunakan sebagai tambahan modal kerja yaitu untuk mendukung ekspansi usaha perusahaan berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk transaksi perdagangan efek.
2. Sekitar 33% kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pemberian pembiayaan berupa anjak piutang dan sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan alat berat seperti *eskavator, loader, dozer, crane*, dan lain-lain yang digunakan oleh debitur-debitur PT MNC Guna Usaha Indonesia di sektor Infrastruktur, perkebunan dan pertambangan serta sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan alat-alat kesehatan dan mesin industri bagi debitur PT MNC Guna Usaha Indonesia yang bergerak di industri alat kesehatan dan industri manufaktur, baik secara pembelian secara angsuran, sewa pembiayaan dan/atau *sale and leaseback* yang telah dijalankan dan terus dikembangkan sesuai dengan permintaan pelanggan/pihak ketiga di kemudian hari.

3. Sekitar 22% kepada PT MNC Finance yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembiayaan kepada konsumen berupa pembiayaan mobil, rumah dan anjak piutang yang telah dijalankan dan terus dikembangkan sesuai dengan permintaan pelanggan/pihak ketiga di kemudian hari.

Berapapun jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Obligasi ini, maka jumlah pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan akan menggunakan persentase yang sama seperti di atas. Selanjutnya, dalam hal dana tersebut telah dikembalikan oleh Entitas Anak kepada Perseroan, maka akan digunakan Perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.

8. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Selain itu, Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN

Risiko Ketergantungan Perseroan sebagai Perusahaan Induk terhadap Pendapatan dan Laba Entitas Anak

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG MEMPUNYAI PENGARUH TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Pengambil Keputusan Investasi yang dilakukan Perseroan.
2. Perseroan Menghadapi Beberapa Risiko Operasional dalam Perluasan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi pada Entitas Anak.
3. Risiko Ketergantungan Perseroan terhadap Kepengurusan yang Handal dan Berkualitas.

C. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN ENTITAS ANAK

- **Risiko Umum Entitas Anak**
 1. Risiko Persaingan
 2. Risiko Perekonomian
 3. Risiko Peraturan Pemerintah
- **Risiko Lini Usaha Jasa Perbankan**
 1. Risiko Kredit
 2. Risiko Pasar
 3. Risiko Operasional
 4. Risiko Likuiditas
 5. Risiko Hukum
 6. Risiko Strategis
 7. Risiko Kepatuhan
 8. Risiko Reputasi
- **Risiko Lini Usaha Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha**
 1. Risiko Pembiayaan
 2. Risiko Pendanaan
 3. Risiko Kredit
 4. Risiko Pasar
 5. Risiko Operasional
 6. Risiko Strategis
 7. Risiko Aset dan Liabilitas
 8. Risiko Kepengurusan
 9. Risiko Tata Kelola

- **Risiko Lini Usaha Asuransi**
 1. Risiko Klaim
 2. Risiko Pengelolaan Dana
 3. Risiko Operasional
 4. Risiko Reputasi
 5. Risiko Kepengurusan
 6. Risiko Tata Kelola

- **Risiko Lini Usaha Jasa Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Perantara Efek**
 1. Risiko terkait Penghentian Ijin Usaha
 2. Risiko Penjaminan Emisi Efek
 3. Risiko Perdagangan Efek
 4. Risiko Kepatuhan
 5. Risiko Reputasi
 6. Risiko Kepengurusan
 7. Risiko Tata Kelola

- **Risiko Lini Usaha Jasa Pengelolaan Investasi**
 1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
 2. Risiko Likuiditas Reksadana Terbuka
 3. Risiko Kredit
 4. Risiko Reputasi
 5. Risiko Tata Kelola

- **Risiko Lini Usaha Finansial Teknologi**
 1. Risiko terkait Penghentian Ijin Usaha
 2. Risiko Kepatuhan
 3. Risiko Tata Kelola

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko yang dihadapi Perseroan dapat dilihat pada Bab VI mengenai Faktor Risiko.

9. PROSPEK USAHA

Indonesia merupakan rumah bagi populasi *unbanked* terbesar keempat di dunia. Di negara di mana sekitar 92 juta dari 276 juta jiwa tidak memiliki rekening bank, tetapi 70% penduduknya memiliki *smartphone*, jasa keuangan digital memainkan peran penting dalam memajukan inklusi keuangan baik di kota berpenduduk padat maupun di daerah terpencil. Komitmen pemerintah menciptakan inklusi keuangan dengan mendukung layanan keuangan digital, turut membantu meningkatkan tingkat adopsi di antara masyarakat yang kurang terlayani sekaligus meningkatkan efisiensi layanan konvensional.

a. Prospek usaha di bidang jasa perbankan

Perkembangan industri perbankan diproyeksikan terus meningkat, dengan proyeksi pertumbuhan kredit yang masih baik dengan pertumbuhan laba perbankan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh aktivitas perekonomian masyarakat yang berangsur pulih dan pertumbuhan ekonomi yang kembali tumbuh positif pasca pandemi.

Dilihat dari sisi suku bunga, tren yang menurun sejak tahun 2020 hingga kuartal pertama tahun 2022 ini merupakan insentif tersendiri bagi dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Hal ini akan berdampak baik bagi keberlangsungan pendapatan bank dari pembayaran para debiturnya.

BABP memperoleh ijin perbankan digital pada tahun 2021, dan meluncurkan Motionbanking. Aplikasi ini akan menjadi poros pertumbuhan Perseroan kedepan. Perseroan terus memperkuat sistem, menyajikan aplikasi yang cepat, mudah, aman dan handal; serta memperkaya kolaborasi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan layanan dan fasilitas.

b. Prospek usaha di bidang jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek

Usaha Perantara Pedagang Efek memiliki peluang pertumbuhan yang lebih baik seiring dengan sentimen positif Bursa pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah investor di Indonesia yang meningkat 27,4% dari 7,5 juta pada akhir tahun 2021 menjadi 9,5 juta investor pasar modal pada bulan Agustus 2022 dengan sekitar 80% dari total investor merupakan generasi milenial.

Dengan bergabungnya generasi milenial di pasar modal, terbentuklah peluang untuk lanjut mengembangkan *platform* perdagangan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang melek teknologi. Ditambah dengan sisi penawaran pasar modal, penghimpunan dana melalui pasar modal telah mencapai Rp 153 triliun dengan 41 emiten IPO pertama dalam tahun 2022. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor dan aktifnya pasar modal Indonesia, akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan yang berdampak positif bagi bisnis pedagang perantara efek di Indonesia.

c. Prospek usaha di bidang finansial teknologi (*e-money*)

Adopsi uang digital terus meningkat dengan adanya normalisasi pembayaran melalui QR Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI). Jumlah pengguna dan *merchant* terus tumbuh secara signifikan, yang pada akhir Juni 2022 masing-masing berjumlah 21,1 juta pengguna QRIS dan 19,27 juta *merchant* QRIS. Hal ini dimotori oleh kemudahan yang ditawarkan aplikasi *e-money* dan *e-wallet* menyimpan uang elektronik dan kartu nasabah untuk melakukan pembayaran dengan satu ketukan tombol.

Dengan dukungan BI dalam perkembangan QRIS, perkembangan dan peluncuran hubungan pembayaran QR lintas batas antara negara-negara mitra menjadi sorotan dan nilai tambah terbaru bagi semua penyelenggara uang digital dikarenakan pengguna juga akan dapat yang memanfaatkan platform mereka saat liburan ke luar negeri melalui penyelesaian mata uang lokal. QR lintas batas tersebut akan menguntungkan penyelenggara uang digital dalam hal nilai dan jumlah transaksi, serta didorong juga oleh populasi kelas menengah yang terus berkembang pesat.

d. Prospek usaha di bidang pembiayaan konsumen

Permintaan terhadap mobil dan rumah kembali menguat setelah berkontraksi pada 2020. Sejumlah indikator perekonomian domestik yang terus menunjukkan pemulihan, seperti mobilitas yang kembali meningkat dan daya beli masyarakat membaik, turut mendorong penyaluran kredit pembiayaan konsumen. MNCF berfokus pada pembiayaan konsumen dengan mayoritas portofolio pembiayaan untuk rumah (*mortgage*) dan mobil bekas (*used car*). Segmen pembiayaan tersebut belum tersentuh dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, MNCGUI baru saja meluncurkan MotionCredit, aplikasi pembiayaan multiguna. MotionCredit menawarkan layanan pembiayaan multiguna dengan agunan mobil dan rumah serta pembiayaan dana Haji.

e. Prospek usaha di bidang sewa guna usaha

Ketahanan Indonesia terhadap gejolak ekonomi global serta tingginya permintaan meningkatkan kepercayaan diri pelaku bisnis mengambil pinjaman pembiayaan modal kerja, terutama di sektor konstruksi, agribisnis, dan pertambangan. Ditambah, kendala pasokan sebagai akibat dari konflik Rusia-Ukraina menyebabkan meroketnya harga sumber daya energi dan hasil pertanian, memotivasi peningkatan produksi yang tentunya dibarengi dengan kebutuhan modal kerja. MNCGUI berfokus pada klien korporasi dengan berkonsentrasi pada pembiayaan aset-aset seperti alat berat, mesin dan alat kesehatan untuk kalangan bisnis di Indonesia.

Strategi MNCGUI untuk pembiayaan dana haji melalui diversifikasi produk pembiayaan yang belum banyak pemainnya juga merupakan salah satu cara untuk meraih potensi pasar dalam menambah segmen pembiayaan.

f. Prospek usaha di bidang asuransi

Pasar asuransi didominasi oleh pemain tradisional, dengan akses terbatas terutama di kota-kota padat penduduk. Hal ini mengakibatkan rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia yang baru mencapai 3,18% pada tahun 2021, meliputi asuransi jiwa 1,19%, asuransi umum 0,47%, asuransi sosial 1,45%, dan asuransi wajib 0,08%.

Akselerasi transformasi digital diharapkan dapat mengembangkan industri asuransi. Produk-produk inovatif yang dapat diserap kalangan milenial melalui sarana distribusi digital menjadi potensi untuk mendorong penetrasi asuransi, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendorong pertumbuhan dan memperkuat fundamental ekonomi.

g. Prospek usaha di bidang jasa pengelolaan investasi

Reksa dana merupakan solusi investasi yang sangat diminati oleh individu yang kurang paham soal pasar modal. Secara konsisten menawarkan imbal hasil yang lebih menarik dibanding menabung di bank sehingga lebih mampu melindungi nilai aset terhadap inflasi. Minat terhadap reksa dana juga meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini, investor reksa dana tumbuh 14,6 kali lipat dari 622.545 investor di 2017 jadi 9,09 juta investor pada September 2022. Program literasi keuangan dari berbagai lembaga keuangan di Indonesia juga menjadi sangat penting untuk membantu meningkatkan jumlah investor yang ingin mencapai kebebasan finansial mereka.

10. EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

No.	Nama Obligasi	Jumlah Obligasi	Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Efektif	Periode Jatuh Tempo	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi yang masih terutang pada saat Prospektus ini diterbitkan
1.	Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018	Rp300.000.000.000	IdBBB+	12,5%	18 Juli 2018	5 (lima) tahun	3 Juli 2023	Rp300.000.000.000

I. PENAWARAN UMUM



PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk

Bidang Usaha:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Investasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

MNC Financial Center Lantai 21

Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340

Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983 6870

Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com

Website : www.mncfinancialservices.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP450.000.000.000,-
(EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp346.880.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp231.280.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp60.425.000.000,- (enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi seri C yang ditawarkan sebesar Rp55.175.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp103.120.000.000,- (seratus tiga miliar seratus dua puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut Penjamin Emisi Obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 10 April 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 20 Januari 2024 untuk Obligasi Seri A, 10 Januari 2026 untuk Obligasi Seri B, 10 Januari 2028 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan Obligasi, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") dengan peringkat:

idBBB+ (Triple B Plus)

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022”.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp346.880.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp231.280.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri A akan dilakukan pada tanggal 10 April 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2024.
- Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp60.425.000.000,- (enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri B akan dilakukan pada tanggal 10 April 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2026.
- Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp55.175.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri C akan dilakukan pada tanggal 10 April 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2028.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp103.120.000.000,- (seratus tiga miliar seratus dua puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut Penjamin Emisi Obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Kepastian nilai Obligasi dan masing-masing seri Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) akan ditentukan kemudian setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum dan akan dituangkan dalam perubahan Perjanjian yang akan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing dari seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	10 April 2023	10 April 2023	10 April 2023
2	10 Juli 2023	10 Juli 2023	10 Juli 2023
3	10 Oktober 2023	10 Oktober 2023	10 Oktober 2023
4	20 Januari 2024	10 Januari 2024	10 Januari 2024
5		10 April 2024	10 April 2024
6		10 Juli 2024	10 Juli 2024
7		10 Oktober 2024	10 Oktober 2024
8		10 Januari 2025	10 Januari 2025
9		10 April 2025	10 April 2025
10		10 Juli 2025	10 Juli 2025
11		10 Oktober 2025	10 Oktober 2025
12		10 Januari 2026	10 Januari 2026
13			10 April 2026
14			10 Juli 2026
15			10 Oktober 2026
16			10 Januari 2027
17			10 April 2027
18			10 Juli 2027
19			10 Oktober 2027
20			10 Januari 2028

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI

Obligasi didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah sesuai dengan daftar yang diberikan oleh Agen Pembayaran dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan akan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam PT MNC Digital Entertainment Tbk. ("MSIN") dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan akan menandatangani akta jaminan gadai saham selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.

Penilaian yang dilakukan atas saham MSIN yang digadaikan adalah berdasarkan valuasi dengan menggunakan nilai harga penutupan saham MSIN di hari sebelum ditandatanganinya akta gadai saham.

Saham yang dijaminan adalah saham MSIN milik Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Saham PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek MSIN tertanggal 4 November 2022, mengenai Ringkasan Daftar Pemegang Saham MSIN.

Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan nilai jaminan sebesar sekurang-kurangnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Pokok Obligasi pada saat ditandatanganinya akta jaminan gadai saham dan/atau setelah dilakukannya *top up* jaminan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Wali Amanat akan mengawasi kecukupan nilai jaminan setiap hari. Nilai jaminan tersebut dihitung dengan valuasi dengan menggunakan nilai harga penutupan saham MSIN di Bursa Efek 1 (satu) Hari Bursa di hari sebelum ditandatanganinya akta gadai saham.

Apabila nilai jaminan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi, maka Perseroan diwajibkan untuk melakukan *top up* sehingga jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila nilai jaminan gadai:
 - a. Turun menjadi dibawah atau sama dengan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) x Nilai Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan; atau
 - b. Turun dibawah nilai jaminan 125% (seratus dua puluh lima persen) namun masih di atas 110% (seratus sepuluh persen) dari Nilai Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan selama 30 (tiga puluh) Hari Bursa berturut-turut;

maka Wali Amanat akan mengirimkan instruksi kepada Emiten untuk melakukan *top up* sehingga jaminan tercukup 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai Pokok Obligasi. *Top up* jaminan wajib dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah instruksi dari Wali Amanat diterima oleh Perseroan.
2. Perseroan akan mengirimkan Instruksi *Receive Free of Payment (RFOP) Settlement* Transaksi *Top up* (dilampirkan konfirmasi transaksi) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - diterima oleh Wali Amanat dengan tindakan Agen Jaminan yang ditunjuk oleh Wali Amanat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penyelesaian transaksi (*settlement date*) dengan konfirmasi per telepon;
 - diterima oleh Wali Amanat/Agen Jaminan melalui sarana tercepat disertai dengan konfirmasi per telepon sebelum pukul 11.00 WIB untuk penyelesaian transaksi (*settlement date*) di hari yang sama.
3. Wali Amanat akan memastikan bahwa *settlement* transaksi akan dilaksanakan oleh Agen Jaminan dengan perusahaan sekuritas selaku *counterpart settlement* transaksi maksimum 3 (tiga) Hari Bursa sejak Instruksi *Settlement* Transaksi *top up*. Perseroan, selaku pemberi gadai berjanji dan mengikatkan diri akan mengeluarkan surat pemberitahuan perihal adanya peletakan gadai atas saham kepada MSIN dan/atau Biro Administrasi Efek MSIN, dan kemudian memberitahukan mengenai terjadinya gadai saham tersebut disertai pengajuan permohonan pemblokiran atas nama yang digadaikan dalam daftar pemegang saham MSIN kepada Wali Amanat.
4. Selanjutnya Perseroan akan memenuhi prosedur yang wajib dilakukan di KSEI dan KSEI atas permintaan Agen Jaminan akan melakukan pemblokiran yang berlaku sampai dengan dikeluarkannya konfirmasi pencatatan gadai dari KSEI, yang berisi pencatatan dan pemblokiran gadai saham di C-BEST, yang mana konfirmasi tersebut harus diperoleh Pemberi Gadai paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterimanya konfirmasi pemblokiran sub-rekening Efek yang diterima dari KSEI.

Apabila nilai jaminan lebih dari 130% (seratus tiga puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan atau apabila hasil pemeringkatan naik sehingga menyebabkan jaminan yang diberikan Perseroan menjadi lebih dari apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Perwalianamanatan, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas jaminan gadai saham yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat (melakukan *top down*) dengan ketentuan penarikan jaminan tersebut tidak menyebabkan nilai jaminan menjadi kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai Pokok Obligasi.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan hasil pemeringkatan idBBB+ (*Triple B Plus*). Dalam hal hasil Pemeringkatan naik melebihi idBBB+ (*Triple B Plus*), Perseroan berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas jaminan gadai saham dengan ketentuan penarikan jaminan tersebut tidak menyebabkan nilai jaminan menjadi kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai Pokok Obligasi.

Sehubungan dengan jaminan dalam penerbitan Obligasi ini, Wali Amanat dan Perseroan menunjuk Agen jaminan untuk melakukan tugas – tugas sesuai dengan instruksi Wali Amanat antara lain :

1. Membuka sub rekening efek untuk penyimpanan saham yang dijaminakan.
2. Dalam hal *settlement* transaksi *Top Up* :
 - a. Menerima instruksi *Receive Free of Payment* (RFOP) dari Emiten melalui Wali Amanat;
 - b. Menerima pengalihan saham yang akan dijaminakan dari perusahaan Sekuritas yang ditunjuk Perseroan yang dilakukan melalui sistem *Central Depository Book Entry Settlement*, (selanjutnya *Central Depository Book Entry Settlement* disebut C-BEST);
 - c. mengirimkan surat permohonan pemblokiran Sub Rekening Efek atas saham yang dijaminakan kepada PT KSEI;
 - d. mengirimkan konfirmasi pemblokiran sub Rekening efek yang diterima dari PT KSEI kepada Perseroan dan Wali Amanat.
1. Dalam hal *settlement* transaksi *Top Down* :
 - a. Menerima instruksi *Delivery Free of Payment* (DFOP) dari Emiten melalui Wali Amanat;
 - b. Mengirimkan surat permohonan pelepasan pemblokiran Sub Rekening Efek atas saham yang dijaminakan kepada PT KSEI;
 - c. mengirimkan konfirmasi pelepasan pemblokiran sub Rekening efek yang diterima dari PT KSEI kepada Perseroan dan Wali Amanat;
 - d. Mengirimkan pengalihan saham yang akan dilepas kepada perusahaan sekuritas yang ditunjuk Perseroan yang dilakukan dengan sistem C-BEST.

SANKSI

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 7.3 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi berupa Denda yaitu sebesar tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

Apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara dibawah tangan, maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Wali Amanat dan Perseroan, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi atas jaminan tersebut, maka jaminan tersebut dapat dieksekusi oleh Wali Amanat.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari

jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1) Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan dan/atau mengizinkan Anak Perusahaan (jika ada) melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar Aset kecuali:
 - i. dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada);
 - ii. penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset baik secara sendiri-sendiri maupun bersama lebih dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan; dan
 - iii. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini.

Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aset adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aset per laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan yang terakhir "Aset" berarti seluruh Aset konsolidasi Emiten berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

- b. mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan (atau mengizinkan Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan), kecuali:
 - i. merger atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha sehari-hari Emiten atau Anak Perusahaan; atau
 - ii. merger atau akuisisi tersebut didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Emiten dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Emiten dalam membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Obligasi; atau
 - iii. merger atau akuisisi antara Emiten dan Anak Perusahaan (jika ada) dengan ketentuan bahwa dalam hal merger tersebut, Emiten tetap menjadi perusahaan hasil merger (*surviving company*).
- c. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. mengurangi modal dasar dan modal disetor Emiten.
- e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga selain Anak Perusahaan (jika ada) di luar kegiatan usaha Emiten tersebut dimana jumlah pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Emiten berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terkini yang telah diaudit, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf b, kecuali pinjaman kepada karyawan Emiten, koperasi dan yayasan karyawan Emiten, dan/atau Afiliasi/Anak Perusahaan (jika ada) serta PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan Emiten, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali.

- i. agunan atau jaminan yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Emiten dan/atau Anak Perusahaan (jika ada);
 - iii. agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan penjaminan atas fasilitas pinjaman baru dalam rangka menunjang kegiatan usaha Emiten dan/atau Anak Perusahaan (jika ada);
 - iv. agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan -posisi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aktiva yang sama.
- g. memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada pihak lain, kecuali (i) kepada Anak Perusahaan, (ii) dalam rangka kegiatan usaha atau penunjang kegiatan usaha Emiten atau Anak Perusahaan, atau (iii) kepada perusahaan Afiliasi Emiten.
- h. mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai tingkatan (ranking) lebih tinggi dari Obligasi dan pembayarannya didahulukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf f tersebut diatas.

Perseroan telah menyampaikan surat permohonan persetujuan untuk melakukan PUB III Tahap I Tahun 2022, dengan target dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp.750.000.000.000,00, dengan jaminan berupa saham MSIN yang dimiliki Perseroan untuk Tahap I kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam PUB II Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam surat Perseroan No. 107/MNCKI/DIR/XI/22 tanggal 24 November 2022 Atas permohonan persetujuan tersebut Wali Amanat telah menyampaikan persetujuannya sebagaimana tercantum dalam surat Wali Amanat No B.804-INV/TCS/AET/11/2022 tanggal 25 November 2022, Perihal: Persetujuan atas Penerbitan PUB III PT MNC Kapital Indonesia.

- 2) Sebagaimana dimaksud dalam poin 1, persetujuan tertulis dari Wali Amanat diberikan dengan ketentuan :
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.
- 3) Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut
- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
 - b. menjaga rasio keuangan dan memelihara keadaan keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
 - 1) *Debt to Equity Ratio*, yaitu perbandingan total Utang dengan total Modal tidak lebih dari: 3 : 1 (tiga) berbanding (satu).
 - 2) *Coverage Ratio*, yaitu perbandingan antara EBITDA Konsolidasi dengan beban bunga pinjaman konsolidasian tidak kurang dari 1 : 1 (satu) berbanding (satu).
 “Utang” adalah total liabilitas per laporan keuangan konsolidasi setelah dikurangi dengan 1) simpanan pihak ketiga, 2) simpanan pihak berelasi, 3) simpanan dari bank lain, 4) utang bank dan institusi keuangan non-bank, 5) utang AI-Musyarakah, 6) utang AI-Mudharabah;

“EBITDA Konsolidasi” adalah laba Perseroan dan Entitas Anak sebelum beban pajak konsolidasi ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi dan Cadangan Kerugian dan Penurunan Nilai (CKPN);

“Beban Bunga Pinjaman Konsolidasi” adalah beban bunga Perseroan dan Entitas Anak dengan tanpa memperhitungkan Entitas Anak yang diakuisisi (jika ada);

“Modal” adalah total ekuitas per laporan keuangan konsolidasi;

“Cadangan Kerugian dan Penurunan Nilai (CKPN)” adalah cadangan yang dibentuk oleh bank untuk menghadapi terjadinya risiko kerugian akibat penanaman dana dalam aktiva produktif.

- c. menjaga agar Perseroan dikendalikan atau Perseroan dimiliki baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh PT Asia Holding Tbk (atau dahulu dikenal dengan sebutan PT MNC Investama Tbk) selama jangka waktu Obligasi;
- d. Perseroan tidak akan menjaminkan jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun;
- e. menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui faksimili atau surat elektronik (*email*);
- f. bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam huruf e diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda atas jumlah yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari keterlambatan yang dihitung sejak tidak dibayarkannya dana tersebut.
Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
- g. memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan;
- h. memberikan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan dengan nilai pada Tanggal Emisi sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terutang sejak ditandatanganinya perjanjian gadai saham yang akan ditandatangani oleh Emiten dan Wali Amanat selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- i. dalam hal nilai jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan kurang dari jumlah yang ditentukan dalam huruf h, maka Emiten berkewajiban untuk melakukan *top up* sehingga jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai Obligasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan apabila :
 - a. Turun menjadi dibawah atau sama dengan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) x Nilai Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan; atau
 - b. Turun dibawah nilai jaminan 125% (seratus dua puluh lima persen) namun nilai jaminan masih di atas 110% (seratus sepuluh persen) dari Nilai Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan selama 30 (tiga puluh) Hari Bursa berturut-turut.
- j. Apabila hasil pemeringkatan Obligasi mengalami penurunan sehingga hasil pemeringkatan menjadi dibawah idBBB- (*Triple B minus*) dari PT Pefindo atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, maka Perseroan berkewajiban menambah jaminan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang untuk setiap penurunan satu notch hasil pemeringkatan dibawah idBBB- (*Triple B minus*) .
Penambahan jaminan tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penambahan jaminan. Syarat-syarat dan ketentuan mengenai penambahan dan/atau pengikatan jaminan tunduk pada ketentuan huruf i dan Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan.
Apabila hasil pemeringkatan kembali ke minimal idBBB (*Triple B*) dari PT Pefindo atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari Pemeringkat,

Perseroan berhak mengubah nilai jaminan sehingga nilai jaminan menjadi seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.1 Perjanjian Perwalianamanatan;

- k. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku;
- l. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- m. segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
- n. segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis paling lambat dalam waktu bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan triwulanan terdekat dalam hal terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - (i) membuat pinjaman baru (dengan bunga) baik yang dilakukan oleh Perseroan kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - (ii) setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - (iii) setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan pemegang saham utama Perseroan, diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan atas perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan; dan
 - (iv) Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
- o. membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- p. menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - (i) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di OJK dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku;
 - (ii) laporan rasio keuangan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam huruf b beserta uraian penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan dari Wali Amanat baik melalui surat tertulis maupun surat elektronik;
 - (iii) laporan-laporan keuangan internal triwulanan (*unaudited*) Perseroan;
 - (iv) laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah disampaikannya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek;
 - (v) salinan resmi akta Perjanjian Perwalianamanatan dan akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi ini;
 - (vi) data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
 - (vii) setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan ini, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut;
 - (viii) Bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Emiten tentang kejadian-kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;

- 2) Pernyataan bahwa Emiten telah mentaati dan melaksanakan seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam persyaratan Obligasi, Perjanjian Perwalianamanatan atau sesuai dengan persyaratan Obligasi.
 - 3) Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Obligasi menjadi cidera janji sehingga sanksi-sanksi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan menjadi berlaku dan harus dilaksanakan;
 - 4) Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Emiten sehubungan dengan penerbitan Obligasi, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
 - 5) Pernyataan mengenai tidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Emiten yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Obligasi yang pertamakali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut.
- q. memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
 - r. memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Emiten pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Emiten dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Emiten;
 - s. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi oleh Emiten yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Emiten, termasuk dalam hal terjadinya penyitaan oleh pengadilan atau instansi yang berwenang terhadap semua atau sebagian besar harta kekayaan Emiten atau tindakan yang menghalangi Emiten untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - t. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianamanatan yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
 - u. memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwalianamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - v. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
 - w. menerbitkan dan menyerahkan Sertipikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan fotokopi Sertipikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat;
 - x. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
 - (i). Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

- (ii). Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat baru; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- (iii). Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
- (iv). Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf v angka (i) butir i dan angka (ii) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- (v). Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf x angka 1), angka 2), dan angka 3) di atas, wajib dilakukan paling sedikit:
 - i. Situs Web Emiten;
 - ii. Situs Web Bursa Efek.

KELALAIAN PERSEROAN

- a. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - 1) Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - 2) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - 3) Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) dinyatakan lalai dan telah melewati jangka waktu perbaikan (apabila ada) sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian triwulan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 4) Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*); atau
 - 5) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi (selain yang disebutkan pada butir 1);

- b. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
- 1) Huruf a butir 1) tentang kelalaian Perseroan dalam Prospektus ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - 2) Huruf a butir 2) sampai dengan 5) tentang kelalaian Perseroan dalam Prospektus ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
- maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.
- Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Emiten, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
- c. Apabila Perseroan:
- 1) dibubarkan karena sebab apapun atau Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;
 - 2) Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*);
- maka dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya dan Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi berhak mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dengan mengajukan tagihan sebesar Jumlah Terutang kepada Perseroan. Untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
- d. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, tanggungan dan ongkos lain apapun yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan untuk sebagian atau seluruh Obligasi;
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- 8) pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan butir 8), paling sedikit

- memuat informasi tentang:
- a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 14) Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - 15) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
 - 16) Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - 17) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan, mengakibatkan:
 - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, meliputi hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
 - 18) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir 7) dan butir 8) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Perseroan yang sahamnya tercatat dalam bursa efek paling sedikit melalui :
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. Bagi Emiten yang sahamnya tercatat dalam bursa efek paling sedikit melalui :
 1. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
 - b) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/ atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/ atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;
 - d) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020; dan
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah,
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO .
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ;
 - (2) agenda RUPO
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

- e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO:
- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO .
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6) huruf g, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a). Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

- (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (2). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- (5). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.
 - (7). RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil -keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - (8). Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 5 di atas
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan pemanggilan RUPO, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 - 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 - 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 - 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 - 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 - 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 - 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab IX mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-955/PEF-DIR/IX/2022 tanggal 20 September 2022, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idBBB+
(Triple B Plus)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 20 September 2022 sampai dengan 1 September 2023.

Efek utang dengan peringkat idBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang mendukung peringkat adalah:

- **Perkembangan strategi bisnis.** Pefindo mengharapkan penguatan posisi bisnis Perseroan untuk terus meningkat dalam jangka menengah, mengingat perkembangan yang signifikan dari strategi integrasi ekosistem digital Grup, memungkinkan upaya kolaborasi yang lebih baik di antara anak perusahaan BCAP. Selain itu, PT Motion Digital Technology atau MDT yang didirikan pada akhir Februari 2022, dengan fokus memaksimalkan produktivitas produk-produk digital intinya, seperti Motion Banking, Motion Pay, Motion Trade, dan Flash Mobile, akan mempercepat pertumbuhan bisnis BCAP di ekosistem tersebut, terutama memanfaatkan potensi bisnis dari eksposur khalayak Media Grup MNC yang luas. Tanda awal perbaikan terlihat dari kinerja bisnis dan keuangan MNC Bank, anak perusahaan terbesarnya. Total pinjaman MNC Bank tumbuh sebesar 25,7% YoY menjadi Rp9,7 triliun per 1H2022 dari Rp7,7 triliun di 1H2021. Hal ini juga diikuti oleh pertumbuhan deposito yang signifikan sebesar 20,6% YoY menjadi Rp12,0 triliun per 1H2022 dari Rp9,9 triliun di 1H2021. Pertumbuhan bisnis yang signifikan telah meningkatkan indikator keuangan, sebagaimana tercermin dalam laba bersih sebesar Rp34,9 miliar pada 1H2022, dibandingkan dengan Rp4,8 miliar pada 1H2021, dan semakin menguat menjadi Rp42,3 miliar pada Juli 2022 (7M2022). Indikator kualitas aset secara bertahap juga membaik, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) turun menjadi 4,1% di 7M2022 dan 1H2022 dari 4,8% di 1H2021. Mengingat pengembangan dan implementasi ekosistem digital yang berkelanjutan di anak-anak perusahaannya, Pefindo melihat bahwa posisi bisnis MNC Bank sebagai salah satu jangkar utama dari strategi ekosistem yang kemungkinan akan semakin membaik, dan pada gilirannya akan memperkuat posisi bisnis BCAP.
- **Kapitalisasi di atas rata-rata.** Pefindo mengharapkan profil permodalan MNC Kapital tetap di atas rata-rata, jika MNC Kapital dan anak perusahaannya mempertahankan pertumbuhan bisnis yang moderat tanpa menimbulkan utang baru dalam jumlah yang signifikan. Pefindo memproyeksikan rasio utang terhadap ekuitas (DER) konsolidasi tetap di bawah 2,5x dalam jangka pendek hingga menengah, sejalan dengan angka historis 1,9x–2,2x. Basis ekuitas MNC Kapital yang cukup besar sebesar Rp6,1 triliun pada 7M2022 dan Rp6,0 triliun pada 1H2022 dibangun di atas serangkaian suntikan modal melalui right issue. Selain itu, telah mempertahankan indikator permodalan yang sangat kuat di tingkat Induk saja, dengan DER di bawah 0,2x selama tahun-tahun yang ditinjau. Leverage yang rendah ini akan memberikan bantalan yang lebih dari cukup untuk menyerap risiko bisnis dan membiayai ekspansi di masa depan.
- **Likuiditas dan fleksibilitas finansial yang memadai.** Pefindo memandang Perseroan memiliki posisi likuiditas yang memadai dengan rasio aset likuid terhadap total liabilitas yang terjaga rata-rata lebih dari 110% selama tahun-tahun yang ditinjau, menunjukkan kapasitas yang memadai untuk membayar liabilitasnya, dan Pefindo memproyeksikannya akan berkelanjutan dalam waktu dekat. hingga jangka menengah. Rasio aset likuid terhadap total kewajiban tercatat sebesar 115,1% pada 7M2022, relatif stabil dibandingkan dengan 1H2022 dan FY2021 masing-masing sebesar 116,5% dan 116,8%. Selain itu, posisi kasnya tetap tinggi di Rp2,1 triliun di 7M2022 dan Rp2,8 triliun di 1H2022. Selain itu, mempertahankan posisi surat berharga yang substansial sebesar Rp4,9 triliun pada 7M2022 dan Rp4,4 triliun pada 1H2022, sebagai bantalan tambahan untuk menyerap guncangan likuiditas yang tidak terduga. Selain itu, anak perusahaan MNC Kapital juga telah memperoleh jalur pendanaan dari bank dan lembaga keuangan, dengan fasilitas kredit yang belum dicairkan sebesar Rp1,8 triliun per 1H2022. Mengingat rekam jeaknya yang baik di pasar utang dan pasar modal, Pefindo berpandangan bahwa MNC Kapital dan anak perusahaannya

memiliki fleksibilitas keuangan untuk melakukan aktivitas penggalangan dana melalui penawaran umum perdana, rights issue, atau penerbitan utang jika diperlukan.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat adalah:

- **Akses tidak langsung terhadap arus kas operasional Entitas anak**. Sebagai perusahaan induk investasi non-operasional, MNC Kapital memiliki arus kas operasi mandiri yang terbatas, dan umumnya mengandalkan pembayaran dividen dari anak perusahaan sebagai sumber pembayaran utama kepada krediturnya. Dengan struktur seperti itu, posisi MNC Kapital dianggap ter subordinasi kepada entitas anak dalam memenuhi kewajiban keuangannya terlebih dahulu kepada kreditor. Mengingat beberapa anak perusahaan MNC Kapital terus berjuang untuk meningkatkan kinerja profitabilitas mereka, kapasitas mereka dalam memberikan kontribusi dividen yang cukup kepada MNC Kapital juga terbatas, yang mengarah pada pandangan Pefindo bahwa kemampuan pembayaran kembali MNC Kapital juga bergantung pada jumlah aset likuid di level holding, serta dana eksternal dari rencana aksi korporasinya.
- **Implementasi strategi sinergi grup yang belum kuat**. Pefindo menganggap indikator profitabilitas BCAP moderat, terutama disebabkan oleh kinerja beberapa anak perusahaan yang tidak maksimal, terutama yang bergerak di bidang asuransi dan pembiayaan non-bank. Perusahaan di kedua sektor ini masih dalam proses pemulihan bisnis dan membangun infrastruktur untuk memanfaatkan potensi bisnis dalam ekosistem MNC Group. Anak perusahaan asuransi BCAP mencatat rasio gabungan yang tinggi di atas 90% pada 7M2022 dan 1H2022, sementara perusahaan pembiayaan membukukan rasio biaya terhadap pendapatan yang tinggi di atas 80% dan rasio pengembalian rata-rata aset (ROAA) yang moderat sekitar 3% pada periode yang sama. Mengingat tahapan mereka dalam strategi sinergi, Pefindo berpandangan bahwa kontribusi dari anak-anak perusahaan ini terhadap kinerja profitabilitas BCAP secara keseluruhan akan tetap tidak signifikan dalam jangka pendek hingga menengah. Indikator profitabilitas BCAP yang moderat juga tercermin dari return on average assets (ROAA) masing-masing sebesar 0,5% dan 0,7% pada 1H2022 dan FY2021, yang dianggap rendah dalam kategori peringkatnya.
- **Volatilitas di pasar modal dan investasi**. Pefindo berpandangan bahwa pasar modal dan investasi kemungkinan akan terus bergejolak dalam jangka menengah, yang berasal dari gejolak pasar dan variabel ekonomi makro, seperti nilai tukar mata uang asing, suku bunga global, harga komoditas, prospek pertumbuhan, dan kebijakan fiskal. MNC Kapital dan anak perusahaannya juga terkena volatilitas pasar ini. Mengingat persaingan pasar yang ketat, setiap pergerakan dana oleh beberapa klien institusional besar juga dapat mempengaruhi anak perusahaan MNC Kapital, terutama MNC Sekuritas dan MNC Asset Management, yang meningkatkan risiko volatilitas secara keseluruhan. Selain itu, investasi saham MNC Insurance dan MNC Life juga cukup besar yaitu sekitar 30% dari total portofolio investasi masing-masing perusahaan, sehingga rentan terhadap volatilitas pasar, terutama untuk profil risiko likuiditas ketika pasar berada dalam tren penurunan.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan Obligasi.

Alamat Wali Amanat
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Investment Services Division
Trust Team
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 – Indonesia
Email: tcsoperation@corp.bri.co.id
Tel. (021) 250 0124, 575 8143
Faks. (021) 251 0316, 575 2444

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat.

PERWALIAMANATAN

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan dan Pembelian Obligasi dalam Prospektus ini.

B. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014:

1. Telah menjadi emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke - 2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tanggal 13 September 2022 dan surat pernyataan yang dibuat oleh Akuntan No. B-152/GN/FD/KPS-SUD/IX/2022 tanggal 21 September 2022.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 45% kepada PT MNC Sekuritas yang selanjutnya akan digunakan sebagai tambahan modal kerja yaitu untuk mendukung ekspansi usaha perusahaan berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk transaksi perdagangan efek.
2. Sekitar 33% kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pemberian pembiayaan berupa anjak piutang dan sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan alat berat seperti *eskavator, loader, dozer, crane*, dan lain-lain yang digunakan oleh debitur-debitur PT MNC Guna Usaha Indonesia di sektor Infrastruktur, perkebunan dan pertambangan serta sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan alat-alat kesehatan dan mesin industri bagi debitur PT MNC Guna Usaha Indonesia yang bergerak di industri alat kesehatan dan industri manufaktur, baik secara pembelian secara angsuran, sewa pembiayaan dan/atau *sale and leaseback* yang telah dijalankan dan terus dikembangkan sesuai dengan permintaan pelanggan/pihak ketiga di kemudian hari.
3. Sekitar 22% kepada PT MNC Finance yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembiayaan kepada konsumen berupa pembiayaan mobil, rumah dan anjak piutang yang telah dijalankan dan terus dikembangkan sesuai dengan permintaan pelanggan/pihak ketiga di kemudian hari.

Berapapun jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Obligasi ini, maka jumlah pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan akan menggunakan persentase yang sama seperti di atas. Selanjutnya, dalam hal dana tersebut telah dikembalikan oleh Entitas Anak kepada Perseroan, maka akan digunakan Perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.

Penggunaan dana hasil PUB Obligasi III Tahap I sebagaimana tersebut diatas, terkualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No.42/2020”), yaitu transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh Sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 POJK No.42/2020, Perseroan wajib melaporkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada OJK pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

Apabila pada saat realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebagaimana tersebut diatas, termasuk sebagai Transaksi Benturan Kepentingan, maka transaksi tersebut terkualifikasi sebagai Transaksi Benturan Kepentingan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.1 POJK No.42/20, yaitu transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) POJK No.42/2020, Perseroan wajib melaporkan Transaksi Benturan Kepentingan tersebut kepada OJK pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal Transaksi Benturan Kepentingan.

Apabila pada saat realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebagaimana tersebut diatas, nilai transaksi adalah sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan terkini dari : (i) Laporan Keuangan yang diaudit, (ii) laporan keuangan triwulanan yang disertai laporan akuntan atas hasil revidu ataupun audit, atau (iii) laporan keuangan interim selain angka (ii) yang diaudit, maka transaksi tersebut terkualifikasi sebagai Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”), yaitu transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) POJK No.17/2020, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada OJK pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal Transaksi Material.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan Otoritas Jasa Keuangan serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017, total biaya (belum termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan emisi Penawaran Umum Obligasi ini kurang lebih setara dengan 1,18% (satu koma satu delapan persen) dari nilai emisi yang meliputi:

1. Biaya jasa penjamin pelaksana emisi (*management fee*) sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).
2. Biaya penjaminan emisi (*underwriting fee*) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
3. Biaya penjualan (*selling fee*) sebesar 0,30% (nol koma tiga nol persen).
4. Biaya jasa untuk lembaga penunjang pasar modal: 0,12% (nol koma satu dua persen), yang terdiri dari:
 - a. Biaya jasa Wali Amanat: 0,05% (nol koma nol lima persen); dan
 - b. Biaya jasa Pemingkat Efek: 0,07% (nol koma nol tujuh persen).
5. Biaya jasa untuk profesi penunjang pasar modal: 0,14% (nol koma satu empat persen), yang terdiri dari:
 - a. Biaya jasa Konsultan Hukum 0,09% (nol koma nol sembilan persen);
 - b. Biaya jasa Notaris: 0,02% (nol koma nol dua persen); dan
 - c. Biaya jasa Akuntan Publik: 0,03% (nol koma nol tiga persen).
6. Biaya Pernyataan Pendaftaran, Pendaftaran dan Pencatatan Efek: 0,09% (nol koma nol sembilan persen), yang terdiri dari:
 - a. Biaya KSEI: 0,01% (nol koma nol satu persen);
 - b. Biaya BEI: 0,03% (nol koma nol tiga persen); dan
 - c. Biaya OJK: 0,05% (nol koma nol lima persen).
7. Biaya lain-Lain (percetakan, iklan, dan lain-lain): 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018, sebagaimana telah dilaporkan pada Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 melalui surat No. 003/MNC-KI/DIR/I/19 tanggal 15 Januari 2019, sampai saat ini Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 Juni 2022, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 Juni 2022 dan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang dicantumkan dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 28 November 2022 dan ditandatangani oleh Florus Daeli SE, Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP, ASEAN CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0126.

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp16.586.323 juta. Rincian dari liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
LIABILITAS	
Simpanan	
Pihak berelasi	1.426.641
Pihak ketiga	10.440.230
Simpanan dari bank lain	61.359
Liabilitas segera	96.708
Utang kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	369.354
Utang Nasabah	416.805
Utang reasuransi dan utang lain-lain	302.998
Utang pajak	25.548
Liabilitas kontrak asuransi dan investasi	659.614
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	931.265
Utang Al-Musyarakah	194.576
Utang Al-Mudharabah	7.685
Utang obligasi	299.419
Utang sewa pembiayaan	10.975
Liabilitas imbalan pasca kerja	58.029
Liabilitas lain-lain	1.285.117
JUMLAH LIABILITAS	16.586.323

1. Simpanan

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
Keterangan	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah
Deposito Berjangka	1.182.635	7.793.894	8.976.529
Tabungan	38.001	1.657.049	1.695.050
Giro	206.005	989.287	1.195.292
Jumlah	1.426.641	10.440.230	11.866.871

2. Simpanan dari bank lain

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Giro	12.105
Tabungan	30.504
Deposito Berjangka	18.750
Jumlah	61.359

3. Utang Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Utang nasabah	357.288
Premi diterima dimuka	33.554
Uang muka dan angsuran	25.499
Utang dealer	464
Jumlah	416.805

4. Utang reasuransi dan utang lain-lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang reasuransi	39.319
Utang klaim	9.421
Biaya yang masih harus dibayar	234.753
Bunga yang masih harus dibayar	
Simpanan	15.842
Simpanan dari bank lain	13
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	3.650
Jumlah	302.998

Utang reasuransi untuk MNCAI adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Harta benda	1.251
Penerbangan	1.996
Rekayasa	1.007
Aneka	2.859
Jumlah	7.113

Utang reasuransi untuk MNCL adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Maskapai Reasuransi Indonesia	27.349
PT Tugu Reasuransi Indonesia	2.840
PT Reasuransi Nasional Makmur	148
PT Reasuransi Nusantara Makmur	1.869
Jumlah	32.206

Utang klaim untuk MNCAI adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Harta benda	674
Kendaraan bermotor	1.618
Rekayasa	-
Pengangkutan	-
Aneka	4.722
Jumlah	7.014

Utang klaim untuk MNCL adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kematian	830
Kesehatan	253
Dwiguna	1.322
Jumlah	2.405

5. Utang pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 21	2.109
Pasal 25	0
Pasal 23	770
Pasal 26	108
Pasal 29	6.633
Pasal 4 ayat 2	9.023
Transaksi Perdagangan Saham	4.059
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	2.846
Jumlah	25.548

6. Liabilitas kontrak asuransi dan investasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas kontrak asuransi	
MNCAI	395.937
MNCL	76.442
Subjumlah	472.379
Liabilitas kontrak investasi	
Estimasi klaim sendiri	187.235
Jumlah	659.614

Liabilitas kontrak asuransi untuk MNCAI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Premi yang belum merupakan pendapatan	93.126
Estimasi liabilitas klaim	186.918
Cadangan premi	115.893
Jumlah	395.937

a) Premi yang belum merupakan pendapatan

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Harta benda	39.454
Kendaraan bermotor	29.432
Rekayasa	12.157
Tanggung gugat	3.154
Satelit	3.566
Penerbangan	3.274
Pengangkutan	131
Aneka	1.958
Jumlah	93.126

b) Estimasi liabilitas klaim

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Harta benda	90.750
Rekayasa	55.768
Kendaraan bermotor	15.584
Pengangkutan	2.358
Aneka	22.458
Jumlah	186.918

c) Cadangan premi

Keterangan	Jumlah
Kendaraan bermotor	72.114
Rekayasa	38.205
Harta benda	5.381

Keterangan	Jumlah
Aneka	193
Jumlah	115.893

Laporan perhitungan liabilitas kontrak asuransi untuk 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastara, aktuaris independen.

Liabilitas kontrak asuransi untuk MNCL

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Estimasi liabilitas klaim	62.530
Premi yang belum merupakan pendapatan	13.912
Jumlah	76.442

a) Estimasi liabilitas klaim

Keterangan	Jumlah
Kematian	6.284
Jatuh tempo	50.041
Kesehatan	6.205
Jumlah	62.530

b) Premi yang belum merupakan pendapatan

Keterangan	Jumlah
Kematian	10.318
Kesehatan	3.594
Jumlah	13.912

7. Utang bank dan institusi keuangan non-bank

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	240.534
PT Bank Sahabat Sampoerna	144.150
PT Bank Victoria International Tbk	144.509
PT Bank Capital Indonesia Tbk	125.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	89.347
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	69.745
PT Bank Ganesha Tbk	60.087
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	26.205
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	12.725
PT Bank OK Indonesia	9.881
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	7.855
PT Bank Mayora	960
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	267
Jumlah	931.265

Utang Bank

MNCF memiliki fasilitas pinjaman yang digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan konsumen yang diperoleh dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang			Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2022			
PT Bank Capital Indonesia Tbk	76.000	-	8.765	-	25 Maret 2023	15,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%
PT Bank Victoria International Tbk	128.000	101.909	106.622	114.700	30 November 2027	10,00% - 13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%
	72.000	-	-	12.000	13 Oktober 2021	13,00%	

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang			Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2022			
	50.000	-	-	2.336	12 Oktober 2021	12,00%	
	100.000	-	-	558	21 Agustus 2021	13,00%	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	200.000	89.347	109.229	138.493	22 Juli 2026	10,25% - 11,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105%
	500.000	-	-	1.840	29 Juni 2021	10,00% - 13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105%
	30.000	26.585	-	-	28 Januari 2028	12,00%	Piutang pembiayaan otomotif dan rumah masing-masing 150% dan 100%
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	50.000	32.881	41.606	-	11 Mei 2027	11,00%	Piutang pembiayaan rumah 100%
	50.000	-	369	8.703	29 Juni 2022	12,00%	Piutang pembiayaan otomotif dan rumah masing-masing 150% dan 100%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	36.880	26.205	27.668	30.171	20 Desember 1931	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%
	200.000	-	-	2.659	20 April 2022	11,25% - 12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105%
PT Bank ICBC Indonesia	100.000	-	400	10.153	28 Desember 2022	12,00%	Piutang pembiayaan otomotif sebesar 120% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 100%
	5.000	4.817	-	-	22 September 2025	10,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%
PT Bank Ganesha Tbk	15.000	1.873	3.673	6.935	29 Desember 2023	12,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%
	10.000	7.710	7.154	-2.993	15 Juli 2025	11,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%
	35.000	-	-	-	31 Maret 2021	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%
PT Bank Oke Indonesia Tbk	10.000	9.881	9.879	2.036	15 April 2023	10,00%	Aset tetap
	20.000	-	-	3.052	11 Oktober 2021	12,00% - 12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%
PT Bank Mayora	20.000	960	2.714	5.079	29 November 2023	11,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%
PT Bank KEB Hana Indonesia	50.000	-	494	3.270	21 Februari 2022	12,00%	Piutang pembiayaan otomotif sebesar 110% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 100%
Jumlah		302.168	318.573	344.978			

MNCGUI memiliki fasilitas pinjaman yang digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan sewa guna usaha yang diperoleh dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang			Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		30 Juni 2022	31 Desember 2021	2020			
PT Bank Capital Indonesia Tbk	50.000	50.000	50.000	50.000	13 Februari 2023	13,00%	Piutang sewa pembiayaan sebesar 105%
	10.000	-	-	2.500	13 Februari 2021	15,50	Piutang sewa pembiayaan sebesar 110%
PT Bank Victoria International Tbk	50.000	42.600	28.400	44.174	8 Agustus 2022	12,00%	Piutang sewa pembiayaan sebesar 110%
	50.000	-	-	2.778	8 Agustus 2021	12,75%	Piutang sewa pembiayaan sebesar 110%
PT Bank Sahabat Sampoerna	200.000	144.150	149.775	138.886	31 Juli 2023	13,00%	Piutang sewa pembiayaan 120%
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	30.000	27.091	-	-	24 Februari 2025	12,00%	Piutang sewa pembiayaan sebesar 100%
	50.000	28.977	38.292	-	23 Maret 2025	12,00%	Piutang sewa pembiayaan sebesar 100%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	30.000	267	3.289	15.222	30 Agustus 2022	13,00%	Piutang sewa pembiayaan sebesar 100%
	50.000	-	-	10.373	21 November 2021	13,00%	Piutang sewa pembiayaan sebesar 100%
	38.000	-	-	1.928	22 Maret 2021	12,50%	Piutang sewa pembiayaan sebesar 105%
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	35.000	-	167	13.324	20 Januari 2022	12,75%	Piutang sewa pembiayaan sebesar 100%
	50.000	-	-	8.180	10 Juli 2021	12,00%	Piutang sewa pembiayaan sebesar 100%
	20.000	20.000	-	-	28 Juni 2025	10,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%
PT Bank Ganesha Tbk	30.000	25.687	30.000	-	29 Desember 2024	11,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%
PT Bank Central Asia Tbk	12.000	-	11.982	4.804	30 Oktober 2022	0,7% dari suku bunga deposito	Penempatan deposito
PT Bank Harda Internasional Tbk	10.000	-	682	4.177	11 April 2022	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	100.000	12.725	16.308	-	16 April 2024	12,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 120%
Jumlah		351.497	328.895	296.346			

MNCS memiliki fasilitas pinjaman yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang			Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		30 Juni 2022	31 Desember 2021	2020			
PT Bank Capital Indonesia Tbk	75.000	75.000	75.000	75.000	7 Juli 2023	9,50%	Jaminan perusahaan
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	125.000	125.000	125.000	100.000	28 Mei 2023	12,00%	Penempatan deposito
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	70.000	69.745	70.000	79.883	2 Februari 2023	12,00%	Sebagian saham "KPIG" sebesar Rp50.000 juta dan jaminan perusahaan
Jumlah		269.745	270.000	254.883			

Utang Institusi Keuangan Non-Bank

MNCF memiliki fasilitas pinjaman yang digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan konsumen yang diperoleh dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang			Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		30 Juni 2022	31 Desember 2021	2020			
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	35.000	4.638	5.099	6.109	20 April 2025	11,00% - 11,88%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 120%
	100.000	2.381	3.145	4.087	20 Januari 2025	9,00% - 9,25%	
	50.000	836	1.054	1.460	15 Juli 2024	10,84% - 11,10%	
Jumlah		7.855	9.298	11.656			

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank JTrust Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Bank Ganesha Tbk, PT Bank Harda Internasional Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Entitas anak wajib memelihara rasio rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10:1.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima dari PT Bank Sahabat Sampoerna, PT Bank OK Indonesia, PT Bank Mayora, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia dan PT Bank Victoria International Tbk, Entitas anak wajib memelihara rasio rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 8:1.

Selain rasio keuangan di atas, Entitas Anak wajib:

- menyampaikan laporan keuangan (setiap bulan, triwulan dan/atau semester).
- menginformasikan kepada Kreditor apabila terdapat perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham.
- menginformasikan kepada Kreditor setiap perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditor.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Entitas Anak telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di dalam perjanjian pinjaman.

Berikut adalah pembayaran utang bank dan institusi keuangan non-bank, pada tanggal 30 Juni 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	399.975
PT Bank Capital Indonesia Tbk	159.000
PT Bank Victoria International Tbk	77.525

Keterangan	Jumlah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54.936
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	31.614
PT Bank Jabar Banten Tbk	19.420
PT Bank Central Asia Tbk	11.982
PT Bank Ganesha Tbk	5.486
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.215
PT Bank KEB Hana Indonesia	507
PT Bank ICBC Indonesia	410
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	167
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 10 milyar)	27.459
Jumlah	789.696

8. Utang Al-Musyarakah

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	193.723
PT Bank BCA Syariah Tbk	643
PT Bank BRISyariah Tbk	210
Jumlah	194.576

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang			Tanggal Jatuh Tempo	Nisbah	Jaminan
		30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020			
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	200.000	193.723	176.770	181.491	6 Juni 2023	11,75	Piutang pembiayaan Al - Musyarakah atas Motor dan Mobil, serta Alat Berat masingmasing sebesar 110% & 120%
PT Bank BCA Syariah Tbk	20.000 60.000	643 -	1.805 -	5.365 5.965	23 Mei 2024 20 April 2022	12,50% 11,50% - 14,50%	Piutang pembiayaan Al-Musyarakah sebesar 111,11%
PT Bank BRISyariah Tbk	80.000	210	678	1.542	5 Juli 2023	12,00%	Fidusia piutang Al-Musyarakah sebesar minimal 105%
PT Bank BNI Syariah Tbk	100.000	-	-	528	17 Juli 2021	11,00%	Fidusia piutang Al-Musyarakah sebesar minimal 105%
Jumlah		194.576	179.253	194.891			

9. Utang Al-Mudharabah

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	2.806
PT Bank Kalimantan Selatan Syariah	4.879
Jumlah	7.685

MNCGUI memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang			Tanggal Jatuh Tempo	Nisbah	Jaminan
		30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020			
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	75.000	2.806	3.065	548	5 Januari 2027	12,00%	Piutang pembiayaan Al-Mudharabah sebesar 100%

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang			Tanggal Jatuh Tempo	Nisbah	Jaminan
		30 Juni 2022	31 Desember 2021	2020			
PT Bank Kalimantan Selatan Syariah PT	15.000	4.879	-	-	27 April 2027	11,85%	Piutang pembiayaan Al-Murabahah sebesar 100%
Bank Jateng Syariah	40.000	-	-	452	7 April 2021	11,50%	Piutang pembiayaan Al-Murabahah sebesar 105%
Jumlah		7.685	3.065	1.000			

10. Utang Obligasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia	300.000
Dikurangi biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(581)
Sub jumlah	299.419
Dikurangi bagian jangka pendek	(299.419)
Bagian jangka panjang	-

Pada tanggal 8 Juni 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya NO. S-70/D.04/2018 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia dengan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 500.000 juta, dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,5% per tahun. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perusahaan menerbitkan Obligasi berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia tahap I Tahun 2018 yang berjangka waktu 5 tahun, dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, pihak ketiga, sebagai agen penjamin dan agen pemantau. Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Juli 2018, dengan pokok obligasi sebesar Rp 300.000 juta, yang dananya diterima pada tanggal 3 Juli 2018.

Pembayaran bunga Obligasi dilakukan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2018.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan II mempunyai rating id BBB+ (*Triple B plus*).

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perseroan harus memelihara beberapa persyaratan, antara lain, (1) memelihara rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 2:1, (2) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman minimal 1:1 dan (3) menjaga saham Entitas dikendalikan atau Entitas dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% oleh PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk) selama jangka waktu obligasi.

Entitas telah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas.

11. Utang Sewa Pembiayaan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Toyota Astra Finance	10.424
PT Maybank Indonesia Finance	476
PT Mandiri Tunas Finance	75
Jumlah	10.975

PT Toyota Astra Finance

Fasilitas pinjaman yang dimiliki MNC GUI berjangka waktu 36 bulan, dengan beragam pencairan sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan 13 Agustus 2021. Pada 30 Juni 2022, fasilitas ini mempunyai beragam tanggal pelunasan dengan tanggal pelunasan yang paling lama pada 12 Oktober 2025. Utang ini dijamin dengan kendaraan bermotor yang dibeli dimana tingkat bunga yang dibebankan adalah 9,50%-10,90% per tahun.

PT Maybank Indonesia Finance

Fasilitas pinjaman yang dimiliki MNCGUI dengan plafon sebesar Rp 3.000 juta dengan jangka waktu 36 bulan sejak tanggal penarikan dan tingkat bunga 11,53% per tahun.

PT Mandiri Tunas Finance

Fasilitas pinjaman yang dimiliki MNCGUI berjangka waktu 36 bulan, dengan beragam tanggal pencairan sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2020. Pada 30 Juni 2022, fasilitas ini mempunyai beragam tanggal pelunasan dengan tanggal pelunasan yang paling lama pada 3 Juni 2023. Utang ini dijamin dengan kendaraan motor yang dibeli, dimana tingkat bunga yang dibebankan adalah 10,00%-12,00% per tahun.

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sampai dengan 1 tahun	4.985
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	7.563
Jumlah	12.548
Bunya yang belum jatuh tempo	(1.573)
Utang sewa pembiayaan	10.975
Bagian jatuh tempo dalam 1 tahun	(4.225)
Bagian jangka panjang	6.750

12. Liabilitas Imbalan pasca-kerja

Program Iuran Pasti

BMNCI menyelenggarakan program iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh DPLK Manulife Indonesia. Iuran ini berasal dari 2,00% gaji pokok yang dibayarkan karyawan dan 3,50% sampai 10,00% dibayarkan oleh BMNCI per bulan.

Imbalan Pasca Kerja - Imbalan Pasti

Kelompok Usaha memberikan imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasti pasca-kerja masing-masing 2.207, 2.146 dan 2.049 karyawan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Diakui pada laba rugi	
Biaya jasa kini	4.997
Beban bunga neto	2.242
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	7.239
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto	
Keuntungan atas penyesuaian pengalaman	(3.103)
Keuntungan atas perubahan asumsi keuangan	(2.909)
Jumlah	1.227

Jumlah tercatat di laporan posisi keuangan konsolidasian yang timbul dari liabilitas terkait dengan imbalan kerja selain pensiun iuran pasti adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Imbalan pasca-kerja	57.163
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	866
Jumlah	58.029

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja sebagai berikut:

Keterangan	Imbalan pasca-kerja	Imbalan Kerja jangka Panjang Lainnya	Jumlah
Kewajiban imbalan pasti - awal	56.269	729	56.998
Biaya jasa kini	4.997	130	5.127
Biaya bunga	2.242	25	2.267
Pengukuran kembali (keuntungan)/kerugian:			
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(2.909)	(22)	(2.931)
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(3.103)	4	(3.099)
Pembayaran manfaat	(333)	-	(333)
Jumlah	57.163	866	58.029

Perhitungan imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain pada tanggal 30 Juni 2022 dihitung oleh aktuaris independen, Padma Radya Aktuarial dan Steven & Mourist.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto per tahun	7,65% - 7,75%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%
Tingkat kematian	100% TMI IV

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 100 basis poin, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp53.487 juta (meningkat sebesar Rp61.287 juta).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar Rp62.124 juta (turun sebesar Rp51.227 juta).

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 10 sampai 20 tahun.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

13. Liabilitas Lain-lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas surat berharga repo	69.619
Liabilitas lainnya	1.215.498
Jumlah	1.285.117

Liabilitas surat berharga repo

(dalam jutaan Rupiah)

Tanggal mulai	Nilai Pokok	Bunga	Tanggal jatuh tempo
7 September 2022	40.000	17,50%	7 Desember 2022
15 Agustus 2022	20.160	16,00%	14 November 2022
7 September 2022	9.459	16,00%	7 Desember 2022
Jumlah	69.619		-

Komitmen dan Kontijensi

Entitas anak – BMNCI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Komitmen	
Tagihan Komitmen	
Pembelian berjangka valuta asing	265.572
Liabilitas Komitmen	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(523.937)
Penjualan tunai valuta asing yang belum diselesaikan	(265.873)
Jumlah Liabilitas Komitmen	(789.810)
Jumlah Liabilitas Komitmen - bersih	(524.238)
Kontijensi	
Tagihan Kontinjensi	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	419.026
Liabilitas Kontinjensi	
Bank garansi	(146.408)
Jumlah Tagihan Kontinjensi - Bersih	272.618
Lainnya	
Kredit hapus buku	1.171.116

Entitas anak – MNCS

MNCS merupakan salah satu tergugat bersama dengan 17 tergugat lainnya dalam gugatan perkara No.128/PDT.G/2019/PN.JKT.PST. Pada tanggal 22 September 2020, MNCS memenangkan perkara yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara No.128, penggugat kemudian mengajukan banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta. Pada tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan keputusan banding No. 62, perusahaan telah mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 18 Juni 2021. Sampai dengan penerbitan pelaporan keuangan, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung dan belum ada putusan apapun terhadapnya, sehingga belum ada dampak materiil apapun terhadap perusahaan.

Entitas anak – MNCAM

MNCAM merupakan salah satu Terdakwa Korporasi dalam perkara No. 64/PID.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Agustus 2021 yang diajukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan, proses hukum masih berjalan dengan agenda pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Perusahaan dan para Terdakwa Korporasi lainnya).

TIDAK ADA PINJAMAN YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK YANG MATERIAL DAN/ATAU UNTUK KEPENTINGAN YANG MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA PER TANGGAL 30 JUNI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN DARI TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI MENYATAKAN:

- 1. DALAM LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR DAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**
- 2. TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN BAIK PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**
- 3. TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**
- 4. TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 28 November 2022 dan ditandatangani oleh Florus Daeli SE, Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP, ASEAN CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0126.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 31 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Harris Siregar CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0524 dan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 7 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Barugamuri Dachi M., Ak., CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1150.

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK. Informasi keuangan tersebut didisajikan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember	
	2022 *)	2022	2021	2020
ASET				
Kas dan setara kas	2.492.437	2.761.476	2.827.492	1.758.171
Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	8.487	8.445	8.353	8.103
Piutang dari Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	300.479	325.012	291.740	340.136
Piutang nasabah	495.542	461.452	474.897	680.541
Efek-efek				
Pihak berelasi	366.567	390.488	274.461	349.897
Pihak ketiga	4.402.667	4.061.015	4.308.196	3.695.181
Piutang pembiayaan				
Pihak berelasi	250.958	198.786	208.289	180.993
Pihak ketiga	1.268.623	1.381.693	1.317.356	1.390.494
Cadangan kerugian penurunan nilai Kredit	(12.576)	(12.339)	(13.338)	(15.447)
Pihak ketiga	9.944.252	9.559.927	8.422.485	7.051.743
Cadangan kerugian penurunan nilai Piutang pembiayaan Murabahah	(265.235)	(248.848)	(218.438)	(223.144)

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember	
	2022 *)	2022	2021	2020
Pihak berelasi	77	377	1.654	4.768
Pihak ketiga	19.262	25.515	3.674	89
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9)	(9)	-	(12)
Piutang pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah				
Pihak ketiga	48.330	35.541	21.610	13.316
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35)	(14)	(7)	(342)
Piutang Hawalah bil-Ujrah				
Premi dan aset reasuransi				
Pihak berelasi	14.676	10.534	28.473	43.458
Pihak ketiga	387.054	371.123	304.095	310.482
Cadangan kerugian penurunan nilai	(34.781)	(34.781)	(34.781)	(34.031)
Aset tetap - bersih	172.569	180.195	181.972	204.704
Aset Al - Ijarah - bersih	-	-	-	240
Aset tak berwujud - bersih	166.238	167.461	153.290	141.601
Goodwill	369.443	369.443	369.443	369.443
Aset pajak tangguhan	393.770	391.673	380.742	387.845
Aset lain-lain	2.515.634	2.243.089	2.342.310	2.443.317
Jumlah Aset	23.304.429	22.647.254	21.653.968	19.101.546
LIABILITAS				
Simpanan				
Pihak berelasi	1.502.231	1.426.641	1.524.695	753.682
Pihak ketiga	10.493.643	10.440.230	9.598.751	8.315.127
Simpanan dari bank lain	193.371	61.359	130.675	490.103
Liabilitas segera	67.365	96.708	69.299	173.797
Utang kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	393.201	369.354	385.506	421.663
Utang Nasabah	379.195	416.805	347.083	498.855
Utang reasuransi dan utang lain-lain	351.639	302.998	248.233	232.033
Utang pajak	28.535	25.548	29.696	25.398
Liabilitas kontrak asuransi dan investasi	636.050	659.614	573.363	534.608
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	1.013.823	931.265	926.766	976.791
Utang Al-Musyarakah	186.652	194.576	179.253	194.891
Utang Al-Mudharabah	7.274	7.685	3.065	1.000
Utang obligasi	298.983	299.419	299.155	298.673
Utang sewa pembiayaan	9.708	10.975	13.705	9.523
Liabilitas imbalan pasca kerja	59.704	58.029	56.998	77.035
Liabilitas lain-lain	1.627.295	1.285.117	1.259.914	1.004.533
Jumlah Liabilitas	17.248.669	16.586.323	15.646.157	14.007.712
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				
Modal dasar - 150.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	4.261.885	4.261.885	4.261.885	3.976.085
Tambahan modal disetor	1.312.867	1.312.867	1.312.867	1.184.910
Modal lain-lain - opsi saham karyawan	-	-	-	26.532
Komponen ekuitas lainnya	(752.592)	(732.646)	(712.210)	(729.604)
Saldo laba:				
Ditentukan penggunaannya	3.500	3.500	3.500	3.500
Belum ditentukan penggunaannya	481.621	467.489	413.269	271.088
Dikurangi biaya perolehan saham yang diperoleh kembali	(109.285)	(109.285)	(126.033)	(126.033)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				
Pemilik entitas induk	5.197.996	5.203.810	5.153.278	4.606.478
Kepentingan non-pengendali	857.764	857.121	854.533	487.356
Jumlah Ekuitas	6.055.760	6.060.931	6.007.811	5.093.834

*) Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember	
	2022 *)	2021 *)	2022	2021 *)	2021	2020
PENDAPATAN						
Pendapatan bunga dan dividen	1.201.144	1.066.994	804.277	713.727	1.531.716	1.618.002
Pendapatan pasar modal	275.901	293.122	199.020	203.333	433.796	150.151
Pendapatan premi bersih	271.616	294.319	177.331	174.310	371.512	427.158
Pendapatan digital	200.559	68.920	145.062	45.768	144.590	72.123
Pendapatan pembiayaan syariah	10.406	20.451	6.293	14.352	27.408	31.456
Pendapatan operasional lainnya	118.768	177.014	54.541	130.085	226.120	358.342
Jumlah Pendapatan	2.078.394	1.920.820	1.386.524	1.281.575	2.735.142	2.657.232
BEBAN						
Beban umum dan administrasi	989.242	954.195	644.513	637.212	1.233.850	1.045.425
Beban bunga	515.990	603.370	336.768	401.139	794.941	903.740
Klaim dan manfaat	250.580	178.156	168.875	119.338	224.720	448.869
Penurunan nilai	117.190	38.329	77.868	30.642	83.660	77.187
Komisi neto	18.671	5.511	9.825	2.966	23.753	8.187
Beban bagi hasil syariah	16.906	790	11.278	639	23.094	5.699
Beban administrasi	3.505	4.752	2.286	3.281	6.392	7.341
Lain-lain - bersih	73.449	108.972	68.618	73.686	177.685	76.170
Jumlah Beban	1.985.533	1.894.075	1.320.031	1.268.903	2.568.095	2.572.618
Laba sebelum pajak penghasilan	92.861	26.745	66.493	12.672	167.047	84.614
Manfaat (Beban) pajak - bersih	(9.644)	(596)	(3.733)	3.290	(19.877)	(19.089)
Laba bersih periode berjalan	83.217	26.149	62.760	15.962	147.170	65.525
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	4.687	-	4.721	-	2.337	1.997
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi						
Kerugian dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(38.450)	(42.555)	(21.767)	(31.867)	(6.021)	(4.294)
Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(33.763)	(42.555)	(17.046)	(31.867)	(3.684)	(2.297)
Laba (rugi) komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	49.454	(16.406)	45.714	(15.905)	143.486	63.228
Laba bersih yang diatribusikan kepada						
Pemilik entitas induk	68.352	23.252	54.220	12.738	142.181	62.078
Kepentingan non pengendali	14.865	2.898	8.540	3.224	4.989	3.447
Jumlah	83.217	26.150	62.760	15.962	147.170	65.525
Laba (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada						
Pemilik entitas induk	45.304	(12.985)	42.761	(9.672)	142.372	45.630
Kepentingan non pengendali	4.150	(3.420)	2.953	(6.233)	1.114	17.598
Jumlah	49.454	(16.405)	45.714	(15.905)	143.486	63.228
Laba per saham (Rupiah penuh)						
Dasar	1,62	0,55	1,29	0,30	3,38	1,57

*) Tidak Diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember	
	2022 *)	2022	2021	2020
Rasio Usaha (dalam %)				
Laba Sebelum Pajak/ Jumlah Pendapatan	4,47%	4,80%	6,11%	3,18%
Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah Pendapatan	4,00%	4,53%	5,38%	2,47%
Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	1,37%	1,04%	2,45%	1,29%
Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah Aset	0,36%	0,28%	0,68%	0,34%

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember	
	2022 *)	2022	2021	2020
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Jumlah Pendapatan	3,29%	3,91%	5,20%	2,34%
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Jumlah Ekuitas	1,13%	0,89%	2,37%	1,22%
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Jumlah Aset	0,29%	0,24%	0,66%	0,32%
Jumlah Pendapatan/Jumlah Aset	8,92%	6,12%	12,63%	13,91%
Rasio Keuangan (dalam %)				
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	284,83%	273,66%	260,43%	274,99%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	74,01%	73,24%	72,26%	73,33%
Interest Coverage Ratio ¹⁾	164,73%	173,30%	163,34%	134,71%
Debt Service Coverage Ratio ²⁾	65,00%	72,74%	74,08%	65,65%
Rasio Pertumbuhan (dalam %)				
Jumlah Pendapatan	8,20%	8,19%	2,93%	-2,92%
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	218,23%	293,2%	124,60%	16,01%
Jumlah Aset	7,62%	4,59%	13,36%	3,90%
Jumlah Liabilitas	10,24%	6,01%	11,70%	9,10%
Jumlah Ekuitas	0,80%	0,88%	17,94%	-8,15%

¹⁾ ISCR = EBITDA terhadap beban bunga

²⁾ DSCR = EBITDA terhadap bunga pinjaman dan pokok pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun

*) Tidak Diaudit

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan di Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 28 November 2022 dan ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP., ASEAN CPA. dengan Ijin Akuntan Publik No. AP 0126.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 31 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Harris Siregar CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0524 dan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 7 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Barugamuri Dachi M., Ak., CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1150.

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) didirikan dengan nama PT Bhakti Capital Indonesia Tbk berdasarkan Akta Notaris dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, No. 100 tanggal 15 Juli 1999. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097. Berdasarkan akta No. 23 tanggal 7 November 2012 nama Entitas diubah menjadi PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusan No.AHU62954.AH.01.02. 2012 tanggal 7 Desember 2012. Entitas induk adalah PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk).

Perseroan berlokasi di kantor pusat MNC Financial Center, lantai 21, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340, Indonesia. Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tanggal 19 Mei 2000.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Perseroan Untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja, fokus strategi dan kebijakan strategis Perseroan dan entitas anak untuk menjadi pelopor penyedia jasa keuangan digital terintegrasi di Indonesia diarahkan pada:

- Memperkuat pengembangan bisnis di seluruh unit usaha dari penyediaan layanan jasa keuangan yang konvensional menjadi layanan yang berbasis digital, dengan dukungan sinergi yang kuat dari ekosistem di MNC Group, yang bertujuan untuk meningkatkan performa bisnis dan kenyamanan bagi para nasabah;

- Melanjutkan sinergi antar entitas anak antara lain melalui penawaran produk yang *crossselling*, manajemen *database* yang terintegrasi, pengembangan sistem, perbaikan alur bisnis dan program-program pemasaran bersama yang berinsentif; serta menggiatkan promosi dan iklan bersama melalui *platform* MNC Media;
- Meningkatkan produktivitas dari jaringan distribusi baik secara digital maupun melalui penempatan titik-titik penjualan (*points-of-sales*) dengan jumlah tenaga kerja yang lebih rendah, serta menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik dengan para mitra usaha domestik dan internasional;
- Memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk menunjang pertumbuhan bisnis entitas anak secara organik, serta akuisisi kegiatan-kegiatan usaha yang prospektif di industri jasa keuangan; dan
- Membangun kemitraan untuk mengembangkan dan melaksanakan pengembangan strategis layanan omnichannel yang saling menguntungkan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Hasil Operasi Perseroan dan Entitas Anak

Dalam melakukan kegiatan operasional dan bisnis, Perseroan menyadari bahwa aspek risiko merupakan aspek terpenting dan wajib diperhitungkan dengan seksama. Risiko dapat berupa risiko yang berada dibawah kendali maupun risiko yang berada diluar kendali Perseroan. Risiko harus dapat dikelola secara terintegrasi dan berkesinambungan. Seringkali kinerja bisnis mengalami tekanan, sebagai akibat risiko tidak diperhatikan dan diperhitungkan dengan matang. Oleh karena itu, risiko wajib diperhitungkan dan dipetakan jauh sebelum risiko berdampak negatif terhadap kegiatan bisnis Perseroan. Potensi kerugian disebabkan karena risiko yang terjadi harus dapat dikendalikan agar kegiatan bisnis Perseroan dapat berjalan dengan baik. Kerugian yang mungkin timbul dalam pengelolaan usaha dapat bersumber dari internal maupun eksternal Perseroan.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat secara signifikan mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak.

A. Faktor Perekonomian

Kinerja Perseroan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan ekonomi dalam negeri secara keseluruhan. Apabila terjadinya perubahan ekonomi yang kurang menguntungkan, seperti penurunan Produk Domestik Bruto, depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga yang tinggi dan penurunan kinerja pasar modal, hal ini akan menurunkan laba Perseroan.

B. Faktor Peraturan Pemerintah

Mengingat kegiatan usaha Perseroan berhubungan dengan kepentingan umum, Pemerintah dapat senantiasa melakukan pengawasan secara ketat melalui berbagai peraturan. Munculnya peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat menimbulkan dampak negatif bagi Perseroan. Perubahan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan usaha di bidang perbankan, pembiayaan, asuransi, perantara perdagangan efek dan pengelolaan investasi akan mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan investasi di kelompok jasa keuangan.

C. Faktor Persaingan Usaha

Faktor kompetisi yaitu faktor yang berkaitan dengan kompetisi persaingan usaha di bidang industri pembiayaan, perasuransian, perantara perdagangan efek dan pengelolaan investasi yaitu dengan adanya ancaman dari pendatang baru yang memiliki jaringan yang lebih kuat dan besar, sehingga berani memberikan tarif bunga/premi/*trading fee/ subscription fee* yang lebih rendah. Hal ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

D. Faktor Kredit

Faktor kredit timbul dari faktor kegagalan dari *counterparty* atas liabilitas kontraktual yang mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa perdagangan dengan nasabah yang mempunyai catatan kredit yang baik. Divisi kredit menetapkan batas kredit dan tingkat jaminan untuk klien.

Eksposur faktor kredit Perseroan berkaitan dengan kegiatan *broker* saham terasosiasi pada posisi kontraktual nasabah yang muncul pada saat perdagangan. Dengan demikian, Perseroan memerlukan jaminan untuk mengurangi faktor tersebut. Jenis instrumen diterima Perseroan atas jaminan tersebut dapat berupa kas dan efek yang tercatat di bursa. Konsentrasi faktor kredit yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan berasal dari piutang nasabah lebih dari 30 hari. Perseroan mempunyai eksposur terhadap nasabah-nasabah yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 30 hari tersebut dan atas piutang tersebut, Perseroan telah menerima jaminan yang memadai.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

4. Kinerja Segmen Operasi

Perseroan membagi segmen operasinya menjadi 8 bagian, yaitu perbankan, investasi, asuransi, penjaminan dan perantara perdagangan efek, pengelolaan investasi, lembaga pembiayaan, finansial teknologi dan penyewaan properti. Berikut ini adalah kinerja dari masing-masing segmen operasi Perseroan tersebut yang mengacu pada Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan beserta Catatan atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang dilampirkan dalam Prospektus ini untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP., ASEAN CPA. dengan Ijin Akuntan Publik No. AP 0126 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Harris Siregar CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0524 serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Barugamuri Dachi M., Ak., CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1150.

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP).

Pendapatan Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Deskripsi	30 Juni		31 Desember			
	2022		2021		2020	
	Nilai	Kontribusi (%)	Nilai	Kontribusi (%)	Nilai	Kontribusi (%)
Perbankan	591.103	42,3%	1.139.599	40,4%	1.157.947	42,8%
Asuransi	294.335	21,1%	459.679	16,3%	480.664	17,8%
Penjaminan dan perantara perdagangan efek	228.099	16,3%	501.306	17,8%	178.110	6,6%
Lembaga pembiayaan	182.700	13,1%	364.808	12,9%	472.547	17,5%
Pengelolaan investasi	25.996	1,9%	28.904	1,0%	15.206	0,6%
Finansial teknologi	22.240	1,6%	35.204	1,2%	20.342	0,8%
Investasi	52.879	3,8%	292.187	10,4%	379.045	14,0%
Penyewaan properti	17	0,0%	12	0,0%	15	0,0%
Total Sebelum Eliminasi	1.397.369	100,0%	2.821.699	100,0%	2.703.876	100,0%

Hasil Segmen

(dalam jutaan Rupiah)

Deskripsi	30 Juni		31 Desember			
	2022		2021		2020	
	Nilai	Kontribusi (%)	Nilai	Kontribusi (%)	Nilai	ontribusi (%)
Perbankan	278.864	20,0%	625.800	22,2%	641.233	23,7%
Asuransi	42.729	3,1%	62.178	2,2%	(145.840)	-5,4%

Deskripsi	30 Juni		31 Desember			
	2022		2021		2020	
	Nilai	Kontribusi (%)	Nilai	Kontribusi (%)	Nilai	Kontribusi (%)
Penjaminan dan perantara						
perdagangan efek	36.101	2,6%	119.446	4,2%	87.250	3,2%
Lembaga pembiayaan	79.810	5,7%	151.798	5,4%	186.656	6,9%
Pengelolaan investasi	16.266	1,2%	6.377	0,2%	(10.811)	-0,4%
Finansial teknologi	16.329	1,2%	27.238	1,0%	14.953	0,6%
Investasi	22.626	1,6%	252.563	9,0%	338.983	12,5%
Penyewaan properti	(1.019)	-0,1%	(894)	0,0%	(57)	0,0%
Total Sebelum Eliminasi	491.706	100%	1.244.506	100%	1.112.367	100%

Pendapatan Bersih berdasarkan segmen operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Pendapatan dari sektor perbankan membukukan jumlah pendapatan sebesar Rp 591.103 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, atau meningkat sebesar 6,2% dari Rp 556.464 juta untuk periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga sejalan dengan kenaikan kredit yang diberikan.

Pendapatan dari sektor asuransi membukukan jumlah pendapatan sebesar Rp 294.335 juta untuk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, atau meningkat sebesar 47,3% dari Rp 199.883 juta untuk periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan premi bersih.

Pendapatan dari lembaga pembiayaan membukukan jumlah pendapatan sebesar Rp 182.700 juta untuk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, atau meningkat sebesar 1,6% dari Rp 179.753 juta untuk periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran.

Pendapatan dari penjaminan dan perantara perdagangan efek membukukan jumlah pendapatan sebesar Rp 228.099 juta untuk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, atau menurun sebesar -9,4% dari Rp 251.666 juta untuk periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak perang rusia dan kraina sehingga berpengaruh terhadap perdagangan saham secara global.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan dari sektor perbankan membukukan jumlah pendapatan sebesar Rp 1.139.599 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau menurun sebesar 1,6% dari Rp 1.157.947 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga kredit sejalan dengan restrukturisasi yang dilakukan Bank dalam rangka penyelamatan kredit yang terkena dampak Covid-19, serta kredit yang baru tumbuh di kuartal akhir tahun 2021 dan penurunan pendapatan operasi lainnya terutama penurunan dari pendapatan lain-lain, pendapatan valuta asing dan pendapatan provisi dan komisi selain kredit.

Pendapatan dari sektor asuransi membukukan jumlah pendapatan sebesar Rp 459.679 juta untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau menurun sebesar 4,4% dari Rp 480.664 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan premi bersih.

Pendapatan dari penjaminan dan perantara perdagangan efek membukukan jumlah pendapatan sebesar Rp 501.306 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau meningkat sebesar 181,5% dari Rp 178.110 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama

disebabkan oleh peningkatan pendapatan perantara pedagang efek sejalan dengan peningkatan transaksi di bursa saham. Selain itu, peningkatan pendapatan juga disebabkan oleh akuisisi perusahaan perantara pedangan efek di luar negeri oleh Perseroan.

Pendapatan dari lembaga pembiayaan membukukan jumlah pendapatan sebesar Rp 364.808 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau menurun sebesar 22,8% dari Rp 472.547 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19, dimana penjualan atas piutang pembiayaan belum bisa kembali seperti kondisi sebelum Covid 19.

Hasil segmen berdasarkan segmen operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Hasil segmen dari sektor perbankan membukukan jumlah hasil segmen sebesar Rp 278.864 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, atau menurun sebesar 8,0% dari Rp 303.003 juta untuk periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terutama disebabkan peningkatan beban penurunan nilai.

Hasil segmen dari sektor asuransi membukukan jumlah hasil segmen sebesar Rp Rp 42.729 juta untuk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, atau meningkat sebesar 1.025,9% dari rugi Rp 4.615 juta untuk periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan premi bersih.

Pendapatan dari lembaga pembiayaan membukukan jumlah pendapatan sebesar Rp 79.810 juta untuk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, atau meningkat sebesar 3,2% dari Rp 77.332 juta untuk periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran.

Pendapatan dari penjaminan dan perantara perdagangan efek membukukan jumlah pendapatan sebesar Rp 36.101 juta untuk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, atau menurun sebesar -38,1% dari Rp 58.279 juta untuk periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak perang rusia dan kraina sehingga berpengaruh terhadap perdagangan saham secara global.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Hasil segmen dari sektor perbankan membukukan jumlah hasil segmen sebesar Rp 625.800 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau menurun sebesar 2,4% dari Rp 641.233 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pendapatan bunga kredit dan restrukturisasi yang dilakukan Bank dalam rangka penyelamatan kredit yang terkena dampak Covid-19, serta kredit yang baru tumbuh di kuartal akhir tahun 2021 dan penurunan pendapatan operasi lainnya terutama penurunan dari pendapatan lain-lain, pendapatan valuta asing dan pendapatan provisi dan komisi selain kredit.

Hasil segmen dari sektor asuransi membukukan jumlah hasil segmen sebesar Rp 62.178 juta untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau meningkat sebesar 142,6% dari rugi Rp 145.840 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban klaim di tahun 2021.

Hasil segmen dari penjaminan dan perantara perdagangan efek membukukan jumlah hasil segmen sebesar Rp 119.446 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau meningkat sebesar 36,9% dari Rp 87.250 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan perantara pedagang efek sejalan dengan peningkatan transaksi

di bursa saham. Selain itu, peningkatan pendapatan juga disebabkan oleh akuisisi perusahaan perantara pedangan efek di luar negeri oleh Perseroan.

Hasil segmen dari lembaga pembiayaan membukukan jumlah hasil segmen sebesar Rp 151.798 juta untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau menurun sebesar 18,7% dari Rp 186.656 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19, dimana penjualan atas piutang pembiayaan belum bisa kembali seperti kondisi sebelum Covid 19.

5. Analisis Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Analisis Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan beserta Catatan atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang dilampirkan dalam Prospektus ini untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP., ASEAN CPA. dengan Ijin Akuntan Publik No. AP 0126 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Harris Siregar CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0524 serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Barugamuri Dachi M., Ak., CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1150.

(dalam jutaan Rupiah)

Deskripsi	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 *)	2021	2020
Jumlah Pendapatan	1.386.524	1.281.575	2.735.142	2.657.232
Jumlah Beban	1.320.031	1.268.903	2.568.095	2.572.618
Laba Sebelum Pajak	66.493	12.672	167.047	84.614
Manfaat (Beban) Pajak - Bersih	(3.733)	3.290	(19.877)	(19.089)
Laba Bersih Periode Berjalan	62.760	15.962	147.170	65.525
Penghasilan Komprehensif Lain, setelah pajak	(17.046)	(31.867)	(3.684)	(2.297)
Laba (Rugi) Komprehensif Lain Periode Berjalan, setelah pajak	45.714	(15.905)	143.486	63.228

*) Tidak diaudit

Berikut ini adalah perbandingan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pendapatan

(dalam jutaan Rupiah)

Deskripsi	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 *)	2021	2020
Pendapatan bunga dan dividen	804.277	713.727	1.531.716	1.618.002
Pendapatan pasar modal	199.020	203.333	433.796	150.151
Pendapatan premi bersih	177.331	174.310	371.512	427.158
Pendapatan digital	145.062	45.768	144.590	72.123
Pendapatan pembiayaan syariah	6.293	14.352	27.408	31.456
Pendapatan operasional lainnya	54.541	130.085	226.037	358.342
Jumlah	1.386.524	1.281.575	2.735.059	2.657.232

*) Tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Perseroan membukukan jumlah pendapatan konsolidasian sebesar Rp 1.386.524 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, atau meningkat sebesar 8,2% dari Rp 1.281.575 juta untuk periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan dividen sebesar 12,7% menjadi Rp 804.277 juta dari Rp 713.727 juta pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, pendapatan Perseroan yang berasal dari sektor digital melambung tinggi menjadi Rp 145.062 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari Rp 45.768 juta pada periode yang sama tahun lalu, atau setara 217,0%. Hal ini sejalan dengan komitmen dan fokus Perseroan dalam mengembangkan ekosistem layanan keuangan digital yang terintegrasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perseroan melaporkan jumlah pendapatan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.735.059 juta, atau meningkat 2,9% dari Rp 2.657.232 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pendapatan Perseroan tahun 2021 terutama berasal dari pendapatan bunga dan dividen sebesar Rp 1.531.716 juta atau setara dengan 56,0% dari total pendapatan konsolidasian, diikuti oleh pendapatan pasar modal sebesar Rp 433.796 juta, kemudian pendapatan premi bersih sebesar Rp 371.512 juta. Pada tahun 2021, Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan digital dari hanya Rp 72.123 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 144.590 juta pada tahun 2021, peningkatan signifikan YoY sebesar 100,5%.

Beban

(dalam jutaan Rupiah)

Deskripsi	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 *)	2021	2020
Beban umum dan administrasi	644.513	637.212	1.233.766	1.045.425
Beban bunga	336.768	401.139	794.941	903.740
Klaim dan manfaat	168.875	119.338	224.720	448.869
Penurunan nilai	77.868	30.642	83.660	77.187
Komisi neto	9.825	2.966	23.753	8.187
Beban bagi hasil syariah	11.278	639	23.094	5.699
Beban administrasi	2.286	3.281	6.392	7.341
Lain-lain - bersih	68.618	73.686	177.685	76.170
Jumlah	1.320.031	1.268.903	2.568.011	2.572.618

*) Tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Jumlah Beban konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,0% menjadi Rp 1.320.031 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dari sebesar Rp 1.268.903 juta. Peningkatan jumlah beban konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 terutama berasal dari peningkatan beban klaim dan manfaat sebesar Rp 49.537 juta serta beban penurunan nilai sebesar Rp 47.226 juta. Namun untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, beban bunga mengalami penurunan sebesar Rp 64.371 juta.

Klaim dan manfaat

Beban klaim dan manfaat untuk untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 41,5% menjadi Rp 168.875 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 119.338 juta.

Penurunan nilai

Beban penurunan nilai untuk untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 154,1% menjadi Rp 77.868 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 30.642 juta.

Beban Bunga

Beban bunga untuk untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar 16,0% menjadi Rp 336.768 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 401.139 juta. Penurunan beban bunga tersebut sejalan dengan penurunan suku bunga simpanan sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Beban konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 0,2% menjadi Rp 2.568.011 juta dibandingkan Rp 2.572.618 juta dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Peningkatan jumlah beban konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 terutama berasal dari akuisi Aurbach Grayson, entitas anak, pada Januari 2021. Namun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, beban klaim dan manfaat serta beban bunga mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp 224.149 juta dan Rp 108.799 juta.

Beban Bunga

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, beban bunga juga mengalami penurunan sebesar 12,0% menjadi Rp 794.941 juta dari Rp 903.740 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Penurunan beban bunga terutama disebabkan Penurunan beban bunga tersebut terutama disebabkan penurunan suku bunga simpanan sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dan peningkatan CASA Bank terlihat dari rasio CASA yang meningkat dari 18,81% di 2020 menjadi 28,89% di 2021.

Klaim dan manfaat

Beban klaim dan manfaat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, beban klaim dan manfaat mengalami penurunan sebesar 49,9% menjadi Rp 224.720 juta dari Rp 448.869 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Penurunan nilai

Beban penurunan nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, beban penurunan nilai mengalami kenaikan sebesar 8,4% menjadi Rp 83.660 juta dari Rp 77.187 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Laba Bersih Tahun Berjalan**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021**

Laba bersih konsolidasian untuk periode enam bulan meningkat sebesar Rp 46.798 juta, atau setara 293,18% dari sebesar Rp 15.962 juta pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 62.760 juta pada tahun 2021. Pertumbuhan kinerja yang fantastis sejalan dengan pertumbuhan pendapatan konsolidasian untuk periode enam bulan sebesar Rp 104.949 juta, atau setara dengan 8,19% dan penurunan beban bunga sebesar Rp 64.371 juta, atau setara 16,0%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp 81,6 miliar, atau setara 124,47% menjadi Rp 147.087 juta dibandingkan Rp 65.525 juta pada tahun 2020. Pertumbuhan laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sejalan dengan pertumbuhan pendapatan

konsolidasian sebesar Rp 77.826 juta, atau setara 2,9% dan penurunan beban klaim dan manfaat sebesar Rp 224.149 juta serta penurunan beban bunga sebesar Rp 108.799 juta.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, laba komprehensif lain setelah pajak konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp 61.619 juta atau sebesar 387,42% menjadi sebesar Rp 45.714 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu, rugi komprehensif lain setelah pajak konsolidasian sebesar Rp 15.905 juta. Kenaikan laba komprehensif lain setelah pajak terutama disebabkan kenaikan harga pasar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak dari periode yang sama tahun lalu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif lain setelah pajak konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp 80.258 juta atau sebesar 126,93% menjadi sebesar Rp 143.486 juta dari sebelumnya sebesar Rp 63.228 juta pada tahun 2020. Kenaikan laba komprehensif lain setelah pajak terutama disebabkan kenaikan harga pasar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak dari tahun lalu.

6. Analisis Posisi Keuangan Konsolidasian

Analisis Posisi Keuangan Konsolidasian berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan beserta Catatan atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang dilampirkan dalam Prospektus ini untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP., ASEAN CPA. dengan Ijin Akuntan Publik No. AP 0126 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Harris Siregar CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0524 serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Barugamuri Dachi M., Ak., CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1150.

(dalam jutaan Rupiah)

Deskripsi	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Jumlah Aset	22.647.254	21.653.968	19.101.546
Jumlah Liabilitas	16.586.323	15.646.157	14.007.712
Jumlah Ekuitas	6.060.931	6.007.811	5.093.834

Berikut ini adalah perbandingan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Aset

Jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 22.647.254 juta atau meningkat sebesar Rp 993.286 juta atau setara 4,6% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp 21.653.968 juta. Kenaikan jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tahun 2022 terutama disebabkan pertumbuhan kredit bersih yang diberikan sebesar Rp 1.107.032 juta yang dikontribusi oleh BABP dan penurunan nilai wajar efek-efek yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp 131.154 juta.

Jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 21.653.968 juta atau meningkat sebesar Rp 2.552.422 juta atau setara 13,4% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp 19.101.546 juta. Kenaikan jumlah aset konsolidasian Perseroan pada tahun 2021 terutama disebabkan pertumbuhan kredit bersih yang diberikan sebesar Rp 1.375.448 juta, kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp 1.069.321 juta, kenaikan nilai wajar efek-efek yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp 537.579 juta.

Liabilitas

Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 16.586.323 juta atau meningkat sebesar Rp 940.166 juta atau setara 6,0% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp 15.646.157 juta. Kenaikan jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tahun 2022 terutama disebabkan pertumbuhan simpanan pihak ketiga sebesar Rp 841.479 juta dan kenaikan liabilitas kontrak asuransi dan investasi sebesar Rp 86.251 juta.

Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 15.646.157 juta atau naik sebesar Rp 1.638.445 juta atau sebesar 11,7% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp 14.007.712 juta. Kenaikan jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan pada tahun 2021 terutama disebabkan pertumbuhan simpanan sebesar Rp 2.054.637 juta, penurunan simpanan dari bank lain dan liabilitas segera masing-masing sebesar Rp 359.428 juta dan Rp 104.498 juta.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 6.060.931 juta atau meningkat sebesar Rp 53.120 juta atau setara 0,9% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp 6.007.811 juta. Kenaikan jumlah ekuitas Perseroan terutama disebabkan laba bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang berhasil dicapai oleh Grup.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.007.811 juta atau meningkat sebesar Rp 913.977 juta atau setara 18% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp 5.093.834 juta. Kenaikan jumlah ekuitas Perseroan terutama disebabkan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang berhasil dicapai oleh Grup sebesar Rp 147.170 juta, peningkatan modal disetor Perseroan melalui penambahan saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 2.857.999.000 lembar atau setara Rp 413.757 juta dan setoran modal oleh pihak non pengendali pada entitas anak sebesar Rp 288.018 juta.

7. Analisis Arus Kas Konsolidasian

Analisis Arus Kas Konsolidasian berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan beserta Catatan atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang dilampirkan dalam Prospektus ini untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP., ASEAN CPA. dengan Ijin Akuntan Publik No. AP 0126 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Harris Siregar CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0524 serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Barugamuri Dachi M., Ak., CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1150.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(2.557)	258.952	1.706.213	1.726.730
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	67.281	(87.330)	(107.956)	130.850

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(126.583)	(381.433)	(514.416)	(1.262.623)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(61.859)	(209.811)	1.083.841	594.957
Pengaruh perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(4.157)	(8.829)	(14.520)	(14.181)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	2.827.492	1.758.171	1.758.171	1.177.395
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	2.761.476	1.539.531	2.827.492	1.758.171

Berikut ini adalah perbandingan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp 2.557 juta yang terutama berasal dari kenaikan aset operasi efek-efek. Sementara untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021, Perseroan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 258.952 juta yang terutama berasal dari penurunan aset operasi tagihan derivatif, efek-efek dan kenaikan aset operasi liabilitas segera.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, arus kas bersih atau arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan turun sebesar Rp 20.517 juta atau sebesar 1,2% menjadi sebesar Rp 1.706.213 juta dibandingkan Rp 1.726.730 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan kenaikan pembayaran kepada karyawan dan pemasok.

Aktivitas operasi yang menjadi bagian dari arus kas dari aktivitas operasi antara lain penerimaan dari bunga, provisi, komisi kredit, penjualan portofolio efek, nasabah, premi, klaim reasuransi, komisi perantara perdagangan efek, pendapatan manajer investasi, jasa penasihat keuangan; pembayaran untuk karyawan, bunga, hadiah, provisi, komisi dana, perolehan portofolio efek, pemasok, pajak penghasilan; penurunan (kenaikan) aset operasi dan kenaikan (penurunan) liabilitas operasi.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, Perseroan membukukan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp 67.281 juta yang berasal dari pencairan investasi. Sementara untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021, Perseroan menggunakan arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp 87.330 juta yang sebagian besar digunakan untuk penempatan investasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 107.956 juta yang sebagian besar digunakan untuk penempatan investasi dan perolehan aset tetap. Sementara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, Perseroan

memperoleh arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp 130.850 juta yang diperoleh dari pencairan investasi.

Aktivitas investasi yang menjadi bagian dari arus kas dari aktivitas investasi antara lain pencairan dan penempatan investasi, perolehan dan penjualan aset tetap, perolehan dan pelepasan aset *Al-Ijarah*, penerimaan dividen dan kas dan setara kas yang diperoleh dari akuisisi entitas anak setelah dikurangi biaya akuisisi.

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dan 2021, Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan masing-masing sebesar Rp 126.583 juta dan Rp 381.433 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran bunga dan pembayaran sebagian fasilitas pinjaman oleh Entitas Anak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan masing-masing sebesar Rp 514.416 juta dan Rp 1.262.623 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran bunga dan pembayaran sebagian fasilitas pinjaman oleh Entitas Anak.

Aktivitas pendanaan yang menjadi bagian dari arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain penerimaan dan pembayaran pinjaman pada pihak ketiga, pembayaran bunga dan penerimaan dari setoran modal saham.

8. Likuiditas dan Solvabilitas

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Sumber internal likuiditas Perseroan adalah kas dan setara kas dan aset keuangan, dividen dari Entitas Anak, penjualan *treasury stock* dan penjualan saham Entitas Anak, sedangkan sumber eksternal likuiditas Perseroan adalah pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya dan obligasi. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling utama adalah utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan adalah kas dan setara kas dan aset keuangan lancar perusahaan, dividen dari Entitas Anak, penjualan *treasury stock*, penjualan saham Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan memiliki modal kerja yang cukup.

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset Perseroan. Solvabilitas diukur dengan membandingkan antara jumlah liabilitas terhadap jumlah aset. Tingkat solvabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 73,24%, 72,26% dan 73,33%.

9. Imbal hasil ekuitas dan imbal hasil investasi

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dari perbandingan laba tahun berjalan terhadap jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 2,07%, 0,27% dan 2,89%.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aktiva yang dimiliki Perseroan, diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total aset. Tingkat imbal hasil investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 0,55%, 0,07% dan 0,77%.

10. Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Perseroan dan Entitas Anak	19.836	42.284	59.899

Pembelian aset tetap secara umum dibiayai oleh pinjaman dari bank/lembaga keuangan lainnya karena sebagian besar aset tetap tersebut adalah aset sewa operasi. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena tidak adanya sumber dana pembelian aset tetap dalam mata uang asing. Seluruh belanja modal yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak mencakup kota Jakarta, Semarang, Bandung dan Surabaya. Aset tetap yang dibeli oleh Perseroan dan Entitas Anak terutama berupa kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional.

Dalam melakukan belanja modal, Perseroan dan Entitas Anak telah mempertimbangkan fungsi dan tujuan belanja modal tersebut. Pembelian aset tetap yang dilakukan adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

11. Manajemen Risiko Permodalan

Perseroan dan Entitas Anak berupaya untuk mencapai struktur modal yang optimal dalam mencapai tujuan usaha mereka, termasuk mempertahankan rasio modal yang sehat dan peringkat kredit yang kuat, dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Beberapa instrumen utang Perseroan dan Entitas Anak memiliki pembatasan tertentu yang menentukan rasio *leverage* maksimum (*maximum leverage ratios*). Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditentukan secara eksternal.

Pihak manajemen melakukan pengawasan modal dengan menggunakan beberapa pengukuran *leverage* keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas. Perseroan dan Entitas Anak terus mengelola pembatasan utang dan struktur modal. Pada tanggal 30 Juni 2022 dan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rasio utang terhadap ekuitas konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali gearing ratio)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Pinjaman	13.372.150	12.676.065	11.039.790
Kas dan Bank	(2.761.476)	(2.827.492)	(1.758.171)
Pinjaman – Bersih	10.610.674	9.848.573	9.281.619
Ekuitas	6.060.931	6.007.811	5.093.834
Gearing ratio	175%	164%	182%

12. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang

Jumlah pinjaman bank dan surat utang yang masih terutang per 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp 1.513.539 juta dengan analisis jatuh tempo pinjaman sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	< 1 tahun	1 - 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	767.424	128.713	35.128	931.265
Utang Obligasi-bersih	-	299.419	-	299.419
Utang sewa pembiayaan	4.132	6.843	-	10.975
Utang AI - Musyarakah	194.446	130	-	194.576
Utang AI - Mudharabah	2.393	3.847	1.445	7.685
Liabilitas surat berharga repo	69.619	-	-	69.619
Jumlah	1.038.014	438.952	36.573	1.513.539

Informasi lebih lanjut mengenai fasilitas pinjaman dari bank dan institusi keuangan non-bank serta surat utang dapat dilihat pada Bab III Prospektus ini mengenai Pernyataan Utang.

Untuk melunasi pinjaman yang akan jatuh tempo di bawah 1 tahun, Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan /atau lembaga keuangan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

TIDAK ADA PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS YANG DILAPORKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK TERAKHIR.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Selain itu, Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor. Beberapa potensi risiko di bawah ini dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan, yang diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN

Risiko Ketergantungan Perseroan sebagai Perusahaan Induk terhadap Pendapatan dan Laba Entitas Anak

Sebagai perusahaan induk, kelangsungan bisnis perusahaan induk tidak lepas dari dukungan dari Entitas Anak untuk kelancaran bisnis induknya. Pendapatan dan laba Perseroan tergantung pada kelangsungan bisnis, pendapatan dan laba Entitas Anak. Entitas Anak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan dan/atau pengaruh paling besar terhadap kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan saat ini adalah BAPP.

Perseroan berupaya secara aktif melakukan pengawasan dan implementasi manajemen strategis pada setiap Entitas Anak dengan didukung pengalaman manajemen Perseroan. Namun apabila kegiatan usaha dan laba Entitas Anak mengalami penurunan sebagai akibat dari risiko-risiko yang dihadapi masing-masing Entitas Anak, maka pendapatan dan laba bersih Perseroan akan terkena dampak negatif.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG MEMPUNYAI PENGARUH TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Pengambil Keputusan Investasi yang dilakukan Perseroan

Perseroan melakukan pengawasan atas investasi yang dilakukan Entitas Anak untuk pengembangan bisnisnya masing-masing dan juga dapat melakukan investasi pada perusahaan perusahaan atau bisnis baru agar dapat bertumbuh. Meskipun keputusan investasi dibuat setelah melakukan analisis dengan penuh kehati-hatian dan juga telah berusaha mencakup berbagai oleh faktor internal maupun eksternal seperti kemampuan manajemen dalam bidang pengelolaan investasi, manajemen risiko dan kebijakan strategi dan faktor eksternal seperti kondisi perekonomian di Indonesia namun tidak dapat dipastikan bahwa akan sesuai dengan realisasi di masa depan. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan investasi pada bisnis atau perusahaan dengan kinerja rendah sehingga berdampak negatif terhadap pendapatan dan laba Perseroan.

2. Perseroan Menghadapi Beberapa Risiko Operasional dalam Perluasan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi pada Entitas Anak

Perseroan sedang dalam proses atau rencana, untuk mengembangkan dan memperluas beberapa bagian dari kegiatan usaha Entitas Anak. Kegiatan usaha Perseroan yang efisien sangat bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem teknologi informasi yang dapat memproses transaksi yang sangat besar dengan akurat dan tepat waktu untuk berbagai produk dan layanan yang ditawarkan Entitas Anak.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kegiatan operasional Perseroan tidak akan terganggu secara material apabila terjadi kegagalan pada sebagian atau seluruh sistem teknologi informasi. Kegagalan sistem teknologi informasi untuk dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan oleh Perseroan, dapat mengganggu kegiatan Perseroan dan Entitas Anak dan dapat berakibat pada kesalahan transaksi, proses yang tidak efisien. Selain itu, sistem teknologi informasi juga menghadapi risiko kerusakan atau gangguan dari hal-hal yang berada diluar kendali Perseroan antara lain, kebakaran, bencana alam, kegagalan sistem, pelanggaran keamanan dan virus. Hal tersebut dapat berdampak negative dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Ketergantungan Perseroan terhadap Kepengurusan yang Handal dan Berkualitas

Salah satu faktor kunci keberhasilan Perseroan terletak pada kepengurusan yang handal dan berkualitas. Kepengurusan Perseroan yang handal dan berkualitas terdiri dari Direksi dan Komisaris yang memiliki

kualifikasi yang dibutuhkan untuk keberhasilan Perseroan di masa mendatang. Perseroan dan/atau Entitas Anak bergerak dibidang-bidang usaha yang kompetitif dan mengalami perkembangan yang cepat dari segi penawaran layanan-layanannya, teknologi dan regulasi. Dalam industri ini terdapat kebutuhan tinggi dari setiap pemain industrinya atas kepengurusan yang memiliki visi dan misi kedepan.

Risiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik kepengurusan yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan kepengurusan yang kompeten maka kemampuan Perseroan untuk bersaing di pasar dapat terkena dampak negatif yang juga dapat memberikan dampak negatif kepada penjualan, keuntungan dan keadaan finansial Perseroan.

C. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN ENTITAS ANAK

- **Risiko Umum Entitas Anak**

1. **Risiko Persaingan**

Risiko persaingan adalah risiko yang dapat terjadi dikala perusahaan menghadapi persaingan dengan beberapa persusahaan domestik maupun asing yg bergerak dalam bidang usaha yang sama. Seiring dengan membaiknya keadaan perekonomian di Indonesia, sektor perbankan, jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek, pembiayaan maupun pengelolaan dana semakin banyak diminati oleh para investor. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan sejenis yang beroperasi dan memperebutkan pangsa pasar sehingga menimbulkan tingkat persaingan yang ketat antar perusahaan sejenis sehingga dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

2. **Risiko Perekonomian**

Pemulihan kondisi makro ekonomi di tahun 2022 berdampak positif terhadap pelaku bisnis di sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Hal ini mengingat dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional, maka potensi terjadinya debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara gradual akan semakin menurun sehingga risiko kredit dapat menurun. Dalam hal memburuknya kondisi makro ekonomi maka akan berdampak negatif terhadap risiko pasar (risiko suku bunga dan valuta asing), risiko likuiditas seiring dengan penggalangan dana masyarakat maupun kondisi likuiditas antar bank, serta membawa dampak negatif bagi bank dalam mencapai target-target pencapaian kinerja dan bisnisnya.

3. **Risiko Peraturan Pemerintah**

Mengingat kegiatan usaha Perseroan berhubungan dengan kepentingan umum, Pemerintah dapat senantiasa melakukan pengawasan secara ketat melalui berbagai peraturan. Risiko Kebijakan Pemerintah, khususnya terkait dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

- **Risiko Lini Usaha Perbankan**

1. **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Risiko kredit terutama berasal dari segmen *Wholesales/Corporate* karena segmen ini mengambil porsi terbesar dalam penyaluran kredit Perseroan. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali atas pokok kredit yang diberikan maupun bunganya, dapat menurunkan kinerja Perseroan sebagai konsekuensi dari menurunnya tingkat kolektibilitas kredit, penurunan pendapatan, peningkatan biaya pencadangan kerugian, hingga penurunan permodalan Perseroan yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank.

Pemberian kredit dalam jumlah yang cukup signifikan pada sekelompok perusahaan atau industri tertentu akan meningkatkan potensi risiko kredit bermasalah bagi Perseroan jika terjadi gejolak terhadap kelompok usaha maupun sektor ekonomi tertentu.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan akibat adanya perubahan kondisi pasar yang tercermin pada pergerakan variabel pasar seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar, termasuk juga transaksi derivatif. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam surat berharga, pasar uang, kegiatan pendanaan, penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*). Risiko suku bunga timbul karena adanya perbedaan suku bunga (*repricing gap*) antara dana pihak ketiga yang diambil dengan penempatan yang dijalankan oleh Perseroan meliputi kredit, penempatan antar bank serta investasi lainnya. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja Perseroan apabila terjadi suatu perubahan yang mendadak pada suku bunga di pasar yang secara langsung akan meningkatkan suku bunga dana, sedangkan suku bunga penempatan dana tidak dapat secara serta merta meningkat. Risiko nilai tukar timbul karena Perseroan memegang mata uang asing lainnya sebagai salah satu usaha yang dijalankan oleh Perseroan sehingga adanya perubahan nilai tukar mata uang asing akan secara langsung mempengaruhi kinerja Perseroan. Perubahan variabel yang terjadi secara signifikan akan berdampak pada penurunan nilai portofolio yang dimiliki oleh Perseroan. Adapun apabila hal ini memiliki nilai yang material maka akan dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal yang dapat mengganggu Perseroan sehingga mempengaruhi operasional perusahaan seperti tingkat pelayanan jasa transaksi perbankan menjadi bermasalah, kemudian dapat juga menimbulkan masalah pembukuan dan pelaporan serta memungkinkan timbulnya risiko lain seperti risiko hukum dan reputasi. Hal ini berdampak negatif terhadap kepercayaan nasabah dan mampu menyebabkan kesulitan dalam menghimpun pendanaan serta menurunkan kinerja Perseroan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Hal ini timbul akibat adanya kesenjangan jumlah dan jangka waktu antara sumber pendanaan yang umumnya berjangka pendek dengan penempatan (aset) yang umumnya berjangka panjang. Sebagaimana umumnya bahwa sumber pendanaan bersifat jangka pendek, sehingga apabila dana pihak ketiga sebagai sumber pendanaan Perseroan tidak diperpanjang (*roll over*) dan terjadinya penarikan dana dalam jumlah yang signifikan pada waktu yang serentak maka akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perseroan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*). Secara umum, industri perbankan cukup rentan terhadap isu-isu negatif yang dapat mengakibatkan pengambilan dana masyarakat secara massal dan dalam kurun waktu yang singkat (*rush*) sehingga mengancam kegiatan operasional Perseroan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Perseroan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga. Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan permasalahan dan tuntutan hukum di kemudian hari, yang berpotensi

menimbulkan kerugian yang besar bagi Perseroan sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

6. Risiko Strategis

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan Perseroan dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis serta perubahan eksternal (perubahan kebijakan moneter dan peraturan pemerintah, perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik) risiko strategik antara lain terkait dengan ketentuan mengenai rencana bisnis bank. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya deviasi dari sasaran yang telah ditetapkan Perseroan sehingga diperlukan adanya penyesuaian kembali atas target yang telah ditetapkan sebelumnya agar kinerja Perseroan berjalan dengan baik dan tepat tujuan.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Risiko kepatuhan ini melekat pada Perseroan, terkait pada perundang-undangan dan ketentuan lain seperti ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas maka risiko yang mungkin terjadi adalah pengenaan sanksi yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material ataupun sanksi non finansial seperti teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan Direksi Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha tertentu bahkan dapat menyebabkan dicabutnya ijin usaha Perseroan. Hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap Perseroan.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Salah satu faktor keberhasilan dalam bidang usaha jasa perbankan dilandasi oleh kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan kegiatan operasional. Adanya persepsi negatif terhadap Perseroan dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

- **Risiko Lini Usaha Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha**

1. Risiko Pembiayaan

Risiko ini dapat terjadi jika konsumen/debitur mengalami kesulitan dalam membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko ini timbul jika struktur kredit, kelayakan konsumen dan piutang tidak dikelola secara hati-hati sehingga menyebabkan ketidaktuntutan pembayaran angsuran dari konsumen yang dapat menurunkan pendapatan.

2. Risiko Pendanaan

Risiko pendanaan dapat timbul jika MNCF dan MNCGUI mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber dana baik berupa pinjaman maupun berupa pembiayaan bersama. Kesulitan mendapatkan sumber pendanaan eksternal ini dapat mempengaruhi perkembangan usaha MNCF dan MNCGUI dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen. Selain jumlah pendanaan, hal-hal lain yang menentukan adalah jangka waktu pendanaan dan tingkat bunga. Lebih lanjut, ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana dengan jangka waktu pembiayaan maupun tingkat bunga yang diperoleh dengan tingkat bunga yang dibebankan ke konsumen dapat berakibat kepada ketidaksesuaian arus kas yang selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan MNCF dan MNCGUI secara negatif.

3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank dan instrumen keuangan lainnya.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko bahwa nilai wajar dari arus kas masa depan pada sebuah instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perseroan terekspos pada risiko pasar yaitu risiko suku bunga. Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

5. Risiko Operasional

Potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan.

6. Risiko Strategis

Potensi kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal.

7. Risiko Aset dan Liabilitas

Risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas pembiayaan konsumen. Tujuannya mengidentifikasi, menilai dan mengukur risiko aset dan liabilitas serta menilai kecukupan pengendalian manajemen dalam mengelola risiko.

8. Risiko Kepengurusan

Risiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak memadai, komposisi dan proporsi Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, kompetensi dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, serta kepemimpinan Direksi dan Dewan Komisaris tidak baik dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan dan menurunkan reputasi perusahaan.

9. Risiko Tata Kelola

Potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.

- **Risiko Lini Usaha Asuransi**

1. Risiko Klaim

Klaim yang muncul saat beberapa klaim diajukan hampir pada saat yang bersamaan dalam jumlah yang signifikan sehingga menekan arus kas Perusahaan dan dapat mengakibatkan kerugian yang substansial, sehingga dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.

2. Risiko Pengelolaan Dana

Dalam pengelolaan dana yaitu risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian dan perubahan situasi ekonomi global, sehingga mengakibatkan ketidakpastian politik dan makro ekonomi Indonesia dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keamanan investasi Perusahaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian pendapatan hasil investasi Perusahaan.

3. Risiko Operasional

Dalam mengembangkan usahanya harus diimbangi dengan kemampuan menganalisa pasar dan mengantisipasi kebutuhan sebagian besar masyarakat. Dalam hal ini kedekatan dengan pelanggan, penyedia sumber data statistik yang cepat dan akurat serta kehandalan Sumber Daya Manusia dalam mengantisipasi kebutuhan pasar akan sangat mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Apabila terjadi hambatan dalam operasional akan menghambat proses pelayanan kepada para pelanggan dan selanjutnya akan mengurangi daya saing yang pada akhirnya sangat berdampak pada kemampuan memproduksi premi sebagai pendapatan utama perusahaan.

4. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap MNCAI dan MNCL. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh MNCAI dan MNCL. Kegagalan MNCAI dan MNCL dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat berpengaruh terhadap hasil usaha Perseroan.

5. Risiko Kepengurusan

Risiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak memadai, komposisi dan proporsi Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, kompetensi dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, serta kepemimpinan Direksi dan Dewan Komisaris tidak baik dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan dan menurunkan reputasi perusahaan.

6. Risiko Tata Kelola

Potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.

- **Risiko Lini Usaha Jasa Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Perantara Efek**

1. Risiko terkait Penghentian Ijin Usaha

Dalam menjalankan usahanya MNCS berpedoman pada peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan Pemerintah yang ditunjuk untuk mengatur dan melakukan pengawasan atas kegiatan pasar modal maupun oleh ketentuan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur perusahaan efek, termasuk yang dikeluarkan oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Adanya kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, memungkinkan penghentian sementara atau pencabutan salah satu ijin usaha MNCS sehingga akan berpengaruh terhadap hasil usaha Perseroan.

2. Risiko Penjaminan Emisi Efek

Salah satu kegiatan usaha MNCS adalah menjamin emisi efek. Apabila efek yang dijamin MNCS tidak dapat terjual habis maka MNCS diwajibkan untuk membeli efek yang tidak terjual tersebut dan sebagian dana MNCS menjadi terikat sehingga dapat mengganggu likuiditas dan jika harga efek tersebut mengalami penurunan harga, maka dapat mengakibatkan turunnya penghasilan Perseroan.

3. Risiko Perdagangan Efek

Usaha di bidang perdagangan efek sifatnya berfluktuasi, yang mengakibatkan pendapatan MNCS berfluktuasi tergantung pada keadaan Pasar Modal, kurs Rupiah, tingkat bunga umum, situasi politik dan volume perdagangan. Dengan kondisi tersebut apabila MNCS kurang dapat mengantisipasi situasi dengan baik, akan mempengaruhi pendapatan Perseroan secara negatif.

4. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber dari risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Kegagalan dalam mengelola risiko kepatuhan dapat menyebabkan MNCS terkena sanksi dan denda dari regulator atau penurunan reputasi.

5. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap MNCS. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh MNCS. Kegagalan MNCS dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat berpengaruh terhadap hasil usaha Perseroan.

6. Risiko Kepengurusan

Risiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak memadai, komposisi dan proporsi Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, kompetensi dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, serta kepemimpinan Direksi dan Dewan Komisaris tidak baik dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan dan menurunkan reputasi perusahaan.

7. Risiko Tata Kelola

Potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.

- **Risiko Lini Usaha Jasa Pengelolaan Investasi**

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Pendapatan Risiko ini dapat terjadi akibat fluktuasi harga efek (risiko pasar) termasuk berkurangnya nilai unit penyertaan yang disebabkan pertumbuhan harga efek dalam portofolio reksa dana lebih rendah dari besarnya biaya pembelian dan biaya penjualan kembali dan dapat menyebabkan penurunan terhadap NAB reksadana yang dikelola.

2. Risiko Likuiditas Reksadana Terbuka

Risiko likuiditas dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali unit penyertaan secara serentak oleh pemegang unit penyertaan, sehingga manajer investasi tidak dapat dengan segera menyediakan uang tunai untuk membayar penjualan kembali unit penyertaan tersebut, antara lain, karena:

- Keadaan likuiditas reksa dana yang kurang baik.
- Buruknya kondisi ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kinerja efek.
- Keadaan darurat.

Hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha MNCAM apabila seluruh nasabah menarik dana mereka secara serentak.

3. Risiko Kredit

Risiko kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan efek dan instrumen pasar uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan/atau bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi reksa dana secara negatif.

4. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap MNCAM. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh MNCAM. Kegagalan MNCAM dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat berpengaruh terhadap hasil usaha Perseroan.

5. Risiko Tata Kelola

Potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.

- **Risiko Finansial Teknologi**

1. Risiko terkait Penghentian Ijin Usaha

Dalam menjalankan usahanya Entitas Anak berpedoman pada peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang mengatur dan melakukan pengawasan atas kegiatan penyelenggara teknologi finansial. Adanya kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, memungkinkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha sementara atau pencabutan ijin usaha sehingga akan berpengaruh terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber dari risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Kegagalan dalam mengelola risiko kepatuhan dapat menyebabkan Entitas Anak terkena sanksi dan denda dari regulator atau penurunan reputasi.

3. Risiko Tata Kelola

Potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERSEBUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Pada bulan Desember 2022, MAB dan MNCS, entitas anak, melakukan penjualan sebanyak 425.457.600 lembar senilai Rp 109.258 juta. Tidak terdapat selisih antara harga perolehan dengan harga pelepasan saham yang diperoleh kembali. Sehingga pada tanggal prospectus ini diterbitkan, MAB dan MNCS (entitas anak) sudah tidak memiliki saham Perseroan.

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan dan hingga Efektifnya Pernyataan Pendaftaran selain yang diungkapkan di atas, tidak ada kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 28 November 2022 atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam Laporan Akuntan Publik tertanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh Florus Daeli SE, Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP, ASEAN CPA dengan ijin AP.0126. Dan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporan Akuntan Publik tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Harris Siregar CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0524 serta atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporan Akuntan Publik tertanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Barugamuri Dachi M., Ak., CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1150.

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK. Informasi keuangan tersebut disajikan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Tidak terdapat fakta material lain selain yang telah diungkapkan di atas dan tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan konsolidasian interim per tanggal 30 September 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan di Jakarta pertama kali dengan nama PT Bhakti Capital Indonesia berdasarkan Akta No. 100 tanggal 15 Juli 1999, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH 09.03/III/2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097.

Susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian, sesuai dengan Akta Pendirian No. 100 tanggal 15 Juli 1999, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Saham	Nominal	%
Modal Dasar	40.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Bhakti Investama Tbk	9.999.000	9.999.000.000	99,99
- Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk.	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	30.000.000	30.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir adalah sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.33 tanggal 15 Agustus 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022”), yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0059072.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022, adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan penunjang usaha lainnya, pendidikan, informasi dan komunikasi, aktivitas jasa lainnya, perdagangan besar, industri pengolahan, pengangkutan dan pergudangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, serta real estat. Namun kegiatan usaha Perseroan saat ini yang telah benar-benar dijalankan adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Investasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, meliputi:
 - i. Aktivitas perusahaan *holding*.
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis, meliputi:
 - i. Periklanan;
 - ii. Penelitian Pasar;
 - iii. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya ytdl;
 - iv. Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis;
 - v. Aktivitas arsitektur;
 - vi. Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis;
 - vii. Aktivitas desain konten kreatif lainnya.

- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, dan Penunjang Usaha Lainnya, meliputi:
 - i. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan;
 - ii. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya;
 - iii. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat perekaman gambar dan *editing*;
 - iv. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya ytdl;
 - v. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pendidikan, meliputi:
 - i. Jasa pendidikan manajemen dan perbankan;
 - ii. Pendidikan lainnya swasta.
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang Informasi dan Komunikasi, meliputi:
 - i. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Jasa Lainnya, meliputi:
 - i. Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya.
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Besar, meliputi:
 - i. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - ii. Perdagangan besar mobil baru;
 - iii. Perdagangan besar sepeda motor baru;
 - iv. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
 - v. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi.
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang Industri Pengolahan, meliputi:
 - i. Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan;
 - ii. Industri pendinginan/pengesan ikan;
 - iii. Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya;
 - iv. Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil;
 - v. Industri furnitur dari kayu;
 - vi. Industri mesin untuk keperluan umum lainnya;
 - vii. Industri perlengkapan dan perlatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur);
 - viii. Industri barang bangunan dari kayu;
 - ix. Industri barang bangunan prafabrikasi dari kayu;
 - x. Industri barang anyaman dari rotan dan bambu;
 - xi. Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu;
 - xii. Industri alat dapur dari kayu, rotan, dan bambu;
 - xiii. Industri barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya ytdl;
 - xiv. Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - xv. Industri minyak mentah dan lemak nabati;
 - xvi. Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit;
 - xvii. Industri minyak goreng kelapa.
- i. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi:
 - i. Pergudangan termasuk aktivitas *cold-storage*;
 - ii. Angkutan darat lainnya untuk penumpang.
- j. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, meliputi:
 - i. Pertanian termasuk pertanian padi hibrida, pertanian padi inbrida, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis;
 - ii. Peternakan termasuk pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya sapi perah, budidaya ayam ras pedaging, budidaya ayam ras petelur, pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya, pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya;

- iii. Perikanan termasuk penangkapan pisces/ikan bersirip di laut, penangkapan biota air lainnya di laut, penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat, penangkapan biota air lainnya di perairan darat, pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung atau karamba jaring tancap;
 - iv. Perkebunan termasuk perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan buah oleaginous lainnya;
 - v. Kehutanan termasuk pengusahaan hutan bukan kayu lainnya, pemanenan kayu, usaha pemungutan kayu, usaha kehutanan lainnya, pemungutan bukan kayu lainnya.
- k. Menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi, meliputi:
- i. Penyiapan lahan;
 - ii. Pembongkaran;
 - iii. Konstruksi termasuk konstruksi gedung hunian, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung lainnya, konstruksi bangunan sipil jalan, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi bangunan sipil lainnya, konstruksi khusus lainnya ytdl;
 - iv. Instalasi termasuk instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, instalasi mekanikal, instalasi saluran air (*plumbing*), instalasi pemans dan geothermal, instalasi pendingin dan ventilasi udara dan instalasi konstruksi lainnya ytdl.
- l. Menjalankan usaha-usaha di bidang Real Estat, meliputi real estat termasuk real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan real estat atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
- m. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya termasuk jasa investasi, mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat menjalankan usaha lainnya (penunjang) yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan.

Perseroan memiliki penyertaan langsung pada Entitas Anak berikut ini:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
1.	MNCAM	Jasa pengelolaan investasi	Jakarta	99,99	2003	Beroperasi	Langsung
2.	MNCS	Jasa perantara pedagang efek dan penjamin emisi	Jakarta	99,99	2004	Beroperasi	Langsung
3.	MNCF	Lembaga pembiayaan	Jakarta	99,99	2003	Beroperasi	Langsung
4.	MNCL	Jasa asuransi jiwa	Jakarta	99,98	2010	Beroperasi	Langsung
5.	MNCAI	Jasa asuransi umum	Jakarta	99,98	2011	Beroperasi	Langsung
6.	MNCGUI	Jasa penyewaan	Jakarta	99,99	2014	Beroperasi	Langsung
7.	BABP	Jasa perbankan	Jakarta	48,99	2014	Beroperasi	Langsung
8.	FM	Teknologi informasi	Jakarta	99,99	2020	Beroperasi	Langsung
9.	MTN	Finansial teknologi	Jakarta	99,99	2018	Beroperasi	Langsung
10.	MAB	Layanan urun dana	Jakarta	99,99	2016	Belum Beroperasi	Langsung
11.	SIAP	Finansial teknologi	Jakarta	99,99	2016	Belum Beroperasi	Langsung
12.	MDNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Beroperasi	Langsung
13.	RINP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Beroperasi	Langsung
14.	MCT	Jasa perantara perdagangan aset digital	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
15.	SGNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
16.	MIB	Jasa perantara asuransi	Jakarta	99,99	2016	Beroperasi	Langsung
17.	MMV	Modal Ventura	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
18.	MDT	Perusahaan investasi	Jakarta	99,99	2022	Belum Beroperasi	Langsung
19.	Winfly Ltd	Perusahaan investasi	British Virgin Island	100,00	2018	Beroperasi	Langsung
20.	Lafite Asets Ltd	Perusahaan investasi	British Virgin Island	100,00	2020	Beroperasi	Langsung
21.	Motion Digital Ltd	Perusahaan investasi	British Virgin Island	99,99	2022	Belum Beroperasi	Langsung

2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut ini adalah perubahan dalam struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 164 tanggal 27 Juli 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0366322 tanggal 26 Agustus 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139675.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Junctis (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 27 tanggal 23 Maret 2021, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0244174 tanggal 19 April 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0071198.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 April 2021, (ii) Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% (lima persen) atau lebih per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Nominal	%
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	21.228.044.760	2.122.804.476.000	50,40
- Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	390.000.000.000	9,26
- UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	3.450.695.800	345.069.580.000	8,19
- HT Investment Development Ltd.	3.708.705.000	370.870.500.000	8,81
- Masyarakat*	9.832.813.767	983.281.376.700	23,34
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (sebelum Saham Treasury)	42.120.259.327	4.212.025.932.700	100,00
Saham Treasury	498.591.600	49.859.160.000	
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.618.850.927	4.261.885.092.700	
Saham dalam Portepel	107.381.149.073	10.738.114.907.300	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Keterangan

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 2.857.999.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.285.799.900.000 (dua ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) tersebut merupakan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2021, dan diambil bagian oleh:

- i. Marco Prince Corp sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham; dan
- ii. Scotts Capital Investment Corporation sebesar 1.357.999.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham.

Sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan melalui website Bursa Efek dan website Perseroan bersamaan dengan pengumuman RUPS pada tanggal 14 Mei 2019 dan Perubahan dan/atau Pernyataan Kembali Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham website Bursa Efek dan website MKAP pada tanggal 31 Mei 2019.

Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut telah mendapat persetujuan RUPS Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 20 Juni 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.25 tanggal 20 Juni 2019, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan ditegaskan kembali dalam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.162 tanggal 27 Juli 2020, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dimana RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui penambahan

modal Perseoran melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 3.712.482.170 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).

Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut, telah diumumkan dalam website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan <https://www.mncfinancialservices.com/> pada tanggal 5 Januari 2021.

Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 jo. “Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% Atau Lebih” (Daftar Pemegang Saham) Tanggal 31 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Nominal	%
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	21.228.044.760	2.122.804.476.000	50,31
- Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	390.000.000.000	9,24
- UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	3.114.935.800	311.493.580.000	7,38
- HT Capital Investment Ltd.	3.708.705.000	370.870.500.000	8,79
- Masyarakat*	10.241.707.767	1.024.170.776.700	24,28
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (sebelum Saham Treasury)	42.193.393.327	4.219.339.332.700	100,00
Saham Treasury	425.457.600	42.545.760.000	
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	42.618.850.927	4.261.885.092.700	
	107.381.149.073	10.738.114.907.300	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Jumlah saham *treasury* Perseroan sebanyak 425.457.600 saham, merupakan saham Perseroan milik Entitas Anak dengan rincian yang dimiliki PT MNC Sekuritas (“MNCS”) adalah sejumlah 415.022.600 saham dan dimiliki oleh PT Modal Anak Bangsa (“MAB”) sejumlah 10.435.000 saham.

Disamping yang dimiliki oleh MNCS dan MAB sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 22 Desember 2020 PT MNC Teknologi Nusantara (“MTN”) membeli/memiliki saham Perseroan sejumlah 51.300.000 saham dan PT FM Digital Solution (“FM”) membeli/memiliki saham Perseroan sejumlah 21.834.000 saham.

Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 UUPT, maka saham Perseroan yang dibeli oleh Anak Perusahaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai saham *treasury* Perseroan, karena saham *treasury* diperoleh apabila dilakukan pembelian saham Perseroan oleh Perseroan tersebut dan sahamnya dikuasai oleh Perseroan.

Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur bahwa Perseroan dilarang untuk mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan (*cross holding*), dengan demikian kepemilikan saham Perseroan oleh Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud diatas terqualifikasi sebagai larangan yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 UUPT. Namun demikian saham Perseroan yang dimiliki oleh Anak Perusahaan saat ini telah dijual seluruhnya kepada pihak yang berwenang menerima pengalihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Bursa Efek, yaitu saham Perseroan yang dimiliki oleh MNCS telah dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 9 Desember 2022, saham Perseroan yang dimiliki oleh MAB telah dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 5 Desember 2022, saham Perseroan yang dimiliki oleh MTN telah dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 10 Maret 2022, dan saham Perseroan yang dimiliki oleh FM telah dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 10 Maret 2022. Dengan dijualnya saham-saham tersebut maka sudah tidak ada lagi *cross holding* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 UUPT.

2. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 Juncto Daftar Pemegang Saham Per tanggal 12 Desember 2022, yang diambil dari Website KSEI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 12 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Nominal	%
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	21.228.044.760	2.122.804.476.000	49,81
- Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	390.000.000.000	9,16
- UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	3.004.211.300	300.421.130.000	7,05
- HT Capital Investment Ltd.	3.708.705.000	370.870.500.000	8,70
- Masyarakat*	10.777.889.867	1.077.788.986.700	25,28
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.618.850.927	4.261.885.092.700,00	100,00
Saham dalam Portepel	107.381.149.073	10.738.114.907.300	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut adalah beberapa kejadian penting Perseroan sejak awal berdiri sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Tahun	Kejadian Penting
1999	Pada tanggal 15 Juli 1999, Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bhakti Capital Indonesia. PT MNC Investama mengalihkan bisnis sekuritas dan aset manajemen ke PT Bhakti Capital Indonesia.
2001	Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (<i>Initial Public Offering/IPO</i>), dengan kode saham BCAP.
2003	Perseroan menjadi perusahaan induk untuk entitas anak di bawah MNC Group yang bergerak di sektor jasa keuangan. PT Bhakti Asset Management dan PT Bhakti Finance menjadi Entitas Anak Perseroan
2004	PT Bhakti Securities resmi didirikan. Kegiatan usaha sekuritas Perseroan dialihkan ke PT Bhakti Securities.
2010	Perseroan mengakuisisi PT UOB Life Sun Assurance yang kemudian namanya diganti menjadi PT MNCL Assurance (MNCL).
2011	Perseroan mengakuisisi PT Jamindo General Insurance yang kemudian namanya diganti menjadi PT MNC Asuransi Indonesia (MNCAI). PT Bhakti Asset Management, PT Bhakti Finance dan PT Bhakti Securities masing-masing berganti nama menjadi PT MNC Asset Management (MNCAM), PT MNC Finance (MNCF) dan PT MNC Securities.
2012	Perseroan berganti nama menjadi PT MNC Kapital Indonesia Tbk.
2013	Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp225 miliar dengan tenor 5 tahun untuk memperkuat modal kerja Entitas Anak.
2014	Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 2.615.276.045 lembar saham dengan total nilai Rp2,35 triliun. Perseroan mengambil alih saham dan resmi menjadi pemegang saham pengendali PT Bank ICB Bumiputera Tbk yang kemudian namanya diganti menjadi PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP). Perseroan mengakuisisi 99,99% kepemilikan saham atas PT Indo Finance Perkasa yang kemudian namanya diganti menjadi PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGUI).
2015	Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 551.474.960 lembar saham dengan total dana yang diterima sebesar Rp827,21 miliar. BABP meluncurkan aplikasi <i>mobile banking</i> .
2016	Perseroan melakukan investasi yang diutamakan untuk membangun infrastruktur digital pada tujuh unit bisnisnya. MNCS meluncurkan Aplikasi perdagangan saham secara <i>online</i> , yang diberi nama MNC Trade New. MNCF meluncurkan Aplikasi <i>consumer loan</i> dengan nama Bang Kredit.
2017	PT MNC Securities berganti nama menjadi PT MNC Sekuritas (MNCS).

Tahun	Kejadian Penting
	Perseroan meresmikan kantor cabang terintegrasi MNC Financial Services di Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, Medan, dan Bali untuk mewujudkan pelayanan jasa keuangan terpadu dari 7 unit bisnisnya di bawah “satu atap” kepada nasabah.
2018	Peluncuran logo baru Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan mendirikan entitas anak baru bernama PT MNC Teknologi Nusantara (MTN), yang berfokus pada pengembangan solusi dan sistem pembayaran digital, khususnya uang elektronik dengan produk utama bernama SPIN (<i>Smart Payment Indonesia</i>).
2019	Perseroan melalui MTN memperoleh lisensi dari Bank Indonesia untuk menyediakan uang elektronik, dompet elektronik, dan transfer dana sebagai bagian dari uang elektronik, dan selanjutnya meluncurkan SPIN pada tanggal 3 November 2019. Perseroan melalui MNCL meluncurkan aplikasi asuransi digital dengan nama Hario.
2020	MTN mendapatkan Persetujuan dari Bank Indonesia untuk Penggunaan QRIS (<i>Quick Response Code Indonesia Standard</i>) dalam aplikasi SPIN. Perseroan mengakuisisi FM, sebuah Perusahaan <i>payment gateway</i> dan <i>biller aggregator</i> . Perseroan terus berfokus pada peningkatan berbagai layanan keuangan digital, diantaranya Motion – <i>mobile banking</i> ; Hario – aplikasi asuransi; MNC Trade New – <i>platform</i> perdagangan saham; dan SPIN – aplikasi <i>e-money</i> , <i>e-wallet</i> , <i>digital remittance</i> . Perseroan mengakuisisi mayoritas saham Auerbach Grayson & Company LLC untuk merambah pasar internasional.
2021	Memperoleh lisensi penyelenggara <i>payment gateway</i> , layanan <i>fraud detection system</i> dan <i>invoicing</i> dari Bank Indonesia. MNCGUI meluncurkan SIAP Haji – pembiayaan haji berbasis web. BABP mendapatkan izin <i>digital onboarding</i> untuk MotionBanking dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perseroan dan entitas anaknya meluncurkan sekaligus rebranding Aplikasi keuangan digital mereka dengan brand “Motion”, yang meliputi MotionBanking, MotionTrade, MotionInsure, MotionPay. Program loyalitas bernama MotionPoints dan pusat teknologi keuangan digital bernama MotionTechnology juga diluncurkan tahun ini. Perseroan mengakuisisi PT Felima Orient Pacific, suatu perusahaan Pialang asuransi, dan mengubah namanya menjadi PT MNC Insurance Broker (MIB)

4. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
Perseroan			
1.	Nomor Induk Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 9120401882196 tanggal 22 September 2022 (Perubahan ke-2), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	SIUP tanggal 13 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
Entitas Anak			
MNCAM			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 9120409940032, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 3 September 2019 yang telah mengalami perubahan ke-3 pada tanggal 18 Maret 2021	Berlaku selama MNCAM menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Perusahaan Efek	Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-05/PM/MII/2000 tanggal 25 Mei 2000	Masa berlaku tidak diatur.

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
3.	Izin Komersial/Operasional	Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 15 Maret 2021	Masa berlaku tidak diatur.
4.	Izin Lokasi	Izin Lokasi dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk lokasi-lokasi MNCAM di Jakarta (diterbitkan tanggal 15 Maret 2021), Surabaya (diterbitkan tanggal 18 November 2020), Bandung (diterbitkan tanggal 18 November 2020), dan Pekanbaru (diterbitkan tanggal 18 November 2020).	Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
5.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 000353.01/DJAI.PSE/04/2021 tanggal 9 April 2021 untuk MNC DUIT dan Motionfunds.	Masa berlaku tidak diatur.

MNCS

1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 9120402891355 tanggal 15 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama MNCS menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-03/PM/PEE/2004 tanggal 26 Mei 2004 jo. Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Nomor KEP-20/PM.2/2021 tanggal 29 Oktober 2021.	Masa berlaku tidak diatur.
3.	Persetujuan Anggota Bursa Efek	Surat No. SPAB 235/JATS/BEJ.ANG/06-2004 oleh PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 1 Juni 2004	Masa berlaku tidak diatur.
4.	Pencatatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana	Surat No. S-368/PM.211/2016, tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Masa berlaku tidak diatur.
5.	Persetujuan atas Transaksi Reksa Dana secara Elektronik	Surat No. S-698/PM.21/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A	Masa berlaku tidak diatur.
6.	Persetujuan Kegiatan Lain sebagai Penatalaksana (<i>Arranger</i>) atas Efek MTN, PN, NCD, Obligasi Konversi, Surat Utang Konversi, dan Surat Utang Wajib Konversi	Surat No. S-154 /PM.21/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Masa berlaku tidak diatur.
7.	Izin Komersial / Operasional Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik	Izin Komersial/Operasional berupa Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik tanggal 11 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	Masa berlaku tidak diatur.
8.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No.00703.02/DJAI.PSE/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021, diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk produk Motion Trade.	Masa berlaku tidak diatur.

MNCF

1.	Nomor Induk Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 9120102162348 tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama MNCF menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan	1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-64/KM.10/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 155/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Citra International Finance & Investment Corporation sebagaimana telah diubah dengan	Masa berlaku tidak diatur.

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
		Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-039/KM.5/2006, yang menerangkan memberi izin usaha Perusahaan Pembiayaan kepada MNCF. 2. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-443/NB.223/2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada MNCF yang ditetapkan tanggal 13 Oktober 2015.	
MNCL			
1.	Nomor Induk Berusaha	Perizinan Usaha Berbasis Risiko No. 02201082318480001 tanggal 5 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku selama MNCL menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Asuransi Jiwa	Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 647/KMK.017/1996 tanggal 13 November 1996 jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-717/KM.10/2010 tanggal 21 Februari 2011	Berlaku selama MNCL menjalankan kegiatan usaha.
MNCAI			
1.	Nomor Induk Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 8120210172789 tanggal 28 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama MNCAI menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Asuransi	Surat Keputusan Direktorat Jenderal Moneter No. Kep-5790/M/1988 tentang izin usaha PT. Asuransi Jamindo Pusaka jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-118/KM.10/2012 tanggal 2 Maret 2012.	Masa berlaku tidak diatur.
MNCGUI			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 9120314271393 tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama MNCGUI menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan	1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 91/KMK/017/1995 tanggal 15 Februari 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Indo Finance Perkasa, yang memberi izin kepada PT Indo Finance Perkasa untuk melakukan kegiatan dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu kredit dan Pembiayaan Konsumen. 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-482/NB.1/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Indo Finance Perkasa Menjadi PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGUI), yang memberlakukan izin usaha di bidang perusahaan pembiayaan kepada PT Indo Finance Perkasa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 91/KMK/017/1995 tanggal 15 Februari 1995 kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGUI).	Masa berlaku tidak diatur.
3.	Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah	Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. S-973/NB.223/2016 tanggal 29 Juli 2016.	Masa berlaku tidak diatur.
BABP			

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 9120505892397, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan Perubahan ke-2 pada tanggal 19 Januari 2022	Berlaku selama BABP menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Bank Umum, Bank Persepsi, dan Bank Devisa	<p>1. Keputusan Menteri Keuangan No.10/KMK.013/1990 tanggal 4 Januari 1990 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.22/1147/Upps/PSBd tanggal 20 Januari 1990 tentang pemberian izin usaha untuk beroperasi sebagai Bank Umum kepada PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk.</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/45/KEP.GBI/2009 tanggal 11 September 2009, izin usaha atas nama PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk dialihkan menjadi izin usaha PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.18/KDK.03/2014 tanggal 15 Oktober 2014 izin usaha atas nama PT Bank ICB Bumiputera Tbk dialihkan menjadi izin usaha BABP.</p> <p>2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.30/146/KEP/DIR tanggal 5 Desember 1997, BABP resmi mulai beroperasi sebagai Bank Devisa dari tanggal 5 Desember 1997. BABP memperoleh status sebagai Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi dan Bank Devisa Persepsi Kas Negara untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-485/MK.03/1998 tanggal 8 September 1998 tentang Penunjukan BABP sebagai Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi Kas Negara.</p>	Berlaku selama BABP menjalankan kegiatan usaha.
3.	Izin Penyelenggaraan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-60/PB.33/2021 tanggal 25 Mei 2021	Masa berlaku tidak diatur.
4.	Izin Operasional / Komersial	Izin Operasional / Komersial dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 3 November 2020	Berlaku selama BABP menjalankan kegiatan usaha.
5.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Motion dan Ebiz	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No.00453.01/DJAI.PSE/04/2021 tanggal 26 April 2021	Masa berlaku tidak diatur.
6.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Motionbanking.id	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Domestik PB-UMKU: 912050589239700010002 tanggal 1 Juli 2022	Masa berlaku tidak diatur.
7.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Website	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Domestik PB-UMKU: 912050589239700010001 tanggal 1 Juli 2022, diterbitkan oleh sistem OSS atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Masa berlaku tidak diatur.
8.	Izin Lokasi	Izin Lokasi dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 2 Oktober 2020	Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
			tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
FM			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 0220207930316 tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama FM menjalankan kegiatan usaha.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	SIUP Menengah No. 203/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2018 tanggal 15 Februari 2018, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.	Berlaku selama FM menjalankan kegiatan usaha.
3.	Izin Komersial / Operasional	Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 1 Desember 2020	Berlaku selama FM menjalankan kegiatan usaha.
4.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 000126.01/DJAI.PSE/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Masa berlaku tidak diatur.
MTN			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 0220108401147 tanggal 14 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama MTN menjalankan kegiatan usaha.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	SIUP tanggal 2 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Berlaku selama MTN menjalankan kegiatan usaha.
3.	Izin Komersial / Operasional	Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 1 Desember 2020	Berlaku selama MTN menjalankan kegiatan usaha.
4.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 000259.01/DJAI.PSE/03/2021 tanggal 4 Maret 2021, diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Masa berlaku tidak diatur.
5.	Tanda Daftar Penyelenggara Transfer Dana	Surat No. 21/260/DKSP/96 tanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (<i>Payment System Policy Department</i>).	Masa berlaku tidak diatur.
6.	Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Pemrosesan Transaksi Menggunakan Standar Nasional QR Code Pembayaran (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>) – Merchant Presented Mode (QRIS-MPM)	Surat Bank Indonesia No. 22/225/DKSP/Srt/B tanggal 31 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.	Masa berlaku tidak diatur.
7.	Izin Sebagai Penyelenggara Dompot Elektronik	Surat Bank Indonesia No. 21/393/DKSP/Srt/B tanggal 23 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.	Masa berlaku tidak diatur.
8.	Izin Sebagai Penyelenggara Transfer Dana Dalam Rangka Penyediaan Fitur Transfer Dana Melalui Uang Elektronik	Surat Bank Indonesia No. 21/394/DKSP/Srt/B tanggal 23 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.	Masa berlaku tidak diatur.
9.	Izin Sebagai Penerbit Uang Elektronik	Surat Bank Indonesia No. 21/392/DKSP/Srt/B tanggal 23 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.	Berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak pemberian izin sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024.
MAB			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 0294000931646 tanggal 26 Februari 2021 (Perubahan Ke-1), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama MAB menjalankan kegiatan usaha.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Melalui Sistem Elektronik	SIUP tanggal 26 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama	Masa berlaku tidak diatur.

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
		Menteri, Pimpinan Lembaga. Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018	
3.	Izin Komersial / Operasional	Izin Komersial/Operasional dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 18 Februari 2021	Masa berlaku tidak diatur.
4.	Izin Lokasi	Izin Lokasi dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 26 Februari 2021	Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis dan diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
SIAP			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 1211000313602 tanggal 30 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku selama SIAP menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Lokasi	Izin Lokasi tanggal 6 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Walikota Adm. Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan	SIUP tanggal 6 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	Berlaku selama SIAP menjalankan kegiatan usaha.
MDNP			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 0208220043038 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama MDNP menjalankan kegiatan usaha.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	SIUP Kecil tanggal 09 September 2016, yang dikeluarkan oleh PTSP	Berlaku selama MDNP menjalankan kegiatan usaha.
RINP			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 1609220263293 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama RINP menjalankan kegiatan usaha.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	SIUP Kecil tanggal 09 September 2016, yang dikeluarkan oleh PTSP	Berlaku selama RINP menjalankan kegiatan usaha.
MCT			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 1003220052888 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama MCT menjalankan kegiatan usaha.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	SIUP Kecil tanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh PTSP	Berlaku selama MCT menjalankan kegiatan usaha.
SGNP			
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	SIUP Kecil tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh PTSP	Berlaku selama SGNP menjalankan kegiatan usaha.
MIB			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 9120000111844 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama MIB menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Perusahaan Pialang Asuransi	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-13/NB.1/2022 tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan dengan Perubahan Nama PT Felima Orient Pacific Menjadi MIB.	Masa berlaku tidak diatur.
MMV			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 1709210037334, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama MMV menjalankan kegiatan usaha.

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
MDT			
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 2903220018105, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama MDT menjalankan kegiatan usaha.

5. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

A. Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk menunjang kegiatan usahanya.

B. BABP

Berikut adalah perjanjian-perjanjian BABP dengan Pihak Ketiga khususnya untuk menunjang kegiatan usaha BABP:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Kerja Sama Tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronik Artajasa dalam Rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional No. 054/MB-AJ/PKS/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum Kedua Terhadap Perjanjian Kerja Sama Tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronik Artajasa dalam Rangka Implementasi QR Gerbang Pembayaran Nasional No. 071/MB-APE/Add/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022	PT Artajasa Pembayaran Elektronik ("Artajasa") dan BABP	21 Juni 2018 – 21 Juni 2021 Masa keanggotaan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya demikian seterusnya, selama perseroan tidak menyampaikan pemberitahuan tidak memperpanjang masa keanggotaan. Sampai dengan Keterangan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan tidak terdapat pengakhiran atas Perjanjian sebagaimana tersebut di atas. Sehingga Perjanjian di atas masih berlaku dan mengikat Para Pihak.	Artajasa memberikan Layanan Transaksi Elektronik Artajasa kepada Perseroan sebagai berikut: a. Layanan ATM Bersama; b. Layanan ATM Bersama Debit; dan c. Layanan ATM Bersama QR
2.	Perjanjian Kerja Sama No. 037/MB-DUKCAPIL/KS/III/18 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia	21 Juli 2022 – 31 Juli 2023	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik Dalam Layanan Perseroan.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	Kependudukan dan KTP Elektronik Dalam Layanan Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Keenam Perjanjian Kerja Sama No. 062/MB-Dukcapil/Add/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik Dalam Layanan Perseroan	dan BABP		
3.	Perjanjian Pemeliharaan Hardware Security Module antara BABP Tbk dengan PT Dymar Jaya Indonesia Nomor 032/MB-DJI/PKS/IV/19 tanggal 24 April 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Pemeliharaan Hardware Security Module antara BABP dengan PT Dymar Jaya Indonesia Nomor 042/MB-DJI-Add/V/2022 tanggal 18 Mei 2022	BABP dan PT Dymar Jaya Indonesia ("Pihak Kedua")	29 April 2022 - 31 Desember 2022 Keterangan: Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan untuk jangka waktu yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.	Perjanjian Pemeliharaan Hardware Security Module oleh Pihak Kedua.
4.	Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan Telekomunikasi No. 011/FMU-IT/IX/2019 tanggal 12 September 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan Telekomunikasi No. 262/MNCB-FMU/Add III/VII/2022 tanggal 30 Juni 2022	BABP dan PT Flexindo Mandiri Utama ("FMU")	01 Juli 2022 – 30 Juni 2023	Jasa layanan Penyediaan jenis sambungan telepon, HP, SLJJ, yang disalurkan oleh FMU ke operator.
5.	Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Perangkat Keras No. 049/MB-MII/PKS/2021 tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen II Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Perangkat Keras No. 045/MB-MII/Add/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022	PT Mitra Integrasi Informatika ("Pihak Pertama") dan BABP	30 Juni 2022 – 30 April 2023	Pemeliharaan Perangkat keras dan dukungan teknis untuk produk-produk berikut ini: a. FAZ-VM0000093019 FortiAnalyzer VM b. FEVM010000205152 FortiMail-VM01 c. FG100FTK19003326 FortiGate 100F d. FG200FT920909452 FortiGate 200F e. FG200FT920909459 FortiGate 200F f. FG200FT922901744 FortiGate 200F g. FGT60D4Q15036460 FortiGate 60D h. FGT60E4Q16064015 FortiGate 60E
6.	Perjanjian Pemeliharaan Annual Maintenance Cost For SKN Gen 2 Nomor: 038/MB-EI/KS/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perubahan Dan Penegasan Kembali Perjanjian Pemeliharaan Annual Maintenance Cost For SKN Gen 2 No. 068/MB-NTT/Add/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022	BABP ("Bank"), PT NTT Indonesia Digital Business Solutions (d/h PT Emerio Indonesia) dan PT NTT Indonesia Technology ("Vendor")	1 Juni 2022 – 31 Mei 2023	PT NTT Indonesia Digital Business Solutions mengalihkan seluruh hak dan kewajiban dalam perjanjian awal kepada Vendor. Untuk selanjutnya pelaksanaan perjanjian dilaksanakan oleh Bank dan Vendor. Vendor bersedia melakukan pekerjaan: a. Dukungan dan perbaikan error for current SKN Gen 2 single and bulk converter and processing; b. Menganalisis bug atau error yang terjadi dalam produksi; c. Support on call;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				<ul style="list-style-type: none"> d. Mandatory visit minimal 1 bulan sekali untuk diskusi; e. Kunjungan dalam waktu 2 jam setelah dihubungi oleh Bank (jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui on call); f. Pengembangan program SKN GEN 2 single and Bulk Converter and processing; dan g. Pengembangan fitur-fitur baru untuk SKN GEN 2 single and Bulk Converter processing.
7.	Perjanjian Jasa Cyber Security Operation Center No. 031/MB-PSS/PKS/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Jasa Cyber Security Operation Center No. 006/MB-PSS/Add/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022	BABP (“Bank”) dan PT Protergo Siber Sekuritas (“Provider”)	7 Juli 2022 – 6 Juli 2023	Perjanjian Jasa Cyber Security Operation Center untuk 75 aset – monitoring tersedia 24/7.
8.	Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Kerjasama Pengadaan Layanan Pemeliharaan Modul Silverlake Integrated Banking System No. 062/MB-SS/KS/VII/18 tanggal 12 Juli 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Kedua terhadap Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Kerjasama Pengadaan Layanan Pemeliharaan Modul Silverlake Integrated Banking System Nomor 018/MB-SLV/ADDM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022	BABP (“Pihak Pertama”) dan PT Structured Services (“Pihak Kedua”)	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 Keterangan: Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan untuk jangka waktu yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.	Layanan Pemeliharaan untuk Silverlake Intergrated Banking System Module, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Customer Information Facility (CIF) System b. Deposits System c. Loans System b. Remittance System c. Generla Ledger System d. Central Bank of Indonesia Reporting e. Branch Tellerling System f. Delivery Service Processor
9.	Perjanjian Kerja Sama Layanan Transaksi Cash In Dan/Atau Cash Out Motion Banking Melalui Kantorpos Secara Host To Host No. 070/MB-POS/PKS/IX/2021 tanggal 29 September 2021	PT Pos Indonesia (Persero) (“POS”) dan BABP (“MNC”)	29 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> a. MNC menunjuk POS untuk menyediakan layanan melakukan Transaksi Cash In dan/atau Transaksi Cash Out di outlet POS secara langsung untuk pengguna Jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. b. POS melayani Transaksi Cash In dan/atau Transaksi Cash Out dengan menyediakan dan mengembangkan fasilitas penyetoran dan penarikan uang tunai bagi pengguna jasa di outlet POS.
10.	Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Joint Financing Corporate Nomor: 032/MB-IMS/PKS/IV/2022 tanggal 13 April 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum I Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Joint Financing Nomor 049/MB-IMS/Add/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022	BABP (“Bank”) dan PT Intisoft Mitra Solusi (“Vendor”)	29 Juni 2022 – 29 Juni 2023	Vendor bersedia untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa pemeliharaan untuk Aplikasi Joint Financing Corporate; b. Jasa Pemeliharaan tidak termasuk pemeliharaan atau pengadaan Hardware, Lisensi Software O/S, Lisensi Software Database, Dan Lisensi Software Appeon; c. Selama masa pemeliharaan, Vendor akan melakukan pemeliharaan dan

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				<p>memperbaiki adanya bugs/error pada program aplikasi dan siap untuk menyelesaikan bugs/error tersebut untuk datang ke kantor bank;</p> <p>d. Pada setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat jam 08.00 WIB – 17.00 WIB, Vendor siap menerima laporan pengaduan dari bank melalui telepon, surat atau email;</p> <p>e. Melakukan kunjungan ke kantor bank sekali dalam 3 bulan untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan dan pemeliharaan atas program Aplikasi berjalan dan membuat berita acara pemeliharaan dan laporannya; dan</p> <p>b. Melakukan pendampingan proses akhir bulan pada setiap bulannya.</p>
11.	Perjanjian Kerja Sama Jasa Pemeliharaan Program Aplikasi Joint Financing Mirroring System No. 105/MB-IMS/KS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum IV Perjanjian Pemeliharaan Program Aplikasi Joint Financing Mirroring System No. 050/MB-IMS/Add/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022	BABP (“Pihak Pertama”) dan PT Intisoft Mitra Solusi (“Pihak Kedua”)	23 Juni 2022 – 22 Juni 2023	<p>Pihak Kedua memberikan pekerjaan:</p> <p>a. Jasa pemeliharaan untuk Aplikasi Joint Financing Mirroring System;</p> <p>b. Jasa pemeliharaan tidak termasuk pemeliharaan atau pengadaan Hardware, Lisensi Software O/S, Lisensi Software Database, dan Lisensi Software Appeon;</p> <p>c. Selama masa pemeliharaan, Pihak Kedua akan melakukan pemeliharaan dan memperbaiki adanya bugs/error pada program Aplikasi dan siap untuk menyelesaikan Bugs/Error tersebut untuk datang ke kantor Pihak Pertama</p> <p>d. Pada setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat jam 08.00 WIB – 17.00 WIB, Pihak Kedua siap menerima laporan pengaduan dari Pihak Pertama melalui telepon, surat atau email;</p> <p>e. Melakukan kunjungan ke kantor Pihak Pertama sekali dalam 3 bulan untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan dan pemeliharaan atas program Aplikasi berjalan dan membuat berita acara pemeliharaan dan laporannya; dan</p> <p>f. Melakukan pendampingan proses akhir bulan pada setiap bulannya.</p>
12.	Perjanjian Kerja Sama tentang jasa Layanan Swift Service Bureau Share Connection, Environment Disaster Recovery No.193/MB-DS/KS/XII/17; No.006/PKS-DRC/Add/Decillion/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, sebagaimana telah diubah dengan No.064/MB-BTI/PKS/VII/18; No.008/PKS-SSB/BT/VI/2018 tanggal 30 Juli 2018 dan telah diubah dengan perubahan	BABP (“Pihak Pertama”) dan PT Bottomline Technologies Indonesia d/h PT Decillion Solution (“Pihak Kedua”)	16 Juni 2022 – 15 Desember 2022 Keterangan: Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan untuk jangka waktu yang berlaku sejak tanggal 16	Penyediaan Jasa Layanan Swift Service Bureau Share Connection Environment Disaster Recovery.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	keduanya, Order Agreement No.: BT-109772 tanggal 16 Juni 2022		Desember 2022 sampai dengan 15 Juni 2023.	
13.	Perjanjian Kerjasama Layanan Komunikasi Jaringan antara PT Arthatech Selaras dengan Perseroan, No. PT Arthatech Selaras: 014/PKS-AS/XII/20, No. Perseroan: 068A/MB-ATH/PKS/XI/2020 tanggal 30 November 2020.	PT Arthatech Selaras ("Pihak Pertama") dan BABP ("Pihak Kedua")	1 Juni 2020 – 31 Mei 2025.	Pihak Kedua memerlukan jasa Pihak Pertama untuk menyediakan jasa penyelenggara telekomunikasi di kantor Pihak Kedua. Pihak Kedua telah menunjuk Pihak Pertama untuk menyediakan jasa penyelenggaraan telekomunikasi dan Pihak Pertama setuju untuk menerima penunjukan dari Pihak Kedua.
14.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dan PT Sarana Yukti Bandhana tentang Penyediaan Jasa Jaringan MLPO, No. Refrensi Perseroan: 070/MB-SYB/KS/IX/19 dan No. Refrensi SYB: P.MLPO.MNC/19/IX/2019 tanggal 23 September 2019.	BABP ("Bank") dan PT Sarana Yukti Bandhana ("SYB")	10 November 2017 – 9 November 2022, dan diperpanjang secara otomatis untuk 3 tahun berikutnya.	Para Pihak setuju dengan itikad baik untuk bekerjasama dalam rangka penyediaan layanan Jaringan MLPO oleh SYB kepada Bank untuk pembayaran tagihan listrik PLN dengan menggunakan aplikasi dan sistem <i>host to host</i> antara Bank dengan SYB dan antara SYB dengan PLN dan pelaksanaan pembayaran tagihan listrik nasabah perusahaan lainnya.
15.	Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Advantage SCM tentang Jasa Layanan <i>Cash in Transit</i> dan <i>Cash Processing Center</i> , No. Perseroan: 16A/MNCB-ASCM/KS/I/2016 dan No. PT Advantage SCM: 002/ADV-MNC/CIT/2016, tanggal 28 Januari 2016.	BABP ("Pihak Pertama") dan PT Advantage SCM ("Pihak Kedua")	28 Januari 2016 – 27 Januari 2017 Apabila tidak ada kesepakatan pengakhiran perjanjian, maka Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap tahunnya.	Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan jasa Pihak Kedua dalam pelaksanaan <i>Cash in Transit</i> dan <i>Cash Processing Center</i> dan Pihak Kedua setuju untuk memberikan jasanya tersebut untuk kepentingan Pihak Pertama sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
			<p><i>Keterangan:</i> Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan tidak terdapat pengakhiran atas Perjanjian sebagaimana tersebut di atas. Sehingga Perjanjian di atas masih berlaku dan mengikat Para Pihak.</p>	
16.	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Fasilitas 3D Secure Dynamic Authentication, No.067/MNC-AKKI-IS/KS/VI/2015; No.AKKI/2015/VI/002; No. 034/IS/VI/2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Fasilitas 3D Secure Dynamic Authentication , No. Perseroan: 048/MB-IS/PKS/VIII/20 dan No. Infinitium Solutions: PKS/III/VI/2020/MNC	BABP ("Bank"); Asosiasi Kartu Kredit Indonesia ("AKKI") dan PT Infinitium Solution ("Infinitium")	5 Juni 2020 – 4 Juni 2023	AKKI mengikatkan diri dan setuju untuk memberikan layanan sesuai dengan permintaan Bank, yaitu: AKKI akan menyediakan sistem untuk menjalankan layanan, menjamin bahwa Infinitium akan menyediakan dukungan teknis dalam menjalankan layanan, dan menjamin bahwa Infinitium akan bertanggung jawab untuk melakukan perawatan rutin layanan.
17.	Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia No.7/78/DASP tanggal 29 Juli 2005.	Bank Indonesia ("Pihak Pertama") dan BABP ("Pihak Kedua")	Jangka waktu berakhirnya perjanjian yaitu terhitung sejak Perseroan masih	Pihak Pertama setuju untuk menyediakan dan menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan Pihak Kedua setuju untuk

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
			menjadi Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sampai apabila Perseroan dihentikan secara tetap sebagai Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.	menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
			<p><i>Keterangan: Perjanjian sebagaimana tersebut di atas masih berlaku dan mengikat Para Pihak.</i></p>	
18.	Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Sistem Bank Indonesia – <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS), No.17/58/DPSP tanggal 16 November 2015.	Bank Indonesia (“Penyelenggara”) dan BABP (“Peserta”)	Jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan dengan mengingat ketentuan pengakhiran perjanjian. Apabila tidak ada kesepakatan pengakhiran Perjanjian, maka Perjanjian ini akan diperpanjang otomatis untuk setiap tahunnya.	Penyelenggara setuju untuk menyediakan sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS dan Peserta setuju untuk menggunakan sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS.
			<p><i>Keterangan: Perjanjian sebagaimana tersebut di atas masih berlaku dan mengikat Para Pihak.</i></p>	
19.	Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Bank Indonesia - <i>Scripless Securities Settlement System</i> (BI-SSSS), No.17/58/DPSP tanggal 16 November 2015	Bank Indonesia (“Penyelenggara”) dan BABP (“Peserta”)	Jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan dengan mengingat ketentuan pengakhiran perjanjian. Apabila tidak ada kesepakatan pengakhiran Perjanjian, maka Perjanjian ini akan diperpanjang otomatis untuk setiap tahunnya.	Penyelenggara menyediakan sarana dan prasarana BI-SSSS yang digunakan untuk melakukan penatausahaan, yang meliputi transaksi dengan Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, dan transaksi pasar keuangan.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
<p><i>Keterangan: Perjanjian sebagaimana tersebut di atas masih berlaku dan mengikat Para Pihak.</i></p>				
20.	<p>Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Aplikasi Sistem ATMR, PSAK LBU, dan AML antara Perseroan dengan PT Sahassa Panca Manunggal No. BABP: 108/MB-SPM/KS/XII/18 dan No. PT Sahassa Panca Manunggal: 29/SHS.PKS/XI/2018</p>	<p>PT Sahassa Panca Manunggal (“Pihak Pertama”) dan BABP (“Pihak Kedua”)</p>	<p>Berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023</p>	<p>Pihak Pertama memberikan layanan pemeliharaan aplikasi sistem ATMR, PSAK LBU dan AML yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan Pencegahan Kunjungan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memonitor kinerja dari aplikasi dan/atau program, termasuk memonitor table space, log system untuk memastikan space yang dibutuhkan masih tersedia sehingga aplikasi dan/atau program berjalan sesuai dengan yang diharapkan, serta memberikan saran-saran kepada Pihak Kedua tentang hal-hal yang bisa memperbaiki kinerja aplikasi/program sesuai lingkup pemeliharaan. b. Tindakan Perbaikan Melakukan koreksi terhadap kesalahan program jika ternyata program tidak sesuai dengan system design tersebut. c. Layanan Panggilan Memberikan dukungan dan bantuan mengenai operasional aplikasi, termasuk penggunaan aplikasi dan alur kerja aplikasi, serta menangani masalah yang mungkin disebabkan oleh kesalahan program.
21.	<p>Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank MNC Internasional Tbk dengan PT Mitra Sentral Terpadu Tentang Layana Tarik Tunai Rekening Melalui Mitra Tarik Tunai Nomor Pihak Pertama: 059a/MB-MST/PKS/IX/2021 dan Nomor Pihak Kedua: 245/PKS/MST-MNC/IX/2021 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Kedua atas Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Tarik Tunai Rekening Melalui Mitra Tarik Tunai Nomor Pihak Pertama: 083/MB-MST/Add/VIII/2022 dan Nomor Pihak Kedua: 304/Add/MST-MNC/VIII/2022</p>	<p>BABP (“Pihak Pertama”) dan PT Mitra Sentral Terpadu (“Pihak Kedua”)</p>	<p>Berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2024</p>	<p>Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Agregator Mitra Tarik Tunai untuk menyediakan jasa yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi layanan Tarik tunai rekening di mitra tarik tunai.</p>

C. MNCAM

Berikut adalah perjanjian-perjanjian MNCAM dengan Pihak Ketiga khususnya untuk menunjang kegiatan usaha MNCAM:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 70 tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandji, S.H., Notaris di Bandung, yang mengatur hal-hal sebagai berikut	- Wandy, Phiong Teddy Sanata, dan Tjong Virliz Amelia ("Pihak Pertama / Pihak yang Menyewakan") - MNCS, MNCAM, dan MNCGUI ("Pihak Kedua / Pihak Penyewa")	Satu tahun sejak 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.	Perjanjian Sewa Menyewa Sebuah bangunan Rumah Toko (Ruko) 3 lantai dengan luas bangunan 360 m2 berikut dengan tanah pekarangannya teletak di Kota Bandung setempat dikenal sebagai Jalan Naripan nomor 97A Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40112 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 905 m2 berdasarkan SHM No. 892/Kel. Kebon Pisang tertanggal 23 April 2012 yang tercatat atas nama Phiong Teddy Sanata, Tjong Virliz Amelia, dan Wandy.
2.	Perjanjian Pengadaan Jasa Pesan antara PT Citicall Teknologi Indonesia dengan MNCAM No.009/MNCAM/LEGAL/XI/2020 tanggal 11 November 2020	- PT Citicall Teknologi Indonesia ("Citicall") - MNCAM ("Klien")	1 tahun sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan 11 November 2021.	Atas permintaan Klien, Citicall setuju untuk menyediakan jasa Citicall kepada klien, dengan persyaratan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan aturan dalam Perjanjian ini. <i>Keterangan: Tidak terdapat pengakhiran atas Perjanjian sebagaimana tersebut di atas.</i>
3.	Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan antara PT Global Jasa Sejahtera dengan MNCAM No.009/MNCAM/LEGAL/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021	- MNCAM ("Pihak Pertama") - PT Global Jasa Sejahtera ("Pihak Kedua")	sampai dengan 31 Desember 2021. <i>Keterangan: Tidak terdapat pengakhiran atas Perjanjian sebagaimana tersebut di atas.</i>	Pihak Kedua wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Keamanan yang diperlukan oleh Pihak Pertama.
4.	Perjanjian Penggunaan Layanan Jasa S-Invest	- KSEI ("Penyedia S-INVEST"); - MNCAM ("Pengguna S-INVEST")	Perjanjian ini tidak memiliki jangka waktu	Penyedia S-INVEST dengan ini bersedia dan setuju untuk memberikan layanan jasa S-INVEST dalam bentuk, antara lain, pencatatan Produk Investasi, Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industry pengelolaan investasi (untuk selanjutnya disebut "Layanan Jasa") untuk Pengguna S-INVEST.

D. MNCS

Berikut adalah perjanjian-perjanjian MNCS dengan Pihak Ketiga khususnya untuk menunjang kegiatan usaha MNCS:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 2 tanggal 12 April 2022, yang dibuat di hadapan Theomarisi Eddy Boham, S.H., M.H., Notaris di Manado	- Fonny Poanda ("Pihak Pertama" / "Pihak yang Menyewakan") - MNCS ("Pihak Kedua" / "Pihak Penyewa")	15 April 2022 sampai dengan 15 April 2024.	Perjanjian Sewa Menyewa Sebuah bangunan rumah toko (ruko) diatas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Sertifikat No. 377/Wenang Selatan atas nama Fonny Poanda.
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 70 tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandji, S.H., Notaris di	- Wandy, Phiong Teddy Sanata, dan Tjong Virliz Amelia ("Pihak	Satu tahun sejak 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.	Perjanjian Sewa Menyewa Sebuah bangunan Rumah Toko (Ruko) 3 lantai dengan luas bangunan 360 m2 berikut dengan tanah pekarangannya teletak di

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	Bandung, yang mengatur hal-hal sebagai berikut	Pertama / Pihak yang Menyewakan") - MNCS, MNCAM, dan MNCGUI ("Pihak Kedua / Pihak Penyewa")		Kota Bandung setempat dikenal sebagai Jalan Naripan nomor 97A Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40112 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 905 m2 berdasarkan SHM No. 892/Kel. Kebon Pisang tertanggal 23 April 2012 yang tercatat atas nama Phiong Teddy Sanata, Tjiong Viriliz Amelia, dan Wandy.

E. MNCF

Berikut adalah perjanjian-perjanjian MNCF dengan Pihak Ketiga khususnya untuk menunjang kegiatan usaha MNCF:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Kerjasama No. 010/PK-RSR-BKL/MNCF/01/2018 tanggal 9 Januari 2018	- MNCF ("Pihak Pertama") - Mustaqim ("Pihak Kedua/Pemilik Showroom")	9 Januari 2018 sampai dengan 9 Januari 2019. <i>Keterangan: Tidak terdapat pengakhiran atas Perjanjian sebagaimana tersebut di atas.</i>	Pemberian fasilitas kredit/pembiayaan kepada konsumen yang membeli kendaraan milik Pihak Kedua oleh Pihak pertama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
2.	Perjanjian Kerjasama No. 15/PK-RSR/MNC-PKU/I/2018 tanggal 22 Januari 2018	- MNCF ("Pihak Pertama") - Fakhru Khasni ("Pihak Kedua/Pemilik Showroom")	Perjanjian ini mulai berlaku sejak dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki jangka waktu selama 1 tahun yakni 22 Januari 2018 sampai dengan 22 Januari 2019. Namun secara otomatis diperpanjang apabila Para Pihak tidak menghendaki pengakhiran atas perjanjian ini.	Pemberian fasilitas kredit/pembiayaan kepada konsumen yang membeli kendaraan milik Pihak Kedua oleh Pihak pertama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
3.	Perjanjian Kerjasama No. 02/PK-RSR/MNCF/KND/01/2018 tanggal 30 Januari 2018	- MNCF ("Pihak Pertama") - Surni Hardi ("Pihak Kedua")	Perjanjian ini mulai berlaku sejak dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki jangka waktu selama 1 tahun yakni 30 Januari 2018 sampai dengan 30 Januari 2019. Namun secara otomatis diperpanjang apabila Para Pihak tidak menghendaki pengakhiran atas perjanjian ini.	Pemberian fasilitas kredit/pembiayaan kepada konsumen yang membeli kendaraan milik Pihak Kedua oleh Pihak pertama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.

F. MNCGUI

Berikut adalah perjanjian-perjanjian MNCGUI dengan Pihak Ketiga khususnya untuk menunjang kegiatan usaha MNCGUI:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Kerjasama No. S.17.10.414-CS-L-MNCL tanggal 2 Oktober 2017	- PT Oscarmas ("Pihak Pertama") - MNCGUI ("Pihak Kedua")	Jangka waktu perjanjian ini dimulai sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.	Pihak Kedua akan meneliti dan menganalisa pelanggan yang membutuhkan fasilitas pembiayaan untuk memperoleh barang yang akan dijual oleh Pihak Pertama, baik pelanggan yang direkomendasikan oleh Pihak Pertama ataupun yang mengajukan permohonan langsung kepada Pihak Kedua.
2.	Perjanjian Kerja Sama Lelang No. 3/BLO-MNCL/JKT/XI/2018 tanggal 7 November 2018	- PT Balai Lelang Otomas ("Pihak Pertama") - MNCGUI ("Pihak Kedua")	Jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 7 November 2018 dan diperpanjang secara otomatis setiap tahun sampai dengan seterusnya. <i>Keterangan: Tidak terdapat pengakhiran atas Perjanjian sebagaimana tersebut di atas. Sehingga Perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat Para Pihak.</i>	i. Penyediaan layanan Jasa Lelang ini disepakati untuk ditatalaksanakan dalam bentuk dan format sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua, yaitu dalam bentuk penyediaan jasa pelelangan secara keseluruhan dan atau terbatas pada penyediaan jasa pelelangan bagi atau untuk kepentingan pemilik melalui Pihak Kedua yang dilakukan dengan format lelang sukarela sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang lelang. ii. Pelaksanaan Jasa Lelang sepakat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan proses lelang sejak verifikasi penyerahan unit Kendaraan Bermotor sampai dengan penyerahan pembayaran.
3.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 70 tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandil, S.H., Notaris di Bandung, yang mengatur hal-hal sebagai berikut	- Wandy, Phiong Teddy Sanata, dan Tjiong Virliz Amelia ("Pihak Pertama" / Pihak yang Menyewakan") - MNCS, MNCAM, dan MNCGUI ("Pihak Kedua" / Pihak Penyewa")	Satu tahun sejak 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.	Perjanjian Sewa Menyewa Sebuah bangunan Rumah Toko (Ruko) 3 lantai dengan luas bangunan 360 m2 berikut dengan tanah pekarangannya terletak di Kota Bandung setempat dikenal sebagai Jalan Naripan nomor 97A Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40112 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 905 m2 berdasarkan SHM No. 892/Kel. Kebon Pisang tertanggal 23 April 2012 yang tercatat atas nama Phiong Teddy Sanata, Tjiong Virliz Amelia, dan Wandy.

G. MNCAI

Berikut adalah perjanjian-perjanjian MNCAI dengan Pihak Ketiga khususnya untuk menunjang kegiatan usaha MNCAI:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 28 tanggal 27 November 2020, dibuat dihadapan Hajjah Tuti Alawiyah, S.H, Notaris di Bekasi	- Suhartono ("Pihak Pertama" / "Pihak yang Menyewakan") - MNCAI ("Pihak Kedua" / "Pihak Penyewa")	21 Januari 2021 sampai dengan 20 Januari 2023.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Ruko 4 lantai, terletak di Komplek Ruko Emerald Commercial Summarecon Bekasi, Jl. Bulevar Selatan Blok UG No. 10 Provinsi Jawa Barat, Bekasi, dengan luas 77 m2 (tujuh puluh tujuh meter persegi), type 220.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
2.	Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang No. 109/PB-KSS/P-SM/IX/22	- PT Kuala Sarana Sejahtera (“Pihak Pertama”) - MNCAI (“Pihak Kedua”)	1 November 2022 sampai dengan 31 Oktober 2024	Perjanjian sewa menyewa ruangan nomor #1 di lantai 1 seluas 48m2 di dalam gedung Puri Begawan Jl. Raya Pajajaran No. 5-7, Bogor 16143.
3.	Akta Perjanjian Perpanjangan Kontrak Sewa Menyewa Nomor 04 tanggal 26 Januari 2021 <i>jo.</i> Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 01 tanggal 5 Desember 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Natalia Astrea Devi Alie Kianggoen, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung	- Kurnia Tantra, Sri Murni Tantra, Chiellim Tantra, Iwan Tantra, dan Budhi Tantra (“Pihak Pertama”) - MNCAI (“Pihak Kedua”)	2 Desember 2022 sampai dengan 1 Desember 2024.	Perjanjian sewa menyewa 2 unit bangunan toko dan rumah tinggal dengan Surat Izin No. 503.644.2/SI-2531.Disbang/2007 tanggal 23 Oktober 2007 keduanya terletak di Jl. Lengkong Kecil No. 1B dan 1C, Kel. Paledang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
4.	Surat Perpanjangan Sewa Ruang Kantor No. 073PS/04.a.FGP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 <i>Jo.</i> Internal Office Memorandum MNCAI tanggal 30 Juni 2022	- PT Fajar Graha Pena Makassar (“Yang Menyewakan”) - MNCAI (“Penyewa”)	10 Juli 2022 – 9 Juli 2023	Perjanjian sewa Lantai 09 kav. 915 Gedung Fajar Graha Pena Makassar. Jl. Urip Sumohardjo No. 12 Makassar.
5.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No.038/PKS/MNCAI-MTF/VII/2016/LGL dan No.027A/PKS-CLC/MTF/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016	- PT Mandiri Tunas Finance (“Pihak Pertama”) - MNCAI (“Pihak Kedua”)	3 tahun, terhitung sejak 20 Juli 2016 sampai dengan 20 Juli 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai perusahaan asuransi yang menyediakan Asuransi Kendaraan Bermotor yang dibeli oleh Debitur dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama.
<u>Keterangan:</u> <i>Tidak terdapat pengakhiran atas Perjanjian sebagaimana tersebut di atas. Sehingga Perjanjian sebagaimana tersebut di atas masih berlaku dan mengikat Para Pihak.</i>				
6.	Addendum II Perjanjian Kerjasama Bengkel Rekanan PT MNC Asuransi Indonesia dengan PT Istana Carindo No.078/PKS-BENGKEL/MNCAI-IC/V/2017/LGL tanggal 9 Mei 2021	- MNCAI (“Pihak Pertama”) - PT Istana Carindo (“Pihak Kedua”)	9 Mei 2021 sampai dengan 9 Mei 2023	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan jasa perbaikan, pergantian dan perawatan body yang dibutuhkan untuk kendaraan milik tertanggung Pihak Pertama.
7.	Addendum II Perjanjian Kerjasama Penunjukan Bengkel Rekanan PT MNC Asuransi Indonesia dengan PT Persada Lampungraya No.084/PKS-BENGKEL/MNCAI-PL/IX/2017/LGL tanggal 30 September 2019 <i>Jo.</i> Addendum III Perjanjian Kerjasama Penunjukan Bengkel Rekanan PT MNC Asuransi Indonesia dengan PT Persada Lampungraya No.084/PKS-BENGKEL/MNCAI-PL/IX/2017/LGL tanggal 30 September 2021	- MNCAI (“Pihak Pertama”) - PT Persada Lampungraya (“Pihak Kedua”)	24 bulan dan akan berakhir tanggal 30 September 2023.	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai rekanan/mitra yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian suku cadang di Bengkel serta pelayanan antar jemput Kendaraan Bermotor milik Tertanggung Pihak Pertama yang dijamin dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.
8.	Addendum I Perjanjian Kerjasama Bengkel Rekanan PT	- MNCAI (“Pihak Pertama”)	24 bulan dan akan berakhir tanggal	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai rekanan/mitra yang

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	MNC Asuransi Indonesia dengan Muji Motor No. 094/PKS-Bengkel/MNCAI-MM/XI/2017/LGL tanggal 15 November 2019 Jo. Addendum II Perjanjian Kerjasama Bengkel Rekanan PT MNC Asuransi Indonesia dengan Muji Motor No. 094/PKS-Bengkel/MNCAI-MM/XI/2017/LGL tanggal 15 Juni 2020 Jo. Addendum III Perjanjian Kerjasama Bengkel Rekanan PT MNC Asuransi Indonesia dengan Muji Motor No. 094/PKS-Bengkel/MNCAI-MM/XI/2017/LGL tanggal 15 November 2021	- Muji Motor (“Pihak Kedua”)	15 November 2023	bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian suku cadang di Bengkel yang dijamin dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

6. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan syarat wajar dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Afiliasi	Masa Berlaku	Nilai (Rp)	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Sewa Ruang MNC Financial Center No. MNCL-MCAM-LA-9F-10F/230715 tanggal 23 Juli 2015 junctis Amandemen Kesatu Terhadap Perjanjian Sewa Ruang Lantai 20, 21, Ground Floor dan Sharing Area di Gedung MNC Financial Center No. MNCL-MNCKI-AMD1-20F-21F-GF/301116 tanggal 30 November 2016; Surat PT MNC Land Tbk No.182-MNC Kapital/GLDP-MKT/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020; dan Surat Konfirmasi Perpanjangan Sewa Ruang Kantor Lantai GF (share area), 13 (share meeting room), 20 dan 21 di Gedung Financial Center No. 182-MNC Kapital/GLDP-MKT/XII/20 tanggal 18 Desember 2020	Perseroan dan PT MNC Land Tbk	Afiliasi Karena Dikendalikan Langsung oleh Pihak Yang Sama	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.	Uang Sewa: a. Lantai 13 (share meeting room), 20, dan 21 adalah sebesar Rp.191.442,00 /m2/bulan belum termasuk PPN; b. Lantai GF adalah sebesar Rp.382.885,00 /m2/bulan belum termasuk PPN. Biaya Layanan: Rp.800.000,00/m2/bulan belum termasuk PPN.	Sewa-menyewa ruangan yang terletak di GF (share area), Lantai 13 (share meeting room), 20, dan 21, dengan total luas 992,77 m2, yang terletak dalam bangunan/gedung yang bernama MNC Financial Center, Jalan Kebon Sirih No. 21 - 27 Jakarta Pusat.
2.	Perjanjian Sewa Ruang MNC Financial Centre No. MNCL-MNCKI-LA-22F/F/230216 tanggal 23 Februari 2016 jjs. Surat No. 135-MNCKapital/GLDP-MKT/IX/21 tanggal 9 September 2021 Perihal: Konfirmasi Perpanjangan Sewa Ruang Kantor Lantai 22 di Gedung Financial Center dan Surat Konfirmasi Perpanjangan Sewa Ruang Kantor Lantai 22 di Gedung Financial Center No. 200-MNCKapital/GLDP-MKT/X/22	Perseroan dan PT MNC Land Tbk	Afiliasi Karena Dikendalikan Langsung oleh Pihak Yang Sama	1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023.	Biaya Sewa: Rp.191.442,00 per m2 per bulan, belum termasuk PPN. Biaya Layanan : Rp80.000,00 per m2 per bulan, belum termasuk PPN. Biaya layanan akan ditinjau kembali dari waktu ke waktu apabila terdapat kenaikan	Sewa menyewa ruangan yang terletak di Lantai 22 dengan luas 156,02 m2, yang terletak dalam bangunan/gedung yang bernama “MNC Financial Centre”, Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Afiliasi	Masa Berlaku	Nilai (Rp)	Deskripsi Singkat
					biaya operasional gedung.	
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 408-MNCB/GLDProp-MKT/VIII/17 junctis: (i) Perjanjian Perpanjangan Sewa Ruang di MNC Tower No. 26/GLDP-BMNCI/ADD.LA/XII/2018; (ii) Surat PT GLD Property, Ref. No. 245-MNC Bank/GLDP-MKT/X/20 tanggal 6 Oktober 2020 Perihal: Konfirmasi Perpanjangan Sewa Ruang Kantor Lantai B1F, GF suite 101, 101A, 105, dan Lantai 2 Suite 201 di MNC Tower, dan (iii) Surat PT GLD Property Ref. No. 202-MNCBank/GLDP-MKT/X/22 tanggal 20 Oktober 2022.	BABP dan PT GLD Property	Afiliasi Karena Dikendalikan Tidak Langsung oleh Pihak Yang Sama	1 Desember 2022 – 30 November 2024	Gross Rental (Biaya Sewa dan Biaya Layanan) adalah sebesar Rp.165.000,00 / m2 / bulan (Typical Floor) + sebesar Rp.250.000,00 / m2 / bulan (Ground Floor) + Rp.90.000,00 / m2 / bulan (Biaya Layanan).	Sewa ruang perkantoran yang terletak di lantai B1F, GF suite 101, 101A, 105, dan Lantai 2 suite 201 di MNC Tower, dengan total luas sewa adalah 788,55 m2.
4.	Surat PT GLD Property, Ref. No: 005-MNC Bank/GLDP – MKT/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, Perihal: Konfirmasi Perpanjangan Sewa Ruang Lantai suite 401 di MNC Tower	BABP dan PT GLD Property	Afiliasi Karena Dikendalikan Tidak Langsung oleh Pihak Yang Sama	1 Maret 2021 – 28 Februari 2023	Rp.165.000,00 / m2 / bulan dan biaya layanan sebesar Rp.90.000,00 / m2 / bulan.	Ruang perkantoran yang terletak di lantai suite 401 di MNC Tower.
5.	Kesepakatan Sewa Ruang Gedung Financial Center No.638-MNCAM/MNCL-MKT/IX/14 tanggal 20 November 2014 juncto Surat PT MNC Land Tbk Ref.No: 181-MNC Bank/GLDP-MKT/VII/20 tanggal 10 Juli 2020, Perihal: Konfirmasi Perpanjangan Sewa Ruang Kantor Lantai GF (share area), 13 (share meeting room), 6, 7, dan 8 di Gedung Financial Center	BABP dan PT MNC Land Tbk	Afiliasi Karena Dikendalikan Tidak Langsung oleh Pihak Yang Sama	1 November 2020 – 31 Oktober 2025	Gross Rental (Uang Sewa & Uang Pelayanan) adalah Rp.191.442,00/m2/bulan untuk lantai 6,7,8, dan 13 (share meeting), Rp.382.885,00 /m2/bulan untuk GF; dan Rp.80.000,00/m2/ bulan untuk Biaya Layanan.	Sewa Ruang Perkantoran yang terletak di Lantai GF (share area), 13 (share meeting room), 6, 7, dan 8 di gedung Financial Center.
6.	Perjanjian Kerjasama Bancassurance Term ROP – MNC Safe Pro dengan Model Distribusi antara Perseroan dengan MNCL, Nomor Perseroan: 082/MNCB-MNCLA/KS/VIII/2015 dan Nomor MNCL: 031/BA-MNCLA/VIII/2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Bancassurance Term ROP – MNC Safe Pro dengan Model Distribusi antara Perseroan dengan MNCL, Nomor Perseroan: 056/MNCB-MLA/Add/IX/2020 dan Nomor MNCL: 019/PKS-MNCLA/IX/2020 tanggal 17 September 2020.	BABP dan MNCL	Afiliasi Karena Dikendalikan Langsung oleh Pihak Yang Sama	10 Agustus 2020 – 9 Agustus 2025	Besaran Komisi ditetapkan sebagai berikut: Tahun 1: 15% dari premi Tahun 2: 7.50% dari premi Tahun 3: 2.50% dari premi Tahun 4: 2.50% dari premi Tahun 5: 2.50% dari premi Tahun 6+: 0%	Para Pihak bermaksud untuk mengadakan Perjanjian Bancassurance untuk pemasaran produk asuransi tertentu dengan model distribusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, Perihal: Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktifitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance).

No.	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Afiliasi	Masa Berlaku	Nilai (Rp)	Deskripsi Singkat
7.	Amandemen dan Pernyataan Kembali Kerjasama Layanan Motionpay dan Motionbanking No. 036/MTN-MNCBANK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022	BABP dan MTN	Afiliasi Karena Dikendalikan Langsung oleh Pihak Yang Sama	26 Juli 2022 – 26 Juli 2024	Nilai perjanjian tidak disebutkan dalam perjanjian.	<p>Ruang Lingkup kerja sama layanan integrasi MotionPay dan MotionBanking yang disepakati Para Pihak adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Linkage</p> <p>Penautan akun MotionPay pada aplikasi MotionBanking untuk Nasabah MotionBanking yang telah memiliki akun MotionPay sehingga dapat menampilkan saldo akun MotionPay pada MotionBanking ;</p> <p>b. Pendaftaran</p> <p>Proses registrasi yang dilakukan Nasabah MotionBanking untuk Nasabah MotionPay sehingga Nasabah MotionBanking dapat melakukan pembukaan akun MotionPay melalui aplikasi MotionBanking.</p>
8.	Perjanjian Sewa Ruang MNC Financial Center No. MNCL-MNCAM-LA-9F-107/230715, tanggal 23 Juli 2015 di Jakarta Jo. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruang MNC Financial Center No. 004/MNCL-MNCAM/ADD.LA/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 Jo. Addendum II Perjanjian Sewa Ruang MNC Financial Center No. 002/MNCL-MNCAM/ADD.LA/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Jo. Konfirmasi Perpanjangan Sewa Ruang Kantor lantai GF, 9, dan 13 (sharing area) di Gedung Financial Center No. 101-MNCAM/MKT/VI/22 tanggal 17 Juni 2022	MNCAM dengan PT MNC Land Tbk	Afiliasi Karena Dikendalikan Tidak Langsung oleh Pihak Yang Sama	sampai tanggal 31 Agustus 2024	<p>Lantai 9 dan Lantai 13 Sharing Meeting Room : Rp191.442,00/m2 /bulan;</p> <p>Lantai GF : Rp382.885,00/m2 /bulan;</p> <p>Biaya layanan : Rp 80.000/m2/bulan.</p>	<p>Sewa menyewa ruangan yang terletak di Lantai 9 dengan luas 856,06 m2, Lantai 13 Sharing Meeting Room dengan luas 107,26 m2, dan Ground Floor Sharing Area dengan luas 27,45 m2 merupakan bagian dari Gedung yang didirikan di atas sertifikat HGB No 699/Kebon Sirih, HGB No. 700/Kebon Sirih, HGB No. 701/Kebon Sirih, dan HGB No. 988/Kebon Sirih, setempat dikenal dengan nama "MNC Financial Centre" yang terletak di Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Afiliasi	Masa Berlaku	Nilai (Rp)	Deskripsi Singkat
						Pusat 103040, Indonesia.
9.	Perjanjian Sewa Ruang No. 006/RNP/PKS/XI/2016 tanggal 21 November 2016	MNCAM dan RINP	Afiliasi Karena Dikendalikan Langsung oleh Pihak Yang Sama	21 November 2016 sampai dengan 20 November 2026.	Rp 75.222.222,00 per tahun sesudah dikenakan PPh 4 (2) Final Sewa.	Sewa menyewa ruangan yang merupakan bagian dari bangunan ruko 4 lantai yang berlokasi di Jl. Arifin Ahmad, Kecamatan Marpoyan Damai, Kel. Sidomulyo Timur, Pekanbaru, Riau.
10.	Perjanjian Sewa Ruang No. 005/MNP/PKS/I/2017 tanggal 21 November 2016	MNCAM dan MDNP	Afiliasi Karena Dikendalikan Langsung oleh Pihak Yang Sama	9 Januari 2017 sampai dengan 8 Januari 2027.	Rp133.155.556,00 per tahun sesudah dikenakan PPh 4 (2) Final Sewa.	Sewa menyewa Ruangan yang merupakan bagian dari bangunan ruko 4 lantai yang berlokasi di Jl. Kapten Maulana Lubis No.12, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Medan.
11.	Perjanjian Sewa Ruang Di Gedung MNC Tower Surabaya No. 05/SCS-MNC Asset Management/PK/III/17 tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Addendum III Perjanjian Sewa Ruang No. 002/MNCAM/LEGAL/ADD/I/2022 tanggal 27 Januari 2022	MNCAM dan PT MNC Graha Surabaya	Afiliasi Karena Dikendalikan Tidak Langsung oleh Pihak Yang Sama	1 Maret 2022 sampai dengan 29 Februari 2024.	- Uang sewa adalah sebesar Rp499.363.200,00 per tahun. - Biaya pelayanan adalah sebesar Rp 196.178.400,00 per tahun.	Sewa menyewa Lantai 5 Suite E-F, dengan luas 208,83 m2 dan Lantai 6 Sharing Meeting Rom dengan luas 88,41 m2 Gedung MNC Tower Surabaya, Jalan Taman Ade Irma Suryani 21, Surabaya, Jawa Timur.
12.	Perjanjian Penggunaan Jaringan Terpadu Pasar Modal antara MNCAM dan PT MNC Sekuritas No. 044/PK/MNCSek-Comp/III/2018 dan No. 077/MNCAM/LGL/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 Jo. Perubahan I Perjanjian Kerjasama antara MNCAM dan PT MNC Sekuritas No. 010/MNCAM/LEGAL/AMDN/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan No. 148/PK/MNC-Sek-Comp/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021	MNCAM dan MNCS	Afiliasi Karena Dikendalikan Langsung oleh Pihak Yang Sama	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal perjanjian ini dan otomatis akan diperpanjang hingga dikirimkannya suatu surat pemberitahuan terlebih dahulu yang paling lambat 30 hari kerja sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.	- Imbalan jasa transaksi MNCAM 100% pada saat subscription, redemption, dan switching.	Para pihak dengan ini mengikatkan diri untuk mengadakan kerjasama penggunaan Jaringan Terpadu Pasar Modal (JTPM), dalam bentuk penggunaan bandwidth secara bersama, dan para pihak sepakat untuk bandwidth yang digunakan oleh MNCAM sebesar 2 Mbps atau 10% dari total bandwidth yang dimiliki oleh MNCS saat ini.
13.	Perjanjian Sewa Ruang	MNCS dan RINP	Afiliasi Karena Dikendalikan Langsung oleh Pihak Yang Sama	21 November 2016 dan akan berakhir pada tanggal 20 November 2026.	Rp75.222.222,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) per tahun	Ruangan sewa adalah bangunan ruko 4 (empat) lantai di Jalan Arifin, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan

No.	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Afiliasi	Masa Berlaku	Nilai (Rp)	Deskripsi Singkat
					(sesudah dikenakan PPh 4(2) Final Sewa)	Sidumulyo Timur, Pekanbaru Riau seluas 119,16m2.
14.	Perjanjian Sewa Ruang No. 006/MNP/PKS/1/2017 tanggal 9 Januari 2017	MNCS dan MDNP	Afiliasi Karena Dikendalikan Langsung oleh Pihak Yang Sama	9 Januari 2017 dan akan berakhir pada tanggal 8 Januari 2027.	Rp130.270.000,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per tahun.	Ruangan sewa adalah bangunan ruko 4 (empat) lantai seluas 128,59m2 yang terletak di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 12, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Pelisah.
15.	Perjanjian Sewa Ruang Gedung MNC Financial Center No. 015/MNCL-MNCAI/PK/CL.LEASING/I/2020 tanggal 29 Januari 2020	MNCAI dan PT MNC Land Tbk	Afiliasi Karena Dikendalikan Tidak Langsung oleh Pihak Yang Sama	1 September 2020 – 31 Agustus 2025	Lantai 10,11, dan 13: Rp191.442,00/m2 /bulan (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) belum termasuk PPN. Lantai GF Rp382.885,00/m2 /bulan (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) belum termasuk PPN.	Sewa Ruangan Lantai GF (share area), 10,11, dan 13 (share meeting room), Terletak di MNC Financial Center Lt. 11, Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat.
16.	Perjanjian Sewa Ruang No.002/MNP/PKS/I/2017 tanggal 9 Januari 2017	MNCAI dan MDNP	Afiliasi Karena Dikendalikan Langsung oleh Pihak Yang Sama	9 Januari 2017 sampai dengan 8 Januari 2027	Rp186.833.333,00 per tahun sesudah dikenakan PPh.	Sewa Ruangan seluas 165,94 m2 pada Bangunan Ruko 4 lantai berlokasi di Jl. Kapten Maulana Lubis No.12, Medan.
17.	Konfirmasi Perpanjangan Sewa Ruang Kantor Lantai 3 suite D-F di Gedung Bursa Efek Indonesia – Surabaya No. 044-MNCAI/MC GS-MKT/II/22 tanggal 25 Februari 2022	MNCAI dan PT MNC Graha Surabaya	Afiliasi Karena Dikendalikan Langsung oleh Pihak Yang Sama	1 Maret 2022 – 29 Februari 2024	Sewa sebesar Rp140.000,00/m2 /bulan. Biaya layanan sebesar Rp55.000,00/m2/ bulan.	Sewa Lantai 3 suite D-F seluas 292.81 m2 dan Lantai 6 Share meeting room seluas 88.41 m2 Gedung Bursa Efek Surabaya.
18.	Addendum Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi No.004/PKS/MNCAI-MNCGUI/VII/2017/LGL tanggal 3 Juli 2020 Jo. Addendum II Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi No.004/PKS/MNCAI-MNCGUI/VII/2017/LGL tanggal 4 Juli 2022	MNCAI dan MNCGUI	Afiliasi Karena Dikendalikan Langsung oleh Pihak Yang Sama	2 tahun terhitung sejak 4 Juli 2022 sampai dengan 4 Juli 2024	-	Pihak Pertama setuju bekerjasama dengan Pihak Kedua selaku perusahaan yang menyediakan fasilitas pembiayaan atas Alat Berat, Kendaraan Bermotor, Mesin dan Properti, dimana Pihak Pertama bertindak sebagai penanggung yang melaksanakan pertanggung

No.	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Afiliasi	Masa Berlaku	Nilai (Rp)	Deskripsi Singkat
						asuransi atas objek pembiayaan tersebut.
19.	Perjanjian Sewa Ruang Kantor untuk POS di Medan berdasarkan Perjanjian No. 004/MNP/PKS/I/2017 tanggal 09 Agustus 2017	MNCGUI dan MDNP	Afiliasi Karena Dikendalikan Tidak Langsung oleh Pihak Yang Sama	9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2027.	Uang sewa adalah sebesar Rp148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).	Sewa Ruangan yang merupakan bagian dari bangunan ruko 4 (empat) lantai seluas 131,88 m ² , berlokasi di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 12, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan.

Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang sifatnya operasional dan bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional dari Entitas Anak. Tidak terdapat pembatasan yang berlaku sehubungan dengan transaksi-transaksi tersebut di atas. Perjanjian dengan pihak afiliasi dilakukan dengan wajar seperti apabila dilakukan dengan pihak ketiga.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tidak memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan.

7. Keterangan Tentang Aset Tetap Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan melalui Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki beberapa bidang tanah dan bangunan dengan sah, antara lain sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Luas (M ²)	Berakhirnya Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Lokasi	Atas Nama	Peruntukan Tanah
1.	Sertifikat HGB No. 2626/ Petojo Selatan	107	30-10-2035	00063/2005 tanggal 16 Agustus 2005	Jl. Abdul Muis No. 36 Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta	MNCF	Kantor Operasional
2.	Sertifikat HGB No. 2586/ Petojo Selatan	46	06-01-2035	00059/2004 tanggal 30 Juli 2004	Jl. Abdul Muis No. 36C, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta	MNCF	Kantor Operasional
3.	Sertifikat HGB No. 1782/ Petojo Selatan	43	30-08-2037	162/1994 tanggal 9 Februari 1994	Jl. Abdul Muis No. 36C, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta	MNCF	Kantor Operasional
4.	Sertifikat HGB No. 526/ Petojo Selatan	88	30-08-2037	459/1979 tanggal 28 Juli 1979	Jl. Abdul Muis No. 36D, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta	MNCF	Kantor Operasional
5.	Sertifikat HGB No. 525/ Petojo Selatan	198	30-08-2037	458/1979 tanggal 28 Juli 1979	Jl. Abdul Muis No. 36E, F, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta	MNCF	Kantor Operasional

No.	Bukti Kepemilikan	Luas (M ²)	Berakhirnya Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Lokasi	Atas Nama	Peruntukan Tanah
6.	Sertifikat HGB No. 2589/Petojo Selatan	79	23-01-2035	00010/2008 tanggal 15 Februari 2008	Jl. Abdul Muis No. 36 N, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta	MNCF	Kantor Operasional
7.	Sertifikat HGB No. 241/Harapan Mulya	71	24-09-2033	12612/1997 tanggal 22 September 1997	Kav No. C-31, Kel. Harapan Mulya, Kec. Bekasi Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat	MNCF	Kantor Operasional
8.	Sertifikat HGB No. 35/Sindangsari	74	21-03-2035	68/Sindangsari/2004 tanggal 25 Oktober 2004	Jl. Raya Wangun RT 005/02, Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat	MNCF	Kantor Operasional
9.	Sertifikat HGB No. 124/Sukorejo	73	28-03-2042	869/Sukorejo/2010 tanggal 10 Februari 2010	Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur	MNCF	Kantor Operasional
10.	Sertifikat HGB No. 313/Kemasan	119	04-03-2026	35/Kemasan/2006 tanggal 22 Maret 2006	Jl. Joyoboyo No. 60 Kel. Kemasan, Kec. Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur	MNCF	Kantor Operasional
11.	Sertifikat HGB No. 48/SB/Sumur Batu	423	27-12-2031	4278/1995 tanggal 2 November 1995	Jl. Diponegoro, Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung	MNCF	Kantor Operasional
12.	Sertifikat HGB No. 4194/Medan Estate	72	11-04-2032	2889/Medan Estate/2012 tanggal 8 Februari 2012	Jl. Letda Sujono, Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	MNCF	Kantor Operasional
13.	Sertifikat HGB No. 45/Jati Baru	124	17-10-2041	00488/2010 tanggal 26 Oktober 2010	Kel. Jati Baru Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat	MNCF	Kantor Operasional
14.	Sertifikat HGB No. 46/Jati Baru	124	17-10-2041	00489/2010 tanggal 26 Oktober 2010	Kel. Jati Baru Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat	MNCF	Kantor Operasional
15.	Sertifikat HGB No. 143/Wonorejo	106	12-01-2030	990/1991 tanggal 12 Januari 2030	Jl. Nangka Kel. Wonorejo, Kec. Sukajadi, Kab. Pekanbaru, Prov. Riau	MNCF	Kantor Operasional
16.	Sertifikat HGB No. 00990/Pakulonon	80	19-10-2024	64/Pakulonon/2001 tanggal 16 April 2001	Jl. Sutera Niaga II No. 2, Desa Pakulonon, Kec. Serpong, Kab. Tangerang	MNCF	Kantor Operasional
17.	Sertifikat HGB No. 1041/ Sidomulyo Timur	167	20-10-2046	01703/Sidomulyo Timur/2016	Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Marpoyan	RINP	Kantor Operasional

No.	Bukti Kepemilikan	Luas (M ²)	Berakhirnya Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Lokasi	Atas Nama	Peruntukan Tanah
				tanggal 29 Agustus 2016	Damai, Kel. Sidumulyo Timur		
18.	Sertifikat HGB No. 1042/ Sidumulyo Timur	172	20-10-2046	01705/Sidumulyo Timur/2016 tanggal 29 Agustus 2016	Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Marpoyan Damai, Kel. Sidumulyo Timur	RINP	Kantor Operasional
19.	Sertifikat HGB No. 1043/ Sidumulyo Timur	170	20-10-2046	01704/Sidumulyo Timur/2016 tanggal 29 Agustus 2016	Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Marpoyan Damai, Kel. Sidumulyo Timur	RINP	Kantor Operasional
20.	Sertifikat HGB No. 1044/ Sidumulyo Timur	192	20-10-2046	01702/Sidumulyo Timur/2016 tanggal 29 Agustus 2016	Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Marpoyan Damai, Kel. Sidumulyo Timur	RINP	Kantor Operasional
21.	Sertifikat HGB No.3924/Petisah Tengah	656	Sertifikat diterbitkan pada tahun 2017 namun dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan tidak dicantumkan masa berakhir hak	00251/Petisah Tengah/2016 tanggal 10 November 2016	Jl. Kapten Maulana Lubis No. 12, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.	MDNP	Kantor Operasional

Total nilai buku aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp180.195 juta.

8. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan miliknya berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dengan jumlah yang memadai.

A. Asuransi Kendaraan

No.	Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungungan	Nomor Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungungan (Rp)	Tertanggung	Penanggung
1.	Kendaraan Bermotor / Nissan X-Trail XT 2.5 AT, (B 1495 PIY)	10.03.02.22.08.000015	31 Agustus 2022 – 31 Agustus 2023	260.000.000	Perseroan	MNCAI
2.	Kendaraan Bermotor / Honda Civic, (B 2441 SYX)	10.03.02.21.10.000785	29 Oktober 2021 – 29 Oktober 2024	1.040.000.000	Perseroan	MNCAI
3.	Kendaraan Bermotor / Honda HRV, (B 2109 PKX)	10.03.02.20.12.000520	4 Desember 2020 – 4 Desember 2023	1.040.000.000	MNCF qq. Perseroan	MNCAI
4.	Kendaraan Bermotor / Alphard 2.5G A/T, (B 2328 PKC)	10.03.02.22.05.000270	15 Mei 2022 – 15 Mei 2023	1.045.000.000	Perseroan	MNCAI
5.	Kendaraan Bermotor / Toyota Avanza 1.3 G MT (B 1527 PKT), Toyota Avanza 1.3 GMMEJ (B 1831 POY), dan Toyota Kijang Innova (B 1196 PZR)	10.03.02.22.04.000244	6 April 2022 – 6 April 2023	295.100.000	MNCAM	MNCAI

No.	Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungan	Nomor Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Penanggung
6.	Kendaraan Bermotor / Toyota Alphard 2.5 G AT (B 2049 PBQ)	10.03.02.22.07.00044	30 Juli 2022 – 30 Juli 2023	725.000.000	MNCAM	MNCAI
7.	Kendaraan Bermotor / Toyota Kijang Innova 2.0G AT (B 2738 PFH)	10.03.02.22.09.00600	16 September 2022 – 16 September 2023	305.000.000	MNCAM	MNCAI
8.	Kendaraan Bermotor/ Suzuki AVI414FTYPE (B 2962 PBM)	1BD02252200853	1 Oktober 2022 – 1 Oktober 2023	120.000.000	MNCAI	PT KSK Insurance Indonesia
9.	Kendaraan Bermotor/ Suzuki AVI414FTYPE (B 2963 PBM)	1BD02252200854	1 Oktober 2022 – 1 Oktober 2023	120.000.000	MNCAI	PT KSK Insurance Indonesia
10.	Kendaraan Bermotor/ New Avanza 1.3 AT (B 2726 PBM)	1BD02252200855	1 Oktober 2022 – 1 Oktober 2023	110.000.000	MNCAI	PT KSK Insurance Indonesia
11.	Kendaraan Bermotor/ New Avanza 1.3 AT (B 2724 PBM)	1BD02252200858	1 Oktober 2022 – 1 Oktober 2023	130.000.000	MNCAI	PT KSK Insurance Indonesia
12.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Innova 2.0 G AT, B 1033 PRW	10.03.02.22.10.00835	15 Oktober 2022 – 15 Oktober 2023	190.000.000	MNCGU	MNCAI
13.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Innova 2.0 G AT, B 1351 PRX	10.03.02.22.10.00833	15 Oktober 2022 – 15 Oktober 2023	230.000.000	MNCGU	MNCAI
14.	Kendaraan Bermotor/ Daihatsu New Xenia X DLX MT, B 1224 PYH	10.03.02.22.12.00923	11 Desember 2022 – 11 Desember 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
15.	Kendaraan Bermotor/ Daihatsu New Xenia X DLX MT, B 1253 PYH	10.03.02.22.12.00924	11 Desember 2022 – 11 Desember 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
16.	Kendaraan Bermotor/ Daihatsu New Xenia X DLX MT, B 1268 PYH	10.03.02.22.12.00925	11 Desember 2022 – 11 Desember 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
17.	Kendaraan Bermotor/ Daihatsu New Xenia X DLX MT, B 1972 PYH	10.03.02.22.12.00926	11 Desember 2022 – 11 Desember 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
18.	Kendaraan Bermotor/ Daihatsu New Xenia X DLX MT, B 2292 TFA	10.03.02.22.12.00927	11 Desember 2022 – 11 Desember 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
19.	Kendaraan Bermotor/ Daihatsu Granmax D FF 1.5 MT, B 1457 PZT	10.03.02.22.02.00348	06 Februari 2022 – 06 Februari 2023	50.000.000	MNCGU	MNCAI
20.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Innova 2.0E AT, B 1195 PRE	10.03.02.22.02.00446	14 Februari 2022 – 14 Februari 2023	145.000.000	MNCGU	MNCAI
21.	Kendaraan Bermotor/ Honda Revo SW, B 6281 PVD	10.03.02.22.03.00204	03 Maret 2022 – 03 Maret 2023	7.000.000	MNCGU	MNCAI
22.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1767 PRV	10.03.02.22.03.00588	23 Maret 2022 – 23 Maret 2023	115.000.000	MNCGU	MNCAI
23.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1779 PRV	10.03.02.22.03.00589	23 Maret 2022 – 23 Maret 2023	115.000.000	MNCGU	MNCAI
24.	Kendaraan Bermotor/ Daihatsu Xenia 1.3X MT DLX, B 1338 PIH	10.03.02.22.04.00407	13 April 2022 – 13 April 2023	125.000.000	MNCGU	MNCAI
25.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Innova 2.0E AT, B 1192 PZX	10.03.02.22.05.00356	11 Mei 2022 – 11 Mei 2023	150.000.000	MNCGU	MNCAI
26.	Kendaraan Bermotor/ BMW 320i N20 CKD AT, B 1954 PAH	10.03.02.22.05.00478	16 Mei 2022 – 16 Mei 2023	425.000.000	MNCGU	MNCAI
27.	Kendaraan Bermotor/ Suzuki Ertiga GL MT, B 1667 PIK	10.03.02.22.05.00583	30 Mei 2022 – 30 Mei 2023	120.000.000	MNCGU	MNCAI

No.	Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungan	Nomor Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Penanggung
28.	Kendaraan Bermotor/ Daihatsu Xenia 1.3X STD MT, B 1773 PYJ	10.03.02.22.06. 0.00425	11 Juni 2022 – 11 Juni 2023	105.000.000	MNCGU	MNCAI
29.	Kendaraan Bermotor/ Daihatsu Xenia 1.3X STD MT, B 1766 PYJ	10.03.02.22.06. 0.00426	11 Juni 22 – 11 Juni 2023	105.000.000	MNCGU	MNCAI
30.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1956 PRV	10.03.02.22.06. 0.00769	23 Juni 2022 – 23 Juni 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
31.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1694 PRV	10.03.02.21.06. 0.00711	23 Juni 2022 – 23 Juni 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
32.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1700 PRV	10.03.02.22.06. 0.00771	23 Juni 2022 – 23 Juni 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
33.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1701 PRV	10.03.02.22.06. 0.00772	23 Juni 2022 – 23 Juni 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
34.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1675 PRV	10.03.02.22.06. 0.00774	23 Juni 2022 – 23 Juni 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
35.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1751 PRV	10.03.02.22.06. 0.00775	23 Juni 2022 – 23 Juni 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
36.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1780 PRV	10.03.02.22.06. 0.00777	23 Juni 2022 – 23 Juni 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
37.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1705 PRV	10.03.02.22.06. 0.00779	23 Juni 2022 – 23 Juni 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
38.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1728 PRV	10.03.02.22.06. 0.00780	23 Juni 2022 – 23 Juni 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
39.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1697 PRV	10.03.02.22.06. 0.00781	23 Juni 2022 – 23 Juni 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
40.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Avanza 1.3G M/T, B 1720 PRV	10.03.02.22.06. 0.00782	23 Juni 2022 – 23 Juni 2023	110.000.000	MNCGU	MNCAI
41.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Innova 2.0 G AT, B 1033 PRW	10.03.02.22.10. 0.00835	15 Oktober 2022 – 15 Oktober 2023	190.000.000	MNCGU	MNCAI
42.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Innova 2.0G A/T, B 1954 PRV	10.03.02.22.08. 0.00505	09 Agustus 2022 – 09 Agustus 2023	180.000.000	MNCGU	MNCAI
43.	Kendaraan Bermotor/ Honda Civic, B 1369 PAK	10.03.02.22.03. 0.00615	16 Maret 22 – 16 Maret 2025	1.476.540.000	MNCGU	MNCAI
44.	Kendaraan Bermotor/ Toyota Fortuner VRZ Diesel, B 1844 PJL	10.03.02.22.08. 0.00507	09 Agustus 22 – 09 Agustus 2023	375.000.000	MNCGU	MNCAI

B. Asuransi Property All Risk

No.	Objek Pertanggungan	No Polis Asuransi	Masa Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Kota	Tertanggung	Perusahaan Asuransi
1	Kantor	990122007368	07/06/22 sd 07/06/23	4.408.000.000	MALANG, TANGERANG, DAN JAKARTA	MNCF	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
2	Kantor	990122007369	07/06/22 sd 07/06/23	4.408.000.000	MALANG, TANGERANG, DAN JAKARTA	MNCF	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

C. Asuransi Gempa Bumi

Asuransi Gempa Bumi yang dimiliki BABP yang diterbitkan oleh MNC Insurance dengan No. Polis 10.03.01.22.11.0.00353 adalah sebagai berikut:

No.	Objek Pertanggungan	No Polis Asuransi	Masa Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Kota	Tertanggung	Perusahaan Asuransi
1	Kantor	10.03.01.21.11.0.00424	30/11/22 sd 30/11/23	1.818.630.307	BALI DENPASAR	BABP	MNCAI
2	Kantor	10.03.01.21.11.0.00424	30/11/22 sd 30/11/23	712.374.777	BALI UBUD	BABP	MNCAI
3	Kantor	10.03.01.21.11.0.00424	30/11/22 sd 30/11/23	1.954.279.639	YOGYAKARTA MANGKUBUMI	BABP	MNCAI

D. Asuransi Kebakaran

Asuransi Kebakaran yang dimiliki BABP yang diterbitkan oleh MNC Insurance dengan No. Polis 10.03.01.22.11.0.00346 adalah sebagai berikut:

No	Obyek Pertanggungan	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan (Rp)	Area/Cabang	Tertanggung	Penanggung
1.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	1.214.754.840	BALI DENPASAR	BABP	MNCAI
2.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	288.716.844	BALI UBUD	BABP	MNCAI
3.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	763.016.327	BALIKPAPAN	BABP	MNCAI
4.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	1.117.536.810	BANDUNG DAGO	BABP	MNCAI
5.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	1.764.297.754	JABODETABEK MNC TOWER	BABP	MNCAI
6.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	11.370.682.827	JABODETABEK HEAD OFFICE FINCEN	BABP	MNCAI
7.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	507.153.704	JABODETABEK WISMA BP	BABP	MNCAI
8.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	565.776.963	JABODETABEK WOLTER	BABP	MNCAI
9.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	276.506.572	JABODETABEK GREEN GARDEN	BABP	MNCAI
10.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	968.322.622	JABODETABEK ROXY	BABP	MNCAI
11.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	484.689.283	JABODETABEK PURI INDAH	BABP	MNCAI
12.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	705.318.206	JABODETABEK SUPOMO	BABP	MNCAI
13.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	353.847.753	JABODETABEK ARKADIA	BsABP	MNCAI
14.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	572.425.814	JABODETABEK FATMAWATI	BABP	MNCAI
15.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	598.639.657	JABODETABEK KELAPA GADING	BABP	MNCAI
16.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	340.952.513	JABODETABEK MANGGA DUA	BABP	MNCAI
17.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	657.278.466	JABODETABEK MERUYA	BABP	MNCAI
18.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	375.519.130	JABODETABEK KB.JERUK	BABP	MNCAI
19.	Kantor	10.03.01.21.11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	936.017.408	JABODETABEK PIK	BABP	MNCAI
20.	Kantor	10.03.01.21	30 /11/22 sd	349.691.747	CIKARANG	BABP	MNCAI

No	Obyek Pertanggung gan	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggung gan (Rp)	Area/Cabang	Tertanggung	Penanggung
		.11.0.00423	30/11/23		JAWA BARAT		
21.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	339.371.292	BSD CITY SEKTOR VII	BABP	MNCAI
22.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	558.338.880	GADING SERPONG	BABP	MNCAI
23.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	605.646.879	DEPOK JAWA BARAT	BABP	MNCAI
24.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	749.178.588	SNK BEKASI	BABP	MNCAI
25.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	710.669.175	BOGOR PAJAJARAN	BABP	MNCAI
26.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	1.598.403.462	JAMBI	BABP	MNCAI
27.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	744.973.453	MAKASSAR	BABP	MNCAI
28.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	1.032.243.839	MEDAN MAULANA	BABP	MNCAI
29.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	575.056.706	MEDAN ASIA	BABP	MNCAI
30.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	934.714.341	PEKANBARU SUDIRMAN	BABP	MNCAI
31.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	1.068.557.249	PEKANBARU ARIFIN AHMAD	BABP	MNCAI
32.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	1.055.217.933	SAMARINDA	BABP	MNCAI
33.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	1.174.271.815	SEMARANG	BABP	MNCAI
34.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	449.908.897	SOLO	BABP	MNCAI
35.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	342.025.353	SURABAYA TAIS	BABP	MNCAI
36.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	619.448.960	SURABAYA SUNGKONO	BABP	MNCAI
37.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	1.172.563.357	SURABAYA KERTAJAYA	BABP	MNCAI
38.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	774.060.298	TARAKAN	BABP	MNCAI
39.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	1.214.754.840	YOGYAKARTA MANGKUBUMI	BABP	MNCAI
40.	Kantor	10.03.01.21 .11.0.00423	30 /11/22 sd 30/11/23	288.716.844	BATAM CENTER	BABP	MNCAI

E. Asuransi Kecurian/Kebongkaran (*Burglary*)

Asuransi Kecurian/Kebongkaran (*Burglary*) yang dimiliki BABP berdasarkan *Cover Note* No. Ref.No.001.MNC-BG.XI.2022 yang diterbitkan oleh MNC Insurance dengan No. Polis 10.03.13.21.11.0.00004 adalah sebagai berikut:

No	Obyek Pertanggung gan	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggung gan (Rp)	Area/Cabang	Tertanggung	Perusahaan Asuransi
1	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	199.429.247	BALIKPAPAN	BABP	MNCAI
2	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	500.676.192	BANDUNG DAGO	BABP	MNCAI
3	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	190.059.145	JABODETABEK WOLTER	BABP	MNCAI
4	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	359.637.232	JABODETABEK ROXY	BABP	MNCAI
5	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	143.328.315	JABODETABEK PURI INDAH	BABP	MNCAI
6	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	96.139.048	JABODETABEK DEPOK	BABP	MNCAI
7	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	211.173.694	JABODETABEK PONDOK INDAH	BABP	MNCAI

No	Obyek Pertanggungsaan	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungsaan (Rp)	Area/Cabang	Tertanggung	Perusahaan Asuransi
8	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	204.612.907	JABODETABEK FATMAWATI	BABP	MNCAI
9	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	153.864.677	JABODETABEK BEKASI SNK	BABP	MNCAI
10	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	215.493.789	JABODETABEK BOGOR PAJAJARAN	BABP	MNCAI
11	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	126.602.380	JABODETABEK SUNTER	BABP	MNCAI
12	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	254.290.412	JABODETABEK CIKARANG	BABP	MNCAI
13	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	123.456.675	JABODETABEK KELAPA GADING	BABP	MNCAI
14	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	249.911.273	JABODETABEK MANGGA DUA	BABP	MNCAI
15	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	291.552.482	JABODETABEK MERUYA	BABP	MNCAI
16	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	213.325.015	JABODETABEK BSD CITY SEKTOR VII	BABP	MNCAI
17	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	115.504.941	JABODETABEK PIK	BABP	MNCAI
18	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	174.621.550	JABODETABEK GADING SERPONG	BABP	MNCAI
19	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	845.553.820	JAMBI	BABP	MNCAI
20	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	353.484.881	MEDAN MAULANA LUBIS	BABP	MNCAI
21	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	182.286.921	MEDAN ASIA	BABP	MNCAI
22	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	302.383.373	PEKANBARU ARIFIN AHMAD	BABP	MNCAI
23	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	433.377.020	PEKANBARU SUDIRMAN	BABP	MNCAI
24	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	430.224.767	SAMARINDA	BABP	MNCAI
25	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	77.791.490	SOLO	BABP	MNCAI
26	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	327.383.408	TARAKAN	BABP	MNCAI
27	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	201.188.017	YOGYAKARTA MANGKUBUMI	BABP	MNCAI
28	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	157.649.763	SURABAYA KERTAJAYA INDAH	BABP	MNCAI
29	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	437.113.137	BATAM CENTER	BABP	MNCAI
30	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	199.429.247	SURABAYA SUNGKONO	BABP	MNCAI
31	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	500.676.192	BALI UBUD	BABP	MNCAI
32	Perabotan Kantor	10.03.13.21. 11.0.00004	30 /11/22 sd 30/11/23	190.059.145	SEMARANG	BABP	MNCAI

Keterangan:

Penerbitan polis asuransi Kecurian/Kebongkaran (Burglary) sebagaimana ternyata dalam Cover Note No. Ref.No.001.MNC-BG.XI.2022 masih dalam proses penerbitan.

F. Asuransi Cash in Safe

Asuransi Cash In Safe yang dimiliki BABP yang diterbitkan oleh MNC Insurance dengan No. Polis 10.03.13.22.11.0.00040 adalah sebagai berikut:

No	Objek Pertanggungangan	No Polis	Jangka Waktu	Pertanggungangan IDR/USD/SGD	Area/Cabang	Tertanggung	Penanggung
1	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 5.000.000.000 USD 100.000 SGD 100.000	MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI
2	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 500.000.000	ROXY	BABP	MNCAI
3	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 600.000.000 USD 5.000	PANTAI INDAH KAPUK	BABP	MNCAI
4	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 500.000.000 USD 15.000	MERUYA	BABP	MNCAI
5	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 1.250.000.000 USD 2.000	GREEN GARDEN	BABP	MNCAI
6	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 300.000.000	GADING SERPONG	BABP	MNCAI
7	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 300.000.000	BSD CITY	BABP	MNCAI
8	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 1.500.000.000	KEBON JERUK	BABP	MNCAI
9	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 1.000.000.000 USD 1.000	PURI INDAH	BABP	MNCAI
10	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 500.000.000 USD 5.000	KELAPA GADING	BABP	MNCAI
11	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 500.000.000	MANGGA DUA	BABP	MNCAI
12	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 350.000.000 USD 5.000	SUNTER	BABP	MNCAI
13	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 450.000.000 USD 5.000	SOEPOMO	BABP	MNCAI
14	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000 USD 5.000	WISMA BUMIPUTERA	BABP	MNCAI
16	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 350.000.000	WOLTER MONGINSIDI	BABP	MNCAI
17	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 350.000.000	FATMAWATI	BABP	MNCAI
18	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 300.000.000	BEKASI SNK	BABP	MNCAI
19	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	CIKARANG	BABP	MNCAI
20	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 300.000.000 USD 10.000	DEPOK	BABP	MNCAI
21	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 300.000.000 USD 4.000	ARKADIA	BABP	MNCAI
22	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 3.250.000.000 USD 7.000 EUR 7.000	BOGOR PAJAJARAN	BABP	MNCAI
23	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000 USD 7.000	BALI DENPASAR	BABP	MNCAI
24	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 1.750.000.000	BALI UBUD	BABP	MNCAI
25	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 750.000.000 USD 5.000	BALIKPAPAN	BABP	MNCAI
26	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 3.000.000.000 USD 5.000 SGD 5.000	BANDUNG DAGO	BABP	MNCAI
27	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 750.000.000	BATAM	BABP	MNCAI
28	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 1.000.000.000	JAMBI	BABP	MNCAI
29	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 1.200.000.000 USD 10.000	MAKASSAR	BABP	MNCAI
30	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 500.000.000	MEDAN MAULANA	BABP	MNCAI

No	Objek Pertanggungsaan	No Polis	Jangka Waktu	Pertanggungsaan IDR/USD/SGD	Area/Cabang	Tertanggung	Penanggung
31	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 1.500.000.000 USD 5.000	MEDAN ASIA	BABP	MNCAI
32	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 1.250.000.000	PEKANBARU SUDIRMAN	BABP	MNCAI
33	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 1.350.000.000 USD 2.500	PEKANBARU ARIFIN	BABP	MNCAI
34	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 2.200.000.000 USD 2.500	SAMARINDA	BABP	MNCAI
35	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 1.300.000.000	SEMARANG	BABP	MNCAI
36	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 2.700.000.000 USD 25.000	SOLO	BABP	MNCAI
37	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 500.000.000 USD 10.000	SURABAYA TAIS	BABP	MNCAI
38	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 700.000.000 USD 5.000	SURABAYA KERTAJAYA	BABP	MNCAI
39	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 1.250.000.000	SURABAYA SUNGKONO	BABP	MNCAI
40	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 1.250.000.000 USD 10.000	TARAKAN	BABP	MNCAI
41	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	YOGYAKARTA	BABP	MNCAI
42	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM WISMA BUMIPUTERA	BABP	MNCAI
43	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	00.000.000,00	ATM WOLTER	BABP	MNCAI
44	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM ROXY	BABP	MNCAI
45	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM GREEN GARDEN	BABP	MNCAI
46	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM GREEN GARDEN	BABP	MNCAI
47	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM GREEN GARDEN	BABP	MNCAI
48	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM PURI INDAH	BABP	MNCAI
49	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM SOEPOMO	BABP	MNCAI
50	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM ARKADIA	BABP	MNCAI
51	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM DEPOK	BABP	MNCAI
52	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM PONDOK INDAH	BABP	MNCAI
53	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM FATMAWATI	BABP	MNCAI
54	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM BEKASI SNK	BABP	MNCAI
55	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI
56	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI
57	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI
58	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI
59	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI
60	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI
61	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI
62	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI
63	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI

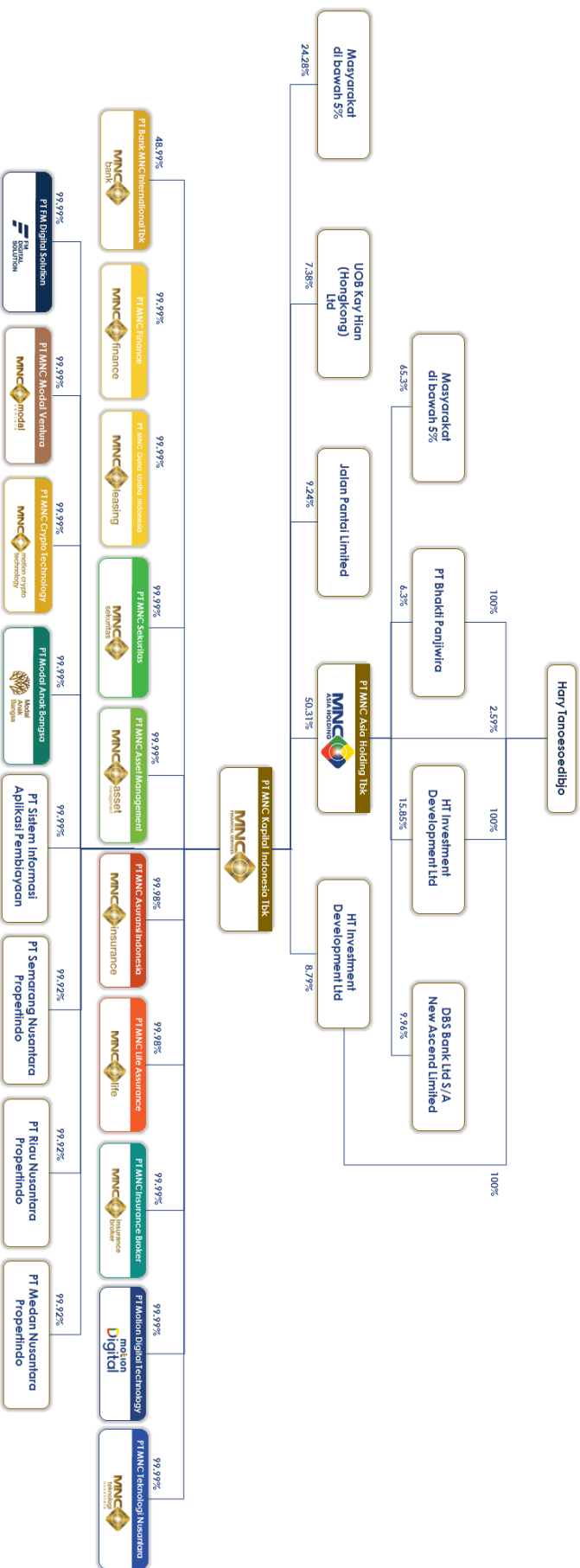
No	Objek Pertanggungangan	No Polis	Jangka Waktu	Pertanggungangan IDR/USD/SGD	Area/Cabang	Tertanggung	Penanggung
64	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI
65	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI
66	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM MNC KEBON SIRIH	BABP	MNCAI
67	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM BOGOR	BABP	MNCAI
68	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 100.000.000	ATM BOGOR	BABP	MNCAI
69	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM SUNTER	BABP	MNCAI
70	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM CIKARANG	BABP	MNCAI
71	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM KELAPA GADING	BABP	MNCAI
72	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM MANGGA DUA	BABP	MNCAI
73	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM MERUYA	BABP	MNCAI
74	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM MERUYA	BABP	MNCAI
75	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM MERUYA	BABP	MNCAI
76	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM KEBON JERUK	BABP	MNCAI
77	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM KEBON JERUK	BABP	MNCAI
78	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM KEBON JERUK	BABP	MNCAI
79	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM KEBON JERUK	BABP	MNCAI
80	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 800.000.000	ATM KEBON JERUK	BABP	MNCAI
81	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM KEBON JERUK	BABP	MNCAI
82	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM KEBON JERUK	BABP	MNCAI
83	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM BSD CITY	BABP	MNCAI
84	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM PANTAI INDAH KAPUK	BABP	MNCAI
85	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 100.000.000	ATM GADING SERPONG	BABP	MNCAI
86	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM BANDUNG DAGO	BABP	MNCAI
87	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM BANDUNG DAGO	BABP	MNCAI
88	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM SURABAYA KERTAJAYA	BABP	MNCAI
89	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM PEKANBARU SUDIRMAN	BABP	MNCAI
90	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 100.000.000	ATM PEKANBARU ARIFIN AHMAD	BABP	MNCAI
91	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM MEDAN MAULANA	BABP	MNCAI
92	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM MEDAN MAULANA	BABP	MNCAI
93	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM MEDAN ASIA	BABP	MNCAI
94	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM JAMBI	BABP	MNCAI
95	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 100.000.000	ATM BATAM	BABP	MNCAI

No	Objek Pertanggunggaan	No Polis	Jangka Waktu	Pertanggunggaan IDR/USD/SGD	Area/Cabang	Tertanggung	Penanggung
96	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM SURABAYA JEMURSARI	BABP	MNCAI
97	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM SURABAYA	BABP	MNCAI
98	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 100.000.000	ATM SURABAYA	BABP	MNCAI
99	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 400.000.000	ATM SURABAYA SUNGKONO	BABP	MNCAI
100	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM BALI DENPASAR	BABP	MNCAI
101	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM BALI DENPASAR	BABP	MNCAI
102	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM BALI DENPASAR	BABP	MNCAI
103	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 100.000.000	ATM BALI DENPASAR	BABP	MNCAI
104	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM BALI UBUD	BABP	MNCAI
105	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM YOGYAKARTA	BABP	MNCAI
106	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM BALIKPAPAN	BABP	MNCAI
107	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM TARAKAN	BABP	MNCAI
108	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 200.000.000	ATM SEMARANG	BABP	MNCAI
109	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 5.000.000.000 USD 100.000 SGD 100.000	ATM SAMARINDA	BABP	MNCAI
110	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 500.000.000	ATM MAKASSAR	BABP	MNCAI
111	Vault/Counter/ATM	10.03.13.21.1 1.0.00003	30 /11/22 sd 30/11/23	Rp 600.000.000 USD 5.000	ATM SOLO	BABP	MNCAI

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas yaitu hubungan kepemilikan sebagai perusahaan pengendali. Jumlah pertanggunggaan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas objek yang dipertanggunggaan.

9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak

Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Entitas Anak Per 31 Oktober 2022



*Data per 31 Oktober 2022

Pihak yang menjadi pengendali Perseroan sekaligus Individu yang menjadi Pemilik Manfaat (Ultimate Beneficial Owner/UBO) dari Perseroan adalah Hary Tanoesoedibjo dan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perseroan telah melaporkan UBO sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 18 ayat 1 Perpres No. 13/2018 kepada Instansi Berwenang (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sebagaimana ternyata dalam bukti Informasi Penyampaian Data tanggal 3 November 2022.

Hubungan Afiliasi Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak

Per 30 Juni 2022

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	BCAP	MNCA M	MN CS	MN CF	MN CL	MNCAI	MNCG UI	BABP	FM	MTN	MAB	SIAP	MD NP	RIN P	MCT	SGNP	MIB	MMV	MDT
Mashudi Hamka	DU								DU	K	K				DU				D
Jessica H. Tanoesoedibjo	D								D	DU	D				K			DU	D
Ageng Purwanto	D												DU	DU					
Peter Fajar	D							K											
Oerianto Guyandi	D								K	K	DU				K				D
Muhammad Suhada	D								D										
Mahdan	D							K											
Wito Mailoa	KU			KU	KU	KU	KU						KU	KU		K			K
Tien	K																		
Sukisto	KI																		
Frery Kojongian		DU																	
Yong Julia		D																	
Edwin J. Sebayang		D																	
Stein Maria Schouten		KU																	
Risna Muhti		KI																	
Susy Meilina			DU																
Fifi Virgantria, Bong Marlina			D																
Ronald Adrian Tirtabudi			D																
A Fen			D																
Henry Suparman			KU																
Alpino Kianjaya			KI																
Agustinus Wishnu Handoyono			K																
Mahjudin				DU															
Edwin Andu				D															
Henby				D															
Rodion Wikanto Njotowidjojo				KI															
Febriyani Sjojfan					DU												K		
Johanes					D														
Donny Trihardono					D														
Deddy Maryadi Yoeshar					KI														
Jovita Josephine Sadrach					KI														
Wirahadi Suryana Jatiputra						DU											K		
Eka Listiani Kartono						D													
Tengku Kurnia Dzulfikar Nurdin						D													
Inkes Lukman						KI													
Josh Hidayat						KI													
Hary Tanoesoedibjo									KU	KU	KU				KU			KU	DU
Natalia Purnama									K				K	K		D			K
Darma Widjaja													D	D					
Sonny Agustino Laksito															D				
Pondra Nala Permana																	DU		
Afrianto Budi Purnomo																	D		
Samuel Mulyono																		D	
Darma Putra Wati																		K	KU
Susanty Tjandra Sanusi										K									K
Yusnandi Liauw							D												
Henri Gunawan							D												
Miron Durait							D												
Erdie Suriaherdadi Manan							KI												
Sukma Yulius Archie										D									
Maya Sari Dewi										D									
Guntur Satrya Saputro										D									
Agus Ghozali													D						
Budi Jatmiko													D						
Rully Rakhmatullah													K						
Edward Kennetze													K						
Rita Montagna								DU											
Denny Setiawan Hanubrata								WDU											
Hermawan								D											
Tee Teddy Setiawan								D											

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	BCAP	MNCA M	MN CS	MN CF	MN CL	MNCAI	MNCG UI	BABP	FM	MTN	MAB	SIAP	MD NP	RIN P	MCT	SGNP	MIB	MMV	MDT
Reinard Y. Seno Setiaji								D											
Ponky Nayarana Pudjanto								KU											
Frederikus Woeseke P.								KI											

Keterangan :

BCAP	: Berarti Perseroan atau PT MNC Kapital Indonesia Tbk.	KU	: Komisaris Utama / Presiden Komisaris
MNCAM	: Berarti PT MNC Asset Management	WDU	: Wakil Direktur Utama
MNCS	: Berarti PT MNC Sekuritas	KI	: Komisaris Independen
MNCF	: Berarti PT MNC Finance	K	: Komisaris
MNCL	: Berarti PT MNC Life Assurance	DU	: Direktur Utama
MNCAI	: Berarti PT MNC Asuransi Indonesia	DI	: Direktur Independen
MNCGUI	: Berarti PT MNC Guna Usaha Indonesia	D	: Direktur
BABP	: Berarti PT Bank MNC Internasional Tbk		
FM	: Berarti PT FM Digital Solution (dahulu bernama PT Flash Mobile)		
MTN	: Berarti PT MNC Teknologi Nusantara		
MAB	: Berarti PT Modal Anak Bangsa		
SIAP	: Berarti PT Sistem Informasi Aplikasi Pembiayaan		
MDNP	: Berarti PT Medan Nusantara Propertindo		
RINP	: Berarti PT Riau Nusantara Propertindo		
MCT	: Berarti PT Motion Crypto Technology		
SGNP	: Berarti PT Semarang Nusantara Propertindo		
MIB	: Berarti PT MNC Insurance Broker		
MMV	: Berarti PT MNC Modal Ventura		
MDT	: Berarti PT Motion Digital Technology		

B. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut ini:

PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu “PT MNC Investama Tbk”)

Riwayat Singkat

PT MNC Asia Holding Tbk (“BHIT”) semula bernama PT Bhakti Investama, didirikan pada tanggal 2 Nopember 1989, berdasarkan Akta No. 22 tanggal 2 November 1989, sebagaimana diubah dengan Akta No.193 tanggal 15 Nopember 1989, keduanya dibuat dihadapan Soetjipto, SH, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10673.HT.01.01-TH.89 tanggal 22 November 1989 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1850/1989 tanggal 19 Desember 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 2 Maret 1990, Tambahan No. 813.

Anggaran Dasar BHIT telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah mengenai: (i) nama Perseroan dari semula PT MNC Investama Tbk menjadi PT MNC Asia Holding Tbk; (ii) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan dengan Peraturan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020; dan (iii) penegasan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 29 tanggal 24 Agustus 2022, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 29 tanggal 24 Agustus 2022**”), yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan No. AHU-0060365.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166506.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022.

Maksud dan tujuan dari BHIT adalah berusaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan penunjang usaha lainnya, pendidikan, informasi dan komunikasi, aktivitas jasa lainnya, perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalan, pertanian, kehutanan dan perikanan, pengangkutan dan pergudangan, konstruksi, dan real estat. Namun kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan BHIT adalah berusaha dalam bidang jasa investasi.

BHIT beralamat domisili di MNC Financial Center Lantai 21, Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340.

Pengurusan dan Pengawasan BHIT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 123 tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0039315 tanggal 2 Agustus 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148922.AH.01.11.Tahun 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BHIT yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Agung Firman Sampurna
Wakil Komisaris Utama	: Darma Putra Wati
Komisaris	: Liliana Tanaja
Komisaris	: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris Independen	: Herbert Parulian Sitohang, S.H.

Direksi

Direktur Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama	: Susanty Tjandra Sanusi
Direktur	: Tien
Direktur	: Natalia Purnama
Direktur	: Jiohan Sebastian
Direktur	: Henry Suparman
Direktur	: Mashudi Hamka
Direktur	: Santi Paramita

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BHIT

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Agustus 2022 *juncto* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BHIT per tanggal 30 September 2022, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Nominal	%
Modal Dasar	205.000.000.000	20.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- HT Investment Development Ltd	13.238.835.716	1.323.883.571.600	15,85
- DBS Bank Ltd S/A	8.321.109.800	832.110.980.000	9,96
- PT Bhakti Panjiwira	5.262.220.112	526.222.011.200	6,3
- Masyarakat*	54.554.007.831	5.455.400.783.100	65,3
- Hary Tanoesoedibjo	2.166.568.300	216.656.830.000	2,59
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Sebelum Saham Treasury)	83.542.741.759	8.354.274.175.900	100,00
Saham Treasury	2.525.414.946	252.541.494.600	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	86.068.156.705	8.606.815.670.500.00	
Saham dalam Portepel	118.931.843.295	11.893.184.329.500	

*) kepemilikan saham dibawah 5%

Keterangan

Berdasarkan klarifikasi Perseroan dengan BHIT, sampai dengan saat ini saham treasury yang dimiliki oleh BHIT adalah sebesar 2.525.414.946 lembar saham.

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 20 Juli 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0044789 tanggal 16 Agustus 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0160922.AH.01.11.Tahun 2022 ("Akta 79/2022"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Wito Mailoa
Komisaris	: Tien
Komisaris Independen	: Sukisto

Direksi

Direktur Utama	: Mashudi Hamka
Direktur	: Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	: Ageng Purwanto
Direktur	: Peter Fajar
Direktur	: Oerianto Guyandi
Direktur	: Muhammad Suhada
Direktur	: Mahdan

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diatas mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang berlangsung pada saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan atas Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Wito Mailoa

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Lahir di Manado, 4 November 1969. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2022 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Riwayat Pekerjaan

2022 - Sekarang	: Komisaris Utama Motion Digital Technology
2021 - Sekarang	: Komisaris PT MNC Teknologi Nusantara
2020 - Sekarang	: Komisaris Utama PT Medan Nusantara Propertindo
2020 - Sekarang	: Komisaris PT Riau Nusantara Propertindo
2019 - Sekarang	: Komisaris Utama PT MNC Life Assurance
2018 - Sekarang	: Komisaris PT Semarang Nusantara Propertindo
2018 - Sekarang	: Komisaris Utama PT MNC Finance
2018 - Sekarang	: Komisaris Utama PT MNC Guna Usaha Indonesia
2018 - Sekarang	: Komisaris Utama PT MNC Asuransi Indonesia
2018 - Sekarang	: Wakil Ketua I Koperasi Karyawan MNC Group
2016 – 2019	: Komisaris Utama PT MNC Asset Management
2018 – 2022	: Direktur Utama Perseroan
2016 – 2018	: Direktur Perseroan
2013 – 2016	: Direktur Independen Perseroan
2009 – 2013	: Direktur Utama PT MNC Sekuritas
2008 – 2009	: Direktur PT OSK Nusadana Securities Indonesia
2001 – 2008	: Direktur PT CIMB-GK Securities Indonesia
1999 – 2000	: Direktur PT Indoverse Securities Associate
1998 – 1999	: <i>Head of Equity Sales, Vice President PT Sigma Batara Securities</i>
1995 – 1998	: <i>Head of Equity Sales PT Harumdana Securities</i>

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science MIS dari San Diego State University, Amerika Serikat tahun 1991 dan MBA Finance dari University Pomona, Amerika Serikat tahun 1993.

Tien

Komisaris



Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Lahir di Medan, 8 Februari 1971. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2016 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

2014	-	: Direktur PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Sekarang Investama Tbk)
2014 – 2016	:	Direktur Perseroan
2004 – 2014	:	Direktur PT MNC Sekuritas
2003 – 2004	:	Direktur PT Bhakti Capital Indonesia Tbk
2000 – 2003	:	<i>Manager Corporate Finance</i> PT Bhakti Capital Indonesia Tbk
1997 – 2000	:	<i>Manager Corporate Finance</i> PT Bhakti Investama Tbk
1993 – 1997	:	Analisis PT Inti Salim Corpora

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1993.

Sukisto

Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Lahir di Batang pada 3 September 1959. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2020 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

2016	:	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
2016	:	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua
2014	:	Inspektur Pengawas Daerah Sumatera Selatan
2012	:	Inspektur Bidang Manajemen SDM II Inspektorat Wilayah V Inspektorat Pengawasan Umum
2010	:	Kepala Biro Sarana dan Prasarana Polda Bali
2008	:	Kepala Biro Logistik Polda Kalimantan Barat
2006	:	Kepala Bidang Telematika Polda Metrojaya
2004	:	Kepala Sub Bagian Densus II 88 AT Bareskrim Polri
2004	:	Kepala Bagian Opslat Bareskrim Polri
2001	:	Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja
2000	:	Kapolres Sikka Polda Nusa Tenggara Timur
1998	:	Kapolres Ngada Polda Nusa Tenggara Timur
1997	:	Kepala Bagian Tindak Pidana Korupsi Dit Serse Polda Bali
1995	:	Guru Muda Pusat Pendidikan Res Intel
1994	:	Kepala Korps Siswa SPN
1992	:	Kepala Satuan Reserse Resta Bandung timur
1988	:	Kepala Satuan IPP Resta Pontianak Kalimantan Barat
1986	:	Kepala Satuan Reserse Resta Pontianak Kalimantan Barat
1985	:	Kepala Kepolisian Sektor Kota Pontianak Selatan
1985	:	Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kota Pontianak Selatan
1983	:	Komando Satuan Serse Sanggau Kalimantan Barat

Beliau menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1983, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1991, Bundeskriminalamt Jerman pada tahun 1995, Sekolah Staf & Komando Angkatan Darat pada tahun 1997, Sekolah Staf & Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi Polri pada tahun 2007.

DIREKSI

Mashudi Hamka Direktur Utama



Warga Negara Jepang, 51 tahun. Lahir di Jakarta, 6 Februari 1971. Beliau menjabat sebagai Perseroan sejak 2022 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

- 2022 - Sekarang : Direktur Utama PT Motion Crypto Technology
- 2022 - Sekarang : Direktur PT Motion Digital Technology
- 2020 - Sekarang : Direktur Utama PT FM Digital Solution (dahulu PT Flash Mobile)
- 2019 - Sekarang : Direktur Utama PT MNC Teknologi Nusantara
- 2018 - Sekarang : Direktur PT MNC Investama Tbk
- 2017 - Sekarang : Chief Technical Officer MNC Group
- 2017 - Sekarang : Chief Operating Officer MNC Innovation Center
- 2015 – 2018 : Direktur Perseroan
- 2013 – 2015 : AXA Group
 - Direktur PT AXA Technology Services Indonesia
 - *Regional Head of Business Development* AXA Technology Services Asia (Hong Kong)
 - Head of Client Office AXA Technology Services Japan (Tokyo)
- 1998 – 2000 : *Director of Sales* Nihon Libertec (Tokyo Kinden Group)
- 1994 – 1995 : Bancassurance Manager Aetna Life (Jakarta Aetna Group)

Beliau memperoleh gelar Diploma di bidang Business Management dari Regent Business College, Sydney, Australia tahun 1991 – 1993, MBA dari Temple University, Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2000 – 2002, dan Executive Leadership Education dari Wharton School of Business, University of Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2009 – 2010.

Jessica Herliani Tanoesoedibjo Direktur



Warga Negara Indonesia, 28 tahun. Lahir di Jakarta pada 15 Juni 1994. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2018.

- 2022 - Sekarang : Komisaris PT Motion Crypto Technology
- 2022 - Sekarang : Direktur PT Motion Digital Technology
- 2021 - Sekarang : Direktur Utama PT MNC Modal Ventura
- 2020 - Sekarang : Direktur PT Modal Anak Bangsa
- 2020 - Sekarang : Direktur PT FM Digital Solution (dahulu PT Flash Mobile)
- 2020 - Sekarang : Direktur PT MNC Teknologi Nusantara
- 2018 - Sekarang : Ketua MNC Peduli
- 2018 - Sekarang : Ketua MNC University (Yayasan Hary Tanoesoedibjo)

Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari University of New South Wales, Sydney tahun 2012 – 2014, *Master of Internasional Trade & Commerce Law* dari Macquarie University, Sydney tahun 2014 – 2015, *Master of Arts in Biblical &*

Theological Studies tahun 2015 – 2017, dan *Master of Arts in Education* dari Biola University, Los Angeles tahun 2018 - 2020.

Ageng Purwanto

Direktur



Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Lahir di Jakarta pada 10 Mei 1996. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

2018-2019	:	Direktur Utama PT Bank MNC Internasional Tbk
2015-2018	:	Direktur Utama PT MNC Guna Usaha Indonesia
2011-2015	:	<i>General Manager Sales & Distribution</i> PT Bank Negara Indonesia Tbk
2010-2011	:	<i>Senior Vice President</i> SME Banking Bank ANZ
2008-2010	:	<i>Senior Vice President</i> SME Banking ABN Amri/RBS Indonesia
1997-2008	:	<i>Vice President</i> SME Banking Standard Chartered
1990-1997	:	<i>Tele Sales Manager</i> Citibank

Beliau memperoleh Gelar Diploma Manajemen Perbankan dari STIE Perbanas Jakarta pada tahun 1989 dan Gelar Sarjana Marketing Management dari Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Peter Fajar

Direktur



Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Lahir di Jakarta pada 20 Desember 1998. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

2020	:	<i>Head of Corporate Finance</i> Perseroan
2009-2012	:	Direktur PT Helios Capital
2009	:	<i>CDM Senior Manager and Head of Investment and Addionality for CDM Development</i> di South Pole Carbon Asset Management
2007-2008	:	<i>Head of Investment and Risk Management</i> for CDM Project EcoSecurites Plc
2002-2006	:	<i>Corporate Finance and Treasury Head (General manager)</i> PT Putra Sumber Sumber Utama Timber
2001-2002	:	<i>Corporate Finance Advisory</i> di Prijohandoyo & Boentoro Strategic Consulting
2000-2001	:	<i>Vice President in Risk Management, Restructuring and investment Department</i> di Bhakti Investama (IRCL Division)
1999-2000	:	<i>Head of Corporate Finance (General Manager and Assistant Commisioner)</i> Martha Tilaar Group (Martina Berto Holdings)
1998-1999	:	<i>Corporate Finance and Analyst Manager</i> Martha Tilaar Group (maraba Holding Group)
1996-1998	:	<i>Quality System manager</i> PT Sari Ayu Indonesia

Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Industrial and Manufacturing Engineering* dari Oregon State University dan *Finance and Commercial Banking* dari Texas A&M University.

Oerianto Guyandi

Direktur



Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Lahir di Jember pada tanggal 7 Agustus 1966. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

2022 - Sekarang	:	Komisaris PT Motion Crypto Technology
2022 - Sekarang	:	Direktur Utama PT Modal Anak Bangsa
2022 - Sekarang	:	Direktur PT Motion Digital Technology
2022 - Sekarang	:	Komisaris Utama PT Jarvis Aset Manajemen
2017 - 2020	:	Komisaris PT MNC Metube Indonesia
2017 - 2020	:	Komisaris Utama PT MNC Kabel Mediakom
2017 - 2020	:	Komisaris PT MNC GS Homeshopping
2017 - 2020	:	Komisaris Utama PT MNC Digital Indonesia
2017 - 2020	:	Komisaris Utama PT Mediacitra Indostar
2017 - 2020	:	Komisaris PT FM Digital Solution (dahulu PT Flash Mobile)
2016 - 2020	:	Komisaris Utama PT OTT MNC Indonesia
2016 - 2020	:	Komisaris Utama PT MNC Vision Networks
2016 - 2020	:	Komisaris Utama PT MNC Media Investasi
2016 -2016	:	Direktur PT MNC Vision Networks
2012-2020	:	<i>Chief Financial Officer</i> PT Global Mediacom Tbk
2009-2020	:	Komisaris PT Infokom Elektrindo
2009-2014	:	Komisaris PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
2009-2013	:	Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk
2008-2009	:	Wakil Direktur Utama PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
2007-2008	:	Wakil Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk
2004-2008	:	- Direktur PT MNC Sky Vision - Direktur PT Bhakti Investama Tbk (PT MNC Investama Tbk)
2000-2003	:	Direktur Operasional PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
1999-2001	:	Direktur Bhakti Capital Indonesia (PT MNC Kapital Indonesia Tbk)

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990, Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan Magister Manajemen Sistem Informasi dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2017.

Muhammad Suhada

Direktur



Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Lahir di Medan pada tanggal 9 November 1978. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

2022 - Sekarang	:	Komisaris PT Motion Crypto Technology
2020-2022	:	<i>Vice President Information Technology</i> PT Blue Bird Tbk
2019-2020	:	<i>General Manager IT Development</i> PT Blue Bird Tbk
2016-2018	:	<i>Head of Global Resource Management & OMI</i> di T-System Malaysia Sdn. Bhd

Perseroan beserta seluruh unit bisnisnya menjunjung tinggi dan berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip GCG dalam mengimplementasikan bisnis Perseroan. Perseroan berupaya untuk tetap terus mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor kepada Perseroan melalui penyediaan informasi berbentuk laporan melalui media massa, laporan berkala, *public expose*, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui korespondensi langsung yang menganut prinsip keterbukaan, keakuratan dan akuntabilitas.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang disyaratkan oleh OJK, lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan secara umum maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 1, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 4 setiap akhir tahun buku.

Rapat Dewan Komisaris

Sampai dengan bulan Juni 2022, Dewan Komisaris mengadakan 3 (tiga) kali rapat dengan Direksi sesuai dengan tugas pengawasan dan pemantauan pengelolaan Perseroan. Sebelum setiap rapat, materi dan makalah rapat telah disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris setidaknya lima hari kerja sebelumnya untuk memberikan kesempatan mengkaji. Sebelum setiap rapat, Dewan Komisaris mengadakan rapat tertutup terpisah, tanpa kehadiran Direksi.

Tingkat kehadiran pada tahun 2022:

Nama	Tingkat kehadiran/Jumlah rapat Komisaris tahun 2022
Wito Mailoa (berdasarkan Akta 79/2022 mulai menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 20 Juli 2022)	Per Juni 2022 belum menjabat sebagai Komisaris Utama
Tien	3x
Sukisto	3x
Darma Putra (berdasarkan Akta 79/2022 sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 21 Februari 2022)	3x

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dalam pelaksanaan tugasnya wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum Perseroan, peraturan Pasar Modal yang berlaku dan peraturan-peraturan lain terkait dengan kegiatan Perseroan.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan yang meliputi Tugas Umum, Tugas *Corporate Governance*, Tugas Pengembangan Sumber Daya, Tugas *Risk Management*, serta penerapan fungsi kepatuhan.

Tugas Umum

1. Menyusun, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan visi, misi dan Rencana Strategis Perusahaan yang meliputi Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi.
2. Menyusun struktur organisasi Perusahaan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Perusahaan, termasuk di dalamnya adalah satuan kerja dan komite.
3. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
5. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan kecuali apabila kondisi-kondisi berikut berlaku:
 - a. Terjadi perkara dihadapan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
6. Wajib menyelenggarakan Rapat Direksi Perusahaan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dengan waktu yang memadai.
7. Wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
8. Menyelenggarakan RUPS tahunan selambatnya 6 (enam) bulan sejak ditutupnya tahun buku Perseroan dan menyelenggarakan RUPS lainnya sesuai dengan keperluan Perusahaan dan turut serta memastikan bahwa usul-usul pemegang saham telah diangkat sebagai mata agenda RUPS terutama apabila mata agenda terkait dianggap berhubungan langsung dengan kepentingan Perusahaan dan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham yang mewakili minimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah.
9. Menyelenggarakan RUPS LB apabila diperlukan.
10. Mengumumkan waktu pembayaran dividen kepada para pemegang saham.
11. Bertindak selaku likuidator jika dalam keputusan RUPS atau penetapan likuidasi Perusahaan tidak menunjuk likuidator.
12. Menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
13. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata-usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.
14. Memberikan semua data/informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu apabila diperlukan oleh Dewan Komisaris.
15. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada pemegang saham melalui RUPS.
16. Menyampaikan pertanggungjawaban atas kepengurusan Perseroan berupa laporan keuangan, laporan kegiatan Perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG.

Tugas terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Menyusun kerangka kerja dan struktur atau kebijakan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta mengevaluasinya secara minimal satu kali dalam satu tahun.
2. Mensosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh jenjang organisasi Perseroan.
3. Memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara terus menerus dalam rangka mengelola Perusahaan secara profesional.
4. Mengungkapkan informasi/issue penting yang relevan kepada para pemegang saham, dan pelaku pasar terkait dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang transparan.
5. Memastikan Perusahaan telah menyampaikan laporan sebagaimana diwajibkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia maupun regulator lainnya.

Tugas terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Menyusun dan menerapkan kebijakan sumber daya manusia secara lengkap.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan Perusahaan dengan memperluas pengetahuan dan keahlian seluruh karyawan Perseroan pada seluruh jenjang organisasi yang dapat diaktualisasikan melalui penyelesaian permasalahan secara efektif dan pencapaian hasil yang sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan.
3. Mengedepankan budaya pembelajaran secara berkala pada seluruh jenjang organisasi guna meningkatkan pengetahuan yang menunjang operasional Perusahaan. Budaya pembelajaran tersebut dapat diaktualisasikan melalui peningkatan tingkat perolehan sertifikasi atau program pelatihan guna mengembangkan kapasitas individu.

Tugas terkait dengan penerapan Manajemen Risiko atau *Risk Management*

1. Membentuk fungsi yang menjalankan manajemen risiko yang independen dari operasi Perusahaan.
2. Membentuk Komite Manajemen Risiko.
3. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhitungkan limit risiko secara keseluruhan untuk setiap jenis risiko yang relevan dengan Perusahaan dan Entitas Anaknya, serta tingkat dan batas toleransi risiko sehubungan dengan kapasitas permodalan.
4. Melaksanakan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan.
5. Menyusun dan menentukan mekanisme persetujuan transaksi, terutama yang melampaui batasan limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan di Perusahaan dan Entitas Anak.
6. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
7. Memastikan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk pengelolaan dan pengendalian risiko sudah memadai.
8. Menetapkan struktur organisasi yang meliputi tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang berlaku pada setiap jenjang jabatan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko di Perseroan.
9. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
10. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah menindaklanjuti seluruh risiko Perusahaan yang material beserta dampak yang ditimbulkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
12. Mengevaluasi dan memperbaharui kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko dengan frekuensi yang disesuaikan dengan perubahan faktor-faktor yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan usaha Perusahaan, eksposur risiko, dan profil risiko.
13. Melakukan kajian risiko untuk setiap pengambilan keputusan strategis serta hal-hal terkait pengeluaran maupun penyediaan dana besar.
14. Menjadi panutan dalam penerapan; manajemen risiko, prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai Perseroan serta etika dan integritas.
15. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, pengelolaan aset, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan serta penyusunan laporan keuangan. Sistem pengendalian intern ini meliputi pengendalian intern yang dilakukan secara manual maupun yang dilakukan secara terotomatisasi dan dilakukan pengujian secara periodik.
16. Menyusun kebijakan, pedoman atau standar operasi dan prosedur (SOP) untuk operasional rutin perusahaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme *check and balance*.
17. Mensosialisasikan dan memutakhirkan kebijakan, pedoman atau Standar Operasi dan Prosedur (SOP) untuk operasional rutin Perusahaan seluruh karyawan secara periodik.

Tugas terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan

1. Memastikan bahwa pemilihan dan pelantikan serta tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membentuk fungsi yang menjalankan Kepatuhan yang independen dari operasi Perusahaan dengan personil dan sistem manajemen informasi yang memadai.

3. Memantau serta menyetujui kebijakan kepatuhan Perusahaan secara formal mengenai fungsi penerapan kepatuhan yang efektif.
4. Mengkomunikasikan seluruh komponen penerapan kepatuhan Perseroan yaitu kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.
5. Memastikan bahwa Perseroan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan laporan yang diperlukan lainnya kepada OJK atau pihak terkait, dimana cakupan laporan-laporan tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.

Tugas terkait dengan pelaksanaan audit

1. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (Unit Audit Internal) yang independen dari operasi Perusahaan dan memiliki jalur pelaporan ke Direktur Utama dan jalur komunikasi ke Komite Audit serta memiliki personil yang berkualitas.
2. Menindaklanjuti hasil audit baik dilakukan oleh Unit Audit Internal, auditor eksternal maupun audit dari regulator.
3. Memastikan bahwa telah terdapat penerapan tindakan perbaikan yang memadai atas penyimpangan atau kendala dan hambatan dalam kegiatan usaha Perusahaan yang diidentifikasi oleh Unit Audit Internal, auditor ekstern dan regulator.
4. Memastikan bahwa laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal Perusahaan telah tersedia untuk RUPS.

Tugas terkait dengan keterbukaan informasi

Sesuai dengan Peraturan OJK dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, maka sekurang-kurangnya Direksi melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut.

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di Perseroan, bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di Republik Indonesia maupun di luar negeri.
2. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
3. Ada atau tidak ada benturan kepentingan serta intervensi Pemilik Perusahaan dalam pelaksanaan operasional Perseroan.
4. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Perseroan.
5. Kepemilikan *shares option* yang mencakup informasi sebagai berikut:
 - a. Kebijakan pengalokasian *shares option*;
 - b. Jumlah saham yang sebelumnya telah dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum menerima *shares option*;
 - c. Jumlah *shares option* yang diberikan;
 - d. Jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir periode pelaporan;
 - e. Harga *shares option* yang diberikan; dan
 - f. Jangka waktu atau masa berlaku eksekusi *shares option*.

Rapat dan Kehadiran Direksi

Direksi telah mengadakan 6 kali rapat sampai dengan Juni 2022 termasuk rapat-rapat operasional. Direksi juga menghadiri rapat dengan Dewan Komisaris dan komite-komite.

Tingkat Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah kehadiran dalam Rapat Direksi per Juni 2022
Mashudi Hamka (berdasarkan Akta 79/2022 mulai menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 20 Juli 2022)	Per Juni 2022 belum menjabat sebagai Direktur Utama
Jessica Herliani Tanoesoedibjo	6x
Ageng Purwanto	6x
Peter Fajar	6x
Oerianto Guyandi (berdasarkan Akta 79/2022 mulai menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 20 Juli 2022)	Per Juni 2022 belum menjabat sebagai Direktur
Muhammad Suhada	Per Juni 2022 belum menjabat sebagai Direktur

(berdasarkan Akta 79/2022 mulai menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 20 Juli 2022)	
Mahdan	6x
Wito Mailoa (berdasarkan Akta 79/2022 sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 20 Juli 2022)	6x
Natalia Purnama (berdasarkan Akta 79/2022 sudah tidak menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 20 Juli 2022)	6x
Samuel Mulyono (berdasarkan Akta 79/2022 sudah tidak menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 7 Februari 2022)	1x
Darma Widjaja (berdasarkan Akta 79/2022 sudah tidak menjabat sebagai Direktur sejak 21 Februari 2022)	1x

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besarnya Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp774 juta, Rp1.444 juta, dan Rp1.767 juta untuk Dewan Komisaris dan sebesar Rp6.029 juta, Rp8.314 juta, dan Rp6.287 juta untuk Direksi.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/MNCKI/LEGAL/VII/2021, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Sukisto
 Anggota : Andrea Frans Tambunan
 Anggota : Riza Satria

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan di Perseroan, Komite Audit mengemban sejumlah tanggung jawab. Sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan, pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Laporan atau informasi keuangan.
Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Audit Internal
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.
3. Audit Eksternal
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
 - b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya
4. Manajemen risiko dan Pengendalian internal
Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Manajemen/Direksi.
5. Peraturan perundang-undangan
Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
6. Pengaduan
Menelaah pengaduan yang diterima Perseroan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

8. Kerahasiaan
Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Piagam Komite Audit Perseroan, rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Seluruh rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Tingkat Kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah kehadiran dalam Rapat Komite Audit per Juni 2022
Sukisto	2x
Andrea Frans Tambunan	2x
Riza Satria	2x

Berikut disajikan keterangan singkat mengenai Anggota Komite Audit Perseroan:

Sukisto

Ketua Komite

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Lahir di Batang pada 3 September 1959. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2020.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua pada tahun 2016, Inspektur Pengawas Daerah Sumatera Selatan pada tahun 2014, Inspektur Bidang Manajemen SDM II Inspektorat Wilayah V Inspektorat Pengawasan Umum pada tahun 2012, Kepala Biro Sarana dan Prasarana Polda Bali pada tahun 2010, Kepala Biro Logistik Polda Kalimantan Barat pada tahun 2008, Kepala Bidang Telematika Polda Metrojaya pada tahun 2006, Kepala Sub Bagian Densus II 88 AT Bareskrim Polri pada tahun 2004, Kepala Bagian Opslat Bareskrim Polri pada tahun 2004, Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja pada tahun 2001, Kapolres Sikka Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2000, Kapolres Ngada Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 1998, Kepala Bagian Tindak Pidana Korupsi Dit Serse Polda Bali pada tahun 1997, Guru Muda Pusat Pendidikan Res Intel pada tahun 1995, Kepala Korps Siswa SPN pada tahun 1994, Kepala Satuan Reserse Resta Bandung timur pada tahun 1992, Kepala Satuan IPP Resta Pontianak Kalimantan Barat pada tahun 1988, Kepala Satuan Reserse Resta Pontianak Kalimantan Barat pada tahun 1986, Kepala Kepolisian Sektor Kota Pontianak Selatan pada tahun 1985, Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kota Pontianak Selatan pada tahun 1985, Komando Satuan Serse Sanggau Kalimantan Barat pada tahun 1983.

Beliau menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1983, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1991, Bundeskriminalamt Jerman pada tahun 1995, Sekolah Staf & Komando Angkatan Darat pada tahun 1997, Sekolah Staf & Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi Polri pada tahun 2007.

Andrea Frans Tambunan

Anggota Komite

Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 1999. Pengalaman kerja beliau antara lain sebagai Internal Audit

Manager PT Melissa Kreasi Mandiri pada tahun 2006-2007, Chief of Internal Audit Committee PT Melissa Kreasi Mandiri (2007-2009), Finance & Accounting Manager PT Nuansacipta Coal Investment (2009-2012), Finance & Accounting Manager PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (2012-2015) dan Finance & Accounting Manager PT Putra Muba Coal (2015-sekarang).

Riza Satria

Anggota Komite

Warga Negara Indonesia, berusia 34 tahun. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2011. Pengalaman kerja beliau antara lain sebagai Auditor di Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Member firm of BDO International) – Jakarta (2011-2012), kemudian dilanjutkan dengan berkarir di Ernst & Young, Indonesia – Jakarta sebagai Auditor (2012-sekarang).

Internal Audit

Perseroan memiliki Unit Audit Internal sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah mengangkat M. Ilham Abrar selaku Kepala Unit Audit Internal terhitung sejak tanggal 20 Desember 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 068/HRD/MNCKI/XII/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan tertanggal 20 Desember 2021.

Unit Audit Internal bertugas memberikan pandangan, keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan proses GCG Perseroan dan unit-unit usaha.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal Perseroan, secara garis besar tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal antara lain:

1. Menyusun serta melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberi saran perbaikan dan informasi yang obyektif mengenai kegiatan yang diperiksa pada seluruh tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit dan mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu Audit Internal.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ("Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014") Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang di jalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/MNCKI/LEGAL/XI/2022 tanggal 21 November 2022.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi mengenai komposisi jabatan anggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan Remunerasi.

- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang disampaikan melalui RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 004/MNCKI/LEGAL/XI/2022 tanggal 21 November 2022:

Ketua dan selaku Anggota : Sukisto
 Anggota : Wito Mailoa
 Anggota : Angelina Anggraeni

Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang telah dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2022 adalah 2 kali. Berikut adalah tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjabat pada periode tersebut:

Nama	Tingkat kehadiran/Jumlah rapat Komisaris tahun 2022
Sukisto	100% / 2x
Wito Mailoa	100% / 2x
Angelina Anggraeni	100% / 2x

Berikut disajikan keterangan singkat mengenai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Sukisto

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Lahir di Batang pada 3 September 1959. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2020.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua pada tahun 2016, Inspektur Pengawas Daerah Sumatera Selatan pada tahun 2014, Inspektur Bidang Manajemen SDM II Inspektorat Wilayah V Inspektorat Pengawasan Umum pada tahun 2012, Kepala Biro Sarana dan Prasarana Polda Bali pada tahun 2010, Kepala Biro Logistik Polda Kalimantan Barat pada tahun 2008, Kepala Bidang Telematika Polda Metrojaya pada tahun 2006, Kepala Sub Bagian Densus II 88 AT Bareskrim Polri pada tahun 2004, Kepala Bagian Opslat Bareskrim Polri pada tahun 2004, Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja pada tahun 2001, Kapolres Sikka Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2000, Kapolres Ngada Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 1998, Kepala Bagian Tindak Pidana Korupsi Dit Serse Polda Bali pada tahun 1997, Guru Muda Pusat Pendidikan Res Intel pada tahun 1995, Kepala Korps Siswa SPN pada tahun 1994, Kepala Satuan Reserse Resta Bandung timur pada tahun 1992, Kepala Satuan IPP Resta Pontianak Kalimantan Barat pada tahun 1988, Kepala Satuan Reserse Resta Pontianak Kalimantan Barat pada tahun 1986, Kepala Kepolisian Sektor Kota Pontianak Selatan pada tahun 1985, Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kota Pontianak Selatan pada tahun 1985, Komando Satuan Serse Sanggau Kalimantan Barat pada tahun 1983.

Beliau menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1983, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1991, Bundeskriminalamt Jerman pada tahun 1995, Sekolah Staf & Komando Angkatan Darat pada tahun 1997, Sekolah Staf & Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi Polri pada tahun 2007.

Angelina Anggraeni

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2009 dan gelar Magister of Management dari Universitas Budi Luhur pada tahun 2012. Beliau memulai karirnya di Perseroan sejak tahun 2014 dan saat ini menjabat sebagai HR Compensation Benefit. Sebelum bergabung dengan

Perseroan, beliau berkarir sebagai HR Payroll di PT Berkat Satria Jaya (2011-2013) dan HR System Procedure di PT Golden Energy Mines (2009-2011).

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah 5 tahun yaitu sampai dengan tanggal 2026. Selain Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Audit, Perseroan juga memiliki Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola.

Komite Pemantauan Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/MNCKI/LEGAL/IX/2022 tanggal 30 September 2022.

Tugas komite pemantau risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan tanggung jawab pengawasan dalam manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan benar.
2. Sehubungan dengan proses untuk memberikan rekomendasi, Komite harus mengevaluasi konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan implementasinya.
3. Menyiapkan dan/atau memperbarui pedoman kerja dan prosedur Komite.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi pengawasan seperti yang diminta oleh Dewan Komisaris.

Susunan Komite Pemantauan Risiko Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/MNCKI/LEGAL/IX/2022 tanggal 30 September 2022, adalah sebagai berikut:

Ketua : Sukisto
 Anggota : Wito Mailoa
 Anggota : Susanty Tjandra Sanusi

Jumlah Rapat Komite Pemantauan Risiko Perseroan yang telah dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2022 adalah 2 kali. Berikut adalah tingkat kehadiran anggota Komite Pemantauan Risiko yang menjabat pada periode tersebut:

Nama	Tingkat kehadiran/Jumlah rapat Komisaris tahun 2022
Sukisto	100% / 2x
Wito Mailoa	100% / 2x
Susanty Tjandra Sanusi	100% / 2x

Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola Perusahaan dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/MNCKI/LEGAL/2022 tanggal 30 September 2022.

Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Perusahaan wajib bertindak secara independen.
2. Komite Tata Kelola Perusahaan mengevaluasi struktur dan kerangka tata kelola serta kesesuaian kebijakan *Corporate Governance* Perusahaan.
3. Secara berkala mengkaji dan menilai prinsip-prinsip dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai ketidaksesuaian pelaksanaan *Corporate Governance* dan menyampaikan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam rangka perbaikan.

Susunan Komite Tata Kelola Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/MNCKI/LEGAL/2022 tanggal 30 September 2022, adalah sebagai berikut:

Ketua : Sukisto
 Anggota : Wito Mailoa
 Anggota : Tien

Jumlah Rapat Komite Tata Kelola Perseroan yang telah dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2022 adalah 2 kali. Berikut adalah tingkat kehadiran anggota Komite Tata Kelola yang menjabat pada periode tersebut:

Nama	Tingkat kehadiran/Jumlah rapat Komisaris tahun 2022
Sukisto	100% / 2x
Wito Mailoa	100% / 2x
Tien	100% / 2x

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“**Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014**”), Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. 134/MNCK-WM/DIR/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah mengangkat **Edward Kennetze** sebagai Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan tercapainya peningkatan citra perusahaan melalui pengelolaan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal perusahaan, mengadministrasikan dokumen perusahaan, membina hubungan antar lembaga, melakukan pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai perusahaan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dan menjamin ketersediaan informasi kepada *stakeholders*. Sekretaris perusahaan menggunakan berbagai macam media informasi demi tercapainya informasi kepada pihak lainnya dengan menggunakan media surat kabar, buletin internal, web perusahaan (www.mncfinancialservices.com), serta media lainnya yang dianggap sesuai. Sekretaris Perusahaan telah mengikuti seminar yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 September 2022 dengan tema Sosialisasi Pemenuhan Ketentuan *Free Float*.

Berikut adalah riwayat singkat pejabat Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Warga Negara Indonesia, saat ini berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada tahun 1985. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Depok, pada tahun 2009. Beliau memulai karir sebagai Junior Associate Angeline Suparto Konsultan Indonesia (2009), lalu sebagai Legal Officer dan Department Head PT First Media Tbk (2009-2015), dan sebagai Legal Manager di PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk) (2015-2019). Bekerja di Perseroan sejak April 2019 sampai saat ini.

Sekretaris Perusahaan

PT MNC Kapital Indonesia Tbk
 MNC Financial Center Lantai 21
 Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340
 Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983 6870
 Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Perseroan beserta seluruh Entitas Anak Perusahaan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Pengendalian internal tersebut mencakup aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Berikut adalah bentuk pengendalian keuangan Perseroan yaitu:

1. Pemisahan tugas (*segregation of duties*) yang memadai dan pembuatan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas.
2. Level otorisasi yang jelas dalam hal keuangan.
3. Penggunaan harta kekayaan Perseroan secara efisien dan efektif dengan persetujuan sesuai dengan level otorisasi dan anggaran yang telah disetujui sebelumnya.

4. Pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 5. Analisa laporan keuangan secara rutin untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan.
- Sedangkan untuk bentuk pengendalian operasional yang telah dilakukan Perseroan, yaitu:
1. Struktur organisasi yang memastikan pemisahan tugas (*segregation of duties*) yang memadai.
 2. Pembuatan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas secara aktivitas maupun kontrol.
 3. Level otorisasi yang jelas dalam aspek operasional.
 4. Memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
 5. Memastikan efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan.

Upaya Pengelolaan Risiko

Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang mengacu pada kebijakan dan tata cara Perseroan serta pedoman yang ditetapkan oleh Direksi. Direksi menetapkan, menjaga dan mengevaluasi risiko sehingga eksposur risiko masih terdapat dalam batas toleransi kerugian.

Fungsi utama manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur dan mengelola posisi risiko sesuai kebijakan dan tata cara Perseroan. Perseroan senantiasa mengantisipasi berbagai risiko yang timbul dalam menjalankan roda bisnisnya baik risiko yang dapat dikendalikan secara internal maupun risiko yang berada diluar kendali Perseroan. Risiko-risiko yang bersifat internal sedapat mungkin dikendalikan dan diminimalkan keberadaannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Manajemen Risiko. Untuk risiko-risiko yang bersifat eksternal sedapat mungkin diidentifikasi secara seksama atas potensi dan dampaknya terhadap Perseroan.

Perseroan mengidentifikasi dan memitigasi sejumlah risiko yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang tergabung dalam Perseroan, antara lain sebagai berikut:

a. Risiko Suku Bunga

Eksposur risiko tingkat bunga berhubungan dengan jumlah aset atau liabilitas dimana pergerakan pada tingkat suku bunga dapat mempengaruhi laba setelah pajak. Kelompok Usaha memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan dari kreditur yang menawarkan suku bunga yang paling menguntungkan Kelompok Usaha. Persetujuan dari Direksi dan Komisaris harus diperoleh sebelum Kelompok Usaha menggunakan instrumen keuangan tersebut untuk mengelola eksposur risiko suku bunga.

b. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Kelompok Usaha mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang.

c. Risiko Harga Ekuitas

Investasi jangka panjang Kelompok Usaha terutama terdiri dari investasi minoritas dalam ekuitas Entitas swasta Indonesia. Sehubungan dengan Entitas Indonesia dimana Kelompok Usaha memiliki investasi, kinerja keuangan Kelompok Usaha tersebut kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia.

d. Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan kerugian bagi Kelompok Usaha.

Risiko kredit Kelompok Usaha terutama melekat pada rekening bank, setara kas, piutang nasabah, deposito yang dijadikan sebagai jaminan pada Lembaga Kliring dan Penjamin Efek Indonesia, piutang pembiayaan, kredit, piutang pembiayaan murabahah, premi dan aset reasuransi. Kelompok Usaha menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya, sedangkan piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Kelompok Usaha dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (limit) pihak lawan yang direviu dan disetujui oleh manajemen secara tahunan.

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Kelompok Usaha mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut. Kelompok Usaha melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk semua pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi terlebih dahulu. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau *exposure* terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Nilai tercatat aset keuangan yang dicatat pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai dan peningkatan kredit mencerminkan eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko kredit.

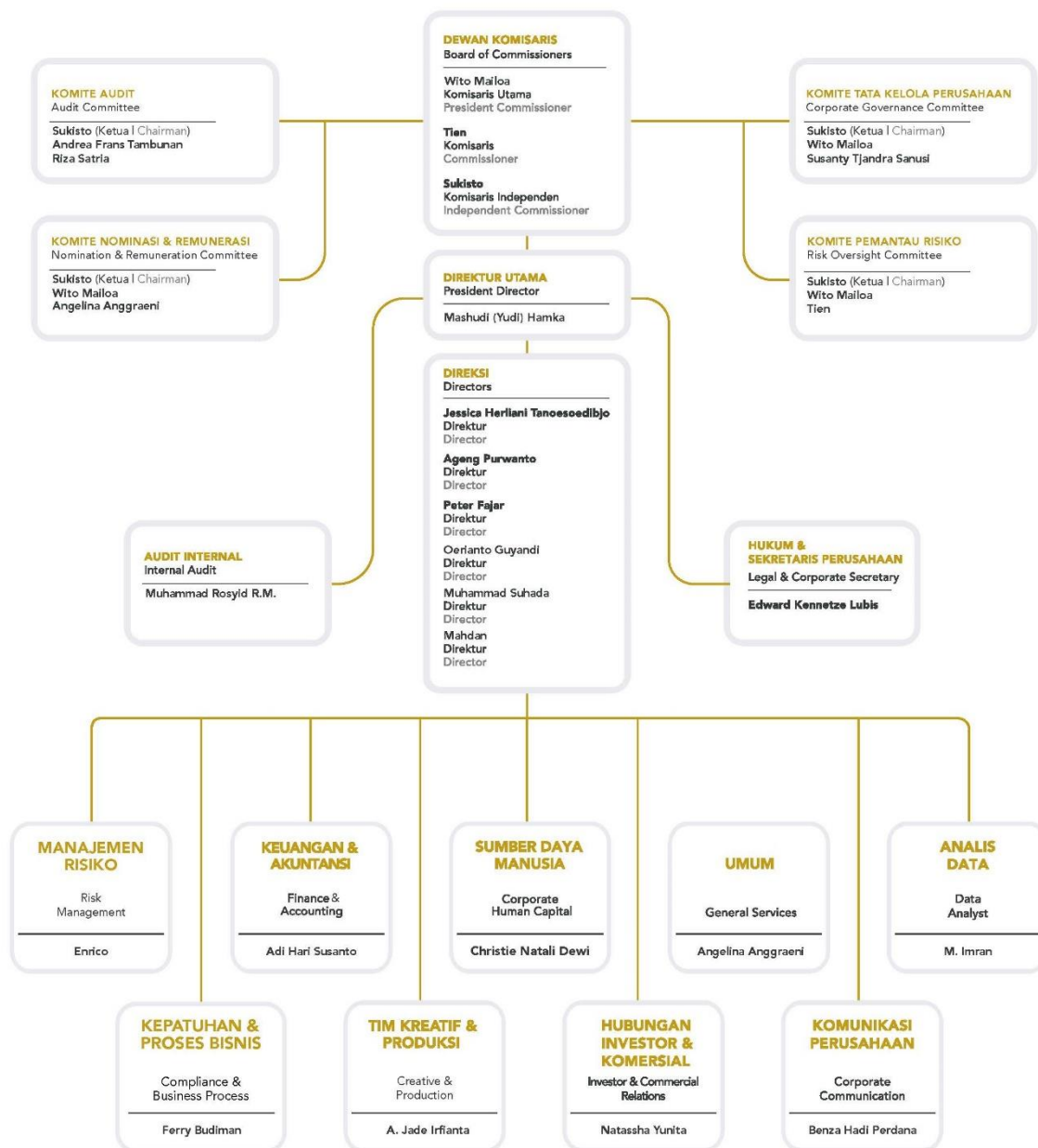
e. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Kelompok Usaha menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek. Kelompok Usaha pada tanggal laporan ini memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendek.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Kelompok Usaha dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka.

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:



F. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

MNC Group mendirikan lembaga sosial bernama Yayasan Jalinan Kasih dalam menampung dana pemirsa yang fokus dalam kegiatan sosial pendidikan dan kesehatan. Dalam kegiatan CSR, Yayasan Jalinan Kasih menggunakan nama MNC Peduli.

Selain menggunakan dana pemirsa, Perseroan juga melakukan berbagai kegiatan sosial baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun grup unit-unit dibawah Perseroan. Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, maka kegiatannya pun disesuaikan dengan bidang usahanya. Kegiatan sosial dilakukan secara integrasi dengan unit-unit lain dibawah Perseroan dan Grup.

Perseroan berkeyakinan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian penting dari kegiatan usaha Perseroan. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Perseroan mengadopsi berbagai program dan aktivitas dengan tujuan untuk memberikan solusi yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun Perseroan. Program dan aktivitas yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Bidang Sosial

- MNC Peduli menyelenggarakan aksi donor darah yang bertemakan “*MNC Love Donation. Let’s share the love with your blood*” yang berlokasi di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
- MNC Peduli bekerja sama dengan PMI Kota Depok dan Bogor dalam kegiatan Donor Darah.
- Kegiatan sosial dengan memberikan bantuan kepada para lansia berupa bingkisan keperluan di Panti Werdha Melania Pademangan, Jakarta Utara.
- MNC Peduli memberikan sumbangan sebesar Rp5 miliar kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam bentuk alat pelindung diri (APD) untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.
- MNC Peduli mendukung kegiatan sentra vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Enesis Group berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur.
- MNC Peduli bekerja sama dengan Dewan Pers, ATVI, IJTI, dan RSAU serta Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk para insan pertelevisian, dan jurnalis televisi di Gedung High End, Jakarta Pusat.
- MNC Peduli menyalurkan hewan kurban melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).
- MNC Peduli dipercayakan oleh NESTLE menyalurkan bantuan untuk tenaga kesehatan yang berjuang membantu pasien terinfeksi COVID-19.

2. Bidang Lingkungan

- Kegiatan Peduli Lingkungan dengan melakukan gerakan penghijauan menanam pohon sebagai wujud kepedulian dan kelestarian terhadap lingkungan.
- MNC Peduli bersama Komunitas Masyarakat Peduli Ciliwung (MAT PECl) menanam sebanyak 2.225 lebih bibit pohon di bantaran sungai Ciliwung di sekitar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
- Penanaman bibit mangrove sebanyak 1.000 bibit tanaman di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh unit grup jasa keuangan dibawah Perseroan secara integrasi dan sinergi dengan bisnis masing-masing unit usahanya, yaitu:

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP)

- Bidang pendidikan
 - *Prospect For Global Financial Stability Lecture*
 - *Youth Collaboration Towards Action*
 - Pengembangan Seni Anak Sejak Usia Dini di Sahid Festival
 - Indonesia Banking Outlook & Overview Lecture
 - Edukasi Literasi Finansial
 - *Fun Schooling SDN 045*
 - Bulan inklusi keuangan
 - *Financial Day*
 - *Fun Schooling TK Eka Dhiyasa*
- Bidang keagamaan
 - Perayaan Paskah Penyandang Difabel
 - Buka Puasa Bersama BABP
 - Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim IBI
 - Buka Puasa Bersama Group
 - Ibadah Natal Persekutuan Doa BABP
- Bidang sosial
 - Donor Darah MNC "*Let's Share The Love With Your Blood*"
 - Sepuluh Ribu Mata
 - Sumbangan Hewan Kurban Idul Adha
 - 100 Kacamata Gratis
 - UNICEF Check Out for Children

PT MNC Finance (MNCF)

- Bidang Lingkungan
 - Peduli Ciliwung dalam rangka memperingati HUT MNC Group

PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGUI)

- Bidang pendidikan:
 - Sumbangan 100 Kacamata Baca Gratis
 - Terima buku dari Siswa SMPN 27 Jakarta, SMPN 27 Duren Sawit Jakarta Timur
 - Bantuan buku bacaan anak kepada RPTRA Jeruk Manis, RPTRA Kebon Sirih
- Bidang keagamaan:
 - Penyaluran Hewan Qurban Idul Adha 1438 H
- Bidang Baksos:
 - MNC Bersih-bersih Ciliwung, Srengseh Sawah, Jakarta

PT MNC Asuransi Indonesia (MNCAI)

- Bidang keagamaan
 - Penyerahan Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha di Masjid Bimantara
 - Penyerahan Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha MNC Kapital di Banten
- Bidang Baksos
 - Penyerahan bantuan kepada Yayasan Yatim Piatu Nurul Iman Jafariya

PT MNC Sekuritas (MNCS)

- Bidang keagamaan
 - Penyerahan sumbangan hewan qurban Idul Adha 1438 H

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2022, Direktorat Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi dan pengkajian desain organisasi secara menyeluruh baik di induk perusahaan maupun unit usaha, pembenahan kebijakan SDM, pengembangan kompetensi SDM, integrasi sistem operasional SDM sampai dengan internalisasi budaya organisasi.

Perseroan percaya bahwa melalui SDM yang unggul dan tata kelola serta budaya perusahaan akan mampu mengakomodasi perubahan cepat yang senantiasa terjadi di dunia bisnis, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif Perseroan.

Untuk itu Perseroan meninjau kembali fundamental budaya perusahaan dan merancang ulang nilai-nilai budaya tersebut dengan menitikberatkan pada visi, *values*, kualitas, kecepatan, progresif dan kerja keras dalam semua aspek tata kelola perusahaan. Perseroan menyadari bahwa kekayaan intelektual adalah mesin penggerak utama dari bisnis Perseroan. Karena pentingnya hal tersebut, Perseroan selalu mengintegrasikan pengembangan SDM sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi bisnis Perseroan.

Pengembangan Organisasi

Perseroan juga telah menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*), dengan menggunakan kompetensi perilaku (*Behavior Competency*) baru yang diturunkan dari nilai-nilai (*values*), visi, serta misi Perusahaan yang telah diperbaharui. Kompetensi inilah yang menjadi salah satu basis untuk mengidentifikasi talenta-talenta yang memiliki potensi (*Talent Identification*), dan dapat juga dikenali dari hasil kinerjanya (*performance*) agar selanjutnya dapat dilakukan proses *Talent Mapping* untuk memastikan bahwa talenta ini akan ditempatkan pada posisi-posisi yang tepat, terutama pada posisi kunci (*key position*).

Selain itu survei budaya juga telah diselenggarakan, *Organization Culture Health Index* (OCHI), yang melibatkan seluruh karyawan. Survei ini merupakan bagian program pengenalan budaya baru perusahaan dan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan konsultan ACT Consulting (salah satu unit usaha *ESQ Leadership Center*) untuk memastikan anonimitas dan independensi hasil. Pengukuran budaya ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tingkat kesehatan budaya kerja di Organisasi
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja di Organisasi

3. Mengetahui harapan karyawan terhadap budaya kerja di Organisasi saat ini
4. Melakukan analisa terhadap nilai-nilai di Organisasi
5. Mengetahui tingkat kenyamanan bekerja di Organisasi

Hasil dari pengukuran budaya ini menjadi salah satu acuan untuk program pengembangan organisasi.

Pengembangan SDM

Tahun 2022, Perseroan berfokus pada program pengembangan kepemimpinan melalui *Financial Services Leadership Training* serta *Leaders Strategic Meeting*, serta program pengembangan kompetensi teknikal *IT Developer* yang mendukung pengembangan produk-produk digital di unit-unit bisnis *Financial Services*.

MNC Financial Services Leadership Training & Leaders Strategic Meeting yang mengusung tema “UNITED FOR GROWTH” merupakan sebuah program pengembangan yang diikuti oleh seluruh Direksi di MNC Kapital Indonesia dan entitasnya. Program ini bertujuan untuk membangun semangat kebersamaan untuk kesuksesan bersama di Group Financial Services dalam Era Digitalisasi, meningkatkan sinergi lintas unit dibawah naungan MNC Financial Services, dan meningkatkan pertumbuhan performance unit bisnis MNC Financial Services. Program ini diikuti oleh total 52 peserta yang terdiri dari Direksi Holding dan Direksi Unit Bisnis MNC Financial Services, difasilitasi oleh Bapak Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group dan juga oleh Direksi Holding MNC Financial Services dibawah pimpinan Bapak Yudi Hamka selaku Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Program ini diadakan selama 3 hari pada tanggal 15 September 2022, di MNC Conference Hall, Gd.iNews Lt.3, Kebon Sirih dan dilanjutkan pada tanggal 16-17 di Lido Lakes Resort & Conference, Sukabumi.

Program Pengembangan Kompetensi Teknikal *IT Developer* diinisiasi atas dasar kebutuhan organisasi Financial Services terhadap SDM yang kompeten dalam bahasa pemrograman untuk mendukung inisiatif pengembangan produk digital di Motion Technology. Program pengembangan saat ini bekerjasama dengan Hacktiv8 sebagai salah satu *market leader* dalam penyelenggaraan program-program *bootcamp IT Developers*. Hacktiv8 saat ini dipercaya untuk melaksanakan program bootcamp bahasa pemrograman Golang bagi 50 IT Developers di lingkungan MNC Group. Program Pengembangan Kompetensi Teknikal *IT Developer* ini diharapkan dapat memperluas kerjasamanya dengan berbagai vendor penyelenggara pelatihan *IT Developer* terkemuka di Indonesia untuk memberikan pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi *IT Developers* terkait berbagai jenis *tools developers* seperti: *Python, Node.js, React.js, Fullstack Dev, Php*, dan *tools* pemrograman lainnya.

Rencana pengembangan SDM tahun 2022 masih berfokus pada *Organization Readiness* dengan menjalankan program-program yang memastikan proses transisi (suksesi) dalam organisasi dapat berlangsung dengan lancar. Infrastruktur SDM yang dibutuhkan dalam program suksesi ini adalah *talent pool, career development (career path & managerial development program)*.

- Budaya sebagai fondasi organisasi masih menjadi salah satu sasaran program di 2022. Pembangunan Budaya Perusahaan (*Company Culture*) yang menyeluruh bertujuan agar setiap individu karyawan memiliki kebanggaan dan semangat yang sama dalam menjadi bagian dari MNC Group. Untuk semakin memperluas pengenalan dan pemahaman budaya baru di MNC Group, di tahun 2022 akan dilaksanakan aktivitas-aktivitas untuk semakin memperdalam pemahaman akan budaya dan mensosialisasikan kembali terhadap nilai – nilai (*values*) perusahaan agar karyawan semakin paham dalam mengimplementasikan nilai-nilai perusahaan tersebut di dalam bidang professional dan individu yang tercermin menjadi budaya MNC Group.
- Sistem dan Kebijakan perusahaan dalam pengembangan SDM terus dilengkapi dan diperbaiki untuk menunjang program pengembangan SDM.
 - Pengukuran Produktivitas merupakan sistem baru yang akan terus dijalankan dalam lingkup MNC Group, untuk mengukur produktivitas dari level organisasi hingga departemen.
 - Pelaksanaan talent review di 2022 bertujuan untuk mengkaji karyawan berkinerja tinggi di masing-masing unit bisnis di bawah MNC Financial Services dan menentukan *Individual Development Program* yang merupakan bagian dari program *talent retention* dan *succession planning* di MNC Financial Services.
 - Untuk melengkapi Kamus Kompetensi Inti, tahun 2022 akan mulai disusun Kompetensi Teknis untuk posisi/fungsi kunci di setiap unit bisnis.

MNC Talent Club (MTC): sebagai salah satu bentuk komitmen dalam pengembangan SDM, Divisi Talent Management & People Development menyelenggarakan program *Talent Management* untuk memastikan tersedianya *successor* untuk mengisi posisi yang dibutuhkan di organisasi serta tersedianya data identifikasi

talent untuk keperluan pemetaan *future leaders*. Program ini diawali dengan pelaksanaan potensial review di setiap unit yang sudah dilaksanakan sejak awal 2022 yang hasilnya akan di sandingkan dengan *performance appraisal* dan menghasilkan *matrix 9 Box of MTC*. Berdasarkan hasil wawancara terhadap harapan *leader* terkait dengan visi, strategi bisnis dan *culture* maka tim Talent akan melakukan wawancara terhadap peserta (*talent*) untuk observasi gap dilihat dari harapan leader dan actual implementasi. *Talent Box*, *Talent Profile* dan *assessment* juga akan menjadi acuan dalam melihat kompetensi Talent, organisasi akan mengembangkan *Individual Development Plan* bagi setiap *Talent* dan memetakan para *talent* ke dalam *Replacement Table Chart* (RTC) sebagai bagian dari mapping succession plan setiap divisi dalam sebuah unit, selain memasukkan para *talent* ke dalam RTC, talent juga akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari program tindak lanjut yaitu *MTC Engagement Program*, *MTC Learning Wallet*, *MTC Retention Program*.

Manajemen rekrutmen yang terintegrasi

Perencanaan Karyawan

- I. Perencanaan karyawan yang mencakup penyusunan struktur organisasi, uraian jabatan dan persyaratan dari tiap-tiap jabatan ditentukan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- II. Perencanaan karyawan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh perusahaan yang termasuk di dalamnya visi, misi, sasaran dan program kerja perusahaan.
- III. Perencanaan karyawan menjadi salah satu dasar untuk:
 - a. Perencanaan karyawan baru;
 - b. Penempatan karyawan atau pemindahan karyawan; dan
 - c. Pemberian promosi kepada karyawan.

Proses Penerimaan Karyawan

1. Perusahaan dalam melaksanakan penerimaan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam anggaran tahunan yang telah disetujui.
Di dalam penerimaan karyawan perusahaan akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan bisnis sebagaimana tercantum dalam anggaran tahunan yang telah disetujui.
2. Dalam pengisian lowongan jabatan tertentu, perusahaan akan memberikan prioritas kepada karyawan perusahaan yang dinilai memenuhi persyaratan jabatan. Apabila dinilai tidak ada yang memenuhi persyaratan, perusahaan akan melakukan penerimaan dengan calon yang berasal dari luar perusahaan.
Dalam penerimaan karyawan untuk jabatan kosong di dalam struktur organisasi maka perusahaan akan memberikan prioritas kepada karyawan yang dinilai memenuhi persyaratan uraian pekerjaan di dalam jabatan sebagai program karir. Apabila dinilai karyawan belum ada yang memenuhi, maka penerimaan karyawan akan dilakukan dari luar perusahaan.
3. Struktur organisasi, uraian pekerjaan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pekerja ditentukan dan diatur oleh Perseroan.

Syarat Penerimaan Karyawan

Sebelum diterima sebagai karyawan, seorang calon karyawan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi karyawan.

1. Penerimaan karyawan dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan karyawan (*Man Power Planning*) dan perencanaan dana yang telah disetujui.
2. Setiap calon karyawan wajib mengikuti prosedur seleksi yang telah ditetapkan dan dinyatakan lulus dalam seleksi (wawancara dan tes) yang diadakan serta pemeriksaan kesehatan oleh tim medis kesehatan atau yang ditunjuk.
3. Calon karyawan dengan spesifikasi yang sesuai wajib mengikuti prosedur seleksi wawancara, tes psikologi, tes kemampuan teknis, pengecekan referensi serta pemeriksaan kesehatan oleh tim medis yang ditunjuk dan dinyatakan lulus.
4. Calon karyawan akan mengajukan penawaran kompensasi kerja yang akan di sesuaikan dengan skema remunerasi perusahaan sehingga terjadi kesepakatan kedua belah pihak dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kerja.
5. Untuk karyawan tetap, bersedia menjalani masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU No. 13 Tahun 2003. Dalam masa percobaan kedua belah pihak dapat memutuskan hubungan kerjanya setiap waktu tanpa ada konsekuensi apapun.
6. Apabila masa percobaan telah dilaksanakan dengan memuaskan dan memenuhi persyaratan perusahaan, maka perusahaan dan calon karyawan akan mengadakan hubungan kerja. Dalam hal ini karyawan yang

bersangkutan akan menerima Surat Pengangkatan. Masa kerja karyawan yang bersangkutan akan dihitung sejak hari pertama masa percobaan.

7. Masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus dijalani oleh kedua belah pihak (pihak perusahaan dan pihak karyawan) secara konsekuen sampai berakhirnya masa perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian kerja kecuali salah satu pihak melakukan pelanggaran berat atau karena dalam keadaan memaksa (*force majeure*) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Penempatan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kualifikasi karyawan tersebut. Penempatan karyawan disesuaikan dengan kualifikasi pekerjaan dan struktur organisasi.
9. Karyawan baru akan diberikan orientasi untuk membantu proses penyesuaian diri pada tugas, interaksi dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan.

Skema/Alur Proses Rekrutmen

Mulai → *Man Power Planning* → Pencarian Kandidat → Seleksi Kandidat → Pengecekan Referensi & Tes Kesehatan → Pengajuan *Offering* → Penandatanganan Perjanjian Kerja → Persiapan Karyawan Baru → Karyawan baru Masuk → Selesai

Sistem Remunerasi

Perseroan secara terus menerus memperbaiki pemberian kompensasi dan *benefits* kepada seluruh karyawan di seluruh level sesuai dengan kinerja organisasi, individu dan/atau disesuaikan dengan praktek di industri. Untuk memenuhi kesejahteraan karyawan serta sebagai bentuk apresiasi bagi yang berprestasi, Perseroan senantiasa mengkaji paket remunerasi yang disediakan bagi karyawan agar mampu menyesuaikan dengan standar industri dan peraturan persyaratan ketenagakerjaan yang berlaku. Perseroan memberikan paket remunerasi yang kompetitif bagi seluruh karyawan yang terdiri dari:

- Gaji pokok dan berbagai tunjangan sesuai dengan jabatan.
- Di antara tunjangan yang diberikan adalah Tunjangan Hari Raya (THR), BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dana pensiun dalam bentuk program pensiun iuran pasti, asuransi jiwa serta jaminan perawatan kesehatan (rawat inap dan rawat jalan, perawatan gigi dan *maternity*).
- Perseroan juga memberikan bonus dan insentif atas dasar kinerja perusahaan serta performa masing-masing karyawan dan unit bisnisnya.
- Paket Umroh ke Tanah Suci bagi karyawan Muslim dan Paket Ibadah ke *Holy Land* bagi karyawan Kristiani yang diberikan kepada karyawan yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Perseroan.
- Program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Program/MESOP*).

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan juga menyadari perlunya menciptakan mekanisme yang efektif untuk membangun motivasi di setiap individu di lingkungan perusahaan agar terdorong untuk berkreasi dan meningkatkan produktivitasnya. Dalam hal ini, Perseroan memperhatikan faktor-faktor yang memberikan kepuasan bagi karyawan, seperti penghargaan terhadap prestasi kerja, pengakuan dan kemajuan personal. Sementara itu, Perseroan juga dituntut untuk memperhatikan faktor yang mendukung pencapaian kepuasan karyawan, seperti pemberian gaji, tunjangan yang memadai, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang kondusif.

Upaya peningkatan kompetensi para karyawan diadakan berbagai pelatihan baik secara *in house* maupun *public* yang disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing. Perseroan juga membentuk *Talent Inventory System* yang merupakan fasilitas pengembangan potensi karyawan melalui rotasi kerja yang memberikan kesempatan pada mereka untuk bekerja di bidang yang diminatinya atau sesuai keahliannya. Rotasi kerja ini diharapkan juga akan semakin mengasah kemampuan dan pengalaman karyawan untuk mempersiapkan mereka ke jenjang karir yang lebih tinggi.

Integrated HRIS and HR Reporting

Human Resources Information System (HRIS) yang terintegrasi dengan seluruh unit bisnis telah diimplementasikan di tahun 2017. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan HR ke unit bisnis dan karyawan serta meningkatkan kinerja manajemen HR. Dengan implementasi *Human Resources Information System* (HRIS) yang terintegrasi tersebut maka kedepannya HR akan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih maksimal baik dari segi *HR Administrative & Operation*, *HR Strategic* dan *Managerial*. HRIS dapat mengakomodir

kebutuhan karyawan seperti absensi, ijin, pengajuan cuti, pengkinian data, perjalanan dinas, pengajuan training, remunerasi, penilaian kerja dan HR administrasi lain serta HR Strategic.

Employee Communications/Events

Perseroan secara berkala telah mengadakan berbagai kegiatan, hal tersebut bertujuan untuk memberikan sinergi kerjasama antar karyawan di setiap unit bisnis. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- *Manager Forum*
- *Executive Talk*
- Pelaksanaan CSR
- Perayaan HUT MNC Group
- *MNC Rising Innovation Challenge*
- Outing dan Team Building
- Leaders Conference

Serikat Pekerja

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Asuransi Jiwa

Karyawan Perseroan dan Entitas Anak diikutsertakan dalam program asuransi kesehatan pada MNCL dan Program Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri pada MNCL yang sampai dengan tanggal Prospektus ini masih berlaku.

Perseroan juga mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek berdasarkan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 01BJ6008 tanggal 20 Februari 2001, ditandatangani oleh Direksi PT Jamsostek (Persero).

Koperasi

Perseroan memiliki koperasi bernama Koperasi Bimantara Group yang melayani kegiatan seperti penjualan barang konsumsi, simpan pinjam serta layanan lainnya kepada karyawan Perseroan. Manajemen Koperasi Bimantara Group ditunjuk langsung oleh Dewan Pembina Koperasi. Pengurus Koperasi Bimantara Group dipilih setiap lima (5) tahun sekali pada Rapat Anggota Tahunan.

Perjanjian Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan, Direksi, atau Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diadakan sebelumnya, para pemegang saham menyetujui Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris (EMSOP). EMSOP diberikan kepada karyawan kunci Perseroan dan Entitas Anak. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Perseroan bermaksud untuk memberikan hak opsi kepada Peserta untuk menukar dan membeli sejumlah saham Perseroan dengan jumlah, harga, dan tata cara yang disebutkan dalam Perjanjian dan Peserta yang bermaksud untuk menerima hak opsi tersebut harus menukarnya sesuai dengan tata cara yang disebutkan dalam Perjanjian.

Komposisi Karyawan

Total karyawan Perseroan dan Entitas Anak berikut per 30 Juni 2022 berjumlah 2.207 orang. Komposisi karyawan per tanggal 30 Juni 2022, menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, jenjang usia, status karyawan, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Komposisi Karyawan Perseroan serta Entitas Anak Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Perseroan			
Manajer (Manajer - EVP)	24	20	20
Asst. Manajer/Supervisor	28	22	20
Staff	8	4	5
Non Staff	1	1	1
Total	61	47	46
Entitas Anak			

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Manajer (Manajer - EVP)	394	384	378
Asst. Manajer/Supervisor	661	629	574
Staff	1.082	1.077	1.074
Non Staff	9	9	10
Total	2.146	2.099	2.003
Total Perseroan dan Entitas Anak	2.207	2.146	2.049

Komposisi Karyawan Perseroan serta Entitas Anak Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Perseroan			
S3/Doctor	-	-	-
S2/Postgraduate	9	6	7
S1/Undergraduate	40	32	31
Diploma/Diploma	11	9	8
Non Akademi/Non-Academic	1	-	-
Total	61	47	46
Entitas Anak			
S3/Doctor	-	-	1
S2/Postgraduate	89	88	81
S1/Undergraduate	1.600	1.557	1.478
Diploma/Diploma	299	303	293
Non Akademi/Non-Academic	158	151	150
Total	2.146	2.099	2.003
Total Perseroan dan Entitas Anak	2.207	2.146	2.049

Komposisi Karyawan Perseroan serta Entitas Anak Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Perseroan			
<25	3	-	1
25-34	22	19	19
35-44	31	24	21
45-50	3	3	4
>50	2	1	1
Total	61	47	46
Entitas Anak			
<25	103	132	78
25-34	937	910	864
35-44	756	730	727
45-50	224	184	233
>50	126	143	101
Total	2.146	2.099	2.003
Total Perseroan dan Entitas Anak	2.207	2.146	2.049

Komposisi Karyawan Perseroan serta Entitas Anak Menurut Status Karyawan

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Perseroan			
Tetap	49	39	45
Tidak Tetap	12	8	1
Total	61	47	46

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Entitas Anak			
Tetap	1.559	1.541	1.555
Tidak Tetap	587	558	448
Total	2.146	2.099	2.003
Total Perseroan dan Entitas Anak	2.207	2.146	2.049

Komposisi Karyawan Perseroan serta Entitas Anak Menurut Aktivitas Utama Perseroan

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Perseroan			
Investasi	61	47	46
Total	61	47	46
Entitas Anak			
Jasa perbankan	924	899	892
Jasa asuransi umum	205	213	203
Jasa asuransi jiwa	87	86	79
Jasa pembiayaan konsumen	448	435	422
Jasa sewa guna usaha	155	156	155
Jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek	182	187	169
Jasa pengelolaan investasi	46	45	43
Jasa finansial teknologi	99	78	40
Total	2.146	2.099	2.003
Total Perseroan dan Entitas Anak	2.207	2.146	2.049

Komposisi Karyawan Perseroan serta Entitas Anak Menurut Lokasi Perseroan

Keterangan	30 Juni 2022	31 Des	
		2021	2020
Perseroan			
Kantor Pusat	61	47	46
Total	61	47	46
Entitas Anak			
Kantor Pusat	1.225	1.181	1.084
Kantor Regional	921	918	919
Total	2.146	2.099	2.003
Total Perseroan dan Entitas Anak	2.207	2.146	2.049

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing yaitu Mashudi Hamka selaku Direktur Utama Perseroan dengan nomor Izin Tinggal Terbatas Elektronik No. 2C21AL0142-W, yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2023.

H. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK YANG MEMILIKI KONTRIBUSI 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU LEBIH DARI TOTAL ASET, TOTAL LIABILITAS, ATAU LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK DARI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan bergerak dalam bidang jasa keuangan di berbagai lini bisnis, antara lain: perbankan yang operasionalnya dilakukan oleh BABP, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 42,3%, lini bisnis asuransi oleh MNCAI, MNCL dan MIB, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 21,1%, lini bisnis pembiayaan oleh MNCF dan MNCGUI, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 13,1%, penjaminan dan perantara perdagangan efek oleh MNCS, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 7,5% bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memperoleh pendapatan dari bisnis pengelolaan investasi oleh MNCAM 1,9%, finansial teknologi oleh MTN dan FM 1,6% serta kegiatan operasional lainnya sebesar 12,5% .

i. PT Bank MNC Internasional Tbk (“BABP”)

a. Riwayat Singkat

BABP pada awalnya didirikan dengan nama PT Bank Bumiputera Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Ny. Sri Rahayu, ada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7223-HT.01.01-Th’89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 692/Not./1989/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Agustus 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 19 September 1989, Tambahan No. 1917/1989. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 7 tanggal 17 April 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LL.M, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 26 Mei 2009 No. AHU-22959.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah dicatat di dalam Daftar Perseroan No. AHU.0029405.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tambahan No. 18380/2009 tanggal 14 Juli 2009, nama PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk diubah menjadi PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 48 tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Jo akta No. 57 tanggal 16 Juli 2014 dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, SH, Mkn, tersebut yang telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06038.40.20.2014 tanggal 24 Juli 2014, nama PT Bank ICB Bumiputera Tbk diubah menjadi BABP.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 6 tanggal 6 September 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Akta No. 6 tanggal 6 September 2022”), yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0289003 tanggal 8 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177938.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 September 2022. Akta sebagaimana tersebut diatas adalah mengenai mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor BABP (Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar).

Perseroan melakukan penyertaan modal pada BABP pertama kali di tahun 2014.

BABP beralamat domisili di Gedung MNC Financial Center Lt. 8, Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat, 10340.

b. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BABP sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar adalah menjalankan usaha di bidang Bank Umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BABP dapat melaksanakan:

- 1) Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok, yaitu sebagai berikut:
 - a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing;
 - b) Memberikan kredit atau menyediakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku;
 - c) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - d) Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- e) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”);
 - f) Melakukan kegiatan usaha utama berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas adalah sebagai berikut:
- a. Menerbitkan surat pengakuan utang;
 - b. Membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh BABP yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - ii. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menerima pembayaran dari tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 - d. Melakukan kegiatan penitipan dan penyimpanan barang dan surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - e. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - f. Membeli melalui pelelangan ataupun dengan cara lain, agunan baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BABP, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - g. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
 - h. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK;
 - i. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK;
 - j. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku di Republik Indonesia; dan
 - k. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. Melakukan kegiatan usaha penunjang berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, OJK, atau instansi yang berwenang lainnya.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan BABP adalah Bank Umum.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 51 tanggal 26 Juni 2020, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0046953.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020; (ii) diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0283264 tanggal 10 Juli 2020; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0110158.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia No. 89, Tambahan No. 042135 Jo. Akta No. 6 tanggal 6 September 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	97.132.520.965		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A Nilai Nominal Rp.100/saham	22.867.479.035	2.286.747.903.500	
Saham Seri B Nilai Nominal Rp.50/Saham	74.265.041.930	3.713.252.096.500	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	9.309.678.241	930.967.824.100	29,67
Winfly Ltd	4.708.704.800	470.870.480.000	15,00
Masyarakat (di bawah 5%)	8.034.466.747	803.446.674.700	25,60
Saham Seri B			
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	6.063.574.159	303.178.707.950	19,32
Masyarakat (di bawah 5%)	3.266.631.721	163.331.586.050	10,41
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	31.383.055.668	2.671.795.272.800	100,0
Saham Seri A	22.052.849.788	2.205.284.978.800	70,27
Saham Seri B	9.330.205.880	466.510.294.000	29,73
Saham dalam Portepel	65.749.465.297	3.328.204.727.200	
Saham Seri A	814.629.247	81.462.924.700	
Saham Seri B	64.934.836.050	3.246.741.802.500	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 43 tanggal 31 Oktober 2022 (“Akta No. 43 tanggal 31 Oktober 2022”), dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0071575 tanggal 1 November 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0218887.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 November 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BAPP adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Rita Montagna Siahaan
Direktur	: Denny Setiawan Hanubrata
Direktur	: Hermawan
Direktur Kepatuhan	: Reinard Y. Seno Setiaji

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	: Ponky Nayarana Pudijanto
Komisaris Independen	: Frederikus P. Weoseke
Komisaris	: Peter Fajar
Komisaris	: Mahdan

Keterangan:

- Seluruh susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, menjabat untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan yang sedang berlangsung, yakni sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2025 (Direksi) dan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2024 (Dewan Komisaris) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Juncto Pasal 105 ayat (1) UU PT;
- Susunan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan: (i) Pasal 2 POJK 33/2014 yang mewajibkan Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota Direksi dan (ii) Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK 55/2016”) yang mewajibkan Direksi bank paling kurang terdiri dari 3 orang anggota Direksi;
- Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan: (i) Pasal 20 POJK 33/2014 yang mewajibkan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik paling kurang 2 orang anggota dan apabila Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 orang anggota, maka paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen dan (ii) Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) POJK 55/2016 yang mewajibkan Dewan Komisaris Bank paling sedikit berjumlah 3 orang dan paling banyak sama

- dengan jumlah anggota Direksi, dimana paling kurang 50% dari jumlah Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
4. Berdasarkan Surat Pernyataan Independensi tanggal 15 Agustus 2022 dan sebagai bagian pemeriksaan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK (Perbankan), Rita Montagna Siahaan selaku calon Presiden Direktur Perseroan menyatakan bahwa untuk dan atas nama pribadi: (i) merupakan pihak independent terhadap pemilik Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali (PSP); dan (ii) tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dalam ketentuan pelaksanaan Good Corporate Governance untuk Bank Umum; dan
 5. Reinard Y. Seno Setiaji merupakan Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum Juncto Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

e. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari BABP untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	14.765.318	14.015.360	11.652.904
Jumlah Liabilitas	12.384.167	11.649.903	10.101.667
Jumlah Ekuitas	2.381.151	2.365.457	1.551.237

Perbandingan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Jumlah Aset

Jumlah Aset BABP pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 14.765.318 juta, naik 5,4% dibandingkan Rp 14.015.360 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan aset BABP didorong oleh Pertumbuhan kredit BABP yang tumbuh 13,8% menjadi Rp 9.680.960 juta dari 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.503.664 juta. Sedangkan jumlah Aset BABP pada tanggal 31 Desember 2021 naik 20,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 11.652.904 juta. Peningkatan aset BABP pada tahun 2021 didorong oleh peningkatan dana pihak ketiga dan peningkatan modal disetor pada 2021. Pertumbuhan kredit BABP tumbuh 19,4% menjadi Rp 8.503.664 juta dari tahun 2020 sebesar Rp 7.122.033 juta. *Excess* likuiditas BABP disalurkan pada instrumen Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang meningkat Rp 829.945 juta.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas BABP pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat 6,3% menjadi Rp 12.384.167 juta dibandingkan Rp 11.649.903 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan liabilitas terutama berasal dari peningkatan dana pihak ketiga sebesar Rp 736.745 juta atau 6,6% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan jumlah liabilitas BABP pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat 15,3% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 10.101.667 juta. Peningkatan liabilitas pada tahun 2021 terutama berasal dari peningkatan dana pihak ketiga sebesar Rp 2.035.470 juta atau 22,1%.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas BABP pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat 0,7% menjadi Rp 2.381.151 juta dibandingkan Rp 2.365.457 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ekuitas terutama berasal dari penambahan modal disetor hasil pelaksanaan waran dan laba bersih yang berhasil dibukukan BABP untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan jumlah ekuitas BABP pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat 52,5% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.551.237 juta. Peningkatan ekuitas pada tahun 2021 tersebut terutama dari penambahan modal

saham dari Penawaran Umum Terbatas (PUT) VIII, pelaksanaan waran dan penambahan setoran modal oleh Pemegang Saham Pengendali Bank yaitu Perseroan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan bunga	537.024	465.863	979.937	969.784
Beban bunga	223.351	283.024	572.424	601.249
Pendapatan bunga – bersih	313.673	182.839	407.513	368.535
Pendapatan operasional lain	58.628	95.964	169.361	207.527
Beban kerugian penurunan nilai	70.179	27.392	71.805	55.229
Beban operasional lain	262.210	244.686	479.738	498.137
Laba (rugi) operasional	39.912	6.725	25.331	22.696
Laba (rugi) sebelum pajak	44.524	6.221	22.547	15.954
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	34.669	4.783	12.868	10.414

Perbandingan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pendapatan Bunga

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, BABP berhasil membukukan pendapatan bunga sebesar Rp 537.024 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 15,3% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 465.863 juta. Peningkatan tersebut dikontribusi dari peningkatan pendapatan bunga dari kredit sebesar Rp 72.623 juta sejalan dengan perbaikan ekonomi dan pertumbuhan kredit.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Sepanjang tahun 2021 pendapatan bunga naik 1% dari Rp 969.784 juta di tahun 2020 menjadi Rp 979.937 juta. Peningkatan tersebut dikontribusi dari peningkatan pendapatan bunga dari penempatan pada surat berharga (efek-efek), penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain yang meningkat masing-masing sebesar Rp 26.712 juta dan Rp 18.730 juta. Sementara itu, pendapatan bunga kredit sedikit lebih kecil dari tahun sebelumnya sejalan dengan restrukturisasi yang dilakukan Bank dalam rangka penyelamatan kredit yang terkena dampak Covid-19, serta kredit yang baru tumbuh di kuartal akhir tahun 2021.

Beban Bunga

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, BABP berhasil menurunkan beban bunga menjadi Rp 223.351 juta dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 283.024 juta atau turun 21,1%. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan suku bunga simpanan sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

BABP dapat menurunkan beban bunga menjadi Rp 572.424 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp 601.249 juta atau turun 4,8%. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan suku bunga simpanan sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dan peningkatan CASA Bank terlihat dari rasio CASA yang meningkat dari 18,8% di 2020 menjadi 28,89% di 2021.

Laba (Rugi) Bersih

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Laba bersih BABP untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, melesat hingga 6 kali lipat menjadi sebesar Rp 34.669 juta atau meningkat 624,8% jika dibandingkan dengan laba bersih untuk periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4.783 juta. Pencapaian ini terutama di dorong oleh peningkatan pendapatan bunga kredit dan penurunan beban bunga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Di tahun 2021, BABP masih dapat membukukan laba bersih positif sebesar Rp 12.868 juta, meningkat 23,6% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 10.414 juta. Peningkatan laba bersih terutama diperoleh dari peningkatan pendapatan bunga bersih yang meningkat Rp 38.978 juta atau 10,6%. Peningkatan pendapatan bunga bersih dikontribusi dari peningkatan pendapatan bunga sebesar Rp 10.153 juta dan penurunan beban bunga sebesar Rp 28.825 juta. Penurunan beban bunga tersebut sejalan dengan strategi Bank untuk meningkatkan dana murah.

ii. PT MNC Asset Management (“MNCAM”)

a. Riwayat Singkat

MNCAM didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1999 dengan nama PT Bhakti Asset Management berdasarkan akta Notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 99 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-16031 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 September 1999 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 7003 Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 17 November 2000. Anggaran Dasar MNCAM telah disesuaikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bhakti Asset Management No. 44 tanggal 7 Agustus 2008, dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05450.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006461.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 27 Februari 2009; (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 2009, Tambahan No.12120. Perubahan nama PT Bhakti Asset Management kemudian berubah nama menjadi MNCAM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Bhakti Asset Management No.48 tanggal 30 November 2010, dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-56603.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087650.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 5 April 2012, Tambahan No. 15762.

Anggaran Dasar MNCAM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No. 6 tanggal 5 Maret 2021 (“**Akta No. 6 tanggal 5 Maret 2021**”), dibuat di hadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014716.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0152426 tanggal 9 Maret 2021; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044377.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 9 Maret 2021. Perubahan anggaran dasar ini adalah mengenai perubahan alamat MNCAM, perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MNCAM untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (Pasal 3 Anggaran Dasar), dan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM.

Perseroan melakukan penyertaan modal pada MNCAM pertama kali di tahun 2003.

MNCAM beralamat domisili di Gedung MNC Financial Center Lt. 9, Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat, 10340.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MNCAM adalah berusaha dan bergerak dalam bidang pengelolaan portofolio efek untuk para nasabah perseorangan maupun instansi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MNCAM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KBLI 66123). Namun, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan MNCAM saat ini adalah Jasa Pengelolaan Investasi (Manajer Investasi).

c. Struktur Modal

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat MNCAM No. 22 tanggal 28 Juni 2019 (“Akta No. 22 tanggal 28 Juni 2019”), dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Depok yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0034021.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0292562 tanggal 1 Juli 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101768.AH.01.11 Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCAM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	74.997.500	74.997.500.000	99,97%
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	2.500	2.500.000	0,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	75.000.000	75.000.000.000	100,000%
Jumlah Saham dalam Portepel	225.000.000	225.000.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 5 Maret 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Frery Kojongian
 Direktur : Yong Julia
 Direktur : Edwin Julianus Sebayang

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Stein Maria Schouten
 Komisaris Independen : Risna Muhti

e. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari MNCAM untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	98.735	82.320	79.118
Jumlah Liabilitas	8.032	6.779	4.473
Jumlah Ekuitas	90.703	75.541	74.645

Perbandingan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Jumlah Aset

Jumlah Aset MNCAM pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 98.735 juta, naik 19,94% dibandingkan Rp 82.320 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan aset MNCAM ini terutama berasal dari kenaikan portofolio efek akibat kenaikan nilai wajar aset keuangan yang dimiliki baik melalui laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah Aset MNCAM pada tanggal 31 Desember 2021 naik 4,05% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 79.118 juta. Kenaikan aset MNCAM pada tahun 2021 terutama berasal dari kenaikan portofolio efek akibat kenaikan nilai wajar aset keuangan yang dimiliki baik melalui laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas MNCAM pada tanggal 30 Juni 2022 naik 18,48% menjadi Rp 8.032 juta dibandingkan Rp 6.779 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan liabilitas terutama berasal dari kenaikan beban akrual dan utang pajak. Sedangkan jumlah liabilitas MNCAM pada tanggal 31 Desember 2021 naik 51,55% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4.473 juta. Kenaikan liabilitas pada tahun 2021 terutama berasal dari kenaikan beban akrual.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas MNCAM pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat 20,07% menjadi Rp 90.703 juta dibandingkan Rp 75.541 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ekuitas berasal dari peningkatan laba bersih MNCAM yang positif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan jumlah ekuitas MNCAM pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat 1,20% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 74.645 juta. Kenaikan ekuitas pada tahun 2021 disebabkan laba bersih yang berhasil dicapai sepanjang tahun 2021.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan	25.958	12.012	28.813	15.151
Beban Usaha	9.731	10.113	22.527	26.017
Laba (Rugi) sebelum pajak	16.300	1.959	6.566	(10.671)
Laba (Rugi) bersih tahun berjalan	17.248	2.765	5.045	(8.316)

Perbandingan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pendapatan

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, pendapatan MNCAM mengalami kenaikan sebesar 116,10% menjadi Rp 25.958 juta jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 12.012 juta. Kenaikan tersebut dikontribusi oleh keuntungan atas penjualan efek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Sepanjang tahun 2021, pendapatan MNCAM naik 90,17% dari Rp 15.151 juta di tahun 2020 menjadi Rp 28.813 juta. Kenaikan tersebut dikontribusi dari keuntungan penjualan efek dan atas perubahan nilai wajar efek diperdagangkan.

Beban Usaha

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, beban usaha MNCAM turun sebesar 3,78% menjadi Rp 9.731 juta dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 10.113 juta. Penurunan beban usaha tersebut didorong oleh penurunan beban kepegawaian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Untuk tahun 2021, sejalan dengan kenaikan pendapatan MNCAM, jumlah beban usaha turun sebesar 13,41% atau menjadi Rp 22.527 juta dari Rp 26.017 juta. Penurunan beban usaha terutama disebabkan penurunan beban kepegawaian sebagai langkah strategis MNCAM untuk melakukan efisiensi biaya.

Laba Bersih

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Laba bersih MNCAM untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tercatat sebesar Rp 17.248 juta atau meningkat 523,80% jika dibandingkan dengan laba bersih untuk periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 2.765 juta. Kenaikan laba bersih terutama di dorong oleh kenaikan pendapatan yang dikontribusi oleh keuntungan atas penjualan efek dan juga penurunan beban kepegawaian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Di tahun 2021, MNCAM membukukan laba bersih positif sebesar Rp 5.045 juta, meningkat 160,67% jika dibandingkan tahun 2020 yang membukukan rugi bersih sebesar Rp 8.316 juta. Kinerja positif pada tahun 2021 terutama didorong oleh kenaikan pendapatan yang dikontribusi dari keuntungan penjualan efek dan atas perubahan nilai wajar efek diperdagangkan dan juga penurunan beban kepegawaian.

iii. PT MNC Finance (“MNCF”)

a. Riwayat Singkat

MNCF berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. MNCF didirikan pertama kali dengan nama “PT Citra International Finance & Investment Corporation” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MNCF No. 64, tanggal 14 Nopember 1989, dibuat di hadapan Maria Lidwina Indriani Soepojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11044.HT.01.01.TH.89, tanggal 5 Desember 1989, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.1031/Not/89/PN.JKT.SEL pada tanggal

12 Desember 1989, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11, tanggal 6 Pebruari 1990, Tambahan No. 456.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar, No. 48 tanggal 10 Nopember 2003, dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., pengganti dari Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, PT Citra International Finance & Investment Corporation berubah nama menjadi “PT Bhakti Finance”. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-29072 HT.01.04.TH.2003, tanggal 15 Desember 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No.0944/RUB.02.09/IV/2004 tanggal 27 April 2004 dan diumumkan dalam Tambahan No. 4915, Berita Negara Republik Indonesia No. 42, tanggal 25 Mei 2004.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 03 tanggal 15 Juli 2022 (“Akta No. 03 tanggal 15 Juli 2022”), dibuat dihadapan Evi Luciani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0049327.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136396.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022. Akta tersebut adalah mengenai perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha MNCF untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (Pasal 3 Anggaran Dasar).

Perseroan melakukan penyertaan modal pada MNCF pertama kali di tahun 2003.

MNCF beralamat domisili di Gedung MNC Financial Center Lt. 12, Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat, 10340.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MNCF ialah berusaha dalam Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MNCF, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MNCF dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) 64911 – Perusahaan Pembiayaan Konvensional
- 2) 64913 – Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

Namun, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan MNCF saat ini adalah perusahaan pembiayaan.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Akta Perbaikan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 20 Desember 2018 (“Akta No. 24 tanggal 20 Desember 2018”), yang dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0005976 tanggal 7 Januari 2019; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0001690.AH.01.11Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCF adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	1.900.000	1.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	475.993	475.993.000.000	99,99%
Koperasi Karyawan MNC Group	7	7.000.000	0,001%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	476.000	476.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.424.000	1.424.000.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari RUPS Luar Biasa No. 15 tanggal 15 Oktober 2021, dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0463634 tanggal 22 Oktober 2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0183387.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Oktober 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MNCF adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Mahjudin
 Direktur Keuangan : Edwin Andu
 Direktur Marketing : Henby

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wito Mailoa
 Komisaris : Rodion Wikanto Njotowidjojo

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Muhamad Nadrattuzaman Hoson
 Anggota : Rizka Maulan

e. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari MNCF untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Jumlah Aset	1.351.391	1.282.364	1.387.363
Jumlah Liabilitas	587.357	564.055	680.390
Jumlah Ekuitas	764.034	718.309	706.973

Perbandingan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Jumlah Aset

Jumlah Aset MNCF pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 1.351.391 juta, naik 5,38% dibandingkan Rp 1.282.364 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan aset MNCF ini terutama berasal dari kenaikan nilai wajar efek-efek yang dimiliki dan peningkatan piutang pembiayaan Musyarakah Mutana Qishah pada tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan jumlah Aset MNCF pada tanggal 31 Desember 2021 turun 7,57% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.387.363 juta. Penurunan aset MNCF pada tahun 2021 terutama berasal dari penurunan kas dan setara kas sebesar Rp 26.148 juta, piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 34.545 juta, piutang anjak piutang sebesar Rp 10.854 juta dan piutang lain-lain sebesar Rp 26.971 juta.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas MNCF pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat 4,13% menjadi Rp 587.357 juta dibandingkan Rp 564.055 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan liabilitas terutama berasal dari peningkatan utang Musyarakah sebesar Rp 15.323 juta dan utang usaha sebesar Rp 7.151 juta. Sedangkan jumlah liabilitas MNCF pada tanggal 31 Desember 2021 turun 17,10% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 680.390 juta. Penurunan liabilitas pada tahun 2021

terutama berasal dari penurunan pinjaman yang diterima sebesar Rp 97.690 juta dan utang Musyarakah sebesar Rp 15.638 juta.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas MNCF pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat 6,37% menjadi Rp 764.034 juta dibandingkan Rp 718.309 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ekuitas berasal dari peningkatan laba bersih MNCF yang positif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan jumlah ekuitas MNCF pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat 1,60% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 706.973 juta. Peningkatan ekuitas pada tahun 2021 berasal dari laba bersih yang dibukukan sepanjang tahun 2021.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan	115.595	116.796	240.155	332.565
Beban	105.323	107.450	219.883	318.164
Laba (rugi) sebelum pajak	10.272	9.345	20.272	14.401
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	8.088	7.289	19.046	10.608

Perbandingan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pendapatan

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, pendapatan MNCF mengalami penurunan sebesar 1,03% menjadi Rp 115.596 juta jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 116.795 juta. Penurunan tersebut dikontribusi oleh penurunan pembiayaan konsumen karena pasar pembiayaan konsumen di kendaraan bermotor dan properti masih terdampak pandemi Covid-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Sepanjang tahun 2021, pendapatan MNCF turun 27,79% dari Rp 332.565 juta di tahun 2020 menjadi Rp 240.154 juta. Penurunan tersebut dikontribusi dari penurunan pembiayaan konsumen karena pasar pembiayaan konsumen di kendaraan bermotor dan properti yang terdampak pandemi Covid-19.

Beban

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, MNCF berhasil menurunkan beban menjadi Rp 105.323 juta dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 107.450 juta atau turun 1,98%. Penurunan beban tersebut didorong oleh penurunan beban bunga pinjaman sejalan dengan strategi MNCF untuk terus menurunkan *cost of fund* sehingga dapat memberikan pembiayaan konsumen yang kompetitif.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Untuk tahun 2021, sejalan dengan menurunnya pendapatan akibat pandemi Covid-19, MNCF mampu melakukan efisiensi biaya sehingga menurunkan jumlah beban sebesar 30,89% atau menjadi Rp 219.883 juta dari Rp 318.164 juta. Penurunan beban dikontribusi dari penurunan beban umum dan administrasi Rp 66.335 juta atau 30,60%.

Laba Bersih

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Laba bersih MNCF untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tercatat sebesar Rp 8.088 juta atau meningkat 10,96% jika dibandingkan dengan laba bersih untuk periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 7.289 juta. Kenaikan laba bersih terutama di dorong oleh penurunan bunga pinjaman sejalan dengan strategi MNCF untuk terus menurunkan *cost of fund* sehingga dapat memberikan pembiayaan konsumen yang kompetitif.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Di tahun 2021, meskipun masih terdampak pandemi Covid-19, MNCF masih dapat membukukan laba bersih positif sebesar Rp 19.046 juta, meningkat 79,54% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 10.608 juta. Peningkatan laba bersih terutama diperoleh dari penurunan beban umum dan administrasi.

iv. PT MNC Sekuritas (“MNCS”)

a. Riwayat Singkat

MNCS didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 99 dari Notaris Sutjipto S.H., tanggal 17 Februari 2004 dengan nama PT Bhakti Securities. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-07616 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 Maret 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 20 Juli 2004, Tambahan No. 6895 Tahun 2004. Anggaran dasar MNCS telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 5 Agustus 2008 (“Akta No. 4 tanggal 5 Agustus 2008”), dibuat dihadapan Wahyu Nurani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No.AHU-76905.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0099580.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 27 tanggal 21 Februari 2022 oleh Notaris Martina, S.H., yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0117634 tanggal 22 Februari 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0036848.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022. Akta sebagaimana tersebut diatas adalah mengenai perubahan modal ditempatkan dan modal disetor (Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar).

Perseroan melakukan penyertaan modal pada MNCS pertama kali di tahun 2004.

MNCS beralamat domisili di Gedung MNC Financial Center Lt. 15-16, Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat, 10340.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar MNCS sebagaimana tercantum dalam Akta Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 5 Agustus 2008, dibuat dihadapan Wahyu Nurani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No.AHU-76905.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0099580.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan MNCS ialah bergerak dalam bidang Perusahaan Efek.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MNCS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek.
 - b. Bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek.

Namun, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan MNCS saat ini adalah Penjamin Emisi Efek.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 06 tanggal 29 Desember 2015 (“Akta No. 06 tanggal 29 Desember 2015”), dibuat di hadapan Sendy Yudhawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah (i) mendapat mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0949104.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0992238 tanggal 30 Desember 2015, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3599717.AH.01.011.Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13, Tambahan No. 2521, Tahun 2016 Junctis Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 21 Februari 2022, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0117634 tanggal 22 Februari 2022, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0036848.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 26 tanggal 21 Februari 2022, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0114479 tanggal 22 Februari 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0035990.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCS adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	429.998.000	429.998.000.000	99,9995%
Koperasi Karyawan MNC Group	2.000	2.000.000	0,005%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	430.000.000	430.000.000.000	100,000%
Jumlah Saham dalam Portepel	570.000.000	570.000.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MNCS No. 6 tanggal 19 Mei 2022 (“Akta No. 6 tanggal 19 Mei 2022”), dibuat dihadapan Martina, Notaris di Jakarta, diterima dan dicatat dalam Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0013839 tanggal 19 Mei 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MNCS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Susy Meilina
Direktur	: Fifi Virgantria, Bong
Direktur	: Marlina
Direktur	: Ronald Adrian Tirtabudi
Direktur	: A Fen

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Henry Suparman
Komisaris	: Agustinus Wishnu Handoyono
Komisaris Independen	: Alpino Kianjaya

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Muhamad Nadrattuzaman Hosen
Anggota	: Rizka Maulan

e. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari MNCS untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022.

Laporan Posisi Keuangan

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Jumlah Aset	1.875.467	1.770.783	2.008.060
Jumlah Liabilitas	1.426.345	1.442.034	1.646.405
Jumlah Ekuitas	449.121	328.749	361.655

Perbandingan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Jumlah Aset

Jumlah Aset MNCS pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 1.875.467 juta, naik 5,91% dibandingkan Rp 1.770.783 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan aset MNCS ini terutama berasal dari kenaikan kas dan setara kas, piutang reverse repo masing-masing sebesar Rp 35.430 juta dan Rp 21.508 juta. Sementara itu, piutang nasabah reguler dan piutang lembaga kliring dan penjaminan juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp 18.452 juta dan Rp 33.272 juta sejalan dengan kenaikan transaksi di pasar modal. Sedangkan jumlah Aset MNCS pada tanggal 31 Desember 2021 turun 11,82% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2.008.060 juta. Penurunan aset MNCS pada tahun 2021 terutama berasal dari penurunan piutang nasabah reguler dan piutang lembaga kliring dan penjaminan masing-masing sebesar Rp 206.551 juta dan Rp 48.396 juta.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas MNCS pada tanggal 30 Juni 2022 turun 1,09% menjadi Rp 1.426.345 juta dibandingkan Rp 1.442.034 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan liabilitas terutama berasal dari penurunan utang lembaga kliring dan penjaminan. Sedangkan jumlah liabilitas MNCS pada tanggal 31 Desember 2021 turun 12,41% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.646.405 juta. Penurunan liabilitas pada tahun 2021 terutama berasal dari penurunan utang nasabah reguler dan utang lembaga kliring dan penjaminan masing-masing sebesar Rp 167.753 juta dan Rp 36.157 juta.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas MNCS pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat 36,62% menjadi Rp 449.121 juta dibandingkan Rp 328.749 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ekuitas berasal dari penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 80.000 juta dari Perseroan dan keuntungan komprehensif lain akibat kenaikan nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain.

Sedangkan jumlah ekuitas MNCS pada tanggal 31 Desember 2021 menurun 9,10% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 361.655 juta. Penurunan ekuitas pada tahun 2021 disebabkan kerugian komprehensif lain akibat penurunan nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan	103.493	99.461	215.831	173.786
Beban Usaha	56.858	56.007	112.315	90.722
Laba sebelum pajak	9.839	9.569	33.248	26.019
Laba bersih tahun berjalan	8.984	8.076	30.372	24.800

Perbandingan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pendapatan

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, pendapatan MNCS mengalami kenaikan sebesar 4,05% menjadi Rp 103.493 juta jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 99.461 juta. Kenaikan tersebut dikontribusi oleh pendapatan kegiatan manajemen dan pendapatan dividen dan bunga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Sepanjang tahun 2021, pendapatan MNCS naik 24,20% dari Rp 173.786 juta di tahun 2020 menjadi Rp 215.831 juta. Kenaikan tersebut dikontribusi dari pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek.

Beban Usaha

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, beban usaha MNCS naik sebesar 1,52% menjadi Rp 56.858 juta dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 56.023 juta. Kenaikan beban usaha tersebut berasal dari kenaikan beban kepegawaian dan beban komunikasi dan telekomunikasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Untuk tahun 2021, sejalan dengan kenaikan pendapatan MNCS, jumlah beban usaha naik sebesar 23,80% atau menjadi Rp 112.315 juta dari Rp 90.722 juta. Kenaikan beban usaha terutama disebabkan kenaikan beban kepegawaian dan beban atas jasa tenaga ahli masing-masing sebesar Rp 8.064 juta dan Rp 13.616 juta.

Laba Bersih

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Laba bersih MNCS untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tercatat sebesar Rp 8.984 juta atau meningkat 11,23% jika dibandingkan dengan laba bersih untuk periode

yang sama tahun lalu sebesar Rp 8.076 juta. Kenaikan laba bersih terutama di dorong oleh pendapatan kegiatan penjamin emisi efek dan pendapatan dividen dan bunga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Di tahun 2021, MNCS membukukan laba bersih positif sebesar Rp 30.372 juta, meningkat 22,46% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 24.800 juta. Peningkatan laba bersih terutama diperoleh dari kenaikan pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek.

v. PT MNC Guna Usaha Indonesia (“MNCGUI”)

a. Riwayat Singkat

MNCGUI yang didirikan di Jakarta dengan nama PT Indo Leasing Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. No. 3 tanggal 10 November 1993, yang dibuat di hadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto S.H., Notaris di Serang. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-10946.HT.01.01.TH. 94 tanggal 16 Juli 1994 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 18 Oktober 1994 Tambahan No. 8054/19 Pada tanggal 27 Juni 1994, PT Indo Leasing Perkasa kemudian berubah nama menjadi PT Indo Finance Perkasa melalui Akta No. 18 tanggal 27 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto S.H., Notaris di Serang. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No. C2-10946.H.T.01.01.TH 94, tanggal 16 Juli 1994. Pada tanggal 4 Desember 2014, Perusahaan mengubah nama PT Indo Finance Perkasa menjadi MNCGUI melalui Akta Notaris No. 30 yang dibuat oleh Humbert Lie., S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-12376.40.20.2014 tanggal 5 Desember 2014 dan Penerimaan Pemberitahuan Data Perusahaan No. AHU- 45270.40.22.2014 tanggal 5 Desember 2014. Anggaran Dasar MNCGUI telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 8 Februari 2008 (“Akta No. 03 tanggal 8 Februari 2008”), dibuat dihadapan Meiyane Halimatussyadiah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26238.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038423.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 35 tanggal 22 Maret 2022 (“Akta No. 35 tanggal 20 Maret 2022”), yang dibuat di hadapan Evi Luciani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang. Akta tersebut telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020562.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Maret 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056523.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Maret 2022. Akta sebagaimana tersebut di atas adalah mengenai perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha MNCGU untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Pasal 3 Anggaran Dasar).

Perseroan melakukan penyertaan modal pada MNCGUI pertama kali di tahun 2014.

MNCGUI beralamat domisili di Gedung MNC Financial Center Lt. 23, Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat, 10340.

b. Kegiatan Usaha

1. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MNCGUI ialah berusaha dalam bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank (Lembaga Pembiayaan).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MNCGUI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. 64911 – Perusahaan Pembiayaan Konvensional.
 - b. 64913 - Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

- c. 77100 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya.
- d. 77391 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan.
- e. 77392 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya.
- f. 77393 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil.
- g. 77394 – Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya.
- h. 77395 – Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.

Namun, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan MNCGUI saat ini adalah aktivitas sewa guna usaha (*leasing*).

c. Struktur Modal

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.20 tanggal 19 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Amastasia Dau, S.H., Notaris di Kotamadya Jakarta Timur, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074269 tanggal 24 Agustus 2016, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098639.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016 Junctis Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 30 Oktober 2017 (“Akta No. 20 tanggal 30 Oktober 2017”), yang dibuat dihadapan Amastasia Dau, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023417.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 9 November 2017, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141877.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 9 November 2017 dan Akta No. 20 tanggal 30 Oktober 2017 dan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 13 Juni 2022 (“Akta No. 10 tanggal 13 Juni 2022”), yang dibuat di hadapan Evi Luciani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0023145 tanggal 17 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0114005.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCGUI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	748.000	748.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	186.999	186.999.000.000	99,99%
Koperasi Karyawan MNC Group	1	1.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	187.000	187.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	561.000	561.000.000.000,00	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MNCGUI No. 22 tanggal 13 Agustus 2021 (“Akta No. 22 tanggal 13 Agustus 2021”) yang telah Diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0437518 tanggal 16 Agustus 2021 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139107.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCGU yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Yusnandi Liauw
 Direktur : Henri Gunawan
 Direktur : Miron Durait Panjaitan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wito Mailoa
 Komisaris Independen : Erdie Suriaherdadi Manan

e. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari MNCGUI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	688.052	627.262	614.702
Jumlah Liabilitas	419.571	367.048	353.885
Jumlah Ekuitas	268.481	260.214	260.817

Perbandingan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Jumlah Aset

Jumlah Aset MNCGUI pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 688.052 juta, naik 9,69% dibandingkan Rp 627.262 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan aset MNCGUI ini terutama berasal dari kontribusi kenaikan piutang pembiayaan seiring dengan peningkatan penyaluran Pembiayaan, terutama kenaikan dari produk pembiayaan berbasis aset (*asset based on financing*). Sedangkan jumlah Aset MNCGUI pada tanggal 31 Desember 2021 naik 2,04% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 614.702 juta. Kenaikan aset MNCGUI pada tahun 2021 terutama berasal dari kenaikan piutang pembiayaan seiring dengan peningkatan penyaluran pembiayaan, terutama kenaikan dari produk pembiayaan berbasis aset (*asset based on financing*).

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas MNCGUI pada tanggal 30 Juni 2022 naik 14,31% menjadi Rp 419.571 juta dibandingkan Rp 367.048 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan liabilitas terutama berasal dari kenaikan pinjaman yang diterima dimana MNCGUI seiring dengan kenaikan realisasi penyaluran Pembiayaan, terutama kenaikan dari produk berbasis aset (*asset based on financing*). Sedangkan jumlah liabilitas MNCGUI pada tanggal 31 Desember 2021 naik 3,72% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 353.885 juta. Kenaikan liabilitas pada tahun 2021 terutama berasal dari kenaikan pinjaman yang diterima, terutama kenaikan dari produk berbasis aset (*asset based on financing*).

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas MNCGUI pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat 3,18% menjadi Rp 268.481 juta dibandingkan Rp 260.214 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ekuitas berasal dari peningkatan laba bersih MNCGUI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan jumlah ekuitas MNCGUI pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar 0,23% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 260.817 juta. Penurunan ekuitas pada tahun 2021 disebabkan adanya pembagian dividen ditahun 2021 atas laba bersih tahun 2020 sebesar Rp 7.500 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan	66.536	61.731	122.192	136.684
Beban	57.025	56.351	112.796	123.789
Laba (rugi) sebelum pajak	9.511	5.380	9.396	12.894
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	8.036	3.901	7.174	9.478

Perbandingan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pendapatan

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, pendapatan MNCGUI mengalami kenaikan sebesar 7,78% menjadi Rp 66.536 juta jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 61.731 juta. Kenaikan tersebut berasal dari dikontribusi kenaikan pendapatan bunga untuk pembiayaan anjak piutang, pembiayaan berbasis aset dan pendapatan sewa operasi seiring dengan kenaikan dengan penyaluran pembiayaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Sepanjang tahun 2021, pendapatan MNCGUI mengalami penurunan 10,60% dari Rp 136.684 juta di tahun 2020 menjadi Rp 122.192 juta. Penurunan tersebut terutama dikarenakan rata-rata penyaluran pembiayaan baru 2021 lebih kecil dari pada *rundown* piutang yang ada, juga dikarenakan rata-rata tenor umur piutang yang sudah mendekati *maturity*.

Beban

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, beban MNCGUI naik sebesar 1,20% menjadi Rp 57.025 juta dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 56.351 juta. Kenaikan beban tersebut terutama berasal dari kenaikan beban bunga pinjaman dan beban keuangan sebesar Rp 3,7 milyar atau 17% seiring dengan kenaikan pinjaman diterima.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Untuk tahun 2021, beban mengalami penurunan sebesar 9% atau Rp 10.994 juta dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan beban tersebut terutama berasal dari penurunan beban bunga bank sebesar 5.904 juta karena lebih kecilnya tingkat rata-rata penyaluran pembiayaan baru dan penurunan beban umum dan administrasi juga berasal dari penurunan beban penyusutan dan pengiriman dari kendaraan *operating lease*.

Laba Bersih

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Laba bersih MNCGUI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tercatat sebesar 8.036 juta atau meningkat 106,00% jika dibandingkan dengan laba bersih untuk periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.901 juta. Kenaikan laba bersih terutama di dorong oleh kenaikan pendapatan bunga seiring dengan kenaikan penyaluran pembiayaan yang didanai langsung oleh MNCGUI.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Di tahun 2021, MNCGUI membukukan laba bersih sebesar Rp 7.174 juta, meskipun mengalami penurunan sebesar 24,31% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 9.478 juta. Penurunan laba bersih terutama disebabkan penurunan pendapatan operasional dimana penyaluran pembiayaan baru terjadi triwulan ke II di tahun 2021, dan belum berhasil mengangkat pendapatan karena *run down* kontrak masih lebih besar dibandingkan dengan penambahan penyaluran pembiayaan baru

vi. PT MNC Asuransi Indonesia (“MNCAI”)

a. Riwayat Singkat

MNCAI pertama kali didirikan dengan nama PT. Asuransi Jamindo Pusaka berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Asuransi Jamindo Pusaka No. 14 tanggal 18 Agustus 1987, dibuat di hadapan Buhari, S.H., Notaris di Bogor, yang telah: (i) mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-4394.HT.01.01.Th.88 tanggal 11 Mei 1988; (ii) didaftarkan di dalam buku register pada Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Mei 1988 di bawah No. W8DH.74.HT.01.10.1988; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 14 Juni 1988, Tambahan No.578.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 09 tanggal 27 Oktober 2020 (“**Akta No. 09 tanggal 27 Oktober 2020**”), dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Depok, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074502.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 November 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0185375.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 05 November 2020. Akta sebagaimana tersebut di atas adalah mengenai perubahan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha sehubungan dengan penutupan unit asuransi non jiwa syariah (Pasal 3 Anggaran Dasar).

Perseroan melakukan penyertaan modal pada MNCAI pertama kali di tahun 2011.

MNCAI beralamat domisili di Gedung MNC Financial Center Lt. 11, Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat, 10340.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MNCAI, maksud dan tujuan MNCAI ialah berusaha dalam bidang Asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MNCAI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Asuransi Non Jiwa Konvensional yang mana melaksanakan kegiatan usaha yaitu mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan. Namun, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan MNCAI saat ini adalah jasa asuransi umum.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Anggaran Dasar MNCAI yang saat ini berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No.10 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Depok, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-0019139.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0172319 tanggal 18 September 2017, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0115924.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal

18 September 2017 dan (iv) Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.21 tanggal 13 Maret 2018, Tambahan No.5103 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 09 tanggal 14 Juni 2021, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0385027 tanggal 18 Juni 2021 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107906.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCAI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	65.200	326.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	34.880	174.400.000.000	99,98%
Koperasi Karyawan MNC Group	8	40.000.000	0,02%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.888	174.440.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	30.312	151.560.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No.1 tanggal 6 Juli 2022, dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0031489 tanggal 11 Juli 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0131972.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAI yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama merangkap Direktur Kepatuhan : Wirahadi Suryana Jatiputra
 Direktur : Eka Listiani Kartono
 Direktur : Tengku Kurnia Dzulfikar Nurdin

Dewan Komisaris

Komisaris : Wito Mailoa
 Komisaris Independen : Inkes Lukman
 Komisaris Independen : Josh Hidayat

e. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari MNCAI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	688.052	627.262	614.702
Jumlah Liabilitas	419.571	367.048	353.885
Jumlah Ekuitas	268.481	260.214	260.817

Perbandingan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Jumlah Aset

Jumlah Aset MNCAI pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 638.697 juta, naik 8,09% dibandingkan Rp 591.157 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan aset MNCAI ini terutama berasal dari kenaikan piutang premi dan aset reasuransi. Sedangkan jumlah Aset MNCAI pada tanggal 31 Desember

2021 naik 4,31% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 566.735 juta. Kenaikan aset MNCAI pada tahun 2021 terutama berasal dari kenaikan kas dan bank.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas MNCAI pada tanggal 30 Juni 2022 naik 13,16% menjadi Rp 432.787 juta dibandingkan Rp 382.472 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan liabilitas terutama berasal dari kenaikan liabilitas kontrak asuransi. Sedangkan jumlah liabilitas MNCAI pada tanggal 31 Desember 2021 naik 4,58% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 365.713 juta. Kenaikan liabilitas pada tahun 2021 terutama berasal dari kenaikan liabilitas kontrak asuransi.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas MNCAI pada tanggal 30 Juni 2022 turun 1,33% menjadi Rp 205.910 juta dibandingkan Rp 208.685 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ekuitas terutama disebabkan komponen ekuitas lainnya akibat penurunan nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah ekuitas MNCAI pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat 3,81% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 201.021 juta. Kenaikan ekuitas pada tahun 2021 disebabkan kenaikan laba bersih sepanjang tahun 2021.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan	122.814	106.368	234.401	201.735
Beban	112.055	99.070	211.289	192.756
Laba sebelum pajak	10.759	7.298	23.112	8.979
Laba bersih tahun berjalan	8.142	5.659	18.691	8.316

Perbandingan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pendapatan

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, pendapatan MNCAI mengalami kenaikan sebesar 15,46% menjadi Rp 122.814 juta jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 106.368 juta. Kenaikan tersebut dikontribusi oleh kenaikan pendapatan premi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Sepanjang tahun 2021, pendapatan MNCAI naik 16,19% dari Rp 234.401 juta di tahun 2020 menjadi Rp 201.735 juta. Kenaikan tersebut dikontribusi dari kenaikan pendapatan premi.

Beban

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022, beban MNCAI naik sebesar 13,11% menjadi Rp 112.055 juta dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 99.070 juta. Kenaikan beban tersebut didorong oleh kenaikan beban klaim.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Untuk tahun 2021, sejalan dengan kenaikan pendapatan MNCAI, jumlah beban naik sebesar 9.61% atau menjadi Rp 211.289 juta dari Rp 192.756 juta. Kenaikan beban terutama disebabkan kenaikan beban klaim dan komisi.

Laba Bersih

Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021

Laba bersih MNCAI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tercatat sebesar Rp 8.142 juta atau meningkat 43.88% jika dibandingkan dengan laba bersih untuk periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5.659 juta. Kenaikan laba bersih terutama di dorong oleh kenaikan pendapatan premi dan penurunan beban umum dan administrasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Di tahun 2021, MNCAI membukukan laba bersih positif sebesar Rp 18.691 juta, meningkat hampir 2 (dua) kali lipat atau sebesar 124,76% jika dibandingkan dengan laba bersih tahun 2020 sebesar Rp 8.316 juta. Peningkatan laba bersih terutama diperoleh dari kenaikan pendapatan premi.

I. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, didukung oleh Surat Pernyataan tanggal 13 September 2022, Perseroan dan Entitas Anak: (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa dibidang persaingan usaha, (vii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, dan (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan, somasi dan/atau klaim yang mungkin timbul, kecuali untuk perkara-perkara sebagai berikut:

Keterangan Perkara Perseroan:

No.	No. Perkara	Para Pihak	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan, Upaya Hukum Dan/Atau Status
1.	128/PDT.G/2019/PN.J KT.PST	PT Tugu Reasuransi Indonesia selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat II	Perbuatan melawan hukum atas 4 MTN SNP yang dimiliki PT Tugu Reasuransi Indonesia.	Perseroan telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung,

Keterangan Perkara BAPB:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah perkara-perkara yang sedang dihadapi BAPB:

No.	No. Perkara	Para Pihak	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan, Upaya Hukum Dan/Atau Status
1.	Perkara No. 921/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel tanggal 21 Oktober 2021 di Pengadilan Jakarta Selatan	PT Bangun Bumi Bersatu selaku Pengugat, melawan: 1. Perseroan selaku Tergugat I; 2. PT Harbin Perkasa selaku Tergugat II; 3. PT MNC Investama selaku Tergugat III; dan 4. PT Sapta Prima Talenta selaku tergugat IV.	Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit antara Tergugat I dan Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.	Persidangan: Agenda sidang masih pada tahapan pemeriksaan saksi tergugat (Perseroan).
2.	Perkara No. 1008/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 13 Oktober 2021 di pengadilan Negeri Surabaya.	Perseroan selaku Pengugat melawan: 1. Sherlina Kawilarang selaku Tergugat I; 2. Tim Kurator PT Ramagloria selaku Turut Tergugat I; 3. BPN Kanwil Jawa Timur Selaku Turut Tergugat II; 4. BPN Kota Surabaya Selaku Turut Tergugat III; dan 5. BPN Kota Pasuruan Selaku Turut Tergugat IV.	Saat ini PT Ramagloria dalam keadaan pailit, oleh karenanya Bank menuntut PG Ramagloria (Sherlima K) untuk bertanggung jawab melakukan penyelesaian atas sisa utang Ramagloria per tanggal 11 Oktober 2020 sebesar Rp. 30.551.991.938.74. Selain tuntutan pembayaran utang, Bank juga mengajukan sita atas : 1. Rumah terletak di Pradaklih Kendal SHGB No. 03525 / Pradakalihkendal 2. Tanah terletak di Kemirisewu Pasuruan SHM No. 00021, SHM 00025, SHM No. 00016 tanah terletak di Dusun Randupitu, Pasuruan	Persidangan: Tahapan persidangan ada pada pemeriksaan saksi fakta dari tergugat.
3.	Perkara No. 1088/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Desember 2021	Perseroan Melawa: 1. Yanuar Firmansyah Selaku Tergugat I; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Selaku Tergugat II; 3. Mitra Produktif Selaku Turut Tergugat I; dan 4. Moch. Ali Archid Turut Tergugat II.	Perseroan mengajukan gugatan karena AYDA Bank berupa SHGB No. 04223 dahulu SHM No. 1275/Menteng (ex jaminan PT Mira Produktif) telah disewakan oleh ex Pemilik jaminan IC TI kepada TII (Protelindo) sebagaimana dalam PERJANJIAN SEWA TANAH /BANGUNAN, sewa mana untuk mendirikan, membangun, memasang dan mengoperasikan menara, pondasi, fasilitas, shelters, sumber listrik dan segala peralatan, berapapun pengguna menara yang terpasang atau akan terpasang pada tempat yang disewakan, termasuk hak untuk mengizinkan penggunaan setiap bagian pada Tempat yang disewakan kepada berapapun jumlah Pengguna Menara dan hak untuk menarik kabel atau membuat sambungan-sambungan lainnya dari menara-menara ke utilitas-utilitas TII, Bank menuntut Kerugian Material sebesar Rp. 8.679.700.000	Persidangan: Agenda sidang masuk tahapan panggilan terhadap Turut Tergugat I.
4.	Perkara No. 68/PDT.G/2022/PN.JK T.PST tanggal 03 Februari 2022 di Pengadilan Jakarta Pusat.	Dwiky Fatana Darmawan & Tuti Rairawati Melawan: 1. Perseroan Selaku Tergugat I; dan 2. PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses Selaku Turut Tergugat II.	Penggugat adalah ahli waris dari debitur KPR Carlano yang menerima fasilitas kredit KPR No. 275 tgl 28 Februari 2021, dan debitur meninggal pada tgl 16 Mei 2021. Ahli waris debitur menuntut Klaim Asuransi kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya senilai Rp. 2.133.861.666 namun ditolak oleh Asuransi Indosurya dengan alasan debitur pada saat akad kredit telah menderita penyakit tekanan darah tinggi, jantung, enteritis dan ISPA. Oleh karena klaim asuransi tidak cair,	Persidangan: Terdapat Upaya banding dari Penggugat.

No.	No. Perkara	Para Pihak	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan, Upaya Hukum Dan/Atau Status
			maka Bank menagihkan sisa kewajiban debitur kepada Ahli Warisnya namun ahli waris keberatan dan meminta agar SHM No. 6246 dan SHM No. 2683 dikembalikan kepada Ahli waris	
5.	Perkara No. 98/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 23 tanggal 2022	Yiswi Nuryani melawan: 1. PT Otomas Multifinance selaku Tergugat I; dan 2. Perseroan Selaku Turut Tergugat I	Penggugat keberatan atas Cessie yang dilakukan oleh PT Otomas Multifinance dan Penggugat meminta pembatalan Akta Cessie tsb, meminta agar jaminan berupa SHM No. 9345, 9346, dan SHM No. 8020, SHM No. 8682 dikembalikan oleh TI kepada Penggugat	Persidangan: Agenda sidang masuk pada tahapan pembacaan Duplik.
6.	Perkara No. 221/Pdt.G/2022 /PN.Jkt Brt tanggal 16 Maret 2022 di Pengadilan Jakarta Barat	Agus Rahardja melawan: 1. Dion Setiawan selaku Tergugat; dan 2. Perseroan selaku Turut Tergugat.	Bank telah melakukan cessie atas tagihan Agus Rahardja (debitur) kepada Dion Setiawan. Jumlah kewajiban Debitur pada saat di cesiekan per tanggal 08 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 85.172.321,78, dengan harga penjualan sebesar Rp. 73.191.536,09. Penggugat/Debitur keberatan atas jumlah utang yang ditagihkan oleh Dion Setiawan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).	Persidangan: Agenda sidang masuk pada pembacaan Replik
7.	Perkara No. 237/Pdt.G/2022/PN.Bdg tanggal 24 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Bandung	Wahyu Nugraha Melawan: 1. Perseroan Selaku Tergugat I; 2. BPN Kota Cimahi Selaku Turut Tergugat I; 3. Notaris Aji Murtidianti selaku Turu Tergugat II; dan 4. KPKNL Bandung selaku Turut Tergugat III.	Penggugat mengajukan gugatan pembatalan lelang atas jaminan yang telah dilelang berupa tanah dan bangunan berupa SHGB No. 3610, 3609, 3611 (sekarang menjadi SHGB No. 3610, 3609, 3611 an. Perseroan) dengan alasan Perseroan selaku penjual tidak boleh membeli lelang karena hal tsb merupakan perbuatan melawan hukum.	Persidangan: Agenda persidangan masuk tahapan mediasi.
8.	Perkara No. 489/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Bar tanggal 09 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Win Lie Sadikin Melawan: 1. Perseroan Selaku Tergugat; dan 2. Notaris Herry Sosiawan, SH selaku Turut Tergugat.	Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena Bank menurunkan plafond fasilitas kredit Akta Perjanjian Kredit No. 370 dan 371 keduanya tanggal 30 Oktober 2013 sbb : - PRK sebesar Rp. 8 Milyar menjadi Rp. 5 Milyar - Fas PT sebesar Rp. 12 Milyar menjadi Rp. 10.550.000.000	Persidangan: Agenda persidangan masuk tahapan mediasi.
9.	Perkara No. 102/Pdt.G/2022/PN.Skt tanggal 17 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Surakarta.	Santi Wahyuningsih melawan: 1. Perseroan selaku Tergugat; 2. KPNKL Surakarta selaku Turut Tergugat I; 3. BPN Surakarta selaku Turut Tergugat II; dan 4. Otoritas Jasa Keuangan selaku Turut Tergugat III.	Pada tanggal 16 Juni 2017 Penggugat bersama almarhum suaminya KETHOT KARDIYONO dengan Tergugat mengadakan perjanjian kredit KMG 1 sebesar Rp. 2,690,023,763,- dan KMG 2 sebesar Rp. 1,189,976,237,-. dengan jaminan rumah tinggal SHM No. 2648 luas 501 M2 Kel. Banyuanyar, Kec. Bajrasari Solo. Tanggal 23, Agustus 2021 suami Penggugat meninggal dunia, kemudian Penggugat mengurus asuransi jiwa suami dan mendatangi Turut Tergugat III (OJK) untuk meminta informasi debitur atas nama Kethot KARDIYONO, pinjaman tsb telah dicover oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk dan Asuransi PT EQUITY LIFE INDONESIA. Karena suami/debitur telah meninggal maka Penggugat meminta pinjaman suami Penggugat terhadap Tergugat sudah lunas karena tercover oleh Asuransi.	Persidangan: Agenda persidangan masuk tahapan pembacaan Jawaban

No.	No. Perkara	Para Pihak	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan, Upaya Hukum Dan/Atau Status
10.	Perkara No. No. 436/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst tgl 14 Desember 2021 di Pengadilan Jakarta Pusat (PKPU)	Rita Andri, Denny Mulyawan sebagai Pemohon dan PT Trijaya Nusantara sebagai Termohon. Bank dalam perkara ini berkedudukan sebagai pihak yang mengajukan tagihan.	Diajukan PKPU oleh : Rita Andri dan Denny Mulyawan, SE Fasilitas Kewajiban (Rp) PT dan PTK 3,787,636,293.77 Bunga 302,456,510.11 Denda 69,118,677.16 Denda Berjalan 63,891,021.39 Bunga Differed 88,154,694.31 Penalty 189,381,814.69 Total 4,500,639,011.43	Tahapan: Kurator telah mengajukan lelang atas SHGB No. 7159 (jaminan di Perseroan).
11.	Perkara No. 565/Pdt.G/2020/PN.J kt.Bar tanggal 19 Agustus 2020	PT PANCADHARMA NIAGA PUTRA melawan: 1. Perseroan selaku Tergugat I; 2. BLS Nobel selaku Tergugat II; 3. Herlina Hasan selaku Tergugat III; 4. Achim Miharja selaku Tergugat IV; 5. KPKNL Jakarta V selaku Tergugat V; 6. KPNL Tangerang II selaku Tergugat VI; dan 7. Turut Tergugat lainnya.	Penggugat mengajukan pembatalan terhadap lelang sbb : 1. Menyatakan batal pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan Tergugat V No. : 072/29/2018, tertanggal 28 Februari 2018 terhadap Hak Tanggungan SHM No. 1171, SHGB No. 712 dan SHGB No. 713 2. Menyatakan batal pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat VI sebagaimana dimaksud Risalah Lelang No. : 101/24/2018, tertanggal 27 Februari 2018 terhadap Hak Tanggungan SHM No. 2862, SHM No. 2123.	Persidangan: Penggugat Intervensi mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri.
12.	Perkara No, 290/Pdt.G/2021/PN. Mdn tgl 7 April 2021 di Pengadilan Negeri Medan	Perseroan melawan: 1. CV Asia Jaya selaku Tergugat I; 2. Hendrik Wong selaku Tergugat II; dan 3. Haryati Chen selaku Tergugat III	Bank menuntut pembayaran atas sisa utang CV Asia Jaya per tanggal 22 September 2020 sebesar Rp. Rp. 103.733.760.477,57 dengan mengajukan sita atas asset pribadi Hendrik Wong selaku Personal Guarantee berupa : Aset di Bogor seluas 7.148 M2 (8 SHM) SHM No. 00690/Tugu Jaya, SHM No. 00695/Tugu Jaya, SHM No. 00696/Tugu Jaya, SHM No. 00697/Tugu Jaya, SHM No. 00698/Tugu Jaya, SHM No. 00705/Tugu Jaya, SHM No. 00727/Tugu Jaya, SHM No. 00081/Tugu Jaya	Persidangan: Tahapan persidangan sudah ada pada tingkat Banding.
13.	Perkara No. 301/Pdt.F/2021/PN. Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	Wawan Kurniawan melawan: 1. Perseroan selaku Tergugat I; dan 2. KPNKL Jakarta V selaku Tergugat II.	Penggugat meminta pembatalan lelang karena menurut Penggugat lelang dilakukan secara Melawan Hukum dengan melakukan penjualan dengan nilai sangat murah yakni dijual lelang senilai Rp. 16.962.000.000,- sedangkan harga pasar senilai Rp. 23 Milyar. Maka Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 6.038.000.000,-.	Persidangan: Penggugat telah mengajukan Banding.
14.	Perkara No, 704/Pdt.G/2021/PN.J KT.PST tanggal 18 November 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sumantari Purwoko dan Evy Kurniati melawan: 1. Tatang Sulistiyanto Maprodin selaku Tergugat I; dan 2. Perseroan selaku Tergugat II	Direktur PT Vikara Hata Utama dalam mengajukan penambahan Plafond Fasilitas Kredit sebesar Rp. 400.000.000,- dan 2.000.000.000,- tanpa persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham dengan menggunakan jaminan berupa SHM No. 1050/Kalibata, tercatat atas nama Sumantri Purwoko terletak di Jl. Kalibata Selatan II, Jakarta Selatan. oleh karena tidak ada persetujuan maka Para Penggugat meminta agar utang pada Tergugat II menjadi Tanggung Jawab Tergugat I,dan	Persidangan: Masih pada tahapan Banding.

No.	No. Perkara	Para Pihak	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan, Upaya Hukum Dan/Atau Status
			mengembalikan jaminan SHM No. 1050/Kalibata Kepada Tergugat I.	
15.	Perkara No. 73/Pdt.G/2020/PN.Jkt .Sel tgl 20 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Rifqi Ramdani melawan: 1. Henry Mahendra selaku Tergugat I; 2. Benny Kusnadi selaku Tergugat II; 3. Perseroan selaku Turut Tergugat I; 4. BPN Jaksel selatan selaku Turut Tergugat II; dan 5. PPAT Relawati Turut Tergugat III.	a. Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan SHGB No. 3760/Grogol Selatan An Rifqi Ramadhani. b. Penggugat dan HENRY MAHENDRA – Tergugat 1 membuat Kesepakatan Jual Beli tanggal 26 Oktober 2017 atas SHGB No. 3760 dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) selambat-lambatnya dibayar tanggal 26 April 2018, namun BELUM DIBAYAR LUNAS	Persidangan: Tahapan persidangan masih pada banding.
16.	Perkara No. 31/Pdt.G/PN.Jmb tanggal 27 Februari 2020 di Pengadilan Negeri Jambi	Perseroan melawan: 1. M Yunus selaku Tergugat I; dan 2. Koperasi Karyawan Darma Universitas Jambi selaku Tergugat II.	Perseroan mengajukan gugatan kepada M Yunus sebesar 600 jt yang telah membeli 7 unit bus (jaminan Kopkar Univ Jambi) dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000 dan baru dibayar Rp. 400.000.000,- Selain gugatan 600 jt tsb, gugatan diajukan agar SHM No. 7975/Kenali Besar milik M yunus dapat dilakukan blokir agar tidak dapat dilakukan balik nama	Persidangan: Tahapan perkara sudah masuk pada kasasi.
17.	Perkara No. 151/Pdt.G/2020/PN.S by tanggal 1 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Surabaya	M.Husaini melawan: 1. MNC Bank Cab. Surabaya selaku Tergugat I; 2. Mas'ud selaku Tergugat II; 3. Evy Retno Budiarty., S.H. selaku Turut Tergugat I; 4. Santi Arianti., S.H., M.Kn. selaku Turut Tergugat II; dan 5. BPN Kota Surabaya selaku Turut Tergugat III	Memohon pembatalan Akta Cessie No. 26, karena Penggugat (debitur) merasa cessie tsb telah merugikan Penggugat, jaminan SHM No. 2487 memiliki nilai yang cukup tinggi dan tidak sebanding dengan kredit yang diterima	Kasasi: BABP telah menyerahkan kontra memori kasasi.
18.	Perkara No. 128/Pdt.G/2019/PN.J kt.Pst tanggal 25 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	PT Tugu Reasuransi Indonesia melawan: 1. PT MNC Sekuritas selaku Tergugat I; 2. PT MNC Kapital Indonesia Tbk selaku Tergugat II; 3. Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk selaku Tergugat III; 4. Perseroan Selaku Tergugat IV; dan 5. Tergugat dan Turut Tergugat lainnya.	PT Tugu Reasuransi Indonesia (PT Tugu) mengajukan gugatan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan transaksi investasi pembelian MTN Sunprima. Dalil dari PT Tugu terdapat perjanjian jaminan pembelian kembali dari MNC Sekuritas. Sementara MNC Sekuritas mendalilkan bahwa mereka hanya bertindak sebagai broker dalam transaksi pembelian MTN tersebut. Terkait dengan perjanjian jaminan pembelian kembali tersebut, diindikasikan terdapat pemalsuan tanda tangan direksi MNC Sekuritas oleh oknum karyawan MNC Sekuritas, yang telah diproses secara pidana oleh MNC Sekuritas ke Polda Metro Jaya. Bank menjadi Tergugat IV, karena merupakan entitas utama dalam konglomerasi yang menaungi MNC Sekuritas, yang dianggap oleh PT Tugu, lalai dalam menerapkan tata kelola dan manajemen risiko konglomerasi keuangan sesuai aturan POJK yang berlaku.	Persidangan: Perkara sudah masuk tahapan Kasasi.
19.	Perkara No. 39/Pdt.G/2021.PN.Trng tanggal 7 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Tenggarong.	Joko Lelono melawan: 1. Perseroan selaku Tergugat I; 2. Lilis Kuryani selaku Turut Tergugat I;	- Penggugat menerima fasilitas kredit dari Tergugat sebesar Rp. 450 jt dengan jaminan SHM No. 04669/Kel. Lok Bahu seluas 72 M2. Penggugat juga menandatangani SKMHT untuk	Persidangan: Perkara sudah masuk pada tahapan Kasasi.

No.	No. Perkara	Para Pihak	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan, Upaya Hukum Dan/Atau Status
		3. BPN Kota Samarinda selaku Turut Tergugat II; dan 4. Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 selaku Turut Tergugat III.	membuat APHT No. 52/2017 tanggal 03 Mei 2017. Ternyata antara SKMHT dan APHT ada jeda waktu selama 60 hari. Sebagaimana menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan pasal 15 (3) berbunyi : "SKMHT mengenai atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Pemberian Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan" - Proses pembuatan APHT tsb melanggar UU sehingga perbuatan berikutnya yang menyertainya adalah tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. - Penggugat juga telah mengajukan permohonan penundaan pembayaran terdampak adanya Covid 19, namun tidak ditanggapi. Hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 4 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	
20.	Perkara Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 12 April 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	Novarina Anggradiani, Suryadi Surya, dan Pandu Haryanto melawan Perseroan selaku Tergugat	Penggugat menggugat Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat tidak memberikan hak pensiun Penggugat sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Persidangan: Tahapan persidangan sudah masuk pada pembacaan kesimpulan.

Keterangan Perkara MNCAM:

No.	No. Perkara	Para Pihak	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan, Upaya Hukum Dan/Atau Status
1.	Perkara Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	MNCAM ("Terdakwa Korporasi")	Bahwa Terdakwa selaku Manajer Investasi telah menerima komisi berupa management fee yang tidak sah dalam pengelolaan investasi dalam produk reksadana milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang merugikan negara sebesar Rp480.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh miliar rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)	Terdakwa Korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Saat ini Terdakwa Korporasi mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Keterangan Perkara MNCS:

No.	No. Perkara	Para Pihak	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan, Upaya Hukum Dan/Atau Status
1.	Perkara Nomor 128/Pdt/G/2019/PN.Jkt.Pst	PT Tugu Reasuransi Indonesia selaku Penggugat melawan MNCS selaku Tergugat I dan PT Sunprima Nusantara Pembinaan ("SNP") selaku Turut Tergugat I	a. Pada tahun 2016, MNCS selaku broker menawarkan transaksi investasi pembelian Medium Term Notes ("MTN") dari SNP kepada Penggugat.	Status: Pada tanggal 22 September 2020, MNCS memenangkan perkara yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri

No.	No. Perkara	Para Pihak	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan, Upaya Hukum Dan/Atau Status
			b. Pada tahun 2018, SNP dinyatakan berstatus PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakibatkan 4 (empat) dari 17 (tujuh belas) transaksi MTN yang dilakukan oleh Penggugat kepada SNP menjadi gagal bayar dengan total senilai Rp143.000.000.000,00	Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Penggugat kemudian mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan MNCS telah menerima Relas Putusan Banding yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut. Atas adanya putusan tersebut, MNCS melalui Kuasa Hukum dalam proses Peninjauan Kembali.

Keterangan Perkara MNCAI:

No.	No. Perkara	Para Pihak	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan, Upaya Hukum Dan/Atau Status
1.	Perkara Nomor 947/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel	PT Cahaya Lampung Selatan selaku Penggugat melawan: 1. PT Arthagraha General Insurance selaku Tergugat I; 2. PT Asuransi Kresnamitra selaku Tergugat II; 3. PT Asuransi Jasa Raharja Putera selaku Tergugat III; 4. PT Asuransi Mega Pratama selaku Tergugat IV; 5. PT Asuransi Purna Artanugraha Batam selaku Tergugat V; 6. PT Asuransi Ramayana selaku Tergugat VI; 7. PT Asuransi Bintang selaku Tergugat VII; dan 8. MNCAI selaku Tergugat VIII.	1. Penggugat merupakan pihak Tertanggung dan Para Tergugat selaku Para Penanggung saling mengikatkan diri dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. L06.0121.0618.00002 tertanggal 3 Juni 2018. 2. Para Tergugat selaku Para Penanggung belum memenuhi kewajiban hukumnya secara penuh untuk memberikan penggantian kerugian kepada Penggugat selaku Tertanggung atas peristiwa kebakaran pabrik Penggugat.	Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Status: Penggugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta yakni tahap penerimaan kontra memori banding.
2.	Perkara Nomor 191/Pdt.G/2022/PN/Jkt/Pst	PT Argo Manunggal Triasta selaku Penggugat I dan PT Grand Textile Industry selaku Penggugat II melawan PT KB Insurance Indonesia selaku Tergugat I; PT Avrist General Insurance selaku Tergugat II; dan MNCAI selaku Tergugat III	1. Para Penggugat merupakan pihak Tertanggung dan Para Tergugat selaku Para Penanggung saling mengikatkan diri dalam Property All Risks Insurance Policy No. 2009201092000008 tanggal 1 April 2020. 2. Para Penggugat menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap klausul pembatalan dalam polis. 3. Para Penggugat menilai bahwa Para tergugat tidak pernah membatalkan polis secara resmi, melainkan secara manipulatif berusaha untuk menghindari kewajibannya dalam menanggung dan menerima klaim asuransi yang telah diajukan para terdapat atas kerugian yang diderita Para Penggugat akibat kebakaran.	Sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni dalam proses pemeriksaan ahli.

Keterangan Perkara MNCGUI:

No.	No. Perkara	Para Pihak	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan, Upaya Hukum Dan/Atau Status
3.	Perkara Nomor 278/Pdt.g/2022/PNJkt Pusat	- Moch Agus Rozak (Penggugat) - MNCGUI (Tergugat)	Penggugat tidak sepakat dengan harga diskon pelunasan yang disampaikan oleh debitur sehingga Penggugat mengajukan gugatan di PN Jakarta Pusat	Saat ini sedang dalam tahap Pemeriksaan Pokok Perkara di PN Jakarta Pusat.

Perkara-perkara yang saat ini dihadapi Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha, harta kekayaan, dan rencana Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

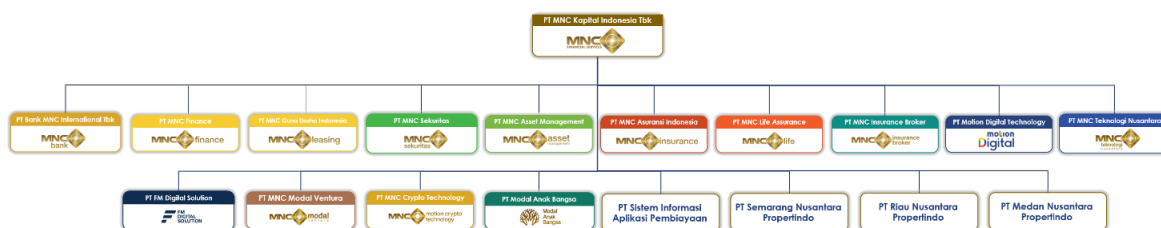
Adapun Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha, harta kekayaan, dan rencana Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

J. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak dalam bidang jasa keuangan di berbagai lini bisnis, antara lain: perbankan yang operasionalnya dilakukan oleh BAPP, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 42,3%, lini bisnis asuransi oleh MNCAI, MNCL dan MIB, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 21,1%, lini bisnis pembiayaan oleh MNCF dan MNCGUI, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 13,1%, penjaminan dan perantara perdagangan efek oleh MNCS, yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 7,5% bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memperoleh pendapatan dari bisnis pengelolaan investasi oleh MNCAM 1,9%, finansial teknologi oleh MTN dan FM 1,6% serta kegiatan operasional lainnya sebesar 12,5% .

Berikut adalah struktur Perseroan dan lini bisnis Entitas Anak per tanggal 31 Oktober 2022:



*Data per 31 Oktober 2022

Berikut adalah klasifikasi lini usaha dibawah Perseroan berdasarkan bidang usaha, yaitu:

A. Motion Digital

Motion Digital merupakan entitas yang baru dibentuk oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk untuk mengkonsolidasikan unit bisnis berbasis transaksinya termasuk layanan perbankan dari MNC Bank, perdagangan saham & reksa dana dari MNC Sekuritas, dan e-money & *payment gateway* MNC Teknologi Nusantara, termasuk aplikasi-aplikasi digitalnya kedalam satu ekosistem. Ekosistem ini dibentuk untuk mempermudah nasabah dalam pengelolaan dan pemantauan transaksi. Pengguna dapat melakukan transaksi harian, mulai dari transfer hingga pembayaran QRIS, mengakses pinjaman digital, hingga investasi saham dan reksa dana, memungkinkan nasabah mengelola semua kebutuhan keuangannya. Untuk meningkatkan kenyamanan, aplikasi di bawah Motion Digital akan diintegrasikan dengan *single sign-on*, e-KYC yang terhubung, dan *cross wallet*. Flash Mobile akan memproses semua transaksi di ekosistem Motion Digital untuk memastikan eksekusi *real-time*.

A.1. Lini Bisnis Jasa Perbankan

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP)

MNC Bank memainkan peran utama untuk menggerakkan seluruh bisnis jasa keuangan Perseroan, menyediakan layanan perbankan lengkap bagi individu, UMKM, maupun korporasi, disamping layanan kartu kredit dan kartu debit. MNC Bank memiliki 16 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu dan 70 ATM yang terkoneksi dengan lebih dari 200.000 ATM yang tergabung dengan jaringan GPN, ATM Prima dan ATM Bersama. MNC Bank memperoleh Peringkat Komposit 2 (PK-2) atau baik dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB).

Sebagai penyedia jasa intermediasi keuangan, maka aktivitas pemasaran BABP terdiri dari penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana (kredit). Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, BABP akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen.

Pada tahun 2021, PT Bank MNC Internasional Tbk meluncurkan MotionBanking setelah memperoleh lisensi *digital onboarding* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai salah satu bank digital pertama di Indonesia, MotionBanking menawarkan pengalaman perbankan lengkap, memungkinkan nasabah membuka rekening, deposit, transfer, pembayaran online dan offline dari smartphone melalui fitur-fitur kekinian yang mampu

menjawab kebutuhan nasabah, seperti pembukaan rekening secara online/*digital onboarding*, transfer, pembayaran tagihan, login biometrik, *top up e-wallet*, integrasi dengan MotionPay, Deposito Online, pembayaran QRIS, pembayaran kartu kredit hingga pengajuan cicilan kartu kredit dengan bunga 0 persen, transfer dengan BI-Fast serta setor dan tarik tunai di 20.000 jaringan Indomaret dan 4.800 Pos Indonesia. Deretan fitur dan layanan tersebut semakin mengokohkan MotionBanking sebagai solusi perbankan digital yang terintegrasi. Selain itu, MNC Bank juga telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga untuk memperluas ekosistem keuangannya, termasuk KemenkopUKM, BPJAMSOSTEK, Taspen dan KOPNUSPOS. Tidak berhenti disitu, MotionBanking masih mengembangkan banyak fitur guna memenuhi kebutuhan nasabah terhadap layanan perbankan digital seperti digital signature dan rekening RDN.

Penyaluran dana dalam bentuk kredit dilakukan BABP dalam bentuk fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi dengan memfokuskan pada peningkatan *low cost funding*. Melalui referensi dari kepala cabang dan juga referensi dari para nasabah, BABP secara bertahap mengembangkan usaha penyaluran kredit secara selektif. BABP mengedepankan aspek kehati-hatian dalam penyaluran dana guna menjaga *Non Performing Loan (NPL)* yang tetap rendah.

BABP terus berkembang melayani nasabah lebih baik dengan fitur-fitur *top-of-the-line* yang mudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari nasabah. Saat ini, pengguna sudah dapat menikmati integrasi fitur MotionPay untuk melihat saldo dan melakukan transfer *e-money* dari aplikasi MotionBanking. Ada juga fitur digital lending bekerjasama dengan layanan fintech lending menggunakan *AI-based credit scoring*, menawarkan pinjaman dana tunai cepat, langsung dari aplikasi MotionBanking.

A.2. Lini Bisnis Jasa Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Perantara Efek

MNC Sekuritas (MNCS)

MNCS adalah jasa perantara perdagangan efek (instrumen ekuitas, instrumen utang, pembiayaan *margin* dan *online trading*), jasa penasihat keuangan, jasa penjamin emisi efek, serta jasa riset. MNCS telah melakukan beberapa kegiatan korporasi yang menunjang kelangsungan bisnisnya, yaitu:

- Menyediakan *platform* yang memfasilitasi *online trading*, yaitu MotionTrade, yang dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat, dengan sistem operasi Android maupun iOS.
- Mensosialisasikan investasi pasar modal ke berbagai kalangan melalui produk menabung saham MNC Gemesin (Gemar Menabung Saham Indonesia), hanya dengan Rp100.000,- atau kelipatannya per bulan.

- Mengikuti lelang Surat Berharga Negara dan melayani transaksi perdagangan Surat Utang Negara, seperti Obligasi Negara Ritel, Saving Bonds Ritel (SBR), Sukuk Negara Ritel (SUKRI), dan obligasi korporasi.
- Menyelenggarakan program Klinik Edukasi secara rutin untuk menambah jumlah nasabah ritel baru dan pengguna aplikasi online trading MNC Trade New.
- Menyelenggarakan program Klinik Riset secara rutin yaitu sesi konsultasi saham secara *one-on-one* antara nasabah MNCS dengan Tim Riset MNCS, sehingga nasabah dapat memperoleh kesempatan mengkonsultasikan portofolio sahamnya pada analis yang berkompeten di bidangnya.
- Menggelar kegiatan Investor Gathering secara rutin untuk memberikan update arah ekonomi, pasar saham, pasar surat utang, analisa sektoral dan rekomendasi saham pilihan bagi nasabah *existing*.
- Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi ke sekolah, kampus, perusahaan, serta komunitas untuk menarik lebih banyak nasabah.

MotionTrade merupakan salah satu *platform* online trading saham dan reksa dana terkemuka di Indonesia yang menawarkan lebih dari 180 produk yang lengkap dan inovatif. MotionTrade menjadi aplikasi perdagangan saham dan reksa dana online dengan fitur *voice command* pertama di Indonesia. Dilengkapi dengan *update* berita dan riset berkala, serta fitur transaksi otomatis yang memudahkan para *trader*, MotionTrade juga dapat diakses tanpa hambatan melalui perangkat apa pun. MotionTrade memudahkan klien konvensional dan syariah untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja, serta memastikan transaksi saham dan reksa dana secara mudah, stabil, cepat, aman dan nyaman.

MotionTrade telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memverifikasi data calon investor dengan e-KYC sehingga pembukaan rekening dapat dilakukan sepenuhnya secara *online*. MotionTrade juga telah bekerja sama dengan 20 perusahaan manajemen aset, menjual 105 produk reksa dana elektronik di aplikasi MotionTrade.

Pemasaran produk pasar modal melalui aplikasi MotionTrade juga didukung keberadaan 155 *point of sales* MNCS di berbagai belahan Indonesia, terdiri dari 34 kantor cabang, 10 kantor.

A.3. Lini Bisnis Jasa Finansial Teknologi

1. PT MNC Teknologi Nusantara (MTN)

- MotionPay
MotionPay menyediakan *e-money*, *e-wallet* (MotionWallet) untuk pembayaran debit dan kartu kredit, dan pengiriman uang digital (MotionTransfer), dilengkapi dengan fitur QRIS dan MotionPoints, program loyalitas yang terhubung ke seluruh ekosistem MNC Group. Pertumbuhan MotionPay tidak lepas dari berbagai mitra ternama, antara lain Baznas, Alfamart, Alodokter, Ruang Guru, KoinWorks, Pos Indonesia, Indosat, Blibli.com, dan ekosistem besar MNC Group.

Aplikasi *e-money*, *e-wallet* dan transfer *digital*, yang mengadopsi teknologi yang kompatibel dengan QRIS untuk memastikan interkoneksi dengan *e-money* lainnya. MotionPay juga memiliki MotionPoints, program poin loyalitas yang mengintegrasikan semua platform digital MNC Group.

- Flash Mobile
Flash Mobile memiliki lisensi gerbang pembayaran untuk mendukung semua transaksi MNC Group dan pihak ketiga. Flash Mobile menyediakan akses terintegrasi ke berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank, kartu debit dan kredit, gerai ritel, cicilan, QRIS, dan *e-wallet*.

B. Bisnis Jasa Keuangan diluar Motion Digital

B.1. Lini Bisnis Jasa Asuransi Umum dan Jiwa

1. PT MNC Asuransi Indonesia (MNCAI)

Memiliki jaringan luas dan kantor-kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, MNCAI menawarkan beragam proteksi asuransi bagi klien ritel maupun korporasi, antara lain asuransi mobil, rumah tinggal, perjalanan dalam dan luar negeri, kecelakaan diri hingga keluarga, dan produk-produk asuransi umum lainnya yang didukung dengan *call center* dan mobil derek 24 jam.

2. PT MNC Life Assurance (MNCL)

MNCL melayani jasa asuransi jiwa melalui sistem multi jalur distribusi dengan jajaran agen sebagai unit usaha utama, dilengkapi dengan jalur distribusi *Agency, Group* dan *Alternate*, serta meluncurkan jaringan distribusi baru, mediassurance yang memungkinkan pemasaran produk asuransi melalui media grup. Dua solusi utama yang ditawarkan MNCL adalah:

a. *Wealth Protection*

Solusi ini menawarkan produk asuransi kesehatan dan medis, perlindungan kecelakaan dan penyakit kritis, dan asuransi jiwa seumur hidup untuk nasabah individu dan klien grup. Termasuk di produk asuransi ini adalah:

- Produk asuransi tradisional, yang menyediakan perlindungan jiwa dan kesehatan dengan opsi tambahan perlindungan (*riders*)
- Ritel/asuransi mikro, yang menawarkan perlindungan kecelakaan dengan biaya premi yang minimal
- Produk asuransi jiwa seumur hidup, yang memberikan perlindungan jiwa dan sekaligus akumulasi nilai tunai

b. *Wealth Accumulation*

Solusi ini menawarkan program perencanaan pendidikan, hari tua, tabungan dan investasi berdasarkan profil risiko nasabah dalam bentuk proteksi keuangan dan sekaligus investasi berimbang hasil menguntungkan.

MNCL mengoperasikan MotionLife, *insurtech* yang memberikan layanan secara lebih cepat dan responsif, menawarkan berbagai pilihan polis asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, pendidikan, hingga pensiun. Dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan, seperti layanan *e-Polis, live chat 24/7, online claim*, MotionLife menjawab semua kebutuhan asuransi jiwa dengan harga yang sangat terjangkau sehingga semua masyarakat bebas memiliki proteksi hanya dalam genggam.

3. PT MNC Insurance Broker (MIB)

MIB sedang mengembangkan MotionSafe. Aplikasi asuransi dimana pelanggan dapat membeli asuransi dari berbagai penyedia asuransi, dengan menggabungkan semua paket asuransi dari berbagai mitra dengan biaya rendah untuk memberikan pilihan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Perseroan berencana untuk mengubah persepsi mengenai proses rumit dan membosankan memilih asuransi dengan memperkenalkan *platform* asuransi *digital* di mana pengguna dapat dengan mudah membeli asuransi dengan MotionSure, aplikasi asuransi umum oleh MIB, dan MotionLife, aplikasi asuransi jiwa oleh MNCL.

B.2. Lini Bisnis Jasa Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha (*Multifinance*)

1. PT MNC Finance (MNCF)

MNCF bergerak di bidang jasa pembiayaan konsumen (*Consumer Financing*), MNCF menawarkan pembiayaan untuk produk-produk berupa mobil dan KPR serta pembiayaan melalui skema multiguna dengan jaminan BPKB atau sertifikat rumah dan Anjak Piutang untuk pembiayaan piutang pelanggan. Pembiayaan multiguna mobil dan rumah saat ini mendominasi portofolio kredit perusahaan sebesar 66,94%, diikuti oleh anjak piutang sebesar 18,83%, pembiayaan mobil bekas sebesar 8,76% dan KPR sebesar 5,46%. Untuk memperkuat penyaluran pembiayaan perusahaan dan memperluas jaringan, MNCF bekerja sama dengan pihak institusi perbankan dan dealer. MNCF saat ini melayani nasabahnya melalui 43 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama Jabodetabek, Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

2. PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGUI)

MNCGUI bergerak dalam bidang usaha jasa sewa guna usaha, yang meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Pembiayaan MNCGUI menasar industri manufaktur, kesehatan, tambang, perkebunan, konstruksi, transportasi dan infrastruktur. MNCGUI memasarkan jasa sewa operasi, sewa pembiayaan, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan syariah.

Perseroan baru saja meluncurkan MotionCredit, aplikasi pembiayaan digital hasil kerjasama MNC Leasing dan MNCF yang memungkinkan penggunanya untuk mengajukan pembiayaan multiguna dengan mudah melalui smartphone, kapan saja, di mana saja.

Motion Credit Memperkuat ekosistem digital, MNCGUI dan MNCF meluncurkan MotionCredit. Melalui aplikasi MotionCredit, pengguna dapat mengajukan pembiayaan multiguna dengan mudah melalui *smartphone*. MotionCredit menawarkan berbagai layanan pembiayaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti pembiayaan multiguna dengan agunan mobil dan rumah serta pembiayaan dana Haji. Dengan proses pengajuan digital dan pembayaran pembiayaan secara *online*, pengguna dapat mengajukan pendanaan kapan saja, di mana saja melalui MotionCredit, menjadikannya solusi pembiayaan digital yang cepat, mudah, transparan dan aman.

B.3. Lini Bisnis Jasa Pengelolaan Investasi (Asset Management)

PT MNC Aset Management (MNCAM)

Bergerak di bidang jasa Pengelolaan investasi, MNCAM melayani berbagai produk investasi bagi para investor individu maupun institusi dengan target segmen nasabah ritel dan *high net worth*. MNCAM fokus mengoptimalkan investasi memberikan imbal hasil terbaik bagi nasabah melalui reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, ekuitas dan ETF (*Exchange Traded Fund*) yang dikelola. MNCAM juga terus memperluas jaringan distribusi melalui *direct selling* kepada *high net worth*, penjualan kepada institusi, bank dan asuransi, bekerjasama dengan *selling agents* seperti sekuritas dan agen reksa dana baik *online* maupun *offline*, serta memaksimalkan sinergi ekosistem MNC Group.

B.4. Lini Bisnis Jasa Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Perantara Efek

Auerbach Grayson (AGCO)

Pada Januari 2021, Perseroan mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi mayoritas saham Auerbach Grayson & Company LLC (“AGCO”), broker saham yang berpusat di New York, khususnya dalam perdagangan global dan riset mendalam secara eksklusif untuk para investor institusi Amerika Serikat.

Melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, Winfly Ltd menjadi pengendali saham AGCO. Auerbach Grayson akan melengkapi jaringan distribusi kegiatan pasar modal MNCS (*placement* dan *broker* saham), pasar utang, investment banking, riset dan online trading, tidak hanya di Indonesia, tetapi menjangkau hingga komunitas investasi global, terutama untuk wilayah Amerika Serikat, Inggris dan Eropa serta memperluas jaringan distribusi riset MNCS di antara fund manager internasional. MNCS juga akan menjembatani seluruh transaksi AGCO di Indonesia.

AGCO membangun jaringan globalnya dengan menjalin kemitraan dengan broker serta bank lokal maupun regional baik di negara maju maupun berkembang di seluruh dunia. Memiliki jaringan di lebih dari 125 negara, AGCO merupakan broker global terbesar dalam hal jumlah perusahaan yang diulas maupun jumlah analis di seluruh dunia, dan memfasilitasi eksekusi perdagangan investor institusi Amerika Serikat dan riset saham lokal yang mendalam ke hampir semua pasar saham global. AGCO secara unik menawarkan pandangan lokal, akses korporasi, peningkatan modal serta merger and acquisition lintas negara.

Pengembangan Lain

Perseroan berupaya melakukan pengembangan digital dengan menjajaki peluang lain di dalam industri *fintech* melebihi penawaran layanan kami saat ini.

B.5. Lini Bisnis Jasa Perdagangan Aset Digital (Cryptocurrency)

PT MNC Crypto Technology (MCT)

Perseroan memandang mata uang kripto sebagai peluang yang menguntungkan dan telah mengajukan lisensi *platform* jual beli aset digital kripto, yang akan diberi nama MotionCrypto. Pengembangan platform berjalan dengan lancar dan sedang dalam tahap penyelesaian. Setelah disetujui, Perseroan dapat meluncurkan MotionCrypto dengan segera.

B.6. Lini Bisnis Modal Ventura

MMV, yang sedang dalam proses perijinan, merupakan perusahaan yang akan berfokus pada investasi dan pengembangan *start-up*, terutama di sektor *fintech*. Perseroan berharap dapat membantu mengembangkan ekosistem *fintech* di Indonesia, serta menjadi salah satu investor awal dalam *fintech* baru yang muncul dan memanfaatkan produk inovatif ke dalam ekosistem digital Perseroan.

B.7. Lini Bisnis *Securities Crowdfunding*

Aplikasi *securities crowdfunding* MotionSeeds yang dimiliki oleh MAB sedang dalam proses perijinan. MotionSeeds akan dikembangkan untuk melayani investor yang sudah ataupun belum terakreditasi untuk penawaran sekuritas perusahaan swasta.

B.8. Lini Bisnis Broker Asuransi

MIB sedang mengembangkan MotionSafe, aplikasi asuransi dimana pelanggan dapat membeli asuransi dari berbagai penyedia asuransi, dengan menggabungkan semua paket asuransi dari berbagai mitra dengan biaya rendah untuk memberikan pilihan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

2. Strategi Perseroan

Adapun strategi dan rencana Perseroan sebagai upaya mempercepat pengembangan melalui:

1. Memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk menunjang pertumbuhan bisnis Entitas Anak dan mendukung akuisisi perusahaan di industri jasa keuangan yang prospektif dalam rangka menjadi “*the most integrated financial services in Indonesia*”
2. Melanjutkan rencana digitalisasi seluruh unit usaha *financial services* melalui pemuktahiran sistem, menyelesaikan migrasi sistem anak perusahaan ke *Private Cloud*, *Disaster Recovery*, sentralisasi *contact center* dan pengembangan *front end digital system* sebagai pondasi untuk membangun *multi channel distribution (omni-channel)*.
3. Memaksimalkan investasi dari penempatan modal yang telah dilakukan baik di Perseroan maupun Entitas Anak agar menghasilkan imbalan hasil yang lebih baik kepada pemangku kepentingan.
4. Melanjutkan sinergi antar Entitas Anak, antara lain melalui *cross-selling product*, *sharing database management*, *system development*, *business process improvement* dan *insentive program* untuk kegiatan pemasaran bersama.
5. Memaksimalkan ekosistem yang dimiliki MNC Group serta ekosistem pihak ketiga dengan berbagai kolaborasi dan Kerjasama.
6. Integrasi dan standarisasi kantor-kantor Entitas Anak di beberapa kota besar.

Dalam rangka mendukung percepatan pengembangan bisnis dan peningkatan kinerja Perseroan, maka uraian terkait strategi pengembangan bisnis, Perseroan beserta Entitas Anak diuraikan sebagai berikut:

BCAP mendirikan Motion Digital, yang memiliki dan mengintegrasikan MNC Bank, MNCS, dan MTN, termasuk aplikasi-aplikasi digital berbasis transaksinyas di bawah satu entitas. Motion Digital membantu keuangan masyarakat secara maksimal, mulai dari transaksi sehari-hari, pembiayaan digital, hingga *wealth management* untuk masa depan, yang memungkinkan pelanggan mengelola semua kebutuhan keuangan mereka.

Strategi dalam jasa perbankan

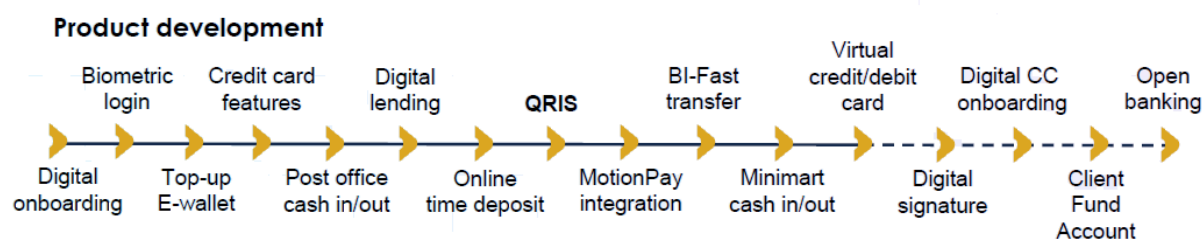
Untuk senantiasa menjaga kinerja yang baik, MNC Bank juga melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur, terutama bagi debitur dengan histori pembayaran yang baik.
- b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap bisnis debitur dengan berinisiatif melakukan kunjungan, serta melakukan *call monitoring*.
- c. Senantiasa menjaga hubungan baik dan meningkatkan kerja sama dengan para debitur yang memiliki portfolio baik di tengah masa pandemi.

- d. Meningkatkan integrasi produk perbankan dengan MotionBanking dan terus mengembangkan fitur-fitur yang ditawarkan untuk semakin mempermudah layanan kepada nasabah.
- e. Mengoptimalkan struktur organisasi dan pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan sehingga mampu menjawab dinamika usaha dan sasaran bisnis Bank.
- f. Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Hasilnya, MNC Bank memperoleh Peringkat Komposit 2 (PK-2) atau baik dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB).

BABP berniat untuk berinvestasi lebih banyak di bidang teknologi informasi untuk mengantisipasi potensi pasar ke depan. BABP telah mendapatkan izin *digital onboarding* untuk aplikasi MotionBanking dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fokus menjadi *digital banking* terkemuka. Saat ini, masyarakat Indonesia dapat menggunakan MotionBanking untuk mengakses layanan perbankan digital. Tanpa harus mengunjungi kantor cabang atau *video call* dengan *customer service*, pengguna dapat langsung membuka rekening tabungan sepenuhnya biometrik. MotionBanking memungkinkan nasabah untuk dengan mudah membayar dengan angsuran kartu kredit dari rekening tabungan mereka, mengurangi risiko angsuran dan meningkatkan kualitas kredit dan *user experience*. Nasabah dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman langsung dari aplikasi MotionBanking. MotionBanking juga telah dilengkapi dengan QRIS, memungkinkan nasabah melakukan pembayaran di 20 juta *merchant* QRIS. Akun MotionBanking juga sudah terkoneksi dengan akun MotionPay untuk meningkatkan sinergi.

Perkembangan MotionBanking



Selain fitur yang sekarang sudah tersedia, MotionBanking juga akan terus meningkatkan layanan untuk memberikan pengalaman layanan keuangan digital lengkap di satu platform.

Strategi dalam jasa pembiayaan

Perseroan memiliki dua Entitas Anak yang bergerak dalam bisnis pembiayaan, MNCF dan MNCGUI. MNCF menawarkan produk pinjaman seperti Express Dana Mobil dan Express Dana Rumah sebagai program *refinancing* mobil dan rumah second di 44 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan MNCGUI menargetkan pembiayaan korporat dengan nilai pembiayaan yang lebih besar, sehingga mampu menawarkan beragam produk pembiayaan yang inovatif, produktif, dan berjangka panjang melalui 16 kantornya yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia. MNCF dan MNCGUI berkolaborasi meluncurkan MotionCredit, aplikasi pembiayaan multiguna melalui smartphone untuk meningkatkan jangkauan MNC Leasing dan MNCF ke pasar yang lebih luas. MotionCredit menawarkan berbagai layanan pembiayaan multiguna dengan agunan mobil dan rumah serta pembiayaan dana Haji. Memanfaatkan digitalisasi proses pengajuan dan pembayaran pembiayaan secara online, pengguna dapat mengajukan pendanaan kapan saja, menjadikannya solusi pembiayaan digital yang cepat, mudah, transparan dan aman.

MNCF dan MNCGUI terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dengan memberikan solusi cepat dan sederhana untuk kebutuhan keuangan mereka.

Strategi dalam jasa asuransi

Perseroan memiliki tiga Entitas Anak yang bergerak pada bidang asuransi. MNCL berfokus pada produk-produk unggulan dengan kategori *Personal Accident*, *Group Health*, *Traditional* untuk individu dan korporasi. Strategi pemasaran MNCL dilakukan melalui jalur pemasaran *agency*, *bancassurance*, *employee benefit* dan juga melalui aplikasi. MNCAI memfokuskan strategi penjualan pada pengembangan saluran penjualan melalui leasing dan dealer, mengembangkan pemasaran di Internal MNC Group, mengembangkan bisnis melalui kemitraan, mengembangkan penjualan asuransi perjalanan, optimalisasi skema kerjasama dengan dealer-dealer mitra usaha, melakukan peninjakan dan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan berbagai bank dan

multifinance. Sedangkan strategi MIB adalah menggabungkan semua paket asuransi dari para mitra asuransi untuk memberikan pilihan yang lebih baik.

Perseroan berencana untuk mengubah persepsi mengenai proses rumit memilih asuransi dengan memperkenalkan *platform* asuransi *digital* di mana pengguna dapat dengan mudah membeli asuransi melalui aplikasi dengan MotionLife, aplikasi asuransi jiwa oleh MNCL; MotionSure, aplikasi asuransi umum oleh MNCAI; dan MotionSafe aplikasi omni-channel yang mampu menggabungkan dan membandingkan berbagai produk agar nasabah mendapatkan perlindungan yang terbaik sesuai kebutuhan.

Strategi dalam jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek

Beberapa strategi yang komprehensif dan terencana menjadi kunci Perseroan dalam memenangkan kompetisi di industri, seperti:

1. Memperluas jaringan berupa point of sales di berbagai wilayah di Indonesia.
2. Menggelar kegiatan edukasi pengenalan pasar modal dan literasi keuangan bagi calon nasabah.
3. Penguatan kegiatan perantara pedagang efek utang melalui penjualan produk pendapatan tetap seperti obligasi dan sukuk, serta sebagai APERD (Agen Penjual Reksa Dana) Online bekerjasama dengan 32 Manajer Investasi di Indonesia. Dengan kerja sama ini, sebanyak lebih dari 100 produk reksa dana tersedia di aplikasi MotionTrade.
4. Penguatan kegiatan *Investment Banking* melalui jasa penjamin emisi dalam transaksi *Initial Public Offering* (IPO) saham maupun jasa penjaminan dan *arranger* dalam transaksi obligasi dan Medium Term Notes (MTN), serta jasa-jasa *financial advisory*.
5. Terus mengembangkan aplikasi MotionTrade, dengan penambahan fitur-fitur baru yang canggih dan cepat untuk membantu nasabah memaksimalkan keuntungan.
6. Meningkatkan interaksi dengan masyarakat melalui media sosial.

Strategi dalam jasa pengelolaan investasi

MNCAM fokus mengoptimalkan investasi memberikan imbal hasil terbaik bagi nasabah melalui reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, ekuitas dan ETF (*Exchange Traded Fund*) yang dikelola. MNCAM juga terus memperluas jaringan distribusi melalui direct selling kepada high net worth, penjualan kepada institusi, bank dan asuransi, bekerjasama dengan *selling agents* seperti sekuritas dan agen reksa dana baik *online* maupun *offline*, serta memaksimalkan sinergi ekosistem MNC Group.

Strategi untuk mendapatkan imbal hasil terbaik:

1. Riset aktif untuk saham pilihan yang memiliki potensi.
2. Manajemen risiko & likuiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pengaturan yang aktif dan terus menerus terhadap benchmark untuk saham beta dan durasi untuk obligasi.
4. Alokasi aset yang dinamis sesuai kondisi pasar.

Strategi dalam jasa teknologi keuangan

MTN merupakan Entitas Anak Perseroan yang khusus bergerak di bidang teknologi keuangan, menjadi solusi pembayaran untuk bisnis dan individu. MTN memiliki dua merek: MotionPay, *platform e-money* dan *e-wallet*, dan Flash Mobile, penyedia *gateway* pembayaran.

Strategi pengembangan yang dilakukan MTN:

1. Memanfaatkan ekosistem MNC Group, menjadi *platform* pembayaran dan *payment gateway* layanan berbayar dan transaksi didalam ekosistem MNC Group serta menjadikan media MNC Group sebagai media utama untuk membangun *awareness*.
2. Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan *user experience*.
3. menambah koneksi ke berbagai metode pembayaran termasuk transfer bank, kartu debit dan kredit, gerai ritel, QRIS, dan *e-wallet White labeling* dan *cobranding*.

3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan senantiasa dihadapkan pada persaingan dari perusahaan penyedia jasa keuangan lain dan berupaya untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan strategi jasa keuangan terpadu, yang menawarkan paket produk-produk keuangan secara terpadu kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan kuat dari Grup MNC Media dalam mempromosikan “*brand awareness*” untuk setiap produk Perseroan sehingga akan memperkuat kepercayaan pelanggan dan menjangkau wilayah geografis yang luas. Perseroan juga membangun kerja sama dengan bank, *dealer*, nasabah institusi, agen asuransi, *broker*, investor lokal dan global untuk dapat bertumbuh dengan cepat.

Perseroan telah membangun sebuah jasa keuangan yang terintegrasi dan bergengsi yang dapat menyediakan jasa keuangan yang lengkap yang terdiri dari BABP, MNCL (asuransi jiwa), MNCAI (asuransi umum), MNCF dan MNCGUI (jasa pembiayaan dan guna usaha), MNCS (penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek) dan MNCAM (pengelolaan investasi). Selain itu pula demi menciptakan jasa finansial yang terintegrasi di cabang-cabang usaha dan efisiensi diantara lini usaha, Perseroan membentuk entitas anak di bidang properti yang penyediaan jasanya hanya untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak (internal). Sinergi di antara Entitas Anak di bawah Perseroan dan MNC Media akan membedakan produk dan jasa serta kinerja Perseroan dibandingkan pemain lainnya di industri jasa keuangan.

Lini usaha perbankan

BABP memainkan peran utama untuk menumbuhkan seluruh bisnis jasa keuangan Perseroan. Dengan hadirnya BABP maka Perseroan dapat menawarkan berbagai ragam produk dan jasa keuangan. BABP menargetkan pasar korporasi dan *consumer* untuk memobilisasi dana pihak ketiga dan utang. BABP akan berfokus pada basis transaksi perbankan termasuk kartu kredit, pengiriman uang, manajemen kas, gaji dan lain-lain. Dengan visi dan misi baru, BABP telah memulai transformasi di semua lini bisnis untuk mewujudkan ‘Bank Masa Depan’ dengan memberikan produk dan pelayanan perbankan yang dapat memuaskan seluruh segmen nasabah dengan berlandaskan teknologi terkini. Komitmen dan dukungan pemegang saham utama menjadi bekal dan kesempatan bagi BABP untuk bersinergi luas dengan MNC Grup, sehingga dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, BABP dapat menjalin kerja sama dengan unit-unit usaha dibawah MNC Grup.

Lini usaha pembiayaan

Nama besar MNCF dan MNCGUI ini menjadi salah satu kelebihan di dunia pembiayaan. MNCF fokus pada pembiayaan otomotif seperti *Used car* dan *Express* dan menjadi pilihan konsumen menggunakan produk MNCF, juga ditambahkan program *digital maketing* semakin mendekatkan konsumen dengan MNCF.

Potensi di dunia pembiayaan roda empat baik *used car*/multiguna sangatlah tinggi khusus di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dimana populasi penduduk lebih dari 200 juta dan mayoritas mobilisasi warga sangat tinggi, ini merupakan bukti bahwa kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama.

MNCF memiliki cabang hampir di semua kota besar seluruh di Indonesia dan beberapa kota atau kabupaten lainnya. Dengan banyaknya perusahaan pembiayaan saat ini, MNCF memiliki pasar tersendiri. MNCF juga memiliki jaringan pembayaran yang luas melalui kerjasama *payment point* dengan Indomaret, Alfamart, Kantor Pos dan lain-lain, sehingga memudahkan debitur dalam melakukan pembayaran. Hal ini juga merupakan komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada mitra dan konsumen.

Lini usaha asuransi

Perseroan memiliki usaha asuransi lengkap, mulai dari asuransi umum, asuransi jiwa dan broker asuransi. MNCAI yang memiliki total aset Rp 640 miliar pada Juni 2022 ini merupakan lini usaha asuransi umum Perseroan. Keunggulan MNCAI termasuk:

- Memiliki network dan kantor cabang di seluruh Indonesia
- Layanan *Call Center* dan Mobil Derek 24 Jam
- Produk asuransi yang bervariasi
- *Mobile Application* baik untuk produk B2B maupun B2C

Selain itu, MNCAI sedang mengembangkan MotionSure, aplikasi yang menyediakan berbagai perlindungan asuransi umum hanya dari genggaman.

Lini usaha asuransi jiwa telah beroperasi sejak tahun 2010. Pada Juni 2022, berhasil membukukan total aset Rp 420,8 miliar. Pengembangan layanan digital serta berfokus pada produk-produk yang menguntungkan bagi nasabah maupun mitra menjadi tolak ukur peningkatan pertumbuhan lini MNCL. MNCL masuk ke *insurtech* dengan MotionLife, *insurtech* yang memberikan layanan secara lebih cepat dan responsif, menawarkan berbagai pilihan polis asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, pendidikan, hingga pension untuk menjawab semua kebutuhan asuransi jiwa dengan harga yang terjangkau.

Lini usaha penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek

Menyediakan jasa sekuritas yang lengkap dengan didukung oleh beberapa divisi usaha *Equity* (Ritel & Institusi), *Fixed Income*, *Investment Banking*, *Research* dan *High Networth*. MNCS memiliki salah satu *online trading* terbaik di Indonesia, MotionTrade, *platform online trading* saham dan reksa dana terkemuka di Indonesia yang menawarkan lebih dari 180 produk yang lengkap dan inovatif. MotionTrade telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memverifikasi data calon investor dengan e-KYC sehingga pembukaan rekening dapat dilakukan sepenuhnya secara *online*. MotionTrade juga telah bekerja sama dengan 32 perusahaan manajemen aset, menjual 170 produk reksa dana elektronik di aplikasi MotionTrade. Selain itu, MotionTrade juga mengoperasikan *online trading* berbasis syariah MotionTrade Syariah bagi para investor yang ingin bertransaksi saham sesuai dengan prinsip syariah. MotionTrade Syariah telah dievaluasi dan resmi mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan nomor 004.41.02/DSN-MUI/V/2016.

MNCS juga didukung keberadaan 147 point of sales, yang terdiri dari 39 kantor cabang, 10 Kantor Perwakilan, dan 98 Galeri Investasi BEI yang tersebar di Tanah Air. Merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) di atas angka Rp250 miliar, sehingga dapat memberikan fasilitas marjin yang lebih baik bagi nasabah.

Lini usaha pengelolaan investasi

MNCAM memiliki produk-produk investasi reksa dana konvensional dan syariah yang memiliki nilai imbal hasil optimal sesuai dengan tingkat resiko masing-masing nasabah, mulai dari reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, ekuitas dan ETF (*Exchange Traded Fund*) yang dikelola. MNCAM juga terus memperluas jaringan distribusi melalui *direct selling* kepada *high net worth*, penjualan kepada institusi, bank dan asuransi, bekerjasama dengan *selling agents* seperti sekuritas dan agen reksa dana baik *online* maupun *offline*, serta memaksimalkan sinergi ekosistem MNC Group.


4. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi









Perseroan dan Entitas Anak telah mendaftarkan sejumlah hak kekayaan intelektual yang terdiri dari merek dagang dan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:







A. Merek Dagang








Pemilik	Nomor Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
Perseroan	IDM000759373		36	14 September 2028
MNCAM	IDM000722989		36	10 Oktober 2028





















Pemilik	Nomor Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	IDM000723093		36	10 Oktober 2028
MNCS	IDM000701963		36	1 Agustus 2028
MNCF	IDM000759396		36	14 September 2028
MNCL	IDM000641374		36	29 Juli 2025
	IDM000717054		36	13 Agustus 2028
MNCAI	IDM000826710		36	14 Maret 2029
	IDM000826709		36	14 Maret 2029
MNCGUI	IDM000914238		36	1 September 2030
	IDM000914036		36	1 September 2030
	IDM000966362		9	12 April 2031
	IDM000966359		36	12 April 2031
	IDM000968124		42	12 April 2031









Pemilik	Nomor Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	IDM000937882	 Sistem Informasi dan Aplikasi Pembiayaan	36	22 Desember 2030
	IDM000925107		9	22 Desember 2030
	IDM000925109		36	22 Desember 2030
	IDM000925110		42	22 Desember 2030
	IDM000739630		36	5 Juni 2028
	IDM000719008		36	5 Juni 2028
	IDM000739549		36	5 Juni 2028
	IDM000739592		36	5 Juni 2028
BABP	IDM000798176		9	26 Oktober 2026
	IDM000802540		36	26 Oktober 2026
	IDM000798175		9	26 Oktober 2026
	IDM000802537		36	26 Oktober 2026
	IDM000798848	 Bantune	9	26 Oktober 2026

Pemilik	Nomor Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	IDM000800537	 <p>Bantune</p>	36	26 Oktober 2026
	IDM000797992	 <p>Chicorus</p>	9	26 Oktober 2026
	IDM000798924	 <p>Chicorus</p>	36	26 Oktober 2026
	IDM000797991	 <p>Roostar</p>	9	26 Oktober 2026
	IDM00079891	 <p>Roostar</p>	36	26 Oktober 2026
	IDM000797657	 <p>Ladpole</p>	9	26 Oktober 2026
	IDM000798914	 <p>Ladpole</p>	36	26 Oktober 2026
	IDM000795669	 <p>Hoprince</p>	9	26 Oktober 2026

Pemilik	Nomor Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	IDM000798162	 Hopprince	36	26 Oktober 2026
	IDM000795668	 Croaking	9	26 Oktober 2026
	IDM000798161	 Croaking	36	26 Oktober 2026
	IDM000798864	 Swart	9	26 Oktober 2026
	IDM000802534	 Swart	36	26 Oktober 2026
	IDM000798860	 Piglearnt	9	26 Oktober 2026
	IDM000802525	 Piglearnt	36	26 Oktober 2026
	IDM000798852	 Hogworth	9	26 Oktober 2026

Pemilik	Nomor Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	IDM000802563	 Hogworth	36	26 Oktober 2026
	IDM000797648	 Runbitt	9	26 Oktober 2026
	IDM000800538	 Runbitt	36	26 Oktober 2026
	IDM000797646	 Sprinny	9	26 Oktober 2026
	IDM000802559	 Sprinny	36	26 Oktober 2026
	IDM000797642	 Harush	9	26 Oktober 2026
	IDM000802558	 Harush	36	26 Oktober 2026
	IDM000922782	MOTION BY MNC BANK	9	12 November 2030

Pemilik	Nomor Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	IDM000933052		36	12 November 2030
	IDM000956397		16, 35, 36	12 November 2030
	IDM000975413		16	21 Mei 2031
	IDM000976343		35	21 Mei 2031
	IDM000975369		36	21 Mei 2031
	IDM000974464		9	28 Mei 2031
	IDM000977958		16	28 Mei 2031
	IDM000974312		35	28 Mei 2031
	IDM000974297		36	28 Mei 2031
	IDM000972415		9	2 Juni 2031
	IDM000972209		36	2 Juni 2031
	IDM000972207		38	2 Juni 2031
	IDM000972205		42	2 Juni 2031
	IDM000981049		9	16 Juni 2031
	IDM000981040		36	16 Juni 2031
	IDM000974639		9	16 Juni 2031
	IDM000974529		36	16 Juni 2031
	IDM000974413		9	16 Juni 2031
	IDM000974406		36	16 Juni 2031
	IDM000976783		9	16 Juni 2031
	IDM000977955		36	16 Juni 2031

Pemilik	Nomor Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	IDM000973562		9	17 Juni 2031
	IDM000973558		36	17 Juni 2031
	IDM000973145		9	17 Juni 2031
	IDM000973140		36	17 Juni 2031
	IDM000977952		9	18 Juni 2031
	IDM000974801		36	18 Juni 2031
	IDM000979150		9	30 Juni 2031
	IDM000977058		36	30 Juni 2031
	IDM000975613		9, 16, 35, 36	21 Mei 2031
MTN	IDM000933658		9, 36, 38, 42	3 Desember 2030
MAB	IDM000959070	 Modal Anak Bangsa	36	19 Maret 2031
	IDM000956056	 Modal Anak Bangsa	9, 38, 42	25 Februari 2031

B. Hak Cipta

1. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan tanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama & Alamat Pencipta dan Pemegang Hak Cipta : PT Bhakti Capital Indonesia Tbk
MNC Tower Lt.1 & 2

Jl.Kebon Sirih, Menteng
Jakarta Pusat

Jenis Ciptaan : Seni Logo

Judul Ciptaan : **MNC Financial Services**

Tgl & Tempat Diumumkan untuk pertama kali di Wilayah Indonesia atau diluar Wilayah Indonesia : 16 Desember 2011, di Jakarta

No.Pendaftaran : 059036

Jangka Waktu Perlindungan : 50 tahun sejak pertama kali diumumkan

2. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan tanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, dengan keterangan sebagai berikut:

- Nama & Alamat Pencipta dan Pemegang Hak Cipta : PT MNC Asuransi Indonesia
MNC Tower Lt.21 Suite 2102
Jl.Kebon Sirih, Menteng
Jakarta Pusat
- Jenis Ciptaan : Seni Logo
Judul Ciptaan : MNC Insurance
Tgl & Tempat Diumumkan untuk pertama kali di Wilayah Indonesia atau diluar Wilayah Indonesia : 20 Desember 2011, di Jakarta
No.Pendaftaran : C00201200504/31 Januari 2012
Jangka Waktu Perlindungan : 50 tahun sejak pertama kali diumumkan
3. Surat Pendaftaran Ciptaan Tanggal 1 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, dengan keterangan sebagai berikut :
- Nama & Alamat Pencipta dan Pemegang Hak Cipta : PT MNC Life Assurance
MNC Tower Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 17, 18, 19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat
- Jenis Ciptaan : Seni Lukis Karakter
Judul Ciptaan : **HARIO BOS**
Tgl & Tempat Diumumkan untuk pertama kali di Wilayah Indonesia atau diluar Wilayah Indonesia : 10 Januari 2011, di Jakarta
No. Pendaftaran : 059529
Jangka Waktu Perlindungan : 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
4. Surat Pendaftaran Ciptaan Tanggal 13 Februari 2013, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, dengan keterangan sebagai berikut :
- Nama & Alamat Pencipta dan Pemegang Hak Cipta : PT. MNC Life Assurance
MNC Tower Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat
- Jenis Ciptaan : Seni Logo
Judul Ciptaan : **UANG MUKA KLAIM**
Tgl & Tempat Diumumkan untuk pertama kali di Wilayah Indonesia atau diluar Wilayah Indonesia : 20 Februari 2012, di Jakarta
No. Pendaftaran : 062073
Jangka Waktu Perlindungan : 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
5. Sertifikat pendaftaran Ciptaan tanggal 20 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, dengan keterangan sebagai berikut :
- Nomor & Tgl Permohonan : C00201201741, 7 Juni 2012
Nama & Alamat Pencipta dan Pemegang Hak Cipta : PT MNC Finance
Jl. Abdul Muis No.36/C.D.E.F GD Bhakti Finance Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat
- Jenis Ciptaan : Seni Logo
Judul Ciptaan : MNC Finance
Tgl & Tempat Diumumkan untuk pertama kali di Wilayah Indonesia atau diluar Wilayah Indonesia : 8 Desember 2010, di Jakarta
No.Pendaftaran : 063160
Jangka Waktu Perlindungan : 50 tahun sejak pertama kali diumumkan

5. Penghargaan

Penghargaan yang pernah diterima Perseroan dan Entitas Anak dalam kurun waktu 2020-2021 adalah sebagai berikut:

No	Penghargaan Tahun 2021	Kategori	Penyelenggara	Tanggal
PERSEROAN				
1	The 12 th IICD Corporate Governance & Award	Top 50 Mid-Capitalization Public Listed Company	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)	31 Mei 2021
BABP				
2	Indonesia's Most Popular Digital Brand Awards 2021	3 rd The Best Category Bank BUKU 2 Public Company	Majalah Economic Review	9 April 2021
3	Indonesia Corporate Secretary – Communication Award VI 2021	1 st The Best Informative Website 2021 Category Bank BUKU 2 Public Company	Majalah Economic Review	24 Juni 2021
4	Indonesia Finance Award IV 2021	Silver Award (Good) Category Bank Public Company	Majalah Economic Review	19 November 2021
MNCS				
5	Indonesia's Most Popular Digital Brand Awards 2021	E-Trading Securities	Iconomics	26 Februari 2021
6	10 th Infobank Digital Brand Awards 2021	1 st Best Overall Perusahaan Sekuritas	Infobank	3 Juni 2021
7	10 th Infobank Digital Brand Awards 2021	The Best Digital Brand 2017-2021 – Perusahaan Sekuritas	Infobank	3 Juni 2021
8	Indonesia Financial Top Leader Awards 2021	Best Leader for Business Resilience Through Business Innovation – Market Segmentation, Business Expansion and Product Development	Wartaekonomi.co.id	28 Juli 2021
9	IDX Islamic 2021	AB-SOTS dengan Rata-Rata Volume Transaksi Terbanyak dalam IDX Islamic Challenge 2021	Bursa Efek Indonesia	2 Desember 2021
10	Top Innovation Award 2021	MotionTrade – Top Innovation Award	TRAS N CO Indonesia & Infobrand.id	9 Desember 2021
11	GI BEI Award 2021	Anggota Bursa Mitra Galeri Investasi BEI dengan kinerja terbaik	Bursa Efek Indonesia	15 Desember 2021
MNCL				
12	Warta Ekonomi Indonesia Best Insurance Award 2021	Best Insurance 2021 with Outstanding Financial Performance and Corporate Business Development, Category Life Insurance	Warta Ekonomi	28 Oktober 2021
No Penghargaan Tahun 2020				
BABP				
1	Indonesia Sales Marketing Award (ISMA) IV 2020	2 nd The Best ISMA IV-2020, Kategori Bank BUKU 2	Majalah Economic Review	12 Maret 2020
2	Top Bank Awards 2020	Peringkat Gold untuk kategori Bank BUKU II	The Iconomics bekerja sama dengan RRI	28 Oktober 2020
3	Artajasa ATM Bersama Members Meeting 2020	Best Digital Innovation	Artajasa	16 Desember 2020
	Indonesia Operational Excellence Awards (IOEA) 2020	“Gold (Excellent)” untuk kategori bank BUKU II	Economic Review bekerja sama dengan PQI Consultant, Indonesia-Asia Institute, dan Ideku Group	14 Desember 2020
MNCS				
4	9 th Infobank Digital Brand Awards 2020	2 nd Best Overall Perusahaan	Majalah Infobank	15 Mei 2020

No	Penghargaan Tahun 2020	Kategori	Penyelenggara	Tanggal
		Sekuritas		
5	9 th Infobank Digital Brand Awards 2020	1 st Perusahaan Sekuritas Penjamin Emisi Efek Aset Rp1 Triliun ke Atas	Majalah Infobank	15 Mei 2020
6	Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands 2020	Millenials Choice	The Iconomics	26 Juni 2020
7	Rekor MURI	Peresmian Galeri Investasi Terbanyak Secara Virtual dalam Sehari	MURI	10 November 2020
8	Penghargaan Galeri Investasi BEI 2020	Anggota Bursa Mitra dengan Kinerja Terbaik	Bursa Efek Indonesia	14 Desember 2020
9	Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award 2020	3 rd The Best General Insurance Company	Majalah Economic Review	7 Februari 2020
10	9 th Infobank Digital Brand Awards 2020	3 rd Best Overall Perusahaan Asuransi Umum Konvensional	Majalah Infobank	15 Mei 2020
11	9 th Infobank Digital Brand Awards 2020	2 nd Perusahaan Asuransi Umum Konvensional Premi Bruto Rp250 Miliar sampai dengan Rp500 Miliar	Majalah Infobank	15 Mei 2020

6. Prospek Usaha

Indonesia merupakan rumah bagi populasi unbanked terbesar keempat di dunia. Di negara di mana sekitar 92 juta dari 276 juta jiwa tidak memiliki rekening bank, tetapi 70% penduduknya memiliki *smartphone*, jasa keuangan digital memainkan peran penting dalam memajukan inklusi keuangan baik di kota berpenduduk padat maupun di daerah terpencil. Komitmen pemerintah menciptakan inklusi keuangan dengan mendukung layanan keuangan digital, turut membantu meningkatkan tingkat adopsi di antara masyarakat yang kurang terlayani sekaligus meningkatkan efisiensi layanan konvensional.

Prospek usaha di bidang jasa perbankan

Perkembangan industri perbankan diproyeksikan terus meningkat, dengan proyeksi pertumbuhan kredit yang masih baik dengan pertumbuhan laba perbankan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh aktivitas perekonomian masyarakat yang berangsur pulih dan pertumbuhan ekonomi yang kembali tumbuh positif pasca pandemi.

Dilihat dari sisi suku bunga, tren yang menurun sejak tahun 2020 hingga kuartal pertama tahun 2022 ini merupakan insentif tersendiri bagi dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Hal ini akan berdampak baik bagi keberlangsungan pendapatan bank dari pembayaran para debiturnya.

BABP memperoleh izin perbankan digital pada tahun 2021, dan meluncurkan Motionbanking. Aplikasi ini akan menjadi poros pertumbuhan Perseroan kedepan. Perseroan terus memperkuat sistem, menyajikan aplikasi yang cepat, mudah, aman dan handal; serta memperkaya kolaborasi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan layanan dan fasilitas.

Prospek usaha di bidang jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek

Usaha Perantara Pedagang Efek memiliki peluang pertumbuhan yang lebih baik seiring dengan sentimen positif Bursa pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah investor di Indonesia yang meningkat 27,4% dari 7,5 juta pada akhir tahun 2021 menjadi 9,3 juta investor saham pada bulan Agustus 2022 dengan sekitar 80% dari total investor merupakan generasi milenial.

Dengan bergabungnya generasi milenial di pasar modal, terbentuklah peluang untuk lanjut mengembangkan platform perdagangan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang melek teknologi. Ditambah dengan sisi penawaran pasar modal, penghimpunan dana melalui pasar modal telah mencapai Rp 153 triliun dengan 41 emiten IPO pertama dalam tahun 2022. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor dan aktifnya pasar modal Indonesia, akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan yang berdampak positif bagi bisnis pedagang perantara efek di Indonesia.

Prospek usaha di bidang finansial teknologi (e-money)

Adopsi uang digital terus meningkat dengan adanya normalisasi pembayaran melalui *QR Indonesian Standard* (QRIS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI). Jumlah pengguna dan merchant terus tumbuh secara signifikan, yang pada akhir Juni 2022 masing-masing berjumlah 21,1 juta pengguna QRIS dan 19,27 juta *merchant* QRIS. Hal ini dimotori oleh kemudahan yang ditawarkan aplikasi *e-money* dan *e-wallet* menyimpan uang elektronik dan kartu nasabah untuk melakukan pembayaran dengan satu ketukan tombol.

Dengan dukungan BI dalam perkembangan QRIS, perkembangan dan peluncuran hubungan pembayaran QR lintas batas antara negara-negara mitra menjadi sorotan dan nilai tambah terbaru bagi semua penyelenggara uang *digital* dikarenakan pengguna juga akan dapat yang memanfaatkan *platform* mereka saat liburan ke luar negeri melalui penyelesaian mata uang lokal. QR lintas batas tersebut akan menguntungkan penyelenggara uang *digital* dalam hal nilai dan jumlah transaksi, serta didorong juga oleh populasi kelas menengah yang terus berkembang pesat.

Prospek usaha di bidang pembiayaan konsumen

Pemintaan terhadap mobil dan rumah kembali menguat setelah berkontraksi pada 2020. Sejumlah indikator perekonomian domestik yang terus menunjukkan pemulihan, seperti mobilitas yang kembali meningkat dan daya beli masyarakat membaik, turut mendorong penyaluran kredit pembiayaan konsumen. MNC Financial Services berfokus pada pembiayaan konsumen dengan mayoritas portofolio pembiayaan untuk rumah (*mortgage*) dan mobil bekas (*used car*). Segmen pembiayaan tersebut belum tersentuh dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, MNC Financial Services baru saja meluncurkan MotionCredit, aplikasi pembiayaan multiguna. MotionCredit menawarkan layanan pembiayaan multiguna dengan agunan mobil dan rumah serta pembiayaan dana Haji.

Prospek usaha di bidang sewa guna usaha

Ketahanan Indonesia terhadap gejolak ekonomi global serta tingginya permintaan meningkatkan kepercayaan diri pelaku bisnis mengambil pinjaman pembiayaan modal kerja, terutama di sektor konstruksi, agribisnis, dan pertambangan. Ditambah, kendala pasokan sebagai akibat dari konflik Rusia-Ukraina menyebabkan meroketnya harga sumber daya energi dan hasil pertanian, memotivasi peningkatan produksi yang tentunya dibarengi dengan kebutuhan modal kerja. MNC Financial Services berfokus pada klien korporasi dengan berkonsentrasi pada pembiayaan aset-aset seperti alat berat, mesin dan alat kesehatan untuk kalangan bisnis di Indonesia.

Strategi MNC Financial Services untuk pembiayaan dana haji melalui diversifikasi produk pembiayaan yang belum banyak pemainnya juga merupakan salah satu cara untuk meraih potensi pasar dalam menambah segmen pembiayaan.

Prospek usaha di bidang asuransi

Pasar asuransi didominasi oleh pemain tradisional, dengan akses terbatas terutama di kota-kota padat penduduk. Hal ini mengakibatkan rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia yang baru mencapai 3,2% pada tahun 2021, meliputi asuransi jiwa 1,2%, asuransi umum 0,5%, asuransi sosial 1,5%, dan asuransi wajib 0,1%.

Akselerasi transformasi digital diharapkan dapat mengembangkan industri asuransi. Produk-produk inovatif yang dapat diserap kalangan milenial melalui sarana distribusi digital menjadi potensi untuk mendorong penetrasi asuransi, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendorong pertumbuhan dan memperkuat fundamental ekonomi.

Prospek usaha di bidang jasa pengelolaan investasi

Reksadana merupakan solusi investasi yang sangat diminati oleh individu yang kurang paham soal pasar modal. Secara konsisten menawarkan imbal hasil yang lebih menarik dibanding menabung di bank sehingga lebih mampu melindungi nilai aset terhadap inflasi. Minat terhadap reksa dana juga meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini, investor reksa dana tumbuh 5x lipat sejak 2019 dan sekarang mencapai angka 8,8 juta investor. Program literasi keuangan dari berbagai lembaga keuangan di Indonesia juga menjadi sangat penting untuk membantu meningkatkan jumlah investor yang ingin mencapai kebebasan finansial mereka.

TIDAK ADA KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN.

TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN, TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH, TIDAK ADA SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA RISIKO KHUSUS YANG DITIMBULKAN ATAS KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BERKAITAN DENGAN MODAL KERJA.

IX. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- a. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon;
- b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon;
- c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga;
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
2. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI. tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

1. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
2. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
3. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021").

Berdasarkan Pasal 3 PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT diturunkan menjadi sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B. Bunga obligasi sebagaimana dimaksud termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

Tidak ada fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh Perseroan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Keterangan Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 yang dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp346.880.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) dan secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp103.120.000.000,- (seratus tiga miliar seratus dua puluh juta Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi beserta seluruh perubahannya yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut beserta seluruh perubahannya.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi "Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022" telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan Penjaminan Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran "Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022" adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Obligasi	Pejaminan			Total Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi					
PT MNC Sekuritas (terafiliasi)	109.280.000.000	50.425.000.000	55.175.000.000	214.880.000.000	61,95
PT Sucor Sekuritas	122.000.000.000	10.000.000.000	-	132.000.000.000	38,05
Jumlah	231.280.000.000	60.425.000.000	55.175.000.000	346.880.000.000	100,00

Selanjutnya, Penjamin Emisi Efek dalam Emisi Obligasi ini akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah PT Sucor Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah:

- I. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
- II. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut.
- III. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- IV. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- V. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.
- VI. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Hubungan afiliasi yang dimaksud adalah hubungan pengendalian di mana PT MNC Sekuritas dan Perseroan dikendalikan oleh pihak yang sama.

Perseroan dengan MNCS selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah pihak terafiliasi secara tidak langsung melalui pemilikan saham oleh PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk), sedangkan Penjamin Pelaksana Emisi lainnya yaitu PT Sucor Sekuritas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Tetap Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini ditetapkan pada saat Penawaran Awal (*bookbuilding*) dengan mengumpulkan lembar minat dari calon investor. Dalam lembar minat tersebut, calon investor telah menyampaikan indikasi Tingkat Bunga Obligasi yang diinginkan. Tingkat Bunga Obligasi kemudian ditetapkan dengan melakukan pemetaan atas kompilasi lembar minat dari berbagai calon investor tersebut.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Obligasi ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono

Nexia International
Wisma Bumiputera Lantai 12
Jl. Jendral Sudirman Kav. 75, Setia Budi
Jakarta Selatan 12910

Akuntan Publik	: Florus Daeli
No. STTD	: STTD.AP-190/PM.22/2018
Tanggal STTD	: 5 Februari 2018
Asosiasi profesi	: IAPI No. keanggotaan asosiasi profesi: D-45.170
Standar profesi	: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukkan	: 126/QUO/FD/KPS-SUT/VIII/2022
Tugas Pokok	: Untuk melaksanakan audit berdasarkan standar <i>auditing</i> yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Aulia Taufani, S.H.

Menara Sudirman Lantai 17 D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta Selatan, 12190

No. STTD	: STTD.N-5/PM.22/2018
Surat Penunjukkan	: No 011-NOT/MCOM-CL/III/2022 tanggal 11 Maret 2022
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (“INI”) No. 205.5.041.221146.
Pedoman Kerja	: Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Tugas Pokok	: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

KONSULTAN HUKUM

Jusuf Indradewa & Partners Legal Consultant

Menara BCA (Grand Indonesia)
Lantai 50
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10310

Nama Partner	: Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H.
No STTD	: STTD.KH-21/PM.22/2018 tanggal 13 Maret 2018
No Anggota HKHPPM	: STTD.AP-148/PM.22/2018 tanggal 13 Maret 2018
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan	: 074/MNCKI/DIR/IX/22 tanggal 1 September 2022
Tugas Pokok	: Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atau fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Gedung BRI II Lantai 30
Investment Services Division
Trust Team

No. STTD	: 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996
Surat Penunjukkan	: B.627-INV/TCS/AET/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022
Pedoman Kerja	: Standar prosedur operasi Wali Amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Tugas Pokok	: Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 dimana Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat Dengan Perseroan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan hal-hal berikut ini:

- tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok Obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022;

- tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

PEMERINGKAT EFEK

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower
Sudirman Central Business District Lot. 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

- Surat Penunjukkan : 123/PPJP/PEF-DIR/IX/2022
- Tugas Pokok : Ruang lingkup Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan dengan tegas bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan emisi Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan:

- a. Surat pernyataan No. B.681-INV/TCS/AET/09/2022 Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan:
 - i. mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 ;
 - ii. merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 ;
 - iii. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020;
- b. Surat pernyataan No. B.681-INV/TCS/AET/09/2022 tanggal 21 September 2022, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020;

Surat pernyataan No. B. 680-INV/TCS/AET/09/2022 tanggal 21 September 2022, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

1. Umum

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama *De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden* atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 4 tanggal 06 Oktober 2021 dibuat di hadapan Fathiah Helmi. S.H.. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0457763 Tahun 2021 tanggal 07 Oktober 2021.

2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan laporan kepemilikan saham per 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		Persentase Kepemilikan Saham (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
Saham Biasa Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B Masyarakat	80.610.976.875	4.030.548.843.750	53,19
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)*	70.948.024.728	3.547.401.236.400	46,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh *	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100,00
Jumlah Saham Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800	

* Termasuk Treasury Stock sebanyak 309.266.300 lembar saham

3. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 Tanggal 25 April 2022 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: Paripurna Poerwoko Sugarda*
Komisaris Independen	: Agus Riswanto*
Komisaris Independen	: Nurmaria Sarosa*
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa

Catatan:

* Efektif menjabat selaku Komisaris dan akan dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi	
Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur	: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur	: Agus Noorsanto
Direktur	: Supari
Direktur	: Andrijanto*
Direktur	: Amam Sukriyanto
Direktur	: Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur	: Agus Sudiarto
Direktur	: Handayani
Direktur	: Agus Winardono

Catatan:

* Efektif menjabat selaku Direktur dan akan dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Persentase Kepemilikan
1	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	87,10%
2	BRI Remittance Co. Ltd.	100,00%
3	PT Asuransi BRI Life	59,02%
4	PT BRI Multifinance Indonesia	99,88%
5	PT BRI Danareksa Sekuritas	70,90%
6	PT BRI Ventura Investama	99,97%
7	PT BRI Asuransi Indonesia	90,00%
8	PT Permodalan Nasional Madani	99,99%
9	PT Pegadaian	99,99%

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, Bank BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*).

1) Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Obligasi/Sukuk	Tanggal Emisi
1.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VII Tahun 2021	26-Jan-21
2.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021	17-Feb-21
3.	Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A	26-Mar-21
4.	Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B	26-Mar-21
5.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021	09-Apr-21
6.	Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A	14-Apr-21
7.	Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B	14-Apr-21
8.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A	14-Apr-21
9.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B	14-Apr-21
10.	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	15-Apr-21
11.	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	15-Apr-21
12.	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	20-May-21
13.	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	20-May-21
14.	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap I Tahun 2021 Seri A	08-Jun-21
15.	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap I Tahun 2021 Seri B	08-Jun-21
16.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2021	01-Jul-21
17.	Obligasi Konversi Adi Sarana Armada I Tahun 2021	27-Jul-21
18.	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Seri A	28-Jul-21
19.	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Seri B	28-Jul-21
20.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2021 Seri A	06-Aug-21
21.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2021 Seri B	06-Aug-21
22.	Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021	19-Aug-21
23.	Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 Seri B	17-Jun-16

No.	Nama Obligasi/Sukuk	Tanggal Emisi
24.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A	09-Sep-21
25.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B	09-Sep-21
26.	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2021	22-Oct-21
27.	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap II Tahun 2021	27-Oct-21
28.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021	23-Nov-21
29.	Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021	18-Nov-21
30.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2021	03-Dec-21
31.	Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021	10-Dec-21
32.	Obligasi Berkelanjutan I SPINDO Tahap I Tahun 2021	02-Dec-21
33.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SPINDO Tahap I Tahun 2021	02-Dec-21
34.	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022	23-Feb-22
35.	Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022	23-Feb-22
36.	Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022	02-Mar-22
37.	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	08-Mar-22
38.	Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022	08-Mar-22
39.	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022	22-Mar-22
40.	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022	25-Mar-22
41.	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022	08-Apr-22
42.	Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022	07-Apr-22
43.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022	07-Apr-22
44.	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022	28-Apr-22
45.	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022	10-Jun-22
46.	Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022	30-Jun-22
47.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2022	06-Jul-22
48.	Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022	05-Jul-22
49.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022	05-Jul-22
50.	Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap II Tahun 2022	14-Jul-22
51.	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022	08-Jul-22
52.	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022	08-Jul-22
53.	Obligasi Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022	27-Jul-22
54.	Sukuk Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022	27-Jul-22
55.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022	26-Jul-22
56.	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022	05-Aug-22
57.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022	05-Aug-22

2) Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian rekening *sinking fund* ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok *Medium Term Notes* kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang.

3) Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan Perjanjian Perwalianamanatan, dokumen pengikatan lainnya serta surat-surat jaminan yang terkait dengan penerbitan Efek bersifat Utang.

5. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwalianamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

6. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
 - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020; atau
 - Atas permintaan Pemegang Obligasi;
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Total aset	1.652.838.717	1.678.097.734	1.610.065.344
Total liabilitas	1.366.573.452	1.386.310.930	1.347.101.486
Total ekuitas	286.265.265	291.786.804	229.466.882

Laba Rugi Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto	64.613.523	114.094.429	93.584.113
Pendapatan Premi – neto	854.771	1.043.075	878.710
Pendapatan Operasional lainnya	20.828.315	41.215.807	38.099.755
Laba Operasional	31.145.620	41.144.382	29.778.701
Laba Sebelum Beban Pajak	31.224.279	40.992.065	29.993.406
Laba Tahun Berjalan	24.876.271	30.755.766	18.660.393

Rasio Penting

(dalam %)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
<i>Capital Adequate Ratio (CAR)</i>	25,06	27,20	20,10
<i>Return On Asset (ROA)</i>	3,76	2,60	2,10
<i>Return On Equity (ROE)</i>	19,36	16,00	11,6
<i>Net Interest Margin</i>	8,24	7,70	6,90
<i>Non Performing Loan Ratio (Gross)</i>	3,26	3,00	2,88

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Investment Services Division

Trust Team

Gedung BRI II Lt.30

Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46

Jakarta 10210 - Indonesia

Email: tcsoperation@corp.bri.co.id

Tel. (021) 250 0124, 575 8143

Faks. (021) 251 0316, 575 2444

www.bri.co.id

XIII. TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum, sebagai berikut:

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga atau badan usaha Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, kecuali pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Sehubungan dengan anjuran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus corona (covid-19), maka proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dapat diperoleh *softcopy*-nya melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali melalui email atau faksimili dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai tanggal 4 Januari 2023 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI Nomor SP-102/OBL/KSEI/0922 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI pada tanggal 21 September 2022. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.

- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga serta pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku melalui email kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh FPPO.

Penjamin Emisi Obligasi serta Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Dalam melakukan penjatahan, Manager Penjatahan akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka untuk keperluan penjatahan yang mengajukan lebih dari satu FPPO akan diperlakukan sebagai satu pesanan. Tanggal akhir penjatahan adalah tanggal 6 Januari 2023.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya 9 Januari 2023 yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT MNC Sekuritas
 PT Bank MNC Internasional Tbk
 Cabang Kebon Sirih
 No. Rekening: 100010000108611
 a.n.: PT MNC Sekuritas

PT Sucor Sekuritas
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Cabang Bursa Efek Indonesia
 No. Rekening: 1040001016752
 a.n.: PT Sucor Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2023. (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar dan menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada rekening Perseroan.

10. Distribusi Obligasi secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2 lampiran 11; dan
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- i. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - ii. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - iii. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - iv. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya atau dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum:

- a. Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.

Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui transfer ke rekening pemesan yang bersangkutan oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.

- b. Jika uang pembayaran telah diterima oleh Perseroan dan Pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, maka Penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya atau pemesan tidak memberikan konfirmasi untuk instruksi transfer dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak pengumuman keputusan penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 4 - 5 Januari 2023 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi melalui *e-mail* berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)

MNC Financial Center Lt. 15-16

Jl. Kebon Sirih No. 21-27

Jakarta 10340

Telepon: (021) 2980 3111

Faksimili: (021) 3983 6868

Website: www.mncsekuritas.id

Email: ib.mncs@mncgroup.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lt. 12

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220

Telepon: (021) 8067 3000

Faksimile: (021) 2788 9288

Website: www.sucorsekuritas.com

Email: fi@sucorsekuritas.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Rekan.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Jakarta, 30 Desember 2022

Kepada Yang Terhormat
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
MNC Financial Center, Lantai 21
Jl. Kebon Sirih No.21 - 27
Jakarta Pusat 10340

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT MNC Kapital Indonesia Tbk dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022”

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan dan berkantor pusat di MNC Financial Center, Lantai 21, Jl. Kebon Sirih No.21 – 27, Jakarta Pusat 10340 bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan “**Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022**” dengan nilai Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar **Rp.450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh milyar Rupiah)**, yang merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar Rupiah), dimana sebesar Rp.346.880.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yang terdiri dari :

- a. Obligasi Seri A sebesar Rp.231.280.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh juta Rupiah), jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga tetap 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun;
- b. Obligasi Seri B sebesar Rp.60.425.000.000,00 (enam puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah), jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun;
- c. Obligasi Seri C sebesar Rp.55.175.000.000,00 (lima puluh lima milyar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah), jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 12% (dua belas persen) per tahun;

Sisa dari nilai Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.103.120.000.000,00 (seratus tiga milyar seratus dua puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Satuan pemindahbukuan sebesar Rp.1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya, dan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu **idBBB+ (Triple B Plus)** berdasarkan Surat Pefindo No. RC-955/PEF-DIR/IX/2022 tanggal 20 September 2022. Pemeringkatan tersebut telah mencakup keseluruhan nilai Pokok Obligasi yang direncanakan, yaitu sejumlah Rp.750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar Rupiah) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 POJK No.49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020. Obligasi ini akan dijamin dengan jaminan khusus, yaitu saham-saham yang dimiliki Perseroan dalam PT MNC Digital Entertainment Tbk, yang pada Tanggal Emisi dan pada setiap saat sejak

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

ditandatangani Akta Gadai Saham nilai jaminan selalu sebesar sekurang-kurangnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Pokok Obligasi (selanjutnya disebut “**PUB Obligasi III Tahap I**”).

Sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I tersebut kami, Konsultan Hukum Jusuf Indradewa, S.H. & Partners, selaku konsultan hukum independen dalam hal ini diwakili oleh Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H., dengan STTD.KH-21/PM.22/2018 telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No.074/MNCKI/DIR/IX/22 tanggal 1 September 2022, untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (“**Uji Tuntas**”) yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (“**Pendapat Hukum**”) mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari PUB Obligasi III Tahap I ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal dan dengan berpedoman pada Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

PUB Obligasi III Tahap I ini telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), sebagaimana ternyata dalam surat BEI No.S-09628/BEI/PP2/11-2022 tanggal 11 November 2022, Perihal : Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan sepenuhnya pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum No.041-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-H/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas**”).

Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum No. 042-R8/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 menjadi tidak berlaku lagi.

Asumsi

Dalam menjalankan Uji Tuntas untuk kepentingan Pendapat Hukum ini kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.
- b. Tanda tangan yang terdapat pada suatu dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopinya atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Pihak-pihak yang menandatangani dokumen-dokumen milik pihak ketiga yang tidak termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen tersebut.
- d. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis ataupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini.
- e. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan, atau para Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan kepada Perseroan, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Kualifikasi

Pendapat Hukum yang didasarkan pada Laporan Uji Tuntas diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi negara lain dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat kemungkinan mengenai adanya fakta-fakta, data-data, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang tidak kami ketahui tidak mengakibatkan Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi aspek hukum yang disebutkan didalamnya dan tidak meliputi aspek-aspek lainnya yang mungkin secara implisit dianggap termasuk didalamnya.
4. Pendapat Hukum ditujukan semata-mata dalam rangka PUB Obligasi III Tahap I dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum independen atas Pendapat Hukum kami adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan Uji Tuntas dan asumsi-asumsi dan kualifikasi-kualifikasi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut :

1. Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Bhakti Capital Indonesia berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian No.100 tanggal 15 Juli 1999, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-16030 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 September 1999; didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH 09.03/III/2000; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No.2097.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami perubahan-perubahan, terakhir Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 33 tanggal 15 Agustus 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022**”), yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-0059072.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162906.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76, Tambahan No.032524.

Akta mana adalah mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yaitu penyesuaian deskripsi bidang usaha serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Tahun 2020 (perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan) dan penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan

3. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pendirian dan perubahan-perubahannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu antara lain Peraturan No.IX.J.1, POJK No.33/POJK.04/2014, POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020.

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No.33 tanggal 15 Agustus 2022 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahnya.

4. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022, adalah sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi dan Penunjang Usaha Lainnya, Pendidikan, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Jasa Lainnya, Perdagangan besar, Industri Pengolahan, Pengangkutan dan Pergudangan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Konstruksi, serta Real Estat.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, meliputi:
- i. Aktivitas perusahaan *holding*.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis, meliputi:
- i. Periklanan;
 - ii. Penelitian Pasar;
 - iii. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya ytdl;
 - iv. Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis;
 - v. Aktivitas arsitektur;
 - vi. Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis;
 - vii. Aktivitas desain konten kreatif lainnya.
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, dan Penunjang Usaha Lainnya, meliputi:
- i. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan;
 - ii. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya;
 - iii. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat perekaman gambar dan *editing*;
 - iv. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya ytdl;
 - v. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pendidikan, meliputi:
- i. Jasa pendidikan manajemen dan perbankan;
 - ii. Pendidikan lainnya swasta.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang Informasi dan Komunikasi, meliputi:
 - i. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Jasa Lainnya, meliputi:
 - i. Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya.
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Besar, meliputi:
 - i. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - ii. Perdagangan besar mobil baru;
 - iii. Perdagangan besar sepeda motor baru;
 - iv. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
 - v. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi.
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang Industri Pengolahan, meliputi:
 - i. Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan;
 - ii. Industri pendinginan/pengesan ikan;
 - iii. Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya;
 - iv. Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil;
 - v. Industri furnitur dari kayu;
 - vi. Industri mesin untuk keperluan umum lainnya;
 - vii. Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur);
 - viii. Industri barang bangunan dari kayu;
 - ix. Industri barang bangunan prafabrikasi dari kayu;
 - x. Industri barang anyaman dari rotan dan bambu;
 - xi. Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu;
 - xii. Industri alat dapur dari kayu, rotan, dan bambu;
 - xiii. Industri barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya ytdl;
 - xiv. Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - xv. Industri minyak mentah dan lemak nabati;
 - xvi. Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit;
 - xvii. Industri minyak goreng kelapa.
- i. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi:
 - i. Pergudangan termasuk aktivitas *cold-storage*;
 - ii. Angkutan darat lainnya untuk penumpang.
- j. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, meliputi:
 - i. Pertanian termasuk pertanian padi hibrida, pertanian padi inbrida, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis;
 - ii. Peternakan termasuk pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya sapi perah, budidaya ayam ras pedaging, budidaya ayam ras petelur, pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya, pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya;
 - iii. Perikanan termasuk penangkapan pisces/ikan bersirip di laut, penangkapan biota air lainnya di laut, penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat, penangkapan biota air lainnya di perairan darat, pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung atau karamba jaring tancap;
 - iv. Perkebunan termasuk perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan buah oleaginous lainnya;
 - v. Kehutanan termasuk pengusahaan hutan bukan kayu lainnya, pemanenan kayu, usaha pemungutan kayu, usaha kehutanan lainnya, pemungutan bukan kayu lainnya.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

- k. Menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi, meliputi:
 - i. Penyiapan lahan;
 - ii. Pembongkaran;
 - iii. Konstruksi termasuk konstruksi gedung hunian, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung lainnya, konstruksi bangunan sipil jalan, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi bangunan sipil lainnya, konstruksi khusus lainnya ytdl;
 - iv. Instalasi termasuk instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, instalasi mekanikal, instalasi saluran air (*plumbing*), instalasi pemans dan geothermal, instalasi pendingin dan ventilasi udara dan instalasi konstruksi lainnya ytdl.

- l. Menjalankan usaha-usaha di bidang Real Estat, meliputi:
 - i. Real estat termasuk real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan real estat atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

- m. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya termasuk jasa investasi, mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat menjalankan usaha lainnya (penunjang) yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2020**”).

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perijinan yang telah diperolehnya sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut.

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Perseroan adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan investasi.

5. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 *Juncto* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Tanggal 31 Oktober 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	42.618.850.927	4.261.885.092.700,00
Modal Disetor	42.618.850.927	4.261.885.092.700,00
Sisa Saham Dalam Portepel	107.381.149.073	10.738.114.907.300,00

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Investama Tbk (sekarang bernama PT MNC Asia Holding Tbk)	21.228.044.760	2.122.804.476.000,00	50,31
Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	390.000.000.000,00	9,24
HT Invesment Development	3.708.705.000	370.870.500.000,00	8,79
UOB Kay Hian (Hongkong)	3.114.935.800	311.493.580.000,00	7,38
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	10.241.707.767	1.024.170.776.700,00	24,28
	42.193.393.327	4.219.339.332.700,00	100,00
Saham <i>Treasury</i>	425.457.600	42.545.760.000	0,00
Jumlah	42.618.850.927	4.261.885.092.700,00	100,00

Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan “Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT MNC Kapital Indonesia Tbk tanggal 31 Oktober 2022” serta keterangan dari Perseroan, jumlah saham Perseroan yang dimiliki Anak Perusahaan adalah sebesar 425.457.600 saham, dengan perincian yang dimiliki PT MNC Sekuritas (“MNCs”) adalah sejumlah 415.022.600 saham dan dimiliki oleh PT Modal Anak Bangsa (“MAB”) sejumlah 10.435.000 saham.

Disamping yang dimiliki oleh MNCS dan MAB sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 22 Desember 2020 PT MNC Teknologi Nusantara (“MTN”) membeli/memiliki saham Perseroan sejumlah 51.300.000 saham dan PT FM Digital Solution (“FM”) membeli/memiliki saham Perseroan sejumlah 21.834.000 saham.

Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 UUPU, maka saham Perseroan yang dibeli oleh Anak Perusahaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai saham *treasury* Perseroan, karena saham *treasury* diperoleh apabila dilakukan pembelian saham Perseroan oleh Perseroan tersebut dan sahamnya dikuasai oleh Perseroan.

Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPU”) mengatur bahwa Perseroan dilarang untuk mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan (*cross holding*), dengan demikian kepemilikan saham Perseroan oleh Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud diatas terqualifikasi sebagai larangan yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 UUPU. Namun demikian saham Perseroan yang dimiliki oleh Anak Perusahaan saat ini telah dijual seluruhnya kepada pihak yang berwenang menerima pengalihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Bursa Efek, yaitu saham Perseroan yang dimiliki oleh MNCS telah dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 9 Desember 2022, saham Perseroan yang dimiliki oleh MAB telah dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 5 Desember 2022, saham Perseroan yang dimiliki MTN telah dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 10 Maret 2022, dan saham Perseroan yang dimiliki oleh FM telah dijual seluruhnya melalui Bursa Efek pada tanggal 10 Maret 2022. Dengan dijualnya saham-saham tersebut maka sudah tidak ada lagi *cross holding* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 UUPU.

Saham-saham yang telah dijual (kepada pihak yang berwenang menerima pengalihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Bursa Efek tersebut), memberikan kepada pihak yang membelinya hak-hak penuh sebagai pemegang saham Perseroan, seperti hak untuk diperhitungkan dalam menentukan jumlah kourum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPU dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak untuk menerima dividen.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Pada saat saham-saham Perseroan masih dimiliki oleh MNCS, MAB, MTN dan FM, karena saham tersebut bukan merupakan saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan (bukan saham *treasury*), maka dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan, saham-saham tersebut masih diperhitungkan untuk menentukan jumlah kourum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPU dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, masih memiliki hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan sehubungan dengan saham-saham Perseroan yang pernah dimiliki oleh MNCS, MAB, MTN dan FM, maka Perseroan menyatakan berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh terhadap segala kerugian yang ditimbulkan karena gugatan tersebut, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Perseroan dalam Surat Pernyataannya tertanggal 14 Desember 2022.

Saham Perseroan untuk pertama kali dibeli oleh Anak Perusahaan adalah pada tanggal 13 Desember 2016, yaitu oleh MNCS dan sejak RUPS Tahunan Tahun 2016 sampai dengan RUPS Tahunan Tahun 2022 Perseroan tidak membagikan dividen, dengan demikian sejak MNCS, MAB, MTN dan FM memiliki/menguasai saham Perseroan tidak pernah menerima dividen.

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 *Juncto* Daftar Pemegang Saham Per tanggal 12 Desember 2022, yang diambil dari Website KSEI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 12 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	42.618.850.927	4.261.885.092.700,00
Modal Disetor	42.618.850.927	4.261.885.092.700,00
Sisa Saham Dalam Portepel	107.381.149.073	10.738.114.907.300,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Investama Tbk (sekarang bernama PT MNC Asia Holding Tbk)	21.228.044.760	2.122.804.476.000,00	49,81
Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	390.000.000.000,00	9,16
HT Invesment Development	3.708.705.000	370.870.500.000,00	8,70
UOB Kay Hian (Hongkong)	3.004.211.300	300.421.130.000,00	7,05
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	10.777.889.867	1.077.788.986.700,00	25,28
Jumlah	42.618.850.927	4.261.885.092.700,00	100,00

Sebagian saham milik PT MNC Investama Tbk (sekarang bernama PT MNC Asia Holding Tbk) dalam Perseroan saat ini sedang dijaminkan dengan gadai saham kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 (“**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**”) dan telah diikat dengan Akta Perjanjian Gadai Saham Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No.75 tanggal 29 Juni 2018, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara PT MNC Investama Tbk selaku Pemberi Gadai dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam kedudukannya sebagai Wali Amanat dan dalam kedudukannya sebagai Penerima Jaminan. Nilai penjaminan adalah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari nilai pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, dimana nilai pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar Rupiah).

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Individu yang menjadi Pemilik Manfaat (*Ultimate Beneficial Owner/UBO*) dari Perseroan adalah **Hary Tanoesoedibjo** dan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”).

Perseroan telah melaporkan UBO sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 18 ayat 1 Perpres No. 13/2018 kepada Instansi Berwenang (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sebagaimana ternyata dalam bukti Informasi Penyampaian Data tanggal 1 Juli 2020 dan pengkinian informasi UBO sebagaimana ternyata dalam bukti Informasi Penyampaian Data (Perubahan) tanggal 3 November 2022.

6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 20 Juli 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0044789 tanggal 16 Agustus 2022 dan didaftarkan dalam Perseroan No. AHU-0160922.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Mashudi Hamka
Direktur : Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Ageng Purwanto
Direktur : Peter Fajar
Direktur : Oerianto Guyandi
Direktur : Muhammad Suhada
Direktur : Mahdan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wito Mailoa
Komisaris : Tien
Komisaris Independen : Sukisto

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”) serta menjabat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

7. Susunan Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Edward Kennetze

Pembentukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Komite Audit

Ketua : Sukisto (Komisaris Independen)
Anggota : Riza Satria
Anggota : Andrea Frans Tambunan

Pembentukan Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua dan selaku Anggota : Sukisto (Komisaris Independen)
Anggota : Wito Mailoa
Anggota : Angelina Anggraeni

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Unit Audit Internal

Ketua Audit Internal : M.Ilham Abrar

Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan tanggal 31 Mei 2018, dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal yang sama.

Pembentukan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan Perseroan tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami, tidak terdapat pelanggaran pemenuhan Perseroan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan.

9. Aspek ketenagakerjaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS 3 (tiga) periode terakhir. Telah melakukan pemenuhan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan berdasarkan Undang-Undang No.78 Tahun 1981 (“**WLKP**”), telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2022 yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 13 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, dengan No. Pengesahan: 1131/PP/L/XII/D/2021. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 3 Januari 2024.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perseroan untuk penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan jabatan Direktur Utama (Mashudi Hamka) telah mendapat pengesahan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/37008/PK.04.00/IX/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris Pada PT MNC Kapital Indonesia Tbk. tertanggal 23 September 2022, yang berlaku dari tanggal 23 September 2022 sampai dengan 30 November 2023.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan tidak memiliki harta tetap berupa tanah dan/atau bangunan. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan Perseroan berupa harta bergerak (kendaraan bermotor) telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa, sedang tidak dijamin kepada pihak ketiga serta Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan pula oleh Perseroan dalam Surat Pernyataannya tertanggal 20 September 2022, harta kekayaan Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

Perseroan telah melakukan pendaftaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa Merek “MNC Financial Services” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 14 September 2028 dan ciptaan “MNC Financial Services” dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 16 Desember 2061.

11. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang masih berlaku telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan, telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya mengikat Perseroan. Sehubungan dengan rencana PUB Obligasi III Tahap I, berdasarkan hasil uji tuntas kami, Perseroan (i) tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur dan/atau pemberitahuan kepada kreditur Perseroan maupun kreditur Anak Perusahaan dan (ii) tidak memiliki perjanjian-perjanjian yang memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat menghambat rencana PUB Obligasi III Tahap I dan/atau penggunaan dana hasil PUB Obligasi III Tahap I Perseroan serta yang berpotensi merugikan hak pemegang saham publik dan pemegang Obligasi III Tahap I.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan klarifikasi kami kepada Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban kepada kreditur selama perjanjian kredit berlaku.

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Ruang MNC Financial Center antara Perseroan dengan PT MNC Land Tbk, transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK No. 42/2020, karena nilai transaksi tersebut tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan BABP transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 42/2020, karena merupakan pinjaman yang diterima langsung dari bank.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Sesuai dengan 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 atas Transaksi Afiliasi tersebut, Perseroan wajib melaporkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal Transaksi Afiliasi. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan Perseroan belum melaporkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada OJK. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 27 ayat (4) POJK No. 42/2020 Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa berupa (a) peringatan tertulis; (b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) pembatasan kegiatan usaha; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) pencabutan izin usaha; (f) pembatalan persetujuan; dan/atau (g) pembatalan pendaftaran.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan pula dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 21 November 2022, Perseroan berkomitmen untuk melaporkan Transaksi Afiliasi kepada OJK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan.

12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan pula dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 20 September 2022, Perseroan (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (vii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi, (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, kecuali untuk Perkara Perdata No.128/PDT.G/2019/PN.JKT.PST selaku Tergugat dan saat ini sedang dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan belum ada putusan terhadapnya.

Perkara yang saat ini dihadapi Perseroan tersebut tidak berpengaruh/berdampak negatif secara material terhadap jalannya kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan maupun rencana PUB Obligasi III Tahap I ini.

13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 20 September 2022, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, kecuali Oerianto Guyandi selaku pribadi

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

saat ini sedang terlibat dalam perkara perdata yang bersifat tidak material, dan perkara tersebut tidak berdampak bagi kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I.

14. Dalam rangka PUB Obligasi III Tahap I ini, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut :
- a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahun 2022 No.35 tanggal 21 September 2022 **Jis. (i)** Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahun 2022 No. 9 tanggal 2 November 2022, **(ii)** Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahun 2022 No.64 tanggal 21 November 2022 dan **(iii)** Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahun 2022 No.58 tanggal 27 Desember 2022 (“**Pernyataan PUB**”), oleh Perseroan selaku Emiten, yang ketiganya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
 - b. Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No.36 tanggal 21 September 2022 **Jis. (i)** Akta Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No.10 tanggal 2 November 2022, **(ii)** Akta Addendum II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No.65 tanggal 21 November 2022 dan **(iii)** Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No.59 tanggal 27 Desember 2022 (“**Perjanjian Perwaliananatan Obligasi**”), oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, yang ketiganya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
 - c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No.37 tanggal 21 September 2022, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan **Jis. (i)** Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No.11 tanggal 2 November 2022, **(ii)** Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No.66 tanggal 21 November 2022 dan **(iii)** Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No.60 tanggal 27 Desember 2022, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT MNC Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas masing-masing selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**”).
 - d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No.38 tanggal 21 September 2022 (“**Perjanjian Agen Pembayaran**”), oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Kustodian Sentral Efek, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
 - e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang No.SP-102/OBL/KSEI/0922 tanggal 21 September 2022 (“**Perjanjian Pendaftaran Efek**”), oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Kustodian Sentral Efek.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

- f. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 No.61 tanggal 27 Desember 2022, oleh Perseroan selaku Emiten, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Pernyataan dan perjanjian-perjanjian tersebut diatas seluruhnya telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya untuk Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi telah sesuai dengan POJK No.20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Akta Addendum III, yaitu tanggal 27 Desember 2022. Perjanjian Agen Pembayaran berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Agen Pembayaran yaitu tanggal 21 September 2022, namun tugas Agen Pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran berlaku sejak didaftarkanya Obligasi di KSEI. Perjanjian Pendaftaran Efek berlaku terhitung sejak didistribusikannya Obligasi oleh KSEI.

15. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, untuk Obligasi ini sebesar Rp.346.880.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) oleh Penjamin Emisi Obligasi, dalam pengertian bahwa apabila masih terdapat Obligasi yang ditawarkan yang tidak habis terjual kepada Masyarakat, maka sisa Obligasi tersebut wajib dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Obligasi pada Tanggal Pembayaran dengan Harga Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing, dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.103.120.000.000,00 (seratus tiga milyar seratus dua puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) oleh Penjamin Emisi Obligasi.

Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut Penjamin Emisi Obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Kepastian nilai Pokok Obligasi dan masing-masing seri Obligasi akan ditentukan 1 (satu) hari sebelum Tanggal Penjatahan dan akan dituangkan dalam perubahan pernyataan PUB, Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Pengakuan Utang, yang akan dibuat 1 (satu) hari sebelum tanggal penjatahan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

16. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi maka Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan dengan maksud untuk pelunasan tidak memiliki hak untuk menghadiri RUPO, tidak memiliki hak suara, tidak berhak atas Bunga Obligasi.
17. PUB Obligasi III Tahap I ini akan dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam PT MNC Digital Entertainment Tbk ("**Saham MSIN**"), dengan nilai jaminan setiap saat sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi. Sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Saham MSIN yang akan digadaikan untuk Obligasi adalah benar milik Perseroan dan tidak sedang dalam suatu perkara atau sengketa dan tidak dijadikan agunan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pihak lain. Perseroan akan menandatangani akta jaminan gadai saham selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.

Penjaminan saham MSIN tidak wajib mendapat persetujuan RUPS Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT, mengingat saham-saham MSIN milik Perseroan yang akan dijamin tersebut nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.

18. Dalam rangka PUB Obligasi III Tahap I ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari :

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

- a. Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 12 September 2022, yang memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut : (i) memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mendapatkan pendanaan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia” dengan target dana yang akan dihimpung sebesar Rp.750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) (“Obligasi”) atau jumlah lain yang disetujui oleh Direksi Perseroan, yang akan diterbitkan dalam beberapa tahap penerbitan dengan besaran sesuai dengan keputusan Direksi dan selanjutnya mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mencatatkan Obligasi tersebut untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang seluruhnya dilakukan dengan syarat, ketentuan dan tata cara yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan tunduk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; (ii) menyetujui untuk menentukan penggunaan yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi tersebut, sebagaimana dianggap baik oleh Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam PUB II Tahap I Tahun 2018, sebagaimana ternyata dalam suratnya No.B.804-INV/TCS/AET/11/2022 tanggal 25 November 2022, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (i) penerbitan PUB III Tahap I tidak akan mempengaruhi kemampuan Emiten atas pembayaran bunga maupun pokok Obligasi; (ii) Emiten menjaga rasio keuangan dan memelihara keadaan keuangan Emiten berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7.3 huruf (b) Perjanjian Perwaliamanatan.
19. Perseroan dan Wali Amanat, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”) dan hubungan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (3) UUPM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
 20. Perseroan dan PT Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo), sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
 21. Antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sedangkan antara Perseroan dengan PT Sucor Securitas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
 22. Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 September 2022, Perseroan dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun tidak pernah mengalami gagal bayar, yaitu suatu kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam POJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”).
 23. Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan memiliki peringkat idBBB+ (*Triple B Plus*) sebagaimana ternyata dalam Surat PT Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo) No.RC-955/PEF-DIR/IX/2022 tanggal 20 September 2022. Sehingga, Efek yang diterbitkan dalam PUB Obligasi III Tahap I ini telah memenuhi persyaratan Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No.36/2014, yaitu merupakan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat)

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemingkat Efek.

Pemingkatan tersebut telah mencakup keseluruhan nilai PUB Obligasi III yang ditargetkan yaitu sejumlah maksimum Rp.750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar Rupiah), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

24. Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 45% kepada PT MNC Sekuritas yang selanjutnya akan digunakan sebagai tambahan modal kerja yaitu untuk mendukung ekspansi usaha perusahaan berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk transaksi perdagangan efek.
2. Sekitar 33% kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pemberian pembiayaan berupa anjak piutang dan sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan alat alat berat seperti eskavator, loader, dozer, crane, dan lain-lain yang digunakan oleh debitur-debitur PT MNC Guna Usaha Indonesia di sektor Infrastruktur, perkebunan dan pertambangan serta sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan alat-alat kesehatan dan mesin industri bagi debitur PT MNC Guna Usaha Indonesia yang bergerak di industri alat kesehatan dan industri manufaktur, baik secara pembelian secara angsuran, sewa pembiayaan dan/atau sale and leaseback yang telah dijalankan dan terus dikembangkan sesuai dengan permintaan pelanggan/pihak ketiga di kemudian hari.
3. Sekitar 22% kepada PT MNC Finance yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembiayaan kepada konsumen berupa pembiayaan mobil, rumah dan anjak piutang yang telah dijalankan dan terus dikembangkan sesuai dengan permintaan pelanggan/pihak ketiga di kemudian hari.

Berapapun dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Obligasi ini, maka jumlah pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan akan menggunakan persentase yang sama seperti di atas. Selanjutnya, dalam hal dana tersebut telah dikembalikan oleh Entitas Anak kepada Perseroan, maka akan digunakan Perseroan untuk melunasi PUB Obligasi III Tahap I.

Penggunaan dana hasil PUB Obligasi III Tahap I sebagaimana tersebut diatas, terkualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No.42/2020”), yaitu transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh Sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 POJK No.42/2020, Perseroan wajib melaporkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada OJK pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

Apabila pada saat realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi III Tahap I sebagaimana tersebut di atas, termasuk sebagai Transaksi Benturan Kepentingan, maka transaksi tersebut terkualifikasi sebagai Transaksi Benturan Kepentingan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.1 POJK No.42/20, yaitu transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Terkendali. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) POJK No.42/2020, Perseroan wajib melaporkan Transaksi Benturan Kepentingan tersebut kepada OJK pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal Transaksi Benturan Kepentingan.

Apabila pada saat realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi III Tahap I sebagaimana tersebut diatas, nilai transaksi adalah sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan terkini dari : (i) Laporan Keuangan yang diaudit, (ii) laporan keuangan triwulanan yang disertai laporan akuntan atas hasil revidu ataupun audit, atau (iii) laporan keuangan interim selain angka (ii) yang diaudit, maka transaksi tersebut terqualifikasi sebagai Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”), yaitu transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) POJK No.17/2020, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada OJK pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal Transaksi Material.

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil PUB Obligasi III Tahap I secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan disampaikan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi III Tahap I telah direalisasikan. Perseroan untuk pertama kali wajib membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana pada tanggal laporan terdekat (30 Juni dan 31 Desember) setelah tanggal penyerahan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk. Perseroan juga wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS Tahunan.

25. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPO. Hasil RUPO wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.
26. Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada Anak Perusahaan sebagai berikut:
 - a. PT MNC Asset Management (“MNCAM”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MNCAM;
 - b. PT MNC Sekuritas (“MNCS”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MNCS;
 - c. PT MNC Finance (“MNCF”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MNCF;

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

- d. PT MNC Life Assurance (“**MNCL**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MNCL;
- e. PT MNC Asuransi Indonesia (“**MNCAI**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MNCAI;
- f. PT MNC Guna Usaha Indonesia (“**MNCGU**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MNCGU;
- g. PT Bank MNC Internasional Tbk (“**BABP**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 48,99% (empat puluh delapan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh BABP;
- h. PT FM Digital Solution (“**FM**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh FM;
- i. PT MNC Teknologi Nusantara (“**MTN**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MTN;
- j. PT Modal Anak Bangsa (“**MAB**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MAB.
- k. PT Sistem Informasi Aplikasi Pembiayaan (“**SIAP**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh SIAP;
- l. PT Medan Nusantara Propertindo (“**MDNP**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma Sembilan puluh dua persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MDNP;
- m. PT Riau Nusantara Propertindo (“**RINP**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar merupakan 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh dua persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh RINP;
- n. PT Semarang Nusantara Propertindo (“**SGNP**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh dua persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh SGNP;
- o. PT Motion Crypto Technology (“**MCT**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh dua persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MCT;

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

- p. PT Motion Digital Technology (“**MDT**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MDT;
- q. PT MNC Insurance Broker (“**MIB**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MIB;
- r. PT MNC Modal Ventura (“**MNV**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MNV;
- s. Winfly Ltd, berkedudukan di British Virgin Island, dengan prosentase kepemilikan sebesar 100% (seratus persen) dari modal saham Winfly Ltd;
- t. Lafite Assets Ltd, berkedudukan di British Virgin Island, dengan prosentase kepemilikan sebesar 100% (seratus persen) dari modal saham Lafite Assets Ltd;
- u. Motion Digital Ltd, berkedudukan di British Virgin Island, dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal saham Motion Digital Ltd;
- v. PT MNC Digital Entertainment Tbk (“**MSIN**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan prosentase kepemilikan sebesar 1,09 (satu koma nol sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MSIN.

Kecuali Winfly Ltd, Lafite Assets Ltd, Motion Digital Ltd yang merupakan badan hukum asing, Perseroan telah melakukan penyertaan di Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Pemeriksaan Hukum terhadap Winfly Ltd, Lafite Assets Ltd, Motion Digital Ltd telah dilakukan oleh konsultan hukum independen yang berwenang sesuai dengan yurisdiksi hukum dimana Winfly Ltd, Lafite Assets Ltd, Motion Digital Ltd didirikan, yaitu oleh O’Neal Webster, sebagaimana tercantum dalam Legal Opinion-nya masing-masing tertanggal 21 November 2022, No.Ref : VK/CG/25235, No.Ref : VK/CG/25236, dan No.Ref : VK/CG/25237.

- 27. a. MNCAM yang didirikan dengan nama PT Bhakti Asset Management adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar MNCAM telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar MNCAM yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.
- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No. 22 tanggal 28 Juni 2019, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034021.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0292562 tanggal 1 Juli 2019, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101768.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCAM adalah sebagai berikut :

Permodalan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	75.000.000	75.000.000.000,00
Modal Disetor	75.000.000	75.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	225.000.000	225.000.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	74.997.500	74.997.500.000,00	99,99
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	2.500	2.500.000,00	0,01
Jumlah	75.000.000	75.000.000.000,00	100,00

Struktur permodalan MNCAM baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MNCAM dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No. 6 tanggal 5 Maret 2021 (“**Akta No.6 tanggal 5 Maret 2021**”), dibuat di hadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0152426 tanggal 9 Maret 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044377.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 9 Maret 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Frery Kojongian
 Direktur : Yong Julia
 Direktur : Edwin Julianus Sebayang

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Stein Maria Schouten
 Komisaris Independen : Risna Muhti

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

- d. Maksud dan tujuan MNCAM sebagaimana tercantum dalam Akta No.6 tanggal 5 Maret 2021, adalah berusaha dan bergerak dalam bidang pengelolaan portofolio efek untuk para nasabah perseorangan maupun instansi.
Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan MNCAM adalah Jasa Pengelolaan Investasi (Manager Investasi).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar MNCAM (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) belum disesuaikan dengan KBLI 2020. Tidak terdapat konsekuensi hukum dari belum disesuaikannya Pasal 3 Anggaran Dasar MNCAM dengan KBLI 2020.

MNCAM telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MNCAM sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar MNCAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan MNCAM tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat hukum ini MNCAM tidak memiliki harta kekayaan berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan). Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan MNCAM berupa harta bergerak (kendaraan bermotor) telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga serta telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

MNCAM telah melakukan pendaftaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu berupa merek “MNC asset management” dan “MNC DUIT”, dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2028.

- f. MNCAM telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS 3 (tiga) periode terakhir.

MNCAM telah memiliki Peraturan Perusahaan, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.215/PHIJSK-PK/PP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, dan berlaku terhitung sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019. Berdasarkan keterangan MNCAM, sampai dengan saat ini MNCAM masih menggunakan Peraturan Perusahaan tersebut dan telah membuat Peraturan Perusahaan baru yang sedang dalam proses pengesahan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Nomor Dokumen #220823040.

- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNCAM tertanggal 20 September 2022, MNCAM tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit Suratatau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi, kecuali Perkara Pidana No.64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst selaku Terdakwa Korporasi, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses permohonan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Perkara Pidana sebagaimana sebagaimana tersebut di atas tidak berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha MNCAM dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

- h. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 20 September 2022, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi, tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MNCAM dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

28. a. MNCS yang didirikan dengan nama PT Bhakti Securities adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar MNCS telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar MNCS yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 06 tanggal 29 Desember 2015 (“**Akta No. 06 tanggal 29 Desember 2015**”), dibuat di hadapan Sendy Yudhawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah (i) mendapat mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0949104.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0992238 tanggal 30 Desember 2015, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3599717.AH.01.011.Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13, Tambahan No. 2521, Tahun 2016 *Junctis* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 21 Februari 2022, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0117634 tanggal 22 Februari 2022, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0036848.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 26 tanggal 21 Februari 2022, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0114479 tanggal 22 Februari 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0035990.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCS adalah sebagai berikut :

Permodalan	Nilai Nominal Rp 1.000,000,00 (Satu Juta Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	430.000.000	430.000.000.000,00
Modal Disetor	430.000.000	430.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	570.000.000	570.000.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,000,00 (Satu Juta Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	429.998.000	429.998.000.000,00	99,99
Koperasi Karyawan MNC Group	2.000	2.000.000,00	0,01
Jumlah	430.000.000	430.000.000.000,00	100,00

Riwayat struktur permodalan MNCS, baik yang mengenai modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam 2 (dua) tahun terakhir, adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCS dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.1 tanggal 2 Agustus 2021, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0435886 tanggal 10 Agustus 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136132.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 19 Mei 2022, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0013839 tanggal 19 Mei 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093204.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Mei 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCS yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	:	Susy Meilina
Direktur	:	Fifi Virgantria, Bong
Direktur	:	Marlina
Direktur	:	Ronald Adrian Tirtabudi
Direktur	:	A Fen

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Henry Suparman
Komisaris	:	Agustinus Wishnu Handoyono
Komisaris Independen	:	Alpino Kianjaya

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCS tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan MNCS sebagaimana tercantum dalam Akta Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 5 Agustus 2008, dibuat dihadapan Wahyu Nurani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No.AHU-76905.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0099580.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 adalah bergerak dalam bidang Perusahaan Efek.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan MNCS adalah Penjamin Emisi Efek.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar MNCS (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) belum disesuaikan dengan KBLI 2020. Tidak terdapat konsekuensi hukum dari belum disesuaikannya Pasal 3 Anggaran Dasar MNCS dengan KBLI 2020.

MNCS telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MNCS sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar MNCS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan MNCS tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCS tidak memiliki harta kekayaan berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan). Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan MNCS berupa harta bergerak (kendaraan bermotor) telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijamin kepada pihak ketiga dan atas kendaraan-kendaraan tersebut tidak diasuransikan.

MNCS telah melakukan pendaftaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

yaitu berupa merek “MNC Sekuritas” dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2028.

Saham milik MNCS dalam PT MNC Land Tbk sejumlah 357.142.900 (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus) lembar saham saat ini sedang dijaminakan di PT Bank Mayapada International Tbk (“**Bank Mayapada**”) guna menjamin utang MNCS kepada Bank Mayapada berdasarkan Akta Surat Hutang No. 2 tanggal 1 November 2018, yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Persesuaian No. 0023/Pers/AOO/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, dan telah diikat dengan Akta Gadai Saham No.3 tanggal 1 November 2018, dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

- f. MNCS telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS 3 (tiga) periode terakhir.

MNCS telah memiliki Peraturan Perusahaan, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep.708/PHIJSK-PK/PP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020, dan berlaku terhitung sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022. Sampai dengan saat ini MNCS belum memiliki Peraturan Perusahaan yang baru dan masih menggunakan Peraturan Perusahaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan Peraturan Perusahaan paling lama 30 hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya Peraturan Perusahaan, kepada pejabat untuk mendapat pengesahan. Namun demikian, tidak terdapat sanksi apabila Perusahaan tidak melakukan pembaharuan Peraturan Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Uji Tuntas kami MNCS berkomitmen untuk melakukan pembaharuan Peraturan Perusahaan yang telah habis masa berlakunya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNCS tertanggal 21 November 2022.

- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNCS tertanggal 20 September 2022, MNCS tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi, kecuali Perkara Perdata No.128/Pdt/G/2019/PN.JKT.Pst selaku Tergugat I melawan PT Tugu Reasuransi Indonesia selaku Penggugat, yang saat ini sedang dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan belum ada putusan terhadapnya.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Perkara Perdata sebagaimana sebagaimana tersebut di atas tidak berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha MNCS dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

- h. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 20 September 2022, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCS dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MNCS dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

29. a. MNCF yang didirikan dengan nama PT Citra International Finance & Investment Corporation adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar MNCF telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar MNCF yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.

- b. Berdasarkan Akta Perbaikan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 20 2018, yang dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0005976 tanggal 7 Januari 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0001690.AH.01.11Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 12 tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Mohamad Rasyid, S.H., M.Kn., pengganti Kristianti Suryani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0187831 tanggal 15 April 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0068728.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 April 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCF adalah sebagai berikut :

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Permodalan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	1.900.000	1.900.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	476.000	476.000.000.000,00
Modal Disetor	476.000	476.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	1.424.000	1.424.000.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.00.0000,00 (Satu Juta Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	475.993	475.993.000.000	99,99
Koperasi Karyawan MNC Group	7	7.000.000,00	0,01
Jumlah	476.000	476.000.000.000,00	100,00

Struktur permodalan MNCF baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MNCF dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham No.40 tanggal 28 Oktober 2022 (“**Akta No.40 tanggal 28 Oktober 2022**”), dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-0079567.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 3 November 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.09-0072283 tanggal 3 November 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220456.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 November 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah MNCF yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Mahjudin
Direktur : Edwin Andu
Direktur : Henby

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wito Mailoa
Komisaris Independen : Rodion Wikanto Njotowidjojo

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Muhamad Nadrattuzaman Hosien
Anggota : Rizka Maulan

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah MNCF tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan MNCF sebagaimana tercantum dalam Akta No.40 tanggal 28 Oktober 2022, adalah berusaha dalam Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (64).

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan MNCF adalah Lembaga Pembiayaan.

Pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar MNCF (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) telah disesuaikan dengan KBLI 2020.

MNCF telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MNCF sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar MNCF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan MNCF tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan MNCF baik berupa harta tetap maupun harta bergerak telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan sebagai berikut :
- SHGB No.48/SB/Sumur Batu yang terletak di Bandar Lampung sedang dijaminkan di PT Bank Ganesha Tbk (Bank Ganesha) sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima MNCF dari Bank Ganesha;
 - SHGB No.2626/Petojo Selatan yang terletak di Jakarta Pusat dan SHGB No.00990/Pakulonan yang terletak di Kab.Tangerang, sedang dijaminkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima MNCF dari BNI;
 - SHGB No.241/Harapan Mulya yang terletak di Kab.Bekasi, SHGB No.124/Sukorejo yang terletak di Kab.Bojonegoro, SHGB No.313/Kemasan yang terletak di Kota Kediri, SHGB No.143/Wonorejo yang terletak di Kab.Pekan Baru, SHGB No.45/Jati Baru dan SHGB No.46/Jati Baru yang keduanya terletak di Kota Padang, sedang dijaminkan PT Bank OKE Indonesia Tbk (Bank OKE) sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima MNCF dari Bank OKE.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNCF tertanggal 20 September 2022, MNCF telah mengasuransikan seluruh asset material MNCF dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

MNCF telah melakukan pendaftaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu berupa merek “MNC Finance” dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 14 September 2028 dan ciptaan “MNC Finance” dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 8 Desember 2060.

- f. MNCF telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS 3 (tiga) periode terakhir.

MNCF telah memiliki Peraturan Perusahaan, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.4/HI.00.00/00.0000.220203008/B/IX/2022 tanggal 27 September 2022, dan berlaku terhitung sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2024.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

MNCF telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 3700 Tahun 2022 tanggal 2 November 2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT MNC Finance.

- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNCF, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 20 September 2022, MNCF, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MNCF dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

30. a. MNCL yang didirikan dengan nama PT Sigih Citra adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar MNCL telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar MNCL yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 17 Juni 2021, dibuat oleh Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03.0389813 tanggal 21 Juni 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0109329.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 **Jo.** Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 34 tanggal 22 Oktober 2021, dibuat oleh Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-00059417.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03.0465029 tanggal 26 Oktober 2021, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0185790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCL adalah sebagai berikut :

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Permodalan	Nilai Nominal Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	1.200.000.000	1.200.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	307.197.027	307.197.027.000,00
Modal Disetor	307.197.027	307.197.027.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	892.802.973	892.802.973.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	307.146.500	307.146.500.000,00	99,98
Koperasi Karyawan MNC Group	50.527	50.527.000,00	0,02
Jumlah	307.197.027	307.197.027.000,00	100,00

Struktur permodalan MNCL baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MNCL dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 32 tanggal 25 Mei 2022, dibuat oleh Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09.0016936 tanggal 31 Mei 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0100221.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCL yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Febriyani Sjofjan
 Direktur : Johannes
 Direktur Kepatuhan : Donny Trihardono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wito Mailoa
 Komisaris Independen : Deddy Maryadi Yoeshar
 Komisaris Independen : Jovita Josephine Sadrach

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCL tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan MNCL sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 27 Desember 2019, dibuat dihadapan Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-0005317.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012568.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020, adalah berusaha dalam bidang Asuransi Jiwa dan Dana Pensiun.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan MNCL adalah Jasa Asuransi Jiwa.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar MNCL (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) belum disesuaikan dengan KBLI 2020. Tidak terdapat konsekuensi hukum dari belum disesuaikannya Pasal 3 Anggaran Dasar MNCL dengan KBLI 2020.

MNCL telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MNCL sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar MNCL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan MNCL tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini MNCL tidak memiliki harta kekayaan berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan). Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan MNCL berupa harta bergerak (kendaraan bermotor) telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga serta untuk 2 (dua) buah kendaraannya telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

MNCL telah melakukan pendaftaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu berupa merek “Si Bejo” dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 29 Juli 2025 dan merek “MNC life” dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2028, serta ciptaan “HARIO BOS” dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 10 Januari 2061 dan ciptaan “UANG MUKA KLAIM” dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 20 Februari 2062.

- f. MNCL telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS 3 (tiga) periode terakhir.

MNCL telah memiliki Peraturan Perusahaan, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.892/PHIJSK-PK/PP/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, dan berlaku terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019. Sampai dengan saat ini MNCL masih menggunakan Peraturan Perusahaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan Peraturan Perusahaan paling lama 30 hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya Peraturan Perusahaan, kepada pejabat untuk mendapat pengesahan. Namun demikian, tidak terdapat sanksi apabila Perusahaan tidak melakukan pembaharuan Peraturan Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Uji Tuntas kami MNCL berkomitmen untuk melakukan pembaharuan Peraturan Perusahaan yang telah habis masa berlakunya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNCL tertanggal 21 November 2022.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNCL, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 20 September 2022, MNCL, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MNCL dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

31. a. MNCAI yang didirikan dengan nama PT Asuransi Jamindo Pusaka adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar MNCAI telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar MNCAI yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No.10 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Depok, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-0019139.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0172319 tanggal 18 September 2017, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0115924.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 dan (iv) Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.21 tanggal 13 Maret 2018, Tambahan No.5103 **Jo**. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 09 tanggal 14 Juni 2021, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0385027 tanggal 18 Juni 2021 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107906.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCAI adalah sebagai berikut :

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Permodalan	Nilai Nominal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	65.200	326.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	34.888	174.440.000.000,00
Modal Disetor	34.888	174.440.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	30.312	151.560.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	34.880	174.400.000.000,00	99,98
Koperasi Karyawan MNC Group	8	40.000.000,00	0,02
Jumlah	34.888	174.440.000.000,00	100,00

Struktur permodalan MNCAI baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MNCAI dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No.1 tanggal 6 Juli 2022, dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0031489 tanggal 11 Juli 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0131972.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAI yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama merangkap Direktur : Wirahadi Suryana Jatiputra
Kepatuhan
Direktur : Eka Listiani Kartono
Direktur : Tengku Kurnia Dzulfikar Nurdin

Dewan Komisaris

Komisaris : Wito Mailoa
Komisaris Independen : Inkes Lukman
Komisaris Independen : Josh Hidayat

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAI tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCAI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan MNCAI sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 09 tanggal 27 Oktober 2020, dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074502.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 November 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0185375.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 05 November 2020, adalah berusaha dalam bidang Asuransi.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan MNCAI adalah Jasa Asuransi Umum.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar MNCAI (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) belum disesuaikan dengan KBLI 2020. Tidak terdapat konsekuensi hukum dari belum disesuaikannya Pasal 3 Anggaran Dasar MNCAI dengan KBLI 2020.

MNCAI telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MNCAI sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar MNCAI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan MNCAI tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini MNCAI tidak memiliki harta kekayaan berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan). Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan MNCAI berupa harta bergerak (kendaraan bermotor) telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCAI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga serta telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

MNCAI telah melakukan pendaftaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu berupa merek "Asuransi MNC Home Express" dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 14 Maret 2029 dan merek "Asuransi MNC Personal Accident" dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 14 Maret 2029, serta ciptaan "MNC Insurance" dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 20 Desember 2061.

- f. MNCAI telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS 3 (tiga) periode terakhir.

MNCAI telah memiliki Peraturan Perusahaan, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.4/HI.00.00/00.0000.210821001/B/IV/2022 tanggal 11 April 2022, dan berlaku terhitung sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2024.

- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNCAI tertanggal 20 September 2022, MNCAI tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi, kecuali perkara sebagai berikut :

1. Perkara Perdata No.947/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel selaku Tergugat VIII, yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan tingkat banding di pengadilan Tinggi Jakarta, yang diajukan oleh Penggugat
2. Perkara Perdata No.191/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst selaku Tergugat III, yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perkara perdata sebagaimana sebagaimana tersebut di atas tidak berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha MNCAI dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

- h. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 20 September 2022, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAI dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi, tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MNCAI dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

32. a. MNCGU yang didirikan dengan nama PT Indo Leasing Perkasa adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar MNCGU telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar MNCGU yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.20 tanggal 19 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Amastasia Dau, S.H., Notaris di Kotamadya Jakarta Timur, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074269 tanggal 24 Agustus 2016, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098639.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016 ***Junctis*** Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 30 Oktober 2017 (“**Akta No. 20 tanggal 30 Oktober 2017**”), yang dibuat dihadapan Amastasia Dau, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

0023417.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 9 November 2017, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141877.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 9 November 2017 dan Akta No. 20 tanggal 30 Oktober 2017 dan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MNCGU No. 10 tanggal 13 Juni 2022 (“**Akta No. 10 tanggal 13 Juni 2022**”), dibuat di hadapan Evi Luciani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0023145 tanggal 17 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0114005.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCGU adalah sebagai berikut :

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	748.000	748.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	187.000	187.000.000.000,00
Modal Disetor	187.000	187.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	561.000	561.000.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	186.999	186.999.000.000,00	99,99
Koperasi Karyawan MNC Group	1	1.000.000,00	0,01
Jumlah	187.000	187.000.000.000,00	100,00

Struktur permodalan MNCGU baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MNCGU dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan.

- c. Berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MNCGU No. 22 tanggal 13 Agustus 2021 (“**Akta No. 22 tanggal 13 Agustus 2021**”) yang telah Diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0437518 tanggal 16 Agustus 2021 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139107.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCGU yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Yusnandi Liauw
 Direktur : Henri Gunawan
 Direktur : Miron Durait Panjaitan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wito Mailoa
 Komisaris : Erdie Suriaherdadi Manan

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCGU tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCGU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.44 tanggal 30 Juni 2016 (“**Akta No.44 tanggal 30 Juni 2016**”), dibuat dihadapan Amastasia Dau, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0063154 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081750.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016, susunan anggota Dewan Pengawas Syariah MNCGU yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah

Anggota : Muhamad Nadrattuzaman Hosen
Anggota : Jaenal Effendi

- d. Maksud dan tujuan MNCGU sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.35 tanggal 22 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Evi Luciani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020562.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056523.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Maret 2022, adalah berusaha dalam bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank (Lembaga Pembiayaan).

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan MNCGU adalah Jasa Penyewaan.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas (Pasal 3 Anggaran Dasar MNCGU) telah disesuaikan dengan KBLI 2020.

MNCGU telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MNCGU sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar MNCGU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan MNCGU tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini MNCGU tidak memiliki harta kekayaan berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan). Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan MNCGU berupa harta bergerak (kendaraan bermotor) telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCGU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan pula dalam Surat Pernyataan MNCGU tertanggal 20 September 2022, MNCGU telah mengasuransikan seluruh asset material MNCGU dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

MNCGU telah melakukan pendaftaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu berupa 13 (tiga belas) merek, dengan jangka waktu perlindungan masing-masing sampai dengan tanggal 5 Juni 2028, 1 September 2030, 22 Desember 2030, dan 12 April 2031.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

- f. MNCGU telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS 3 (tiga) periode terakhir.

MNCGU telah memiliki Peraturan Perusahaan, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.338/PHIJSK-PK/PP/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, dan berlaku terhitung sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021. Sampai dengan saat ini MNCGU masih tunduk dan menggunakan Peraturan Perusahaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan Peraturan Perusahaan paling lama 30 hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya Peraturan Perusahaan, kepada pejabat untuk mendapat pengesahan. Namun demikian, tidak terdapat sanksi apabila Perusahaan tidak melakukan pembaharuan Peraturan Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Uji Tuntas kami MNCGU berkomitmen untuk melakukan pembaharuan Peraturan Perusahaan yang telah habis masa berlakunya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNCGU tertanggal 21 November 2022.

- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNCGU tertanggal 20 September 2022, MNCGU tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi, kecuali Perkara Perdata No.278/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst selaku Tergugat, yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan perkara.

Perkara yang saat ini sedang dihadapi MNCGU tersebut tidak berdampak negatif secara material terhadap jalannya kelangsungan usaha dan/atau operasional MNCGU dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I.

- h. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 20 September 2022, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCGU dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

sebagai pribadi, tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MNCGU dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

33. a. BABP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar BABP telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar BABP yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 51 tanggal 26 Juni 2020, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046953.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020, (ii) diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0283264 tanggal 10 Juli 2020, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110158.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020, dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89, Tambahan No. 042135 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 6 tanggal 6 September 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0289003 tanggal 8 September 2022 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177938.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 September 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BABP adalah sebagai berikut :

Permodalan	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	97.132.520.965	6.000.000.000.000	
Saham Seri A Nilai Nominal Rp.100/saham	22.867.479.035	2.286.747.903.500	
Saham Seri B Nilai Nominal Rp.50/Saham	74.265.041.930	3.713.252.096.500	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	9.309.678.241	930.967.824.100	29,67

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Winfly LTD	4.708.704.800	470.870.480.000	15,00
Masyarakat (di bawah 5%)	8.034.466.747	803.446.674.700	25,60
Saham Seri B			
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	6.063.574.159	303.178.707.950	19,32
Masyarakat (di bawah 5%)	3.266.631.721	163.331.586.050	10,41
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	31.383.055.668	2.671.795.272.800	100,0
Saham Seri A	22.052.849.788	2.205.284.978.800	70,27
Saham Seri B	9.330.205.880	466.510.294.000	29,73
Saham dalam Portepel	65.749.465.297	3.328.204.727.200	
Saham Seri A	814.629.247	81.462.924.700	
Saham Seri B	64.934.836.050	3.246.741.802.500	

Riwayat struktur permodalan BABP, baik yang mengenai modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam 2 (dua) tahun terakhir, adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BABP dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 43 tanggal 31 Oktober 2022 (“**Akta No. 43 tanggal 31 Oktober 2022**”), dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0071575 tanggal 1 November 2022; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0218887.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 November 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BABP adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur	: Rita Montagna Siahaan
Direktur	: Denny Setiawan Hanubrata
Direktur	: Hermawan
Direktur Kepatuhan	: Reinard Y. Seno Setiaji

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	: Ponky Nayarana Pudijanto
Komisaris Independen	: Frederikus P. Weoseke
Komisaris	: Peter Fajar
Komisaris	: Mahdan

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BABP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar BABP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan BABP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 76 tanggal 20 Juli 2022, dibuat di hadapan dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052996.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146252.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74, Tambahan No. 031787, adalah menjalankan usaha di bidang Bank Umum.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan BABP adalah Bank Umum.

Pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar BABP (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) telah disesuaikan dengan KBLI 2020.

BABP telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BABP sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BABP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan BABP tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan BABP baik berupa harta tetap maupun harta bergerak telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar BABP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga serta telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

BABP telah melakukan pendaftaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu berupa 59 (lima puluh sembilan) merek, dengan jangka waktu perlindungan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku.

- f. BABP telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS 3 (tiga) periode terakhir.

BABP telah membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja PT Bank MNC Internasional Tbk, yang termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama Periode 2020 – 2022, dan telah didaftarkan di Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.009/PHIJSK-PK/PKB/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bank MNC Internasional Tbk dengan Serikat Pekerja PT Bank MNC Internasional Tbk.

PKB tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 30 November 2022, dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan.

- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan BABP tertanggal 20 September 2022, BABP tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi, kecuali 21 (dua puluh empat) perkara perdata baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, yang sampai tanggal Pendapat Hukum ini 10 (sepuluh) perkara sedang dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, 6 (enam) perkara sedang dalam proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, 5 (lima) perkara sedang dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan 1 (satu) perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimana BABP sebagai pihak yang mengajukan tagihan, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengajuan lelang jaminan.

Perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh BABP tersebut tidak berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha BABP dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

- h. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 20 September 2022, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BABP dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi, tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BABP dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

34. a. FM yang didirikan dengan nama PT Flash Mobile adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar FM telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar FM yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.7 tanggal 14 September 2022 (“**Akta No.7 tanggal 14 September 2022**”), dibuat dihadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067128.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 September 2022 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0185331.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 September 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FM adalah sebagai berikut :

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	210.000.000	210.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	52.757.500	52.757.500.000,00
Modal Disetor	52.757.500	52.757.500.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	157.242.500	157.242.500.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	52.757.499	52.757.499.000,00	99,99
PT MNC Teknologi Nusantara	1	1000,00	0,01
Jumlah	52.757.500	52.757.500.000,00	100,00

Riwayat struktur permodalan FM, baik yang mengenai peningkatan modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam 2 (dua) tahun terakhir, adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar FM dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perolehan saham FM oleh Perseroan sejumlah 4.999.999 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.4.999.999.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.15 tanggal 14 Mei 2020 dan Akta Jual Beli Saham No.16 tanggal 14 Mei 2020, tidak terqualifikasi sebagai Transaksi Material karena nilai transaksi ini tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan pada saat transaksi dilakukan. Oleh karena itu, Perseroan tidak wajib memenuhi kewajiban-kewajiban pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal seperti POJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan POJK No. 31/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Perseroan melakukan pengambilalihan sejumlah 4.999.999 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham langsung melalui masing-masing pemegang saham terdahulu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 ayat (7) UU PT, Perseroan tidak wajib melakukan hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 125 ayat (5) UU PT (menyampaikan maksud pengambilalihan kepada Direksi FM) dan Pasal 125 ayat (6) UU PT (menyusun rancangan pengambilalihan).

- c. Berdasarkan Akta No.7 tanggal 14 September 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FM yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Mashudi Hamka
 Direktur : Jessica Herliani Tanoesoedibjo
 Direktur : Muhammad Suhada

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
 Komisaris : Natalia Purnama
 Komisaris : Oerianto Guyandi

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris FM tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar FM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan FM sebagaimana tercantum dalam Akta No.7 tanggal 14 September 2022, adalah menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI yang meliputi (i) aktivitas pemrograman komputer lainnya (ii) aktivitas konsultasi keamanan informasi, (iii) aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas computer lainnya, (iv) aktivitas teknologi informasi dan jasa computer lainnya.
Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan FM adalah Teknologi Informasi .
Pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar FM (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) telah disesuaikan dengan KBLI 2020.

FM telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha FM sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar FM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan FM tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini FM tidak memiliki harta kekayaan berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan). Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan FM berupa 1 (satu) kendaraan bermotor telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar FM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
- f. FM telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS 3 (tiga) periode terakhir.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum dibuat FM belum memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”). Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) UU No. 13/2003 konsekuensi hukum bagi Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban memiliki peraturan Perusahaan sebagaimana diamanatkan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13/2003 dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Uji Tuntas kami FM berkomitmen untuk membuat Peraturan Perusahaan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan, sebagaimana hal ini ditegaskan pula dalam Surat Pernyataan FM tertanggal 21 November 2022.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) FM untuk penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan jabatan Direktur Utama (Mashudi Hamka) telah mendapat pengesahan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No.B.3/48811/PK.04.00/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris Pada PT FM Digital Solution, yang berlaku dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan 31 Januari 2024.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan FM tertanggal 12 September 2022 dan Surat Pernyataan anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 12 September 2022 dan tertanggal 20 September 2022, FM dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris FM baik dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi tidak sedang (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha FM, kecuali Oerianto Guyandi selaku pribadi saat ini sedang terlibat dalam perkara perdata yang bersifat tidak material, dan perkara tersebut tidak berdampak bagi kelangsungan usaha FM dan kelangsungan Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I.

35. a. MTN adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar MTN telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar MTN yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tanggal 17 Desember 2021, dibuat dihadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah (i) mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074269.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0489183 tanggal 21 Desember 2021, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0227106.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MTN adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	700.000.000	700.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	175.000.000	175.000.000.000,00
Modal Disetor	175.000.000	175.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	525.000.000	525.000.000.000,00

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	174.999.999	174.999.999.000,00	99,99
PT Infokom Elektrindo	1	1.000,00	0,01
Jumlah	175.000.000	175.000.000.000,00	100,00

Riwayat struktur permodalan MTN, baik yang mengenai peningkatan modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam 2 (dua) tahun terakhir, adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MTN dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.05 tanggal 8 Agustus 2022 (“**Akta No.05 tanggal 8 Agustus 2022**”), dibuat dihadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah (i) mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057117.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0043253 tanggal 212 Agustus 2022 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157568.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTN yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	:	Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	:	Sukma Yulius Archie
Direktur	:	Maya Sari Dewi
Direktur	:	Guntur Satrya Saputro

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	:	Susanty Tjandra Sanusi
Komisaris	:	Oerianto Guyandi
Komisaris	:	Mashudi Hamka

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTN tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MTN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan MTN sebagaimana tercantum dalam Akta No.05 tanggal 8 Agustus 2022, adalah berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, serta aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, jasa dan investasi.
Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan MTN adalah Financial Teknologi .
Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas (Pasal 3 Anggaran Dasar MTN) telah disesuaikan dengan KBLI 2020.

MTN telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MTN sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar MTN dan peraturan perundang-undangan

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

yang berlaku. Perijinan MTN tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MTN tertanggal 20 September 2022, MTN tidak memiliki harta kekayaan baik berupa harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun harta bergerak berupa kendaraan bermotor.
- f. MTN telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS 3 (tiga) periode terakhir.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum dibuat MTN belum memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”). Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) UU No. 13/2003 konsekuensi hukum bagi Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban memiliki peraturan Perusahaan sebagaimana diamanatkan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13/2003 dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Uji Tuntas kami MTN berkomitmen untuk membuat Peraturan Perusahaan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Surat Pernyataan MTN tertanggal 21 November 2022.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) MTN untuk penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan jabatan Komisararis (Mashudi Hamka) telah mendapat pengesahan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No.B.3/48677/PK.04.00/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris Pada PT MNC Teknologi Nusantara, yang berlaku dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan 31 Januari 2024.

- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MTN tertanggal 20 September 2022, MTN (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MTN dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

- h. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 20 September 2022, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTN baik dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MTN, kecuali Oerianto Guyandi selaku pribadi saat ini sedang terlibat dalam perkara perdata yang bersifat tidak material, dan perkara tersebut tidak berdampak bagi kelangsungan usaha MTN dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I.

36. a. MAB yang didirikan dengan nama PT Surabaya Nusantara Propertindo adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar MAB telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar MAB yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 01 tanggal 12 Agustus 2020, dibuat dihadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari (i) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057506.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0359972 tanggal 24 Agustus 2020, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137671.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MAB adalah sebagai berikut :

Permodalan	Nilai Nominal Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	25.000	2.500.000.000,00
Modal Disetor	25.000	2.500.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	75.000	7.500.000.000,00

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	24.999	2.499.900.000,00	99,99
Koperasi Karyawan MNC Group	1	100.000,00	0,01
Jumlah	25.000	2.500.000.000,00	100,00

Struktur permodalan MAB baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MAB dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.19 tanggal 8 Maret 2022, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0151304 tanggal 8 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045761.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Maret 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MAB yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Oerianto Guyandi
Direktur : Jessica Herliani Tanoesoedibjo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Mashudi Hamka

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MAB tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MAB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan MAB sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.74 tanggal 27 Agustus 2021 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 0046853.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 1 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148233.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 September 2021, adalah berusaha dalam bidang keuangan.

MAB merupakan perusahaan yang belum beroperasi/belum melakukan kegiatan usaha.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar MAB (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) belum disesuaikan dengan KBLI 2020. Tidak terdapat konsekuensi hukum dari belum disesuaikannya Pasal 3 Anggaran Dasar MAB dengan KBLI 2020.

- e. Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MAB tertanggal 20 September 2022, MAB tidak memiliki harta kekayaan baik berupa harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun harta bergerak berupa kendaraan bermotor.
- f. MAB telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS 3 (tiga) periode

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

terakhir. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini MAB belum memiliki Peraturan Perusahaan dan jumlah karyawan MAB adalah 4 (empat) orang. Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut MAB belum diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) MAB untuk penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan jabatan Komisaris (Mashudi Hamka) telah mendapat pengesahan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No.B.3/46027/PK.04.00/XI/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris Pada PT Modal Anak Bangsa, yang berlaku dari tanggal 7 November 2022 sampai dengan 31 Januari 2024.

- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MAB, anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 20 September 2022, MAB, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MAB dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MAB, kecuali Oerianto Guyandi selaku pribadi saat ini sedang terlibat dalam perkara perdata yang bersifat tidak material, dan perkara tersebut tidak berdampak bagi kelangsungan usaha MAB dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I.

37. a. SIAP yang didirikan dengan nama PT Palembang Nusantara Propertindo adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar SIAP telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar SIAP yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 19 Maret 2021 (“**Akta No. 15 tanggal 19 Maret 2021**”) dibuat dihadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018270.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0189680 tanggal 24 Maret 2021, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054987.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIAP adalah sebagai berikut :

Permodalan	Nilai Nominal Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	600.000	60.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	150.000	15.000.000.000,00
Modal Disetor	150.000	15.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	450.000	45.000.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	149.999	14.999.900.000,00	99,99
Koperasi Karyawan MNC Group	1	100.000,00	0,01
Jumlah	150.000	15.000.000.000,00	100,00

Struktur permodalan SIAP baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor SIAP dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 02 tanggal 3 Juni 2021, dibuat dihadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352188 tanggal 4 Juni 2021 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SIAP yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Agus Ghozali *)
Direktur : Budi Jatmiko

Dewan Komisaris

Komisaris : Rully Rakhmatullah
Komisaris : Edward Kennetze

*) Agus Ghozali telah mengundurkan diri sebagai Direktur efektif terhitung sejak tanggal 28 Februari 2022, sebagaimana ternyata dalam surat yang bersangkutan tanggal 8 November 2021.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SIAP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar SIAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan SIAP sebagaimana tercantum dalam Akta No.15 tanggal 19 Maret 2021, adalah berusaha dalam bidang informasi dan komunikasi, dan aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

SIAP merupakan perusahaan yang belum beroperasi/belum melakukan kegiatan usaha.

Pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar SIAP (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) belum disesuaikan dengan KBLI 2020. Tidak terdapat konsekuensi hukum dari belum disesuaikannya Pasal 3 Anggaran Dasar SIAP dengan KBLI 2020.

- e. Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan SIAP tertanggal 20 September 2022, SIAP tidak memiliki harta kekayaan baik berupa harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun harta bergerak berupa kendaraan bermotor.
 - f. Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan SIAP tertanggal 20 September 2022, SIAP tidak memiliki karyawan, sehingga SIAP belum memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan-peraturan dibidang ketenagakerjaan.
 - g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan SIAP, anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 20 September 2022, SIAP dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SIAP dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha SIAP dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.
38. a. MDNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Perubahan Anggaran Dasar MDNP telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar MDNP yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.
- b. Berdasarkan Akta Pendirian *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.19 tanggal 30 Desember 2020 (“**Akta No. 19 tanggal 30 Desember 2020**”), dibuat dihadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-0004063.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021, (ii) diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU.AH.01.03-0037933 tanggal 21 Januari 2021, (iii) dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

0012187.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDNP adalah sebagai berikut :

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	5.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.250	125.000.000,00
Modal Disetor	1.250	125.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.249	124.900.000,00	99,92
Koperasi Karyawan MNC Grup	1	100.000,00	0,08
Jumlah	1.250	125.000.000,00	100,00

Struktur permodalan MDNP baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MDNP dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan.

- c. Berdasarkan Akta No.19 tanggal 30 Desember 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDNP yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Ageng Purwanto
Direktur : Darma Widjaja*)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wito Mailoa
Komisaris : Natalia Purnama

*) *Darma Widjaja telah mengundurkan diri sebagai Direktur efektif terhitung sejak tanggal 21 Februari 2022, sebagaimana ternyata dalam surat pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 9 Oktober 2021.*

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDNP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MDNP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan MDNP sebagaimana tercantum dalam Akta Akta No.19 tanggal 30 Desember 2020, adalah berusaha dalam bidang perdagangan, konstruksi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, jasa investasi dan real estat (termasuk industri).

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan MDNP adalah penyewaan properti.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar MDNP (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) belum disesuaikan dengan KBLI 2020,. Tidak terdapat konsekuensi hukum dari belum disesuaikannya Pasal 3 Anggaran Dasar MDNP dengan KBLI 2020.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

MDNP telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MDNP sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar MDNP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan MDNP tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan MDNP berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan) berupa SHGB No.3924/Petisah Tengah telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MDNP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa dan saat ini sedang dijaminkan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) guna menjamin utang PT MNC Finance kepada BRI berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.52 tanggal 20 Desember 2016, dibuat dihadapan Syafil Warman S.H., Notaris di Kota Medan, dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00180/2020, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.25.200.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus juta Rupiah).

Penjaminan harta kekayaan MDNP tersebut telah mendapat persetujuan dari RUPS MDNP sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.27 tanggal 16 Desember 2016, dibuat dihadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini MDNP tidak memiliki harta kekayaan berupa harta bergerak (kendaraan bermotor).

Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MDNP tertanggal 20 September 2022, MDNP telah mengasuransikan seluruh asset material MDNP dan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

- f. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini MDNP tidak memiliki karyawan, sehingga MDNP belum memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan-peraturan dibidang ketenagakerjaan.
- g. Sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil uji tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MDNP, anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 20 September 2022, MDNP, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDNP dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MDNP dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

39. a. RINP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar RINP telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar RINP yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.
- b. Berdasarkan Akta Pendirian *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 20 tanggal 30 Desember 2020 (“**Akta No.20 tanggal 30 Desember 2020**”), dibuat dihadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-0004916.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0014826.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RINP adalah sebagai berikut :

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	5.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.250	125.000.000,00
Modal Disetor	1.250	125.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.249	124.900.000,00	99,92
Koperasi Karyawan MNC Grup	1	100.000,00	0,08
Jumlah	1.250	125.000.000,00	100,00

Struktur permodalan RINP baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor RINP dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan.

- c. Berdasarkan Akta No.20 tanggal 30 Desember 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RINP yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Ageng Purwanto
Direktur : Darma Widjaja *)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wito Mailoa
Komisaris : Natalia Purnama

*) Darma Widjaja telah mengundurkan diri sebagai Direktur efektif terhitung sejak tanggal 21 Februari 2022, sebagaimana ternyata dalam surat pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 9 Oktober 2021

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris RINP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar RINP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan RINP sebagaimana tercantum dalam Akta No.20 tanggal 30 Desember 2020, adalah berusaha dalam bidang perdagangan, konstruksi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, jasa investasi dan real estat (termasuk industri).

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan RINP adalah penyewaan properti.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar RINP (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) belum disesuaikan dengan KBLI 2020. Tidak terdapat konsekuensi hukum dari belum disesuaikannya Pasal 3 Anggaran Dasar RINP dengan KBLI 2020.

RINP telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha RINP sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar RINP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan RINP tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan RINP berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan) dengan SHGB No.1041/Sidomulyo Timur, SHGB No.1041/Sidomulyo Timur, SHGB No.1043/Sidomulyo Timur, SHGB No.1044/Sidomulyo Timur telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar RINP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa dan saat ini sedang dijaminkan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“**BRI**”) guna menjamin utang PT MNC Finance kepada BRI berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.71 tanggal 12 Oktober 2016, dibuat dihadapan Riri Liestia, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru, dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.733/2017, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).

Penjaminan harta kekayaan RINP tersebut telah mendapat persetujuan dari RUPS RINP sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa RINP tertanggal 10 Oktober 2016, dibuat dibawah tangan, yang telah dilegalisasi oleh Widawati, S.H.,M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, dengan No.Leg.40/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini RINP tidak memiliki harta kekayaan berupa harta bergerak (kendaraan bermotor).

Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan RINP tertanggal 20 September 2022, RINP telah mengasuransikan seluruh asset material RINP dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

- f. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini RINP tidak memiliki karyawan, sehingga RINP belum memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan-peraturan dibidang ketenagakerjaan.
- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan RINP, anggota Direksi dan Dewan Komisaris

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

masing-masing tertanggal 20 September 2022, RINP masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris RINP dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha RINP dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

40. a. SGNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Anggaran Dasar SGNP sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.07 tanggal 05 Agustus 2016 tanggal 08 Agustus 2016 (“**Akta Pendirian**”), dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah (i) mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0035177.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091809.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016 dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 8 November 2016, Tambahan No. 77961, telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sampai dengan saat ini belum mengalami perubahan.

- b. Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SGNP adalah sebagai berikut :

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	5.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.250	125.000.000,00
Modal Disetor	1.250	125.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.249	124.900.000,00	99,92
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	100.000,00	0,08
Jumlah	1.250	125.000.000,00	100,00

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Struktur permodalan SGNP baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor SGNP dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan.

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 10 tanggal 05 Juli 2018, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0221342 tanggal 12 Juli 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0089928.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Juli 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SGNP yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Natalia Purnama

Dewan Komisaris

Komisaris : Wito Mailoa

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SGNP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar SGNP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan SGNP sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian, adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat.
SGNP merupakan perusahaan yang belum beroperasi/belum melakukan kegiatan usaha.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar SGNP (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) belum disesuaikan dengan KBLI 2020. Tidak terdapat konsekuensi hukum dari belum disesuaikannya Pasal 3 Anggaran Dasar SGNP dengan KBLI 2020.

- e. Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan SGNP tertanggal 20 September 2022, SGNP tidak memiliki harta kekayaan baik berupa harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun harta bergerak berupa kendaraan bermotor.
- f. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini SGNP tidak memiliki karyawan, sehingga SGNP belum memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan-peraturan dibidang ketenagakerjaan.
- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan SGNP, anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 20 September 2022, SGNP dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SGNP dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha SGNP dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

41. a. MCT yang didirikan dengan nama PT Bandung Nusantara Propertindo adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Perubahan Anggaran Dasar MCT telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar MCT yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.
- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.03 tanggal 08 September 2022, dibuat dihadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn. Notaris di Bogor, yang telah (i) mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0065600.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 September 2022, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290543 tanggal 13 September 2022, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0181083.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MCT adalah sebagai berikut :

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	4.000.000	400.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.000.000	100.000.000.000,00
Modal Disetor	1.000.000	100.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.000.000	300.000.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	999.999	99.999.900.000,00	99,92
Koperasi Karyawan MNC Grup	1	100.000,00	0,08
Jumlah	1.000.000	100.000.000.000,00	100,00

Riwayat struktur permodalan MCT, baik yang mengenai peningkatan modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam 2 (dua) tahun terakhir, adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MCT dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- c. Berdasarkan Akta No.01 tanggal 01 April 2022 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.06 tanggal 8 Agustus 2022, dibuat dihadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn. Notaris di Bogor, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0042272 tanggal 9 Agustus 2022 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0155423.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 9 Agustus 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MCT yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Direksi

Direktur Utama : Mashudi Hamka
Direktur : Sonny Agustino Laksito

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris : Oerianto Guyandi

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MCT tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MCT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan MCT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.03 tanggal 04 Maret 2022 (“**Akta No.03 tanggal 04 Maret 2022**”), dibuat dihadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H.,M.Kn. Notaris di Bogor, yang telah (i) mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-0015882.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 07 Maret 2022 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0044066.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 07 Maret 2022, adalah berusaha dalam bidang Informasi Komunikasi, Aktivitas Keuangan dan Asuransi serta Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis.

MCT merupakan perusahaan yang belum beroperasi/belum melakukan kegiatan usaha.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas (Pasal 3 Anggaran Dasar MCT) telah disesuaikan dengan KBLI 2020.

- e. Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MCT tertanggal 20 September 2022, MCT tidak memiliki harta kekayaan baik berupa harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun harta bergerak berupa kendaraan bermotor.
- f. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini MCT tidak memiliki karyawan, sehingga MCT belum memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan-peraturan dibidang ketenagakerjaan.
- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MCT, anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 20 September 2022, MCT dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MCT dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MCT, kecuali Oerianto Guyandi selaku pribadi saat ini

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

sedang terlibat dalam perkara perdata yang bersifat tidak material, dan perkara tersebut tidak berdampak bagi kelangsungan usaha MCT dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I.

42. a. MDT adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Anggaran Dasar MDT sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 35 tanggal 18 Februari 2022 (“**Akta Pendirian**”), dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0015960.AH.01.01.Tahun 2022 pada tanggal 04 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0042893.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022, telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan sampai dengan saat ini belum mengalami perubahan.

- b. Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDT adalah sebagai berikut :

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.000.000	1.000.000.000,00
Modal Disetor	1.000.000	1.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	999.999	999.999.000,00	99,99
Koperasi Karyawan MNC Group	1	1.000,00	0,1
Jumlah	1.000.000	1.000.000.000,00	100,00

Struktur permodalan MDT sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan.

- c. Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDT yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	:	Hary Tanoesoedibjo
Direktur	:	Mashudi Hamka
Direktur	:	Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	:	Oerianto Guyandi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Darma Putra Wati
Komisaris	:	Wito Mailoa

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Komisaris : Natalia Purnama
Komisaris : Susanty Tjandra Sanusi

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDT tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MDT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan MDT sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian, adalah berusaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, serta Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

MDT merupakan perusahaan yang belum beroperasi/belum melakukan kegiatan usaha.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas (Pasal 3 Anggaran Dasar MDT) telah disesuaikan dengan KBLI 2020.

- e. Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MDT tertanggal 20 September 2022, MDT tidak memiliki harta kekayaan baik berupa harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun harta bergerak berupa kendaraan bermotor.
- f. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini MDT tidak memiliki karyawan, sehingga MDT belum memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan-peraturan dibidang ketenagakerjaan.
- g. Sampai dengan tanggal pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MDT, anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 20 September 2022, MDT dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDT dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MDT, kecuali Oerianto Guyandi selaku pribadi saat ini sedang terlibat dalam perkara perdata yang bersifat tidak material, dan perkara tersebut tidak berdampak bagi kelangsungan usaha MDT dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I.

43. a. MIB yang didirikan dengan nama PT Felima Orient Pacific adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar MIB telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar MIB yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 10 Juni 2022 (“**Akta No. 3 tanggal 10 Juni 2022**”), dibuat di hadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Bogor yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-A0041944.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0253037 tanggal 21 Juni 2022, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115791.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MIB adalah sebagai berikut :

Permodalan	Nilai Nominal Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	59.600	29.800.000.000,00
Modal Ditempatkan	14.900	7.450.000.000,00
Modal Disetor	14.900	7.450.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	44.700	22.350.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	14.899	7.449.500.000,00	99,99
Koperasi Karyawan MNC Group	1	500.000,00	0,01
Jumlah	14.900	7.450.000.000,00	100,00

Riwayat struktur permodalan MIB, baik yang mengenai modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam 2 (dua) tahun terakhir, adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MIB dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perolehan saham MIB oleh Perseroan sejumlah 11.899 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.5.949.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.14 tanggal 17 Desember 2021, Akta Jual Beli Saham No.16 tanggal 17 Desember 2021 dan Akta Jual Beli Saham No.17 tanggal 17 Desember 2021, tidak terqualifikasi sebagai transaksi material karena nilai transaksi ini tidak sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan tidak harus memenuhi kewajiban-kewajiban pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal seperti POJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK No. 31/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan melakukan pengambilalihan sejumlah 11.899 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) saham langsung melalui masing-masing pemegang saham terdahulu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 ayat (7) UU PT, Perseroan tidak perlu melakukan hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 125 ayat (5) dan Pasal 125 ayat (6) UU PT.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

- c. Berdasarkan Akta No.3 tanggal 10 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MIB yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Pondra Nala Permana
Direktur : Afrianto Budi Purnomo

Dewan Komisaris

Komisaris : Wirahadi Suryana Jatiputra
Komisaris : Febriyani Sjojfan

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MIB tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MIB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan MIB sebagaimana tercantum dalam Akta No.3 tanggal 10 Juni 2022, adalah berusaha di bidang (i) Aktivitas Keuangan dan Asuransi, (ii) Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis, (iii) Jasa dan Investasi.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan MIB adalah jasa perantara asuransi.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas (Pasal 3 Anggaran Dasar MIB) telah disesuaikan dengan KBLI 2020.

MIB telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatannya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIB sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar MIB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan MIB tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MIB tertanggal 20 September 2022, MIB tidak memiliki harta kekayaan baik berupa harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun harta bergerak berupa kendaraan bermotor.
- f. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini MIB tidak memiliki karyawan, sehingga MIB belum memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan-peraturan dibidang ketenagakerjaan.
- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MIB, anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 20 September 2022, MIB dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MIB dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MIB dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

44. a. MNV yang didirikan dengan nama PT Yogyakarta Nusantara Propertindo adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar MNV telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian terdapat akta perubahan Anggaran Dasar MNV yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.6 tanggal 18 Juni 2021 (“**Akta No. 6 tanggal 18 Juni 2021**”), dibuat di hadapan Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Bogor yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0040249.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0429531 tanggal 19 Juli 2021, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0125235.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNV adalah sebagai berikut :

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	2.000.000	200.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	500.000	50.000.000.000,00
Modal Disetor	500.000	50.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	1.500.000	150.000.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	499.999	49.999.900.000,00	99.99
Koperasi Karyawan MNC Group	1	100.000,00	0.01
Jumlah	500.000	50.000.000.000,00	100,00

Struktur permodalan MNV baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MNV dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan.

- c. Berdasarkan Akta No.6 tanggal 18 Juni 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNV yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Jessica Herliani Tanoesoedibjo

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Direktur : Samuel Mulyono*)

Dewan Komisaris

Komisaris : Hary Tanoesoedibjo

Komisaris : Darma Putra Wati

**)Samuel Mulyono telah mengundurkan diri sebagai Direktur MNV efektif terhitung sejak tanggal 7 Februari 2022, sebagaimana ternyata dalam surat yang bersangkutan tanggal 4 Februari 2022.*

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNV tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNV dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Maksud dan tujuan MNV sebagaimana tercantum dalam Akta No.6 tanggal 18 Juni 2021, adalah berusaha dalam bidang (i) Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun, (ii) Aktivitas konsultasi manajemen, (iii) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

MNV merupakan perusahaan yang belum beroperasi/belum melakukan kegiatan usaha.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas (Pasal 3 Anggaran Dasar MNV) telah disesuaikan dengan KBLI 2020.

- e. Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNV tertanggal 20 September 2022, MNV tidak memiliki harta kekayaan baik berupa harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun harta bergerak berupa kendaraan bermotor.
- f. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini MNV tidak memiliki karyawan, sehingga MNV belum memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan-peraturan dibidang ketenagakerjaan.
- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan MNV, anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 20 September 2022, MNV dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNV dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha MNV dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I ini.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

45. Kecuali Winfly Ltd, Lafite Assets Ltd, Motion Digital Ltd yang merupakan badan hukum asing, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh masing-masing Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dan/atau dengan pihak Terafiliasi telah ditandatangani secara sah oleh masing-masing Anak Perusahaan, mengikat Anak Perusahaan dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi III Tahap I dan/atau penggunaan dana hasil PUB Obligasi III Tahap I serta yang berpotensi merugikan hak pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas dan klarifikasi kami kepada MNCS, MNCF, MNCGU, MNCAI, FM, MTN, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan MNCS, MNCF, MNCGU, MNCAI, FM, MTN telah memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada kreditur selama perjanjian kredit berlaku, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan sebagaimana disepakati dalam tiap-tiap perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas tidak terdapat hak dan kewajiban yang timbul/hubungan timbal balik antara MNCS dengan Perseroan sehubungan dengan adanya jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan berkaitan dengan Perjanjian Kredit yang dibuat antara MNCS dengan PT Bank Capital Indonesia Tbk dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas tidak terdapat hak dan kewajiban yang timbul/hubungan timbal balik antara MNCF dengan Perseroan sehubungan dengan adanya jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan berkaitan dengan Perjanjian Kredit yang dibuat antara MNCF dengan PT Bank Victoria Internasional Tbk.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas tidak terdapat hak dan kewajiban yang timbul/hubungan timbal balik antara MNCGU dengan PT MNC Kapital Indonesia Tbk sehubungan dengan adanya jaminan perusahaan yang diberikan oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk berkaitan dengan Perjanjian Kredit yang dibuat antara MNCGU dengan PT Bank Sahabat Sampoerna dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tbk.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 dan/atau Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 sehubungan dengan perjanjian antara Anak Perusahaan (kecuali Winfly Ltd, Lafite Assets Ltd, Motion Digital Ltd yang merupakan badan hukum asing) dengan pihak ketiga.

46. Sampai dengan saat ini baik Perseroan maupun Anak Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang karyawan atau lebih, yaitu MNCS, MNCL, MNCAI, MNCGU dan BABP, belum membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”). Sesuai dengan Pasal 190 UU No. 13/2003, apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban pada Pasal 106 ayat (1) UU No. 13/2003, maka Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa (i) teguran; (ii) peringatan tertulis; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pembatalan persetujuan; (vi) pembatalan pendaftaran; (vii) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan (viii) pencabutan izin.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan pula dalam Surat Pernyataan Perseroan, MNCS, MNCL, MNCAI, dan MNCGU masing-masing tertanggal 21 November 2022, Perseroan, MNCS, MNCL, MNCAI, dan MNCGU berkomitmen untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan.

Berdasarkan Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan BABP tertanggal 21 November 2022, BABP berkomitmen untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami, tidak terdapat pelanggaran pemenuhan perizinan Anak Perusahaan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha Anak Perusahaan .

47. Modal ditempatkan dan modal disetor MAB, SIAP, MDNP, RINP, SGNP, MCT, MDT dan MNV pada saat pendirian telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas. Kecuali MDT, penysetoran modal disetor tersebut telah dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2016 (“**PP No.29/2016**”) sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2021 (“**PP No.8/2021**”), yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas di tandatangani. Namun demikian tidak terdapat ketentuan dalam UUPT maupun dalam PP No.29/2016 sebagaimana telah dicabut dengan PP No.8/2021 yang mengatur mengenai sanksi terhadap perseroan dan pemegang saham apabila melakukan penysetoran modal saham melebihi batas waktu yang sudah ditentukan tersebut.

Sehubungan dengan keterlambatan penysetoran modal disetor ini para pemegang saham MDT telah menegaskan kembali/meratifikasi penysetoran modal tersebut sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 67 tanggal 21 November 2022, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

48. Informasi yang disajikan dalam Prospektus dalam rangka PUB Obligasi III Tahap I yang berkaitan dengan aspek hukum telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas yang kami lakukan.

042-R9/CS-SG-ES-NM-DM/II-G/XII/2022

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, serta ditujukan dalam rangka PUB Obligasi III Tahap I dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

KONSULTAN HUKUM JUSUF INDRADEWA & PARTNERS



Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H.

STTD.KH-21/PM.22/2018

Anggota HKHPM No. 92036

Nomor Induk Advokat PERADI No. 92.10415

Tembusan:

1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yang Terhormat PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yang Terhormat PT MNC Sekuritas.
4. Yang Terhormat PT Sucor Sekuritas.

XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP., ASEAN CPA. dengan Ijin Akuntan Publik No. AP 0126 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Harris Siregar CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.0524 serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Barugamuri Dachi M., Ak., CA., CPA, nomor Izin Akuntan Publik No. AP.1150.

Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

**PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM/
*INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020/
*As of June 30, 2022 and December 31, 2021 and 2020***

**Serta Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 Juni 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020/
*And For Six Months Periods Ended June 30, 2022 and 2021 (Unaudited)
and For The Years Ended December 31, 2021 and 2020***

PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARIES

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman/</u> <u>Pages</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		<i>DIRECTOR'S STATEMENT LETTER</i>
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM:		<i>INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:</i>
PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020.		<i>AS OF JUNE 30, 2022 AND DECEMBER 31, 2021 AND 2020 AND FOR SIX MONTHS PERIODS ENDED JUNE 30, 2022 AND 2021 (UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020</i>
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM	1 - 2	<i>INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</i>
LAPORAN LABA ATAU RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM	3	<i>INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM	4 - 5	<i>INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY</i>
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM	6	<i>INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS</i>
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM	7 - 156	<i>NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK (“PERUSAHAAN”)
DAN ENTITAS ANAK UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

***DIRECTOR’S STATEMENT LETTER
RELATING THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK (“THE COMPANY”)
AND SUBSIDIARIES FOR SIX MONTH PERIODS
ENDED JUNE 30, 2022 AND
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020***

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We the undersigned:

- | | |
|--|---|
| <p>1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> | <p>: Mashudi Hamka
: MNC Financial Center Lt.21
: Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta
: Jl. Tampak Siring E2 RT.005 / RW.012 Kecamatan Limo,
: Kota Depok, Jawa Barat
: 021-29709700
: Direktur Utama/President Director</p> |
| <p>2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> | <p>: Oerianto Guyandi
: MNC Financial Center Lt.21
: Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta
: Jl. P. Matahari VI Blok A7/20, RT.016 / RW.009, Kelurahan
: Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
: 021-29709700
: Direktur/Director</p> |

Menyatakan bahwa:

Stated that:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak;</p> | <p>1. <i>We are responsibility for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries;</i></p> |
| <p>2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;</p> | <p>2. <i>The Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia;</i></p> |
| <p>3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;</p> <p>b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> | <p>3. a. <i>All information presented in the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries has been completely and properly disclosed;</i></p> <p>b. <i>The Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries do not contain any improper material information or fact, and do not omit any material information or fact;</i></p> |
| <p>4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.</p> | <p>4. <i>We are responsible for the internal control system of the Company and its Subsidiaries.</i></p> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 28 November 2022/November 28, 2022

 Mashudi Hamka Direktur Utama/President Director	 Oerianto Guyandi Direktur/Director
--	---

Laporan Auditor Independen***Independent Auditors' Report***

Ref: 00171/3.0409/AU.1/09/0126-1/1/XI/2022

Pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT MNC Kapital Tbk dan entitas anak*Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT MNC Kapital Tbk and its subsidiaries***Opini*****Opinion***

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT MNC Kapital Tbk dan entitas anak ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

We have audited the accompanying interim consolidated financial statements of PT MNC Kapital Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the interim consolidated statement of financial position as at June 30, 2022, and the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the six-month period then ended, and notes to the interim consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT MNC Kapital Tbk dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interimnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial position of PT MNC Kapital Tbk and its subsidiaries as at June 30, 2022, and their interim financial performance and cash flows for the six-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini***Basis for Opinion***

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Interim pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Interim consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the interim consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama***Key Audit Matters***

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the interim consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the interim consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami dijabarkan di bawah ini.

The key audit matter identified in our audit is outlined below.

Perhitungan cadangan penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan Catatan 10 tentang pinjaman yang diberikan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir, pada tanggal 30 Juni 2022, Grup telah mengakui pinjaman yang diberikan sebesar Rp9.559.927 juta dan telah menghitung cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp248.848 juta.

Cadangan penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan dihitung oleh manajemen menggunakan metode Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai dengan PSAK 71, "Instrumen Keuangan".

Pendekatan yang digunakan dalam menghitung cadangan penurunan nilai:

- **Penilaian Individual**
Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian secara individual dengan membandingkan antara nilai tercatat pinjaman yang diberikan dengan nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan diterima oleh Grup baik yang bersumber dari pembayaran pokok dan/atau bunga, maupun arus kas dari penjualan jaminan, untuk pinjaman yang diberikan yang memiliki nilai cukup signifikan dan terdapat bukti objektif penurunan nilai.
- **Penilaian Kolektif**
Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian secara kolektif menggunakan menggunakan teknik *statistical based* yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain, *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, untuk pinjaman yang diberikan yang tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan pinjaman yang diberikan yang terdapat bukti objektif penurunan nilai namun tidak bernilai signifikan.

Perhitungan cadangan penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan merupakan hal audit utama karena besarnya nilai tercatat atas pinjaman yang diberikan dan penilaian memerlukan pertimbangan signifikan manajemen dan perhitungan menggunakan estimasi dan asumsi yang memiliki ketidakpastian yang tinggi yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian interim Grup.

Tanggapan audit atas hal audit utama

Kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk:

- Memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi atas pinjaman yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau menunjukkan bukti objektif penurunan nilai.
- Melakukan uji petik atas pinjaman yang diberikan dan mengevaluasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai dan membandingkan hasilnya dengan penilaian manajemen.

Calculation of allowance for impairment on loans

As disclosed in Note 10 regarding loans to the attached interim consolidated financial statements, as of June 30, 2022, the Group has recognized the loans amounting to Rp9,559,927 million and has calculated the allowance for impairment losses on loans amounting to Rp248,848 million.

Allowance for impairment of loans is calculated by management using the Expected Credit Loss method in accordance with PSAK 71, "Financial Instruments".

Approach used in calculating allowance for impairment:

- **Individual Assessment**
The Group calculates the expected credit loss individually by comparing the carrying amount of the loan with the present value of the future cash flows expected to be received by the Group, either from principal and/or interest payments, as well as cash flows from the sale of guarantees, for loans which has a significant value and there is objective evidence of impairment.
- **Collective Assessment**
The Group calculates the expected credit losses collectively using statistical-based techniques that use several main parameters, that consist of, probability of default, loss given default and exposure at default, for loans which there is no objective evidence of impairment and loans with objective evidence of impairment but not significant.

The calculation of the allowance for impairment losses on loans is the key audit matter because the carrying amount of loans and valuations requires significant management judgment and calculations using estimates and assumptions that have high uncertainty which could have a material impact on the Group interim consolidated financial statements.

Audit response to key audit matters

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- *Understand and test relevant controls over the identification of loans that have significantly increased credit risk or show objective evidence of impairment.*
- *Conduct a sampling test on loans and evaluate whether there is a significant increase in credit risk or there is objective evidence of impairment and compare the results with management's assessment.*

- Menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai atas pinjaman yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai dengan memeriksa baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Grup dalam perhitungan kerugian penurunan nilai.
- Menilai metodologi dan asumsi yang digunakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian secara kolektif, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default* dan melakukan perhitungan ulang.
- *Assess the adequacy of the allowance for impairment on loans that have a significant increase in credit risk or there is objective evidence of impairment by examining both the amount and timing of future cash flows used by the Group in calculating impairment losses.*
- *Assessing the methodology and assumptions used in calculating expected credit losses collectively, including determining the probability of default, loss given default and exposure at default and performing recalculation.*

Hal lain

Laporan keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diaudit oleh auditor independen lain dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan No. 00036/3.0409/AU.1/09/0524-1/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan No. 00265/3.0409/AU.1/09/1150-1/1/V/2021 tanggal 7 Mei 2021.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00170/3.0409/AU.1/09/0126-1/1/XI/2022 tanggal 21 November 2022 atas laporan keuangan konsolidasian interim PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan entitas anak dengan opini tanpa modifikasi. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III sebagaimana yang dijelaskan dalam catatan 52 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dengan beberapa tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terdahulu.

Informasi lain

Laporan keuangan konsolidasian interim diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan aksi korporasi Grup, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya. Hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Other matters

The financial statements of PT MNC Kapital Indonesia Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021 audited by other independent auditor with an unqualified opinion No. 00036/3.0409/AU.1/09/0524-1/1/III/2022 dated March 31, 2022 and No. 00265/3.0409/AU.1/09/1150-1/1/V/2021 May 7, 2021.

Prior to this report, we had issued an independent auditor's report No. 00170/3.0409/AU.1/09/0126-1/1/XI/2022 dated November 21, 2022 on the interim consolidated financial statements of PT MNC Kapital Indonesia Tbk and its subsidiaries with an unmodified fair opinion. In the context of the Shelf Registration Bond III as described in note 52 to the financial statements, the Company has reissued the interim consolidated financial statements for the 6 (six) month period ended June 30, 2022 with some additional disclosures in the notes to the previous financial statements.

Other Information

This interim consolidated financial statements has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed public offering of the Group, and are not intended and are not allowed to be used for other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Interim Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of interim consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the interim consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan interim Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami, keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material atas laporan keuangan konsolidasian interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut. Serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajiban estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan interim atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan audit kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group financial reporting processes.

Auditor's Responsibilities for the Audit of Interim consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the interim consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these interim consolidated financial statements.

As part of an audit based on the Auditing Standards, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risk of material misstatement of the interim consolidated financial statements, whether caused by fraud or error, design and implement audit procedures that are responsive to these risks. And obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than that caused by error, because fraud may involve collusion, forgery, omission, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of the accounting policies used and the accounting estimation obligations and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the interim consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian interim mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian interim. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian interim periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the interim consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the interim consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the interim consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the interim consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO




Florus Daeli, SE., Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CPI., CACP., ASEAN CPA
No. Ijin AP.0126/License No. AP. 0126
28 November 2022/November 28, 2022

Ref: 00171/3.0409/AU.1/09/0126-1/1/XI/2022



00171

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
ASET					ASSETS
Kas dan setara kas	5	2.761.476	2.827.492	1.758.171	Cash and cash equivalents
Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	6	8.445	8.353	8.103	Deposits to Indonesian Clearing and Securities Guarantee Institution
Piutang dari Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	6	325.012	291.740	340.136	Receivables from Indonesian Clearing and Securities Guarantee Institution
Piutang nasabah	7	461.452	474.897	680.541	Receivables from customers
Efek-efek	8				Securities
Pihak berelasi		390.488	274.461	349.897	Related parties
Pihak ketiga		4.061.015	4.308.196	3.695.181	Third parties
Piutang pembiayaan	9				Financing receivables
Pihak berelasi		198.786	208.289	180.993	Related parties
Pihak ketiga		1.381.693	1.317.356	1.390.494	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(12.339)	(13.338)	(15.447)	Allowance for impairment losses
Kredit	10				Loans
Pihak ketiga		9.559.927	8.422.485	7.051.743	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(248.848)	(218.438)	(223.144)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan Murabahah	11				Murabahah financing receivables
Pihak berelasi		377	1.654	4.768	Related parties
Pihak ketiga		25.515	3.674	89	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(9)	-	(12)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah	12				Musyarakah Mutanaqisah financing receivables
Pihak ketiga		35.541	21.610	13.316	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(14)	(7)	(342)	Allowance for impairment losses
Premi dan aset reasuransi	13				Premium and reinsurance assets
Pihak berelasi		10.534	28.473	43.458	Related parties
Pihak ketiga		371.123	304.095	310.482	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(34.781)	(34.781)	(34.031)	Allowance for impairment losses
Aset tetap - bersih	14	180.195	181.972	204.704	Property and equipment - net
Aset AI - Ijarah - bersih	15	-	-	240	AI - Ijarah assets - net
Aset tak berwujud - bersih	16,51	167.461	153.290	141.601	Intangible assets - net
Goodwill	17	369.443	369.443	369.443	Goodwill
Aset pajak tangguhan	40	391.673	380.742	387.845	Deferred tax assets
Aset lain-lain	18,51	2.243.089	2.342.310	2.443.317	Other assets
JUMLAH ASET		22.647.254	21.653.968	19.101.546	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

See accompanying notes to interim consolidated financial statements which are an integral part of the interim consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Simpanan	19				Deposits
Pihak berelasi		1.426.641	1.524.695	753.682	Related parties
Pihak ketiga		10.440.230	9.598.751	8.315.127	Third parties
Simpanan dari bank lain	20	61.359	130.675	490.103	Deposits from other banks
Liabilitas segera		96.708	69.299	173.797	Liabilities immediately payable
Utang kepada					Payables to
Lembaga Kliring dan Penjaminan					Indonesian Clearing
Efek Indonesia	6	369.354	385.506	421.663	and Securities Guarantee Institution
Utang Nasabah	21	416.805	347.083	498.855	Customers payables
Utang reasuransi dan utang lain-lain	22	302.998	248.233	232.033	Reinsurance and other payables
Utang pajak	40	25.548	29.696	25.398	Taxes payables
Liabilitas kontrak asuransi dan investasi	23	659.614	573.363	534.608	Insurance and investment contracts liability
Utang bank dan institusi keuangan					Loans from bank and non-bank
non-bank	24	931.265	926.766	976.791	financial institutions
Utang Al-Musyarakah	25	194.576	179.253	194.891	Al-Musyarakah loan
Utang Al-Mudharabah	26	7.685	3.065	1.000	Al-Mudharabah loan
Utang obligasi	27	299.419	299.155	298.673	Bonds payable
Utang sewa pembiayaan	28	10.975	13.705	9.523	Obligations under finance lease
Liabilitas imbalan pasca kerja	29	58.029	56.998	77.035	Employee benefits obligation
Liabilitas lain-lain	30	1.285.117	1.259.914	1.004.533	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		16.586.323	15.646.157	14.007.712	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham					Capital stock - Rp 100 per value per share
Modal dasar - 150.000.000.000 saham					Authorized - 150,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh -					Issued and fully paid -
42.618.850.927 saham pada 30 Juni 2022 dan					42,618,850,927 shares on June 30, 2022 and
31 Desember 2021 dan 39.760.851.927 saham					December 31, 2021 and 39,760,851,927 shares
pada 31 Desember 2020	31	4.261.885	4.261.885	3.976.085	on December 31, 2020
Tambahan modal disetor	32	1.312.867	1.312.867	1.184.910	Additional paid-in capital
Modal lain-lain -					Other capital -
opsi saham karyawan		-	-	26.532	employee stock options
Komponen ekuitas lainnya	33	(732.646)	(712.210)	(729.604)	Other equity components
Saldo laba:					Retained earnings:
Ditentukan penggunaannya		3.500	3.500	3.500	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		467.489	413.269	271.088	Unappropriated
Dikurangi biaya perolehan saham yang					Less cost of treasury stock
diperoleh kembali	35	(109.285)	(126.033)	(126.033)	Equity attributable to
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada					The owners of the Company
Pemilik entitas induk		5.203.810	5.153.278	4.606.478	Non-controlling interests
Kepentingan non-pengendali	35	857.121	854.533	487.356	
JUMLAH EKUITAS		6.060.931	6.007.811	5.093.834	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		22.647.254	21.653.968	19.101.546	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

See accompanying notes to interim consolidated financial statements which are an integral part of the interim consolidated financial statements.

PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR SIX MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2022 AND 2021 (UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
		2022	2021 Tidak diaudit/ Unaudited	2021	2020	
PENDAPATAN						REVENUES
Pendapatan bunga dan dividen	36	804.277	713.727	1.531.716	1.618.002	Interest and dividends income
Pendapatan pasar modal	36	199.020	203.333	433.796	150.151	Capital market income
Pendapatan premi bersih	36	177.331	174.310	371.512	427.158	Net premium income
Pendapatan digital	36	145.062	45.768	144.590	72.123	Digital income
Pendapatan pembiayaan syariah	36	6.293	14.352	27.408	31.456	Syariah financing lease income
Pendapatan operasional lainnya	36	54.541	130.085	226.120	358.342	Other operating income
Jumlah Pendapatan		1.386.524	1.281.575	2.735.142	2.657.232	Total Revenues
BEBAN						EXPENSES
Beban umum dan administrasi	37	644.513	637.212	1.233.850	1.045.425	General and administrative expenses
Beban bunga	38	336.768	401.139	794.941	903.740	Interest expenses
Klaim dan manfaat		168.875	119.338	224.720	448.869	Claims and benefits
Penurunan nilai		77.868	30.642	83.660	77.187	Impairment losses
Komisi neto		9.825	2.966	23.753	8.187	Net commission
Beban bagi hasil syariah		11.278	639	23.094	5.699	Syariah profit sharing expenses
Beban administrasi		2.286	3.281	6.392	7.341	Bank charges
Lain-lain - bersih	39	68.618	73.686	177.685	76.170	Others - net
Jumlah Beban		1.320.031	1.268.903	2.568.095	2.572.618	Total Expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		66.493	12.672	167.047	84.614	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK - BERSIH	40	(3.733)	3.290	(19.877)	(19.089)	INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) - NET
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		62.760	15.962	147.170	65.525	PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK						OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF TAX
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti		4.721	-	2.337	1.997	Remeasurement of defined benefits obligation
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi						Item that may be reclassified to profit or loss
Kerugian dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(21.767)	(31.867)	(6.021)	(4.294)	Loss on changes in value financial assets at fair value through other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		(17.046)	(31.867)	(3.684)	(2.297)	Total other comprehensive income, net of tax
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK		45.714	(15.905)	143.486	63.228	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD, NET OF TAX
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:						PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		54.220	12.738	142.181	62.078	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		8.540	3.224	4.989	3.447	Non-controlling interests
JUMLAH		62.760	15.962	147.170	65.525	TOTAL
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:						COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		42.761	(9.672)	142.372	45.630	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		2.953	(6.233)	1.114	17.598	Non-controlling interests
JUMLAH		45.714	(15.905)	143.486	63.228	TOTAL
LABA PER SAHAM (Rupiah penuh)						EARNINGS PER SHARE (Full rupiah amount)
Dasar		1,29	0,30	3,38	0,17	Basic

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim

See accompanying notes to interim consolidated financial statements which are an integral part of the interim consolidated financial statements

	Komponen ekuitas lainnya/Other equity components													
	Keuntungan yang belum di realisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui	Keuntungan lain - bersih/Unrealized gain of financial assets measured at fair value of other comprehensive income - net	Selain transaksi dengan pihak non-pengendali/ Difference in value of equity transaction with non-controlling interest	Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti/ Remeasurement of defined benefits obligations	Selain transaksi perubahan ekuitas entitas anak/ Difference due to changes in equity of subsidiaries	Saldo laba/Retained earnings/ Sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owners of the company	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity				
Saldo per 1 Januari 2021	3.976.085	1.184.910	(128.033)	26.532	(117.351)	(915.870)	13.287	(9.670)	3.500	271.088	4.606.478	487.356	5.093.834	Balance as of January 1, 2021
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	(22.410)	-	-	-	-	12.738	12.738	3.224	15.982	Net profit for the period
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22.410)	(9.457)	(31.867)	Other comprehensive income
Perubahan saham tanpa hak remesan efek terleleh dahulu	285.800	100.030	-	-	-	67.496	-	-	-	-	385.830	-	385.830	Stock issuance
Selain transaksi perubahan ekuitas dengan pihak non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.496	13.004	80.500	Without/preemptive rights
Perubahan ekuitas entitas anak	-	-	-	-	-	8.472	-	-	-	-	8.472	4.932	13.404	Changes in equity of subsidiaries
Saldo per 30 Jun/2021	4.261.885	1.284.940	(128.033)	26.532	(139.761)	(548.374)	13.287	(1.198)	3.500	283.826	5.058.604	499.059	5.557.663	Balance as of June 30, 2021
Saldo per 1 Januari 2022	4.261.885	1.312.867	(128.033)	-	(118.633)	(548.374)	14.760	(59.963)	3.500	413.289	5.153.278	854.533	6.007.811	Balance as of January 1, 2022
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	(15.010)	-	3.551	-	-	54.220	54.220	(5.587)	8.540	Net profit for the period
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.459)	(5.587)	(17.046)	Other comprehensive income
Penjualan saham yang diperoleh kembali oleh entitas anak	34	-	16.748	-	-	-	-	-	-	-	16.748	-	16.748	Sale of treasury stock by subsidiary
Perubahan ekuitas entitas anak	32	-	-	-	-	-	-	(8.977)	-	-	(8.977)	(385)	(9.342)	Changes in equity of subsidiaries
Saldo per 30 Jun/2022	4.261.885	1.312.867	(109.285)	-	(133.643)	(548.374)	18.311	(89.940)	3.500	467.489	5.203.810	857.121	6.060.931	Balance as of June 30, 2022

Uraian catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

See accompanying notes to interim consolidated financial statements which are an integral part of the interim consolidated financial statements.

Catatan/ Notes	30 Juni/June 30, 2021		31 Desember/December 31,		
	2022	Tidak diaudit/ Unaudited	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima	575.284	479.694	1.041.769	994.454	Interest, loan commissions and fees received
Bunga dan premi penjamin yang dibayar	(229.877)	(289.667)	(590.095)	(602.362)	Interest and guarantee premium paid
Penjualan portofolio efek	92.727	17.767	119.320	266.396	Proceeds from sale of securities owned
Penerimaan dari premi dan klaim reasuransi	230.102	162.364	383.641	290.854	Receipts from premium and reinsurance claims
Penerimaan dari transaksi pasar modal	164.587	184.345	366.402	74.100	Receipts from capital market transaction
Pembayaran pajak	(7.318)	(12.078)	(20.178)	(29.736)	Payments for taxes
Pembayaran kepada karyawan	(225.279)	(215.376)	(485.701)	(419.927)	Payments to employees
Pembayaran pada pemasok	(353.570)	(122.681)	273.678	429.568	Payments from suppliers
Penerimaan dari nasabah	136.541	166.126	273.083	232.424	Receipts from customers
Perolehan portofolio efek	(12.749)	(12.186)	(90.668)	(318.376)	Acquisitions of securities
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	370.448	358.308	1.281.251	917.395	Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi					Decrease (increase) in operating assets
Tagihan derivatif	18	(37)	3.244	4.111	Derivative receivable
Kredit		(1.198.305)	(597.330)	(1.441.162)	Loans
Efek-efek		(1.020)	117.287	291.660	Securities
Aset lain-lain		122.019	(136.763)	22.649	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi					Increase (decrease) in operating liabilities
Simpanan	19	743.426	748.762	2.054.636	Deposits
Liabilitas lain-lain		2.545	(47.833)	(43.015)	Other Liabilities
Liabilitas segera		27.408	105.183	(104.497)	Liabilities payable immediately
Liabilitas derivatif		275	39	8	Derivative payable
Simpanan dari bank lain	20	(69.316)	(291.945)	(359.428)	Deposits from other banks
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(2.557)	258.952	1.706.213	Net Cash provided by (used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Kas dan setara kas dari akuisisi entitas anak setelah dikurangi biaya akuisisi		-	-	-	Cash and cash equivalents from subsidiaries acquired less acquisition cost
Perolehan aset tak berwujud	16	(18.352)	(4.348)	(20.242)	Acquisitions of intangible assets
Penerimaan dari penjualan aset tetap	14	1.946	15.838	20.429	Proceeds from sale of property and equipment
Penerimaan dividen		-	161	492	Dividends received
Perolehan aset tetap	14,49	(15.736)	(7.401)	(28.646)	Acquisitions of property and equipment
Pencairan (penempatan) investasi		99.423	(91.580)	(79.989)	Redemption (placement) of investments
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi		67.281	(87.330)	(107.956)	Net cash flows provided by (used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman	24	1.214.780	1.090.335	2.367.896	Proceeds from borrowings
Penerimaan uang muka setoran saham		-	-	2.780	Proceeds from advance for subscription of capital stocks
Penerimaan setoran modal saham dari pihak non-pengendali entitas anak		-	4	288.018	Proceeds from issuance of capital stock from non-controlling interest of subsidiaries
Pembayaran bunga		(111.202)	(112.701)	(237.384)	Payments of interest
Pembayaran pinjaman pada pihak ketiga	24	(1.230.161)	(1.359.071)	(2.935.726)	Payments of loans to third parties
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(126.583)	(381.433)	(514.416)	Net Cash used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(61.859)	(209.811)	1.083.841	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Pengaruh perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas		(4.157)	(8.829)	(14.520)	Net foreign exchange difference on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		2.827.492	1.758.171	1.758.171	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		2.761.476	1.539.531	2.827.492	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim.

See accompanying notes to interim consolidated financial statements which are an integral part of the interim consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Entitas

PT MNC Kapital Indonesia Tbk ("Entitas") didirikan dengan nama PT Bhakti Capital Indonesia Tbk berdasarkan Akta Notaris dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, No. 100 tanggal 15 Juli 1999. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097.

Berdasarkan akta No. 23 tanggal 7 November 2012 nama Entitas diubah menjadi PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusan No.AHU-62954.AH.01.02.2012 tanggal 7 Desember 2012.

Entitas induk dan entitas induk terakhir adalah PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk).

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Entitas berdasarkan Akta No. 27 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor yang telah diterima dan dicatat dalam sistem pelaporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0244174 tertanggal 19 April 2021.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, ruang lingkup kegiatan Entitas meliputi antara lain:

- Menjalankan usaha-usaha bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan;
- Mendirikan dan ikut serta dalam Entitas dan badan hukum/badan usaha lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Entitas berlokasi di kantor pusat MNC Financial Center, lantai 21, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340, Indonesia.

Entitas mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tanggal 19 Mei 2000.

1. GENERAL

a. The Entity's Establishment

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (Entity) was established under the name PT Bhakti Capital Indonesia Tbk based on the Notarial Deed No. 100 of Rachmat Santoso, S.H., a Notary in Jakarta, dated July 15, 1999. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decree No. C-16030.HT.01.01.Th.99 dated September 6, 1999 and was published in the State Gazette No. 27 dated April 3, 2001, Supplement No. 2097.

Based on Notarial Deed No. 23 dated November 7, 2012, the Entity's name was changed to PT MNC Kapital Indonesia Tbk. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-62954.AH.01.02.2012 dated December 7, 2012.

The Entity's parent and the ultimate parent is PT MNC Asia Holding Tbk (formerly PT MNC Investama Tbk).

The Entity's Articles of Association has been amended several times. The latest amendment is based on Notarial Deed No. 27 dated March 23, 2021 of Aulia Taufani, SH, Notary in South Jakarta, regarding to the increase in of issued/paid-up capital which was received and recorded in the system database of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia under Letter No. AHU-AH.01.03-0244174 dated April 19, 2021.

In accordance with article 3 of the Entity's Articles of Association, the scope of Entity's activities include the following:

- *Provide services related to general services, except in legal and tax services;*
- *Provide services related to industrial services;*
- *Provide services related to trading sector;*
- *Establish and participate in companies and corporations/other entities, both domestic and abroad.*

The Entity's head office is located at MNC Financial Center, 21st floor, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340, Indonesia.

The Entity started its commercial operations on May 19, 2000.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Saham Umum Entitas

Entitas memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) berdasarkan Surat Keputusan No. S-1096/PM/2001 tanggal 18 Mei 2001 untuk melakukan penawaran umum atas 250.000.000 saham Entitas dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 250 per saham kepada masyarakat. Saham Entitas telah dicatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 8 Juni 2001.

Pada tanggal 16 Oktober 2012, Entitas memperoleh persetujuan dari Direktur Bursa Efek Indonesia dengan suratnya No. S-07068/BEL.PPJ/10-2012 terkait pencatatan saham tambahan yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 87.500.000 saham.

Pada tanggal 20 Juni 2014, Entitas memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No.S-290/D.04/2014 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 2.615.276.045 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 900 per saham. Setiap pemegang saham Entitas yang mempunyai 11 saham pada tanggal 2 Juli 2014 mempunyai 21 HMETD untuk membeli 21 saham baru dengan harga penawaran Rp 900 per saham.

Pada tanggal 14 April 2015, Entitas telah melakukan pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD sebanyak 128.823.255 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, dan harga pelaksanaan sebesar Rp 1.800 per saham. Penambahan saham tanpa HMETD tersebut, sebelumnya telah memperoleh persetujuan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 28 April 2014 yang Berita Acara Rapatnya termuat dalam Akta Notaris No. 94 tanggal 28 April 2014, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Penambahan saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 April 2015.

Pada tanggal 25 September 2015, Entitas memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No.S-438/D.04/2015 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dalam rangka penerbitan HMETD dengan rincian sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Initial Public Offering

The Entity obtained the notice of effectivity from the Chairman of Bapepam (currently The Financial Services Authority (OJK)) through decree No.S-1096/PM/2001 dated May 18, 2001 for its public offering of 250,000,000 shares with par value of Rp 100 per share at the offering price of Rp 250 per share to the public. The Entity's shares were listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges on June 8, 2001.

On October 16, 2012, the Entity obtained an approval from the Director of Indonesia Stock Exchange in his letter No. S-07068/BEL.PPJ/10-2012 for the listing of additional 87,500,000 shares through Rights Issue without Preemptive Rights to the shareholders.

On June 20, 2014, the Entity obtained the statement of effectivity from the Commissioner of the Financial Services Authority (OJK) with letter No.S-290/D.04/2014 for the Limited Public Offering I (PUT I) through Rights Issue with Preemptive Rights (HMETD) to the shareholders at a maximum of 2,615,276,045 shares with par value of Rp 100 per share at an offering price of Rp 900 per share. Every shareholder with 11 shares as of July 2, 2014 has 21 preemptive rights to purchase 21 shares at an offering price of Rp 900 per share.

On April 14, 2015, the Entity carried-out a share subscription without preemptive rights (HMETD) amounting to 128,823,255 shares with par value of Rp 100 per share and exercise price amounting to Rp 1,800 per share. The Rights Issue without HMETD was approved during the Extraordinary Meeting of Shareholders on April 28, 2014 in which the Minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders is stated in Notarial Deed No. 94 dated April 28, 2014 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta. The additional shares have been recorded with the Indonesia Stock Exchange on April 14, 2015.

On September 25, 2015, the Entity obtained the statement of effectivity from the Commissioner of the Financial Services Authority (OJK) under letter No. S-438/D.04/2015 for the Limited Public Offering II (PUT II) through Pre-emptive Rights (HMETD) with the following details:

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Saham Umum Entitas (lanjutan)

- Jumlah maksimum saham baru yang akan ditawarkan adalah 551.474.960 saham biasa dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 1.500 per saham, sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp 827.212.440.000 dengan ketentuan setiap pemegang 15 (lima belas) saham berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 HMETD berhak untuk membeli 1 saham baru.
- Penerbitan sebanyak-banyaknya 551.474.960 Waran Seri I, dimana untuk setiap 1 saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 waran seri I yang akan diberikan secara cuma-cuma dan setiap 1 Waran seri I memiliki hak untuk membeli 1 saham Entitas dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga pelaksanaan Rp 1.500 per saham, sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp 827.212.440.000 yang dapat dilaksanakan mulai 11 April 2016 sampai tanggal 7 Oktober 2016. Sampai dengan 31 Desember 2016, jumlah yang telah dilaksanakan Waran Seri I adalah 549.519.579 waran.

Pada tanggal 3 Mei 2016, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham telah disetujui penerbitan saham tambahan hingga 328.256.955 lembar berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Pada tanggal 17 Mei 2016, Direktur Bursa Efek Indonesia dengan suratnya No. S-03146/BEI.PP2/05-2016, menyetujui pencatatan saham tambahan sebanyak 232.207.479 lembar.

Pada tanggal 30 Mei 2017, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah disetujui penerbitan saham tambahan hingga 406.627.281 lembar berasal dari Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Pada tanggal 3 April 2018, Direktur Bursa Efek Indonesia dengan suratnya No. S-01969/BEI.PP2/04-2018, menyetujui pencatatan saham tambahan sebanyak 15.822.785 lembar.

Pada tanggal 12 Juli 2018, Direktur Bursa Efek Indonesia dengan suratnya No. S-04033/BEI.PP2/07-2018, menyetujui pencatatan saham tambahan sebanyak 15.822.785 lembar.

Berdasarkan Akta Notaris dari Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta, No.26 tanggal 16 Agustus 2018, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui:

- Meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari 15.000.000.000 lembar saham menjadi 150.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham.
- Pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham dengan rasio 1:6, dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 33.026.903.328, sehingga jumlah saham Perusahaan yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar 38.531.387.216.

1. GENERAL (continued)

b. Initial Public Offering (continued)

- The maximum number of new shares that will be offered is 551,474,960 ordinary shares at an exercise price of Rp 1,500 per share, equal to maximum of Rp 827,212,440,000 where each holder of 15 (fifteen) shares are entitled to 2 pre-emptive right, whereby 1 pre-emptive right shall be entitled to purchase 1 new share.
- The issuance of a maximum of 551,474,960 Warrant Series I, wherein for every 1 share arising from the execution of the pre-emptive rights will be given 1 Warrant Series I free of charge and every 1 Warrant Series I has the right to purchase 1 share of the Entity with par value of Rp 100 per share at an exercise price of Rp 1,500 per share, equal to a maximum amount of Rp 827,212,440,000, which can be exercised starting on April 11, 2016 to October 7, 2016. As of December 31, 2016, the total Warrant Series I exercised was 549,519,579 warrants.

On May 3, 2016, based on the Annual General Meeting of the Shareholders, it was agreed to issue additional shares up to 328,256,955 shares through Rights Issue without Preemptive Rights to the shareholders.

On May 17, 2016, the Director of Indonesia Stock Exchange in his letter No. S-03146/BEI.PP2/05-2016 approved the listing of additional 232,207,479 shares.

On May 30, 2017, according to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, it was agreed to issue additional shares up to 406,627,281 shares through Rights Issue without Preemptive Rights to the shareholders.

On April 3, 2018, the Director of Indonesia Stock Exchange in his letter No. S-01969/BEI.PP2/04-2018 approved the listing of additional 15,822,785 shares.

On July 12, 2018, the Director of Indonesia Stock Exchange in his letter No. S-04033/BEI.PP2/07-2018 approved the listing of additional 15,822,785 shares.

Based on the Notarial Deed No. 26 of Aulia Taufani, S.H., a Notary in Jakarta, dated August 16, 2018, the Annual General Meeting of the Shareholders approved to:

- Increase the Company's Authorized shares from 15,000,000,000 shares to 150,000,000,000 shares with par value of Rp 100 per share.
- Distribute bonus shares from additional paid in capital with ratio 1:6, with maximum shares 33,026,903,328, as a result the Company's shares, issued and fully paid, amounting 38,531,387,216

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Saham Umum Entitas (lanjutan)

Pada tanggal 15 Mei 2019, Direktur Bursa Efek Indonesia dengan suratnya No. S-02707/BEI.PP2/05-2019, menyetujui pencatatan saham tambahan sebanyak 374.981.711 lembar.

Pada tanggal 20 Juni 2019, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah disetujui penerbitan saham tambahan hingga 3.712.482.170 lembar berasal dari Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Pada tanggal 7 Februari 2020, Direktur Bursa Efek Indonesia dengan suratnya No. S-00896/BEI.PP2/02-2020, menyetujui pencatatan saham tambahan sebanyak 854.483.000 lembar.

Pada tanggal 7 Januari 2021, Direktur Bursa Efek Indonesia dengan suratnya No. S-00104/BEI.PP2/01-2021, menyetujui pencatatan saham tambahan sebanyak 2.857.999.000 lembar.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebanyak 42.618.850.927 lembar saham telah dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia.

c. Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30, 2022	31 Desember/December 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	
Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Komisaris Utama	Darma Putra	Darma Putra	Darma Putra	President Commissioner
Komisaris	Tien	Tien	Tien	Commissioner
Komisaris Independen	Sukisto	Sukisto	Sukisto	Independent Commissioner
Direksi				Directors
Direktur Utama	Wito Mailoa	Wito Mailoa	Wito Mailoa	President Director
Direktur	Jessica Herliani Tanoesoedibjo	Jessica Herliani Tanoesoedibjo	Jessica Herliani Tanoesoedibjo	Director
Direktur	Natalia Purnama	Natalia Purnama	Natalia Purnama	Director
Direktur	Ageng Purwanto	Ageng Purwanto	Ageng Purwanto	Director
Direktur	Peter Fajar	Samuel Mulyono*	Samuel Mulyono	Director
Direktur	-	Darma Widjaja*	Darma Widjaja	Director
Direktur	-	Peter Fajar	Peter Fajar	Director
Komite Audit				Audit Committee
Ketua	Sukisto	Sukisto	Sukisto	Chairman
Anggota	Andrea Frans Tambunan	Andrea Frans Tambunan	Andrea Frans Tambunan	Member
Anggota	Riza Satria	Riza Satria	Verdi Surjadi	Member
Sekretaris Perusahaan	Edward Kennetze Lubis	Edward Kennetze Lubis	Edward Kennetze Lubis	Corporate Secretary
Audit Internal	M. Ilham Abrar	M. Ilham Abrar	Angga Surya Putra Perdana	Internal Audit

* Telah mengundurkan diri pada bulan Februari 2022 dan akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

1. GENERAL (continued)

b. Initial Public Offering (continued)

On May 15, 2019, the Director of Indonesia Stock Exchange in his letter No. S-02707/BEI.PP2/05-2019 approved the listing of additional 374,981,711 shares.

On June 20, 2019, according to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, it was agreed to issue additional shares up to 3,712,482,170 shares through Rights Issue without Preemptive Rights to the shareholders.

On February 7, 2020, the Director of Indonesia Stock Exchange in his letter No. S-00896/BEI.PP2/02-2020 approved the listing of additional 854,483,000 shares.

On January 7, 2021, the Director of Indonesia Stock Exchange in his letter No. S-00104/BEI.PP2/01-2021 approved the listing of additional 2,857,999,000 shares.

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, 42,618,850,927 shares, respectively, have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

c. Board of Commissioners and Directors and Employees

The composition of the Entity's Board of Commissioners and Directors as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 is as follows:

* Resigned in February, 2022 and will be effective upon approval at the General Shareholder's Meeting.

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 jumlah karyawan Entitas dan Entitas anak masing-masing adalah 2.207, 2.146 dan 2.049 orang karyawan (tidak diaudit).

d. Struktur Entitas Anak

Entitas mempunyai pengendalian, baik langsung maupun tidak langsung pada Entitas anak berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners and Directors and Employees (continued)

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Entity and its subsidiaries have 2,207, 2,146 and 2,049 employees, respectively (unaudited).

d. Structure of the Subsidiaries

The Entity had control directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Berdiri/ Year of Incorporation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership			Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)		
				30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
PT MNC Asset Management (MNCAM) *	Jakarta	Jasa pengelolaan investasi/ Fund investment	1999	99,99%	99,99%	99,99%	98.735	82.320	79.118
PT MNC Finance (MNCF) *	Jakarta	Lembaga pembiayaan/ Multi finance	1989	99,99%	99,99%	99,99%	1.351.391	1.282.364	1.387.363
PT MNC Sekuritas (MNCS) *	Jakarta	Jasa perantara pedagang efek dan penjamin emisi/ Brokerage and underwriting	2004	99,99%	99,99%	99,99%	1.875.467	1.771.741	2.007.016
PT MNC Life Assurance (MNCL) *	Jakarta	Jasa asuransi jiwa/ Life insurance	1988	99,98%	99,98%	99,98%	420.894	376.601	384.396
PT MNC Asuransi Indonesia (MNCAI) *	Jakarta	Jasa asuransi umum/ General insurance	1987	99,98%	99,98%	99,98%	638.976	591.157	566.735
PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGUI) *	Jakarta	Jasa penyewaan/ Leasing	1993	99,99%	99,99%	99,99%	688.052	627.262	614.702
PT Bank MNC Internasional Tbk (BMNCI) *	Jakarta	Bank/Banking	1989	48,99%	45,57%	50,43%	14.765.318	14.015.360	11.652.904
Winfly Ltd (WINFLY) *	British virgin island	Perusahaan investasi/ Investment Company	2006	100,00%	100,00%	100,00%	660.797	996.139	385.283
Auerbach Grayson Ltd (AGCO) **	United States of America	Jasa perantara pedagang efek dan penjamin emisi/ Brokerage and underwriting	1990	75,00%	75,00%	-	89.865	112.729	-
PT Medan Nusantara Propertindo (MDNP) *	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	2016	99,92%	99,92%	99,92%	28.659	29.542	28.646
PT Riau Nusantara Propertindo (RINP) *	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	2016	99,92%	99,92%	99,92%	6.809	7.132	7.231
PT Motion Crypto Technology (dahulu PT Bandung Nusantara Propertindo) *	Jakarta	Jasa perantara perdagangan aset digital/ Digital asset brokerage	2016	99,92%	99,92%	99,92%	49.958	105	106
PT Semarang Nusantara Propertindo (SGNP) *	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	2016	99,92%	99,92%	99,92%	112	113	112
PT Makassar Nusantara Propertindo (MKNP) *	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	2016	-	-	99,92%	-	-	167
PT MNC Insurance Broker (MIB) *	Jakarta	Jasa perantara asuransi/ Insurance broker	2021	99,99%	-	-	3.253	-	-
PT Modal Anak Bangsa (MAB) *	Jakarta	Layanan Urun Dana/ Equity Crowd Funding	2016	99,99%	99,99%	99,99%	2.646	3.483	1.489
PT Sistem Informasi Aplikasi Pembayaran (SIAP) *	Jakarta	Finansial Teknologi/ Financial Technology	2016	99,99%	99,99%	99,92%	12.236	13.358	113
PT MNC Modal Ventura (MNV) *	Jakarta	Modal ventura/ Ventura capital	2016	99,92%	99,92%	99,92%	108	108	113
PT MNC Teknologi Nusantara (MTN) *	Jakarta	Finansial Teknologi/ Financial Technology	2018	99,99%	99,99%	99,99%	181.214	174.688	155.319
Lafite Assets Ltd (LAFITE) *	British virgin island	Perusahaan Investasi/ Investment Company	2006	100,00%	100,00%	100,00%	868.659	883.096	376.159
PT Flash Mobile (FM) *	Jakarta	Teknologi Informasi/ Information Technology	2004	99,99%	99,99%	99,99%	74.312	70.922	83.042
PT Motion Digital Technology (MDT) *	Jakarta	Perusahaan investasi/ Investment Company	2022	99,99%	-	-	999	-	-
PT Motion Digital Ltd (MDL) *	British virgin island	Perusahaan investasi/ Investment Company	2022	99,99%	-	-	2	-	-

*) Pemilikan langsung/Direct ownership

**) Pemilikan tidak langsung/Indirect ownership

1. UMUM (lanjutan)

d. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan BMNCI, entitas dengan kepentingan non-pengendali anak sebelum eliminasi intra Kelompok Usaha, pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dibawah ini:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020
Jumlah Aset	14.765.318	14.015.360	11.652.904
Liabilitas	12.384.167	11.649.903	10.101.667
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada			
Pemilik entitas induk	1.166.427	1.158.837	782.289
Kepentingan non-pengendali	1.214.724	1.206.620	768.948
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	14.765.318	14.015.360	11.652.904

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2021	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2020
Pendapatan	600.264	562.952	1.177.571
Beban	565.595	558.169	1.167.157
Keuntungan untuk tahun berjalan	34.669	4.783	10.414
Penghasilan Komprehensif Lain			
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual - bersih setelah pajak	(22.007)	(19.072)	26.055
Jumlah penghasilan Komprehensif Lain - setelah pajak	(22.007)	(19.072)	28.549
Jumlah penghasilan Komprehensif tahun berjalan	12.662	(14.289)	38.963
Laba yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	16.983	2.412	5.252
Kepentingan non-pengendali	17.686	2.371	5.162
Jumlah	34.669	4.783	10.414

Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik entitas induk	6.203	(7.206)	19.649
Kepentingan non-pengendali	6.459	(7.083)	19.314
Jumlah Laba Komprehensif untuk tahun berjalan	12.662	(14.289)	38.963

1. GENERAL (continued)

d. Structure of the Subsidiaries (continued)

Summarized financial information before intragroup eliminations as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 for the six months period ended June 30, 2022 and 2021 and years ended December 31, 2021 and 2020 in respect of BMNCI, a subsidiary with material non-controlling interest is set out below:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2021	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2020
Total Assets	14.765.318	14.015.360	11.652.904
Liabilities	12.384.167	11.649.903	10.101.667
Equity attributable to Owners of the Company	1.166.427	1.158.837	782.289
Non-controlling interest	1.214.724	1.206.620	768.948
Total Liabilities and Equity	14.765.318	14.015.360	11.652.904
Revenues	600.264	562.952	1.177.571
Expenses	565.595	558.169	1.167.157
Net profit for the year	34.669	4.783	10.414
Other Comprehensive Income			
Item that may be reclassified subsequently	(22.007)	(19.072)	26.055
Gain (loss) on changes in fair value of available for sale securities net of tax	(22.007)	(19.072)	28.549
Total Other Comprehensive Income (Loss) - net of tax	(22.007)	(19.072)	28.549
Total Comprehensive Income for the year	12.662	(14.289)	38.963
Profit attributable to:			
Owner of the Company	16.983	2.412	5.252
Non-controlling interests	17.686	2.371	5.162
Total	34.669	4.783	10.414
Total Comprehensive Income (Loss) attributable to:			
Owner of the Company	6.203	(7.206)	19.649
Non-controlling interests	6.459	(7.083)	19.314
Total Comprehensive Income for the year	12.662	(14.289)	38.963

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI

a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2022)

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amandemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2021

PSAK 73 (amendemen) Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

- PSAK 22 (amendemen) Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual
- PSAK 57 (amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2020 atas PSAK (amendemen PSAK 69 Agrikultur, PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa)

b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2023)

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- PSAK 74, “Kontrak Asuransi”;
- Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amandemen PSAK 16, “Aset Tetap”;
- Amandemen PSAK 22, “Kombinasi bisnis”;
- Amandemen PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi”;
- Amandemen PSAK 46, “Pajak Penghasilan”.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)

a. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2022)

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Group were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after April 1, 2021

PSAK 73 (amendment) Leases: Covid19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021

Effective for periods beginning on or after January 1, 2022

- PSAK 22 (amendment) Business Combinations: References to the Conceptual Framework
- PSAK 57 (amendment) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts
- 2020 Annual Improvements to PSAK (amendments to PSAK 69 Agriculture, PSAK 71 Financial Instruments, and PSAK 73 Leases)

b. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued but not Effective in the Current Year (on or after January 1, 2023)

New standards, amendments and annual improvements issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2023 are as follows:

- PSAK 74, “Insurance Contracts”;
- Amendments to PSAK 1, “Presentation of Financial Statements”;
- Amendments to PSAK 16, “Property, Plant and Equipment”;
- Amendments to PSAK 22, “Business combination”;
- Amendments to PSAK 25, “Accounting Policies”; and
- Amendments to PSAK 46, “Income Tax”.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan SAK, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan SAK mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritikal tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mensyaratkan manajemen Grup untuk menggunakan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup. Area di mana pertimbangan dan estimasi yang signifikan telah dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya diungkapkan dalam Catatan 4.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance Statement

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with SAK, which comprises the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Attachment to the Decision of the Chairman of Bapepam – LK (now becoming Indonesian Financial Services Authority or OJK) No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 that is Regulation No.VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosures of the Financial Statements of the Public Company that is effective for the financial statements ending on or after December 31, 2012.

The consolidated financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for the consolidated statement of cash flows using cash basis.

The measurement in the preparation of consolidated financial statements is historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of the respective account.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah (Rp) which also represents the functional currency of the Group.

The preparation of the consolidated financial statements in compliance with SAK requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires Group management to exercise judgment in applying the Group's accounting policies. The areas where significant judgments and estimates have been made in preparing the consolidated financial statements and their effect are disclosed in Note 4.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

PSAK mensyaratkan Entitas induk (Entitas yang mengendalikan satu atau lebih Entitas lain) untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor menentukan apakah investor merupakan Entitas induk dengan menilai apakah investor mengendalikan satu atau lebih *investee*. Investor mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan ketika menilai apakah investor mengendalikan *investee*.

Investor dikatakan sebagai pengendali ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika, investor memenuhi seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee* (misalnya hak yang ada saat ini yang memberi investor tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Pada umumnya, mayoritas hak suara menghasilkan pengendalian. Ketika Entitas memiliki kurang dari mayoritas hak suara, atau serupa atas *investee*, investor mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemegang suara lainnya dari *investee*;
- hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual;
- hak suara dan hak suara potential investor.

Investor menilai kembali apakah investor bersangkutan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Prosedur Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian:

- menggabungkan item sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dari Entitas induk dengan Entitas anaknya;

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation

PSAK requires a parent entity (an entity that controls one or more other entities) to present consolidated financial statements. An investor determines whether it is a parent by assessing whether it controls one or more investees. An investor considers all relevant facts and circumstances when assessing whether it controls an investee.

Control is achieved when the investor is exposed or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the investor controls the investee if and only if, the investor has the following elements:

- power over the investee (i.e. existing rights to give it the current ability to direct the relevant activities of the investee);
- exposures or rights to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power over the investee to affect the investor's returns.

Generally, a majority of voting rights result in control. When the Entity has less than a majority of the voting, or similar, rights of an investee, it considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, which includes:

- the contractual arrangement(s) with the other vote holders of investee;
- rights arising from other contractual arrangement(s);
- the Entity's voting rights and potential voting rights.

Investor reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three element of control.

Consolidation Procedures

Consolidated financial statements:

- combine like items of assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the parent with those of its subsidiaries;

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Prosedur Konsolidasi (lanjutan)

- menghapus (mengeliminasi) jumlah tercatat dari investasi Entitas induk di setiap Entitas anak dan bagian Entitas induk pada ekuitas setiap Entitas anak;
- mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha yang berkaitan dengan transaksi antara Entitas-Entitas dalam Kelompok Usaha.

Entitas memasukkan penghasilan dan beban Entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi.

Entitas dan entitas anaknya disyaratkan untuk mempunyai kebijakan akuntansi dan tanggal pelaporan yang sama, atau konsolidasian berdasarkan informasi keuangan tambahan yang dibuat Entitas anak.

Kepentingan Nonpengendali (NCI)

Entitas induk menyajikan NCI di laporan posisi keuangan konsolidasiannya dalam ekuitas, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Entitas mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik Entitas induk dari Kelompok Usaha dan NCI, meskipun hal tersebut mengakibatkan NCI memiliki saldo defisit atas dasar kepentingan kepemilikan sekarang.

Perubahan Proporsi Kepemilikan

Perubahan kepemilikan Entitas dalam Entitas anak yang tidak menghasilkan kehilangan pengendalian di Entitas anak adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh NCI berubah, entitas menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan NCI untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

Consolidation Procedures (continued)

- offset (eliminate) the carrying amount of the parent's investment in each subsidiary and the parent's portion of equity of each subsidiary;
- eliminate in full intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the Group.

A reporting entity includes the income and expenses of a subsidiary in the consolidated financial statements from the date it gains control until the date when the reporting entity ceases to control the subsidiary. Income and expenses of the subsidiary are based on the amounts of the assets and liabilities recognized in the consolidated financial statements at the acquisition date.

The parent and subsidiaries are required to have the same accounting policies and reporting dates, or consolidation based on additional financial information prepared by subsidiary.

Non Controlling Interest (NCI)

A parent presents NCI in its consolidated statement of financial position within equity, separately from the equity of the owners of the parent.

Profit or loss and each component of OCI are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the NCI, even if this results in the NCI having a deficit balance on the basis of present ownership interests.

Changes in Ownership Interests

Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the parent losing control of the subsidiary are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of the equity held by NCI changes, the carrying amounts of the controlling and NCI are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Perubahan Proporsi Kepemilikan (lanjutan)

Entitas tersebut mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat NCI yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk.

Kehilangan Pengendalian

Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk:

- a. menghentikan pengakuan aset dan liabilitas Entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian;
- b. mengakui sisa investasi apapun pada Entitas anak terdahulu pada saat hilangnya pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada Entitas anak terdahulu sesuai dengan PSAK lain yang relevan. Sisa investasi tersebut diukur kembali dan pengukuran kembali tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK, atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada Entitas asosiasi atau ventura bersama;
- c. mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

Entitas Investasi – Pengecualian Konsolidasi

Entitas investasi tidak mengkonsolidasi entitas anaknya atau menerapkan PSAK No. 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis” ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain. Ketika entitas menjadi, atau berhenti, menjadi entitas investasi, entitas menerapkan secara prospektif perubahan statusnya dari tanggal terjadinya perubahan status tersebut.

Entitas investasi adalah entitas yang:

- a. Memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;
- b. Menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- c. Mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya yang substansial berdasarkan pada nilai wajar.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

Changes in Ownership Interests (continued)

Any difference between the amount by which the NCI's are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Loss of Control

When there is a loss control over subsidiary, the parent entity:

- a. derecognizes the assets and liabilities of the former subsidiary from the consolidated statement of financial position;
- b. recognizes any investment retained in the former subsidiary when control is lost and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary in accordance with relevant PSAK. The retained interest is remeasured and the remeasured value is regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset in accordance with PSAK, or, when appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture;
- c. recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.

Investment Entity Consolidation Exemption

Investment entity does not consolidate its subsidiaries, or apply PSAK No.22 (Revised 2010), “Business Combinations” when it obtains control of another Entity. When an Entity becomes, or ceases to be, an investment Entity, it applies its status change prospectively from the date of change.

An Investment Entity is an entity that:

- a. Obtains funds from one or more investors for the purpose of providing those investor(s) with investment management services;
- b. Commits to its investor(s) that its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and
- c. Measures and evaluates the performance of substantially all of its investments on a fair value basis.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Entitas Investasi - Pengecualian Konsolidasi (lanjutan)

Entitas disyaratkan untuk mempertimbangkan semua fakta dan keadaan apakah entitas merupakan entitas investasi, termasuk tujuan dan desainnya seperti:

- a. Memiliki lebih dari satu investasi;
- a. Memiliki lebih dari satu investor;
- c. Memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas;
- d. Memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk kepentingan ekuitas atau kepentingan serupa.

Jika tidak terdapat karakteristik khusus tersebut tidak berarti mendiskualifikasikan entitas dari pengklasifikasian sebagai entitas investasi. Entitas investasi yang tidak memiliki seluruh karakteristik khusus tersebut memberikan pengungkapan tambahan yang disyaratkan oleh PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Entitas investasi disyaratkan untuk mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan".

Karena entitas investasi tidak disyaratkan untuk mengkonsolidasi entitas anaknya, transaksi pihak berelasi intra Kelompok Usaha dan saldo tidak dieliminasi.

Pengecualian terhadap konsolidasi hanya diterapkan pada entitas investasi tersebut. Oleh karenanya entitas induk dari entitas investasi mengkonsolidasi seluruh entitas yang dikendalikannya, termasuk entitas yang dikendalikan melalui entitas anak yang merupakan entitas investasi, kecuali entitas induk itu sendiri merupakan entitas investasi.

Persyaratan pengungkapan untuk laporan keuangan konsolidasian diatur dalam PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

Investment Entity Consolidation Exemption (continued)

An entity is required to consider all facts and circumstances when determining whether it is an investment entity, including its purpose and design such as:

- a. It has more than one investment;*
- b. It has more than one investor;*
- c. It has investors that are not related parties of the entity;*
- d. It has ownership interests in the form of equity or similar interests.*

The absence of any of these typical characteristics does not necessarily disqualify an entity from being classified as an investment entity. Investment entity that does not have all those typical characteristics provide additional information as required by PSAK No. 67, "Disclosures of Interests in Other Entities".

An investment entity is required to measure an investment in a subsidiary at fair value through profit or loss in accordance with PSAK No.71, "Financial Instruments".

Because an investment entity is not required to consolidate its subsidiaries, intragroup related party transactions and outstanding balances are not eliminated.

The exemption from consolidation only applies to the investment entity itself. Accordingly, a parent of an investment Entity is required to consolidate all entities that it controls, including those controlled through an investment entity subsidiary, unless the parent itself is an investment entity.

The disclosure requirements for consolidated financial statements are specified in PSAK No. 67, "Disclosure of Interests in Other Entities".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Entitas Investasi - Pengecualian Konsolidasi (lanjutan)

Sebagaimana diatur dalam PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri", laporan keuangan tersendiri (Entitas induk) dapat disajikan hanya jika laporan tersebut merupakan informasi tambahan pada laporan keuangan konsolidasian dan disajikan sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi di Entitas anak, asosiasi dan ventura bersama adalah metode biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan". Laporan keuangan tersendiri terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

c. Kombinasi Bisnis dan Goodwill

Kombinasi bisnis diterapkan dengan metode akuisisi. Harga perolehan suatu akuisisi diukur sebagai imbalan agregat yang dialihkan, diukur dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap NCI pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Entitas memilih apakah mengukur NCI pada pihak yang diakuisisi baik nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan NCI atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul sehubungan dengan akuisisi dibebankan langsung dalam "Beban Umum dan Administrasi".

Ketika Entitas mengakuisisi sebuah bisnis, Entitas menilai aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih untuk klasifikasi dan penetapan yang sesuai dengan persyaratan kontraktual, keadaan ekonomi dan keadaan terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi.

Jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas yang dimiliki Entitas sebelumnya pada pihak yang diakuisisi diukur kembali pada nilai wajar tanggal akuisisi dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas akan diakui sesuai dengan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan", baik dalam laba rugi ataupun sebagai OCI. Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali sampai penyelesaian akhir dalam ekuitas.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

Investment Entity Consolidation Exemption
(continued)

As regulated in PSAK No.4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements", separate financial statements (parent entity) can be served only when those statements are additional information on the consolidated financial statements and are presented as an attachment to the consolidated financial statements. The method used to record investments in subsidiaries, associations and joint ventures are cost method or in accordance with PSAK No. 71, "Financial Instruments". Separate financial statements consist of the statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows.

c. Business Combination and Goodwill

Business combination is accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Entity selects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or proportionate shares of the acquiree's identifiable net assets. All other costs incurred associated with an acquisition are directly expensed and included in "General and Administrative Expenses".

When the entity acquires a business, it assesses the identifiable assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic condition and other pertinent circumstances as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the entity's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and recognized gain (loss), if any, in the statement of profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized in accordance with PSAK No. 71, "Financial Instrument", either in profit or loss or as OCI. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

c. Kombinasi Bisnis dan Goodwill (lanjutan)

Pada tanggal akuisisi, pengakuan awal *goodwill* pada awalnya diukur adalah biaya perolehan yang merupakan selisih lebih (a) atas (b) dibawah ini:

- (a) nilai agregat dari:
- (i) imbalan yang dialihkan yang diukur pada nilai wajar;
 - (ii) jumlah setiap NCI pada pihak yang diakuisisi; dan
 - (iii) untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar kepentingan ekuitas yang dimiliki Entitas sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi.
- (b) Selisih jumlah net aset yang teridentifikasi dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi.

Jika nilai agregat dari jumlah (b) melebihi nilai agregat dari jumlah (a), maka perbedaannya diakui dalam laporan laba atau rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon setelah penilaian sebelumnya atas pengidentifikasian dan pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi yang diakuisisi dan liabilities yang diambil-alih dan dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi dan OCI.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dari tanggal akuisisi, dialokasikan ke setiap CGU dari entitas yang diharapkan bermanfaat dari kombinasi tersebut, terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas CGU tersebut. Pengakuan penurunan nilai disyaratkan di PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset".

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu CGU dan operasi tertentu dari CGU tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian disposal tersebut. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi CGU yang ditahan.

Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 22 (Revisi 2014), "Kombinasi Bisnis", jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan pada saat kombinasi bisnis terjadi, Entitas melaporkan jumlah provisi item-item yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Entitas menyesuaikan secara retrospektif jumlah provisi yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Business Combination and Goodwill (continued)

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of (a) over (b) below:

- (a) *The aggregate of:*
- (i) *the consideration transferred which is measured at fair value;*
 - (ii) *the amount recognized for NCI in the acquire; and*
 - (iii) *for the business combination that is achieved in stages, the fair value of the Entity's previously held equity interest in the acquiree at the acquisition date.*
- (b) *the difference between net identifiable assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date.*

If the aggregate amount of (b) exceeds the aggregate of amount (a), the difference is recognized in the statement of profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities and recorded in the consolidated statement of profit or loss and OCI.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, allocated to each the entity's Cash Generating Units (CGU) that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs. Impairment recognition is required by PSAK No. 48, "Impairment of Assets".

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained

In accordance with the provision of PSAK No. 22 (Revised 2014), "Business Combinations", if the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the entity shall report in its consolidated financial statements provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. During the measurement period, the entity shall retrospectively adjust the provisional amounts recognized at acquisition date to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have affected the measurement of the amounts recognized as of that date.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

PSAK menentukan penerapan metode ekuitas atas investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama.

Entitas asosiasi adalah suatu entitas yang mana investor mempunyai pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan.

Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas aset bersih *investee* setelah tanggal perolehan. Laba atau rugi investor mencakup dari laba atau rugi *investee* dan OCI dari investor mencakup bagian OCI dari *investee*. *Goodwill* terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama terdapat dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun pengujian penurunan nilai secara individu.

Jika terdapat suatu perubahan yang diakui langsung dalam ekuitas entitas asosiasi atau ventura bersama, entitas mengakui bagiannya dari perubahan tersebut dan mengungkapkannya, jika relevan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan atau kerugian belum terealisasi yang timbul dari transaksi antara entitas dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebatas kepentingannya dalam entitas asosiasi atau ventura bersama.

Jika bagian entitas atas rugi pada entitas asosiasi atau joint venture sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, maka entitas menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi nol, tambahan kerugian dicadangkan, dan liabilitas diakui, hanya sepanjang entitas mempunyai kewajiban hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Investments in Associates and Joint Ventures

PSAK prescribes the application of the equity method to investments in associates and joint ventures.

An associate is an entity over which the entity has significant influence. Significant influence is the power of participate on the financial and operating policy decisions of the investee, but does not have control or joint control over those policies

A joint venture is a type of joint arrangement where the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement.

Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

Under the equity method, the investment in an associate or a joint venture is initially recognized at cost and adjusted thereafter for the post-acquisition change in the investor's share of the investee's net assets. The investor's profit or loss includes its share of the investee's profit or loss and the investor's OCI includes its share of the investee's OCI. Goodwill relating to the associate or joint venture is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor individually tested for impairment.

If there is a change recognized directly in the equity of the associate or joint venture, the entity recognizes its share of such changes and to disclose this, if relevant in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains or losses resulting from transactions between the entity and associate or joint venture are eliminated to the extent of the interest in the associate or joint venture.

If the entity's share on loss in an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, it discontinues recognizing its share of further losses. After the entity's interest is reduced to zero, additional losses are provided for and a liability is recognized, only to the extent that the entity has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (lanjutan)

Jika entitas asosiasi atau ventura bersama melaporkan laba pada periode berikutnya, entitas mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian kerugian yang tidak diakui.

Laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama disusun untuk periode yang sama dengan entitas. Jika perlu, penyesuaian dilakukan untuk membawa kebijakan akuntansi yang sama dengan yang diterapkan entitas.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menilai setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika penurunan terindikasi, jumlah dikalkulasi dengan mengacu pada PSAK no. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset".

Jumlah tercatat keseluruhan investasi diuji untuk penurunan nilai sebagai suatu aset tunggal, yaitu, *goodwill* tidak diuji secara terpisah. Jumlah pemulihan investasi pada entitas asosiasi dinilai untuk setiap entitas asosiasi atau ventura bersama, kecuali entitas asosiasi atau ventura bersama tidak menghasilkan arus kas secara independen.

Pada saat hilangnya pengaruh signifikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama, entitas mengakui setiap investasi yang tersisa pada nilai wajar. Perbedaan antara jumlah tercatat entitas asosiasi atau ventura bersama pada saat hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajar dari investasi yang tersisa dan hasil dari pelepasan diakui dalam laba atau rugi.

Persyaratan pengungkapan untuk entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan pada investee dijelaskan dalam PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Investments in Associates and Joint Ventures (continued)

If the associate or joint venture subsequently reports profits, the entity resumes recognizing its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognized.

The financial statements of the associate or joint venture are prepared for the same reporting period as the entity. When necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the entity.

After application of the equity method, the Group determine at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in associate or joint venture is impaired. If impairment is indicated, the amount is calculated by reference to PSAK No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets".

The entire carrying amount of the investment is tested for impairment as a single asset, that is, goodwill is not tested separately. The recoverable amount of an investment in an associate is assessed for each individual associate or joint venture, unless the associate or joint venture does not generate cash flows independently.

Upon loss of significant influence over the associate or joint control over joint venture, the entity measures and recognizes any retained investment as its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate or joint venture upon loss of significant influence and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

The disclosure requirements for entity with joint control of, or significant influence over, an investee are specified in PSAK No. 67, "Disclosure of Interest in Other Entities"

e. Transactions with Related Parties

The Group deals transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures" and PSAK No. 7 (Improvement 2015), "Related Party Disclosures".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri Entitas induk dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual.

PSAK ini juga memberikan pengecualian dari persyaratan umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan pemerintah dan Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah (Entitas berelasi dengan Pemerintah).

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Entitas pelapor jika orang tersebut:
- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - entitas tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas lain yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transactions with Related Parties (continued)

This PSAK requires disclosure of relationships, transactions and balances with related parties, including commitments in the consolidated financial statements and separate financial statements of the parent entity also applies to individual financial statements.

This PSAK also introduces an exemption from the general related party disclosure requirements for transactions with government and entities that are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the same Government as the reporting entity (Government related entities).

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares financial statements (the reporting entity).

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
- has control or joint control over the reporting entity;
 - has significant influence over the reporting entity; or
 - is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
- the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - both entities are joint ventures of the same third party.
 - one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a.i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

f. Pelaporan Segmen

Kelompok Usaha melaporkan informasi segmen yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana Entitas beroperasi.

Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari Entitas yang:

- a. terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Kelompok Usaha melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Kelompok Usaha.

Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transactions with Related Parties (continued)

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)

- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (vii) a person identified in (a.i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

The transaction was conducted on terms agreed by both parties, which terms may not be the same as other transactions conducted by parties who are not related.

All transactions and balances with significant related parties, whether or not conducted with the terms and conditions, as were done with the parties that have no relation to related parties, have been disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

f. Segment Reporting

The Group discloses segment information that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Entity engages and economic environments in which it operates.

An operating segment is a component of an entity:

- a. that engages in business activities which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Segment reporting made by the Group is based on the financial information used by operating decision makers in evaluating operating segment performance and determining the allocation of its resources. Segmentation based on the activity of each legal entity operating activities in the Group.

All transactions between segments are eliminated.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan

(1) Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Biaya perolehan diamortisasi
- Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI)
- Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang memenuhi kondisi berikut diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Kas dan setara kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dan deposito berjangka diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, yang diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments

(1) Financial Assets

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Group's financial assets are classified as follows:

- Amortised cost
- Fair value through other comprehensive income (FVOCI)
- Fair value through profit or loss (FVTPL)

Amortized cost

Financial assets that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Cash and cash equivalents, receivable from customers, other receivables and time deposits are classified as amortized cost, which are measured using the effective interest method less impairment.

Interest is recognized by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas dan pembayaran di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) tidak termasuk kerugian kredit yang diharapkan, selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto dari aset keuangan (basis bruto), kecuali untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit tahap 3 dengan basis neto. Jika, pada periode pelaporan berikutnya, risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga kredit efektif yang disesuaikan terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut sejak pengakuan awal. Penghitungan tidak kembali ke basis bruto meskipun risiko kredit dari aset keuangan kemudian membaik sehingga aset keuangan tidak lagi memburuk.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Amortized cost (continued)

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognised on an effective interest basis for debt instruments other than those financial instruments at FVTPL.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset (gross basis), except for financial assets that have subsequently become stage 3 credit-impaired by net bases. If, in subsequent reporting periods, the credit risk on the credit-impaired financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, the Group recognizes interest income by applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortized cost of the financial asset from initial recognition. The calculation does not revert to the gross basis even if the credit risk of the financial asset subsequently improves so that the financial asset is no longer credit-impaired.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI)

Aset keuangan yang memenuhi ketentuan berikut ini selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI):

- aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi dalam ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada cadangan revaluasi investasi dalam pendapatan komprehensif lain, direklasifikasi ke laba rugi.

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Semua aset keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI selanjutnya diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau instrumen utang yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI atau investasi ekuitas yang tidak ditetapkan untuk diklasifikasi sebagai FVOCI pada pengakuan awal melalui opsi FVOCI.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Fair value through other comprehensive income (FVOCI)

Financial assets that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI):

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Gains and losses arising from changes in fair value are recognised in other comprehensive income and accumulated in investment revaluation reserve in equity, with the exception of impairment losses, interest calculated using the effective interest method, and foreign exchange gains and losses on monetary assets, which are recognised in profit or loss. Where the investment is disposed of or is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in investment revaluation reserve in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

Fair value through profit or loss (FVTPL)

All other financial assets that are not classified as amortized cost or FVOCI are subsequently measured at FVTPL.

Financial assets are classified as FVTPL when the financial asset is either held for trading or debt instruments that do not qualify as amortised cost or FVOCI or equity investments that are not designated to be classified as FVOCI through FVOCI option.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Perdagangan umumnya mencerminkan pembelian dan penjualan yang aktif dan sering, dan instrumen keuangan yang dimiliki untuk perdagangan umumnya digunakan dengan tujuan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga atau margin dealer jangka pendek.

Opsi nilai wajar aset yang akan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dapat ditetapkan yang tidak dapat dibatalkan, hanya pada pengakuan awal, untuk diukur pada FVTPL, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas keuangan dan mengakui laba atau rugi dengan basis yang berbeda.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

Investasi ekuitas secara *default* diklasifikasi sebagai FVTPL. Namun, jika investasi ekuitas tidak dimiliki untuk diperdagangkan, terdapat opsi yang tidak dapat dibatalkan, pada pengakuan awal, untuk diklasifikasi sebagai FVOCI, dengan hanya pendapatan dividen yang diakui dalam laba rugi. Perubahan lainnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain tanpa reklasifikasi ke laba rugi pada penghentian pengakuan dan penurunan nilai tidak diakui. Penetapan tersebut dilakukan atas dasar instrumen-demi-instrumen.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Fair value through profit or loss (FVTPL) (continued)

A financial asset is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of trading in the near future; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

Trading generally reflects active and frequent buying and selling, and financial instruments held for trading generally are used with the objective of generating a profit from short-term fluctuations in price or dealer's margin.

Fair value option for an asset which would otherwise be measured at amortized cost or FVOCI can be irrevocably designated, at initial recognition only, to be measured at FVTPL, if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise from measuring any financial assets or liabilities and recognizing any gains or losses on them on different bases.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resulting gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset.

Equity investment, by default, is classified as FVTPL. However, if an equity investment is not held for trading, there are irrevocably option, at initial recognition only, to classify it at FVOCI, with only dividend income recognized in profit or loss. Other changes are recognized in other comprehensive income without reclassification to profit or loss on de-recognition and no impairment recognised. Such designation is done on an instrument-by-instrument basis.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

Investasi efek diperdagangkan, reksadana, unit link merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Grup tidak memiliki aset keuangan, selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap kerugian kredit ekspektasian (ECL) pada setiap tanggal pelaporan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal atas instrumen keuangan tersebut.

ECL sepanjang umur diakui ketika terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal. Sebaliknya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diukur untuk instrumen keuangan tersebut dengan jumlah yang sama dengan ECL 12 bulan (12mECL). Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan atau risiko gagal bayar yang terjadi sejak pengakuan awal alih-alih pada bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan atau terjadi gagal bayar yang sebenarnya.

ECL sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan peristiwa gagal bayar (default) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, 12mECL merupakan porsi ECL sepanjang umur yang diharapkan dihasilkan dari peristiwa gagal bayar (default) pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Fair value through profit or loss (FVTPL) (continued)

Investment equity securities held for trading, mutual funds, unit-linked are financial assets held for trading and are classified as at FVTPL.

The Group does not have financial assets, other than for trading purpose, that are designated as at FVTPL upon initial recognition.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for expected credit losses (ECL) at each reporting date. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

Lifetime ECL is recognized when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the loss allowance is measured for that financial instrument at an amount equal to 12 month ECL (12mECL). The assessment of whether lifetime ECL should be recognised is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit-impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12mECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Grup mempertimbangkan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajar dan dapat didukung, termasuk pengalaman historis dan informasi berwawasan ke depan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Informasi berwawasan ke depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri tempat debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari pertimbangan berbagai sumber eksternal actual dan memperkirakan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

Grup secara berkala memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlah tersebut jatuh tempo.

Grup mengakui ECL sepanjang umur untuk piutang usaha dan aset kontrak. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan ini diestimasi dengan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan untuk faktor-faktor yang spesifik bagi debitur, kondisi ekonomi secara umum dan penilaian terhadap arah saat ini maupun arah kondisi perkiraan kerugian pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu uang jika sesuai.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan nilai tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen utang yang diukur pada FVOCI, di mana penyisihan kerugian diakui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

The Group always recognizes lifetime ECL for trade receivables and contract assets. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

The Group recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investments in debt instruments that are measured at FVOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and accumulated in the investment revaluation reserve, and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the statement of financial position.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup menghapus aset keuangan jika terdapat informasi yang menunjukkan bahwa debitur berada dalam kesulitan keuangan yang parah dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis. Aset keuangan yang dihapuskan mungkin masih tunduk pada aktivitas penegakan hukum berdasarkan prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan advis hukum jika sesuai. Setiap pemulihan yang dilakukan diakui dalam laporan laba rugi.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, tidak diturunkan secara individual, namun akan dinilai penurunan nilainya secara kolektif. Penilaian penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kedepan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah ditetapkan Grup pada pengakuan awal untuk diukur pada FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the debtor is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

For certain categories of financial asset, such as receivables, are not impaired individually are, However, to be assessed for impairment on a collective basis. Impairment assessment for a portfolio of receivables could include the Group's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as forward looking observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Derecognition of financial assets

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investments revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Pembelian instrumen ekuitas Perusahaan oleh entitas anak dicatat sebagai aset keuangan dalam laporan keuangan entitas anak. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, pembelian instrumen ekuitas Perusahaan oleh entitas anak tersebut disajikan sebagai saham yang diperoleh kembali.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Derecognition of financial assets (continued)

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

(2) Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instrument.

Purchases of the Company's own equity instruments by subsidiaries are recorded as other financial assets in the the subsidiary's statements of financial position. In the consolidated financial position, purchases of the Company's own equity instruments by subsidiaries are presented as treasury stocks.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(2) Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, obligasi, pinjaman jangka pendek dan pinjaman panjang lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

(3) Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

(4) Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan tanpa pengurangan untuk biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

(2) Financial Liabilities and Equity Instruments (continued)

Financial liabilities

The Group's financial liabilities are classified as either "at amortized cost".

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities, which include trade and other payables, bonds, short and long term debts, initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or expires. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

(3) Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a legal right to offset the carrying amount of financial assets and financial liabilities and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

(4) Fair Value of Financial Instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to their quoted prices in an active market at the close of business on the financial position date without any deduction for transaction costs. For financial instruments with no active market, fair value is determined using valuation techniques.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(4) Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan, mengacu pada nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lain sebagaimana disyaratkan di PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar"

Penyesuaian Risiko Kredit

Kelompok usaha menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan (*counterparty*) antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit kelompok usaha terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

(5) Instrumen Derivatif

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui berdasarkan nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif itu dimulai dan selanjutnya dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Metode untuk mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang terjadi tergantung apakah derivatif itu ditujukan untuk instrumen derivatif, dan sifat dari objek yang dilindungi nilainya.

Kelompok usaha mengelompokkan tujuan dari derivatif sebagai berikut:

- (1) suatu lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar atas aset atau liabilitas yang telah diakui atau komitmen pasti yang belum diakui, atau bagian yang telah diidentifikasi dari aset, liabilitas atau komitmen pasti tersebut, yang diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laba-rugi (lindung nilai atas nilai wajar); atau
- (2) suatu lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang:
 - (i) dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan
 - (ii) dapat mempengaruhi laba-rugi (lindung nilai arus kas).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

(4) Fair Value of Financial Instruments (continued)

Such techniques may include the use of fair market transactions between the parties who understand and are willing to (arm's length transactions), referring to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis or other valuation models as required in PSAK No. 68 "Fair Value Measurement"

Credit Risk Adjustment

The Group adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the instruments being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liabilities position, the group's credit risk associated with the instrument should be taken into account.

(5) Derivative Instruments

Derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date a derivative contract is initiated and subsequently remeasured at fair value. The method of recognizing the resulting gain or loss is dependent whether the derivative is intended for derivative instruments and the nature of the item being hedged.

The Group classifies the objectives of the derivative as:

- (1) a hedge against exposure to changes in fair value of assets or liabilities that have been recognized or unrecognized definite commitment, or an identified portion of an asset, liability or definite commitment, which is attributable to the particular risk and could affect profit or loss (fair value hedge); or
- (2) a hedge of the exposure to variability in cash flows that:
 - (i) are attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or are attributable to a particular risk associated with the forecast transactions likely to occur, and
 - (ii) could affect profit or loss (cash flow hedge).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(5) Instrumen Derivatif (lanjutan)

Pada saat terjadinya transaksi, Kelompok usaha mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Kelompok usaha juga mendokumentasikan penilaiannya, pada saat terjadinya dan secara berkesinambungan, apakah derivatif yang digunakan untuk transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam rangka saling menghapuskan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai.

Nilai penuh dari derivatif lindung nilai dikelompokkan sebagai aset atau liabilitas tidak lancar apabila jatuh tempo item yang dilindung nilai tersebut melebihi 12 (dua belas) bulan dan sebagai aset atau liabilitas lancar apabila jatuh tempo item lindung nilai tersebut kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(i) lindung nilai atas nilai wajar

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan dikualifikasikan sebagai lindung nilai atas nilai wajar, dicatat didalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, bersamaan dengan perubahan yang terjadi pada nilai wajar aset atau liabilitas yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada resiko yang dilindung nilai.

Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai atas nilai wajar diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, di baris yang sama dengan perubahan nilai wajar item yang dilindung nilai.

Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam akun "Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain - bersih".

(ii) lindung nilai arus kas

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan dikualifikasikan sebagai lindung nilai arus kas, diakui dalam bagian ekuitas, didalam akun "Perubahan Bersih Nilai Wajar – Lindung Nilai Arus Kas".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

(5) Derivative Instruments (continued)

At the time of the transaction, the Group documents the relationship between hedging instruments and hedged items, as well as the risk management objective and strategy for undertaking various hedge transactions. The group also documents its judgment, at the time of occurrence and continuously, whether the derivatives used to hedge transactions have a high effectiveness in order to mutually eliminate changes in fair value or cash flows of hedged items.

The full value of the hedging derivative is classified as non-current asset or liability if the maturity of the hedged item is more than 12 (twelve) months and as a current asset or liability if the maturity of the hedged item is less than 12 (twelve) months.

(i) fair value hedge

Changes in fair value of derivatives that are designated and qualify as fair value hedge are recorded in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, along with changes in the fair value of the hedged asset or liability value attributable to the hedged risk.

Gains or losses related to the effective portion of fair value hedge are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the same line with changes in the fair value of the hedged item.

Gains or losses related to the ineffective portion are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the account "Gain/(Loss) Other – net".

(ii) cash flow hedge

The effective portion of changes in fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedge is recognized in equity, in the account "Net Changes in Fair Value of Cash Flow Hedges".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(5) Instrumen Derivatif (lanjutan)

(ii) lindung nilai arus kas (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif diakui segera di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dalam akun "Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain-bersih". Akan tetapi, ketika prakiraan transaksi yang dilindungi nilai menimbulkan aset non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya ditangguhkan di ekuitas akan dialihkan dari ekuitas dan dimasukkan di dalam pengukuran awal biaya perolehan aset tersebut.

Jumlah yang diakumulasikan di ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat item yang dilindungi nilai mempengaruhi laba atau rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai arus kas diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, di baris yang sama dengan item yang dilindungi nilai.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, atau ketika lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ada di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Apabila prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah dicatat di bagian ekuitas segera dialihkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dalam akun "Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain-bersih".

Perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif apapun yang tidak ditujukan atau tidak dikualifikasikan sebagai akuntansi lindung nilai diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dalam akun "Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain-bersih".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

(5) Derivative Instruments (continued)

(ii) cash flow hedge (continued)

Gains or losses related to the ineffective portion are recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the account "Gain/(Loss) Other-Net". However, when the forecast transaction that is hedged raises non-financial assets, gains and losses previously deferred in equity are transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of that asset.

Accumulated amounts in equity are reclassified to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the hedged item affects profit or loss.

Gains or losses related to the effective portion of cash flow hedge are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the same line as the hedged item.

When a hedging instrument is expired or sold, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, the cumulative gain or loss existing in equity at that time remains in equity and is recognized when the forecast transaction ultimately is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

If the forecast transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss that was reported in equity is immediately transferred to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the account "Gain/(Loss) Other-net".

Changes in the fair value of any derivative instruments that are not designated or do not qualify for hedge accounting are recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the account "Gain/(Loss) Other-net".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Kas dan Setara Kas dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi. Sebelumnya, Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan giro pada Bank Indonesia dan bank lain terkait instrumen keuangan.

j. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi. Sebelumnya, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengacu pada Catatan 3g terkait instrumen keuangan.

k. Efek-efek

Efek-efek diklasifikasikan dalam kategori diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan efek-efek mengacu pada Catatan 3g terkait instrument keuangan.

Transaksi pembelian dan penjualan efek, baik untuk nasabah maupun untuk Kelompok Usaha sendiri diakui pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek saham. Pembelian efek saham untuk nasabah dicatat sebagai piutang nasabah dan utang Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), sedangkan penjualan untuk nasabah dicatat sebagai piutang KPEI dan "utang nasabah".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Cash and Cash Equivalents and Restricted Cash

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand, demand deposits with Bank Indonesia and other banks and placements with Bank Indonesia and other banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

i. Demand Deposits with Bank Indonesia and Other Banks

Demand deposits with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost. Previously, Demand deposits with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of demand deposits with Bank Indonesia and other banks related to financial Instruments.

j. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost. Previously, Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of placements with Bank Indonesia and other banks are discussed in Notes 3g related to financial instrument.

k. Securities

Securities are classified as held-for-trading, available-for-sale and held-to-maturity.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of securities are discussed in Notes 3g related to financial instruments.

Purchases of equity securities for the interest of customers or for the Group are recorded as receivable from customers and payable to institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia (KPEI), while sales of equity securities for the interest of customers are recorded as receivable from KPEI and payable to customers.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Efek-efek (lanjutan)

Pembelian efek saham untuk Kelompok Usaha sendiri dicatat sebagai "portofolio efek" dan "utang KPEI", sedangkan penjualan efek saham dicatat sebagai "piutang KPEI" dan mengurangi jumlah portofolio efek yang dimiliki Kelompok Usaha secara *first in first out* (FIFO) serta mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan efek tersebut dalam laba rugi tahun berjalan.

l. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan tagihan dan liabilitas derivatif mengacu pada Catatan 3g terkait instrumen keuangan.

m. Kredit

Kredit diklasifikasikan dalam kategori biaya perolehan diamortisasi. Sebelumnya Kredit diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan efek-efek mengacu pada Catatan 3g terkait instrumen keuangan.

n. Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

o. Piutang Sewa Pembiayaan

Dalam investasi neto sewa pembiayaan, Kelompok Usaha mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi neto sewa pembiayaan Kelompok Usaha.

Investasi neto sewa pembiayaan terdiri dari jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai residu yang dijamin (harga opsi) yang akan diterima pada akhir masa sewa dikurangi dengan penghasilan pembiayaan tangguhan (*unearned lease income*), simpanan jaminan (*security deposit*) dan penyisihan penurunan nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Securities (continued)

Purchase of equity securities for the Group is recorded as "securities owned-trading" and "accounts payable to KPEI", on the other hand, sale of equity securities is recorded as "Receivables from KPEI" and deduction on the number of equity securities owned by the Group is based on first in first out (FIFO) method and any resulting gain or loss is reflected in the current operations.

l. Derivative Receivables and Payables

Derivative receivables and payables are classified as fair value through profit or loss (FVTPL).

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of derivative receivables and payables are discussed in Note 3g related to financial instruments.

m. Loans

Loans are classified as amortized cost. Previously, Loans are classified as loans and receivables.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of securities are discussed in Notes 3g related to financial instrument.

n. Troubled Debt Restructuring

Losses resulting from loan restructuring related to modification of credit terms are recognized if the present value of future cash receipts which have been determined in new loan terms, including receipts designated as interest or principal, is less than the amount of the outstanding loan before the restructuring.

o. Finance Lease Receivable

Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the amount of the Group's net investment in the finance lease.

Net investments in finance lease consist of the total lease receivables plus the guaranteed residual value (option price) to be received at the end of the lease period, less unearned lease income, security deposits, and allowance for impairment losses.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 3. (lanjutan)

o. Piutang Sewa Pembiayaan (lanjutan)

Selisih antara piutang sewa pembiayaan ditambah nilai residu yang dijamin dengan biaya perolehan aset sewaan dicatat sebagai penghasilan pembiayaan tangguhan dan dialokasikan sebagai pendapatan selama masa sewa berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala yang tetap dari investasi neto sewa pembiayaan. Kelompok Usaha tidak mengakui pendapatan bunga dari piutang sewa pembiayaan yang telah menunggak pembayaran lebih dari 90 hari. Pendapatan tersebut diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima.

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan ditandatangani, apabila aset sewaan memiliki nilai residu pada akhir periode sewa, *lessee* diwajibkan untuk memberikan simpanan jaminan yang akan diperhitungkan dengan nilai jual aset sewaan pada akhir masa sewa, bila hak opsi dilaksanakan oleh *lessee*. Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada *lessee* pada akhir masa sewa.

Apabila aset sewaan dijual kepada *lessee* sebelum masa sewa berakhir, maka perbedaan antara harga jual dengan investasi neto sewa pembiayaan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian pada saat terjadinya.

p. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan akseptasi diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi dikategorikan sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan tagihan dan liabilitas akseptasi mengacu pada Catatan 3g terkait instrumen keuangan.

q. Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dan setelah pengakuan awal, dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, yang diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak berdasarkan tingkat suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Finance Lease Receivable (continued)

The difference between the finance lease receivables plus the guaranteed residual value and the acquisition cost of the leased assets is recorded as unearned lease income. This is recognized as finance lease income over the lease period at a periodic rate of return on net investments in finance lease. The Group does not recognize interest income from finance lease receivables which are overdue for more than 90 days. Such interest income is recognized as income when already received.

At the inception of the lease, if the leased asset has residual value at the end of the lease period, the lessee is required to make a security deposit which will be applied as payment to the purchase option price of the leased asset at the end of the lease period if the option to purchase is exercised by the lessee. Otherwise, the security deposit will be returned to the lessee at the end of the lease period.

If the leased assets are sold to the lessee before the end of the lease period, the difference between the sales price and the net investments in finance lease is recorded as gain or loss at the time of sale.

p. Acceptances Receivable and Liabilities

Acceptances receivable are classified as loan and receivables. Acceptances liabilities are classified as financial liabilities at amortized costs.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of acceptances receivable and payable are discussed in Notes 3g related to financial instruments.

q. Consumer Financing

Consumer financing receivables are classified as loans and receivables, and subsequent to initial recognition, are recorded at amortized cost using the effective interest method.

Unrecognized consumer financing income represents the difference between total installment payments to be received from the consumer and the principal amount of financing, which is recognized as income over the contract term based on the effective interest rate of the related consumer financing receivable.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pembiayaan Konsumen (lanjutan)

Piutang pembiayaan konsumen yang pembayarannya angsurannya menunggak lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai piutang bermasalah dan pendapatan pembiayaan konsumen diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (*cash basis*).

Piutang pembiayaan konsumen akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 270 hari untuk pembiayaan mobil. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain saat diterima.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan yang timbul diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan.

r. Anjak Piutang

Anjak piutang dengan perlindungan (*with recourse*) dinyatakan sebesar nilai bersih dari retensi dan pendapatan bunga yang ditangguhkan dan cadangan penurunan nilai. Selisih dari tagihan anjak piutang, termasuk retensi, dengan biaya anjak piutang merupakan pendapatan bunga yang ditangguhkan, yang akan diakui sebagai pendapatan berdasarkan proporsi waktu dengan menggunakan tingkat bunga efektif selama periode kontrak.

s. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Kelompok Usaha harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen.

Akad Murabahah secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan margin dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan seperti yang disebutkan di kebijakan pembelian dengan pembayaran secara angsuran.

Piutang pembiayaan Murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang Murabahah dikurangi margin yang ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan margin Murabahah diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan atas piutang murabahah menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang murabahah.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Consumer Financing (continued)

Consumer financing receivables which installments are overdue for more than 90 days are classified as nonperforming receivables and the related consumer financing income is recognized when it is received (cash basis).

Consumer financing receivables will be written-off when they are overdue for more than 270 days for car financing. Recoveries from written-off receivables are recognized as other income upon receipt.

Early termination of a contract is treated as a cancellation of an existing consumer financing contract and the resulting gain is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

r. Factoring Receivables

Factoring receivables entered into with recourse are stated at net realizable value reduced by retention, unearned factoring income and allowance for impairment. The excess of factoring receivables over the total amount to be paid by the customer, including retention, represents unearned factoring income which will be recognized as income over the terms of the factoring agreement using a constant periodic rate of return.

s. Murabahah Financing

Murabahah is a sale and purchase agreement with the selling price of goods at cost plus an agreed profit and the Group must disclose the cost of the goods to the consumer.

Substantially, Murabahah contract is a financing, therefore margin recognition is based on standards which regulate financing, as mentioned in installment financing policy.

Murabahah financing receivables are presented at the net realizable value, which is the balance of murabahah receivables less the deferred margin and allowance for impairment losses.

Murabahah Margin is recognized using the effective interest rate method. Income from murabahah receivables is recognized using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables.

t. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Musyarakah Mutana Qishah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana Perusahaan akan dialihkan secara bertahap kepada nasabah, sehingga bagian dana Perusahaan akan menurun dan pada akhir masa akad, nasabah akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Pembiayaan Musyarakah Mutana Qishah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Perusahaan menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan musyarakah.

u. Kontrak Asuransi

Aset reasuransi adalah milik hak kontraktual neto *cedant* (pemegang polis atas kontrak reasuransi) dalam perjanjian asuransi.

Aset reasuransi terdiri dari piutang reasuransi dan porsi reasuransi dan premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim.

Aset reasuransi ditelaah untuk penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan, atau lebih sering, ketika sebuah indikasi penurunan nilai selama tahun pelaporan. Penurunan nilai terjadi ketika terdapat bukti obyektif sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi bahwa Kelompok Usaha tidak dapat menerima seluruh jumlah terutang karena berdasarkan ketentuan kontrak dan peristiwa tersebut memiliki dampak yang dapat diukur dengan handal yang akan mempengaruhi jumlah yang akan diterima oleh Kelompok Usaha dari reasuradur. Kerugian penurunan nilai dicatat dalam laba rugi.

PSAK 62 tidak mengijinkan saling hapus antara:

- i) Aset reasuransi dengan liabilitas asuransi terkait atau
- ii) pendapatan atau beban dari kontrak reasuransi dan beban atau pendapatan dari kontrak asuransi.

Transaksi reasuransi

Untuk mengurangi risiko penutupan polis asuransi, Kelompok Usaha mereasuransikan polis-polis yang nilai pertanggungannya melebihi retensi sendiri kepada entitas-entitas reasuradur dan tidak mengakui ganti rugi atas klaim asuransi yang menjadi tanggungan reasuradur.

t. Musyarakah Mutanaqisah Financing

Musyarakah contract is a contract of cooperation between two or more parties for a particular business where each party provides a portion of the fund provided that the profit will be divided according to the agreed percentage, while the loss is borne in accordance with the portion of each fund.

Musyarakah Mutana Qishah is a musyarakah, provided that the portion of the Company's funds will be transferred gradually to customers, so that the portion of the Company's funds will decrease and at the end of the contract period, the customer will become the full owner of the business. Musyarakah Mutana Qishah financing is stated in the amount of the financed balance reduced by the allowance for impairment losses. The Company determines the allowance for impairment losses in accordance with the quality of financing based on a review of each balance of musyarakah financing.

u. Insurance Contract

Reinsurance asset is the value of the cedant's net contractual rights (policy holders for the reinsurance contract) in the reinsurance agreement.

Reinsurance assets consist of reinsurance receivables and reinsurance portion from unearned premiums and estimated claims.

Reinsurance assets are reviewed for impairment at each reporting date, or more frequently, when an indication of impairment arises during the reporting year. Impairment occurs when there is objective evidence as a result of an event that occurred after initial recognition of the reinsurance assets that the Group may not receive all outstanding amounts due under terms of the contract and the event has a reliably measureable impact on the amounts that the Group will receive from the reinsurer. The impairment loss is recorded in the profit or loss.

PSAK 62 does not allow to offset between:

- i) Reinsurance assets and the related insurance liabilities or*
- ii) income or expense from reinsurance contract and expense or income from the related insurance contract.*

Reinsurance transaction

The Group reinsures risks with other insurance companies and do not recognize insurance claim which is borne by the reinsurance companies, to reduce its underwriting risk.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Kontrak Asuransi (lanjutan)

Kontrak reasuransi adalah kontrak satu pihak (asurador) menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan menyetujui untuk mengompensasi pemegang polis jika kejadian masa depan tidak pasti (kejadian yang diasuransikan) berdampak merugikan pemegang polis.

Liabilitas kontrak asuransi

Adalah nilai kewajiban kontraktual neto asurador dalam suatu kontrak asuransi.

Kontrak investasi diklasifikasikan antara kontrak dengan atau tanpa FPT (Fitur Partisipasi Tidak mengikat). Kebijakan akuntansi untuk kewajiban kontrak investasi dengan FPT adalah sama dengan yang untuk kewajiban kontrak asuransi jiwa.

Liabilitas kontrak investasi

Kewajiban kontrak investasi tanpa FPT diakui pada saat kontrak tersebut dilakukan dan premi yang dibebankan. Hutang ini awalnya diakui pada nilai wajar, ini menjadi harga transaksi termasuk transaksi biaya secara langsung terkait dengan penerbitan kontrak. Setelah pengakuan awal investasi, kewajiban kontrak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

v. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

w. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Bangunan dan prasarana	20	5%	Buildings and improvements
Kendaraan	4-5	25% - 20%	Vehicles
Perlengkapan kantor	4-5	25% - 20%	Office furniture and fixtures
Peralatan kantor	4	25%	Office equipment
Partisi	5	20%	Partition

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Insurance Contract (continued)

Reinsurance contract is a contract where one party (insurer) accepts significant insurance risk from another party (the policyholder) by agreeing to compensate the policyholder if the events specified uncertain future (the insured event) adversely affects the policyholder.

Insurance contracts liability

Insurance contracts liability is the value of net contractual obligations under an insurance contract of the insurer.

Investment contracts are classified between contracts with or without DPF (Discretionary Participation Features). The accounting policies for investment contract liabilities with DPF are the same as those for life insurance contract liabilities.

Investment contracts liability

Investment contracts liability without DPF are recognized when contracts are entered into and premiums are charged. These liabilities are initially recognized at fair value, this being the transaction price excluding any transaction costs directly attributable to the issue of the contract. Subsequent to initial recognition investment contract liabilities are measured at fair value through profit or loss.

v. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

w. Property and Equipment

Property and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Aset Tetap (lanjutan)

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut tercermin dalam laba atau rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

x. Aset Al-Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan asset itu sendiri. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu. Aset ijarah dicatat sebesar nilai perolehannya dan disusutkan sesuai dengan jangka waktu sewa yang telah disepakati. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas sewa telah diserahkan kepada penyewa.

y. Properti Investasi

Properti investasi dicatat sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan juga termasuk biaya penggantian bagian properti investasi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Property and Equipment (continued)

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying amounts are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Construction in progress is stated at cost and transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

x. Al-Ijarah Assets

Ijarah is an agreement of transfer of rights to benefit from the use of an asset with a certain time period in exchange for the lease payment (ujrah) without transferring the ownership of the asset. Ijarah muntahiyah bittamlik is an ijarah with transfer of ownership of the asset at any given moment. Al-ijarah assets are initially recorded at cost and are depreciated over the agreed term of lease. Rental income is recognized when the rights of the asset has been transferred to the lessee.

y. Investment Properties

Investment property is stated at cost, including transaction costs less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the investment property, if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial year in which these are incurred.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Properti Investasi (lanjutan)

Properti investasi didepresiasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan taksiran masa manfaat sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Bangunan	20

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Perpindahan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, adanya perubahan dalam penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain. Perpindahan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, adanya perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan yang ditujukan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui di laporan laba rugi pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan.

z. Aset Tak Berwujud

Goodwill

Goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis diakui sebagai aset pada tanggal diperolehnya pengendalian (tanggal akuisisi). Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Kelompok Usaha yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya secara tahunan atau pada saat terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah tercatat aset atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit dan selanjutnya ke aset lainnya dari unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Investment Properties (continued)

Investment properties are depreciated using straight line method based on their estimated useful life as follows:

	Tahun/ Years
Buildings	20

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Transfers are made to investment property when, and only when, there is a change in use, evidenced by ending of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party. Transfers are made from investment property when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner occupation or commencement of development with a view to sale.

Investment property is derecognized when either it is disposed of or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from its disposal. Any gain or loss on the retirement or disposal of an investment property is recognized in the statement of profit or loss in the year of retirement or disposal.

z. Intangible Assets

Goodwill

Goodwill arising in a business combination is recognised as an asset at the date that control is acquired (the acquisition date). For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units expected to benefit from the synergies of the combination. Cash-generating units to which goodwill has been allocated are tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in a subsequent period.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari *goodwill* termasuk dalam penentuan laba atau rugi atas pelepasan.

Perangkat lunak

Perangkat lunak yang dibeli oleh Kelompok Usaha dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 5 tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi direviu setiap akhir tahun.

Biaya pengurusan tanah

Biaya perolehan pengurusan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur hukum hak atas tanah karena umur hukum hak atas tanah lebih pendek dari umur ekonominya.

aa. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan Selain Goodwill

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Kelompok Usaha mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Intangible Assets (continued)

On disposal of the relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

Software

Software acquired by the Group are stated at cost less accumulated amortization.

Amortization is recognized in profit or loss using the straight line method based on its estimated useful lives of 5 years.

The estimated useful lives, residual values and amortization method are reviewed at each year end.

Land processing cost

Costs for the legal processing and renewal of landrights, are deferred and are amortized using the straight-line method over the legal term of the landright since the legal term of the right is shorter than its economic life.

aa. Impairment of Non-Financial Asset Other than Goodwill

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets are impaired. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

bb. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih disajikan dalam kelompok “Aset lain-lain” dan diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih, dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

cc. Utang Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang menggabungkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam Al-Musyarakah Kelompok Usaha dan bank menyediakan modal untuk membiayai usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya Kelompok Usaha dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah di sepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

dd. Utang Mudharabah

Al-Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama dua pihak atau lebih dimana satu pihak sebagai penyandang dana dan pihak yang lain sebagai pengelola dana, dimana dana itu digunakan oleh pengelola untuk usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi hasil sesuai kesepakatan.

ee. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat (Catatan 3g) untuk kebijakan akuntansi atas asset dan liabilitas keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

bb. Foreclosed Collateral

Foreclosed collateral account under “Other Asset” and are stated at net realizable value. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged against allowance for impairment losses.

The difference between the carrying amount of foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as gain or loss at the time of sale.

Management evaluates the value of foreclosed collateral periodically. Allowance for impairment losses on foreclosed collateral is presented as a reduction of foreclosed collateral.

The carrying amount of foreclosed collateral is written down to recognize a permanent decline in the value of the foreclosed collateral, which is charged to current operations.

cc. Musyarakah Loan

Musyarakah is a partnership agreement between the owners of capital who combine their capital for the purpose of profit. In Al-Musyarakah, the Group and the bank alike provide capital to finance a certain business, both existing and new. Furthermore, the Group can recover the capital following the results of which have been agreed in stages or all at once to the bank.

dd. Mudharabah Loan

Al-Mudharabah is a form of cooperation between two or more parties in which one party acts as the lender and other party acts as fund manager, wherein the funds are used by the managers for business. The profit of the business is divided according to the agreement.

ee. Liabilities Immediately Payable

Liabilities payable immediately represent obligation to third parties, based on contract or orders by those having authority that should be settled immediately. These are classified as financial liabilities at amortized cost.

Refer to (Note 3g) for the accounting policies of financial assets and liabilities.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

ff. Simpanan

Simpanan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Lihat (Catatan 3g) untuk kebijakan akuntansi atas asset dan liabilitas keuangan.

gg. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Lihat (Catatan 3g) untuk kebijakan akuntansi atas asset dan liabilitas keuangan.

hh. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui sebagai berikut:

- 1) Pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pendapatan anjak piutang, pendapatan sewa operasi, margin Murabahah, pendapatan bunga dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif seperti dijelaskan pada Catatan 3g.
- 2) Pendapatan dari jasa pengelolaan investasi dan jasa penasehat investasi diakui pada saat jasa diberikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan atau kerugian dari perdagangan efek meliputi keuntungan atau kerugian dari penjualan efek dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.
- 4) Jasa penjamin emisi efek diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi secara substansial telah selesai dan jumlah pendapatan telah dapat ditentukan.
- 5) Pendapatan dividen dari portofolio efek diakui pada saat deklarasi efek ekuitas oleh penerbit.
- 6) Pendapatan ijarah diakui selama masa akad secara proporsional.
- 7) Pendapatan dan Beban Asuransi Pendapatan premi bruto diakui secara tahunan sejak tanggal berlakunya kontrak.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ff. Deposits

Deposits are classified as financial liabilities at amortized costs

Refer to (Note 3g) for the accounting policies of financial assets and liabilities.

gg. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks are classified as financial liabilities at amortized costs.

Refer to (Note 3g) for the accounting policies of financial assets and liabilities.

hh. Recognition of Revenues and Expenses

Revenues are recognized as follows:

- 1) Finance lease income, installment financing income, factoring income, operating lease income, Murabahah margin, interest income and interest expense are recognized using the effective interest rate method as explained in Note 3g.
- 2) Fees from investment management and advisory services are recognized when the services are rendered based on the terms of the contracts.
- 3) Gain or losses on trading of securities consist of gains or losses arising from the sale of securities and unrealized gains or losses resulting from increases (decreases) in the fair value of securities owned.
- 4) Underwriting fees are recognized when underwriting activities are substantially completed and the amount of income has been determined.
- 5) Dividend income from securities is recognized upon declaration by the issuer of equity securities.
- 6) Revenue from ijarah is recognized proportionately over the agreement period.
- 7) Insurance Income and Expenses Gross premium income is recognized on a yearly basis at the inception date of the insurance contract.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

hh. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan premi bruto asuransi yang berjangka waktu lebih dari satu tahun diakui sebagai pendapatan premi ditangguhkan pada saat diterima dan diakui sebagai pendapatan secara tahunan pada setiap tanggal ulang tahun polis selama periode berlakunya kontrak asuransi.

Premi bruto mencakup premi koasuransi sebesar bagian pertanggungansian Kelompok Usaha.

Pendapatan underwriting neto ditentukan setelah memperhitungkan cadangan untuk premi yang belum merupakan pendapatan, beban klaim, beban akuisisi, dan tes kecukupan liabilitas. Metode yang digunakan untuk menentukan cadangan tersebut adalah sebagai berikut:

Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

PSAK 36 (2012), "Akuntansi Asuransi Jiwa" mengatur liabilitas asuransi kontrak asuransi yang berjangka waktu lebih dari satu tahun diukur dengan menggunakan salah satu dari:

Konsep nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan ditambah dengan nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan.

Sesuai dengan PSAK 62, "Kontrak Asuransi", aset reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan dicatat secara terpisah sebagai aset reasuransi.

Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung dengan menggunakan metode yang lebih relevan dan handal yaitu individual harian. Metode individual harian menghitung premi yang belum merupakan pendapatan secara proporsional sesuai dengan jumlah proteksi yang diberikan selama periode kontrak atau risiko untuk setiap kontrak.

Perubahan premi yang belum merupakan pendapatan dan aset reasuransi dari premi yang belum merupakan pendapatan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

hh. Recognition of Revenues and Expenses (continued)

Gross premium income with a term of more than one year is recognized as deferred premium income when received and is recognized as income on a yearly basis at each policy anniversary date over the period of the insurance contract.

Gross premium includes the Group's share of coinsurance policy premiums.

Net underwriting income is determined net after making provisions for unearned premium reserves, claim expense, acquisition expense, and liability adequacy test. The methods used to determine these provisions are as follows:

Unearned Premiums

PSAK 36 (2012), "Accounting for Life Insurance Contract" governs insurance liabilities for insurance contract with a term of more than one year is measured by using one of the following:

Present value of estimated payment of all benefits promised including all options available plus present value of all expenses incurred and considering the future receipt of premium.

In accordance with PSAK 62, "Insurance Contract", the reinsurance assets of unearned premium reserve are separately presented as reinsurance assets.

Unearned premium reserve is calculated based on the method considered to be more relevant and reliable which is the daily individual method. The daily individual method calculates the unearned premium reserve proportionally based on the amount of the protection given during the period of contract or risk for each individual contract.

Changes in unearned premium reserves and reinsurance assets of unearned premium reserve are recognized in profit or loss in the year when the changes occur.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

hh. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban Klaim

Beban klaim dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim meliputi klaim yang telah disetujui, estimasi klaim yang masih dalam proses dan estimasi klaim yang terjadi namun belum dilaporkan ("IBNR"). Dalam laporan posisi keuangan, estimasi klaim yang masih dalam proses dan IBNR disajikan dalam akun estimasi klaim.

Sesuai dengan PSAK 62, "Kontrak Asuransi", estimasi pemulihan klaim reasuransi dicatat secara terpisah dalam akun aset reasuransi. Selanjutnya, pengakuan estimasi klaim juga memasukkan komponen estimasi biaya penanganan klaim dan margin atas kesalahan pengukuran. Pengakuan komponen tersebut mencerminkan pengukuran yang lebih relevan dan handal.

Perubahan jumlah estimasi klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Penerimaan dari hak subrogasi dan pendapatan residu dicatat sebagai pengurang beban klaim pada saat jumlahnya telah diketahui dengan pasti.

Beban Akuisisi

Beban akuisisi polis, seperti komisi, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode yang konsisten dengan metode yang digunakan untuk amortisasi premi yang belum merupakan pendapatan.

Tes Kecukupan Liabilitas

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi telah mencukupi, dengan membandingkan jumlah tercatat tersebut dengan estimasi arus kas masa depan sesuai dengan kontrak asuransi dan diukur dengan menggunakan tingkat suku bunga masa kini.

Jika perbandingan tersebut menunjukkan bahwa nilai tercatat atas liabilitas asuransi (dikurangi dengan biaya akuisisi tanggungan dan aset tak berwujud terkait) lebih rendah dibandingkan dengan estimasi nilai kini atas arus kas masa depan, maka kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

hh. Recognition of Revenues and Expenses (continued)

Claims Expense

Claims expense are recognized as insured loss as incurred. Claims expense include claims approved, estimated for claims reported but not yet approved and estimated of incurred-but-not-reported ("IBNR") claims. In the consolidated statement of financial position, the estimated claim for claims reported but not yet approved and IBNR claims are presented under estimated claim account.

In accordance with PSAK 62, "Insurance Contract", estimated reinsurance claim recoveries are presented separately as reinsurance asset account. Further, the recognition of estimated claim also included an estimate of claim, handling expenses and margin for adverse deviation. The recognition of those components reflect more relevant and reliable measurement.

Changes in the amount of estimated claims as a result of further review and differences between estimated claim and claims paid, are recognized in profit or loss in the year when the changes occur.

Recoveries under subrogation right and salvage are recorded as a reduction of claims expense when the amount can be determined.

Acquisition Cost

Policy acquisition costs, such as commissions are deferred and amortized using an amortization method which is consistent with the method used to amortize the unearned premium reserve.

Liability Adequacy Test

At end of each reporting period, the Group evaluates whether the unearned premium reserves and estimated claim as recognized in the consolidated statement of financial position have been adequately recognized by comparing the carrying amount with the estimated future cash outflows in accordance with the insurance contracts and measured using current market discount rate.

If the valuation indicates that the carrying value of insurance liabilities (net of deferred acquisition costs and relevant intangible assets) is lower compared to the estimated present value of future cash outflows, then such deficiency is recognized in the profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

hh. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Reasuransi

Beban premi reasuransi dicatat sebagai pengurang dari pendapatan premi bruto. Apabila reasuradur gagal memenuhi kewajibannya kepada Kelompok Usaha, Kelompok Usaha tetap memiliki kewajiban kepada pemegang polis atas kerugian yang telah direasuransikan.

ii. Sewa

Sewa merupakan suatu perjanjian yang mana lessor memberikan kepada lessee hak untuk menggunakan aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan insidental kepemilikan aset kepada lessee. Sewa lainnya yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessor

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai Lessee

Pada insepri kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah kontrak adalah, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak adalah atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang identifikasian selama suatu jangka waktu waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang identifikasian, Kelompok Usaha harus menilai apakah:

- Penyewa memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan; dan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

hh. Recognition of Revenues and Expenses (continued)

Reinsurance

Reinsurance premium cost is recorded as a reduction of gross premium income. The Group remains liable to the policy holders for reinsured losses in the event the reinsurers are unable to meet their obligations.

ii. Leases

A lease is an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or series of payments the right to use an asset for an agreed period of time.

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the assets to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As Lessor

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease.

As Lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assesses whether:

- The lessee has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the identified asset throughout the period of use; and

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

ii. Sewa (lanjutan)

- Penyewa memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Kelompok Usaha memiliki hak ini ketika Kelompok Usaha memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara dan tujuan penggunaan aset telah ditentukan sebelumnya:
 1. Penyewa memiliki hak untuk mengoperasikan aset identifikasian;
 2. Penyewa telah mendesain aset identifikasian dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset itu akan digunakan.

Pada inepsi atau penilaian kembali kontrak yang berisi komponen sewa, Kelompok Usaha mengalokasikan imbalan dalam kontrak untuk setiap komponen sewa atas dasar harga tersendiri relative dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Akan tetapi, untuk sewa perbaikan di mana Kelompok Usaha adalah penyewa, Kelompok Usaha telah memilih untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa sebagai komponen sewa tunggal.

Pada saat permulaan sewa, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada harga perolehan, yang terdiri dari jumlah awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah biaya langsung awal yang timbul dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak-guna dengan menggunakan model biaya yang berkaitan aset tetap sesuai PSAK 16.

Berdasarkan model biaya, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Kelompok Usaha pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna mencerminkan bahwa penyewa akan mengeksekusi opsi beli, Kelompok Usaha mendepresiasi hak-guna sejak tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, Kelompok Usaha mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ii. Leases (continued)

- The lessee has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decisionmaking rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The lessee has the right to operate the identified asset;
 2. The lessee has designed the identified asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the nonlease components. However, for the leases of improvements in which the Group is a lessee, the Group has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

Upon lease commencement a lessee recognizes a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

After lease commencement, a lessee measures the right-of-use asset using a cost model that relates to Property, Plant and Equipment under PSAK 16.

Under the cost model, a right-of-use asset is measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment. If the lease transfers ownership of the underlying assets to the Group at the end of the lease period or if the acquisition cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will make a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date until the end of the useful life of the asset underlying assets. If not, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

ii. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang terutang selama masa sewa, didiskontokan pada suku bunga implisit dalam sewa jika hal itu dapat segera ditentukan. Jika suku bunga implisit tersebut tidak dapat segera ditentukan, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh Kelompok Usaha dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli yang cukup pasti Kelompok Usaha akan mengeksekusi; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa lebih awal kecuali kelompok Usaha cukup pasti untuk tidak menghentikan kontrak lebih awal.

Pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran, kecuali biaya tersebut dimasukkan dalam nilai tercatat f menurut Pernyataan lain.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur kembali untuk mencerminkan perubahan dalam:

- masa sewa (menggunakan tingkat diskonto yang direvisi);
- penilaian opsi beli (menggunakan tingkat diskonto yang direvisi);
- pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut (menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ii. Leases (continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments payable over the lease term, discounted at the rate implicit in the lease if that can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Group uses its incremental borrowing rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the Group under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties payment for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Variable lease payments that are not included in the measurement of the lease liability are recognized in profit or loss in the period in which the event or condition that triggers payment occurs, unless the costs are included in the carrying amount of another asset under another Standard.

The lease liability is subsequently remeasured to reflect changes in:

- *the lease term (using a revised discount rate);*
- *the assessment of a purchase option (using a revised discount rate);*
- *future lease payments resulting from a change in an index or a rate used to determine those payments (using an unchanged discount rate).*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

ii. Sewa (lanjutan)

Modifikasi sewa

Modifikasi sewa juga dapat meminta pengukuran kembali liabilitas sewa kecuali jika diperlakukan sebagai sewa terpisah.

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika keduanya:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu atau lebih aset pendasar; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat terhadap harga tersendiri tersebut untuk mencerminkan kondisi kontrak tertentu

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan dalam kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa yang direvisi menggunakan tingkat diskonto revisian atas dasar sisa masa sewa dan sisa pembayaran sewa dengan penyesuaian yang sesuai dengan aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan nilai tercatat aset hak-guna untuk mencerminkan penghentian parsial atau penuh dari sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk semua modifikasi sewa lainnya.

jj. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Program pensiun iuran pasti

BMNCI, Entitas anak, menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Iuran yang ditanggung BMNCI diakui sebagai beban pada laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ii. Leases (continued)

Lease modifications

Lease modifications may also prompt remeasurement of the lease liability unless they are to be treated as separate leases.

The lessee accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the lessee:

- remeasure and allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease;
- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee recognizes in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

jj. Post-Employment Benefits Obligation

Defined contribution pension plan

BMNCI, a subsidiary, established a defined contributory plan covering all of its permanent employees. Contributions funded by BMNCI were charged to profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

jj. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja imbalan pasti

Kelompok Usaha menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Entitas anak sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Imbalan pasca-kerja yang dicatat sebagai imbalan manfaat pasti ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran kembali, yang terdiri keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak dari perubahan plafon aset (jika ada) dan pengembalian aset program (tidak termasuk bunga), tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan beban atau kredit yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain pada periode terjadinya.

Pengukuran kembali yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain tercermin sebagai bagian terpisah pada penghasilan komprehensif lain dalam ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laporan laba rugi pada periode amandemen program. Bunga bersih dihitung dengan menggunakan tarif diskonto pada awal periode dengan liabilitas atau aset imbalan pasti. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut: (i) biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian); (ii) beban bunga bersih atau pendapatan; dan (iii) pengukuran kembali.

Kelompok Usaha menyajikan dua komponen awal biaya imbalan pasti di laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Kelompok Usaha.

Liabilitas untuk pesangon diakui pada lebih awal ketika Entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika Entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

jj. Post-Employment Benefits Obligation (continued)

Defined post-employment benefits

The Group calculates defined post-employment benefits to their employees in accordance with Labor Law No.13/2003.No funding has been made to this defined benefit plan.

Post-employment benefits accounted for as defined benefit plan are determined using the *Projected Unit Credit Method* with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur.

Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows: (i) service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements); (ii) net interest expense or income; and (iii) remeasurement.

The Group presents the first two components of defined benefit cost in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognised in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit in the Group's defined benefit plans.

A liability for a termination benefit is recognised at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognises any related restructuring costs.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

jj. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

BMNCI memberikan penghargaan masa kerja kepada karyawan yang memenuhi persyaratan.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah diakui sebagai provisi untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti.

kk. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

jj. Post-Employment Benefits Obligation (continued)

Other long-term benefits

BMNCI also provides long service award for all qualified employees.

The cost of providing other long-term benefits is determined using the Projected Unit Credit Method. The provision for long-term employee benefits recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefits obligation.

kk. Income Tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

kk. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Kelompok Usaha ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika Entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas Entitas kena pajak yang sama atau Entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

ll. Provisi

Provisi diakui ketika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Kelompok Usaha diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

kk. Income Tax (continued)

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

ll. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 3. (lanjutan)

ii. Provisi (lanjutan)

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

mm. Pengaturan Pembayaran Berbasis Saham

Pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas kepada karyawan dan pihak lain yang memberikan jasa serupa yang diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian kompensasi. Rincian sehubungan dengan penetapan nilai wajar dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas ditetapkan dalam Catatan 32.

Nilai wajar yang ditentukan pada tanggal pemberian dari pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas dibebankan secara garis lurus sepanjang periode *vesting*, berdasarkan estimasi Entitas dari instrumen ekuitas yang pada akhirnya *vest*, dengan peningkatan yang sesuai ekuitas. Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas merevisi estimasi jumlah instrumen ekuitas yang diekspektasi akan *vest* dan dampaknya, jika ada, diakui dalam laba rugi sehingga biaya kumulatif mencerminkan estimasi yang direvisi, dengan penyesuaian yang terkait dengan cadangan ekuitas-menetap imbalan kerja.

nn. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) disajikan sebagai liabilitas sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ii. Provision (continued)

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

mm. Share-based Payment Arrangements

Equity-settled share-based payments to employees and others providing similar services are measured at the fair value of the equity instruments at the grant date. Details regarding the determination of the fair value of equity-settled share-based transactions are set out in Note 32.

The fair value determined at the grant date of the equity-settled share-based payments is expensed on a straight-line basis over the vesting period, based on the Entity's estimate of equity instruments that will eventually vest, with a corresponding increase in equity. At the end of each reporting period, the Entity revises its estimate of the number of equity instruments expected to vest and the impact, if any, is recognised in profit or loss such that the cumulative expense reflects the revised estimate, with a corresponding adjustment to the equity-settled employee benefits reserve.

nn. Securities Sold with Agreements to Repurchase

Securities sold with agreements to repurchase (repo) are classified as financial liabilities at amortized costs.

Securities sold under repurchase agreements (repo) are presented as liabilities and stated at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortized using effective interest method as interest expense over the year commencing from the selling date to the repurchase date.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 3. (lanjutan)

nn. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (lanjutan)

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali.

oo. Laba per Saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Labanya per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 4. AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen Kelompok Usaha untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai pertimbangan, estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada saat dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan dibawah ini.

Kelompok Usaha mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

nn. Securities Sold with Agreements to Repurchase (continued)

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value and derecognition of securities sold with agreements to repurchase.

oo. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to owners of the Entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Entity by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Judgments, Estimates and Assumptions

The preparation of consolidated financial statements requires management of the Group to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about the judgment, estimates and assumptions could result in material adjustments to the carrying value of assets and liabilities in future period.

The key assumptions of the future and the other key source of uncertainty in estimation at the reporting date that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the future period described below.

The Group bases its estimates and assumptions on the parameters available at the time the consolidated financial statements are prepared. Assumptions and situation concerning the future development may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. The changes are reflected in the related assumptions as incurred.

The following judgments, estimates and assumptions made by management in implementing accounting policies of the Group has the most significant effect on the amount recognized in the consolidated financial statements:

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Alokasi Harga Pembelian dan Penurunan Nilai Goodwill

Goodwill harus dilakukan uji penurunan nilai setiap tahun dan bilamana ada indikasi bahwa goodwill tersebut mungkin menurun nilainya. Manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi nilai yang dapat dipulihkan dan dapat menyebabkan beban penurunan nilai masa depan dalam PSAK No. 48 (Revisi 2013), "Penurunan Nilai Aset".

Menentukan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Kelompok Usaha beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan harga pokok penjualan dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling sesuai mewakili dampak ekonomi yang mendasari transaksi, peristiwa dan kondisi.

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Menentukan Nilai Wajar dan Perhitungan Amortisasi Biaya Perolehan dari Instrumen Keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif dan diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Kelompok Usaha.

Menentukan Jumlah Terpulihkan dari Aset Keuangan

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu dan hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Purchase Price Allocation and Goodwill Impairment

Goodwill is subject to annual impairment test and whenever there is an indication that such goodwill may be impaired. Management uses its judgment in estimating the recoverable value and may lead to future impairment charges under PSAK No. 48 (Revised 2013), "Impairment of Assets".

Determining of Functional Currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Group operates. The management considers the currency that mainly influences the revenue and cost of sales and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

Determining Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering if the definitions set forth in PSAK No. 71 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Group's accounting policies.

Determining Fair Value and Calculation of Cost Amortization of Financial Instruments

The Group records certain financial assets and financial liabilities at fair value and at amortized cost, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization is determined using verifiable and objective evidence, the amount of the fair value or amortized cost may differ if the Group uses different valuation methodologies or assumptions. These changes directly affect the Group's profit or loss.

Determining Recoverable Amount of Financial Assets

The Group evaluates specific accounts where it has information that a particular customer cannot meet its financial liabilities. In this case, the Group uses judgment based on available facts and circumstances, including but not limited to, terms and relationships with customers and the credit status of customers based on available credit records from third parties and known market factors, to record specific allowance for the customer against the amount owed in order to reduce the amount of the receivables that the Group expects to collect. Specific allowance is re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amount of allowance for impairment of receivables.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 4. AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Menentukan Jumlah Terpulihkan dari Aset Non-Keuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan.

Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Jumlah pemulihan atas aset tetap, properti investasi dan aset Al-Ijarah didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap, Properti Investasi dan aset Al - Ijarah

Kelompok Usaha mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar.

Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan properti investasi adalah berdasarkan penelaahan Kelompok Usaha terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset serta perkembangan teknologi.

Namun demikian, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Biaya perolehan aset tetap, properti investasi dan aset Al - Ijarah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya.

Determining Recoverable Amount of Non-Financial Assets

Provision for decline in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the physical condition of inventory on hand, the selling price of the market, estimated costs of completion and the estimated costs incurred for the sale.

Provision re-evaluated and adjusted if additional information that affect the estimated amounts.

The recovery amounts of property, plant, equipment, investment properties an Al-Ijarah Assets are based on estimates and assumptions especially about market prospects and cash flows associated with the asset. Estimates of future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these assumptions may have a material impact on the measurement of recoverable amount and could result in adjustments to the allowance for impairment already booked.

Determining Depreciation Method and Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment, Investment Property and Al - Ijarah Assets

The Group estimates the useful lives of property, plant and equipment and investment property based on the expected utilization of assets and supported by plans and business strategy and market behavior.

Estimation of useful lives of property, plant and equipment and investment property are provided based on the Group's evaluation on industry practice, internal technical evaluation and experience for assets equivalent.

The estimated useful lives are reviewed at least at each year end reporting and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other restrictions on the use of assets as well as technological developments.

However, it is possible, future results of operations could be materially affected by changes in the estimates due to changes in the factors mentioned above, and therefore the future depreciation charges may be revised.

The costs of property, plant and equipment, investment property and Al - Ijarah Assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of property, plant and equipment and investment property between 4 to 20 years. This is the age that is generally expected in the industry in which the Group does business.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 4. AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Menentukan Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Kelompok Usaha membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Kelompok Usaha menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Kelompok Usaha juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai.

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas atas pensiun dan kewajiban imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.

Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian dan tingkat pengembalian aset program yang diharapkan.

SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Determining Income Taxes

Significant judgments made in determining the provision for income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business activities. The Group recognizes a liability for corporate income tax based on estimates of whether there will be an additional income tax.

In certain situations, the Group cannot determine the exact amount of their current or future tax liability due to on going investigation, or the negotiations with tax authorities. Uncertainties arise concerning the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of the taxable income in the future.

In determining the amount to be recognized related to uncertain tax liabilities, the Group applies the similar consideration that they will use in determining the amount of provision that must be recognized in accordance with PSAK No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Group makes the analysis to all tax positions related to income taxes to determine if tax liability for unrecognized tax benefits should be recognized.

The Group reviews the deferred tax assets at each reporting date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow for part or all of the deferred tax assets to be utilized. The Group also reviews the expected timing and tax rates on the reversal of temporary differences and adjusts the impact of deferred tax accordingly.

Estimated Pension Costs and Employee Benefits

The determination of liability for pension and employee benefits obligation and net employee benefits expense is subject to the selection of certain assumptions used by independent actuaries in calculating such amounts.

Those assumptions include, among others, the discount rate, annual salary increase, the annual rate of resignation of employees, level of disability, retirement age and mortality and the expected rate of return of plan assets.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Kerja (lanjutan)

Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 28.

Mengevaluasi Provisi dan Kontijensi

Kelompok Usaha terlibat dalam berbagai proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontijensi terutama melalui konsultasi dengan penasihat hukum Kelompok Usaha yang menangani proses hukum dan pajak tersebut. Kelompok Usaha mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya. Dalam pengukuran dan pengukuran provisi, manajemen mengambil risiko dan ketidakpastian.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Kelompok Usaha tidak yakin bahwa proses-proses tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pengukuran Nilai Wajar dan Proses Penilaian

Beberapa aset dan kewajiban Kelompok Usaha diukur pada nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Dewan Direksi Kelompok Usaha telah membentuk sebuah komite penilaian, yang dipimpin oleh Direktur Keuangan dari Kelompok Usaha, untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai dan input untuk pengukuran nilai wajar.

Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau liabilitas, Kelompok Usaha menggunakan pendekatan pasar - data yang dapat diobservasi sepanjang tersedia. Dimana input level 1 tidak tersedia, Kelompok Usaha terlibat dengan penilai pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian. Komite penilaian bekerja sama dengan penilai eksternal yang memenuhi syarat untuk menetapkan model teknik penilaian dan input yang sesuai. Direktur Keuangan melaporkan temuan komite penilaian kepada Direksi Kelompok Usaha setiap kuartal untuk menjelaskan penyebab fluktuasi nilai wajar aset dan liabilitas.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimated Pension Costs and Employee Benefits (continued)

While the Group believes that the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions defined by the Group can materially affect the estimated liability for employee benefits and pensions and net employee benefits expense. More detailed information disclosed in the Note 28.

Evaluating Provisions and Contingencies

The Group is involved in various legal and tax proceedings. The Management makes assessment to distinguish between provisions and contingencies primarily through consultation with legal counsel handling those proceedings. The Group sets up an appropriate provision for current legal proceedings or constructive obligation, if any, in accordance with the provision policy. In recognition and measurement of provisions, the management took a risk and uncertainties.

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Group does not believe that these processes will significantly impact the consolidated financial statements.

Fair Value Measurements and Valuation Processes

Some of the Group's assets and liabilities are measured at fair value for financial reporting purposes. The Board of Directors of the Group has set up a valuation committee, which is headed up by the Financial Director of the Group, to determine the appropriate valuation techniques and inputs for fair value measurements.

In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group uses market approach - observable data to the extent it is available. Where level 1 inputs are not available, the Group engages third party qualified valuers to perform the valuation. The valuation committee works closely with the qualified external valuers to establish the appropriate valuation techniques and inputs to the model. The Financial Director reports the valuation committee's findings to the Board of Directors of the Group every quarter to explain the cause of fluctuations in the fair value of the assets and liabilities.

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consist of:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> <u>2022</u>	31 Desember/ <i>December 31,</i> <u>2021</u>	31 Desember/ <i>December 31,</i> <u>2020</u>	
Kas				<i>Cash on hand</i>
Rupiah	104.124	75.198	92.754	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	929	2.292	4.806	<i>United States Dollar</i>
Dolar Singapura	164	45	155	<i>Singapore Dollar</i>
Euro	-	1	1	<i>Euro</i>
Jumlah	<u>105.217</u>	<u>77.536</u>	<u>97.716</u>	<i>Total</i>
Bank				<i>Cash in banks</i>
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
Rupiah				<i>Rupiah</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52.969	31.455	16.183	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	51.733	39.509	45.056	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Jabar Banten Tbk	26.050	602	3.381	<i>PT Bank Jabar Banten Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.302	6.720	11.915	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.256	3.011	10.267	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 3 milyar)	15.693	14.678	104.036	<i>Others (each below Rp 3 billion)</i>
Sub jumlah	<u>155.003</u>	<u>95.975</u>	<u>190.838</u>	<i>Sub total</i>
Dolar Amerika Serikat				<i>United States Dollar</i>
Standard Chartered Bank	147.812	118.969	42.071	<i>Standard Chartered Bank</i>
City National Bank	18.169	22.495	27.709	<i>City National Bank</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	15.239	14.529	14.344	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	14.477	6.728	15.944	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	9.009	47.062	3.946	<i>The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.750	2.745	7.568	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 3 milyar)	559	819	4.216	<i>Others (each below Rp 3 billion)</i>
Sub jumlah	<u>209.015</u>	<u>213.347</u>	<u>115.798</u>	<i>Sub total</i>
Mata uang Lain				<i>Other currencies</i>
Euro	5.301	3.080	982	<i>Euro</i>
Yuan China	4.664	2.993	1.057	<i>Chinese Yuan</i>
Dolar Australia	2.277	6.625	2.368	<i>Australian Dollar</i>
Dolar Hongkong	1.303	983	1.531	<i>Hongkong Dollar</i>
Yen Jepang	960	-	2.429	<i>Japanese Yen</i>
Dolar Singapura	-	7.583	-	<i>Singapore Dollar</i>
Sub jumlah	<u>14.505</u>	<u>21.264</u>	<u>8.367</u>	<i>Sub total</i>
Jumlah	<u>378.523</u>	<u>330.586</u>	<u>315.003</u>	<i>Total</i>

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	30 Juni/ <u>June 30,</u> 2022	31 Desember/ <u>December 31,</u> 2021	31 Desember/ <u>December 31,</u> 2020	
Setara kas				Cash equivalents
Deposito berjangka				Time Deposits
Pihak ketiga				Third parties
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	252.000	352.000	250.000	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	95.000	90.000	10.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Jabar Banten Tbk	65.600	83.600	-	PT Bank Jabar Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	53.700	15.500	5.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	50.000	-	-	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	41.000	19.000	110.000	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	10.000	10.000	24.000	PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	8.000	163.000	18.000	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.000	1.000	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	-	50.000	-	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Ganesha Tbk	-	5.000	5.000	PT Bank Ganesha Tbk
PT Bank KB Bukopin Syariah	-	5.000	5.000	PT Bank KB Bukopin Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	-	-	5.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank Jabar Banten Syariah	-	-	4.000	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	14.850	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	-	-	7.500	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
Sub Jumlah	<u>580.300</u>	<u>794.100</u>	<u>458.350</u>	Sub Total
Giro pada Bank Indonesia				Demand deposits with Bank Indonesia
Rupiah	563.680	494.790	394.659	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	20.856	25.654	17.562	United States Dollar
Jumlah	<u>584.536</u>	<u>520.444</u>	<u>412.221</u>	Total
Penempatan pada Bank Indonesia				Placements with Bank Indonesia
Rupiah	<u>1.112.900</u>	<u>1.104.826</u>	<u>474.881</u>	Rupiah
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>2.761.476</u>	<u>2.827.492</u>	<u>1.758.171</u>	Total Cash and Cash Equivalents
Tingkat suku bunga pertahun				Interest rates per annum
Rupiah	2,50% - 7,00%	3,00% - 7,50%	3,00% - 8,00%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,50% - 1,25%	1,25% - 1,50%	1,00% - 1,42%	United States Dollar

BMNCI

Rasio GWM pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No. 20/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021. PBI tersebut dijelaskan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019, PADG No. 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020, PADG No. 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan PADG No. 23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021.

BMNCI

The calculation of the GWM ratios as of June 30, 2022, 31 Desember 2021 and 2020 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018 concerning Minimum Statutory Reserve for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currency for Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Syariah Business Unit as amended by PBI No. 22/3/PBI/2020 dated March 24, 2020, PBI No. 20/10/PBI/2020 dated July 28, 2020 and PBI No. 23/16/PBI/2021 dated December 17, 2021. Those PBI explained by (PADG) No. 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 has been changed several times, by PADG No. 20/30/PADG/2018 dated November 30, 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019, PADG No. 21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 dated March 10, 2020, PADG No. 22/10/PADG/2020 dated April 29, 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020 and PADG No. 23/27/PADG/2021 dated December 21, 2021.

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, BMNCI telah memenuhi giro wajib minimum yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 and 2020, tidak terdapat kas dan setara kas yang dijadikan jaminan utang bank dan institusi keuangan non-bank.

6. DEPOSITO PADA DAN PIUTANG DARI (UTANG KEPADA) LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN EFEK INDONESIA (KPEI)

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Deposito	8.445	8.353	8.103	<i>Deposits</i>
Piutang dari KPEI	<u>325.012</u>	<u>291.740</u>	<u>340.136</u>	<i>Receivables from KPEI</i>
Jumlah	<u><u>333.457</u></u>	<u><u>300.093</u></u>	<u><u>348.239</u></u>	<i>Total</i>
Utang kepada KPEI	<u>369.354</u>	<u>385.506</u>	<u>421.663</u>	<i>Payables to KPEI</i>
Tingkat suku bunga deposito per tahun	2,50% - 4,00%	3,50% - 4,00%	3,50% - 4,00%	<i>Annual deposits interest rate</i>

Deposito merupakan deposito MNCS, yang terdapat pada Bank yang ditentukan oleh KPEI sebagai jaminan untuk transaksi perdagangan yang dilakukan oleh MNCS. Deposito ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kepada KPEI atas transaksi perdagangan yang dilakukan MNCS, bila tidak melakukan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan.

Piutang dari dan utang kepada KPEI timbul dari penyelesaian transaksi perdagangan efek-bersih (*net settlement*) dan dana kliring.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the BMNCI has complied with the minimum reserve requirements under the Bank Indonesia regulation.

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, there is no cash and cash equivalent are pledged as collateral for loans from bank and non-bank financial institutions.

6. DEPOSITS TO AND RECEIVABLES FROM (PAYABLES TO) INDONESIAN CLEARING AND SECURITIES GUARANTEE INSTITUTION (KPEI)

This account consist of:

Deposits represent MNCS's deposit in a bank assigned by KPEI to hold MNCS's guarantee deposit for its trading transactions. This deposit can be used to pay KPEI for the trading transactions made by MNCS's in case it fails to pay on due date.

The receivables from and payables to KPEI arose from the net settlement of securities trading transactions and clearing deposits.

7. PIUTANG NASABAH

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi perdagangan efek dan imbalan jasa pengelolaan dana nasabah dan reksadana dengan detail sebagai berikut:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Pihak berelasi (Catatan 42)				<i>Related Parties (Note 42)</i>
Marjin	27.490	41.295	41.009	<i>Margin</i>
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
Transaksi perdagangan efek	321.298	302.845	509.397	<i>Brokerage</i>
Marjin	111.847	129.869	129.236	<i>Margin</i>
Imbalan jasa pengelolaan dana	<u>817</u>	<u>888</u>	<u>899</u>	<i>Fund management services</i>
Jumlah	<u><u>461.452</u></u>	<u><u>474.897</u></u>	<u><u>680.541</u></u>	<i>Total</i>

7. PIUTANG NASABAH (lanjutan)

Rincian saldo piutang nasabah berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Kurang dari 2 hari	297.841	291.045	486.505	<i>Less than 2 days</i>
Lebih dari 2 hari	163.611	183.852	194.036	<i>More than 2 days</i>
Jumlah	<u>461.452</u>	<u>474.897</u>	<u>680.541</u>	<i>Total</i>

Berdasarkan mata uang:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Rupiah	461.446	474.890	680.517	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	6	7	24	<i>United States Dollar</i>
Jumlah	<u>461.452</u>	<u>474.897</u>	<u>680.541</u>	<i>Total</i>

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih dan mempunyai jaminan yang cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Management did not provide any allowance for impairment losses since management believes that the receivables are collectible and adequately secured to cover possible losses on uncollectible accounts.

8. EFEK – EFEK

Berdasarkan jenis dan tujuan investasi, efek-efek adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Pihak berelasi (Catatan 42)				<i>Related parties (Note 42)</i>
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				<i>Fair value through profit loss</i>
Efek ekuitas	64.011	8.068	360	<i>Equity securities</i>
Reksadana	977	-	-	<i>Mutual funds</i>
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				<i>Fair value through other Comprehensive income</i>
Efek ekuitas	314.260	254.089	323.024	<i>Equity securities</i>
Obligasi	-	-	4.541	<i>Bonds</i>
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				<i>Amortized cost</i>
Obligasi	11.240	12.304	21.972	<i>Bonds</i>
Sub jumlah	<u>390.488</u>	<u>274.461</u>	<u>349.897</u>	<i>Sub total</i>

7. RECEIVABLES FROM CUSTOMERS (continued)

The aging schedule of receivables from customers is as follows:

Based on currency:

8. SECURITIES

Securities are classified according to type and purpose as follows:

8. EFEK – EFEK (lanjutan)

Berdasarkan jenis dan tujuan investasi, efek-efek adalah sebagai berikut: (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

Securities are classified according to type and purpose as follows: (continued)

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				<i>Amortized cost</i>
				<i>Indonesian Government</i>
Obligasi Pemerintah Indonesia	106.797	106.810	106.837	<i>bonds</i>
Obligasi	2.451	1.780	1.780	<i>Bonds</i>
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				<i>Fair value through other</i>
				<i>comprehensive income</i>
				<i>Indonesian Government</i>
Obligasi Pemerintah Indonesia	1.366.849	1.513.719	1.169.036	<i>bonds</i>
Efek ekuitas	92.877	143.191	125.364	<i>Equity securities</i>
Reksadana	68.517	53.945	21.586	<i>Mutual funds</i>
Obligasi lainnya	-	-	15.026	<i>Other bonds</i>
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				<i>Fair value through</i>
				<i>profit loss</i>
				<i>Managed funds</i>
Dana kelolaan	2.201.103	2.176.373	1.722.645	<i>Managed funds</i>
Reksadana	170.438	214.258	158.282	<i>Mutual funds</i>
Efek ekuitas	13.770	33.709	38.815	<i>Equity securities</i>
Obligasi Pemerintah Indonesia	37.094	64.411	18.523	<i>Indonesian Government bonds</i>
Obligasi lainnya	1.119	-	317.287	<i>Other bonds</i>
Sub jumlah	<u>4.061.015</u>	<u>4.308.196</u>	<u>3.695.181</u>	<i>Sub total</i>
Jumlah Efek-Efek	<u>4.451.503</u>	<u>4.582.657</u>	<u>4.045.078</u>	<i>Total Securities</i>

Rincian efek-efek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Securities classified according to currencies are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Pihak berelasi				<i>Related parties</i>
Rupiah	390.488	274.461	349.897	<i>Rupiah</i>
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
Rupiah	4.057.403	4.304.208	3.691.157	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	<u>3.612</u>	<u>3.988</u>	<u>4.024</u>	<i>United States Dollar</i>
Jumlah efek-efek	<u>4.451.503</u>	<u>4.582.657</u>	<u>4.045.078</u>	<i>Total securities</i>

8. EFEK – EFEK (lanjutan)

Tingkat bunga rata-rata per tahun atas efek adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Rupiah				Rupiah
Obligasi Pemerintah Indonesia	6,79%	6,95%	6,96%	Indonesian Government Bonds
Obligasi lainnya	5,13%	5,99%	8,48%	Other Bonds

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, sebagian saham “KPIG” yang dimiliki oleh MNCS, Entitas anak, dijadikan sebagai agunan untuk pinjaman jangka pendek (Catatan 22).

Dana Kelolaan

Kelompok Usaha mengadakan perjanjian pengelolaan dana dengan manajer investasi di atas untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi pada saham entitas publik dan non publik dan/atau pada surat berharga. Perjanjian dilakukan dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun mendatang atau lebih sesuai persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Nilai wajar dari dana kelolaan berdasarkan nilai aset bersih pada tanggal pelaporan.

8. SECURITIES (continued)

Average annual interest rates of securities are as follows:

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, part of “KPIG” shares owned by MNCS, a subsidiary, is used as collateral for short term loan (Note 22).

Managed Funds

The Group entered into fund management agreement with several investment managers to manage investment in shares of public or private companies and/or other security instruments. These contracts have a term of one year and can be extended for another year or longer as agreed by both parties in writing. The fair value of managed funds are based on respective net asset value as of the reporting date.

9. PIUTANG PEMBIAYAAN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Pihak berelasi (Catatan 42)				Related parties (Note 42)
Pembiayaan konsumen	120.168	127.423	128.058	Consumer financing
Anjak piutang	78.618	80.866	52.580	Factoring receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	-	355	Finance lease receivables
Sub jumlah	198.786	208.289	180.993	Sub total
Pihak ketiga				Third parties
Pembiayaan konsumen	930.620	862.874	828.923	Consumer financing
Anjak piutang	348.375	349.143	411.486	Factoring receivables
Piutang sewa pembiayaan	102.698	105.339	150.085	Finance lease receivables
Sub jumlah	1.381.693	1.317.356	1.390.494	Sub total
Jumlah	1.580.479	1.525.645	1.571.487	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.339)	(13.338)	(15.447)	Allowance for impairment losses
Bersih	1.568.140	1.512.307	1.556.040	Net

9. FINANCING RECEIVABLES

This account consists of:

9. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

9. FINANCING RECEIVABLES (continued)

a. Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih

a. Consumer Financing Receivables – Net

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas pembiayaan konsumen dengan rincian sebagai berikut:

This account represents consumer financing receivables with details as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
<u>Pihak berelasi</u>				<u>Related parties</u>
Rupiah				Rupiah
Piutang pembiayaan konsumen	169.373	156.597	162.691	Consumer financing receivables
Pendapatan yang belum diakui	(49.205)	(29.174)	(34.633)	Unearned consumer financing income
Sub jumlah	<u>120.168</u>	<u>127.423</u>	<u>128.058</u>	Sub total
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Rupiah				Rupiah
Piutang pembiayaan konsumen	1.098.439	1.014.927	902.588	Consumer financing receivables
Pendapatan yang belum diakui	(167.819)	(152.053)	(73.665)	Unearned consumer financing income
Sub jumlah	<u>930.620</u>	<u>862.874</u>	<u>828.923</u>	Sub total
Jumlah	1.050.788	990.297	956.981	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.682)	(4.772)	(7.983)	Allowance for impairment losses
Bersih	<u>1.047.106</u>	<u>985.525</u>	<u>948.998</u>	Net

Tingkat bunga per tahun adalah sebagai berikut: 15,00% - 28,00% 15,00% - 28,00% 13,00% - 28,00% Interest rates per annum are as follows:

Rincian piutang pembiayaan konsumen (bruto) yang akan diterima berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The details of consumer financing receivables (gross) based on maturity date are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Belum jatuh tempo	1.177.301	1.096.165	998.296	Not yet due
Telah jatuh tempo				Overdue:
11 – 90 hari	64.209	51.387	43.264	11 - 90 days
91 – 120 hari	4.546	3.292	5.250	91 - 120 days
121 – 180 hari	7.743	4.506	4.820	121 - 180 days
> 180 hari	14.013	16.174	13.649	> 180 days
Jumlah	<u>1.267.812</u>	<u>1.171.524</u>	<u>1.065.279</u>	Total

9. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

9. FINANCING RECEIVABLES (continued)

a. Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih (lanjutan)

a. Consumer Financing Receivables – Net (continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Saldo awal periode	4.772	7.983	14.354	Balance at beginning of period
Penyisihan periode berjalan	12.136	6.597	1.950	Provisions during the period
Penghapusan periode berjalan	<u>(13.226)</u>	<u>(9.808)</u>	<u>(8.321)</u>	Write-off during the period
Saldo akhir periode	<u>3.682</u>	<u>4.772</u>	<u>7.983</u>	Balance at end of period

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

b. Tagihan Anjak Piutang – Bersih

b. Factoring Receivables – Net

Akun ini merupakan tagihan anjak piutang dengan dasar “with recourse” dengan rincian sebagai berikut:

This account represents factoring receivables with recourse with details as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
<u>Pihak berelasi</u>				<u>Related parties</u>
Rupiah				Rupiah
Tagihan anjak piutang	83.645	76.949	53.531	Factoring receivables
Tagihan anjak piutang - hawalah bil ujarah	-	5.188	-	Factoring receivables - hawalah bil ujarah
Pendapatan yang belum diakui	<u>(5.027)</u>	<u>(1.271)</u>	<u>(951)</u>	Unearned factoring income
Sub jumlah	78.618	80.866	52.580	Sub total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(109)</u>	<u>(79)</u>	<u>(32)</u>	Allowance for impairment losses
Sub jumlah	<u>78.509</u>	<u>80.787</u>	<u>52.548</u>	Sub total
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Rupiah				Rupiah
Tagihan anjak piutang	137.075	316.779	463.583	Factoring receivables
Tagihan anjak piutang - hawalah bil ujarah	211.300	32.364	15.799	Factoring receivables - hawalah bil ujarah
Pendapatan yang belum diakui	-	-	<u>(67.896)</u>	Unearned factoring income
Sub jumlah	<u>348.375</u>	<u>349.143</u>	<u>411.486</u>	Sub total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1.977)</u>	<u>(1.916)</u>	<u>(861)</u>	Allowance for impairment losses
Sub jumlah	<u>346.398</u>	<u>347.227</u>	<u>410.625</u>	Sub total
Tagihan anjak piutang - Bersih	<u>424.907</u>	<u>428.014</u>	<u>463.173</u>	Factoring receivables - Net
Tingkat bunga per tahun	12,00% - 16,00%	12,00% - 18,50%	13,00% - 18,50%	Interest rates per annum

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh tagihan anjak piutang belum jatuh tempo.

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, all factoring receivables are not yet due.

9. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

9. FINANCING RECEIVABLES (continued)

b. Tagihan Anjak Piutang – Bersih (lanjutan)

b. Factoring Receivables - Net (continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Saldo awal periode	1.995	893	1.051	<i>Balance at beginning of period</i>
Penyisihan (Pemulihan) periode berjalan	91	1.102	(158)	<i>Provision (Reversal) during the period</i>
Saldo akhir periode	<u>2.086</u>	<u>1.995</u>	<u>893</u>	<i>Balance at end of period</i>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

c. Piutang Sewa Pembiayaan – Bersih

c. Finance Lease Receivables - Net

Akun ini merupakan piutang dari pelanggan atas transaksi sewa pembiayaan (*finance lease*) dengan detail sebagai berikut:

This account represents receivables from customers arising from finance lease transaction with details as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
<u>Pihak berelasi</u>				<u><i>Related parties</i></u>
Rupiah				<i>Rupiah</i>
Piutang sewa pembiayaan	-	-	363	<i>Finance lease receivable</i>
Pendapatan yang belum diakui	-	-	(8)	<i>Unearned lease income</i>
Sub jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>355</u>	<i>Sub total</i>
<u>Pihak ketiga</u>				<u><i>Third parties</i></u>
Rupiah				<i>Rupiah</i>
Piutang sewa pembiayaan	121.528	125.550	169.100	<i>Finance lease receivable</i>
Pendapatan yang belum diakui	(18.830)	(20.211)	(19.015)	<i>Unearned lease income</i>
Sub jumlah	102.698	105.339	150.085	<i>Sub total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.571)	(6.571)	(6.571)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Bersih	<u>96.127</u>	<u>98.768</u>	<u>143.869</u>	<i>Net</i>
Tingkat bunga per tahun	16,00% - 20,00%	15,00% - 20,00%	14,50% - 18,50%	<i>Interest rates per annum</i>

9. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

9. FINANCING RECEIVABLES (continued)

c. Piutang Sewa Pembiayaan – Bersih (lanjutan)

c. Finance Lease Receivables - Net (continued)

Jumlah piutang sewa pembiayaan bruto berdasarkan jatuh tempo nya adalah sebagai berikut :

The gross finance lease receivables based on maturity are as follows :

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Belum jatuh tempo	92.185	90.696	131.944	<i>Not yet due</i>
Telah jatuh tempo				<i>Overdue:</i>
11 – 90 hari	22.825	30.651	33.409	<i>11 - 90 days</i>
91 – 120 hari	1.417	329	749	<i>91 - 120 days</i>
121 – 180 hari	837	414	770	<i>121 - 180 days</i>
> 180 hari	4.264	3.460	2.591	<i>> 180 days</i>
Jumlah	<u>121.528</u>	<u>125.550</u>	<u>169.463</u>	<i>Total</i>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Saldo awal tahun	6.571	6.571	6.762	<i>Balance at beginning of year</i>
Penghapusan tahun berjalan	-	-	(191)	<i>Write-off during the year</i>
Saldo akhir tahun	<u>6.571</u>	<u>6.571</u>	<u>6.571</u>	<i>Balance at the end of year</i>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance provided is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

10. KREDIT

10. LOANS

Rincian kredit adalah sebagai berikut:

Details of loans are as follows:

a. Jenis Pinjaman

a. By Type of Loan

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Rupiah				<i>Rupiah</i>
Kredit modal kerja	5.869.870	4.662.999	2.748.757	<i>Working capital loans</i>
Kredit konsumsi	2.571.546	2.691.606	3.095.330	<i>Consumer loans</i>
Kredit investasi	816.056	771.262	903.203	<i>Investment loans</i>
Pinjaman karyawan	8.686	9.644	13.261	<i>Employee loans</i>
Sub jumlah	<u>9.266.158</u>	<u>8.135.511</u>	<u>6.760.551</u>	<i>Sub total</i>

10. KREDIT (lanjutan)

Rincian kredit adalah sebagai berikut: (lanjutan)

a. Jenis Pinjaman (lanjutan)

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Mata uang asing				<i>Foreign currencies</i>
Kredit modal kerja	293.769	286.974	291.192	<i>Working capital loans</i>
Jumlah	9.559.927	8.422.485	7.051.743	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(248.848)	(218.438)	(223.144)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Jumlah Kredit - bersih	9.311.079	8.204.047	6.828.599	<i>Total Loans - net</i>

b. Sektor Ekonomi

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Rupiah				<i>Rupiah</i>
Jasa - jasa dunia usaha	2.880.440	1.384.459	1.843.536	<i>Business services</i>
Rumah Tangga	2.101.511	2.182.875	2.502.972	<i>Household</i>
Perindustrian	2.083.647	1.300.873	502.137	<i>Manufacturing</i>
Jasa sosial/masyarakat	672.532	687.242	286.704	<i>Social/public services</i>
Perdagangan, restoran dan hotel	515.280	437.584	541.766	<i>Trading, restaurant and hotel</i>
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	357.701	372.598	232.364	<i>Transportation, warehouses and communication</i>
Konstruksi	172.474	191.793	197.547	<i>Construction</i>
Pertambangan	68.216	61.758	59.460	<i>Mining</i>
Pertanian dan perhutanan	51.765	51.759	38.554	<i>Agriculture and forestry</i>
Lain-lain	362.592	1.464.570	555.511	<i>Others</i>
Sub jumlah	9.266.158	8.135.511	6.760.551	<i>Sub total</i>
Mata uang asing				<i>Foreign currencies</i>
Perindustrian	205.254	196.368	193.578	<i>Manufacturing</i>
Perdagangan, restoran dan hotel	65.394	62.562	62.095	<i>Trading, restaurant and hotel</i>
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	23.121	27.288	34.774	<i>Transportation, warehouses and communication</i>
Listrik, gas dan air	-	756	745	<i>Electricity, gas and water</i>
Sub jumlah	293.769	286.974	291.192	<i>Sub total</i>
Jumlah	9.559.927	8.422.485	7.051.743	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(248.848)	(218.438)	(223.144)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Jumlah Kredit - Bersih	9.311.079	8.204.047	6.828.599	<i>Total Loans - Net</i>

10. LOANS (continued)

Details of loans are as follows: (continued)

a. By Type of Loan (continued)

b. By Economic Sector

10. KREDIT (lanjutan)

10. LOANS (continued)

c. Kolektibilitas Otoritas Jasa Keuangan

c. Financial Service Authority's Collectability

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Lancar	8.669.294	7.326.471	5.762.088	Current
Dalam perhatian khusus	492.785	720.569	884.487	Special mention
Kurang lancar	23.272	28.957	48.968	Standard
Diragukan	31.835	29.848	33.573	Doubtful
Macet	342.741	316.640	322.627	Loss
Jumlah	9.559.927	8.422.485	7.051.743	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(248.848)	(218.438)	(223.144)	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih	9.311.079	8.204.047	6.828.599	Total Loans - Net

d. Berdasarkan penilaian internal Bank

d. Based on Bank's internal assessment

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Kredit yang dinilai secara individual				Loans assessed individually
Nilai tercatat	1.475.165	1.591.668	1.795.319	Fair value
Cadangan kerugian penurunan nilai	(178.410)	(141.884)	(136.210)	Allowance for impairment loss
Jumlah	1.296.755	1.449.784	1.659.109	Total
Kredit yang dinilai secara kolektif				Loans assessed collectively
Nilai tercatat	8.084.762	6.830.817	5.256.424	Fair value
Cadangan kerugian penurunan nilai	(70.438)	(76.554)	(86.934)	Allowance for impairment loss
Jumlah	8.014.324	6.754.263	5.169.490	Total
Jumlah Kredit - Bersih	9.311.079	8.204.047	6.828.599	Total Loans - Net

e. Jangka Waktu

e. By period

Jangka waktu pinjaman diklasifikasikan berdasarkan periode pinjaman dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

Loans classified based on the term of the loan agreements are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
≤ 1 tahun	3.671.235	3.719.632	1.758.234	≤ 1 year
> 1 - 2 tahun	1.071.343	238.257	325.073	> 1 - 2 years
> 2 - 5 tahun	2.591.061	2.190.449	2.454.271	> 2 - 5 years
> 5 tahun	2.226.288	2.274.147	2.514.165	> 5 years
Jumlah	9.559.927	8.422.485	7.051.743	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(248.848)	(218.438)	(223.144)	Allowance for impairment losses
Jumlah Kredit - Bersih	9.311.079	8.204.047	6.828.599	Total Loans - Net

10. KREDIT (lanjutan)

f. Tingkat Bunga Efektif Rata-Rata per Tahun

	30 Juni/ <i>June 31,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020
Rupiah			
Kartu kredit	21,00%	22,50%	24,94%
Kredit konsumsi	13,13%	13,42%	13,28%
Kredit investasi	12,97%	13,31%	13,23%
Kredit modal kerja	12,74%	13,96%	14,61%
Dolar Amerika Serikat			
Kredit modal kerja	6,00%	6,22%	6,00%

g. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan. Kredit juga dijamin dengan jaminan tunai berupa giro, tabungan dan deposito berjangka. Manajemen berkeyakinan agunan yang diterima tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.
- 2) Kredit untuk modal kerja dan investasi terdiri dari pinjaman jangka panjang, tetap dan berulang, sedangkan kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lain.
- 3) Kredit dalam Rupiah berjangka waktu 28 hari sampai 25 tahun, sedangkan kredit dalam valuta asing berjangka waktu antara 5 bulan sampai 8 tahun.
- 4) Kredit yang diberikan kepada karyawan BMNCI merupakan kredit yang diberikan untuk membeli rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu 1 sampai 20 tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.
- 5) Rasio kredit usaha mikro dan kecil terhadap kredit yang diberikan adalah sebesar 2,52%, 0,99% dan 1,18% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 and 2020.
- 6) Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 and 2020, tidak terdapat kredit yang dijadikan agunan oleh BMNCI.

10. LOANS (continued)

f. Average Annual Effective Interest Rates

	30 Juni/ <i>June 31,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Rupiah				Rupiah
Kartu kredit	21,00%	22,50%	24,94%	Credit card
Kredit konsumsi	13,13%	13,42%	13,28%	Consumer loans
Kredit investasi	12,97%	13,31%	13,23%	Investment loans
Kredit modal kerja	12,74%	13,96%	14,61%	Working capital loans
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Kredit modal kerja	6,00%	6,22%	6,00%	Working capital loans

g. Other major information on loans are as follows :

- 1) Loans are secured by collateral, which are legalized by deed of encumbrance, power of attorney to sell and other collaterals that are generally accepted in the banking industry. Loans are also secured by cash collateral, in the form of demand deposits, savings deposits and time deposits. Management believes that collateral received from debtor is adequate to cover possible losses on uncollectible loan.
- 2) Loans for working capital and investments include long-term, fixed and revolving loans, while consumer loans include housing, car and other consumer loans.
- 3) Loans in Rupiah have terms ranging from 28 days to 25 years, while those in foreign currencies have terms ranging from 5 months to 8 years.
- 4) Loans to BMNCI's employee for the purchase of houses, cars and other necessities with terms of 1 to 20 years are payable through salary deduction.
- 5) The ratio of micro and of small business loans to total loans as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 are 2.52%, 0.99% and 1.18%, respectively.
- 6) As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, there are no loans pledged as collateral by BMNCI.

10. KREDIT (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit adalah sebagai berikut (lanjutan) :

7) Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, rincian kredit yang direstrukturisasi menurut jenis pinjaman sebelum cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Rupiah				Rupiah
Kredit modal kerja	740.569	928.941	982.946	Working capital loans
Kredit konsumsi	759.531	841.666	1.055.207	Consumer loans
Kredit investasi	256.023	322.653	515.703	Investment loans
Sub jumlah	1.756.123	2.093.260	2.553.856	Sub total
Mata uang asing				Foreign currencies
Kredit modal kerja	114.999	115.944	122.592	Working capital loans
Jumlah Kredit	1.871.122	2.209.204	2.676.448	Total Loans

8) Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, rincian kredit yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas Otoritas Jasa Keuangan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Lancar	1.307.626	1.477.012	2.034.799	Current
Dalam perhatian khusus	364.641	575.310	517.319	Special mention
Kurang lancar	18.713	23.870	34.251	Substandard
Diragukan	23.371	18.042	5.744	Doubtful
Macet	156.771	114.970	84.335	Loss
Jumlah	1.871.122	2.209.204	2.676.448	Total

10. LOANS (continued)

g. Other major information on loans are as follows (continued):

7) As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the details of restructured loans classified based on types of loans, gross of allowance of impairment losses are as follows:

8) As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the details of restructured loans based on Financial Services Authority collectibility gross of allowance of impairment losses are as follows:

10. KREDIT (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit adalah sebagai berikut (lanjutan):

- 9) Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit Bank (rasio NPL) pada posisi 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
NPL Bruto	4,11%	4,42%	5,69%	Gross NPL
NPL Neto	2,66%	2,81%	3,63%	Net NPL

- 10) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 kepada Bank Indonesia, BMNCI tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

- 11) Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2022		31 Desember/ December 31, 2021		31 Desember/ December 30, 2020		
	Kredit bermasalah/ Non-performing loans	Penyisihan penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Kredit bermasalah/ Non-performing loans	Penyisihan penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Kredit bermasalah/ Non-performing loans	Penyisihan penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
Rupiah							Rupiah
Perdagangan, restoran dan hotel	80.508	24.608	73.145	17.036	88.314	23.377	Trading, restaurant and hotel
Jasa-jasa dunia usaha	56.714	383	3.887	101	22.628	1.559	Business services
Perindustrian	26.005	19.967	26.227	20.135	28.453	23.709	Manufacturing
Konstruksi	26.103	13.433	26.453	11.933	26.453	11.882	Construction
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	17.737	7.492	19.691	7.492	20.762	7.443	Transportation, warehouses and communication
Jasa sosial/masyarakat	1.424	49	3.725	1.124	444	49	Social/public services
Pertanian dan perhutanan	760	87	632	62	1.750	390	Agriculture and forestry
Lainnya	162.112	47.569	195.592	52.298	190.641	52.271	Others
Sub Jumlah	371.363	113.588	349.352	110.181	379.445	120.680	Sub Total
Mata uang asing							Foreign currencies
Perindustrian	26.484	26.484	25.337	25.337	24.978	24.977	Manufacturing
Listrik, gas, dan air	-	-	756	729	745	719	Electricity, gas and water
Sub Jumlah	26.484	26.484	26.093	26.066	25.723	25.696	Sub Total
Jumlah	397.847	140.072	375.445	136.247	405.168	146.376	Total

10. LOANS (continued)

g. Other major information on loans are as follows (continued):

- 9) Ratio on non performing loan to total loan by the bank (NPL ratio) as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 are as follows:

- 10) In its report on legal lending limit (BMPK) to Bank Indonesia as of June 30, 2022, 31 December 2021 and 2020, BMNCI indicated that there is no debtor either related party or third party who has not complied with or exceeded the BMPK.

- 11) As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the details of non-performing loans based on economic sector are as follows:

10. KREDIT (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit adalah sebagai berikut (lanjutan):

12) Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30, 2022			
	Stage 1 - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12 months-ECL	Stage 2 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL - not credit impaired	Stage 3 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – kredit memburuk/ Lifetime ECL - credit impaired	Jumlah/ Total
Saldo awal periode	69.250	26.205	122.983	218.438
Pengalihan ke :				
stage 1	43.818	9.506	-	53.324
stage 2	(3.526)	4.840	9.948	11.262
stage 3	(2.438)	(1.315)	4.530	777
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(8.907)	(20.420)	40.634	11.307
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	6.167	-	-	6.167
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(4.277)	(4.678)	(3.703)	(12.658)
Penghapusbukuan	-	-	(40.919)	(40.919)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	11	-	1.139	1.150
Cadangan kerugian kredit ekspektasian akhir	<u>100.098</u>	<u>14.138</u>	<u>134.612</u>	<u>248.848</u>

10. LOANS (continued)

g. Other major information on loans are as follows (continued):

12) The changes in allowance for impairment losses are as follows:

	30 Juni/June 30, 2022				
	Stage 1 - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12 months-ECL	Stage 2 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL - not credit impaired	Stage 3 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – kredit memburuk/ Lifetime ECL - credit impaired	Jumlah/ Total	
Saldo awal periode	69.250	26.205	122.983	218.438	Balance at beginning of period
Pengalihan ke :					Transfer to :
stage 1	43.818	9.506	-	53.324	stage 1
stage 2	(3.526)	4.840	9.948	11.262	stage 2
stage 3	(2.438)	(1.315)	4.530	777	stage 3
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(8.907)	(20.420)	40.634	11.307	Net remeasurement of loss allowance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	6.167	-	-	6.167	New financial assets originated and purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(4.277)	(4.678)	(3.703)	(12.658)	Financial assets derecognized
Penghapusbukuan	-	-	(40.919)	(40.919)	Write-off
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	11	-	1.139	1.150	Changes in foreign exchange model or parameter and other changes
Cadangan kerugian kredit ekspektasian akhir	<u>100.098</u>	<u>14.138</u>	<u>134.612</u>	<u>248.848</u>	Ending expected credit losses

	31 Desember/December 31, 2021			
	Stage 1 - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12 months-ECL	Stage 2 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL - not credit impaired	Stage 3 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – kredit memburuk/ Lifetime ECL - credit impaired	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	77.465	21.069	124.610	223.144
Pengalihan ke :				
stage 1	36.849	24.130	93	61.072
stage 2	(9.671)	12.844	27.477	30.650
stage 3	(5.468)	(4.670)	(4.124)	(14.262)
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(34.959)	(17.363)	73.611	21.289
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	9.469	-	-	9.469
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(4.175)	(9.804)	(22.434)	(36.413)
Penghapusbukuan	-	-	(76.888)	(76.888)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(260)	-	637	377
Cadangan kerugian kredit ekspektasian akhir	<u>69.250</u>	<u>26.206</u>	<u>122.982</u>	<u>218.438</u>

10. KREDIT (lanjutan)

10. LOANS (continued)

g. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit adalah sebagai berikut (lanjutan):

g. Other major information on loans are as follows (continued):

12) Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

12) The changes in allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/December 31,				Jumlah/ Total	
	2020					
	Stage 1 - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12 months-ECL	Stage 2 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL - not credit impaired	Stage 3 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – kredit memburuk/ Lifetime ECL - credit impaired			
Saldo awal tahun	79.172	24.513	150.483	254.168		Balance at beginning of the year
Pengalihan ke :						Transfer to :
stage 1	(6.305)	40.805	224	34.724		stage 1
stage 2	(22.944)	4.121	31.126	12.303		stage 2
stage 3	(3.675)	(4.621)	16.898	8.602		stage 3
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(25.808)	(28.094)	74.514	20.612		Net remeasurement of loss allowance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	71.451	-	-	71.451		New financial assets originated and purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(14.590)	(15.655)	(62.218)	(92.463)		Financial assets derecognized
Penghapusbukuan	(248)	-	(86.338)	(86.586)		Write-off
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	412	-	(79)	333		Changes in foreign exchange model or parameter and other changes
Cadangan kerugian kredit ekspektasian akhir	77.465	21.069	124.610	223.144		Ending expected credit losses

Nilai baki debit atas debitur-debitur yang cadangan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual sebesar Rp 1.475.165 juta, Rp 1.591.668 juta dan Rp 1.795.319 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020. Debitur-debitur tersebut termasuk dalam sektor ekonomi perindustrian, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, transportasi, pergudangan dan komunikasi, jasa-jasa dunia usaha, jasa sosial/masyarakat dan lainnya.

The outstanding amount of debtors whose allowance for impairment losses are calculated individually amounted to Rp 1,475,165 million, Rp 1,591,668 million and Rp 1,795,319 million as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020. The economic sector in which the debtors belong to include manufacturing, construction, trading, restaurant and hotel, transportation, warehouses and communication, business services, social/public services and others.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible loans.

10. KREDIT (lanjutan)

10. LOANS (continued)

h. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit adalah sebagai berikut (lanjutan):

h. Other major information on loans are as follows (continued):

13) Mutasi kredit yang dihapus buku adalah sebagai berikut:

13) The changes in the loans written-off are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2022			31 Desember/ December 31, 2021			31 Desember/ December 31, 2020			
	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	
Saldo awal periode	1.050.047	92.427	1.142.474	1.005.128	92.427	1.097.555	953.678	94.484	1.048.162	Balance at beginning of period
Penambahan dalam periode berjalan	40.919	-	40.919	76.888	-	76.888	86.586	-	86.586	Additions during the period
Penerimaan kembali	(10.855)	-	(10.855)	(30.542)	-	(30.542)	(33.208)	(2.057)	(35.265)	Recovery
Hapus tagih	(1.422)	-	(1.422)	(1.427)	-	(1.427)	(1.928)	-	(1.928)	Write-Off
Saldo akhir periode	1.078.689	92.427	1.171.116	1.050.047	92.427	1.142.474	1.005.128	92.427	1.097.555	Balance at end of period

Kredit yang dihapus buku dicatat dalam rekening administratif BMNCI. BMNCI terus melakukan upaya penagihan atas kredit yang telah dihapus buku tersebut.

Loan written-off is recorded in BMNCI's administrative account. BMNCI is continuously collecting these loans written-off.

14) Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

14) The carrying amount of loans at amortised cost is as follows:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Kredit	9.559.927	8.422.485	7.051.743	Loans
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	40.200	44.201	59.408	Accrued interest receivable
Cadangan kerugian penurunan nilai	(248.848)	(218.438)	(223.144)	Allowance for impairment losses
Jumlah	9.351.279	8.248.248	6.888.007	Total

11. PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas pembiayaan murabahah dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
<u>Pihak berelasi (Catatan 42)</u>				<u>Related parties (Note 42)</u>
Piutang pembiayaan Murabahah	394	1.765	5.384	Murabahah financing receivable
Pendapatan yang belum diakui	(17)	(111)	(616)	Unearned financing margin
Sub jumlah	377	1.654	4.768	Sub total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3)	-	-	Allowance for impairment losses
Sub Jumlah	374	1.654	4.768	Sub Total
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Piutang pembiayaan Murabahah	27.705	4.385	98	Murabahah financing receivable
Pendapatan yang belum diakui	(2.190)	(711)	(9)	Unearned financing margin
Sub jumlah	25.515	3.674	89	Sub total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6)	-	(12)	Allowance for impairment losses
Sub Jumlah	25.509	3.674	77	Sub Total
Bersih	25.883	5.328	4.845	Net
Tingkat margin rata-rata pertahun setara	12,99% - 21,00%	12,99% - 21,00%	12,99% - 21,00%	Equivalent margin rate per annum

11. MURABAHAH FINANCING RECEIVABLES

This account represents murabahah financing receivables with details as follows:

Berikut adalah saldo tagihan piutang pembiayaan murabahah (bruto) sesuai dengan masa jatuh temponya, yaitu:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	18.208	1.709	3.743	Less than or equal to 1 year
Lebih dari 1 tahun	9.891	4.441	1.739	More than 1 years
Jumlah	28.099	6.150	5.482	Total

Details of murabahah financing receivables (gross) based on maturity are as follows:

Analisis umur piutang pembiayaan murabahah (bruto) berdasarkan tingkat kolektibilitas atas adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Belum jatuh tempo	28.099	6.150	5.482	Not yet due

The aging analysis of murabahah financing receivables (at gross, based on its collectability are as follows:

11. PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH (lanjutan)

11. MURABAHAH FINANCING RECEIVABLES (continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Saldo awal periode	-	12	1.092	Balance at beginning of period
Penyisihan (pemulihan) periode berjalan	9	(12)	4.093	Provision (recovery) during the period
Penghapusan tahun berjalan	-	-	(5.173)	Write-off during the year
Saldo akhir periode	9	-	12	Balance at end of period

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

12. PIUTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANA QISHAH

12. MUSYARAKAH MUTANA QISHAH FINANCING RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas pembiayaan Musyarakah Mutana Qishah dengan rincian sebagai berikut:

This account represents Musyarakah Mutana Qishah financing receivables with details as follows:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Piutang pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah	46.349	28.592	16.132	Musyarakah Mutanaqisah financing receivables
Pendapatan yang belum diakui	(10.808)	(6.982)	(2.816)	Unearned income
Sub Jumlah	35.541	21.610	13.316	Sub Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14)	(7)	(342)	Allowance for impairment losses
Jumlah	35.527	21.603	12.974	Total
Tingkat margin rata-rata per tahun setara	13,00% - 16,00%	14,00% - 28,00%	14,00% - 28,00%	Equivalent margin rates per annum

Berikut adalah saldo tagihan piutang pembiayaan musyarakah mutanaqisah (bruto) sesuai dengan masa jatuh temponya, yaitu:

Details of musyarakah mutanaqisah financing receivables (at gross) by maturity are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Kurang dari atau sama dengan satu tahun	21.853	13.311	8.183	Less than or equal to one year
Lebih dari satu tahun	24.496	15.281	7.949	More than one years
Jumlah	46.349	28.592	16.132	Total

12. PIUTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANA QISHAH (lanjutan) **12. MUSYARAKAH MUTANA QISHAH FINANCING RECEIVABLES (continued)**

Analisis umur piutang pembiayaan Musyarakah Mutana qishah (bruto) berdasarkan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

The aging analysis of Musyarakah Mutana qishah financing receivables (at gross) based on its collectability are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Belum jatuh tempo	44.330	27.524	13.939	<i>Not yet due</i>
Telah jatuh tempo	2.019	1.068	2.193	<i>Past due</i>
Jumlah	<u>46.349</u>	<u>28.592</u>	<u>16.132</u>	<i>Total</i>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

13. PREMI DAN ASET REASURANSI **13. PREMIUM AND REINSURANCE ASSETS**

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Pihak berelasi (Catatan 42)				<i>Related parties (Note 42)</i>
Piutang premi dan reasuransi	10.534	28.473	43.458	<i>Premium and reinsurance receivables</i>
Pihak ketiga				<i>Third parties</i>
Piutang premi dan reasuransi	170.267	125.919	117.857	<i>Premium and reinsurance receivables</i>
Aset reasuransi	200.856	178.176	192.625	<i>Reinsurance assets</i>
Sub jumlah	371.123	304.095	310.482	<i>Sub total</i>
Cadangan penurunan nilai	(34.781)	(34.781)	(34.031)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Bersih	<u>336.342</u>	<u>269.314</u>	<u>276.451</u>	<i>Net</i>
Jumlah	<u>346.876</u>	<u>297.787</u>	<u>319.909</u>	<i>Total</i>

13. PREMI DAN ASET REASURANSI (lanjutan)

13. PREMIUM AND REINSURANCE ASSETS (continued)

a. Piutang premi dan reasuransi

a. Premium and reinsurance receivables

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Asuransi kerugian	66.433	91.498	112.756	General insurance
Asuransi jiwa	114.368	62.894	48.559	Life insurance
Sub jumlah	180.801	154.392	161.315	Sub total
Cadangan penurunan nilai	(34.781)	(34.781)	(34.031)	Allowance for impairment losses
Jumlah	<u>146.020</u>	<u>119.611</u>	<u>127.284</u>	Total

Piutang premi merupakan tagihan premi kepada tertanggung, agen asuransi dan broker asuransi.

Premium receivables represent receivables from policy holders, insurance agents and insurance brokers.

Piutang reasuransi merupakan tagihan kepada reasuradur sesudah memperhitungkan komisi dan klaim reasuransi atas penyerahan sebagian risiko berdasarkan perjanjian reasuransi.

Reinsurance receivables represent billings to reinsurers after calculating reinsurance commissions and claims upon apportioned risks based on reinsurance agreements.

Piutang premi dan reasuransi berdasarkan klasifikasi umur adalah sebagai berikut:

Premium and reinsurance receivables classified by age are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Kurang dari 60 hari	97.196	72.803	85.641	Less than 60 days
Lewat jatuh waktu 60 – 90 hari	11.890	10.810	12.455	Overdue for 60 - 90 days
Lewat jatuh waktu lebih dari 90 hari	71.715	70.779	63.219	Overdue for more than 90 days
Jumlah	<u>180.801</u>	<u>154.392</u>	<u>161.315</u>	Total

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, piutang premi dan reasuransi yang diakui sebagai aset yang diperkenankan menjadi bagian dalam menghitung solvabilitas adalah piutang premi dan reasuransi yang berumur kurang dari 60 hari. Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, piutang premi diperkenankan masing-masing sebesar Rp 91.693 juta, Rp 65.000 juta dan Rp 82.205 juta. Piutang reasuransi pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 5.503 juta, Rp 7.803 juta dan Rp 3.436 juta.

In accordance with the Minister of Finance Decree, premium and reinsurance receivables recognized as assets are allowed to be included in solvency calculation provided that they are less than 60 days outstanding. As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, allowed premium receivables amounted to Rp 91,693 million, Rp 65,000 million and Rp 82,205 million, respectively. Reinsurance receivables as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 5,503 million, Rp 7,803 million and Rp 3,436 million, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pencadangan cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance provided is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

13. PREMI DAN ASET REASURANSI (lanjutan)

13. PREMIUM AND REINSURANCE ASSETS (continued)

b. Aset reasuransi

b. Reinsurance assets

Merupakan aset reasuransi yang dimiliki melalui entitas anak, berikut :

This reinsurance asset owned by a subsidiaries, the following:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
PT MNC Asuransi Indonesia	181.004	157.250	165.187	PT MNC Asuransi Indonesia
PT MNC Life Assurance	19.852	20.926	27.438	PT MNC Life Assurance
Jumlah	<u>200.856</u>	<u>178.176</u>	<u>192.625</u>	Total

Rincian aset reasuransi PT MNC Asuransi Indonesia adalah sebagai berikut:

Details of the reinsurance assets of PT MNC Asuransi Indonesia are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Premi yang belum merupakan pendapatan	32.114	26.322	42.203	Unearned Premiums
Cadangan premi	16.841	14.608	4.804	Premium reserves
Estimasi klaim	132.049	116.320	118.180	Estimated claims
Jumlah	<u>181.004</u>	<u>157.250</u>	<u>165.187</u>	Total

1) Premi yang belum merupakan pendapatan

1) Unearned premiums

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Harta benda	16.633	18.194	27.768	Property
Rekayasa	5.359	4.136	6.076	Engineering
Penerbangan	3.168	1.289	4.019	Aviation
Tanggung gugat	2.634	163	339	Liability
Satelit	2.496	1.763	3.079	Satellite
Pengangkutan	37	51	377	Transportation
Kendaraan bermotor	141	12	-	Vehicle
Aneka	1.646	714	545	Miscellaneous
Jumlah	<u>32.114</u>	<u>26.322</u>	<u>42.203</u>	Total

13. PREMI DAN ASET REASURANSI (lanjutan)

13. PREMIUMS AND REINSURANCE ASSETS (continued)

b. Aset reasuransi (lanjutan)

b. Reinsurance assets (continued)

2) Cadangan premi

2) Premium reserve

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Rekayasa	15.031	891	2.552	Engineering
Harta benda	1.679	13.684	2.119	Property
Kendaraan bermotor	77	19	23	Motorcycle vehicle
Aneka	54	14	110	Miscellaneous
Jumlah	<u>16.841</u>	<u>14.608</u>	<u>4.804</u>	Total

3) Estimasi klaim

3) Estimated claim

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Harta benda	64.723	66.273	78.956	Property
Rekayasa	44.431	34.058	29.443	Engineering
Pengangkutan	1.346	4.699	2.797	Transportation
Tanggung gugat	1.043	1.755	972	Liability
Penerbangan	73	76	378	Aviation
Aneka	20.433	9.459	5.634	Miscellaneous
Jumlah	<u>132.049</u>	<u>116.320</u>	<u>118.180</u>	Total

Rincian aset reasuransi PT MNC Life Assurance adalah sebagai berikut:

Details of the reinsurance asset of PT MNC Life Assurance are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Estimasi liabilitas klaim	16.018	18.184	23.865	Estimated claims liabilities
Premi yang belum merupakan pendapatan	3.834	2.742	3.573	Unearned premiums
Jumlah	<u>19.852</u>	<u>20.926</u>	<u>27.438</u>	Total

13. PREMI DAN ASET REASURANSI (lanjutan)

b. Aset reasuransi (lanjutan)

1) Estimasi liabilitas klaim

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Kematian	15.746	17.846	21.135	Death
Kesehatan	272	338	2.730	Health
Jumlah	<u>16.018</u>	<u>18.184</u>	<u>23.865</u>	Total

2) Premi yang belum merupakan pendapatan

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Kematian	2.821	842	524	Death
Kesehatan	1.013	1.900	3.049	Health
Jumlah	<u>3.834</u>	<u>2.742</u>	<u>3.573</u>	Total

13. PREMIUMS AND REINSURANCE ASSETS (continued)

b. Reinsurance assets (continued)

1) Estimated claim liabilities

	31 Desember/ December 31, 2020	
Death	21.135	
Health	2.730	
Total	<u>23.865</u>	

2) Unearned premiums

	31 Desember/ December 31, 2020	
Death	524	
Health	3.049	
Total	<u>3.573</u>	

14. ASET TETAP

14. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	30 Juni/ June 30, 2022	
Biaya perolehan						<i>At cost</i>
Pemilikan langsung						<i>Direct acquisition</i>
Tanah	32.387	-			32.387	Land
Bangunan dan prasarana	108.461	-	5.508	2.132	111.852	Buildings and improvements
Peralatan kantor	241.232	13	8.864	320	249.789	Office equipment
Partisi	37.099	-	18	-	37.117	Partition
Kendaraan	28.097	-	-	3.483	24.614	Vehicles
Perlengkapan kantor	33.402	-	1.230	142	34.490	Office furniture and fixtures
Aset tetap dalam penyelesaian	10.628	-	907	238	(15)	Construction in progress
Sewa pembiayaan						<i>Finance lease</i>
Kendaraan	63.923	-	3.309	825	66.407	Vehicles
Jumlah	<u>555.229</u>	<u>13</u>	<u>19.836</u>	<u>7.140</u>	<u>567.938</u>	<i>Total</i>
Akumulasi penyusutan						<i>Accumulated depreciation</i>
Pemilikan langsung						<i>Direct acquisition</i>
Bangunan dan prasarana	84.180	-	3.678	1.941	85.917	Buildings and improvements
Peralatan kantor	187.040	-	8.147	320	194.867	Office equipment
Partisi	21.758	-	494	-	22.252	Partition
Kendaraan	20.580	-	1.068	2.812	50	Vehicles
Perlengkapan kantor	29.993	-	1.339	134	-	Office furniture and fixtures
Sewa pembiayaan						<i>Finance lease</i>
Kendaraan	29.706	-	5.567	600	(50)	Vehicles
Jumlah	<u>373.257</u>	<u>-</u>	<u>20.293</u>	<u>5.807</u>	<u>-</u>	<i>Total</i>
Jumlah Tercatat	<u>181.972</u>				<u>180.195</u>	<i>Net Carrying Amount</i>

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan yang timbul dari akuisisi/ Addition arising from acquisition	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2021	
Biaya perolehan							<i>At cost</i>
Pemilikan langsung							<i>Direct acquisition</i>
Tanah	32.388	-	-	-	(1)	32.387	Land
Bangunan dan prasarana	89.564	-	2.940	9.261	25.218	108.461	Buildings and improvements
Peralatan kantor	208.767	-	19.706	2.685	15.444	241.232	Office equipment
Partisi	37.443	-	149	-	(493)	37.099	Partition
Kendaraan	66.887	-	3.626	10.496	(31.920)	28.097	Vehicles
Perlengkapan kantor	56.199	-	271	929	(22.139)	33.402	Office furniture and fixtures
Aset tetap dalam penyelesaian	38.146	-	156	-	(27.674)	10.628	Construction in progress
Sewa pembiayaan							Finance lease
Kendaraan	36.121	-	15.436	30.229	42.595	63.923	Vehicles
Jumlah	565.515	-	42.284	53.600	1.030	555.229	<i>Total</i>
Akumulasi penyusutan							<i>Accumulated depreciation</i>
Pemilikan langsung							<i>Direct acquisition</i>
Bangunan dan prasarana	56.454	-	8.670	8.206	27.262	84.180	Buildings and improvements
Peralatan kantor	165.755	-	18.003	2.625	5.907	187.040	Office equipment
Partisi	41.726	-	1.794	-	(21.762)	21.758	Partition
Kendaraan	20.399	-	5.678	8.135	2.638	20.580	Vehicles
Perlengkapan kantor	41.622	-	2.459	848	(13.240)	29.993	Office furniture and fixtures
Sewa pembiayaan							Finance lease
Kendaraan	34.855	-	9.004	13.348	(805)	29.706	Vehicles
Jumlah	360.811	-	45.608	33.162	-	373.257	<i>Total</i>
Jumlah Tercatat	204.704					181.972	<i>Net Carrying Amount</i>
		Penambahan yang timbul dari akuisisi/ Addition arising from acquisition	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2020	
Biaya perolehan							<i>At cost</i>
Pemilikan langsung							<i>Direct acquisition</i>
Tanah	32.388	-	-	-	-	32.388	Land
Bangunan dan prasarana	88.386	844	334	-	-	89.564	Buildings and improvements
Peralatan kantor	190.877	8.176	11.701	1.987	-	208.767	Office equipment
Partisi	35.767	-	5.517	3.841	-	37.443	Partition
Kendaraan	124.155	299	4.266	61.833	-	66.887	Vehicles
Perlengkapan kantor	54.319	704	2.198	1.022	-	56.199	Office furniture and fixtures
Aset tetap dalam penyelesaian	6.293	-	31.853	-	-	38.146	Construction in progress
Sewa pembiayaan							Finance lease
Kendaraan	32.091	-	4.030	-	-	36.121	Vehicles
Jumlah	564.276	10.023	59.899	68.683	-	565.515	<i>Total</i>
Akumulasi penyusutan							<i>Accumulated depreciation</i>
Pemilikan langsung							<i>Direct acquisition</i>
Bangunan dan prasarana	54.763	844	847	-	-	56.454	Buildings and improvements
Peralatan kantor	142.937	7.624	17.057	1.863	-	165.755	Office equipment
Partisi	30.396	-	14.523	3.193	-	41.726	Partition
Kendaraan	39.830	45	4.523	23.999	-	20.399	Vehicles
Perlengkapan kantor	36.817	209	5.489	893	-	41.622	Office furniture and fixtures
Sewa pembiayaan							Finance lease
Kendaraan	23.339	-	11.516	-	-	34.855	Vehicles
Jumlah	328.082	8.722	53.955	29.948	-	360.811	<i>Total</i>
Jumlah Tercatat	236.194					204.704	<i>Net Carrying Amount</i>

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan prasarana kantor dan peralatan kantor yang masing-masing diperkirakan akan selesai pada tahun 2023 dan 2022. Pada tanggal 30 Juni 2022, persentase penyelesaian aset tetap dalam penyelesaian masing-masing sebesar 11% dari nilai kontrak (MNCAM) dan 80% dari nilai kontrak (MNCF)

Construction in progress represents leasehold improvements and office equipment which are estimated to be completed in 2023 and 2022, respectively. As of June 30, 2022, the percentage of completion of construction in progress are 11% of the contract value (MNCAM) and 80% of the contract value (MNCF), respectively.

14. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap kecuali hak atas tanah, diasuransikan terhadap risiko kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 153.914 juta, Rp 158.934 juta dan Rp 173.379 juta pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 yaitu PT MNC Asuransi Indonesia (Entitas anak), PT Asuransi Sinarmas Syariah dan PT Asuransi Kresna.

Jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Kelompok Usaha pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 277.130 juta, Rp 275.345 juta dan Rp 246.450 juta.

Bangunan dan kendaraan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh oleh Kelompok Usaha (Catatan 22).

Rincian keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Harga perolehan	7.140	53.600	68.683	Cost
Akumulasi penyusutan	<u>(5.807)</u>	<u>(33.162)</u>	<u>(29.948)</u>	Accumulated depreciation
Jumlah tercatat	1.333	20.438	38.735	Net carrying amount
Harga jual	1.946	20.202	32.537	Proceeds
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap	<u>613</u>	<u>(236)</u>	<u>(6.198)</u>	Profit (loss) on disposal of property and equipment

Tidak terdapat komitmen kontraktual untuk perolehan aset tetap pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Property and equipment except for landrights, are covered by insurance against accident, fire and other risks for the sum insured amounting to Rp 153,914 million, Rp 158,934 million and Rp 173,379 million as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, respectively, which were obtained from PT MNC Asuransi Indonesia (a subsidiary), PT Asuransi Sinarmas Syariah and PT Asuransi Kresna.

Gross carrying amount of property and equipment that are fully depreciated but still used by the Group as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 277,130 million, Rp 275,345 million and Rp 246,450 million, respectively.

Buildings and vehicles are used as collateral for the credit facilities obtained by the Group (Note 22).

Details of gain (loss) from the disposal of property and equipment are as follows:

There are no contractual commitment for the acquisition of property and equipment as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020.

15. ASET AL-IJARAH

15. AL-IJARAH ASSETS

	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2021	
Biaya perolehan	9.968	-	-	9.968	At cost
Akumulasi penyusutan	<u>9.728</u>	<u>240</u>	<u>-</u>	<u>9.968</u>	Accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	<u>240</u>			<u>-</u>	Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2020	
Biaya perolehan	9.968	-	-	9.968	At cost
Akumulasi penyusutan	<u>9.238</u>	<u>490</u>	<u>-</u>	<u>9.728</u>	Accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	<u>730</u>			<u>240</u>	Net Carrying Amount

16. ASET TAK BERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSETS

	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	30 Juni/ June 30, 2022	
Biaya perolehan	274.717	18.352	-	224	293.293	At cost
Akumulasi amortisasi	121.427	4.405	-	-	125.832	Accumulated amortization
Jumlah Tercatat	153.290				167.461	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2021	
Biaya perolehan	254.539	20.242	64	-	274.717	At cost
Akumulasi amortisasi	112.938	8.553	64	-	121.427	Accumulated amortization
Jumlah Tercatat	141.601				153.290	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2020	
Biaya perolehan	121.938	16.993	50	115.658	254.539	At cost
Akumulasi amortisasi	103.187	9.801	50	-	112.938	Accumulated amortization
Jumlah Tercatat	18.751				141.601	Net Carrying Amount

17. GOODWILL

17. GOODWILL

Goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Entitas atas nilai wajar aset bersih Entitas anak adalah sebagai berikut:

Goodwill represents the excess of acquisition cost over the Entity's interest in the fair value of the net assets of entity acquired as follows:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
PT Bank MNC Internasional Tbk	293.390	293.390	293.390	PT Bank MNC Internasional Tbk
PT MNC Guna Usaha Indonesia	65.279	65.279	65.279	PT MNC Guna Usaha Indonesia
WINFLY Ltd	5.280	5.280	5.280	WINFLY Ltd
PT MNC Life Assurance	3.838	3.838	3.838	PT MNC Life Assurance
PT MNC Asuransi Indonesia	1.656	1.656	1.656	PT MNC Asuransi Indonesia
Jumlah	369.443	369.443	369.443	Total

18. ASET LAIN-LAIN

18. OTHER ASSETS

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Agunan yang diambil alih	786.276	788.328	699.650	Foreclosed collateral
Piutang reverse repo	667.996	750.129	744.198	Reverse repo receivables
Piutang lain-lain	214.337	191.808	229.817	Other receivables
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	59.793	62.518	77.846	Accrued interest receivable
Biaya akuisisi kartu kredit dibayar dimuka	53.980	62.657	105.669	Credit card acquisitions prepayment
Uang muka	43.036	46.791	44.891	Advances
Properti investasi - bersih	33.736	34.022	88.970	Investment properties - net
Biaya yang ditangguhkan	32.578	32.206	27.659	Deferred charges
Deposito yang dibatasi penggunaannya	30.000	42.015	39.659	Restricted time deposit
Sewa dibayar dimuka	16.963	17.893	27.870	Prepaid rent
Jaminan sewa dan telepon	11.551	12.309	12.318	Rental and telephone deposits
Pajak dibayar dimuka	3.452	2.878	1.115	Prepaid taxes
Asuransi dibayar dimuka	3.312	2.980	8.296	Prepaid insurance
Penyertaan saham	1.060	1.060	1.370	Investment in shares at cost
Piutang pendapatan sewa Al-Ijarah	260	1.185	5.219	Al-Ijarah rental income receivable
Tagihan derivatif	113	76	4.187	Derivative receivables
Lain-lain	306.243	315.527	346.655	Others
Sub Jumlah	2.264.686	2.364.382	2.465.389	Sub Total
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	(21.597)	(22.072)	(22.072)	Allowance for impairment losses on non-financial assets
Jumlah	2.243.089	2.342.310	2.443.317	Total

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, deposito yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito atas jaminan pinjaman jangka pendek MNCS dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan MNCGUI dari PT Bank Central Asia Tbk.

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the restricted time deposit represents collateral deposits for MNCS's short-term loan from PT Bank JTrust Indonesia Tbk and MNCGUI from PT Bank Central Asia Tbk.

19. SIMPANAN

19. DEPOSITS

Simpanan terdiri dari:

Deposits consist of:

	30 Juni/June 30, 2022			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Deposito berjangka	1.182.635	7.793.894	8.976.529	Time deposits
Tabungan	38.001	1.657.049	1.695.050	Savings deposits
Giro	206.005	989.287	1.195.292	Demand deposits
Jumlah	1.426.641	10.440.230	11.866.871	Total

19. SIMPANAN (lanjutan)

19. DEPOSITS (continued)

	31 Desember/December 31, 2021			
	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Pihak ketiga/ <i>Third parties</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Deposito berjangka	1.247.998	6.737.595	7.985.593	<i>Time deposits</i>
Tabungan	34.518	1.820.880	1.855.398	<i>Savings deposits</i>
Giro	242.179	1.040.276	1.282.455	<i>Demand deposits</i>
Jumlah	1.524.695	9.598.751	11.123.446	<i>Total</i>

	31 Desember/December 31, 2020			
	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Pihak ketiga/ <i>Third parties</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Deposito berjangka	581.884	6.893.477	7.475.361	<i>Time deposits</i>
Tabungan	14.986	868.834	883.820	<i>Savings deposits</i>
Giro	156.812	552.816	709.628	<i>Demand deposits</i>
Jumlah	753.682	8.315.127	9.068.809	<i>Total</i>

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari simpanan adalah sebagai berikut:

The carrying amount of deposits at amortized cost are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>	
	2022	2021	2020	
Simpanan				<i>Deposits</i>
Deposito berjangka	8.976.529	7.985.593	7.475.361	<i>Time deposits</i>
Tabungan	1.695.050	1.855.398	883.820	<i>Savings deposits</i>
Giro	1.195.292	1.282.455	709.628	<i>Demand deposits</i>
Sub jumlah	11.866.871	11.123.446	9.068.809	<i>Sub total</i>
Bunga yang masih harus dibayar (Catatan 22)	15.842	19.629	27.746	<i>Accrued interest (Note 22)</i>
Jumlah	11.882.713	11.143.075	9.096.555	<i>Total</i>

19. SIMPANAN (lanjutan)

19. DEPOSITS (continued)

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	
	2022	2021	2020	
a. Giro:				
Pihak berelasi (Catatan 42)				Related parties (Note 42)
Rupiah	171.716	201.886	140.662	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	30.665	37.639	15.594	United States Dollar
Lainnya	3.624	2.654	556	Others
Sub Jumlah	206.005	242.179	156.812	Sub Total
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah	891.626	888.492	465.817	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	85.598	142.663	79.706	United States Dollar
Dolar Singapura	3.977	2.695	3.185	Singapore Dollar
Euro	3.141	2.696	1.692	Euro
Lainnya	4.945	3.730	2.416	Others
Sub Jumlah	989.287	1.040.276	552.816	Sub Total
Jumlah	1.195.292	1.282.455	709.628	Total
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun				Average annual effective interest rate
Rupiah	2,16%	3,12%	2,67%	Rupiah
Mata Uang Asing	0,23%	0,84%	0,88%	Foreign currencies

Jumlah giro yang dijadikan jaminan kredit pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 46.139 juta, Rp 36.463 juta, dan Rp 78.348 juta.

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, demand deposits which are pledged as loan collaterals amounted to Rp 46,139 million, Rp 36,463 million and Rp 78,348 million, respectively.

b. Tabungan:

b. Savings deposits:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	
	2022	2021	2020	
Rupiah				Rupiah
Tabungan MNC	1.269.111	1.295.671	646.613	Tabungan MNC
Tabungan MNC Bisnis	292.090	413.835	119.736	Tabungan MNC Bisnis
TabunganKu	31.991	36.211	15.334	Tabunganku
Tabungan MNC Junior	11.225	12.163	12.423	Tabungan MNC Junior
Tabungan Rencana MNC	11.181	11.627	10.299	Tabungan Rencana MNC
Tabungan MNC Motion	9.486	8.505	-	Tabungan MNC Motion
Tabungan MNC Bunga Khusus	2.273	994	1.031	Tabungan MNC Bunga Khusus
Tabungan MNC Program Hadiah	2.900	12.906	3.942	Tabungan MNC Program Hadiah
Lainnya	64.793	63.486	74.442	Others
Jumlah	1.695.050	1.855.398	883.820	Total
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	2,52%	1,79%	1,63%	Average annual effective interest rates

19. SIMPANAN (lanjutan)

19. DEPOSITS (continued)

b. Tabungan (lanjutan):

Jumlah tabungan yang dijadikan jaminan kredit pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 7.545 juta, Rp 5.675 juta dan Rp 7.689 juta.

b. Savings deposits (Continued):

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, savings deposits which are pledged as loan collaterals amounted to Rp 7,545 million, Rp 5,675 million and Rp 7,689 million, respectively.

c. Deposito berjangka:

c. Time deposits:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Pihak berelasi (Catatan 42)				Related parties (Note 42)
Rupiah	1.180.451	1.241.062	576.783	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2.184	6.936	5.101	United States Dollar
Sub Jumlah	<u>1.182.635</u>	<u>1.247.998</u>	<u>581.884</u>	Sub Total
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah	7.654.187	6.544.459	6.729.879	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	138.410	187.073	160.283	United States Dollar
Lainnya	1.297	6.063	3.315	Others
Sub Jumlah	<u>7.793.894</u>	<u>6.737.595</u>	<u>6.893.477</u>	Sub Total
Jumlah	<u>8.976.529</u>	<u>7.985.593</u>	<u>7.475.361</u>	Total
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun				Average annual effective interest rates
Rupiah	4,57%	6,23%	7,70%	Rupiah
Mata uang asing	0,72%	1,32%	2,17%	Foreign currencies

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan periode adalah sebagai berikut:

Time deposits classified based on the original term are as follows:

	30 Juni/June 30, 2022			31 Desember/December 31, 2021			31 Desember/December 31, 2020			
	Mata uang asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	Rupiah	
1 bulan	5.511.848	109.057	5.620.905	3.974.412	164.707	4.139.119	3.409.102	117.121	3.526.223	1 month
3 bulan	1.982.034	28.317	2.010.351	2.285.219	30.491	2.315.710	2.467.621	45.406	2.513.027	3 months
6 bulan	724.602	4.397	728.999	1.261.785	4.189	1.265.974	587.807	5.498	593.305	6 months
12 bulan	616.154	120	616.274	264.105	685	264.790	842.132	674	842.806	12 months
Jumlah	<u>8.834.638</u>	<u>141.891</u>	<u>8.976.529</u>	<u>7.785.521</u>	<u>200.072</u>	<u>7.985.593</u>	<u>7.306.662</u>	<u>168.699</u>	<u>7.475.361</u>	Total

Jumlah deposito berjangka yang dijadikan jaminan kredit pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.451.642 juta, Rp 1.367.469 juta dan Rp 470.162 juta.

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, time deposits which are pledged as loan collateral amounted to Rp 1,451,642 million, Rp 1,367,469 million and Rp 470,162 million, respectively.

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari bank lain terdiri dari:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020
Pihak ketiga			
Tabungan	30.504	55.297	27.364
Deposito berjangka	18.750	13.780	251.732
Giro	12.105	61.598	211.007
Jumlah	<u>61.359</u>	<u>130.675</u>	<u>490.103</u>
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun			
Tabungan	2,48%	2,71%	4,24%
Giro	5,47%	5,68%	6,23%
Deposito berjangka	5,19%	5,48%	6,84%

Third parties
Savings deposits
Time deposits
Demand deposits

Total

Average annual effective interest rates

Savings deposits
Demand deposits
Time deposits

Nilai tercatat pada biaya perolehan dari simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

Carrying amount at amortized cost of the deposit from other banks are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020
Simpanan dari bank lain	61.359	130.675	490.103
Bunga yang masih harus dibayar (Catatan 20)	13	14	40
Jumlah	<u>61.372</u>	<u>130.689</u>	<u>490.143</u>

Deposits from other banks
Accrued interest (Note 20)

Total

Deposito Berjangka

Time Deposits

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan periode adalah sebagai berikut:

Time deposits classified based on its term, are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020
1 bulan	9.000	8.280	244.232
3 bulan	6.250	-	2.000
6 bulan	500	500	500
12 bulan	3.000	5.000	5.000
Jumlah	<u>18.750</u>	<u>13.780</u>	<u>251.732</u>

1 month
3 months
6 months
12 months

Total

21. UTANG NASABAH

21. CUSTOMERS PAYABLES

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Pihak ketiga - Rupiah				<i>Third parties - Rupiah</i>
Utang Nasabah	357.288	298.830	465.757	<i>Payables to Costumers</i>
Premi diterima dimuka	33.554	30.757	14.733	<i>Premium deposits</i>
Uang muka dan angsuran	25.499	16.852	18.352	<i>Advances and installments</i>
Utang dealer	464	644	13	<i>Dealers payable</i>
Jumlah	<u>416.805</u>	<u>347.083</u>	<u>498.855</u>	<i>Total</i>

22. UTANG REASURANSI DAN UTANG LAIN-LAIN

22. REINSURANCE AND OTHER PAYABLES

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Biaya yang masih harus dibayar	234.753	183.674	133.582	<i>Accrued expenses</i>
Utang reasuransi	39.319	32.416	26.917	<i>Reinsurance payables</i>
Bunga yang masih harus dibayar				<i>Accrued interest</i>
Simpanan (Catatan 19)	15.842	19.629	27.746	<i>Deposits (Note 19)</i>
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)	13	14	40	<i>Deposits from other banks (Note 20)</i>
Utang bank dan institusi keuangan non-bank (Catatan 24)	3.650	3.489	4.470	<i>Loan from bank and non-bank financial institutions (Note 24)</i>
Utang klaim	9.421	9.011	39.278	<i>Claim payables</i>
Jumlah	<u>302.998</u>	<u>248.233</u>	<u>232.033</u>	<i>Total</i>

23. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI DAN INVESTASI

23. INSURANCE AND INVESTMENT CONTRACTS LIABILITY

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Liabilitas kontrak asuransi				<i>Insurance contracts liability</i>
PT MNC Asuransi Indonesia	395.937	342.413	325.989	<i>PT MNC Asuransi Indonesia</i>
PT MNC Life Assurance	76.442	163.585	150.702	<i>PT MNC Life Assurance</i>
Sub jumlah	<u>472.379</u>	<u>505.998</u>	<u>476.691</u>	<i>Sub total</i>
Liabilitas kontrak investasi				<i>Investment contract liability</i>
Estimasi klaim sendiri	<u>187.235</u>	<u>67.365</u>	<u>57.917</u>	<i>Estimated claims</i>
Jumlah	<u>659.614</u>	<u>573.363</u>	<u>534.608</u>	<i>Total</i>

23. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI DAN INVESTASI (lanjutan) 23. INSURANCE AND INVESTMENT CONTRACTS LIABILITY (continued)

Liabilitas kontrak asuransi untuk PT MNC Asuransi Indonesia adalah sebagai berikut: Insurance contracts liability of PT MNC Asuransi Indonesia consist of:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Premi yang belum merupakan pendapatan	93.126	88.577	115.131	<i>Unearned premiums</i>
Estimasi liabilitas klaim	186.918	160.076	162.212	<i>Estimated claim liabilities</i>
Cadangan premi	115.893	93.760	48.646	<i>Premium reserves</i>
Jumlah	<u>395.937</u>	<u>342.413</u>	<u>325.989</u>	<i>Total</i>

a) Premi yang belum merupakan pendapatan

a) *Unearned premiums*

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Rupiah				<i>Rupiah</i>
Harta benda	39.454	41.802	49.777	<i>Property</i>
Kendaraan bermotor	29.432	31.668	45.056	<i>Motor vehicles</i>
Rekayasa	12.157	9.250	9.694	<i>Engineering</i>
Tanggung gugat	3.154	472	472	<i>Liability</i>
Satelit	3.566	2.561	3.363	<i>Satellite</i>
Penerbangan	3.274	1.401	5.120	<i>Aviation</i>
Pengangkutan	131	271	789	<i>Transportation</i>
Aneka	1.958	1.152	860	<i>Miscellaneous</i>
Jumlah	<u>93.126</u>	<u>88.577</u>	<u>115.131</u>	<i>Total</i>

b) Estimasi liabilitas klaim

b) *Estimated claim liabilities*

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Rupiah				<i>Rupiah</i>
Harta benda	90.750	86.697	99.493	<i>Property</i>
Rekayasa	55.768	43.868	37.979	<i>Engineering</i>
Kendaraan bermotor	15.584	9.879	12.982	<i>Motor vehicle</i>
Pengangkutan	2.358	6.650	4.089	<i>Transportation</i>
Aneka	22.458	12.982	7.669	<i>Miscellaneous</i>
Jumlah	<u>186.918</u>	<u>160.076</u>	<u>162.212</u>	<i>Total</i>

23. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI DAN INVESTASI (lanjutan) 23. INSURANCE AND INVESTMENT CONTRACTS LIABILITY (continued)

c) Cadangan premi

c) Premium reserves

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Kendaraan bermotor	72.114	59.984	28.403	<i>Motor vehicle</i>
Rekayasa	38.205	30.768	15.470	<i>Engineering</i>
Harta benda	5.381	2.889	4.479	<i>Property</i>
Aneka	193	119	294	<i>Miscellaneous</i>
Jumlah	<u>115.893</u>	<u>93.760</u>	<u>48.646</u>	<i>Total</i>

Laporan perhitungan liabilitas kontrak asuransi untuk 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, aktuaris independen.

The report on calculation of insurance contracts liability as of December 31, 2021 and 2020 was carried out by Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, independent actuaries.

Liabilitas kontrak asuransi untuk PT MNC Life Assurance adalah sebagai berikut:

Insurance contracts liability of PT MNC Life Assurance consist of:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Estimasi liabilitas klaim	62.530	152.590	143.605	<i>Estimated claim liabilities</i>
Premi yang belum merupakan pendapatan	13.912	10.995	7.097	<i>Unearned premiums</i>
Jumlah	<u>76.442</u>	<u>163.585</u>	<u>150.702</u>	<i>Total</i>

a) Estimasi liabilitas klaim

a) *Estimated claim liabilities*

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Kematian	6.284	36.607	45.413	<i>Death</i>
Jatuh tempo	50.041	114.677	93.813	<i>Maturity</i>
Kesehatan	6.205	1.306	4.379	<i>Health</i>
Jumlah	<u>62.530</u>	<u>152.590</u>	<u>143.605</u>	<i>Total</i>

23. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI DAN INVESTASI
 (lanjutan)

23. INSURANCE AND INVESTMENT CONTRACTS
 LIABILITY (continued)

b) Premi yang belum merupakan pendapatan

b) Unearned premiums

	31 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Kematian	10.318	3.265	3.158	<i>Death</i>
Kesehatan	3.594	7.730	3.939	<i>Health</i>
Jumlah	<u>13.912</u>	<u>10.995</u>	<u>7.097</u>	<i>Total</i>

Liabilitas kontrak asuransi MNCL berdasarkan mata uang sebagai berikut:

Insurance contracts liability of MNCL by currency are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Rupiah	75.899	162.079	148.885	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	543	1.506	1.817	<i>United States Dollar</i>
Jumlah	<u>76.442</u>	<u>163.585</u>	<u>150.702</u>	<i>Total</i>

Laporan perhitungan liabilitas kontrak asuransi untuk 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Neneng Sumiati dan Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafriah.

The report on the calculation of insurance contracts liability as of December 31, 2021 and 2020 was carried out by Kantor Konsultan Aktuaria Neneng Sumiati and Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafriah.

Liabilitas kontrak investasi MNCL berisi produk asuransi Unit Link. Metode yang digunakan dalam perhitungan liabilitas kontrak investasi adalah Nilai Wajar Akumulasi Aset. Rincian liabilitas kontrak investasi pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 187.235 juta, Rp 67.365 juta dan Rp 57.917 juta.

Investment contracts liability of MNCL contain products of Unit Link. The method used in the calculation of investment contracts liability is Fair Value of Asset Accumulation. Investment contracts liability as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, amounting to Rp 187,235 million, Rp 67,365 million and Rp 57,917 million, respectively.

24. UTANG BANK DAN INSTITUSI KEUANGAN NON-BANK 24. LOANS FROM BANK AND NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Rupiah				Rupiah
Pihak ketiga				Third parties
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	240.534	205.267	108.703	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna	144.150	149.775	138.886	PT Bank Sahabat Sampoerna
PT Bank Victoria International Tbk	144.509	135.022	176.546	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	125.000	133.765	196.428	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	89.347	109.229	140.333	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	69.745	70.000	79.883	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Ganesha Tbk	60.087	40.827	9.928	PT Bank Ganesha Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	26.205	27.668	32.830	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	12.725	16.308	-	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank OK Indonesia	9.881	9.879	5.088	PT Bank OK Indonesia
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	7.855	9.298	11.656	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Bank Mayora	960	2.714	5.079	PT Bank Mayora
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	267	3.289	27.523	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	-	11.982	4.804	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Harda Internasional Tbk	-	682	4.177	PT Bank Harda Internasional Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	494	3.270	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	-	400	10.153	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	167	21.504	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Jumlah	<u>931.265</u>	<u>926.766</u>	<u>976.791</u>	Total
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun	767.425	772.696	754.000	Current portion
Bagian jangka panjang - bersih	<u>163.840</u>	<u>154.070</u>	<u>222.791</u>	Long-term loan - net
Jumlah	<u>931.265</u>	<u>926.766</u>	<u>976.791</u>	Total

Biaya perolehan diamortisasi atas utang adalah sebagai berikut:

The amortized cost of the loans are as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	931.265	926.766	976.791	Loans from bank and non-bank financial institutions
Bunga yang masih harus dibayar (Catatan 22)	<u>3.650</u>	<u>3.489</u>	<u>4.470</u>	Accrued interest (Note 22)
Jumlah	<u>934.915</u>	<u>1.911.516</u>	<u>981.261</u>	Total

24. UTANG BANK DAN INSTITUSI KEUANGAN NON-BANK (lanjutan)

PT Bank Capital Indonesia Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
76.000	-	8.765	68.928	25 Maret 2023/ March 25, 2023	15,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivables equivalent to 110%

MNCGUI memiliki fasilitas pinjaman yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Capital Indonesia Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
50.000	50.000	50.000	50.000	13 Februari 2023/ February 13, 2023	13,00%	Piutang sewa pembiayaan sebesar 105%/ Finance lease receivables equivalent to 105%
10.000	-	-	2.500	13 Februari 2021/ February 13, 2021	15,50%	Piutang sewa pembiayaan sebesar 110%/ Finance lease receivables equivalent to 110%
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>52.500</u>			

MNCS memiliki fasilitas pinjaman yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Capital Indonesia Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
75.000	75.000	75.000	75.000	7 Juli 2023/ July 7, 2023	9,50%	Jaminan Perusahaan dari Entitas/ Corporate Guarantee by Entity

PT Bank Victoria International Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Victoria International Tbk, yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
128.000	101.909	106.622	114.700	30 November 2027/ November 30, 2027	10,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables 100%
72.000	-	-	12.000	13 Oktober 2021/ October 13, 2021	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan hipotek perumahan, masing-masing sebesar 110% dan 100%/ Consumer financing receivables for vehicles and house mortgage of 110% and 100%, respectively
50.000	-	-	2.336	12 Oktober 2021/ October 12, 2021	12,00%	Piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan hipotek perumahan, masing-masing sebesar 110% dan 100%/ Consumer financing receivables for vehicles and house mortgage of 110% and 100%, respectively
100.000	-	-	558	21 Agustus 2021/ August 21, 2021	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan hipotek perumahan, masing-masing sebesar 110% dan 100%/ Consumer financing receivables for vehicles and house mortgage of 110% and 100%, respectively
	<u>101.909</u>	<u>106.622</u>	<u>129.594</u>			

24. LOANS FROM BANK AND NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS (continued)

PT Bank Capital Indonesia Tbk

MNCF has a loan facility which are used for working capital, obtained from PT Bank Capital Indonesia Tbk, as follows:

MNCGUI has a loan facility which is used for working capital, obtained from PT Bank Capital Indonesia Tbk, as follows:

MNCS has a loan facility which is used for working capital, obtained from PT Bank Capital Indonesia Tbk, as follows:

PT Bank Victoria International Tbk

MNCF has a loan facility for working capital, obtained from PT Bank Victoria International Tbk, as follows:

24. UTANG BANK DAN INSTITUSI KEUANGAN NON-BANK (lanjutan)

MNCGUI memiliki fasilitas pinjaman untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Victoria International Tbk, yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
50.000	42.600	28.400	44.174	08 Agustus 2022/ August 08, 2022	12,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable equivalent to 110%
50.000	-	-	2.778	08 Agustus 2021/ August 08, 2021	12,75%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable equivalent to 110%
	<u>42.600</u>	<u>28.400</u>	<u>46.952</u>			

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman yang digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan konsumen yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
200.000	89.347	109.229	138.493	22 Juli 2026/ July 22, 2026	10,25% - 11,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105% dan aset tetap/ Consumer financing receivables equivalent to 105% and fixed assets
500.000	-	-	1.840	29 Juni 2021/ June 29, 2021	10,00% - 13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105% dan aset tetap/ Consumer financing receivables equivalent to 105% and fixed assets
	<u>89.347</u>	<u>109.229</u>	<u>140.333</u>			

PT Bank Sahabat Sampoerna

MNCGUI memiliki fasilitas pinjaman untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Sahabat Sampoerna, yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
200.000	144.150	149.775	138.886	31 Juli 2023/ July 31, 2023	13,00%	Piutang sewa pembiayaan 120%/ Finance lease receivables 120%

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

MNCS memiliki fasilitas pinjaman modal kerja yang diperoleh dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
125.000	125.000	125.000	100.000	28 Mei 2023/ May 28, 2023	12,00%	Penempatan Deposito/ Placement of time deposit

24. LOANS FROM BANK AND NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS (continued)

MNCGUI has a loan facility for working capital, obtained from PT Bank Victoria International Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
50.000	42.600	28.400	44.174	08 Agustus 2022/ August 08, 2022	12,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable equivalent to 110%
50.000	-	-	2.778	08 Agustus 2021/ August 08, 2021	12,75%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable equivalent to 110%
	<u>42.600</u>	<u>28.400</u>	<u>46.952</u>			

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

MNCF has a loan facility which are used for working capital and consumer financing, obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
200.000	89.347	109.229	138.493	22 Juli 2026/ July 22, 2026	10,25% - 11,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105% dan aset tetap/ Consumer financing receivables equivalent to 105% and fixed assets
500.000	-	-	1.840	29 Juni 2021/ June 29, 2021	10,00% - 13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105% dan aset tetap/ Consumer financing receivables equivalent to 105% and fixed assets
	<u>89.347</u>	<u>109.229</u>	<u>140.333</u>			

PT Bank Sahabat Sampoerna

MNCGUI has a loan facility for working capital, obtained from PT Bank Sahabat Sampoerna, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
200.000	144.150	149.775	138.886	31 Juli 2023/ July 31, 2023	13,00%	Piutang sewa pembiayaan 120%/ Finance lease receivables 120%

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

MNCS has a loan facility for working capital, obtained from PT Bank JTrust Indonesia Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
125.000	125.000	125.000	100.000	28 Mei 2023/ May 28, 2023	12,00%	Penempatan Deposito/ Placement of time deposit

24. UTANG BANK DAN INSTITUSI KEUANGAN NON-BANK (lanjutan)

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
30.000	26.585	-	-	28 Januari 2028/ January 28, 2028
50.000	32.881	41.606	-	11 Mei 2027/ May 11, 2027
50.000	-	369	8.703	29 Juni 2022/ June 29, 2022
	<u>59.466</u>	<u>41.975</u>	<u>8.703</u>	

MNCGUI memiliki beberapa fasilitas pinjaman untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
30.000	27.091	-	-	24 Februari 2025/ February 24, 2025
50.000	28.977	38.292	-	23 Maret 2025/ March 23, 2025
	<u>56.068</u>	<u>38.292</u>	<u>-</u>	

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

MNCS memiliki fasilitas pinjaman untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
70.000	69.745	70.000	79.883	02 Februari 2023/ February 02, 2023

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
36.880	26.205	27.668	30.171	20 Desember 2031/ December 20, 2031
200.000	-	-	2.659	20 April 2022/ April 20, 2022
	<u>26.205</u>	<u>27.668</u>	<u>32.830</u>	

24. LOANS FROM BANK AND NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS (continued)

MNCF has several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank JTrust Indonesia Tbk, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
12,00%	Piutang pembiayaan otomotif dan rumah masing-masing sebesar 150% dan 100%/ Automotive and housing financing receivables equivalent to 150% and 100%, respectively
11,00%	Piutang pembiayaan rumah sebesar 100%/ Housing financing receivables equivalent to 100%
12,00%	Piutang pembiayaan otomotif dan rumah masing-masing sebesar 150% dan 100%/ Automotive and housing financing receivables equivalent to 150% and 100%, respectively

MNCGUI has several loan facilities for working capital, obtained from PT Bank JTrust Indonesia Tbk, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
12,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Customer financing receivables equivalent to 100%
12,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Customer financing receivables equivalent to 100%

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

MNCS has a loan facility which is used for working capital, obtained from PT Bank Mayapada Internasional Tbk, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
12,00%	Sebagian saham "KPIG" sebesar Rp50.000 juta dan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari Entitas dan perusahaan menurunkan fasilitas pinjaman menjadi Rp70.000 juta/ Part of "KPIG" shares amounted Rp50,000 million and corporate guarantee by Entity and the company decreased the loan plafon to Rp70,000 million

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

MNCF has several long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Collateral/ Jaminan
13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%
11,25% - 12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105%/ Consumer financing receivables equivalent to 105%

24. UTANG BANK DAN INSTITUSI KEUANGAN NON-BANK (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

MNCGUI memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
30.000	267	3.289	15.222	30 Agustus 2022/ August 30, 2022	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
50.000	-	-	10.373	21 November 2021/ November 21, 2021	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
38.000	-	-	1.928	22 Maret 2021/ March 22, 2021	12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105%/ Consumer financing receivable equivalent to 105%
	<u>267</u>	<u>3.289</u>	<u>27.523</u>			

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

MNCGUI memiliki fasilitas pinjaman untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Collateral/ Jaminan
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
35.000	-	167	13.324	20 Januari 2022/ January 20, 2022	12,75%	Piutang pembiayaan sebesar 100%/ Financing receivables equivalent to 100%
50.000	-	-	8.180	10 Juli 2021/ July 10, 2021	12,00%	Piutang pembiayaan sebesar 100%/ Financing receivables equivalent to 100%
	<u>-</u>	<u>21.671</u>	<u>21.504</u>			

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang diperoleh dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
35.000	4.638	5.099	6.109	20 April 2025/ April 20, 2025	11,00% - 11,88%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 120%/ Consumer financing receivables equivalent to 120%
100.000	2.381	3.145	4.087	20 Januari 2025/ January 20, 2025	9,00% - 9,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 120%/ Consumer financing receivables equivalent to 120%
50.000	836	1.054	1.460	15 Juli 2024/ July 15, 2024	10,85% - 11,10%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 120%/ Consumer financing receivables equivalent to 120%
	<u>7.855</u>	<u>9.298</u>	<u>11.656</u>			

24. LOANS FROM BANK AND NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

MNCGUI has several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, as follows:

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

MNCGUI has a loan facility for working capital, obtained from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, as follows:

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

MNCF has several long-term loan facility for Housing Loans (KPR), obtained from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), as follows:

24. UTANG BANK DAN INSTITUSI KEUANGAN NON-BANK (lanjutan)

PT Bank ICBC Indonesia

MNCF memiliki fasilitas pinjaman yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank ICBC Indonesia sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
100.000	-	400	10.153	28 Desember 2022/ December 28, 2022

PT Bank Ganesha Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Ganesha Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
5.000	4.817	-	-	22 September 2025/ September 22, 2025
15.000	1.873	3.673	6.935	20 Desember 2023/ December 20, 2023
10.000	7.710	7.154	2.993	15 Juli 2025/ July 15, 2025
	<u>14.400</u>	<u>10.827</u>	<u>9.928</u>	

MNGUI memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Ganesha Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
20.000	20.000	-	-	28 Juni 2025/ June 28, 2025
30.000	25.687	30.000	-	29 Desember 2024/ December 29, 2024
	<u>45.687</u>	<u>30.000</u>	<u>-</u>	

PT Bank Oke Indonesia Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman dan pinjaman rekening koran untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Oke Indonesia Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
10.000	9.881	9.879	2.036	15 April 2023/ April 15, 2023
20.000	-	-	3.052	11 Oktober 2021/ October 11, 2021
	<u>9.881</u>	<u>9.879</u>	<u>5.088</u>	

24. LOANS FROM BANK AND NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS (continued)

PT Bank ICBC Indonesia

MNCF has a loan facility which is used for working capital, obtained from PT Bank ICBC Indonesia, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
100.000	-	400	10.153	28 Desember 2022/ December 28, 2022	12,00%	Piutang pembiayaan otomotif sebesar 120% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 100 %/ Automotive financing receivables equivalent to 120% and housing financing receivables equivalent to 100%

PT Bank Ganesha Tbk

MNCF has several long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from PT Bank Ganesha Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
5.000	4.817	-	-	22 September 2025/ September 22, 2025	10,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%
15.000	1.873	3.673	6.935	20 Desember 2023/ December 20, 2023	12,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%
10.000	7.710	7.154	2.993	15 Juli 2025/ July 15, 2025	11,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivables equivalent to 110%
	<u>14.400</u>	<u>10.827</u>	<u>9.928</u>			

MNGUI has a long-term loan facility which are used for working capital, obtained from PT Bank Ganesha Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
20.000	20.000	-	-	28 Juni 2025/ June 28, 2025	10,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivables equivalent to 110%
30.000	25.687	30.000	-	29 Desember 2024/ December 29, 2024	11,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivables equivalent to 110%
	<u>45.687</u>	<u>30.000</u>	<u>-</u>			

PT Bank Oke Indonesia Tbk

MNCF has a loan facility for working capital and overdraft loan, obtained from PT Bank Oke Indonesia Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020			
10.000	9.881	9.879	2.036	15 April 2023/ April 15, 2023	10,00%	Aset tetap/ Fixed assets
20.000	-	-	3.052	11 Oktober 2021/ October 11, 2021	12,00% - 12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100% and housing financing receivables equivalent to 100%
	<u>9.881</u>	<u>9.879</u>	<u>5.088</u>			

24. UTANG BANK DAN INSTITUSI KEUANGAN NON-BANK (lanjutan)

PT Bank Mayora

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Mayora sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
20.000	960	2.714	5.079	29 November 2023/ November 29, 2023

PT Bank Central Asia Tbk

MNCGUI memiliki fasilitas pinjaman rekening koran yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
12.000	-	11.982	4.804	30 Oktober 2022/ October 30, 2022

PT Bank Harda Internasional Tbk

MNCGUI memiliki fasilitas pinjaman untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Harda Internasional Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
10.000	-	682	4.177	11 April 2022/ April 11, 2022

Pada tanggal 31 Maret 2022, fasilitas pinjaman ini seluruhnya sudah dilunasi.

PT Bank KEB Hana Indonesia

MNCF memiliki fasilitas pinjaman yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
50.000	-	494	3.270	21 Februari 2022/ February 21, 2022

24. LOANS FROM BANK AND NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS (continued)

PT Bank Mayora

MNCF has a long-term loan facility for working capital, obtained from PT Bank Mayora, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Collateral/ Jaminan
11,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivables equivalent to 110%

PT Bank Central Asia Tbk

MNCGUI has a overdraft loan obtained from PT Bank Central Asia Tbk, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Collateral/ Jaminan
0,7% dari suku bunga deposito/ 0,7% from interest rate of time deposits	Penempatan Deposito/ Placement of time deposit

PT Bank Harda Internasional Tbk

MNCGUI has a loan facility for working capital, obtained from PT Bank Harda Internasional Tbk, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Collateral/ Jaminan
13,50%	Piutang pembiayaan kosumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%

On March 31, 2022, this loan facility has fully paid.

PT Bank KEB Hana Indonesia

MNCF has a loan facility which are used for working capital, obtained from PT Bank KEB Hana Indonesia, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
12,00%	Piutang pembiayaan otomotif sebesar 110% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 100%/ Automotive financing receivables equivalent to 110% and housing financing receivables equivalent to 100%

24. UTANG BANK DAN INSTITUSI KEUANGAN NON-BANK (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

MNCGUI memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan			Tanggal jatuh tempo/ Due date
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
100.000	12.725	16.308	-	16 April, 2024/ April 16, 2024

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank JTrust Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Bank Ganesha Tbk, PT Bank Harda Internasional Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Entitas anak wajib memelihara rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10:1.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima dari PT Bank Sahabat Sampoerna, PT Bank OK Indonesia, PT Bank Mayora, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia dan PT Bank Victoria International Tbk, Entitas anak wajib memelihara rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 8:1.

Selain rasio keuangan di atas, Entitas Anak wajib:

- menyampaikan laporan keuangan (setiap bulan, triwulan dan/atau semester).
- menginformasikan kepada Kreditor apabila terdapat perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham.
- menginformasikan kepada Kreditor setiap perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditor.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Entitas anak telah memenuhi persyaratan di atas.

24. LOANS FROM BANK AND NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

MNCGUI has a long-term loan facility for working capital, obtained from PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
12,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 120%/ Consumer financing receivable, equivalent to 120%

According to the loan facility from PT Bank Capital Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank JTrust Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Bank Ganesha Tbk, PT Bank Harda Internasional Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, the Subsidiary is required to maintain a debt to equity ratio of less than 10:1.

According to the loan facility from PT Bank Sahabat Sampoerna, PT Bank OK Indonesia, PT Bank Mayora, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia dan PT Bank Victoria International Tbk, the Subsidiary is required to maintain a debt to equity ratio of less than 8:1.

In addition to the above financial ratios, the Subsidiary is required to:

- submit financial reports (every month, quarterly and/or semester).
- inform Creditors if there is a change in the composition of the Management and Shareholders.
- inform Creditors of any changes that may affect the ability to fulfill its obligations to Creditors.

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Subsidiary has complied with the requirements above.

24. UTANG BANK DAN INSTITUSI KEUANGAN NON-BANK (lanjutan) **24. LOANS FROM BANK AND NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS (continued)**

Berikut adalah pembayaran utang bank dan institusi keuangan non-bank, pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

The following are the payments for Bank loan and Non-bank financial institution, as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>Desember 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>Desember 31,</i> 2020	
Rupiah				Rupiah
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	399.975	602.751	576.119	PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	159.000	214.063	158.792	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	77.525	226.553	191.665	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54.936	121.180	150.504	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	31.614	127.536	165.901	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Jabar Banten Tbk	19.420	47.169	43.729	PT Bank Jabar Banten Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	11.982	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Ganesha Tbk	5.486	6.949	16.402	PT Bank Ganesha Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.215	5.255	26.457	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	507	2.846	7.992	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	410	10.000	10.000	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	167	21.337	28.599	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	16.756	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	-	-	11.114	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 10 milyar)	27.459	74.973	207.652	Others (each below Rp 10 billion)
Jumlah	<u>789.696</u>	<u>1.460.612</u>	<u>1.611.682</u>	Total

25. UTANG AL-MUSYARAKAH

25. AL-MUSYARAKAH LOAN

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>Desember 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>Desember 31,</i> 2020	
Rupiah				Rupiah
Pihak ketiga				Third parties
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	193.723	176.770	181.491	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank BCA Syariah Tbk	643	1.805	11.330	PT Bank BCA Syariah Tbk
PT Bank BRISyariah Tbk	210	678	1.542	PT Bank BRISyariah Tbk
PT Bank BNI Syariah Tbk	-	-	528	PT Bank BNI Syariah Tbk
Jumlah	194.576	179.253	194.891	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	<u>(194.446)</u>	<u>(179.130)</u>	<u>(191.915)</u>	Less current portion
Bagian jangka panjang	<u>130</u>	<u>123</u>	<u>2.976</u>	Long-term portion

25. UTANG AL-MUSYARAKAH (lanjutan)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
200.000	193.723	176.770	181.491

PT Bank BCA Syariah Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank BCA Syariah Tbk yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
20.000	643	1.805	5.365
60.000	-	-	5.965
	643	1.805	11.330

PT Bank BRISyariah Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank BRISyariah Tbk yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
80.000	210	678	1.542

PT Bank BNI Syariah Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank BNI Syariah Tbk yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		
	30 Juni 2022/ June 30, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
100.000	-	-	528

25. AL-MUSYARAKAH LOAN (continued)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

MNCF has a loan facility obtained from PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, as follows:

Tanggal jatuh tempo/ Due date	Nisbah/ Profit sharing	Jaminan/ Collateral
06 Juni 2023/ June 06, 2023	11,75%	Piutang pembiayaan Al - Musyarakah atas Motor dan Mobil, serta Alat Berat masing-masing sebesar 110% & 120%/ Al - Musyarakah financing receivable on Motorcycle and Car, also Heavy Equipment equivalent to 110% & 120%

PT Bank BCA Syariah Tbk

MNCF has long-term loan facility obtained from PT Bank BCA Syariah Tbk, as follows:

Tanggal jatuh tempo/ Due date	Nisbah/ Profit sharing	Collateral/ Jaminan
23 Mei 2024/ May 23, 2024	12,50%	Piutang pembiayaan Al-Musyarakah sebesar 111,11%/ Al-Musyarakah financing receivables equivalent to 111,11%
20 April 2022/ April 20, 2022	11,50% - 14,50%	Piutang pembiayaan Al-Musyarakah sebesar 105%/ Al-Musyarakah financing receivables equivalent to 105%

PT Bank BRISyariah Tbk

MNCF has a long-term loan facility obtained from PT Bank BRISyariah Tbk, as follows:

Tanggal jatuh tempo/ Due date	Nisbah/ Profit sharing	Jaminan/ Collateral
05 Juli 2023/ July 05, 2023	12,00%	Fidusia piutang Al-Musyarakah sebesar minimal 105%/ Fiduciary customer Al-Musyarakah at least 105%

PT Bank BNI Syariah Tbk

MNCF has a long-term loan facility obtained from PT Bank BNI Syariah Tbk, as follows:

Tanggal jatuh tempo/ Due date	Nisbah/ Profit sharing	Jaminan/ Collateral
17 Juli 2021/ July 17, 2021	11,00%	Piutang pembiayaan Al-Musyarakah sebesar 105%/ Al-Musyarakah financing receivables equivalent to 105%

26. UTANG AL-MUDHARABAH

26. AL-MUDHARABAH LOAN

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Rupiah				Rupiah
Pihak ketiga				Third parties
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	2.806	3.065	548	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Kalimantan Selatan Syariah	4.879	-	-	PT Bank Kalimantan Selatan Syariah
PT Bank Jateng Syariah	-	-	452	PT Bank Jateng Syariah
Jumlah	7.685	3.065	1.000	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	(2.393)	(812)	(812)	Less current portion
Bagian jangka panjang	5.292	2.253	188	Long-term portion

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

MNCGUI memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, yaitu:

MNCGUI has a long-term loan facility obtained from PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ <i>Facility amount</i>	Saldo terutang/ <i>Outstanding loan</i>			Tanggal jatuh tempo/ <i>Due date</i>	Nisbah/ <i>Profit sharing</i>	Jaminan/ <i>Collateral</i>
	30 Juni 2022/ <i>June 30, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>			
75.000	2.806	3.065	548	5 Januari 2027/ <i>January 5, 2027</i>	12,00%	Piutang pembiayaan Al-Murabahah sebesar 100%/ <i>Al-Murabahah financing receivable, equivalent to 100%</i>

PT Bank Kalimantan Selatan Syariah

PT Bank Kalimantan Selatan Syariah

MNCGUI memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Kalimantan Selatan Syariah, yaitu:

MNCGUI has a long-term loan facility obtained from PT Bank Kalimantan Selatan Syariah, as follows:

Jumlah fasilitas/ <i>Facility amount</i>	Saldo terutang/ <i>Outstanding loan</i>			Tanggal jatuh tempo/ <i>Due date</i>	Nisbah/ <i>Profit sharing</i>	Jaminan/ <i>Collateral</i>
	30 Juni 2022/ <i>June 30, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>			
15.000	4.879	-	-	27 April 2027/ <i>April 27, 2027</i>	11,85%	Piutang pembiayaan Al-Murabahah sebesar 100%/ <i>Al-Murabahah financing receivable, equivalent to 100%</i>

PT Bank Jateng Syariah

PT Bank Jateng Syariah

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Jateng Syariah yaitu:

MNCF has a long-term loan facility obtained from PT Bank Jateng Syariah, as follows:

Jumlah fasilitas/ <i>Facility amount</i>	Saldo terutang/ <i>Outstanding loan</i>			Tanggal jatuh tempo/ <i>Due date</i>	Nisbah/ <i>Profit sharing</i>	Jaminan/ <i>Collateral</i>
	30 Juni 2022/ <i>June 30, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>			
40.000	-	-	452	07 April 2021/ <i>April 07, 2021</i>	11,50%	Piutang pembiayaan Al-Murabahah sebesar 105%/ <i>Al-Murabahah financing receivable, equivalent to 105%</i>

27. UTANG OBLIGASI – BERSIH

27. BONDS PAYABLE – NET

Akun ini terdiri dari:

This account consist of:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
<u>Utang Obligasi</u>				<u>Bonds Payable</u>
Obligasi Berkelanjutan II				<i>Sustainable Bonds II</i>
MNC Kapital Indonesia	300.000	300.000	300.000	<i>MNC Kapital Indonesia</i>
Dikurangi biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(581)	(845)	(1.327)	<i>Less unamortized cost of bond issuance</i>
Sub jumlah	299.419	299.155	298.673	<i>Sub total</i>
Dikurangi bagian jangka pendek	(299.419)	-	-	<i>Less Current Portion</i>
Bagian jangka panjang	-	299.155	298.673	<i>Long term portion</i>

Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia

Sustainable Bonds II MNC Kapital Indonesia

Pada tanggal 8 Juni 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya NO. S-70/D.04/2018 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 500.000 juta, dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,5% per tahun. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perusahaan menerbitkan Obligasi berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia tahap I Tahun 2018 yang berjangka waktu 5 tahun, dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, pihak ketiga, sebagai agen penjamin dan agen pemantau. Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Juli 2018, dengan pokok obligasi sebesar Rp 300.000 juta, yang dananya diterima pada tanggal 3 Juli 2018.

On June 8, 2018, the Company obtained the effective notice from the Financial Services Authority (OJK) in his letter No. S-70/D.04/2018 for the Public Offering of Sustainable Bonds II MNC Kapital Indonesia with fund-raising target of Rp 500,000 million, with fixed rate of 12.5% per annum. In connection with the Public Offering of Sustainable Bonds, the Company issued Sustainable Bonds II MNC Kapital Indonesia Phase I Year 2018 for 5 years term, with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, third party, as guarantor agent and monitoring agent. The bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on July 2, 2018 with nominal amount of Rp 300,000 million, the funds was received on July 3, 2018.

Pembayaran bunga Obligasi dilakukan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2018.

Interest was paid in three months term, with First payment of interest was due on October 2, 2018.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, Obligasi Berkelanjutan II mempunyai rating id.BBB+ (Triple B plus).

Based on the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, Sustainable Bonds II rating is id.BBB+ (Triple B plus).

Entitas memelihara beberapa persyaratan, antara lain, (1) memelihara rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 2:1, (2) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman minimal 1:1 dan (3) menjaga saham Entitas dikendalikan atau Entitas dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% oleh PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk) selama jangka waktu obligasi.

The Entity maintains certain requirements, among others, (1) maintain a debt to equity ratio of less than 2:1, (2) maintain a ratio between EBITDA with loan interest expense at a minimum of 1:1 and (3) maintain control of the Entity or the ownership of the Entity, directly or indirectly, of more than 50% by PT MNC Asia Holding Tbk (formerly PT MNC Investama Tbk) during the term of the bonds.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Entitas telah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas.

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Entity has complied with the requirements above.

28. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGUI), Entitas anak, memperoleh pinjaman untuk membeli kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020
<u>Pihak Ketiga</u>			
PT Toyota Astra Finance	10.424	12.470	6.250
PT Maybank Indonesia Finance	476	1.019	2.014
PT Mandiri Tunas Finance	75	216	1.259
Jumlah	<u>10.975</u>	<u>13.705</u>	<u>9.523</u>

PT Toyota Astra Finance

Fasilitas pinjaman yang dimiliki MNCGUI berjangka waktu 36 bulan, dengan beragam pencairan sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan 13 Agustus 2021. Pada 30 Juni 2022, fasilitas ini mempunyai beragam tanggal pelunasan dengan tanggal pelunasan yang paling lama pada 12 Oktober 2025. Utang ini dijamin dengan kendaraan bermotor yang dibeli dimana tingkat bunga yang dibebankan adalah 9,50%-10,90% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 10.424 juta, Rp 12.470 juta dan Rp 6.250 juta.

PT Maybank Indonesia Finance

Pada tanggal 5 Desember 2019, MNCGUI memperoleh fasilitas pinjaman dengan plafon sebesar Rp 3.000 juta dengan jangka waktu 36 bulan sejak tanggal penarikan dan tingkat bunga 11,53% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 saldo pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 476 juta, Rp 1.019 juta dan Rp 2.014 juta.

PT Mandiri Tunas Finance

Fasilitas pinjaman yang dimiliki MNCGUI berjangka waktu 36 bulan, dengan beragam tanggal pencairan sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2020. Pada 30 Juni 2022, fasilitas ini mempunyai beragam tanggal pelunasan dengan tanggal pelunasan yang paling lama pada 3 Juni 2023. Utang ini dijamin dengan kendaraan motor yang dibeli, dimana tingkat bunga yang dibebankan adalah 10,00%-12,00% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 75 juta, Rp 216 juta dan Rp 1.259 juta.

28. OBLIGATIONS UNDER FINANCE LEASE

PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGUI), a subsidiary, obtained loans to finance their acquisitions of vehicles, with details as follows:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
				<i>Third Parties</i>
				<i>PT Toyota Astra Finance</i>
				<i>PT Maybank Indonesia Finance</i>
				<i>PT Mandiri Tunas Finance</i>
Jumlah	<u>10.975</u>	<u>13.705</u>	<u>9.523</u>	<i>Total</i>

PT Toyota Astra Finance

The credit facility of MNCGUI has a term of 36 months, with various disbursement dates from February 12, 2016 to August 13, 2021. As of June 30, 2022 this facility has various repayment dates with the longest repayment dates on October 12, 2025. This facility is secured by the financed vehicles with interest at 9.50%-10.90% per annum. As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the outstanding loan balance of this facility amounted to Rp 10,424 million, Rp 12,470 million and Rp 6,250 million, respectively.

PT Maybank Indonesia Finance

On December 5, 2019, MNCGUI obtained credit facility with maximum limit amounting to Rp 3,000 million with a period of 36 months since withdrawal date and interest rate of 11.53% per annum. As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the outstanding loan balance of this facility amounted to Rp 476 million, Rp 1,019 million and Rp 2,014 million, respectively.

PT Mandiri Tunas Finance

The credit facility of MNCGUI has a term of 36 months with various disbursement dates from July 26, 2018 to June 30, 2020. As of June 30, 2022, this facility has various repayment dates with the longest repayment dates on June 3, 2023. This facility is secured by the financed vehicles, with interest at 10.00%-12.00% per annum. As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the outstanding loan balance of these facilities amounted to Rp 75 million, Rp 216 million and Rp 1,259 million, respectively.

28. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa yang akan datang pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	
Sampai dengan 1 tahun	4.985	6.241	4.379	<i>Within 1 year</i>
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	7.563	9.651	6.141	<i>More than 1 year and less than 5 years</i>
Jumlah	12.548	15.892	10.520	<i>Total</i>
Bunga yang belum jatuh tempo	(1.573)	(2.187)	(997)	<i>Interest that is not yet due</i>
Utang sewa pembiayaan	10.975	13.705	9.523	<i>Obligations under finance lease</i>
Bagian jatuh tempo dalam 1 tahun	(4.225)	(5.149)	(4.066)	<i>Current portion</i>
Bagian jangka panjang	6.750	8.556	5.457	<i>Long term portion</i>

28. OBLIGATIONS UNDER FINANCE LEASE (continued)

Future minimum lease payments as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 are as follows:

29. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

a. Program Iuran Pasti

BMNCI menyelenggarakan program iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh DPLK Manulife Indonesia. Iuran ini berasal dari 2,00% gaji pokok yang dibayarkan karyawan dan 3,50% sampai 10,00% dibayarkan oleh BMNCI per bulan.

b. Imbalan Pasca Kerja - Imbalan Pasti

Kelompok Usaha memberikan imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasti pasca-kerja masing-masing 2.207, 2.146 dan 2.049 karyawan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit).

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

29. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

a. Defined Contribution Plan

BMNCI provides defined contribution plan for all of their permanent employees, which is managed by DPLK Manulife Indonesia. Contribution to the pension plan consists of a payment of 2.00% of basic salary paid by the employee and 3.50% up to 10.00% contributed by BMNCI per month.

b. Defined Employment Benefits

The Group provides defined post-employment benefits to its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan. The number of employees entitled to post employment benefits are 2,207, 2,146 and 2,049 employees as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 (unaudited).

The defined benefit pension plan typically exposes the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Interest rate risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

29. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

29. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

c. Other Long-term Employee Benefits

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Movements in the present values of employee benefits obligation as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	30 Juni /June 30,			
	Imbalan pasca-kerja/ Post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long term benefits	Jumlah/ Total	
Diakui pada laba rugi				Recognized in profit or loss
Biaya jasa kini	4.997	130	5.127	Current service cost
Beban bunga neto	2.242	25	2.267	Net interest expenses
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	7.239	155	7.394	Component of defined benefit cost recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto				Remeasurement on the net defined benefit liability
Keuntungan atas penyesuaian pengalaman	(3.103)	4	(3.099)	Gains arising from experience adjustment
Keuntungan atas perubahan asumsi keuangan	(2.909)	(22)	(2.931)	gains arising from changes in financial assumptions
Jumlah	1.227	137	1.364	Total
	31 Desember /December 31,			
	Imbalan pasca-kerja/ Post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long term benefits	Jumlah/ Total	
Diakui pada laba rugi				Recognized in profit or loss
Biaya jasa kini	10.123	257	10.380	Current service cost
Beban bunga neto	3.270	34	3.304	Net interest expenses
Penyesuaian	414	-	414	Adjustment
Biaya jasa lalu	(26.474)	(2.327)	(28.801)	Past service cost
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	(12.667)	(2.036)	(14.703)	Component of defined benefit cost recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto				Remeasurement on the net defined benefit liability
Keuntungan atas penyesuaian pengalaman	(1.304)	(16)	(1.320)	Gains arising from experience adjustment
Keuntungan atas perubahan asumsi keuangan	(1.663)	(14)	(1.677)	gains arising from changes in financial assumptions
Jumlah	(15.634)	(2.066)	(17.700)	Total

29. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) 29. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

	31 Desember /December 31,			
	2020			
	Imbalan pasca-kerja/ Post- employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long term benefits	Jumlah/ Total	
Diakui pada laba rugi				Recognized in profit or loss
Biaya jasa kini	13.638	1.177	14.815	Current service cost
Keuntungan aktuarial - bersih	-	(291)	(291)	Actuarial gain - net
Beban bunga neto	4.872	181	5.053	Net interest expenses
Penyesuaian	224	-	224	Adjustment
Biaya jasa lalu	(6.063)	(130)	(6.193)	Past service cost
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	12.671	937	13.608	Component of defined benefit cost recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto				Remeasurement on the net defined benefit liability
Keuntungan atas penyesuaian pengalaman	(4.519)	-	(4.519)	Gains arising from experience adjustment
Keuntungan aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas demografik	101	-	101	Actuarial gains arising from demographic adjustments
Keuntungan atas perubahan asumsi keuangan	1.859	-	1.859	gains arising from changes in financial assumptions
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(2.559)	-	(2.559)	Component of defined benefit cost recognized in other comprehensive income
Jumlah	10.112	937	11.049	Total

Jumlah tercatat di laporan posisi keuangan konsolidasian yang timbul dari liabilitas terkait dengan imbalan kerja selain pensiun iuran pasti adalah sebagai berikut:

The amounts included in the consolidated statement of financial position arising from the obligation in respect of the employee benefits other than defined contributions are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Imbalan pasca-kerja	57.163	56.269	74.240	Post-employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	866	729	2.795	Other long-term benefits
Jumlah	58.029	56.998	77.035	Total

29. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) 29. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Movements in the present values of employee benefits obligation as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 is follows:

	30 Juni /June 30,			
	Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long term benefits	Jumlah/ Total	
Kewajiban imbalan pasti - awal	56.269	729	56.998	Opening defined benefit obligation
Biaya jasa kini	4.997	130	5.127	Current service cost
Biaya bunga	2.242	25	2.267	Interest cost
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(2.909)	(22)	(2.931)	Actuarial gain and losses arising from changes in financial assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(3.103)	4	(3.099)	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Pembayaran manfaat	(333)	-	(333)	Benefits paid
Kewajiban imbalan pasti - akhir	57.163	866	58.029	Closing defined benefit obligation

	31 Desember /December 31,			
	Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long term benefits	Jumlah/ Total	
Kewajiban imbalan pasti - awal	74.240	2.795	77.035	Opening defined benefit obligation
Biaya jasa kini	10.123	257	10.380	Current service cost
Biaya bunga	3.270	34	3.304	Interest cost
Pengukuran kembali (keuntungan)/kerugian: Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(1.663)	(14)	(1.677)	Remeasurement (gains)/losses: Actuarial gain and losses arising from changes in financial assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(1.304)	(16)	(1.320)	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Biaya jasa lalu, termasuk keuntungan dari kurtailmen	(26.474)	(2.327)	(28.801)	Past service cost, including gains on curtailments
Pembayaran manfaat	(2.337)	-	(2.337)	Benefits paid
Penyesuaian	414	-	414	Adjustment
Kewajiban imbalan pasti - akhir	56.269	729	56.998	Closing defined benefit obligation

29. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) 29. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

	31 Desember /December 31,			
	Imbalan pasca-kerja/ Post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long term benefits	Jumlah/ Total	
Kewajiban imbalan pasti - awal	68.372	3.540	71.912	Opening defined benefit obligation
Saldo dari akuisisi entitas anak	473	-	473	Balances from acquisition of subsidiaries
Biaya jasa kini	13.638	1.177	14.815	Current service cost
Biaya bunga	4.872	181	5.053	Interest cost
Keuntungan (kerugian) aktuarial bersih	-	(291)	(291)	Actuarial gain (losses) - net
Pengukuran kembali (keuntungan)/kerugian:				Remeasurement (gains)/losses:
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	101	-	101	Actuarial gains and losses arising from changes in demographic assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	1.859	-	1.859	Actuarial gain and losses arising from changes in financial assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(4.519)	-	(4.519)	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Biaya jasa lalu, termasuk keuntungan dari kurtailmen	(6.063)	(130)	(6.193)	Past service cost, including gains on curtailments
Pembayaran manfaat	(4.717)	(1.682)	(6.399)	Benefits paid
Penyesuaian	224	-	224	Adjustment
Kewajiban imbalan pasti - akhir	74.240	2.795	77.035	Closing defined benefit obligation

Perhitungan imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung oleh aktuaris independen, Padma Radya Aktuarial dan Steven & Mourist. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The cost of providing post-employment and other long-term employee benefits as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 is calculated by an independent actuaries, Padma Radya Aktuarial and Steven & Mourist. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

Tingkat diskonto per tahun	7,65% - 7,75%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	100%TMI IV	Mortality rate

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 100 basis poin, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp53.487 juta (meningkat sebesar Rp61.287 juta).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar Rp62.124 juta (turun sebesar Rp51.227 juta).
- If the discount rate increases (decrease) by 100 basis point, post-employment benefit obligation will decrease by Rp53,487 million (increase by Rp61,287 million).
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the post-employment benefit obligation would increase by Rp62,124 million (decrease by Rp51,227 million).

29. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 10 sampai 20 tahun.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

29. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the post-employment benefits obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the post-employment benefits obligation liability recognized in the consolidated statement of financial position.

The weighted average duration of the defined benefits obligation is 10 to 20 years.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

30. LIABILITAS LAIN-LAIN

30. OTHER LIABILITIES

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Liabilitas surat berharga repo	69.619	69.619	87.119	Securities repo payables
Liabilitas lainnya	1.215.498	1.190.295	917.414	Other liabilities
Jumlah	<u>1.285.117</u>	<u>1.259.914</u>	<u>1.004.533</u>	Total

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Kelompok Usaha melakukan perjanjian membeli kembali efek dengan rincian sebagai berikut:

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Group entered into security repurchase agreements with details as follows:

30 Juni/June 30, 2022			
Tanggal mulai/Starting date	Nilai pokok/Principal amount	Bunga/Interest	Tanggal jatuh tempo/Due date
7 Juni/June 7, 2022	40.000	17,50%	7 September/September 7, 2022
17 Mei/May 17, 2022	20.160	16,00%	15 Agustus/August 15, 2022
7 Juni/June 7, 2022	9.459	16,00%	7 September/September 7, 2022
Jumlah	<u>69.619</u>		Total

31 Desember/December 31, 2021			
Tanggal mulai/Starting date	Nilai pokok/Principal amount	Bunga/Interest	Tanggal jatuh tempo/Due date
11 November/November 11, 2021	40.000	17,50%	6 Maret/March 6, 2022
6 Januari/January 6, 2021	20.160	16,00%	15 Februari/February 15, 2022
11 Februari/February 11, 2021	9.459	16,00%	6 Maret/March 6, 2022
Jumlah	<u>69.619</u>		Total

30. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

30. OTHER LIABILITIES (continued)

31 December/December 31, 2020			
Tanggal mulai/Starting date	Nilai pokok/Principal amount	Bunga/Interest	Tanggal jatuh tempo/Due date
11 Agustus/August 11, 2020	40.000	17,50%	11 November/November 11, 2021
10 Juli/July 10, 2020	20.160	16,00%	6 Januari/January 6, 2021
20 Mei/May 20, 2020	17.500	17,00%	24 Mei/May 24, 2021
24 September/September 24, 2020	9.459	16,00%	11 Februari/February 11, 2021
Jumlah	<u>87.119</u>		Total

31. MODAL SAHAM

31. CAPITAL STOCK

Akun ini terdiri dari:

This account consist of:

30 Juni/June 30, 2022				
Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Stock Rp Juta/ Rp Million	Name of Stockholder
PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	21.228.044.760	50,31%	2.122.804	PT MNC Asia Holding Tbk (formerly PT MNC Investama Tbk)
Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	9,24%	390.000	Jalan Pantai Limited
HT Investment Development Ltd	3.708.705.000	8,79%	370.871	HT Investment Development Ltd
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd	3.323.195.800	7,88%	332.320	UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd
Jessica Herliani Tanoesoedibjo (Direktur)	50.727.500	0,12%	5.073	Jessica Herliani Tanoesoedibjo (Director)
Darma Putra (Komisaris Utama)	27.013.700	0,06%	2.701	Darma Putra (President Commissioner)
Tien (Komisaris)	24.309.100	0,06%	2.431	Tien (Commissioner)
Natalia Purnama (Direktur)	12.865.600	0,03%	1.286	Natalia Purnama (Director)
Wito Mailoa (Direktur Utama)	8.000.000	0,02%	800	Wito Mailoa (President Director)
Ageng Purwanto (Direktur)	2.131.400	0,01%	213	Ageng Purwanto (Director)
Peter Fajar (Direktur)	3.936.100	0,01%	394	Peter Fajar (Director)
Masyarakat lainnya (kepemilikan masing-masing kurang dari 5%)	<u>9.904.464.367</u>	<u>23,47%</u>	<u>990.446</u>	Public (less than 5% each)
Jumlah	42.193.393.327	100,00%	4.219.339	Total
Saham diperoleh kembali	<u>425.457.600</u>		<u>42.546</u>	Treasury stocks
Jumlah	<u>42.618.850.927</u>		<u>4.261.885</u>	Total

31. MODAL SAHAM (lanjutan)

31. CAPITAL STOCK (continued)

Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2021			Name of Stockholder
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Stock Rp Juta/ Rp Million	
PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	21.228.044.760	50,40%	2.122.804	PT MNC Asia Holding Tbk (formerly PT MNC Investama Tbk)
Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	9,26%	390.000	Jalan Pantai Limited
HT Investment Development Ltd	3.708.705.000	8,81%	370.870	HT Investment Development Ltd
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd	3.450.695.800	8,19%	345.070	UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd
Darma Putra (Komisaris Utama)	32.013.700	0,08%	3.201	Darma Putra (President Commissioner)
Tien (Komisaris)	22.309.100	0,05%	2.231	Tien (Commissioner)
Wito Mailoa (Direktur Utama)	6.000.000	0,01%	600	Wito Mailoa (President Director)
Jessica Herliani Tanoesoedibjo (Direktur)	28.727.500	0,07%	2.873	Jessica Herliani Tanoesoedibjo (Director)
Natalia Purnama (Direktur)	12.865.600	0,03%	1.287	Natalia Purnama (Director)
Peter Fajar (Direktur)	4.807.600	0,01%	481	Peter Fajar (Director)
Ageng Purwanto (Direktur)	4.208.900	0,01%	421	Ageng Purwanto (Director)
Darma Widjaja Nubary (Direktur)	1.803.600	0,00%	180	Darma Widjaja Nubary (Director)
Samuel Mulyono (Direktur)	449.800	0,00%	45	Samuel Mulyono (Director)
Masyarakat lainnya (kepemilikan masing-masing kurang dari 5%)	9.719.627.967	23,08%	971.963	Public (less than 5% each)
Jumlah	42.120.259.327	100,01%	4.212.026	Total
Saham diperoleh kembali	498.591.600		49.859	Treasury stocks
Jumlah	42.618.850.927		4.261.885	Total

Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2020			Name of Stockholder
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Stock Rp Juta/ Rp Million	
PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	21.228.044.760	54,07%	2.122.804	PT MNC Asia Holding Tbk (formerly PT MNC Investama Tbk)
Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	9,93%	390.000	Jalan Pantai Limited
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd	3.541.300.000	9,02%	354.130	UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd
HT Investment Development Ltd	3.378.500.000	8,60%	337.850	HT Investment Development Ltd
Darma Putra (Komisaris Utama)	28.410.700	0,07%	2.841	Darma Putra (President Commissioner)
Tien (Komisaris)	20.047.900	0,05%	2.005	Tien (Commissioner)
Wito Mailoa (Direktur Utama)	19.339.500	0,05%	1.934	Wito Mailoa (President Director)
Jessica Herliani Tanoesoedibjo (Direktur)	26.794.900	0,07%	2.679	Jessica Herliani Tanoesoedibjo (Director)
Natalia Purnama (Direktur)	12.816.400	0,03%	1.282	Natalia Purnama (Director)
Ageng Purwanto (Direktur)	8.015.500	0,02%	802	Ageng Purwanto (Director)
Samuel Mulyono (Direktur)	449.800	0,00%	45	Samuel Mulyono (Director)
Darma Widjaja Nubary (Direktur)	259.400	0,00%	26	Darma Widjaja Nubary (Director)
Masyarakat lainnya (kepemilikan masing-masing kurang dari 5%)	7.098.281.467	18,09%	709.828	Public (less than 5% each)
Jumlah	39.262.260.327	100,00%	3.926.226	Total
Saham diperoleh kembali	498.591.600		49.859	Treasury stocks
Jumlah	39.760.851.927		3.976.085	Total

31. MODAL SAHAM (lanjutan)

31. CAPITAL STOCK (continued)

Perubahan jumlah saham beredar adalah sebagai berikut:

The changes in the number of stock are as follows:

	Jumlah Saham/ Number of shares	
Saldo per 1 Januari 2020	38.906.368.927	Balance as of January 1, 2020
Penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD)	<u>854.483.000</u>	Issuance of shares without preemptive rights (non-HMETD)
Saldo per 31 Desember 2020	39.760.851.927	Balance as of December 31, 2020
Penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD)	<u>2.857.999.000</u>	Issuance of shares without preemptive rights (non-HMETD)
Saldo per 31 Desember 2021	<u>42.618.850.927</u>	Balance as of December 31, 2021
Saldo per 30 Juni 2022	<u><u>42.618.850.927</u></u>	Balance as of June 30, 2022

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Akun ini terdiri dari:

This account consist of:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Saldo awal	1.312.867	1.184.910	1.150.730	Beginning balance
Penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD)	-	100.030	34.180	Issuance of shares without preemptive rights (non-HMETD)
Lain-lain	-	27.927	-	Others
Saldo akhir	<u><u>1.312.867</u></u>	<u><u>1.312.867</u></u>	<u><u>1.184.910</u></u>	Ending balance

33. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

33. OTHER EQUITY COMPONENTS

Akun ini terdiri dari:

This account consist of:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Pengukuran kembali atas kewajiban imbangan pasti	18.311	14.760	13.287	Remeasurement of defined benefits obligation
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	(68.940)	(59.963)	(9.670)	Difference due to changes in equity of subsidiaries
Selisih transaksi perubahan ekuitas dengan pihak non-pengendali	(548.374)	(548.374)	(615.870)	Difference in value of equity transaction with non-controlling interest
Keuntungan yang belum di realisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	<u>(133.643)</u>	<u>(118.633)</u>	<u>(117.351)</u>	Unrealized gain of financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net
Jumlah	<u><u>(732.646)</u></u>	<u><u>(712.210)</u></u>	<u><u>(729.604)</u></u>	Total

34. SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah saham yang diperoleh kembali masing-masing adalah sebanyak 498.591.600 lembar senilai Rp 126.033 juta. Jumlah tersebut termasuk pembelian saham Entitas oleh MNCS, MTN, FM dan MAB (entitas anak) dari pasar sekunder sebanyak 498.528.600 lembar pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada bulan Maret 2022, MTN dan FM (entitas anak) melakukan penjualan sebanyak 73.134.000 lembar senilai Rp 16.748 juta. Tidak terdapat selisih antara harga perolehan dengan harga pelepasan saham yang diperoleh kembali. Sampai dengan 30 Juni 2022, Entitas dan MNCS dan MAB (entitas anak) telah melakukan pembelian saham Entitas sebanyak 425.457.600 lembar saham dengan biaya perolehan Rp 109.285 juta.

Pembelian saham Entitas oleh MNCS, MTN, FM dan MAB (entitas anak) dicatat sebagai aset keuangan, portofolio efek dalam laporan posisi keuangan entitas anak. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pembelian saham Entitas oleh MNCS, MTN, FM dan MAB (entitas anak) disajikan sebagai saham yang diperoleh kembali.

35. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Akun ini merupakan kepentingan non-pengendali atas ekuitas dan bagian atas laba (rugi) bersih Entitas anak yang dikonsolidasikan.

a. Kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anak:			
PT Bank MNC Internasional Tbk	853.438	854.451	487.278
PT MNC Asuransi Indonesia	47	48	46
PT MNC Life Assurance	19	18	16
PT MNC Finance	11	11	10
PT MNC Asset Management	3	3	4
PT MNC Sekuritas	2	2	2
PT Winfly Ltd	3.601	-	-

Jumlah

30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
857.121	854.533	487.356

b. Kepentingan non-pengendali atas jumlah penghasilan komprehensif entitas anak:			
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.953	(6.232)	1.113
PT MNC Asuransi Indonesia	(1)	(1)	2
PT MNC Life Assurance	1	-	(1)

Jumlah

30 Juni/ June 30, 2022	30 Juni/ June 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
2.953	(6.233)	1.114	17.598

34. TREASURY STOCKS

As of December 31, 2021 and 2020, total number of treasury stocks amounted to Rp 126,033 million for 498,591,600 shares, respectively. Total number includes the Entity's shares purchased by MNCS, MTN, FM and MAB (subsidiaries) from the secondary market, totally to 498,528,600 shares as of December 31, 2021 and 2020.

In March 2022, MTN and FM (subsidiaries) sale the Entity's shares amounting to Rp 16,478 million for 73,134,000 shares. There was no difference between the acquisition cost and the selling price of treasury stocks. Up to June 30, 2022, Entity and MNCS and MAB (subsidiaries) has purchased of the Entity's shares amounted to 425.457.600 shares with total cost of Rp 109,285 million.

Purchases of the Entity's shares by MNCS, MTN, FM and MAB (subsidiaries) are recorded as other financial asset, securities in the subsidiary's statement of financial position. In the consolidated financial position, purchases of the Entity's shares by MNCS, MTN, FM and MAB (subsidiaries) are presented as treasury stocks.

35. NON-CONTROLLING INTERESTS

This account represents the non-controlling interest in the equity and the net earnings (losses) of the consolidated subsidiaries.

a. Non-controlling interest in net assets of subsidiaries:	
PT Bank MNC Internasional Tbk	487.278
PT MNC Asuransi Indonesia	46
PT MNC Life Assurance	16
PT MNC Finance	10
PT MNC Asset Management	4
PT MNC Sekuritas	2
PT Winfly Ltd	-

Total

b. Non-controlling interest in total comprehensive income of subsidiaries:	
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.113
PT MNC Asuransi Indonesia	(1)
PT MNC Life Assurance	(3)

Total

36. PENDAPATAN

a. Pendapatan bunga dan dividen

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan dividen entitas.

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 42)					Related Parties (Note 42)
Anjak piutang	9.641	2.302	16.430	7.794	Factoring
Pembiayaan konsumen	5.849	7.719	15.215	11.561	Consumer financing
Sewa pembiayaan	-	8	8	221	Finance lease
Pihak ketiga					Third Parties
Pinjaman yang diberikan dan piutang	634.646	526.613	1.168.942	1.177.740	Loans and receivables
Pendapatan bunga					Interest income
Pembiayaan konsumen Tersedia untuk dijual	90.932	75.845	146.012	229.257	Consumer financing Available for sale
Anjak piutang	17.367	34.629	67.065	31.614	Factoring
Sewa pembiayaan	29.967	34.403	63.987	76.424	Finance lease
Diperdagangkan	13.854	21.097	35.780	46.851	Trading
Dimiliki hingga jatuh tempo	319	7.863	11.563	7.083	Held to maturity
Dividen	1.538	3.087	6.222	29.344	Dividend
	164	161	492	113	
Jumlah	804.277	713.727	1.531.716	1.618.002	Total

Tidak ada pendapatan bunga dan dividen dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah.

This account represents interest revenue and dividend income.

There is no interest and dividend that earned from an individual customer which is more than 10% of total.

b. Pendapatan operasional lainnya

Akun ini merupakan pendapatan operasional lainnya dari pihak ketiga.

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Sewa Operasi	7.247	6.130	13.147	16.628	Operating Lease
Pendapatan operasional lainnya	47.294	123.955	212.973	341.714	Other operating income
Jumlah	54.541	130.085	226.120	358.342	Total

Tidak ada pendapatan operasional lainnya dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah.

b. Other operating income

This account represents revenue from other operating from third parties.

There is no other operating income that earned from an individual customer which is more than 10% of total.

36. PENDAPATAN (lanjutan)

c. Pendapatan premi bersih

Akun ini merupakan pendapatan premi setelah dikurangi premi reasuransi dan dikurangi (ditambah) dengan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan.

36. REVENUES (continued)

c. Net premium income

This account represents premiums income, net of outward reinsurance and increase (decrease) in unearned premiums.

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Premi asuransi individu					Individual insurance premiums
Premi tahun pertama	794.973	551.601	849.407	806.945	First year premiums
Premi lanjutan	4.963	5.118	11.129	11.898	Renewal premiums
Sub-jumlah	799.936	556.719	860.536	818.843	Sub-total
Premi asuransi kumpulan					Group insurance premiums
Premi tunggal	43.682	32.528	61.291	69.878	Single premiums
Jumlah premi bruto	843.618	589.247	921.827	888.721	Total gross premiums
Premi reasuransi					Reinsurance premiums
Individu	(5.338)	(7.075)	(13.513)	(14.617)	Individual
Kumpulan	(640.564)	(384.144)	(507.438)	(465.591)	Group
Jumlah premi reasuransi	(645.902)	(391.219)	(520.951)	(480.208)	Total reinsurance premiums
Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan	(20.385)	(23.718)	(29.364)	18.645	Decrease (increase) in unearned premiums revenue
Jumlah	177.331	174.310	371.512	427.158	Total
Pihak berelasi (Catatan 42)	10.291	30.487	40.348	17.761	Related parties (Note 42)
Pihak ketiga	167.040	143.823	331.164	409.397	Third parties
Jumlah	177.331	174.310	371.512	427.158	Total

Tidak ada pendapatan premi bersih dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah.

There is no net premium income that earned from an individual customer which is more than 10% of total.

d. Pendapatan digital

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh melalui platform digital.

d. Digital income

This account represents income from digital platform.

Tidak ada pendapatan digital dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah.

There is no digital income that earned from an individual customer which is more than 10% of total.

36. PENDAPATAN (lanjutan)

e. Pendapatan pembiayaan syariah

Akun ini merupakan pendapatan dari pembiayaan syariah.

36. REVENUES (continued)

e. Syariah financing lease income

This account represents income from syariah financing.

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Pihak ketiga	5.850	14.057	26.953	30.522	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 42)	443	295	455	934	Related parties (Note 42)
Jumlah	6.293	14.352	27.408	31.456	Total

Tidak ada pendapatan pembiayaan syariah dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah.

There is no syariah financing lease income that earned from an individual customer which is more than 10% of the total.

f. Pendapatan pasar modal

Akun ini merupakan komisi yang diperoleh dari aktivitas perantara pedagang efek ekuitas (saham).

f. Capital market income

This account represents commission from brokerage services on equity (shares).

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Komisi perantara perdagangan efek	125.038	143.653	285.028	27.262	Brokerage commissions
Laba dari portofolio efek	69.419	54.895	139.401	111.871	Gain from securities
Jasa manager investasi	4.563	4.785	9.367	11.018	Management investment fees
Jumlah	199.020	203.333	433.796	150.151	Total

Tidak ada pendapatan pendapatan pasar modal dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah.

There is no capital market income that earned from an individual customer which is more than 10% of the total.

37. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

37. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consist of:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	287.861	291.319	521.183	463.686	Salaries and employees benefits
Sewa	73.794	70.595	143.574	145.568	Rent
Beban kantor	37.972	39.129	67.787	56.801	Office supplies
Penyusutan (Catatan 14)	20.292	24.084	45.608	62.676	Depreciation (Note 14)
Komunikasi dan informasi	19.733	17.767	37.112	9.660	Communication and information
Perjalanan dinas dan transportasi	18.172	20.540	41.102	39.738	Travelling and transportation
Iklan dan promosi	14.991	7.526	28.227	17.603	Advertising and promotion
Jasa profesional	10.431	11.331	43.027	27.269	Professional fees
Perbaikan dan pemeliharaan	9.169	8.432	17.962	18.514	Repairs and maintenance
Lain-lain	152.098	146.489	288.268	203.910	Others
Jumlah	644.513	637.212	1.233.850	1.045.425	Total

38. BEBAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Simpanan	199.725	251.259	513.791	539.413	Deposit
Pinjaman	92.620	87.147	172.526	241.759	Loans
Obligasi	19.014	18.983	37.981	37.925	Bonds
Provisi dan komisi kredit	16.708	13.869	29.489	24.759	Loan commissions and fees
Simpanan dari bank lain	972	12.651	16.585	17.835	Deposits from other banks
Lain-lain	7.729	17.230	24.569	42.049	Others
Jumlah	336.768	401.139	794.941	903.740	Total

38. INTEREST EXPENSES

This account consist of:

39. LAIN-LAIN BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Perubahan dalam liabilitas kontrak investasi dan asuransi	32.071	(12.645)	24.115	5.837	Change in investment and insurance contract liabilities
Lain-lain - bersih	36.547	86.331	153.570	70.333	Others - net
Jumlah	68.618	73.686	177.685	76.170	Total

39. OTHERS – NET

This account consist of:

Lain-lain - bersih terdiri dari laba atau rugi penjualan aset tetap, serta pendapatan dan beban lainnya.

Others - net consists of gain or loss on sale of property and equipment and other income and expenses.

40. PAJAK PENGHASILAN

a. Utang Pajak

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	
	2022	2021	2020	
Pajak penghasilan				Income taxes
Pasal 21	2.109	8.698	3.880	Article 21
Pasal 23	770	1.382	1.112	Article 23
Pasal 4 ayat 2	9.023	9.693	10.460	Article 4 paragraph 2
Pasal 26	108	139	213	Article 26
Pasal 29	6.633	4.633	2.685	Article 29
Transaksi Perdagangan Saham	4.059	4.078	5.527	Tax on Securities Trading
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	2.846	1.073	1.521	Value Added Tax - net
Jumlah	25.548	29.696	25.398	Total

40. INCOME TAX

a. Taxes Payable

40. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

40. INCOME TAX (continued)

b. Manfaat (beban) pajak Kelompok Usaha terdiri dari:

b. Tax benefit (expense) of the Group consists of the following:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Pajak kini					Current tax
Entitas anak	(8.822)	(8.064)	(10.984)	(29.216)	Subsidiaries
Jumlah pajak kini	(8.822)	(8.064)	(10.984)	(29.216)	Total current tax
Pajak tangguhan					Deferred tax
Entitas	11.325	8.945	11.677	6.112	Parent Entity
Entitas anak	(6.236)	2.409	(20.570)	4.015	Subsidiaries
Jumlah pajak tangguhan	5.089	11.354	(8.893)	10.127	Total deferred tax
Jumlah	(3.733)	3.290	(19.877)	(19.089)	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and fiscal loss is as follows:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	66.493	12.672	167.047	84.614	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Penyesuaian pada tingkat konsolidasian	42.758	36.486	36.486	(888)	Adjustment at consolidation level
Laba bersih entitas anak	(105.436)	(71.097)	(221.292)	(105.072)	Net profit of subsidiaries
Rugi sebelum pajak Perusahaan	3.815	(21.939)	(17.759)	(21.346)	Loss before tax of the Company
<u>Perbedaan temporer</u>					<u>Temporary differences</u>
Beban imbalan pasca kerja	241	180	422	535	Post-employment benefits
Penyusutan	109	145	302	1.931	Depreciation
<u>Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal</u>					<u>Nondeductible expense (non taxable income)</u>
Laba belum direalisasi aset keuangan pada FVTPL	(9.706)	(20.676)	(58.557)	(77.507)	Unrealized gain on financial assets at FVTPL
Gaji dan tunjangan	2.391	2.331	3.847	3.968	Salaries and employee benefits
Penghasilan bunga yang pajaknya bersifat final	(977)	(311)	(1.250)	(219)	Interest income subjected to final tax
Lain-lain	135	(63)	226	(319)	Others
Taksiran rugi fiskal periode berjalan	(3.992)	(40.333)	(72.769)	(92.957)	Estimated fiscal loss - current period
Akumulasi kompensasi rugi fiskal Tahun sebelumnya	(512.253)	(425.495)	(364.749)	(292.205)	Accumulated fiscal loss carry forward Prior years
Jumlah kompensasi rugi fiskal	(516.245)	(465.828)	(437.518)	(385.162)	Total fiscal loss carry forward

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 didasarkan atas perhitungan yang sama dengan jumlahnya dengan laba kena pajak yang dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan Badan 2021 dan 2020.

In these financial statements, the amount of taxable income for the years ended December 31, 2021 and 2020 based on calculations which is this amount same as taxable income as reported in the corporate income tax returns.

Sampai dengan tanggal pelaporan, tidak terdapat liabilitas pajak tambahan: jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak, serta jumlah pokok dan denda atau bunganya.

Up to the reporting date, there are no additional tax liabilities: type of tax assessment or claim, tax type, years of tax and principal amount and penalty or interest.

40. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

40. INCOME TAX (continued)

c. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

c. Deferred tax asset and liabilities

	1 Januari/ January 1, 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan pendapatan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	30 Juni/ June 30, 2022	
<u>Aset pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax assets</u>
Perusahaan					The Company
Rugi fiskal	96.254	11.275	-	107.529	Fiscal loss
Liabilitas imbalan pasca kerja	364	26	-	390	Employee benefits obligation
Penyusutan	(13)	24	-	11	Depreciation
Sub jumlah	96.605	11.325	-	107.930	Sub total
Entitas Anak					Subsidiaries
Rugi fiskal	166.991	(25.821)	-	141.170	Fiscal loss
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	73.196	2.272	-	75.468	Allowance for impairment losses on loans
Liabilitas imbalan pasca kerja	13.856	(157)	(364)	13.335	Employee benefits obligation
Unearned premium reserve	9.216	2.415	-	11.631	Unearned premium reserve
Penyusutan	10.811	(4.414)	-	6.397	Depreciation
Cadangan kerugian aset keuangan selain kredit yang diberikan	6.996	252	-	7.248	Allowance for impairment losses on financial assets other than loans
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	(2.593)	-	6.206	3.613	Unrealized loss (gain) on change in fair value of available for sale securities
Lain-lain	5.664	19.217	-	24.881	Others
Sub jumlah	284.137	(6.236)	5.842	283.743	Sub total
Total aset pajak tangguhan	380.742	5.089	5.842	391.673	Total deferred tax assets

41. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian didasarkan pada data berikut:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,	
	2022	2021	2021	2020
Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	54.220	12.738	142.181	62.078

Net profit attributable to the owners of the Company

Lembar saham

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar (penyebut) untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,	
	2022	2021	2021	2020
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar	42.138.693.102	41.930.841.730	42.026.360.716	39.438.030.081

Weighted average number of shares outstanding for the purpose of calculating basic earnings per share

Laba per saham - dasar
(dalam satuan Rupiah)

1,29 0,30 3,38 1,57

Earnings per share - basic
(full Rupiah)

41. EARNINGS PER SHARE

The calculation of basic and diluted earnings per share are based on the following data:

Shares

The weighted average number of shares outstanding (denominator) for the computation of basic earnings per share were as follows:

42. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

a. Pihak berelasi yang merupakan pemegang saham mayoritas entitas adalah:

- PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk).

b. Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Kelompok Usaha:

- PT Global Mediacom Tbk
- PT Media Nusantara Citra Tbk

c. Pihak berelasi yang merupakan Entitas yang dikendalikan personil manajemen kunci Entitas:

- PT MNC Land Tbk
- PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
- PT Radio Tridjaja Shakti
- PT Global Informasi Bermutu
- PT MNC Televisi Indonesia
- PT MNC Sky Vision Tbk
- PT Nuansacipta Coal Investama
- PT Infokom Elektrindo
- PT Media Nusantara Informasi
- PT GLD Property
- PT MNC Televisi Network
- PT MNC Land Bali
- PT MNC Kabel Mediacom
- PT MNC Picture
- PT MNC Networks
- PT MNC Vision Networks Tbk

42. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

a. Related party which is the entity's majority shareholder:

- PT MNC Asia Holding Tbk (formerly PT MNC Investama Tbk).

b. Related parties with the same majority shareholder as the Group:

- PT Global Mediacom Tbk
- PT Media Nusantara Citra Tbk

c. Related parties which are entities controlled by key management personnel of the Entity:

- PT MNC Land Tbk
- PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
- PT Radio Tridjaja Shakti
- PT Global Informasi Bermutu
- PT MNC Televisi Indonesia
- PT MNC Sky Vision Tbk
- PT Nuansacipta Coal Investama
- PT Infokom Elektrindo
- PT Media Nusantara Informasi
- PT GLD Property
- PT MNC Televisi Network
- PT MNC Land Bali
- PT MNC Kabel Mediacom
- PT MNC Picture
- PT MNC Networks
- PT MNC Vision Networks Tbk

42. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

42. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi- transaksi Pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

Kelompok Usaha juga melakukan transaksi tertentu dengan pihak yang berelasi, sebagai berikut:

The Group entered into certain transactions with related parties as follows:

- a. Perusahaan menyediakan manfaat pada Komisaris dan personel manajemen kunci sebagai berikut:

- a. The Company provides compensation to the Commissioners and key management personnel as follows:

	30 Juni/June 30, 2022		30 Juni/June 30, 2021		
	Direksi/ Directors	Komisaris/ Commissioners	Direksi/ Directors	Komisaris/ Commissioners	
Imbalan kerja jangka pendek	5.868	774	3.460	781	Short-term benefits
Imbalan pasca kerja	161	-	138	-	Post-employment benefits
Jumlah	6.029	774	3.598	781	Total

	31 Desember/December 31, 2021		31 Desember/December 31, 2020		
	Direksi/ Directors	Komisaris/ Commissioners	Direksi/ Directors	Komisaris/ Commissioners	
Imbalan kerja jangka pendek	8.024	1.444	6.040	1.767	Short-term benefits
Imbalan pasca kerja	290	-	247	-	Post-employment benefits
Jumlah	8.314	1.444	6.287	1.767	Total

- b. Pendapatan Bunga dan Dividen

- b. Interest and Dividends Income

	30 Juni/June 30, 2022		31 Desember/December 31, 2021		31 Desember/December 31, 2020		
	2022	2021	2021	2020	2021	2020	
PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	5.296	6.887	13.726	9.517	13.726	9.517	PT MNC Asia Holding Tbk (formerly PT MNC Investama Tbk)
PT MNC Kabel Mediacom	1.716	666	7.145	956	7.145	956	PT MNC Kabel Mediacom
PT Media Nusantara Citra Tbk	-	-	4.937	5.697	4.937	5.697	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Global Informasi Bermutu	1.299	1.045	2.074	2.060	2.074	2.060	PT Global Informasi Bermutu
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500 juta)	7.179	1.431	3.771	1.346	3.771	1.346	Others (each below Rp 500 million)
Jumlah	15.490	10.029	31.653	19.576	31.653	19.576	Total
Presentase dari jumlah pendapatan	1,12%	0,78%	1,16%	0,74%	1,16%	0,74%	Percentage from total revenue

- c. Pendapatan Pembiayaan Syariah dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 443 juta dan Rp 295 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan sebesar Rp 455 juta dan Rp 934 juta masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Persentase terhadap jumlah pendapatan sebesar 0,03%, 0,02%, 0,02%, dan 0,04% masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

- c. Syariah Financing Lease income from related parties amounted to Rp 443 million and Rp 295 million for six months period ended June 30, 2022 and 2021, respectively and amounted to Rp 455 million and Rp 930 million for the year ended December 31 2021 and 2020, respectively. Percentage to total revenue of 0.02%, 0.02% and 0.04%, respectively for the six months period ended June 30, 2022 and 2021 and for the year ended December 31 2021 and 2020.

42. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) 42. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi- transaksi Pihak Berelasi (lanjutan)

Transactions with Related Parties (continued)

d. Pendapatan premi bersih

d. Net premium income

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
PT MNC Sky Vision Tbk	3.209	8.246	6.255	2.147	PT MNC Sky Vision Tbk
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	962	4.658	7.144	2.733	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
PT Global Informasi Bermutu	60	1.869	4.302	1.222	PT Global Informasi Bermutu
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500 juta)	6.060	15.714	22.647	11.659	Other (each below Rp 500 million)
Jumlah	10.291	30.487	40.348	17.761	Total
Presentase dari jumlah pendapatan	0,74%	2,38%	1,48%	0,67%	Percentage from total revenue

e. Piutang Nasabah

e. Receivables from customer

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	
	2022	2021	2020	
Bhakti Investama International Ltd	9.981	9.982	9.983	Bhakti Investama International Ltd
PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	9.886	9.886	9.887	PT MNC Asia Holding Tbk (formerly PT MNC Investama Tbk)
PT Global Mediacom Tbk	7.623	7.623	7.591	PT Global Mediacom Tbk
PT HT Investama	-	13.804	13.548	PT HT Investama
Jumlah	27.490	41.295	41.009	Total
Presentase dari jumlah aset	0,12%	0,19%	0,21%	Percentage from total assets

f. Efek – efek

f. Securities

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	
	2022	2021	2020	
<u>Diukur pada nilai wajar laba rugi :</u>				<u>Fair value through profit loss :</u>
Efek ekuitas				Equity securities
PT MNC Energy Investment Tbk	40.948	-	-	PT MNC Energy Investment Tbk
PT MNC Digital Entertainment Tbk	12.399	-	-	PT MNC Digital Entertainment Tbk
PT MNC Sky Vision Tbk	10.539	7.884	-	PT MNC Sky Vision Tbk
PT MNC Vision Network Tbk	125	184	360	PT MNC Vision Network Tbk
Reksadana				Mutual funds
PT MNC Asset Management	974	-	-	PT MNC Asset Management
PT MNC Life Assurance	3	-	-	PT MNC Life Assurance
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi :</u>				<u>Amortized cost :</u>
Obligasi				Bonds
PT Global Mediacom Tbk	11.240	12.304	21.972	PT Global Mediacom Tbk
<u>Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain :</u>				<u>Fair value through other comprehensive income :</u>
Efek ekuitas				Equity securities
PT MNC Land Tbk	169.390	192.560	201.180	PT MNC Land Tbk
PT MNC Energy Investment Tbk	83.906	-	-	PT MNC Energy Investment Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	23.244	22.374	67.670	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	19.815	18.808	22.166	PT MNC Asia Holding Tbk (formerly PT MNC Investama Tbk)
PT Global Mediacom Tbk	10.355	9.220	10.284	PT Global Mediacom Tbk
PT MNC Vision Network Tbk	7.550	11.127	21.724	PT MNC Vision Networks
Obligasi				Bonds
PT Global Mediacom Tbk	-	-	4.541	PT Global Mediacom Tbk
Jumlah	390.488	274.461	349.897	Total
Presentase dari jumlah aset	1,72%	1,27%	1,83%	Percentage from total assets

42. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) 42. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi- transaksi Pihak Berelasi (lanjutan)

Transactions with Related Parties (continued)

g. Piutang pembiayaan

g. Financing receivables

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
PT MNC Asia Holding Tbk (dahulu PT MNC Investama Tbk)	108.513	101.359	106.033	PT MNC Asia Holding Tbk (formerly PT MNC Investama Tbk)
PT Media Nusantara Citra Tbk	32.903	35.854	27.439	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Global Informasi Bermutu	10.424	11.125	8.048	PT Global Informasi Bermutu
PT MNC Sky Vision Tbk	5.660	6.565	6.119	PT MNC Sky Vision Tbk
PT MNC Land Tbk	1.326	2.293	1.307	PT MNC Land Tbk
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	1.218	1.586	1.329	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
PT MNC Kabel Mediacom	819	10.427	5.452	PT MNC Kabel Mediacom
PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	266	2.341	3.006	PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500 juta)	37.657	36.739	22.260	Others (each below Rp 500 million)
Jumlah Piutang Pembiayaan	198.786	208.289	180.993	Total Financing Receivables
Presentase dari jumlah aset	0,88%	0,96%	0,95%	Percentage from total assets

h. Piutang Pembiayaan Murabahah dari pihak berelasi sebesar Rp 374 juta, Rp 1.654 dan Rp Rp 4.768 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020. Persentase terhadap jumlah aset sebesar 0,002%, 0,008%, dan 0,025% masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

h. Murabahah financing receivables from related parties amounted to Rp 377 million, Rp 1,654 million and Rp 4,768 million as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, respectively. The percentages to total assets are 0.002%, 0.008% and 0.025%, respectively for the six-month period ended June 30, 2022 and for the years ended December 31, 2021 and 2020, respectively.

i. Biaya dibayar dimuka dan uang muka

i. Prepaid expense and advances

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
PT MNC Land Tbk	175	1.765	1.277	PT MNC Land Tbk
PT Global Informasi Bermutu	79	-	-	PT Global Informasi Bermutu
Jumlah	254	1.765	1.277	Total
Presentase dari jumlah aset	0,00%	0,01%	0,01%	Percentage from total assets

i. Premi dan aset reasuransi

i. Premium and reinsurance assets

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
PT MNC Sky Vision Tbk	3.664	12.929	12.841	PT MNC Sky Vision Tbk
PT MNC Land Tbk	2.630	2.688	4.464	PT MNC Land Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500 juta)	4.240	12.856	26.153	Others (each below Rp 500 million)
Jumlah	10.534	28.473	43.458	Total
Presentase dari jumlah aset	0,05%	0,13%	0,23%	Percentage from total assets

42. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) 42. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

j. Simpanan

Pada tanggal 30 Juni 2022, simpanan terdiri dari tabungan, giro dan deposito dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 38.001 juta, Rp 206.005 juta dan Rp 1.182.635 juta. Persentase simpanan terhadap jumlah liabilitas sebesar 8,60%.

Pada tanggal 31 Desember 2021, simpanan terdiri dari tabungan, giro dan deposito dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 34.518 juta, Rp 242.179 juta dan Rp 1.247.998 juta. Persentase simpanan terhadap jumlah liabilitas sebesar 9,74%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, simpanan terdiri dari tabungan, giro dan deposito dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 14.986 juta, Rp 156.812 juta dan Rp 581.884 juta. Persentase simpanan terhadap jumlah liabilitas sebesar 5,38%.

j. Deposits

As of June 30, 2022, deposits consist of savings deposits, demand deposits and time deposits liabilities with related parties amounting Rp 38,001 million, Rp 206,005 million, and Rp 1,182,635 million, respectively. The percentage of deposits to total liabilities is 8.60%.

As of December 31, 2021, deposits consist of savings deposits, demand deposits and time deposits liabilities with related parties amounting Rp 34,518 million, Rp 242,179 million, and Rp 1,247,998 million, respectively. The percentage of deposits to total liabilities is 9.74%.

As of December 31, 2020, deposits consist of savings deposits, demand deposits and time deposits liabilities with related parties amounting Rp 14,986 million, Rp 156,812 million, and Rp 581,884 million, respectively. The percentage of deposits to total liabilities is 5.38%.

43. KOMITMEN DAN KONTINGENSI 43. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Entitas Anak – BMNCI

The Subsidiary - BMNCI

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Komitmen				Commitments
Tagihan Komitmen				Commitment Receivables
Pembelian berjangka valuta asing	265.572	159.663	287.507	Forwards foreign currencies purchased
Liabilitas Komitmen				Commitment Liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(523.937)	(338.342)	(130.796)	Unused facilities
Penjualan tunai valuta asing yang belum diselesaikan	(265.873)	(159.712)	(282.611)	Unsettled spot foreign currencies sold
Jumlah Liabilitas Komitmen	(789.810)	(498.054)	(413.407)	Total Commitment Liabilities
Jumlah Liabilitas Komitmen - bersih	(524.238)	(338.391)	(125.900)	Total Commitment Liabilities - Net
Kontingensi				Contingencies
Tagihan Kontingensi				Contingent Receivables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	419.026	375.963	261.460	Past due interest revenues
Liabilitas Kontingensi				Contingent Liabilities
Bank garansi	(146.408)	(142.010)	(44.714)	Bank guarantee
Jumlah Tagihan Kontingensi - Bersih	272.618	233.953	216.746	Total Contingent Receivables - Net
Lainnya				Others
Kredit hapus buku	1.171.116	1.142.474	1.097.555	Loans written-off

43. KOMITMEN DAN KONTINGENSI (lanjutan)

Entitas Anak – MNCS

MNCS merupakan salah satu tergugat bersama dengan 17 tergugat lainnya dalam gugatan perkara No.128/PDT.G/2019/PN.JKT.PST. Pada tanggal 22 September 2020, MNCS memenangkan perkara yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara No.128, penggugat kemudian mengajukan banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta. Pada tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan keputusan banding No. 62, perusahaan telah mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 18 Juni 2021. Sampai dengan penerbitan pelaporan keuangan, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung dan belum ada putusan apapun terhadapnya, sehingga belum ada dampak materiil apapun terhadap perusahaan

Entitas Anak – MNCAM

MNCAM merupakan salah satu Terdakwa Korporasi dalam perkara No. 64/PID.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Agustus 2021 yang diajukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan, proses hukum masih berjalan dengan agenda pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Perusahaan dan para Terdakwa Korporasi lainnya).

43. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The Subsidiary - MNCS

MNCS is claimed as one of the defendant along with 17 other defendants under civil case No.128/PDT.G/2019/PN.JKT.PST. On September 22, 2020, MNCS won the case stating that the Central Jakarta District Court was not authorized to hear case No.128, The Plaintiff then filed an appeal at the DKI Jakarta High Court. On June 9, 2021 based on the decision of the appeal decision No. 62, the company has submitted a Memorandum of Cassation on June 18, 2021. As of the issued date of financial statements, the case still in process of being examined at the Supreme Court and has been no decision against him, so there has not been any material impact on the Company.

The Subsidiary - MNCAM

MNCAM, is claimed as the Corporate Defendant under case No. 64/PID.Sus-TPK/2021/pn Jkt.Pst dated 23 August 2021 which filed by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Until the issuance of financial statement, the legal process still on-going with the authentication agenda (the examination of evidence submitted by the Company and other Corporate Defendants).

44. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING **44. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut (dalam satuan penuh, kecuali jumlah setara Rupiah):

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Group has assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows (in full amounts, except Rupiah equivalent):

	30 Juni/June 30, 2022		31 Desember/December 31, 2021		31 Desember/December 31, 2020		
	Mata uang asing/ Foreign currency	Ekuivalen (Rp Juta)/ Equivalent in (Rp Million)	Mata uang asing/ Foreign currency	Ekuivalen (Rp Juta)/ Equivalent in (Rp Million)	Mata uang asing/ Foreign currency	Ekuivalen (Rp Juta)/ Equivalent in (Rp Million)	
Aset Moneter							
Kas dan Setara Kas	US\$ 15.544.181	230.800	16.910.295	241.293	9.795.533	138.166	Cash and Cash Equivalents
Lainnya/							
Other	-	14.669	-	21.310	-	8.523	
Piutang nasabah	US\$ 404	6	491	7	1.701	24	Receivables from customer
Premi dan aset reasuransi	US\$ 2.738.551	40.662	3.315.439	47.308	3.494.080	49.284	Premium and reinsurance assets
Lainnya/							
Other	-	88	-	39	-	183	
Kredit yang diberikan	US\$ 19.785.089	293.769	20.111.711	286.974	20.644.594	291.192	Loans
Efek - efek	US\$ 243.265	3.612	279.487	3.988	285.289	4.024	Securities
Jumlah	38.311.490	583.606	40.617.423	600.919	34.221.197	491.396	Total
Liabilitas Moneter							
Liabilitas segera	US\$ 39.399	585	36.162	516	33.605	474	Liabilities immediately payable
Lainnya/							
Other	-	2	-	1	-	3	
Simpanan	US\$ 18.068.023	268.274	26.232.462	374.311	18.481.673	260.684	Deposits
Lainnya/							
Other	-	16.984	-	17.838	-	11.164	
Utang reasuransi dan utang lain-lain	US\$ -	-	456.304	6.511	1.140.092	16.081	Reinsurance and other payable
Lainnya/							
Other	-	-	-	184	-	115	
Liabilitas kontrak asuransi	US\$ 36.571	543	105.543	1.506	128.819	1.817	Insurance contract liability
Liabilitas lain-lain	US\$ 22.899	340	29.014	414	36.653	517	Other payables
Lainnya/							
Other	-	1.788	-	137	-	1.106	
Jumlah	18.166.892	288.516	26.859.485	401.418	19.820.842	291.961	Total
Aset Dalam Mata Uang Asing - bersih	20.144.598	295.090	13.757.938	199.501	14.400.355	199.435	Monetary Assets in Foreign Currency - net

Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020, kurs konversi yang digunakan Kelompok Usaha serta kurs yang berlaku adalah sebagai berikut:

The conversion rates used by the Group on June 30, 2022 and 2021 and December 31, 2021 and 2020 and the prevailing rates are as follows:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Mata uang					Foreign currency
1 US\$	14.848	14.105	14.269	14.105	US\$ 1

45. INFORMASI SEGMENT

45. SEGMENT INFORMATION

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi:

The following are segment information based on the operating divisions:

	30 Juni/June 30, 2022										
	Perbankan/ Banking	Investasi/ Investment	Asuransi/ Insurance	Penjaminan dan perantara perdagangan efek/ Brokerage and underwriting	Pengelolaan investasi/ Fund management	Lembaga pembiayaan/ Multifinance	Finansial teknologi/ Financial technology	Penyewaan properti/ Property leasing	Eliminasi/ Eliminations	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN	591.103	52.879	294.335	228.099	25.996	182.700	22.240	17	(10.845)	1.386.524	REVENUES
HASIL SEGMENT	278.864	22.626	42.729	36.101	16.266	79.810	16.329	(1.019)	(6.263)	485.443	SEGMENT RESULTS
Lain - lain - bersih										(68.618)	Others - Net
Beban keuangan										(350.332)	Interest expense
Pajak penghasilan										(3.733)	Income tax
Laba tahun berjalan										62.760	Profit for the year
Penyusutan dan amortisasi	8.168	311	911	4.159	203	6.266	268	7	-	20.293	Depreciation and amortization
INFORMASI LAINNYA											OTHER INFORMATION
ASET											ASSETS
Aset segmen	14.546.548	7.944.288	1.013.454	1.872.652	93.038	2.036.639	251.269	100.527	(5.972.277)	21.886.138	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi										761.116	Unallocated assets
Total aset konsolidasian										22.647.254	Total consolidated assets
LIABILITAS											LIABILITIES
Liabilitas segmen	12.434.797	1.389.619	729.692	1.404.447	6.714	1.002.331	20.345	42.754	(502.405)	16.528.294	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi										58.029	Unallocated liabilities
Total liabilitas konsolidasian										16.586.323	Total consolidated liabilities

	30 Juni/June 30, 2021										
	Perbankan/ Banking	Investasi/ Investment	Asuransi/ Insurance	Penjaminan dan perantara perdagangan efek/ Brokerage and underwriting	Pengelolaan investasi/ Fund management	Lembaga pembiayaan/ Multifinance	Penyewaan ruang kantor/ Office space rental	Eliminasi/ Eliminations	Jumlah/ Total		
PENDAPATAN	556.464	149.441	199.882	251.666	12.041	179.753	4	(67.676)		1.281.575	REVENUES
HASIL SEGMENT	303.003	118.362	(4.615)	58.279	1.929	77.332	(67)	(62.806)		491.417	SEGMENT RESULTS
Lain - lain - bersih										(73.686)	Others - Net
Beban keuangan										(405.059)	Interest expense
Pajak penghasilan										3.290	Income tax
Laba tahun berjalan										15.962	Profit for the year
Penyusutan dan amortisasi	8.160	418	7.817	4.606	621	7.038	-	-	-	28.660	Depreciation and amortization
INFORMASI LAINNYA											OTHER INFORMATION
ASET											ASSETS
Aset segmen	11.919.951	9.080.846	1.058.407	1.892.774	77.566	2.004.779	53.667	(6.802.632)		19.285.358	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi										774.191	Unallocated assets
Total aset konsolidasian										20.059.549	Total consolidated assets
LIABILITAS											LIABILITIES
Liabilitas segmen	10.565.418	986.748	790.891	1.522.314	3.946	1.015.761	40.133	(506.128)		14.419.083	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi										82.803	Unallocated liabilities
Total liabilitas konsolidasian										14.501.886	Total consolidated liabilities

45. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

45. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember/December 31, 2021								Jumlah/ Total	
	Perbankan/ Banking	Investasi/ Investment	Asuransi/ Insurance	Penjaminan dan perantara perdagangan efek/ Brokerage and underwriting	Pengelolaan investasi/ Fund management	Lembaga pembiayaan/ Multifinance	Penyewaan ruang kantor/ Office space rental	Eliminasi/ Eliminations		
PENDAPATAN	1.139.599	327.391	459.679	501.306	28.904	364.808	12	(86.557)	2.735.142	REVENUES
HASIL SEGMENT	625.800	279.801	62.178	119.446	6.377	151.798	(894)	(75.347)	1.169.159	SEGMENT RESULTS
Lain - lain - bersih Beban keuangan Pajak penghasilan									(177.685) (824.427) (19.877)	Others - Net Interest expense Income tax
Laba tahun berjalan									147.170	Profit for the year
Penyusutan dan amortisasi	19.519	855	3.517	6.419	1.104	14.194	-	-	45.608	Depreciation and amortization
INFORMASI LAINNYA										OTHER INFORMATION
ASET										ASSETS
Aset segmen	13.792.021	8.722.935	920.247	1.768.957	77.571	1.907.254	53.841	(6.339.043)	20.903.783	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi									750.185	Unallocated assets
Total aset konsolidasian									21.653.968	Total consolidated assets
LIABILITAS										LIABILITIES
Liabilitas segmen	11.615.989	1.415.789	638.825	1.436.798	6.631	926.644	42.136	(493.653)	15.589.159	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi									56.998	Unallocated liabilities
Total liabilitas konsolidasian									15.646.157	Total consolidated liabilities
	31 Desember/December 31, 2020									
	Perbankan/ Banking	Investasi/ Investment	Asuransi/ Insurance	Penjaminan dan perantara perdagangan efek/ Brokerage and underwriting	Pengelolaan investasi/ Fund management	Lembaga pembiayaan/ Multifinance	Penyewaan ruang kantor/ Office space rental	Eliminasi/ Eliminations	Jumlah/ Total	
ENDAPATAN pendapatan usaha	1.157.947	399.386	480.664	178.110	15.206	472.547	15	(46.643)	2.657.232	REVENUES Total revenues
ASIL SEGMENT	641.233	353.936	(145.840)	87.250	(10.811)	186.656	(57)	(34.803)	1.077.564	SEGMENT RESULTS
lain - lain - bersih beban keuangan ajak penghasilan									(76.170) (916.780) (19.089)	Others - Net Interest expense Income tax
laba tahun berjalan									65.525	Profit for the year
penyusutan dan amortisasi	24.797	2.437	4.834	10.322	1.316	18.971	-	-	62.677	Depreciation and amortization
INFORMASI LAINNYA										OTHER INFORMATION
ASET										ASSETS
Aset segmen	11.422.924	6.024.925	893.670	2.003.052	72.805	2.000.360	37.976	(4.111.454)	18.344.258	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi									757.288	Unallocated assets
Total aset konsolidasian									19.101.546	Total consolidated assets
LIABILITAS										LIABILITIES
Liabilitas segmen	10.053.637	941.493	638.743	1.636.851	2.550	1.029.205	39.798	(411.600)	13.930.677	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi									77.035	Unallocated liabilities
Total liabilitas konsolidasian									14.007.712	Total consolidated liabilities

Informasi Wilayah Geografis

Geographical Information

	30 Juni/ June 30,		31 Desember/ December 31		
	2022	2021	2021	2020	
Pendapatan Segmen					Segment Revenues
Indonesia	1.263.104	1.131.663	2.453.794	2.657.232	Indonesia
Amerika Serikat	123.420	149.912	281.348	-	United States of America
Jumlah	1.386.524	1.281.575	2.735.142	2.657.232	Total
	30 Juni/ June 30		31 Desember/ December 31		
	2022	2021	2021	2020	
Jumlah Aset Segmen					Total Segment Asset
Indonesia	22.557.389	21.541.239	19.101.546	-	Indonesia
Amerika Serikat	89.865	112.729	-	-	United States of America
Jumlah	22.647.254	21.653.968	19.101.546	-	Total

46. DIVIDEN TUNAI DAN PENGGUNAAN LABA

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2021 pada tanggal 20 Juli 2022, RUPS telah menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Entitas.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2020 pada tanggal 27 Agustus 2021, RUPS telah menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Entitas.

47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN

a. Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko di Kelompok Usaha mencakup seluruh jenis risiko dari semua aktivitas fungsional Kelompok Usaha berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dengan pengelolaan risikonya.

Untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis, Kelompok Usaha secara terus menerus melakukan evaluasi secara berkala, mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko entitas terpadu dan struktur pengendalian internal yang komprehensif, agar dapat memberikan informasi secara dini mengenai terdapatnya potensi risiko kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalisasi dampak risiko tersebut.

Kerangka manajemen risiko entitas terpadu tersebut dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batas-batas transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas fungsional.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Kelompok Usaha adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga ekuitas, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia.

Direksi Kelompok Usaha menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini:

Risiko suku bunga

Eksposur risiko tingkat bunga berhubungan dengan jumlah aset atau liabilitas dimana pergerakan pada tingkat suku bunga dapat mempengaruhi laba setelah pajak. Kelompok Usaha memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan dari kreditur yang menawarkan suku bunga yang paling menguntungkan Kelompok Usaha. Persetujuan dari Direksi dan Komisaris harus diperoleh sebelum Kelompok Usaha menggunakan instrumen keuangan tersebut untuk mengelola eksposur risiko suku bunga.

46. CASH DIVIDENDS AND UNAPPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Based on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for fiscal year 2021 dated July 20, 2022. AGMS has approved not to distribute dividends to the Entity's shareholder.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for fiscal year 2020 dated August 27, 2021. AGMS has approved not to distribute dividends to the Entity's shareholder.

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

a. Risk Management

Risk management within the Group covers all types of risks in all functional activities of the Group, based on demand to stabilize between the growth of the Group's business and risk management.

To accommodate business growth, the Group continually evaluates on a regular basis, develops and also improves the framework of integrated enterprise risk management system and a comprehensive internal control structure, in order to give management a precaution of potential risk so that management can take an appropriate solution to minimize the impact of the risk.

The integrated enterprise risk management framework stated in the policies, procedures, transaction limits, authority and other provisions, and risk management tools, apply within the functional activities.

The main risks arising from financial instruments of the Group are interest rate risk, foreign currency risk, equity price risk, credit risk and liquidity risk. The importance of managing these risks has increased significantly by considering the changes and volatility of financial markets in Indonesia.

The Group's Directors reviewed and approved the policies for managing risks which are summarized below:

Interest rate risk

The interest rate risk exposure relates to the amount of assets or liabilities which is subject to a risk that a movement in interest rates will adversely affect the income after tax. The Group has a policy of obtaining financing from the creditors who offer the most favorable interest rate. Approvals from the Directors and Commissioners must be obtained before committing the Group into any of the financial instruments to manage the interest rate risk exposure.

47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko suku bunga (lanjutan)

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk kedua instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 1% masing-masing tahun 2022 dan 2021 digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada manajemen kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 17 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba (rugi) Kelompok Usaha untuk 30 Juni 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 akan turun/naik masing-masing sebesar Rp 4.286 juta dan Rp 4.558 juta serta Rp 8.930 juta dan Rp 10.437 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Kelompok Usaha terhadap pinjaman dengan suku bunga variabel.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Kelompok Usaha mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang. Jumlah eksposur mata uang asing bersih Kelompok Usaha pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 42.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Tabel berikut merinci sensitivitas Kelompok Usaha terhadap peningkatan dan penurunan dalam Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para manajemen kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup item mata uang asing moneter yang ada dan menyesuaikan translasinya dalam nilai tukar mata uang asing. Jumlah positif di bawah ini menunjukkan peningkatan laba dimana Rupiah menguat terhadap Dolar Amerika Serikat. Untuk melemahnya Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, akan ada dampak yang sama pada laba, dan saldo di bawah ini akan menjadi negatif.

	Pengaruh pada laba atau rugi setelah pajak/ Effect on profit or loss net of tax								
	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2021	2020	2022	2021	2021	2020	
				Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million		
Dolar Amerika Serikat	± 1,0%	± 1,0%	± 2,0%	± 1,0%	± 2.981	± 2.331	± 3.033	± 1.356	United States Dollar

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

Interest rate risk (continued)

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. One percent increase or decrease in 2022 and 2021, respectively, is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 17 basis points higher/lower and all other variables were held constant, the Group profit (loss) for June 30, 2022 and 2021, also December 31, 2021 and 2020, respectively, would be decreased/increased by Rp 4,286 million and Rp 4,558 million and Rp 8,930 million and Rp 10,437 million, respectively. This is mainly attributable to the Group's exposure to loans with variable interest rates.

Foreign currency risk

The Group manages the foreign currency exposure by matching, as far as possible, receipts and payments in each individual currency. The Group's net open foreign currency exposure as of reporting dates is disclosed in Note 42.

Foreign currency sensitivity analysis

The following table details the Group's sensitivity to increase and decrease in Rupiah against United States Dollar. The sensitivity rate is used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation with the change in foreign currency rates. A positive number below indicates an increase in profit where Rupiah strengthens against the United States Dollar. For weakening of Rupiah against the United States Dollar, there would be a comparable impact on the profit, and the balances below would be negative.

47. **KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko harga ekuitas

Investasi jangka panjang Kelompok Usaha terutama terdiri dari investasi minoritas dalam ekuitas Entitas swasta Indonesia. Sehubungan dengan Entitas Indonesia dimana Kelompok Usaha memiliki investasi, kinerja keuangan Kelompok Usaha tersebut kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia.

Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Kelompok Usaha.

Risiko kredit Kelompok Usaha terutama melekat pada rekening bank, setara kas, piutang nasabah, deposito yang dijadikan sebagai jaminan pada Lembaga Kliring dan Penjamin Efek Indonesia, piutang pembiayaan, kredit, piutang pembiayaan murabahah, premi dan aset reasuransi. Kelompok Usaha menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya, sedangkan piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Kelompok Usaha dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (limit) pihak lawan yang direviu dan disetujui oleh manajemen secara tahunan.

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Kelompok Usaha mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

47. **FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

a. Risk Management (continued)

Equity price risk

The Group's long-term investments primarily consist of minority investments in the equity of private Indonesian companies. In connection with Indonesian companies in which the Group have investments, the Group's financial performance is likely to be greatly influenced by economic conditions in Indonesia.

Credit risk

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Group.

The Group's credit risk is primarily attributed to its cash in banks, cash equivalents, receivables from customers, deposits used as collateral with Institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia, financing receivables, loans, murabahah financing receivables, premiums and reinsurance assets. The Group places its bank balances with credit worthy financial institutions, while receivable are entered with respected and credit worthy third and related parties. The Group's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the management annually.

Credit risk is the risk that the Group may incur losses arising from customer, client or other party who failed to meet their contractual obligations. There is no significant concentration of credit risk. The Group manages and controls credit risk by setting limits of acceptable risk for individual customers and monitor the exposure associated with these restrictions.

47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Agunan dan peningkatan kredit lainnya

Kelompok Usaha memiliki agunan berupa simpanan, tanah, gedung, kendaraan dan alat berat. Jumlah dan jenis agunan yang diperlukan bergantung pada risiko kredit. Pedoman pelaksanaan mengenai penerimaan jenis agunan dan parameter penilaian, sudah merupakan kewajiban Kelompok Usaha untuk menghapus properti secara teratur. Secara umum, penambahan yang digunakan untuk mengurangi atau membayar klaim yang masih beredar dan tidak ditempati untuk penggunaan bisnis.

Tabel di bawah menunjukkan maksimum eksposur risiko kredit Kelompok Usaha pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020
Kas dan setara kas	2.656.259	2.749.956	1.660.455
Deposito pada dan piutang dari KPEI	333.457	300.093	348.239
Piutang nasabah	461.452	474.897	680.541
Piutang pembiayaan bersih	1.568.140	1.512.307	1.556.040
Kredit	9.311.079	8.204.047	6.828.599
Piutang pembiayaan murabahah - bersih	25.883	5.328	4.845
Piutang pembiayaan musyarakah mutanaqisah - bersih	35.527	21.603	12.974
Premi dan aset reasuransi	346.876	297.787	319.909
Piutang lain-lain	214.337	191.808	229.817
Jumlah	<u>14.953.010</u>	<u>13.757.826</u>	<u>11.641.419</u>

Kelompok Usaha melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk semua pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi terlebih dahulu. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang ragu-ragu.

Nilai tercatat aset keuangan yang dicatat pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai dan peningkatan kredit mencerminkan eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko kredit.

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

Credit risk (continued)

Collateral and other credit enhancements

The Group holds collaterals in the form of deposits, land, buildings, vehicle and heavy equipment. The amount and type of collateral required depends on an assessment of credit risk. Guidelines are implemented regarding the acceptability of types of collateral and valuation parameters. It is the Group's policy to dispose of repossessed properties in an orderly fashion. In general, the proceeds are used to reduce or repay the outstanding claim, and are not occupied for business use.

The table below shows the Group's maximum exposure to credit risk of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020.

Cash and cash equivalents
Deposits to and receivable from KPEI
Receivables from customer
Financing receivable-net
Loans
Murabahah financing receivables - net
Musyarakah mutanaqisah financing receivable-net
Premium and reinsurance assets
Other receivables
<i>Total</i>

The Group conducts business relationships only with third parties who are recognized and credible. The Group has a policy for all third parties who will make trading on credit has to go through verification procedures first. In addition, the amounts of receivables are monitored continuously to reduce the risk for doubtful accounts.

The carrying amount of the financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for impairment losses and credit enhancements represents the Group's exposure to credit risk.

47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Kelompok Usaha menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek. Kelompok Usaha pada tanggal laporan ini memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendek.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Kelompok Usaha dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo hutang jangka panjang mereka.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha per 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan.

	30 Juni/June 30, 2022				Jumlah/ Total
	Kurang dari tiga bulan/ Less than three months	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year	Satu Tahun sampai dengan lima tahun/ One to five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years	
Liabilitas					
Tanpa bunga					
Utang kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	369.354	-	-	-	369.354
Utang nasabah	357.752	33.554	25.499	-	416.805
Utang reasuransi	9.830	29.489	-	-	39.319
Utang lain-lain	59.280	194.978	-	-	254.258
Utang klaim	2.355	7.066	-	-	9.421
Instrumen tingkat bunga tetap					
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	286.049	481.375	128.713	35.128	931.265
Utang Obligasi-bersih	-	-	299.419	-	299.419
Utang sewa pembiayaan	1.258	2.874	6.843	-	10.975
Utang AI - Musyarakah	32.408	162.038	130	-	194.576
Utang AI - Mudharabah	614	1.779	3.847	1.445	7.685
Liabilitas surat berharga repo	69.619	-	-	-	69.619
Simpanan	8.058.809	1.177.638	3.537	-	9.239.984
Simpanan dari bank lain	15.250	3.500	-	-	18.750
Instrumen dengan tingkat bunga variabel					
Simpanan	2.626.887	-	-	-	2.626.887
Simpanan dari bank lain	42.609	-	-	-	42.609
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	-	-	-	-	-
Jumlah	11.932.074	2.094.291	467.988	36.573	14.530.926

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk of current cash flow position of the Group shown that short-term revenues are not sufficient to cover short term expenditure. The Group on the date of this report has sufficient liquidity to cover short-term liabilities.

In managing liquidity risk, the Group monitors and maintains levels of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the operations of the Group and to overcome the impact of fluctuations in cash flow. The Group also regularly evaluate cash flow projections and actual cash flows, including the schedule of long-term debt maturity.

The table below is a schedule of maturities of financial liabilities of the Group as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, based on contractual undiscounted payments.

	Liabilities
	<i>Non interest bearing</i>
	<i>Payables to Indonesian Clearing and Securities Guarantee Institution</i>
	<i>Payables to customers</i>
	<i>Reinsurance payable</i>
	<i>Other payables</i>
	<i>Claim liabilities</i>
	<i>Fixed interest rate instrument</i>
	<i>Loans from bank and non-bank financial institutions</i>
	<i>Bonds payable-net</i>
	<i>Obligations under finance lease</i>
	<i>AI - Musyarakah loan</i>
	<i>AI - Mudharabah loan</i>
	<i>Securities repo payables</i>
	<i>Deposits</i>
	<i>Deposits from other banks</i>
	<i>Variable interest rate instrument</i>
	<i>Deposits</i>
	<i>Deposit from other banks</i>
	<i>Loans from bank and non-bank financial institutions</i>
	Total

47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

a. Risk Management (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

	31 Desember/December 31, 2021				Jumlah/ Total	
	Kurang dari tiga bulan/ Less than three months	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year	Satu Tahun sampai dengan lima tahun/ One to five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years		
Liabilitas						Liabilities
Tanpa bunga						Non interest bearing
Utang kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	385.506	-	-	-	385.506	Payables to Indonesian Clearing and Securities Guarantee Institution
Utang nasabah	305.999	32.804	8.280	-	347.083	Payables to customers
Utang reasuransi	7.707	24.709	-	-	32.416	Reinsurance payable
Utang lain-lain	53.084	153.722	-	-	206.806	Other payables
Utang klaim	4.847	4.164	-	-	9.011	Claim liabilities
Instrumen tingkat bunga tetap						Fixed interest rate instrument
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	274.944	497.368	129.769	24.285	926.366	Loans from bank and non-bank financial institutions
Utang Obligasi-bersih	-	-	299.155	-	299.155	Bonds payable-net
Utang sewa pembiayaan	1.352	3.797	8.556	-	13.705	Obligations under finance lease
Utang AI - Musyarakah	810	178.320	123	-	179.253	AI - Musyarakah loan
Utang AI - Mudharabah	204	608	2.253	-	3.065	AI - Mudharabah loan
Liabilitas surat berharga repo	69.619	-	-	-	69.619	Securities repo payables
Simpanan	7.566.881	833.950	8.572	551	8.409.954	Deposits
Simpanan dari bank lain	35.981	2.000	-	-	37.981	Deposits from other banks
Instrumen dengan tingkat bunga variabel						Variable interest rate instrument
Simpanan	2.713.492	-	-	-	2.713.492	Deposits
Simpanan dari bank lain	92.694	-	-	-	92.694	Deposit from other banks
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	64	320	16	-	400	Loans from bank and non-bank financial institutions
Jumlah	11.513.184	1.731.762	456.724	24.836	13.726.506	Total

47. **KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)** 47. **FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

a. **Manajemen Risiko (lanjutan)**

a. **Risk Management (continued)**

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

	31 Desember/December 31, 2020				Jumlah/ Total	
	Kurang dari tiga bulan/ Less than three months	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year	Satu Tahun sampai dengan lima tahun/ One to five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years		
Liabilitas						Liabilities
Tanpa bunga						Non interest bearing
Utang kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	421.663	-	-	-	421.663	Payables to Indonesian Clearing and Securities Guarantee Institution
Utang nasabah	474.369	21.267	3.219	-	498.855	Payables to customers
Utang reasuransi	12.159	14.758	-	-	26.917	Reinsurance payable
Utang lain-lain	9.387	156.451	-	-	165.838	Other payables
Utang klaim	179	36.451	2.648	-	39.278	Claim liabilities
Instrumen tingkat bunga tetap						Fixed interest rate instrument
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	366.092	382.347	190.624	27.575	966.638	Loans from bank and non-bank financial institutions
Utang Obligasi-bersih	-	-	298.673	-	298.673	Bonds payable-net
Utang sewa pembiayaan	2.449	3.499	3.575	-	9.523	Obligations under finance lease
Utang AI - Musyarakah	172.866	19.049	2.976	-	194.891	AI - Musyarakah loan
Utang AI - Mudharabah	377	269	354	-	1.000	AI - Mudharabah loan
Liabilitas surat berharga repo	87.119	-	-	-	87.119	Securities repo payables
Simpanan	6.403.117	1.129.729	5.027	729	7.538.602	Deposits
Simpanan dari bank lain	274.235	-	-	-	274.235	Deposits from other banks
Instrumen dengan tingkat bunga variabel						Variable interest rate instrument
Simpanan	1.530.207	-	-	-	1.530.207	Deposits
Simpanan dari bank lain	215.868	-	-	-	215.868	Deposit from other banks
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	927	4.634	4.215	377	10.153	Loans from bank and non-bank financial institutions
Jumlah	9.971.014	1.768.454	511.311	28.681	12.279.460	Total

b. **Manajemen Modal**

b. **Capital Management**

Kelompok Usaha berupaya untuk mencapai struktur modal yang optimal dalam mencapai tujuan usaha mereka, termasuk mempertahankan rasio modal yang sehat dan peringkat kredit yang kuat, dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

The Group strives to achieve the optimal capital structure to achieve its business objectives, including maintaining a healthy capital ratios and strong credit ratings, and maximizing shareholder value.

Beberapa instrumen utang Kelompok Usaha memiliki pembatasan tertentu yang menentukan rasio leverage maksimum (*maximum leverage ratios*). Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditentukan secara eksternal.

Some of the debt instruments of the Group have certain restrictions that determine the maximum leverage ratio (*maximum leverage ratios*). The Group has complied with all requirements specified in external capital.

47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Manajemen Modal (lanjutan)

Pihak manajemen melakukan pengawasan modal dengan menggunakan beberapa pengukuran leverage keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas.

Kelompok Usaha terus mengelola pembatasan utang mereka dan struktur modal. Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, rasio utang terhadap ekuitas konsolidasi Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020
Pinjaman	13.372.150	12.676.065	11.039.790
Kas dan setara kas	<u>(2.761.476)</u>	<u>(2.827.492)</u>	<u>(1.758.171)</u>
Pinjaman bersih	10.610.674	9.848.573	9.281.619
Ekuitas	<u>6.060.931</u>	<u>6.007.811</u>	<u>5.093.834</u>
Rasio pinjaman terhadap ekuitas	<u>175%</u>	<u>164%</u>	<u>182%</u>

Bank Indonesia mewajibkan bank untuk memenuhi tingkat rasio kecukupan modal. Rasio kewajiban penyediaan modal BMNCI dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 24,31% dan 15,75%.

MNCS diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum modal kerja bersih seperti yang disebutkan dalam peraturan Bapepam-LK No.V.D.5 dan peraturan Bapepam-LK No.X.E.1, yang antara lain, menentukan Modal Kerja Bersih Disesuaikan untuk entitas efek yang beroperasi sebagai perantara perdagangan efek, manajer investasi dan penjamin emisi. Jika hal ini tidak dipantau dan disesuaikan, tingkat modal kerja sesuai dengan peraturan dapat berada di bawah jumlah minimum yang ditetapkan oleh regulator, yang dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai dari denda sampai dengan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Untuk mengatasi risiko ini, MNCS, mengevaluasi tingkat kebutuhan modal kerja berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang modal kerja bersih yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Capital Management (continued)

The management monitors capital by using some measure of financial leverage as the ratio of debt to equity.

The Group continues to manage its debt and restrictions on capital structure. As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the ratio of consolidated debt to equity of the Group are as follows:

Debt
Cash and cash equivalents
Net debt
Equity
Debt to equity ratio

Bank Indonesia requires banks to maintain a certain level of capital adequacy ratio. BMNCI's capital adequacy ratio with consideration for credit, operational and market risks as of December 31, 2021 and 2020 are 24.31% and 15.75%, respectively.

MNCS is also required to maintain minimum net working capital requirements as specified in the Bapepam regulations and No.V.D.5 and Bapepam-LK regulations No.X.E.1, which among others, determine the Net Working Capital Adjusted for securities firms that operate as a securities broker, investment manager and underwriter. If this is not monitored and adjusted, the level of working capital as per the rules can be below the minimum amount set by the regulator, which can lead to various sanctions ranging from fines to termination of part or all of the business.

To manage this risk, MNCS, continues to evaluate the level of working capital requirements under the rules and regulations to monitor the development of net working capital as required and prepare the necessary increase in the minimum limits as per the rules that may occur from time to time in the future.

47. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Manajemen Modal (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, MNCS telah memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan mempunyai modal disetor di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No.179/KMK.010/2003 tentang kepemilikan saham dan permodalan entitas efek.

Sehubungan dengan permodalan asuransi jiwa dan asuransi umum kerugian sebagaimana diwajibkan oleh POJK Nomor 67 tahun 2016 BAB II pasal 6, entitas asuransi diharuskan memiliki modal disetor minimum Rp 150.000 juta. Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, MNCL dan MNCAI telah memenuhi persyaratan.

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Capital Management (continued)

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, MNCS has met the requirements of Adjusted Net Working Capital and has a paid up capital above the required capital established by Decree of the Ministry of Finance No.179/KMK.010/2003 about ownership shares and securities companies.

In connection with the capital of life insurance and general insurance, as required by POJK No. 67 of 2016 Chapter II Article 6 companies are required to have a minimum paid up capital of Rp 150,000 million. As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, MNCL and MNCAI have complied with the requirements.

48. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

48. FINANCIAL INSTRUMENTS

a. Classification of Financial Instruments

Classification of financial assets as of June 30, 2022 December 31, 2021 and 2020 is as follows:

30 Juni/June 30, 2022						
Aset keuangan/ Financial assets	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/Fair value through profit loss	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other comprehensive income	Pinjaman Yang diberikan dan Piutang/ Loans and receivables	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	-	-	-	2.761.476	2.761.476	
Deposito pada dan piutang dari KPEI/ Deposits to and receivables from KPEI	-	-	-	333.457	333.457	
Efek-efek/ Securities	2.488.511	120.488	1.842.504	-	4.451.503	
Piutang nasabah/ Receivable from customers	-	-	-	461.452	461.452	
Piutang murabahah/Murabahah receivables	-	-	-	25.883	25.883	
Piutang Musyarakah Mutanaqisah/Musyarakah Mutanaqisah receivables	-	-	-	35.527	35.527	
Piutang pembiayaan/Financing receivables	-	-	-	1.568.140	1.568.140	
Premi dan aset reasuransi/ Premium and reinsurance assets	-	-	-	346.876	346.876	
Kredit/Loans	-	-	-	9.311.079	9.311.079	
Aset lain-lain/Other assets	113	-	-	214.337	214.450	
Jumlah Aset/Total Assets	113	2.488.511	120.488	15.058.227	19.509.843	

48. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

48. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Classification of Financial Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2021						
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan pada FVTPL/ Financial asset at FVTPL	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/Fair value through profit loss	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other comprehensive income	Pinjaman Yang diberikan dan Piutang/ Loans and receivables	Jumlah/ Total
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	-	-	-	-	2.827.492	2.827.492
Deposito pada dan piutang dari KPEI/ Deposits to and receivables from KPEI	-	-	-	-	300.093	300.093
Efek-efek/ Securities	-	2.496.819	120.894	1.964.944	-	4.582.657
Piutang nasabah/ Receivable from customers	-	-	-	-	474.897	474.897
Piutang murabahah/Murabahah receivables	-	-	-	-	5.328	5.328
Piutang Musyarakah Mutanaqisah/Musyarakah Mutanaqisah receivables	-	-	-	-	21.603	21.603
Piutang pembiayaan/Financing receivables	-	-	-	-	1.512.307	1.512.307
Premi dan aset reasuransi/ Premium and reinsurance assets	-	-	-	-	297.787	297.787
Kredit/Loans	-	-	-	-	8.204.047	8.204.047
Aset lain-lain/Other assets	76	-	-	-	191.808	191.884
Jumlah Aset/Total Assets	76	2.496.819	120.894	1.964.944	13.835.362	18.418.095

31 Desember/December 31, 2020						
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan pada FVTPL/ Financial asset at FVTPL	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/Fair value through profit loss	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other comprehensive income	Pinjaman Yang diberikan dan Piutang/ Loans and receivables	Jumlah/ Total
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	-	-	-	-	1.758.171	1.758.171
Deposito pada dan piutang dari KPEI/ Deposits to and receivables from KPEI	-	-	-	-	348.239	348.239
Efek-efek/ Securities	-	2.255.912	130.589	1.658.577	-	4.045.078
Piutang nasabah/ Receivable from customers	-	-	-	-	680.541	680.541
Piutang murabahah/Murabahah receivables	-	-	-	-	4.845	4.845
Piutang Musyarakah Mutanaqisah/Musyarakah Mutanaqisah receivables	-	-	-	-	12.974	12.974
Piutang pembiayaan/Financing receivables	-	-	-	-	1.556.040	1.556.040
Premi dan aset reasuransi/ Premium and reinsurance assets	-	-	-	-	319.909	319.909
Kredit/Loans	-	-	-	-	6.828.599	6.828.599
Aset lain-lain/Other assets	4.187	-	-	-	229.817	234.004
Jumlah Aset/Total Assets	4.187	2.255.912	130.589	1.658.577	11.739.135	15.788.400

48. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/
Liability at amortized cost

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Simpanan/Deposits	11.866.871	11.123.446	9.068.809
Simpanan dari bank lain/Deposits from other banks	61.359	130.675	490.103
Liabilitas segera/Liabilities immediately payable	96.708	69.299	173.797
Utang kepada lembaga kliring dan penjaminan efek Indonesia/ Payables to Indonesian clearing and securities guarantee institution	369.354	385.506	421.663
Utang nasabah/Customers Payables	416.805	347.083	498.855
Utang reasuransi dan utang lain-lain/Reinsurance and other payables	302.998	248.233	232.033
Liabilitas kontrak asuransi dan investasi/Insurance and investment contracts liability	659.614	573.363	534.608
Utang bank dan institusi keuangan non bank/Loans from bank and non-bank financial institutions	931.265	926.766	976.791
Utang AI - Musyarakah/AI - Musyarakah loan	194.576	179.253	194.891
Utang AI - Mudharabah/AI - Mudharabah loan	7.685	3.065	1.000
Utang obligasi dan medium term notes/Bonds payable and medium term notes	299.419	299.155	298.673
Utang sewa pembiayaan/Obligations under finance lease	10.975	13.705	9.523
Liabilitas lain-lain/Other liabilities	1.285.117	1.259.914	1.004.533
Jumlah Liabilitas/Total Liabilities	<u>16.502.746</u>	<u>15.559.463</u>	<u>13.905.279</u>

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Kecuali disebutkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya:

	30 Juni/June 30, 2022		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan			Financial asset
Kredit	9.311.079	9.311.079	Loans
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	120.488	120.488	Amortized cost
Liabilitas keuangan			Financial liability
Utang obligasi dan Medium term notes	299.419	299.419	Bonds payable and Medium terms notes
Simpanan	11.866.871	11.866.871	Deposits
Simpanan dari bank lain	61.359	61.359	Deposits from other banks

48. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

a. Classification of Financial Instruments (continued)

Financial liabilities classified as financial liabilities at amortized cost as of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Liabilities at amortized cost			
Deposits	11.866.871	11.123.446	9.068.809
Deposits from other banks	61.359	130.675	490.103
Liabilities immediately payable	96.708	69.299	173.797
Payables to Indonesian clearing and securities guarantee institution	369.354	385.506	421.663
Customers Payables	416.805	347.083	498.855
Reinsurance and other payables	302.998	248.233	232.033
Insurance and investment contracts liability	659.614	573.363	534.608
Loans from bank and non-bank financial institutions	931.265	926.766	976.791
AI - Musyarakah/AI - Musyarakah loan	194.576	179.253	194.891
AI - Mudharabah/AI - Mudharabah loan	7.685	3.065	1.000
Bonds payable and medium term notes	299.419	299.155	298.673
Obligations under finance lease	10.975	13.705	9.523
Other liabilities	1.285.117	1.259.914	1.004.533
Total Liabilities	<u>16.502.746</u>	<u>15.559.463</u>	<u>13.905.279</u>

b. Fair Value of Financial Instruments

Except as shown in the following table, the management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values:

	30 Juni/June 30, 2022		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan			Financial asset
Kredit	9.311.079	9.311.079	Loans
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	120.488	120.488	Amortized cost
Liabilitas keuangan			Financial liability
Utang obligasi dan Medium term notes	299.419	299.419	Bonds payable and Medium terms notes
Simpanan	11.866.871	11.866.871	Deposits
Simpanan dari bank lain	61.359	61.359	Deposits from other banks

48. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

48. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

b. Fair Value of Financial Instruments

	31 Desember/December 31, 2021		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan			Financial asset
Kredit	8.204.047	8.204.047	Loans
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	120.894	120.894	Amortized cost
Liabilitas keuangan			Financial liability
Utang obligasi dan <i>Medium term notes</i>	299.155	299.155	Bonds payable and Medium terms notes
Simpanan	11.123.446	11.123.446	Deposits
Simpanan dari bank lain	130.675	130.675	Deposits from other banks

	31 Desember/December 31, 2020		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan			Financial asset
Kredit	6.828.599	6.828.599	Loans
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	130.589	130.589	Amortized cost
Liabilitas keuangan			Financial liability
Utang obligasi dan <i>Medium term notes</i>	298.673	298.673	Bonds payable and Medium terms notes
Simpanan	9.068.809	9.068.809	Deposits
Simpanan dari bank lain	490.103	490.103	Deposits from other banks

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

Nilai wajar aset keuangan dan non keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

The fair value of financial assets and non financial asset and financial liabilities are determined as follows:

- Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, deposito pada dan piutang dari Lembaga Kliring dan Penjaminan Entitas Efek Indonesia, piutang nasabah, piutang murabahah, piutang musyarakah mutanaqisah, premi dan aset reasuransi, simpanan, simpanan dari bank lain, Utang kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan Entitas Efek Indonesia, utang kepada nasabah, liabilitas lain-lain, utang reasuransi dan utang lain-lain, utang Al-Musyarakah, utang Al-Mudharabah, asuransi dan liabilitas kontrak investasi, dan kewajiban sewa pembiayaan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang memiliki tingkat suku bunga pasar.
- Management considers that the carrying amount of cash and cash equivalent, deposit to and receivables from Institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia, receivable from customers, financing receivables, murabahah financing receivables, musyarakah mutanaqisah financing receivables, premiums and reinsurance assets, deposits, deposits from other banks, payable to Institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia, payable to customers, other liabilities, reinsurance and other payables, al-musyarakah and al-mudharabah loan, and insurance and investment contract liability, and obligation under finance lease approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market rates of interest.

48. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

- Nilai wajar efek-efek dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar.
- Nilai wajar tagihan dan liabilitas derivatif diukur dengan menggunakan kurs kuotasi dan kurva yield yang berasal dari suku bunga kuotasi mencocokkan jatuh tempo kontrak.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya (tidak termasuk yang dijelaskan di atas) ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis *discounted cash flow*.

Tabel berikut ini memberikan kondisi dari nilai wajar dari aset dan liabilitas yang dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

48. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

b. Fair Value of Financial Instruments (continued)

- Fair value of securities with standard terms and conditions and traded on active markets are determined with reference to quoted market prices.
- Fair value of derivative receivables and payables are measured using quoted forward exchange rates and yield curves derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts.
- Fair value of other financial assets and financial liabilities (excluding those described above) are determined in accordance with generally accepted pricing models on discounted cash flow analysis.

The following tables provide an analysis of fair value of assets and liabilities, grouped into Levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

	30 Juni/June 30, 2022				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan					Financial assets
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Obligasi pemerintah Indonesia	1.366.849	-	-	1.366.849	Indonesian government bonds
Efek ekuitas	407.137	-	-	407.137	Equity securities
Reksadana	68.517	-	-	68.517	Mutual funds
Sub jumlah	1.842.503	-	-	1.842.503	Sub total
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit loss
Dana kelolaan	2.201.103	-	-	2.201.103	Managed funds
Reksadana	171.415	-	-	171.415	Mutual funds
Efek ekuitas	77.781	-	-	77.781	Equity securities
Obligasi pemerintah Indonesia	37.094	-	-	37.094	Indonesian government bonds
Obligasi lainnya	1.119	-	-	1.119	Other Bonds
Tagihan derivatif	-	113	-	113	Derivative receivables
Sub jumlah	2.488.512	113	-	2.488.625	Sub total
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair values are disclosed
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Obligasi pemerintah Indonesia	106.797	-	-	106.797	Indonesian government bonds
Obligasi	13.691	-	-	13.691	Bonds
Sub jumlah	120.488	-	-	120.488	Sub total
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivable
Kredit - Bersih	-	-	9.311.079	9.311.079	Loans - Net
Jumlah Aset	4.451.503	113	9.311.079	13.762.695	Total Assets
Liabilitas diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Diperdagangkan					Trading
Liabilitas derivatif	-	412	-	412	Derivative payables
Liabilitas dimana nilai wajar diungkapkan					Liabilities to which fair value are disclosed
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Utang obligasi	299.419	-	-	299.419	Bonds payable
Simpanan	-	-	11.866.871	11.866.871	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	-	61.359	61.359	Deposits from other banks
Jumlah Liabilitas	299.419	412	11.928.230	12.228.061	Total Liabilities
Aset (Liabilitas) Neto	4.152.084	(299)	(2.617.151)	1.534.634	Net Assets (Liabilities)

48. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

48. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

b. Fair Value of Financial Instruments (continued)

	31 Desember/December 31, 2021			Jumlah/ Total	
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan					Financial assets
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Efek ekuitas	397.280	-	-	397.280	Equity securities
Obligasi pemerintah Indonesia	1.513.719	-	-	1.513.719	Indonesian government bonds
Reksadana	53.945	-	-	53.945	Mutual funds
Sub jumlah	1.964.944	-	-	1.964.944	Sub total
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit loss
Efek ekuitas	41.777	-	-	41.777	Equity securities
Obligasi pemerintah Indonesia	64.411	-	-	64.411	Indonesian government bonds
Reksadana	214.258	-	-	214.258	Mutual funds
Dana kelolaan	2.176.373	-	-	2.176.373	Managed funds
Tagihan derivatif	-	76	-	76	Derivative receivables
Sub jumlah	2.496.819	76	-	2.496.895	Sub total
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair values are disclosed
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Obligasi pemerintah Indonesia	106.810	-	-	106.810	Indonesian government bonds
Obligasi	14.084	-	-	14.084	Bonds
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivable
Kredit - Bersih	-	-	8.204.047	8.204.047	Loans - Net
Jumlah Aset	4.582.657	76	8.204.047	12.786.780	Total Assets
Liabilitas diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Diperdagangkan					Trading
Liabilitas derivatif	-	137	-	137	Derivative payables
Liabilitas dimana nilai wajar diungkapkan					Liabilities to which fair value are disclosed
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Utang obligasi	299.155	-	-	299.155	Bonds payable
Simpanan	-	-	11.123.446	11.123.446	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	-	130.675	130.675	Deposits from other banks
Jumlah Liabilitas	299.155	137	11.254.121	11.553.413	Total Liabilities
Aset (Liabilitas) Neto	4.283.502	(61)	(3.050.074)	1.233.367	Net Assets (Liabilities)

48. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

48. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

b. Fair Value of Financial Instruments (continued)

	31 Desember/December 31, 2020			Jumlah/ Total	
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan					Financial assets
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Efek ekuitas	448.388	-	-	448.388	Equity securities
Obligasi pemerintah Indonesia	1.169.036	-	-	1.169.036	Indonesian government bonds
Reksadana	21.586	-	-	21.586	Mutual funds
Obligasi	19.568	-	-	19.568	Bonds
Sub jumlah	1.658.578	-	-	1.658.578	Sub total
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit loss
Efek ekuitas	39.175	-	-	39.175	Equity securities
Obligasi pemerintah Indonesia	18.523	-	-	18.523	Indonesian government bonds
Reksadana	158.282	-	-	158.282	Mutual funds
Dana kelolaan	1.722.645	-	-	1.722.645	Managed funds
Obligasi	317.287	-	-	317.287	Bonds
Tagihan derivatif	-	4.187	-	4.187	Derivative receivables
Sub jumlah	2.255.912	4.187	-	2.260.099	Sub total
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair values are disclosed
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Obligasi pemerintah Indonesia	106.837	-	-	106.837	Indonesian government bonds
Obligasi	23.752	-	-	23.752	Bonds
Pinjaman yang diberikan dan piutang Kredit - Bersih	-	-	6.828.599	6.828.599	Loans and receivable Loans - Net
Jumlah Aset	4.045.079	4.187	6.828.599	10.877.865	Total Assets
Liabilitas diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Diperdagangkan					Trading
Liabilitas derivatif	-	4.187	-	4.187	Derivative payables
Liabilitas dimana nilai wajar diungkapkan					Liabilities to which fair value are disclosed
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Utang obligasi	298.673	-	-	298.673	Bonds payable
Simpanan	-	-	9.068.809	9.068.809	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	-	490.103	490.103	Deposits from other banks
Jumlah Liabilitas	298.673	4.187	9.558.912	9.861.772	Total Liabilities
Aset (Liabilitas) Neto	3.746.406	-	(2.730.313)	1.016.093	Net Assets (Liabilities)

Pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 tidak terdapat perpindahan metode pengukuran nilai wajar dari tingkat 1 menjadi tingkat 2, dan sebaliknya.

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 there is no movement in fair value measurement method from level 1 to level 2, and vice versa.

49. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS

49. SUPPLEMENTAL DISCLOSURE ON NONCASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITY

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Perolehan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan dan utang lain-lain	4.097	13.638	25.155	Acquisition of fixed assets through finance lease and other payable
Penambahan modal melalui uang muka setoran modal	-	385.830	119.628	Additional paid-in capital through deposits for stock subscription
Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:				Changes in liabilities arising from financing activities were as follows:

	30 Juni 2022/June 30, 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus kas - neto/ Cash flow - net	Perubahan mata uang/ Foreign exchange movement	Lain-lain/ Others	Saldo Akhir/ Ending balance	
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	926.766	3.542	-	957	931.265	Loans from bank and non-bank financial institutions
Utang AI-Musyarakah	179.253	12.312	-	3.011	194.576	AI-Musyarakah loan
Utang AI-Mudharabah	3.065	4.620	-	-	7.685	AI-Mudharabah loan
Utang obligasi dan medium term notes	299.155	-	-	264	299.419	Bonds payable and medium term notes
Utang sewa pembiayaan	13.705	(2.730)	-	-	10.975	Obligations under finance lease

	31 Desember 2021/December 31, 2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus kas - neto/ Cash flow - net	Perubahan mata uang/ Foreign exchange movement	Lain-lain/ Others	Saldo Akhir/ Ending balance	
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	976.791	(49.908)	-	(117)	926.766	Loans from bank and non-bank financial institutions
Utang AI-Musyarakah	194.891	(15.250)	-	(388)	179.253	AI-Musyarakah loan
Utang AI-Mudharabah	1.000	2.993	-	(928)	3.065	AI-Mudharabah loan
Utang obligasi dan medium term notes	298.673	-	-	482	299.155	Bonds payable and medium term notes
Utang sewa pembiayaan	9.523	(6.727)	-	10.909	13.705	Obligations under finance lease

	31 Desember 2020/December 31, 2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus kas - neto/ Cash flow - net	Perubahan mata uang/ Foreign exchange movement	Lain-lain/ Others	Saldo Akhir/ Ending balance	
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	1.264.045	(725.847)	-	438.593	976.791	Loans from bank and non-bank financial institutions
Utang AI-Musyarakah	287.209	(92.318)	-	-	194.891	AI-Musyarakah loan
Utang AI-Mudharabah	5.339	(4.339)	-	-	1.000	AI-Mudharabah loan
Utang obligasi dan medium term notes	318.093	-	-	(19.420)	298.673	Bonds payable and medium term notes
Utang sewa pembiayaan	35.360	(25.837)	-	-	9.523	Obligations under finance lease

50. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

1. Sesuai dengan paparan publik pada tanggal 15 Februari 2022, Entitas mengungkapkan rencana bisnis untuk menyatukan produk-produk digital intinya untuk menciptakan sinergi yang maksimal dan mampu menarik lebih banyak investor, termasuk *private equity*, *hedge fund*, investor *start-up*, dan lembaga keuangan lainnya.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan, rencana bisnis Entitas masih dalam proses.

2. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2021 pada tanggal 20 Juli 2022, RUPS telah menyetujui:

- a. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Entitas

- Pengangkatan Wito Mailoa untuk menggantikan Darma Putra sebagai Komisaris Utama Entitas
- Pengangkatan Mashudi Hamka untuk menggantikan Wito Mailoa sebagai Direktur Utama Entitas
- Pengangkatan Mahdan, Muhammad Suhada dan Oerianto Guyandi masing-masing sebagai Direktur Entitas
- Pengunduran diri Darma Widjaja, Samuel Mulyono dan Natalia Purnama masing-masing sebagai Direktur Entitas

- b. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2021

51. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa penyajian akun dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 direklasifikasikan agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan komparatif pada tanggal 30 Juni 2022 antara lain:

	31 Desember/ December 31 2021			
	Sebelum		Setelah	
	reklasifikasi/ <i>Before</i> <i>reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	reklasifikasi/ <i>After</i> <i>reclassification</i>	
<u>Laporan posisi keuangan</u>				<u>Statement of financial position</u>
Aset tak berwujud - bersih	-	153.290	153.290	<i>Intangible assets - net</i>
Aset lain-lain	2.495.600	(153.290)	2.342.310	<i>Other assets</i>

	31 Desember/ December 31 2020			
	Sebelum		Setelah	
	reklasifikasi/ <i>Before</i> <i>reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	reklasifikasi/ <i>After</i> <i>reclassification</i>	
<u>Laporan posisi keuangan</u>				<u>Statement of financial position</u>
Aset tak berwujud - bersih	-	141.601	141.601	<i>Intangible assets - net</i>
Aset lain-lain	2.584.918	(141.601)	2.443.317	<i>Other assets</i>

50. SUBSEQUENT EVENT AFTER REPORTING PERIOD

1. In accordance with public expose dated on February 15, 2022, the Entity revealed the business plan to unite its core digital products to create maximum synergy and synergy will attract more investors, including private equity, hedge funds, start-up investors, and other financial institutions.

As of the issuance date of the financial statements, the Entity's business plan is still in process.

2. Based on The Annual General Meeting of Shareholder (AGMS) for fiscal year 2021 dated July 20, 2022, AGMS has approved:

- a. Changes in the composition of the Entity's Board of Commissioners and Directors

- Appointment of Wito Mailoa to replace Darma Putra as the Entity's President Commissioner
- Appointment of Mashudi Hamka to replace Wito Mailoa as the Entity's President Director
- Appointment of Mahdan, Muhammad Suhada and Oerianto Guyandi as the Entity's Director, respectively
- Resignation of Dharma Widjaja, Samuel Mulyono and Natalia Purnama as the Entity's Director, respectively

- b. Not to distribute dividends to the Entity's shareholder for fiscal year 2021.

51. ACCOUNTS RECLASSIFICATION

Some of the presentation of accounts in the financial statements on December 31, 2021 and 2020 reclassified to conform with the presentation of the comparative financial statements on June 30, 2022 include:

52. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III, Entitas telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan catatan atas laporan keuangan nomor 1a, 1d, 3w, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 24, 42, 49 dan 51.

53. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 28 November 2022.

52. REISSUE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

In the context of the Public Offering of Sustainable Bonds III, the Entity's has reissued financial reports for the period ended June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020 to comply with the applicable capital market regulations.

There is no material difference between the prior financial statements and the reissued financial statements, in statement of profit or loss and other comprehensive income and notes to financial statements 1a, 1d, 3w, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 24, 42, 49 and 51.

53. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Entity's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements that have been authorized for issue by the Directors on November 28, 2022.



Kantor Pusat:

MNC Financial Center, Lantai 21
Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700
Faksimili: (021) 3983-6870
Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com
Website : www.mncfinancialservices.com